



LKPJ
2024

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2024 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan tindaklanjut amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPJ Provinsi Gorontalo tahun 2024 memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mencakup capaian pelaksanaan program kegiatan, dan pengelolaan keuangan daerah baik pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, kebijakan strategis yang ditetapkan, dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan selama 1 (satu) periode tahun anggaran sebagai salah satu wujud akuntabilitas pemerintahan daerah dan pertanggungjawaban kepada Presiden RI, Menteri Dalam Negeri RI, dan DPRD Provinsi Gorontalo serta seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah. LKPJ Gubernur Gorontalo juga menggambarkan pencapaian kinerja penyelenggaraan pembangunan pada periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.

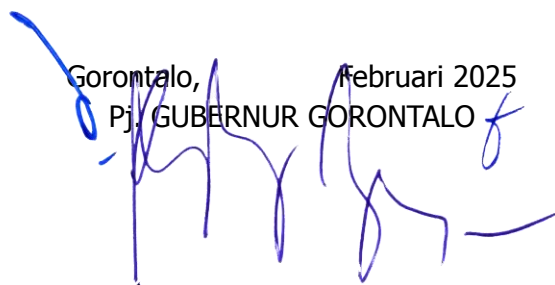
LKPJ Provinsi Gorontalo Tahun 2024 menyajikan laporan keterangan pertanggungjawaban pejabat Gubernur Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, M.E.M, yang menjabat sejak tanggal 17 Mei 2024, menggantikan Ir. Ismail Pakaya yang menjabat Gubernur Gorontalo sejak 12 Mei 2023 sampai dengan 12 Mei 2024. Kami menyadari dalam penyelenggaraan pembangunan masih terdapat hal-hal yang masih perlu perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karenanya melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini diharapkan dapat memperoleh rekomendasi yang strategis dari DPRD Provinsi Gorontalo khususnya Pansus LKPJ sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam rangka penyusunan LKPJ tahun 2024. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan lindungan dan meridhoi langkah dan upaya kita semua untuk membangun Provinsi Gorontalo yang lebih maju dan sejahtera.

Terima Kasih

Wassalamu Alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Gorontalo, Februari 2025
Pj. GUBERNUR GORONTALO



RUDY SALAHUDDIN

RINGKASAN LKPJ GUBERNUR TAHUN 2024



**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA LKPJ GUBERNUR
TAHUN 2025**

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2024 disusun berdasarkan amanat dan ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 19, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat Paripurna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPJ Gubernur tahun 2024 memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, yang dalam penyusunannya berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2024 pasal 17 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 menjadi bagian dari implementasi Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Gorontalo Tahun 2024 menjabarkan hasil penyelenggaraan pembangunan daerah dalam mewujudkan Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan kedalam Tema dan Prioritas Pembangunan dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 yaitu :

“Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang berwawasan lingkungan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Infrastruktur Dasar dan Strategis, serta Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah”

Pencapaian target-target pembangunan tidak lepas dari kinerja program kegiatan yang menjadi bagian dari hasil kinerja pembangunan sekaligus sebagai bahan evaluasi pembangunan serta evaluasi terhadap kinerja Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan. Beberapa hal terkait capaian kinerja pembangunan daerah target 2024 berdasarkan indikator makro pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Penurunan tingkat kemiskinan hingga mencapai 13,87 % atau turun 0,7% poin dibanding tahun 2023 sebesar 14,57%. Jumlah penduduk miskin dibanding tahun sebelumnya turun 7,96 ribu orang menjadi 170,03 orang.
2. Indeks gini yang menggambarkan kesenjangan atau ketimpangan pendapatan masyarakat turun dari 0,417 tahun 2023 menjadi 0,413 tahun 2024.



3. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo tahun 2024 mencapai 72,01 atau meningkat sebesar 1,07 persen dibandingkan tahun 2023, yang didukung oleh perbaikan diseluruh indikator pembentuknya yaitu Umur Harapan Hidup meningkat 0,23% menjadi 70,73 tahun 2024, Harapan Lama Sekolah meningkat 0,01 tahun (0,08%) menjadi 13,17 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,19 tahun menjadi 8,29 tahun pada tahun 2024, serta indikator ekonomi yaitu pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan mencapai 11.539 Ribu Rupiah pada tahun 2024 atau mengalami peningkatan 470 Ribu Rupiah.
 4. Inflasi cukup stabil berada pada range target 2-3%, yaitu dengan capaian rata-rata inflasi bulanan sebesar 2,87.
 5. Pertumbuhan ekspor sebesar 31,95% dengan total ekspor mencapai 52.967.332,45 US\$ tahun 2024, nilai investasi tahun 2024 meningkat mencapai 5,383 Triliun Rupiah.
- Berbanding terbalik dengan Indikator tersebut diatas, ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka pertumbuhan negatif.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami kenaikan menjadi 3,13 % tahun 2024, sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar 3,06%.
 7. Ekonomi tumbuh 4,13 % tahun 2024, mengalami sedikit pelambatan dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 sebesar 4,50%. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 54,5 Triliun Rupiah.
 8. Prevalensi Stunting sesuai data SSGI tahun 2023 sebesar 26,9 persen naik dibanding tahun sebelumnya sebesar 23,8 persen, sedangkan menurut data EPPGBM juga mengalami kenaikan dari 6,7% menjadi 5,4 persen tahun 2024.

Dari aspek tata kelola pemerintahan menunjukkan kinerja yang cukup baik dan progresif ditandai dengan capaian Reformasi Birokrasi dengan Kategori BB, SAKIP naik sebesar 68,88 (B), Nilai MCP KPK mencapai 81.7, Indeks Kualitas Perencanaan sebesar 84,36 dengan kategori Baik, Indeks Sistem Merit sebesar 327 atau Sangat Baik, Nilai Maturitas SPBE mencapai 4,13 dengan kategori Sangat Baik. Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo juga mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih kategori A sebagai Zona Hijau kualitas tertinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan tahun 2024 yang dilakukan oleh Ombudsman Gorontalo, Provinsi Gorontalo memperoleh nilai 90,41. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik yang prima.

Beberapa pencapaian indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang menggambarkan pencapaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2024 sebagai berikut:



Tabel 1
 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Gorontalo
 Dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	2024		% Realisasi
			Target	Realisasi	
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	6,42	4,13	64,33
		Indeks Gini	0,396	0,413	95,88
		Inflasi	2-3	2,87	100
		Pendapatan Perkapita	36,71	44,43	121,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,49	3,13	111,50
		Persentase Kemiskinan	14,54	13,87	104,83
	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumberdaya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	38,98	37,29	96,66
		Indeks Ketahanan Pangan	86,04	81,95	95,24
		Nilai Tukar Petani (NTP)	105,09	109,05	103,77
		Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	113,18	105,29	93,03
		Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	97,82	95,69	97,82
	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	5,36	4,39	81,90
		Nilai Ekspor (juta USD)	19,52	52,96	271,31
		Realisasi PMA/PMDN (Triliun)	2,8	5,383 T	192,26
		Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	3%	2,29%	76,33
	Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa	Kemiskinan perdesaan	22,38	21,62	103,52
		Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)	6 Desa	93 Desa	1.550
	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	64,51	66,12	102,49
		Rasio Elektrifikasi (%)	99,70	99,99	100,29
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	7,38	7,69	95,97
		Persentase Cakupan Air minum Layak	95,75	-	-
		Persentase Cakupan Sanitasi Layak	80,08	-	-
		Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	65	87,76	135,02
		Rasio Konektivitas Antar Wilayah (%)	0,553	0,553	100
		Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	92	97,4	105,87
		Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%)	23	43,77	190,30
Peningkatan Sumber		Indeks Pembangunan	70,02	72,01	102,84



Tujuan	Sasaran	Indikator	2024		% Realisasi
			Target	Realisasi	
daya manusia		Manusia			
	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	8,28	8,29	100,12
		Harapan lama sekolah	13,24	13,17	99,47
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-18	71,63	77,19	107,76
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (satuan pendidikan)	SMA = 1:20 SMK = 1:15 SLB = 1 : 3	78/130 * 100 = 60%	60%
		Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah (%)	100%	100%	100%
	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup	68,4	70,73	103,41
		Prevalensi stunting	23	5,4 (Data EPPGBM)	425,93
	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Gender	87,13	88,24 *	101,27
		Indeks Perlindungan Anak	67,7	60,46*	89,31
		Indeks Pembangunan Pemuda	52,62	57,83	109,9
	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Persentase warisan budaya benda/tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Benda: 30 Tak Benda : 35	Benda: 30 Tak Benda : 35	100
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	69	72,71	105,38
	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	42,56	77,46	182
Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Penurunan emisi GRK (%)	N/A	N/A	N/A
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	74,82	78,5	104,92
	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim	Indeks Resiko Bencana	122,5	116,02	94,71
Terwujudnya Good and Clean Government		Nilai MCP (%)	94,1	81,7	86,82
		Indeks Reformasi Birokrasi	65,7	77,75	118,34
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	BB (Nilai)	68,88 (B)	80
		Indeks Kualitas Perencanaan	85	84,36	99,24
		Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	100
		Indeks Sistem Merit	300	327	109
		Nilai Maturitas SPBE	2,79	4,13	148,03
		Nilai Pengawasan Kearsipan	64 (Nilai)	70,74	110,53
	Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah	Indeks Demokrasi (%)	72	79,71	110,71

Sumber : RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 (diolah)



PENJABARAN APBD

a. Pendapatan

Pendapatan daerah tahun 2024 terjadi peningkatan sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi daerah. Pendapatan daerah tahun 2024 mencapai 1.909.779.535.276, naik 1,99% dibanding tahun 2023. Kenaikan sumber pendapatan tertinggi berasal dari Pendapatan Transfer dengan kenaikan sebesar 2,49. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi sebesar 27,46 % terhadap pendapatan daerah dengan realisasi sebesar Rp524.448.862.639,00, meningkat 2,44 dari tahun 2023. Kontribusi pendapatan lainnya yaitu yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah turun dibanding tahun sebelumnya sebesar -86,59.

b. Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebesar Rp2.078.376.477.087,00, dengan realisasi mencapai Rp 1.926.558.268.760,61, atau sebesar 92,70 persen. Dari total realisasi belanja daerah, sebesar 78,48 % merupakan pengeluaran terhadap belanja operasi. Sementara Belanja Modal sebesar 10,77%, belanja transfer sebesar 10,49 % dan belanja tak terduga sebesar 0,24%.

c. Pembiayaan

Tahun 2024 Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2023 sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp170.905.894.812,55.

Kebijakan Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2024 ditujukan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp 18.217.735.912,00.

Tabel 2
Anggaran dan Realisasi APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024*	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN	1.924.405.965.518,00	1.909.779.535.276,00	99,24
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	516.532.987.548,00	524.448.862.639,00	101,53
4.1.01	Pajak Daerah	437.626.291.107,00	449.447.489.131,00	102,70
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	126.769.436.557,00	139.211.005.874,00	109,81
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	119.439.094.715,00	113.668.944.295,00	95,17
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	91.018.442.069,00	100.997.569.265,00	110,96
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	223.492.231,00	234.827.784,00	105,07
4.1.01.05	Pajak Rokok	100.175.825.535,00	95.335.141.913,00	95,17
4.1.02	Retribusi Daerah	49.085.884.000,00	54.066.708.700,00	110,15
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	46.148.924.000,00	52.873.350.572,00	114,57
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.936.960.000,00	1.193.358.128,00	40,63
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024*	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.601.777.410,00	9.354.296.471,00	47,72
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	359.766.044,00	179,88
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	6.750.000.000,00	1.640.690.326,00	24,31
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.077.777.410,00	1.037.945.218,00	20,44
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	1.857.879.314,00	185,79
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.464.000.000,00	4.458.015.569,00	180,93
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	4.058.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	2.078.376.477.087,00	1.926.558.268.760,61	92,70
5.1	BELANJA OPERASI	1.605.785.176.582,00	1.512.061.463.267,16	94,16
5.1.01	Belanja Pegawai	782.146.327.136,00	764.595.004.643,00	97,76
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.525.499.630,00	597.339.891.568,16	88,69
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42
5.1.05	Belanja Hibah	132.481.124.769,00	132.495.436.851,00	100,01
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.283.213.000,00	11.191.847.860,00	99,19
5.2	BELANJA MODAL	257.490.295.402,00	207.591.794.513,45	80,62
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.466.898.227,00	65.191.800.345,00	86,38
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.486.591.071,00	67.332.004.338,45	70,51
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.641.009.156,00	70.394.263.930,00	89,51
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.895.796.948,00	4.673.725.900,00	59,19
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53
5.4	BELANJA TRANSFER	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00	96,47
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00	96,60
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.975.000.000,00	2.600.000.000,00	87,39
	SURPLIS/DEFISIT	(153.970.511.569,00)	(16.778.733.484,61)	10,90
6	PEMBIAYAAN DAERAH	153.970.511.569,00	152.688.158.900,55	99,17
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.905.894.813,00	170.905.894.812,55	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	170.905.894.813,00	170.905.894.812,55	100,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	501.721.917,40	501.721.917,40	100,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	153.833.000.058,15	153.833.000.058,15	100,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	16.571.172.837,45	16.571.172.837,00	100,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.905.894.813,00	170.905.894.812,55	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57
	<i>PEMBIAYAAN NETTO</i>	<i>153.970.511.569,00</i>	<i>152.688.158.900,55</i>	<i>99,17</i>
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	135.909.425.415,94	0

Sumber Data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2024
*Data Per 31 Desember 2024 (Unaudited BPK)



PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Hasil kinerja pelaksanaan urusan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah oleh masing-masing organisasi perangkat daerah menunjukkan hasil yang sudah sangat baik. Dari sisi **realisasi belanja** Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2024 mencapai 1,96 Triliun atau sebesar **95,45 persen** dari Pagu Belanja OPD sebesar 2,06 Triliun, dengan **realisasi fisik mencapai 99,40% atau Sangat Tinggi**.

Tabel 3
Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keu	% Fisik
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	561.203.081.351	556.155.658.188	99,10	100
2	Dinas Kesehatan	112.851.604.173	107.849.094.135	95,57	100
3	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	169.959.070.667	145.513.816.071	85,62	93
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	148.095.069.776	137.650.033.086	92,95	98,43
5	Dinas Sosial	26.592.018.017	25.511.853.450	95,94	97.30
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran	12.088.677.615	11.785.438.679	97,49	100
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.814.017.841	6,419,997,058	82.16	98.82
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.930.199.349	9.719.802.849	97,88	100
9	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	16.961.645.743	16.633.188.181	98,06	100
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	41.417.771.672	41.156.612.578	99,60	100
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	8.684.962.392	8.531.337.314	98,23	100
12	Dinas Ketahanan Pangan	12.188.019.824	12.037.615.911	98,77	100
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35.346.696.116	35.113.418.365	99,34	100
14	Dinas Perhubungan	15.756.883.780	15.056.484.058	95,55	100
15	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika	16.610.608.464	16.439.436.527	98,97	100
16	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	41.063.393.248	40.817.064.768	99,36	100
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.025.902.522	9.908.975.785	98,83	100
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	38.484.456.600	37.452.202.782	97,32	100
19	Dinas Pariwisata	12.688.655.464	12.410.166.521	97,81	100
20	Dinas Pertanian	68.554.327.744	66.696.225.237	97,29	99
21	Biro Hukum	6.872.877.278	6.507.191.151	94,68	100
22	Biro Pengadaan	8.250.312.410	7.995.538.589	96,91	100
23	Biro Umum dan Pimpinan Setda	28.850.960.954	24.482.695.875	84,86	91,70
24	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	35.915.702.370	35.409.159.311	98,59	100
25	Biro Organisasi	5.870.911.110	5.678.458.086	96,72	100



No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keu	% Fisik
26	Badan Penghubung	9.406.267.605	8.808.478.100	93,64	100
27	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	5.056.668.513	4.866.039.208	96.23	100
28	Sekretariat DPRD	116.082.323.230	109.086.856.524	93.97	100
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18.353.322.175	17.986.248.127	98,00	100
30	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	303.761.881.351	285.361.070.952	93,94	98
31	Badan Kepegawaian Daerah	10.400.858.222	10.280.554.623	98,84	100
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.792.420.419	12.326.620.864	96,36	100
33	Inspektorat	23.103.771.324	22.700.375.785	98, 25	100
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.117.754.427	9.921.284.881	98,06	100
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98.201.025.272	97.853.955.752	99,65	100
TOTAL		2.059.354.119.018	1.965.702.952.313	95,45	99,40

Sumber : OPD Provinsi Gorontalo, 2025

TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan dari 7 Kementerian/Lembaga yaitu (1) Kementerian Pertanian, (2) Kementerian Perindustrian, (3) Kementerian Kelautan dan Perikanan, (4) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (5) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (6) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta (7) kementerian Perdagangan dengan total alokasi Tugas Pembantuan sebesar Rp 57.556.288.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.717.254.047 mencapai 86,49 persen.

Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memperoleh alokasi anggaran dekonsentrasi dari 12 Kementerian/Lembaga, dengan total alokasi anggaran dekonsentrasi sebesar Rp23.494.035.000, dan realisasi mencapai Rp22.241.271.142 atau sebesar 96.18 persen.

PENUTUP

Alhamdulillah Provinsi Gorontalo telah melalui proses penyelenggaraan pembangunan tahun 2024 meskipun ditengah keterbatasan sumber daya yang ada serta berbagai dinamika dan tantangan yang dihadapi, diantaranya musibah banjir dan tanah longsor yang terjadi tahun 2024 yang tentunya berdampak signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun berkat dukungan koordinasi dan kesigapan seluruh pihak, berbagai persoalan dapat diselesaikan dan dituntaskan dengan baik.

Disisi lain Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyelenggarakan Pilkada serentak, baik Pemilihan Presiden, Anggota Legislatif maupun Pilkada Serentak tahun 2024 dengan baik, aman dan lancar. Hal ini dilakukan dengan berkat koordinasi dan dukungan semua pihak pemerintah, unsur forkopimda, pemangku kepentingan terkait, aparat keamanan TNI, Polri, dan unsur lainnya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Provinsi

Gorontalo. Melalui mekanisme penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2024 ini disampaikan, kiranya dapat memberikan gambaran secara komprehensif terkait kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2024 ini kami serahkan untuk dibahas oleh DPRD Provinsi Gorontalo sebagai representasi seluruh rakyat Gorontalo, dan diharapkan rekomendasi-rekomendasi konstruktif untuk semakin menyempurnakan dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan dari berbagai aspek untuk pembangunan daerah yang lebih baik lagi ke depan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN LKPJ GUBERNUR TAHUN 2024	iii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xxx
DAFTAR GRAFIK	xxxix
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1 Dasar Hukum.....	I-1
1.2 Visi Misi.....	I-3
1.2.1 Arah Pembangunan dalam RPD tahun 2023-2026	II-3
1.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024	II-4
1.3 Data Umum Daerah ...	II-5
1.3.1 Data Geografis Wilayah	II-5
1.3.2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	II-7
1.3.3 Jumlah PNS	II-8
1.3.4 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan	II-9
1.3.5 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja	II-12
1.3.6 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan	II-18
1.3.7 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-19
 BAB II PERUBAHAN PENAJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	 II-1
2.1 Kebijakan Keuangan Daerah	II-1
2.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	II-1
2.1.2 Kebijakan Belanja Daerah	II-3
2.2 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2024 .	II-5
 BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	 III-1
3.1 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	III-1
3.2 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	III-508
 BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	 IV-1
4.1 Urusan Pemerintahan yang di Tugas Pembantuan	IV-1
4.1.1 Dasar Hukum	IV-1



4.1.2	Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah tingkat atasnya	IV-2
BAB V	PENUTUP	V-1



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026	I-3
Tabel 1.2 Luas Wilayah Provinsi Gorontalo menurut Kabupaten/Kota	I-6
Tabel 1.3 Jumlah Peduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2024 (jiwa)	I-7
Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2024	I-7
Tabel 1.5 Jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) Provinsi Gorontalo Tahun 2024	I-8
Tabel 1.6 Rekapitulasi Data Pensiun, Mutasi ASN Pemerintah Povinsi Gorontalo Tahun 2024	I-9
Tabel 1.7 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024	I-11
Tabel 1.8 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024	I-12
Tabel 1.9 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024	I-12
Tabel 1.10 Realisasi Anggaran Belanja Provinsi Gorontalo Tahun 2024	I-13
Tabel 1.11 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024	I-14
Tabel 1.12 Realisasi Belanja Barang dan Jasa	I-14
Tabel 1.13 Realisasi Belanja Bunga Tahun 2024	I-15
Tabel 1.14 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024	I-15
Tabel 1.15 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024	I-16
Tabel 1.16 Realisasi Belanja Modal Tahun 2024	I-16
Tabel 1.17 Alokasi dan Realisasi Belanja OPD Tahun 2024	I-17
Tabel 1.18 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	I-19
Tabel 2.1 Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024	II-5
Tabel 3.1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha tahun 2022-2024 (Milyar Rupiah), Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB tahun 2024	III-2
Tabel 3.2 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran tahun 2022-2024 (Milyar Rupiah), Sumber Pertumbuhan dan Distribusi PDRB tahun 2024	III-3
Tabel 3.3 Distribusi Pengeluaran Penduduk Gorontalo (persen) Maret 2023, Maret 2024 dan September 2024	III-7
Tabel 3.4 Perkembangan Dimensi Penyusun IPM Tahun 2020-2024	III-9
Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Gorontalo dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026	III-13
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	III-17
Tabel 3.7 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	III-19



Tabel 3.8	Kebijakan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	III-31
Tabel 3.9	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sesuai Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026	III-32
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	III-34
Tabel 3.11	Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	III-37
Tabel 3.12	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ..	III-50
Tabel 3.13	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	III-53
Tabel 3.14	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kesehatan RSUD Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo Tahun 2024	III-55
Tabel 3.15	Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2024	III-63
Tabel 3.16	Kebijakan Strategis RSUD Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo Tahun 2024	III-64
Tabel 3.17	Indikator Kinerja Urusan Kesehatan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja	III-66
Tabel 3.18	Daftar Perjanjian Kerjasama RSUD dr. Hasri Ainun	III-66
Tabel 3.19	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	III-68
Tabel 3.20	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024	III-70
Tabel 3.21	Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	III-95
Tabel 3.22	Target dan Realisasi Sasaran Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024	III-103
Tabel 3.23	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024	III-104
Tabel 3.24	Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	III-110



Tabel 3.25 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 III-112

Tabel 3.26 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 III-114

Tabel 3.27 Daftar Partai dan Perolehan Suara Hasil Pemilu Tahun 2019-2024 III-120

Tabel 3.28 Hasil Perolehan Suara Sah Pilkada 2024 III-121

Tabel 3.29 Daftar Pemberian Hibah Partai Politik III-122

Tabel 3.30 Daftar Ormas yang terdaftar di Badan Kesbang dan Politik
Provinsi Gorontalo Desember 2024 III-130

Tabel 3.31 Kebijakan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo
Tahun 2024 III-132

Tabel 3.32 Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Sesuai
Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026
dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 III-132

Tabel 3.33 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 III-133

Tabel 3.34 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 III-133

Tabel 3.35 Kebijakan Strategis Tahun 2024 III-148

Tabel 3.36 Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 III-148

Tabel 3.37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 III-150

Tabel 3.39 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 III-150

Tabel 3.40 Data Kejadian dan Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo selang
Tahun 2024 III-152

Tabel 3.41 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Gorontalo Sesuai Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 III-154

Tabel 3.42 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Dinas Sosial
Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-155

Tabel 3.43 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Sosial Tahun 2024 III-156

Tabel 3.44 Indikator Kinerja Urusan Sosial Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Sesuai
Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Perjanjian
Kinerja Tahun 2024 III-175

Tabel 3.45 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Dinas Tenaga
Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-177



Tabel 3.46 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2024 III-179

Tabel 3.47 Kebijakan Strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-187

Tabel 3.48 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan
Transmigrasi Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM
dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja
Tahun 2024 III-188

Tabel 3.49 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-190

Tabel 3.50 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2024 III-191

Tabel 3.51 Kebijakan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-201

Tabel 3.52 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 III-201

Tabel 3.53 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pangan Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-202

Tabel 3.54 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pangan Tahun 2024 III-206

Tabel 3.59 Olah Data Harga Pangan Ecer (Rerata Harga Provinsi) Tahun 2024 III-209

Tabel 3.60 Realisasi Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Tahun 2024 III-212

Tabel 3.61 Realisasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2024 III-218

Tabel 3.62 Alokasi Penerima Manfaat Bantuan Kegiatan Pekarangan Pangan Harapan
Tahun 2024 III-220

Tabel 3.63 Daftar Penerima Bantuan Gertam Cabe Sumber Dana APBN dan APBD
Perubahan Tahun 2024 III-221

Tabel 3.64 Daftar Penerima Bantuan Gertam Cabe Sumber Dana APBN dan APBD
Perubahan Tahun 2024 (Lanjutan) III-222

Tabel 3.65 Daftar Penerima Bantuan PDRP tahun 2024 III-228

Tabel 3.66 Kebijakan Strategis Tahun 2024 III-231

Tabel 3.67 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo
2023-2026 III-234

Tabel 3.68 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 III-236



Tabel 3.69 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-236

Tabel 3.70 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-239

Tabel 3.71 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 III-240

Tabel 3.72 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024 III-241

Tabel 3.73 Data Pemantauan Indeks Kualitas Air Provinsi Gorontalo III-255

Tabel 3.74 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-263

Tabel 3.75 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 III-264

Tabel 3.76 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024 III-264

Tabel 3.77 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-266

Tabel 3.78 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 III-267

Tabel 3.79 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 III-268

Tabel 3.80 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-272

Tabel 3.81 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Dukcapil Pemdes Tahun 2024 III-275

Tabel 3.82 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 III-275

Tabel 3.83 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-279

Tabel 3.84 Perkembangan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 III-281

Tabel 3.89 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2024 III-282

Tabel 3.90 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 III-282



Tabel 3.91 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-284

Tabel 3.92 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-285

Tabel 3.93 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perhubungan Tahun 2024 III-286

Tabel 3.94 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-293

Tabel 3.95 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 III-297

Tabel 3.96 Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 III-297

Tabel 3.97 Daftar Belanja Modal Tahun 2024 III-301

Tabel 3.98 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-304

Tabel 3.99 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 III-305

Tabel 3.100 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 III-307

Tabel 3.101 Daftar Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Primer Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-312

Tabel 3.102 Daftar Pengawasan dan Pemeriksaan/Monev Koperasi di Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-314

Tabel 3.103 Revitalisasi (Bedah) Koperasi III-319

Tabel 3.104 Penerimaan Bantuan Tahap I Tahun 2024 III-325

Tabel 3.105 Penerimaan Bantuan Tahap II Tahun 2024 III-325

Tabel 3.107 Kebijakan Strategis Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-327

Tabel 3.108 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-329

Tabel 3.109 Capaian Indikator Kinerja Per Kegiatan Urusan Koperasi Tahun 2024 III-329

Tabel 3.110 Perkembangan Koperasi selang Tahun 2023-2024 III-333

Tabel 3.111 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024 III-336

Tabel 3.112 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Penanaman Modal Tahun 2024 III-337

Tabel 3.113 Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan III-343

Tabel 3.114 Evaluasi Kinerja Pelayanan Perizinan Provinsi Gorontalo III-344

Tabel 3.115 Kebijakan Strategis Urusan Penanaman Modal Tahun 2024 III-346



Tabel 3.116 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 III-347

Tabel 3.117 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 III-350

Tabel 3.118 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga III-351

Tabel 3.119 Daftar atlet PPLP Provinsi Gorontalo III-356

Tabel 3.120 Daftar Perolehan Medali Atlet yang dibina III-358

Tabel 3.121 Kebijakan Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo
Tahun 2024 III-361

Tabel 3.122 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra dan
RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-362

Tabel 3.123 Tabel Penghargaan Tahun 2024 III-363

Tabel 3.124 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Dinas Komunikasi,
Informasi dan Statistik Tahun 2024 III-366

Tabel 3.125 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Statistik Tahun 2024 III-366

Tabel 3.126 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Statistik Dinas Komunikasi,
Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan
RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-368

Tabel 3.127 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian Dinas Komunikasi,
Informasi dan Statistik Tahun 2024 III-368

Tabel 3.128 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Persandian Tahun 2024 III-369

Tabel 3.129 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Dinas Komunikasi,
Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan
RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-370

Tabel 3.130 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 III-371

Tabel 3.131 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kebudayaan Tahun 2024 III-371

Tabel 3.132 Kebijakan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo
Tahun 2024 III-375

Tabel 3.133 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo
2023-2026 III-375

Tabel 3.134 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 III-378

Tabel 3.135 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perpustakaan Tahun 2024 III-379

Tabel 3.136 Kebijakan Strategis Tahun 2024 III-381

Tabel 3.137 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi
Gorontalo 2023-2026 III-382



Tabel 3.138 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024	III-383
Tabel 3.139 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kearsipan Tahun 2024	III-384
Tabel 3.140 Kebijakan Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	III-388
Tabel 3.141 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026	III-388
Tabel 3.142 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	III-389
Tabel 3.143 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pertanian Tahun 2024	III-391
Tabel 3.144 Kebijakan Strategis Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2024	III-405
Tabel 3.145 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026	III-406
Tabel 3.146 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	III-407
Tabel 3.147 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	III-410
Tabel 3.148 Kebijakan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	III-424
Tabel 3.149 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026	III-425
Tabel 3.150 Penghargaan nasional yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	III-429
Tabel 3.151 Kapal Yang Telah Memiliki Surat Tanda Keterangan ANDON (STKA)	III-431
Tabel 3.152 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	III-434
Tabel 3.153 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pariwisata Tahun 2024	III-435
Tabel 3.154 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026	III-445
Tabel 3.155 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	III-446
Tabel 3.156 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kehutanan Tahun 2024	III-447
Tabel 3.157 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo 2023-2026	III-472
Tabel 3.158 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	III-475
Tabel 3.159 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2024	III-476



Tabel 3.160 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026	III-482
Tabel 3.161 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024	III-483
Tabel 3.162 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024	III-485
Tabel 3.163 Rekap Realisasi Eksport Berdasarkan Komoditi Selang Bulan Januari- Desember 2024	III-489
Tabel 3.164 Penerbitan SKA Yang Dokumennya Telah Diterima dengan Lengkap dan Benar Tahun 2024	III-489
Tabel 3.165 Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi Yang Dilaksanakan Tahun 2024	III-499
Tabel 3.166 Rekapitulasi Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi di Wilayah Kabupaten/Kota .	III-501
Tabel 3.167 Banyaknya Volume Komoditi Yang Dijual	III-501
Tabel 3.168 Data pengawasan Perlindungan Konsumen Di Provinsi Gorontalo Tahun 2024	III-511
Tabel 3.169 Kebijakan Strategis Tahun 2024	III-511
Tabel 3.170 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026	III-512
Tabel 3.171 Capaian Indikator Kinerja Per Kegiatan Tahun 2024 Urusan Perdagangan	III-514
Tabel 3.172 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	III-518
Tabel 3.173 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perindustrian Tahun 2024	III-519
Tabel 3.174 Kebijakan Strategis Tahun 2024	III-525
Tabel 3.175 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026	III-526
Tabel 3.176 Capaian Indikator Kinerja Urusan Industri Tahun 2024	III-527
Tabel 3.177 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	III-531
Tabel 3.178 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Transmigrasi Tahun 2024	III-532
Tabel 3.179 Kebijakan Strategis Tahun 2024	III-534
Tabel 3.180 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026	III-535
Tabel 3.181 Lokasi Transmigrasi Yang Masih Dibina Tahun 2024	III-535
Tabel 3.182 Lokasi Transmigrasi Yang Sudah Diserahkan Tahun 2024	III-536
Tabel 3.183 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 Penunjang urusan Perencanaan dan Penelitian Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo	III-537



Tabel 3.184 Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Perencanaan Tahun 2024 III-538

Tabel 3.185 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Perencanaan BAPPPEDA Provinsi Gorontalo Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo
2023-2026 III-551

Tabel 3.186 Kebijakan Strategis yang ditetapkan Bapppeda Provinsi Gorontalo
Tahun 2024 III-551

Tabel 3.187 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan (Keuangan)
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-552

Tabel 3.188 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-553

Tabel 3.189 Kebijakan Strategis yang ditetapkan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo III-571

Tabel 3.190 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai RPD Provinsi
Gorontalo 2023-2026 III-571

Tabel 3.191 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-575

Tabel 3.192 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-576

Tabel 3.193 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD
Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-581

Tabel 3.194 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan
Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Gorontalo Tahun 2024 III-582

Tabel 3.195 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024 III-583

Tabel 3.196 Rekapitulasi Pengembangan Kompetensi ASN BPSDM Provinsi Gorontalo
Tahun 2024 III-587

Tabel 3.197 Rekapitulasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi BPSDM Provinsi
Gorontalo Tahun 2024 III-588

Tabel 3.198 Perbandingan Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara
Pengeluaran Berdasarkan Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah
pada Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 III-589

Tabel 3.199 Jumlah SDM PBJ Bersertifikasi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-591

Tabel 3.200 Perjanjian Kerja Sama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-592

Tabel 3.201 Kebijakan Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-593



Tabel 3.202 Indikator Kinerja Pembangunan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Sesuai Renstra adan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-595

Tabel 3.203 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-597

Tabel 3.204 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Badan Kepegawaian
Provinsi GorontaloTahun 2024 III-600

Tabel 3.205 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Fungsi Penunjang Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-601

Tabel 3.206 Data Usul Penerbitan Rekomendasi Tugas Belajar III-607

Tabel 3.207 Data Usul Penerbitan SK Tugas Belajar III-607

Tabel 3.208 Data Usul Pencantuman Gelar III-607

Tabel 3.209 Data Usul Bantuan Akhir Studi & Bantuan Beasiswa Tugas Belajar III-608

Tabel 3.210 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penunjang Badan Kepegawaian
Daerah Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 III-609

Tabel 3.211 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Fungsi Penunjang Biro Umum
dan Pimpinan Setda Provinsi Gorontalo tahun 2024 III-610

Tabel 3.212 Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Pemerintahan Daerah Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2024 III-610

Tabel 3.213 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Pemerintahan Daerah Tahun 2024 III-614

Tabel 3.214 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Biro Umum dan
Pimpian Setda Tahun 2024 III-615

Tabel 3.215 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi
Gorontalo (Pimpinan Setda) Tahun 2024 III-615

Tabel 3.216 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Pemerintahan Daerah (Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo) Tahun 2024 III-618

Tabel 3.217 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 III-618

Tabel 3.218 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Penunjang (Biro Pemerintahan Setda
Provinsi Gorontalo) Tahun 2024 III-619

Tabel 3.219 Daftar Pejabat Yang Diterima Secara Adat Mopotilolo Tahun 2024 III-633

Tabel 3.220 Daftar Jamaah Haji Provinsi Gorontalo Tahun 1445 H / 2024 M III-634

Tabel 3.221 Daftar Jumlah Penerima Hibah dan Bansos serta Realisasinya III-635

Tabel 3.222 Bantuan Studi/Beasiswa Tahun 2024 III-636

Tabel 3.223 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Biro Pemerintahan dan Kesra Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi
Gorontalo 2023-2026 III-637

Tabel 3.224 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
(Biro Organisasi) tahun 2024 III-638



Tabel 3.225	Realisasi Fisik dan Keuangan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah (Biro Organisasi) Provinsi Tahun Anggaran 2024	III-639
Tabel 3.226	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintah Provinsi Gorontalo Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026	III-649
Tabel 3.227	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (Biro Hukum) Tahun 2024	III-650
Tabel 3.228	Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024 Biro Hukum	III-651
Tabel 3.229	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintah Provinsi Gorontalo Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026	III-657
Tabel 3.230	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024	III-658
Tabel 3.231	Realisasi Fisik dan Keuangan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024	III-660
Tabel 3.232	Indikator Kinerja Pembangunan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026	III-664
Tabel 3.233	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ..	III-667
Tabel 3.234	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Tahun 2024	III-667
Tabel 3.235	Kebijakan Strategis Sekretariat Daerah (Biro Pengendalian Pembangunan) Tahun 2024	III-672
Tabel 3.236	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026	III-672
Tabel 3.237	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo	III-677
Tabel 3.238	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendukung Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024	III-678
Tabel 3.239	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendukung Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026	III-683
Tabel 3.240	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024	III-683
Tabel 3.241	Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Fungsi Penunjang Badan Penghubung Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024	III-684
Tabel 3.242	Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penunjang Badan Penghubung Daerah Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026	III-687
Tabel 3.243	Rekomendasi Tindaklanjut DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Sebelumnya (Tahun 2023)	III-688



Tabel 4.1	Pagu dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	IV-1
Tabel 4.2	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantuan (TP) Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2024	IV-4
Tabel 4.3	Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Urusan Perindustrian)	IV-7
Tabel 4.4	Program Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pembantuan Satker Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Urusan Perdagangan) Tahun 2024 .	IV-11
Tabel 4.5	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	IV-45
Tabel 4.6	Realisasi Fisik dan Keuangan Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Urusan Pekerjaan Umum)	IV-16
Tabel 4.7	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Dana Tugas Pembantuan (TP) Di SKPD – TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2024 .	IV-16
Tabel 4.8	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantuan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2024	IV-18
Tabel 4.9	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024	IV-20
Tabel 4.10	Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Kementerian/Lembaga di Provinsi Gorontalo Tahun 2024	IV-22
Tabel 4.11	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2024	IV-24
Tabel 4.12	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi Satker Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo (Kementerian Investasi Hilirisasi/BKPM RI) Tahun Anggaran 2024	IV-24
Tabel 4.13	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi Satker Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo (Kementerian Dalam Negeri RI) Tahun Anggaran 2024	IV-25
Tabel 4.14	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi BAPPPEDA Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024	IV-27
Tabel 4.15	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024	IV-27
Tabel 4.16	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi (DK) Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2024	IV-28
Tabel 4.17	Rincian Pagu Dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	IV-30



Tabel 4.18	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024	IV-31
Tabel 4.19	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan 2024	IV-34
Tabel 4.20	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Dana Dekonsentrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 ...	IV-38
Tabel 4.21	Perangkat Daerah yang melaksanakan dana Dekonsentrasi di Provinsi Gorontalo Tahun 2024	IV-39
Tabel 4.22	Tabel Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan pendanaan Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo	IV-39
Tabel 4.23	Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024	IV-41



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Administrasi Provinsi Gorontalo	I-6
Gambar 3.1 Capaian dan Status Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2024	III-10
Gambar 3.2 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ...	III-226
Gambar 3.3 Piagam Penghargaan yang Diterima Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2024	III-349
Gambar 3.4 Realisasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa Per Tgl 31 Desember 2024	III-663
Gambar 3.5 Piagam Penghargaan LKPP terhadap Pencapaian Pemenuhan Kelengkapan Atribut pada Sembilan Variabel Kematangan UKPBJ Level 3	III-665
Gambar 3.6 Piagam Penghargaan Nominasi TPID Provinsi Berkinerja Terbaik	III-676



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Provinsi Gorontalo 2024 I-20
Grafik 1.2	Capaian SPM Pendidikan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 I-20
Grafik 1.3	Perbandingan Capaian Mutu Layanan Sekolah Menengah I-21
Grafik 1.4	Capaian Mutu Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus I-22
Grafik 1.5	Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024 I-23
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024 III-1
Grafik 3.2	Tingkat Inflasi Year on Year (y-o-y) Nasional dan Provinsi Gorontalo, Januari – Desember 2024 III-4
Grafik 3.3	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo dan Nasional, Tahun 2020-2024 III-5
Grafik 3.4	Indeks Gini Provinsi Gorontalo dan Nasional periode Maret 2019 - September 2024 III-6
Grafik 3.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2020-2024 III-8
Grafik 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2021 – 2024 III-10
Grafik 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Agustus 2021-Agustus 2024 (persen) III-11
Grafik 3.8	Prevalensi Stunting Provinsi se-Indonesia Tahun 2023 III-12
Grafik 3.9	Angka Prevalensi Stunting Provinsi dan Kabupaten/ Kota III-13
Grafik 3.10	Grafik Nilai SAKIP DPMPTP III-345
Grafik 3.11	Capaian Realisasi Investasi Provinsi Gorontalo III-348
Grafik 3.12	Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri Provinsi Gorontalo III-348



Bab I Pendahuluan

1.1 DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah merupakan laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu (satu) tahun anggaran, yang disusun sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 19 yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 memuat pelaksanaan kinerja pembangunan yang menggambarkan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo, dan pelaksanaan APBD Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2019 meliputi dua aspek antara lain hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, yang memuat Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan LKPJ, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024, Data Umum Daerah, serta Realisasi APBD Tahun 2024;
- BAB II Perubahan Penjabaran APBD, yang menjelaskan perubahan terhadap alokasi anggaran pendapatan, pengelolaan belanja, dan pembiayaan serta pokok-pokok perubahan anggaran;
- BAB III Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang antara lain memuat capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis, dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
- BAB IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan, yang memuat urusan pemerintahan tugas pembantuan dan hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian.
- BAB V Penutup.

Dasar hukum penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



- 14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2007-2025;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024;
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024;
- 17. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026;
- 18. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 19. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 tahun 2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 20. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 63 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024;
- 21. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024.

1.2 VISI MISI

1.2.1 Arah Pembangunan dalam RPD tahun 2023-2026

Penyelenggaraan pembangunan Tahun 2024 merupakan bagian dari tahapan implementasi arah pembangunan transisi jangka menengah yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026. RPD Provinsi Gorontalo merupakan dokumen rencana jangka menengah diperiode transisi kepala daerah sebelum pilkada serentak 2024, sehingga dalam penyusunannya tidak memiliki Visi Misi. Dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran
1	Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumberdaya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
		b. Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian
		c. Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa
		d. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		e. Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat
2	Peningkatan Sumber daya manusia	a. Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan
		b. Meningkatnya derajat kesehatan
		c. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
		d. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama



No	Tujuan	Sasaran	
3	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	e.	Meningkatnya budaya literasi masyarakat
		a.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		b.	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim
		c.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
4	Terwujudnya Good and Clean Government	a.	Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

Dalam mewujudkan kesinambungan pembangunan maka arah pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 masih mengacu dan selaras dengan masih berpedoman dan selaras dengan pencapaian Visi Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 dengan Visi “Gorontalo Maju dan Mandiri”, dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal
3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah

Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029.

1.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan RKPd Tahun 2024

Selaras dengan kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo dalam RPD Tahun 2023-2026, dan berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta isu strategis pembangunan daerah, maka sebagaimana RKPd Tahun 2024 ditetapkan tema pembangunan tahun 2024 sebagai berikut :

“Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang berwawasan lingkungan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Infrastruktur Dasar dan Strategis, serta Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah”

Berdasarkan tema pembangunan dimaksud, maka kebijakan utama / prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2024, yaitu :

- 1) Peningkatan Ekonomi Daerah, yang dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi, yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan meminimalisir bencana.
- 2) Pengembangan wilayah dan pedesaan, yang difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh stakeholders pembangunan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.
- 3) Peningkatan sumber daya manusia, dititikberatkan pada peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas,

pelaksanaan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, juga mendorong upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja.

- 4) Peningkatan kebudayaan dan agama, yang didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya literasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.
- 5) Peningkatan infrastruktur dasar dan strategis, yang dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur layanan dasar, pembangunan konektifitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
- 6) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, yang diarahkan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- 7) Peningkatan tata kelola pemerintahan, keamanan, ketertiban dan demokrasi dititikberatkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Provinsi Gorontalo dibentuk pada tanggal 5 Desember Tahun 2000, dan menjadi provinsi ke-32 di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo tanggal 22 Desember 2000. Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah sebesar 12.025,147 Km², atau sebesar 0,63 persen dari luas wilayah Indonesia, sebagaimana Kepmendagri 100.1.1-1667 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Sedangkan cakupan wilayah perencanaan sebagaimana RTRW Provinsi seluas kurang lebih 2.107.785 Ha, meliputi wilayah darat dan wilayah laut.

Wilayah Administrasi Provinsi berada pada posisi geografis 0°6' 18" – 1°15' 25" Lintang Utara dan 121°9' 40" – 123°33' 99" Bujur Timur. Letak Provinsi Gorontalo sangat strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Provinsi Gorontalo juga berbatasan langsung dengan dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur.



1.3.2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Provinsi Gorontalo menduduki peringkat ke 32 dari 38 provinsi, yang tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota. Berdasarkan hasil Proyeksi Interim SP 2020, jumlah penduduk Gorontalo pada tahun 2024 mencapai 1.227.794 jiwa, atau hanya 0,43% dari total jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 281,6 juta jiwa. Wilayah Kabupaten Gorontalo memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu sebanyak 409.509 jiwa, sedangkan terendah berada di wilayah Kabupaten Boalemo.

Tabel 1.3

Jumlah Peduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2024 (jiwa)

No	Wilayah Provinsi	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		2022	2023	2024
1	Kab. Boalemo	148.527	151.337	153.274
2	Kab. Gorontalo	398.801	405.322	409.509
3	Kab. Pohuwato	149.297	151.850	153.770
4	Kab. Bone Bolango	166.200	168.556	170.649
5	Kab. Gorontalo Utara	128.563	130.722	132.784
6	Kota Gorontalo	201.350	205.395	207.808
	Provinsi Gorontalo	1.192.737	1.213.182	1.227.794

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebesar 1,18 persen, dengan kepadatan penduduk 102 jiwa/km². Tingkat pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo juga disebabkan antara lain Angka Kelahiran (Fertilitas). Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk SP 2020 menunjukkan bahwa Total Fertility Rate Provinsi Gorontalo, sebesar 2,30 yang menggambarkan seorang perempuan melahirkan rata-rata 2 – 3 anak selama masa reproduksinya. Sedangkan rasio jenis kelamin yang menggambarkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dibanding penduduk perempuan sebesar 101,7. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding jumlah penduduk perempuan.

Tabel 1.4

Laju Pertumbuhan, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km persegi (Km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Boalemo	153,3	1,25	12,48	84	103,7
Gorontalo	409,5	1,03	33,35	190	101,2
Pohuwato	153,8	1,23	12,52	35	103,1
Bone Bolango	170,7	1,19	13,90	90	101,0
Gorontalo Utara	132,8	1,53	10,81	78	103,8
Kota Gorontalo	207,8	1,15	16,93	2,390	99,3
Gorontalo	1.227,8	1,18	100,00	102	101,7

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Wilayah Kota Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibanding wilayah lainnya di Provinsi Gorontalo. Dengan luas wilayah Kota Gorontalo sebesar 79,59 km² kepadatan penduduk mencapai 2.930 jiwa per km². Padatnya penduduk Kota Gorontalo terkait erat dengan fungsi



sentral Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi (pusat pemerintahan) dan juga pusat kegiatan ekonomi, pusat kesehatan, dan pendidikan.

Dilihat dari kelompok umur terlihat bahwa untuk kelompok umur usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,62 persen dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 30,38 persen. Dengan demikian, angka beban tanggungan penduduk usia produktif (*dependency ratio*) sebesar 43,65. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Gorontalo semakin meningkat dan menjadi salah satu pendorong utama pembangunan daerah.

1.3.3 Jumlah PNS

Aparat Sipil Negara (ASN) memegang peranan penting bagi terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu (a) berorientasi pelayanan, (b) akuntabel, (c) kompeten, (d) harmonis, (e) loyal, (f) adaptif dan (g) kolaboratif.

Ketersediaan ASN baik dari aspek kuantitas dan kualitas yang memadai menjadi hal yang sangat penting dalam menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 6.215 ASN, yang terdiri dari 4.902 PNS dan 1.313 PPPK.

Tabel 1.5
Jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

DATA JABATAN		DATA GOLONGAN			
JPT MADYA	1	1	I/c	Juru	1
JPT PRATAMA	32	2	I/d	Juru Tingkat I	4
ADMINISTRATOR	147	3	II/a	Pengatur Muda	13
PENGAWAS	175	4	II/b	Pengatur Muda Tingkat I	21
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	2681	5	II/c	Pengatur	94
Guru	2004	6	II/d	Pengatur Tingkat I	231
Tenaga Kesehatan	108	7	III/a	Penata Muda	316
Fungsional Penyetaraan	569	8	III/b	Penata Muda Tingkat I	663
JABATAN FUNGSIONAL UMUM	1866	9	III/c	Penata	564
Pelaksana	1730	10	III/d	Penata Tingkat I	1384
Tata Usaha	136	11	IV/a	Pembina	722
JUMLAH PNS	4902	12	IV/b	Pembina Tingkat I	734
PPPK	1313	13	IV/c	Pembina Utama Madya	127
PPPK Guru	1220	14	IV/d	Pembina Utama Muda	24
PPPK Nakes	66	15	IV/e	Pembina Utama	4
PPPK pertanian	27	JUMLAH			4902
TOTAL ASN	6215				

Sumber : Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo, 2024



Jumlah ASN Provinsi Gorontalo tahun 2024 berkurang 154 orang dibanding tahun 2023. Data Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo, Pegawai PNS pensiun/meninggal dunia sebanyak 156 orang, sedangkan PPPK sebanyak 4 orang (3 orang meninggal dan 1 pemberhentian). Tahun 2024 sebanyak 32 orang mutasi masuk dan 26 orang mutasi keluar Provinsi Gorontalo.

Tabel 1.6
 Rekapitulasi Data Pensiun, Mutasi ASN Pemerintah Povinsi Gorontalo
 Tahun 2024

Rekapitulasi PNS Pensiun Tahun 2024			Rekapitulasi PNS Mutasi Tahun 2024	
PNS			Mutasi Masuk	: 32 Orang
1	Januari	: 9 Orang	Mutasi Keluar	: 26 Orang
2	Februari	: 9 Orang	Selisih Lebih	: 6 Orang
3	Maret	: 11 Orang		
4	April	: 9 Orang		
5	Mei	: 16 Orang		
6	Juni	: 7 Orang		
7	Juli	: 12 Orang		
8	Agustus	: 15 Orang		
9	September	: 9 Orang		
10	Oktober	: 13 Orang		
11	November	: 18 Orang		
12	Desember	: 7 Orang		
Jumlah BUP		: 135 Orang		
Meninggal Dunia		: 21 Orang		
Total PNS Pensiun		: 156 Orang		
PPPK				
1	Meninggal Dunia	: 3 Orang		
2	Pemberhentian	: 1 Orang		
Jumlah		: 4 Orang		
Total ASN Pensiun		: 160 Orang		
			Rekapitulasi Penambahan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2024	
			Tambahan JFT	: 16 Orang

Sumber : Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo, 2024

1.3.4 Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara umum kinerja pendapatan daerah tahun 2024 terjadi peningkatan sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi daerah. Pendapatan daerah tahun 2024 mencapai 1.909.779.535.276, naik 1,99% dibanding tahun 2023. Kenaikan sumber pendapatan tertinggi berasal dari Pendapatan Transfer dengan kenaikan sebesar 2,49 dan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 2,44%. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah turun dibanding tahun sebelumnya sebesar -86,59.

A. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Terkait hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya memperbaiki sistem dan mekanisme pengelolaan pendapatan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Tahun 2024, pendapatan asli daerah berkontribusi sebesar 27,46 % terhadap pendapatan daerah dengan realisasi sebesar Rp524.448.862.639,00, meningkat 2,44 dari tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan dari sisi kontribusi, perlu menjadi perhatian bahwa rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menggambarkan kondisi kemandirian fiskal daerah yang masih rendah karena masih sangat bergantung pada dana transfer ke daerah. Uraian pendapatan daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan asli daerah. Pada tahun 2024, pajak daerah berkontribusi sebesar 85,69 persen terhadap PAD. Pada komponen penyusun pajak daerah, pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi terbesar yakni mencapai 30,97 persen dari total keseluruhan pajak daerah, sementara terendah yaitu pajak air permukaan yang hanya memberikan kontribusi sebesar 0,05 persen dari total pajak daerah. Sementara itu, untuk realisasi komponen PAD tertinggi yakni pada realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 110,96 persen.

2) Retribusi Daerah

Pada tahun 2024, realisasi retribusi daerah adalah sebesar Rp 54.066.708.700,00 atau 110,15 persen dari target realisasi. Penerimaan retribusi daerah berasal dari retribusi jasa umum, dengan realisasi sebesar Rp52.873.350.572,00 atau sebesar 114,57 dari target, dan retribusi jasa usaha dengan realisasi sebesar Rp1.193.358.128,00 atau sebesar 40,63% dari target.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai dividen atas penyertaan modal pada BUMD, dengan realisasi sebesar Rp11.580.368.337,00, atau terealisasi sebesar 113,32 persen dari target yang ditetapkan.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD yang sah terrealisasi sebesar Rp9.354.296.471,00 atau tercapai sebesar 47,72 persen dari target. Realisasi ini merupakan realisasi terendah dari komponen PAD.



Perhitungan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.7
 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024*	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	516.532.987.548,00	524.448.862.639,00	101,53
4.1.01	Pajak Daerah	437.626.291.107,00	449.447.489.131,00	102,70
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	126.769.436.557,00	139.211.005.874,00	109,81
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	119.439.094.715,00	113.668.944.295,00	95,17
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	91.018.442.069,00	100.997.569.265,00	110,96
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	223.492.231,00	234.827.784,00	105,07
4.1.01.05	Pajak Rokok	100.175.825.535,00	95.335.141.913,00	95,17
4.1.02	Retribusi Daerah	49.085.884.000,00	54.066.708.700,00	110,15
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	46.148.924.000,00	52.873.350.572,00	114,57
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.936.960.000,00	1.193.358.128,00	40,63
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.219.035.031,00	11.580.368.337,00	113,32
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.601.777.410,00	9.354.296.471,00	47,72
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	359.766.044,00	179,88
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	6.750.000.000,00	1.640.690.326,00	24,31
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	5.077.777.410,00	1.037.945.218,00	20,44
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	1.857.879.314,00	185,79
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.464.000.000,00	4.458.015.569,00	180,93
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	1.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	4.058.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2025
 *Unaudited BPK

B. Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pada tahun 2024, pendapatan transfer memberikan kontribusi sebesar 72,46 persen terhadap total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa APBD Provinsi Gorontalo masih sangat bergantung pada pendapatan transfer Pemerintah Pusat. Pendapatan Transfer Tahun 2024 mencapai Rp1.383.951.273.185,00 atau terealisasi sebesar 98,41 dari target yang ditetapkan.



Tabel 1.8

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024*	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.406.269.839.970,00	1.383.951.273.185,00	98,41
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.406.269.839.970,00	1.383.951.273.185,00	98,41
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.398.586.957.970,00	1.376.268.391.185,00	98,40
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.682.882.000,00	7.682.882.000,00	100,00

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2025

*Unaudited BPK

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp 1.379.399.452,00, atau sebesar 86,04 persen dari target yang ditetapkan dengan kontribusi sebesar 0,07 % dari total pendapatan, yang terdiri dari Pendapatan Hibah pemerintah Pusat sebesar Rp 915.839.452,00, dan Lain-lain Pendapatan sebesar Rp 463.560.000,00.

Tabel 1.9

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024*	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.603.138.000,00	1.379.399.452,00	86,04
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.103.138.000,00	915.839.452,00	83,02
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.103.138.000,00	915.839.452,00	83,02
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	463.560.000,00	92,71
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	500.000.000,00	463.560.000,00	92,71

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2025

*Unaudited BPK

1.3.5 Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah meliputi pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, pilihan maupun urusan penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial.



Alokasi Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebesar Rp2.078.376.477.087,00, dengan realisasi mencapai Rp 1.926.558.268.760,61, atau sebesar 92,70 persen sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.10

Realisasi Anggaran Belanja Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024*	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5	BELANJA DAERAH	2.078.376.477.087,00	1.926.558.268.760,61	92,70
5.1	BELANJA OPERASI	1.605.785.176.582,00	1.512.061.463.267,16	94,16
5.1.01	Belanja Pegawai	782.146.327.136,00	764.595.004.643,00	97,76
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.525.499.630,00	597.339.891.568,16	88,69
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42
5.1.05	Belanja Hibah	132.481.124.769,00	132.495.436.851,00	100,01
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.283.213.000,00	11.191.847.860,00	99,19
5.2	BELANJA MODAL	257.490.295.402,00	207.591.794.513,45	80,62
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.466.898.227,00	65.191.800.345,00	86,38
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.486.591.071,00	67.332.004.338,45	70,51
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.641.009.156,00	70.394.263.930,00	89,51
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.895.796.948,00	4.673.725.900,00	59,19
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.496.906.618,00	4.701.497.713,00	85,53
5.4	BELANJA TRANSFER	209.604.098.485,00	202.203.513.267,00	96,47
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	206.629.098.485,00	199.603.513.267,00	96,60
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.975.000.000,00	2.600.000.000,00	87,39

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2025
*Unaudited BPK

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Alokasi belanja operasi Tahun 2024 sebesar Rp1.605.785.176.582,00, dengan realisasi sebesar Rp1.512.061.463.267,16atau sebesar 94,16 persen dari target.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Tahun 2024 dari alokasi anggaran sebesar Rp782.146.327.136,00 dapat terrealisasi sebesar Rp764.595.004.643,00 atau 97,76 persen. Realisasi belanja pegawai pada tahun 2024 ini meningkat sebesar Rp106.768.978.066,00 atau 16,23 persen dari realisasi belanja pegawai pada tahun 2023. Kenaikan terbesar pada Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang meningkat 36,99 persen dan pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang meningkat 15,40 persen dari realisasi tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai, berdasarkan data badan kepegawaian terjadi pengurangan pegawai sebanyak 154 orang dibanding tahun 2023. Peningkatan belanja pegawai



diantaranya disebabkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 dan TPP-THR yang dibayarkan 100% pada tahun 2024, dan adanya peningkatan jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 16 orang. Hal ini berimplikasi terhadap peningkatan belanja Gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN, tambahan penghasilan Guru sebanyak 1 Bulan, Kenaikan Gaji Tahun 2024 sebesar 8%, serta adanya kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.

Tabel 1.11
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024*	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5.1.01	Belanja Pegawai	782.146.327.136,00	764.595.004.643,00	97,76
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	461.293.925.150,00	448.637.439.116,00	97,26
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	159.939.804.931,00	158.889.286.661,00	99,34
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	133.211.726.521,00	129.924.476.671,00	97,53
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.056.244.168,00	25.865.922.867,00	99,27
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	193.026.366,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.451.600.000,00	1.277.879.328,00	88,03

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2025
*Unaudited BPK

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Daerah meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada masyarakat atau pihak lain, Belanja Barang Jasa BOS dan BLUD. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2024 sebesar Rp597.339.891.568,16 atau sebesar 88,69 persen dari alokasi anggaran. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2023. Capaian terendah pada realisasi tahun 2024 adalah pada Belanja Barang dan Jasa BOS yang hanya mencapai 33,44 persen.

Tabel 1.12
Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024*	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	673.525.499.630,00	597.339.891.568,16	88,69
5.1.02.01	Belanja Barang	136.019.787.123,00	130.127.855.164,00	95,67
5.1.02.02	Belanja Jasa	246.806.235.080,00	234.612.173.231,00	95,06
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	25.211.518.796,00	23.677.566.966,53	93,92
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	135.841.043.221,00	130.143.369.927,00	95,81
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.758.459.750,00	8.614.558.181,00	98,36
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	68.210.747.983,00	22.810.426.047,00	33,44
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.677.707.677,00	47.353.942.051,63	89,89

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2025
*Unaudited BPK



3) Belanja Bunga

Pada tahun 2024, realisasi belanja bunga mencapai 101,42 persen. Belanja bunga ini merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMN Jangka Pendek.

Tabel 1.13
Realisasi Belanja Bunga Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024*	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	6.349.012.047,00	6.439.282.345,00	101,42

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2025
*Unaudited BPK

4) Belanja Hibah

Tahun 2024 realisasi belanja hibah mencapai 100,01 persen dari target yang ditetapkan. Peningkatan belanja hibah terjadi pada tahun 2024 dari tahun 2023 sebesar Rp85.797.138.870,00 menjadi Rp132.495.436.851,00 pada tahun 2024. Hal ini karena tahun 2024 merupakan tahun agenda pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak sehingga terjadi peningkatan jumlah belanja hibah kepada Pemerintah Pusat.

Tabel 1.14
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024*	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5.1.05	Belanja Hibah	132.481.124.769,00	132.495.436.851,00	100,01
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	108.889.565.622,00	108.887.795.122,00	100,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.476.950.000,00	22.516.150.000,00	100,17
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.114.609.147,00	1.091.491.729,00	97,93

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2025
*Unaudited BPK

5) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan belanja yang digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial. Pada tahun 2024 realisasi belanja bantuan sosial mencapai Rp11.191.847.860,00 atau sebesar 99,19 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp11.283.213.000,00.



Tabel 1.15
 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024*	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.283.213.000,00	11.191.847.860,00	99,19
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	7.868.163.000,00	7.807.738.560,00	99,23
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.295.650.000,00	1.292.109.300,00	99,73
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.099.400.000,00	2.087.000.000,00	99,41

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2025
 *Unaudited BPK

D. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Pada tahun 2024 realisasi belanja modal mencapai Rp207.591.794.513,45 atau 80,62 persen. Realisasi terendah ada pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan capaian 59,19 persen dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan capaian 70,51 persen. Rendahnya capaian dikarenakan adanya pekerjaan pembangunan yang tidak terselesaikan pada tahun 2024.

Tabel 1.16
 Realisasi Belanja Modal Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024*	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5.2	BELANJA MODAL	257.490.295.402,00	207.591.794.513,45	80,62
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.466.898.227,00	65.191.800.345,00	86,38
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.486.591.071,00	67.332.004.338,45	70,51
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.641.009.156,00	70.394.263.930,00	89,51
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.895.796.948,00	4.673.725.900,00	59,19

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2025
 *Unaudited BPK

E. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Alokasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp 5.496.906.618,00 dengan realisasi Belanja sebesar Rp 4.701.497.713,00 atau 85,53 persen.

F. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporanlain seperti pengeluaran bagi hasil pendapatan maupun bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota atau bantuan keuangan lainnya. Belanja bagi hasil Kepada Kabupaten/Kota merupakan belanja yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Alokasi belanja transfer Pemerintah Provinsi



Gorontalo sebesar Rp209.604.098.485,00 dengan realisasi sebesar Rp202.203.513.267,00 atau 96,47 persen.

Dari sisi **realisasi belanja** Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2024 1,96 Triliun atau sebesar **95,45 persen** dari Pagu Belanja OPD sebesar 2,06 Triliun, dengan **realisasi fisik mencapai 99,40% atau Sangat Tinggi**.

Tabel 1.17
Alokasi dan Realisasi Belanja OPD Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keu	% Fisik
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	561.203.081.351	556.155.658.188	99,10	100
2	Dinas Kesehatan	112.851.604.173	107.849.094.135	95,57	100
3	RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	169.959.070.667	145.513.816.071	85,62	93
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	148.095.069.776	137.650.033.086	92,95	98,43
5	Dinas Sosial	26.592.018.017	25.511.853.450	95,94	97,30
6	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran	12.088.677.615	11.785.438.679	97,49	100
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.814.017.841	6,419,997,058	82,16	98,82
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	9.930.199.349	9.719.802.849	97,88	100
9	Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	16.961.645.743	16.633.188.181	98,06	100
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	41.417.771.672	41.156.612.578	99,60	100
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	8.684.962.392	8.531.337.314	98,23	100
12	Dinas Ketahanan Pangan	12.188.019.824	12.037.615.911	98,77	100
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35.346.696.116	35.113.418.365	99,34	100
14	Dinas Perhubungan	15.756.883.780	15.056.484.058	95,55	100
15	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika	16.610.608.464	16.439.436.527	98,97	100
16	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	41.063.393.248	40.817.064.768	99,36	100
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.025.902.522	9.908.975.785	98,83	100
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	38.484.456.600	37.452.202.782	97,32	100
19	Dinas Pariwisata	12.688.655.464	12.410.166.521	97,81	100
20	Dinas Pertanian	68.554.327.744	66.696.225.237	97,29	99
21	Biro Hukum	6.872.877.278	6.507.191.151	94,68	100



No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keu	% Fisik
22	Biro Pengadaan	8.250.312.410	7.995.538.589	96,91	100
23	Biro Umum dan Pimpinan Setda	28.850.960.954	24.482.695.875	84,86	91,70
24	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	35.915.702.370	35.409.159.311	98,59	100
25	Biro Organisasi	5.870.911.110	5.678.458.086	96,72	100
26	Badan Penghubung	9.406.267.605	8.808.478.100	93,64	100
27	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	5.056.668.513	4.866.039.208	96,23	100
28	Sekretariat DPRD	116.082.323.230	109.086.856.524	93,97	100
29	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18.353.322.175	17.986.248.127	98,00	100
30	Badan Keuangan Provinsi Gorontalo	303.761.881.351	285.361.070.952	93,94	98
31	Badan Kepegawaian Daerah	10.400.858.222	10.280.554.623	98,84	100
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.792.420.419	12.326.620.864	96,36	100
33	Inspektorat	23.103.771.324	22.700.375.785	98, 25	100
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.117.754.427	9.921.284.881	98,06	100
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	98.201.025.272	97.853.955.752	99,65	100
TOTAL		2.059.354.119.018	1.965.702.952.313	95,45	99,40

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo (Diolah), 2025

1.3.6 Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan umum pembiayaan terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan diarahkan untuk Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Pengeluaran Pembiayaan daerah meliputi : pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah. Penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2023 sebagai sumber penerimaan pembiayaan pada APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp170.905.894.812,55.



Kebijakan Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2024 ditujukan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp 18.217.735.912,00.

Tabel 1.18

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024*	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
6	PEMBIAYAAN DAERAH	153.970.511.569,00	152.688.158.900,55	99,17
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	170.905.894.813,00	170.905.894.812,55	100,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	170.905.894.813,00	170.905.894.812,55	100,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00
6.1.01.03	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	501.721.917,40	501.721.917,40	100,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	153.833.000.058,15	153.833.000.058,15	100,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	16.571.172.837,45	16.571.172.837,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	16.935.383.244,00	18.217.735.912,00	107,57

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2025

*Unaudited BPK

1.3.7 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM atau Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Kebutuhan dasar warga negara dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM adalah barang dan/atau jasa engan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

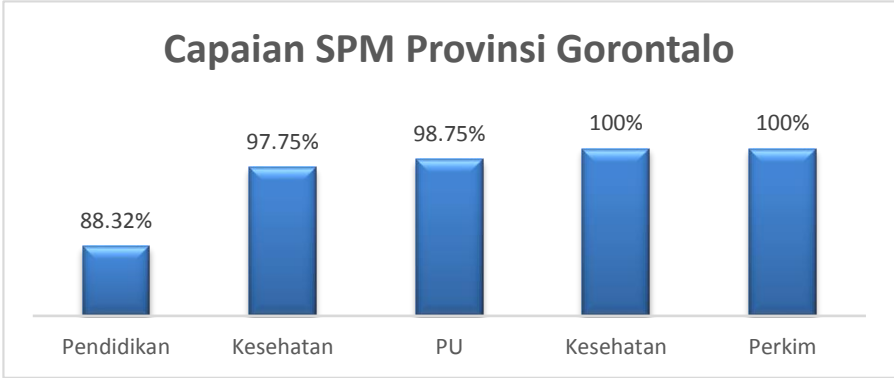
Terdapat 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu (1) pendidikan; 2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4)perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial.

Kondisi capaian SPM Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah SPM kesehatan dan permukiman telah mencapai 100 persen sementara yang terendah capaiannya adalah SPM Pendidikan 88,32 persen. 2 SPM lainnya yaitu SPM sosial dan Pekerjaan Umum masing-masing adalah 97,75 persen dan 98,75 persen.



Grafik 1.1

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Provinsi Gorontalo 2024



Sumber : Dashboard SPM (2025)

1. Pendidikan

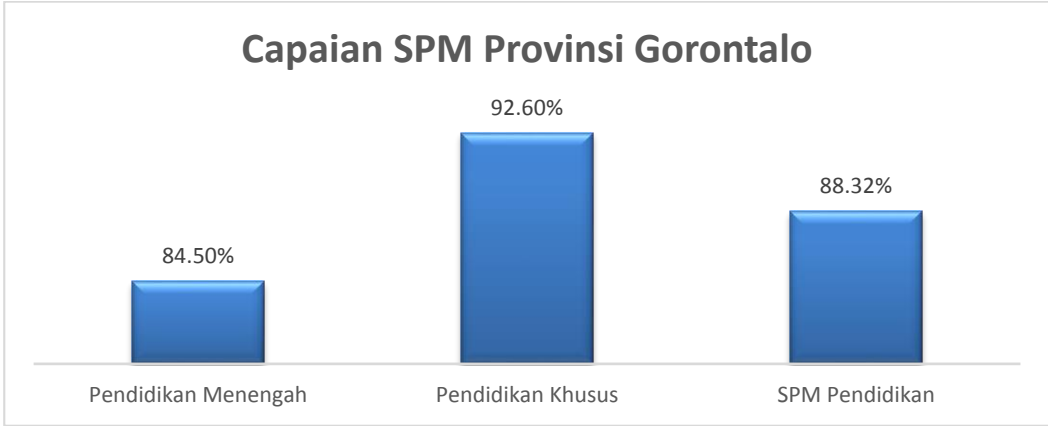
Jenis pelayanan dasar pada urusan pendidikan pada tingkat provinsi adalah pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Adapun penerima pelayanan dasar adalah warga negara berusia 16-18 tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah. Sementara untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus adalah warga negara berusia 4-18 tahun.

Untuk pembiayaan SPM pendidikan Provinsi Gorontalo tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 162.081.837.881 atau 22,88 persen dari total keseluruhan anggaran pendidikan yang mencapai Rp. 561.203.081,351. Anggaran SPM ini Sebagian besar dialokasikan untuk pengelolaan BOS sekolah yaitu sejumlah 61,48 persen.

Namun berdasarkan data, belum tercapainya target 100 persen untuk SPM pendidikan ini disebabkan oleh rendahnya capaian SPM pendidikan menengah yaitu sebesar 84,05 persen. Sementara capaian SPM untuk pendidikan khusus mencapai 92,60 persen.

Grafik 1.2

Capaian SPM Pendidikan Provinsi Gorontalo Tahun 2024



Sumber : Dashboard SPM 2025

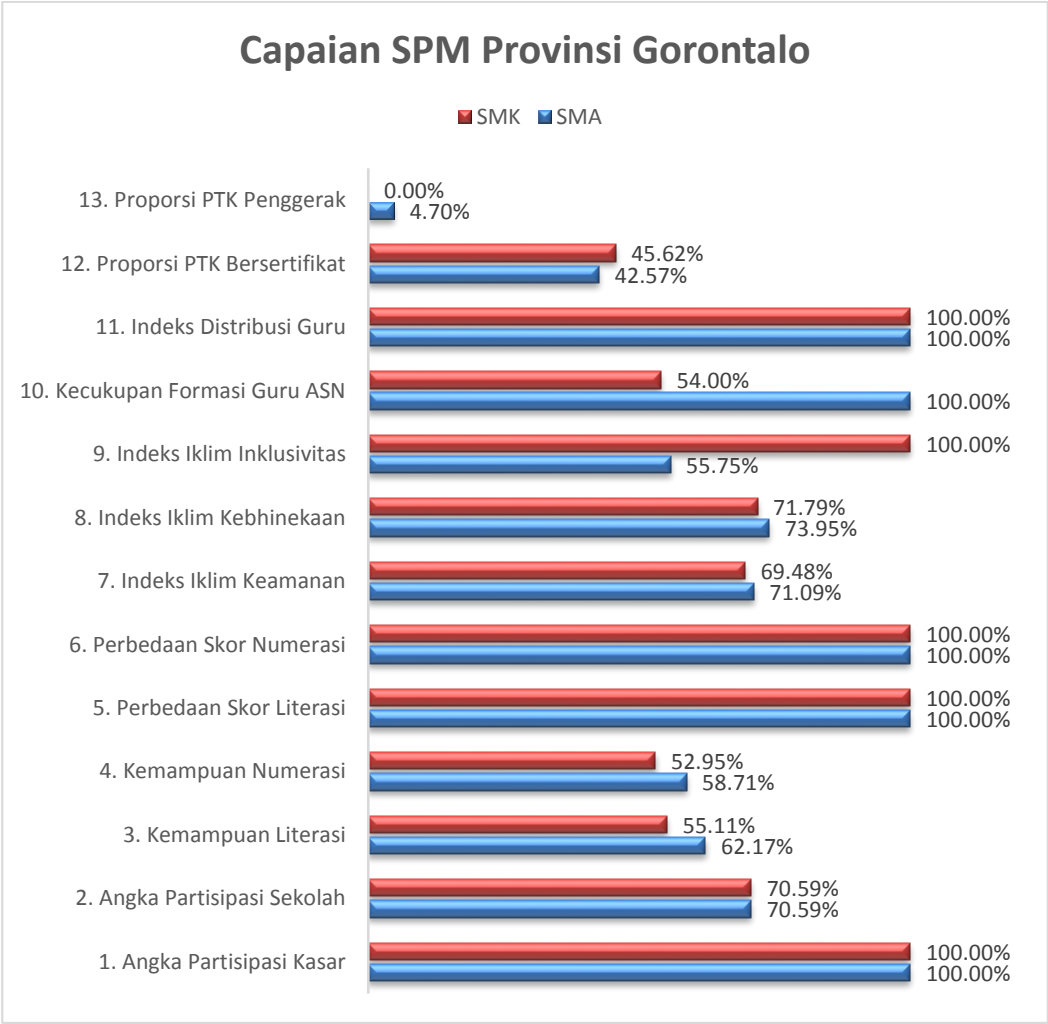
Jika dilihat berdasarkan aspek penyusun SPM yaitu aspek jumlah penerima layanan dan aspek mutu layanan, capaian SPM pendidikan menengah untuk aspek jumlah penerima layanan hanya mencapai 87.12%. Sedangkan untuk pendidikan khusus telah mencapai skor maksimal.



Sebaliknya pada aspek layanan mutu, capaian SPM untuk pendidikan menengah mencapai 71,74 persen, lebih tinggi dari capaian mutu layanan untuk pendidikan khusus yang hanya sebesar 63,01 persen. Bila dilihat pada satuan pendidikan menengah, capaian SMA lebih baik dari pada SMK yaitu 72,27, sementara SMK sebesar 71,22 persen.

Indikator mutu layanan SPM untuk SMA terdapat sebanyak 13 indikator dan untuk SMK sebanyak 15 indikator (ada penambahan indikator tingkat penyerapan lulusan SMK dan indikator kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK). Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA dan SMK adalah sebesar 70,59 persen. Untuk Indikator kemampuan literasi dan numerasi, capaian SMA lebih baik dibandingkan SMK. Demikian pula dengan indeks Iklim keamanan dan indeks kebhinekaan. Kecukupan formasi guru SMA untuk kelompok SMA telah mencapai 100 persen namun SMK baru sebesar 54 persen. Untuk dua indikator tambahan kelompok SMK, menunjukkan capaian untuk indikator tingkat penyerapan lulusan SMK baru mencapai 73.16%. Hal yang relative sama juga terlihat pada capaian indikator kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK yang baru mencapai 75.55%.

Grafik 1.3
Perbandingan Capaian Mutu Layanan Sekolah Menengah.



Sumber : Dashboard SPM 2025

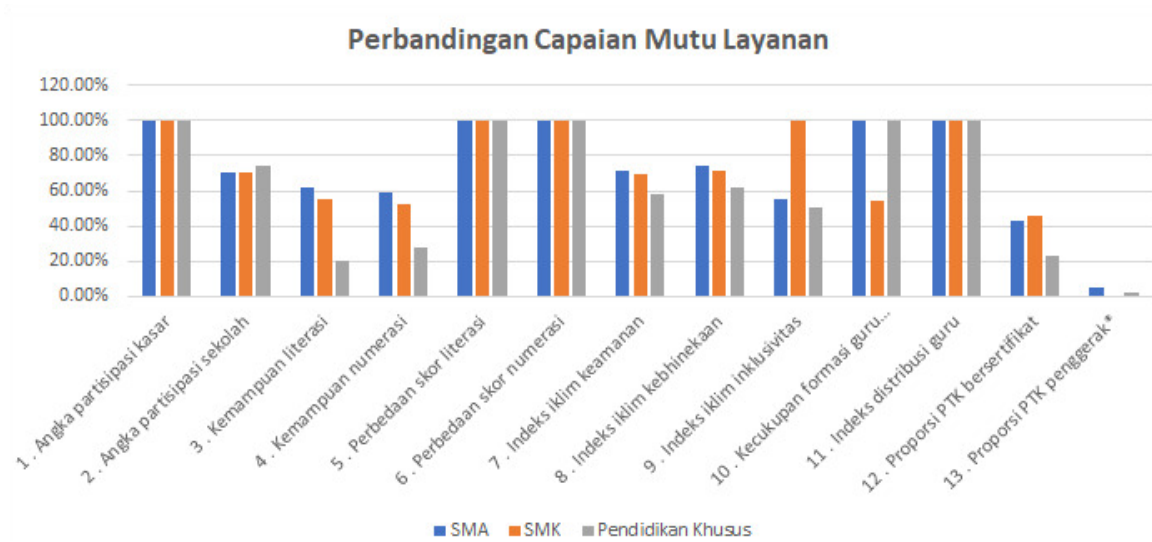


Pendidikan Khusus

Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental dan/atau sosial. Penerima pelayanan dasar SPM pendidikan pada pendidikan khusus merupakan peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4-18 tahun. Dari 13 komponen yang mengukur capaian mutu layanan, terdapat 4 aspek yang memiliki capaian dibawah 30 persen yaitu kemampuan literasi dan numerasi, proporsi PTK bersertifikat dan proporsi PTK penggerak. Sementara itu, 2 aspek yang memiliki capaian dibawah 60 persen yaitu iklim keamanan dan iklim inklusivitas.

Grafik 1.4

Capaian Mutu Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus



Sumber : Dashboard SPM (2024)

2. Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota terdapat 5 jenis layanan dasar bidang sosial untuk provinsi yaitu : (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantardi dalam panti sosial, (2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti sosial, (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti sosial; (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti sosial; dan (5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.

Capaian SPM bidang sosial masih sebesar 97,75 persen. Belum maksimalnya capaian SPM ini disebabkan oleh capaian layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti sosial baru mencapai 92,73 persen. Dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi baru mencapai 96 persen. Sementara untuk 3 layanan lainnya sudah mencapai 100 persen.



Grafik 1.5

Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024



Sumber : Dashboard SPM (2024)

Tidak maksimalnya capaian SPM di dua komponen disebabkan adanya beberapa indikator dalam dimensi mutu layanan yang tidak terpenuhi/tidak dilaksanakan.

Untuk aspek rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, dari 11 indikator mutu layanan yang dinilai, sebanyak 4 indikator yang tidak terpenuhi/tidak dilaksanakan yakni : (1) Penyediaan alat bantu; (2) Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti; (3) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK; (4) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga.

Untuk aspek perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi, dari 5 indikator mutu layanan yang dinilai, sebanyak 1 indikator yang tidak terpenuhi/tidak dilaksanakan yakni Pelayanan dukungan Psikososial.

Anggaran bidang sosial pada APBD 2024 sejumlah Rp. 26.592.018.017. Alokasi untuk SPM sebesar Rp. 4.053.573.860 atau 15,24 persen.

3. Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 6 tahun 2024 mengatur tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. DalamPermenkes tersebut disebutkan bahwa jenis pelayanan dasar SPM kesehatan Provnsi terdiri atas 2 layanan yaitu (1) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi ; dan (2) pelayanan kesehatan bagipenduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.

Pelayanan dasar ini dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dan dilaksanakan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Capaian SPM kesehatan untuk tahun 2024 telah mencapai 100 persen.

Alokasi anggaran bidang kesehatan Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 sebesar Rp. 102.758.790,653. Adapun penyelenggaraan SPM sebesar Rp. 1.759.121,150 atau 1,71 persen dari total anggaran kesehatan.

4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Standar teknis pelayanan minimal bidang Pekerjaan umum dan bidang Perumahan Rakyat diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 13 tahun 2023. SPM bidang Pekerjaan Umum provinsi terdiri atas ; (1) pemenuhan kebutuhan air minum untuk sub bidang air minum dan (2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub bidang air limbah. Adapun jenis pelayanan dasar SPM tersebut adalah (1) pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan (2) penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sementara itu, jenis layanan dasar untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat yaitu (1) penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan (2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Capaian SPM Pekerjaan umum adalah sebesar 98,75 persen. Belum maksimalnya capaian ini dipengaruhi oleh layanan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota yang baru mencapai 97,50 persen. Hal ini disebabkan oleh indikator penilaian pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPALD Kabupaten/Kota, tidak dilaksanakan.

Anggaran Pekerjaan umum untuk tahun 2024 adalah Rp. 138.778.049,553. Alokasi anggaran SPM sebesar Rp. 46.227.025,150. Sementara untuk total Anggaran perkim sebesar Rp. 5.017.613,401. Adapun anggaran SPM bidang perumahan rakyat sebesar Rp. 967.000.600 atau 19,27 persen.

5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah menjadi salah satu layanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dalam Permendagri Nomor 121 tahun 2018 mengenai standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman ketertiban umum telah diatur bahwa mutu pelayanan dasar meliputi (1) Standar operasional prosedur Satpol PP; (2) Standar sarana prasarana Satpol PP ; (3) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan (4) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakkan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi (1) pelayanan kerugian materil; dan (2) pelayanan pengobatan.

Terdapat 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan untuk penyelenggaraan SPM Trantibum di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 yaitu Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dan kegiatan penegakkan peraturan daerah provinsi dan perauran gubernur.

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana utama SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum daerah memiliki anggaran sebesar Rp 5.172.881.235 Adapun alokasi untuk kedua kegiatan tersebut sebesar Rp. 5.075.438.686.



Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan besaran APBD sebesar 2,061 Trilyun sesuai Peraturan Gubernur No.23 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD 2024, bertambah 89,3 Milyar rupiah jika dibandingkan dengan pagu APBD 2024 sebesar 1,972 Trilyun sesuai Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 tentang APBD 2024. Total defisit yang ditargetkan pada Perubahan APBD 2024 sebesar 73,6 Milyar rupiah.

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

2.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah meliputi kebijakan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Beberapa Arah Kebijakan Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

- Dihitung berdasarkan realisasi dan asumsi-asumsi yang terjadi pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dijelaskan pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 maka target PAD mengalami perubahan dari APBD induk yaitu naik sebesar Rp13.450.278.428 atau 2,65%.
- Target PAD pada komponen Retribusi Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp13.300.912.900 atau 36,74% dari yang semula pada APBD Induk Tahun 2024 sebesar Rp35.895.605.572 menjadi sebesar Rp49.085.884.000 Kenaikan retribusi daerah ini adalah karena adanya kenaikan target penerimaan retribusi pelayanan Kesehatan BLUD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo sebesar Rp13.450.912.900 dan adanya penyesuaian kode rekening pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang disesuaikan pada kode rekening Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp150.000.000

b. Kebijakan Pendapatan Transfer

- Pendapatan transfer terdiri atas Dana Bagi Hasil (Pajak dan bukan pajak), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang penerimaannya sangat tergantung pada penerimaan APBN atas penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak dan bukan pajak, maka pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 belum mengalami perubahan.



c. Kebijakan Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Perubahan KUA tahun 2024 ini mengalami kenaikan yaitu pada rekening pendapatan hibah, Dimana Hibah Program ReadSi yang berakhir tahun 2024 ini telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 187 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Hibah Kepada Daerah Tahun Anggaran 2024 Tahap 1, naik sebesar 504.794.000,00 atau 84,37% dari yang semula pada APBD Induk Tahun 2024 sebesar Rp598.344.000,00 menjadi sebesar Rp1.103.138.000,0

Strategi yang diambil Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka Peningkatan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan masyarakat yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan publik yang ditawarkan ke masyarakat
2. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum `yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD
3. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada Pemerintah Pusat dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai;
4. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi
5. Memberikan keringanan bagi wajib pajak melalui pemberian insentif pembebasan BBN-KB II dan denda pajak dan pembebasan pajak progresif;
6. Melakukan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan untuk menjamin agar semua pendapatan dapat terkumpul dengan baik
7. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, Jasa Raharja dan POLRI
8. Mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak yang dapat di sharing dengan daerah seperti PPh, BPHTB, PBB sehingga bagian bagi hasil pajak daerah akan lebih tinggi
9. Memberikan dukungan dana yang lebih memadai dalam upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah khususnya pungutan pajak dan retribusi daerah, berupa pemberian biaya operasional dan insentif
10. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan dinas/instansi terkait pada Pemerintah Kabupaten/Kota
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain peningkatan peran pemerintah daerah dalam bidang perijinan
12. Melakukan kerjasama dengan investor dengan tujuan diperoleh multiplier kearah peningkatan pendapatan masyarakat sebagai obyek dan subyek pendapatan daerah;



13. Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah;
14. Melakukan optimalisasi pemanfaatan BMD melalui proses sewa

2.1.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

a. Belanja Operasi

Pada Perubahan KUA TA. 2024, belanja operasi mengalami kenaikan sebesar Rp56.409.635.703,00 atau 3,68% yang semula pada APBD TA. 2024 sebesar Rp1.533.845.929.581,00 menjadi sebesar Rp1.590.255.565.284

b. Belanja Modal

Belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp64.658.331.987,00 atau 33,78% yang semula pada APBD TA. 2024 sebesar Rp191.425.047.880,00 menjadi sebesar Rp256.083.379.867

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga, mengalami penurunan sebesar Rp36.176.970.864,00 atau 86,81% yang semula pada APBD TA. 2024 sebesar Rp41.673.877.482,00 menjadi sebesar Rp5.496.906.618,00. Kebijakan belanja tidak terduga direncanakan akan diarahkan/terutama untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan didalamnya ada sisa Pinjaman PEN 2021 yang harus disetorkan ke Kas PT. SMI sebesar Rp414.605.000,00

d. Belanja Transfer

Untuk belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil kepada pemerintah Kabupaten/Kota dan belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, di dalam Perubahan KUA TA. 2024 ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.725.000.000,00 atau 1,33%. Kenaikan ini terjadi pada komponen belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebesar Rp2.725.000.000,00 sehingga untuk belanja transfer semula sebesar Rp205.660.292.820,00 menjadi Rp208.385.292.820,00 dari pagu yang ditetapkan pada APBD induk TA. 2024 sebesar Rp205.660.292.820

Strategi pelaksanaan target Belanja Daaerah dilaksanakan dengan :

1. Pemulihan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi pemasaran produk usaha mikro, Intervensi pada UMKM untuk dapat meningkatkan kualitas produknya, serta pengembangan potensi sektor pariwisata
2. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari pendapatan khusus (Dana Alokasi Khusus, DAU SG, DBH Sawit) untuk bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Irigasi dan Jalan



3. Penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan sistem ketahanan bencana melalui penyiapan tanggap bencana mandiri di Masyarakat
5. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
6. Anggaran kesehatan dialokasikan 10% untuk penguatan program promotive dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Optimalisasi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai universal health coverage, surveillance penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem Kesehatan terintegrasi;
7. Pemutakhiran secara berkala terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dan data masyarakat berpenghasilan rendah
8. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta Upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya
9. Penguatan ketahanan pangan melalui urban farming dan diversifikasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;
10. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
11. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan public melalui e-Government untuk mengurangi intensitas pertemuan tatap muka;
12. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip money follow program
13. Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada beberapa SKPD yang telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo

2.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Memperhatikan kebijakan pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam penetapan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024, maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan daerah dibandingkan dengan belanja daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang semula dianggarkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran



2024 sebesar Rp97.245.604.887,00, maka pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp170.905.894.812,69 berdasarkan hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA. 2023

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Perubahan KUA tahun 2024 ini, kebijakan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu masih sebesar Rp16.935.383.244,00 yaitu pembayaran pokok utang Pinjaman Program PEN Tahun 2021

2.2 Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Tahun 2024

Tabel 2.1

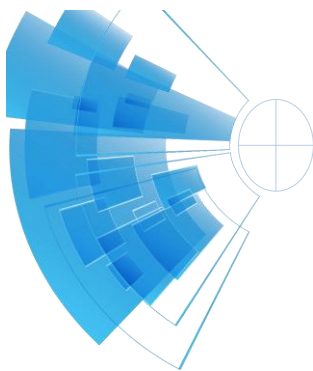
Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

Kode	Uraian	Perda No. 5 Tahun 2023 tentang APBD 2024	Pergub No. 23 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD 2024
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	503.192.709.120	516.532.987.548
4.1.01	Pajak Daerah	437.626.291.107	437.626.291.107
4.1.02	Retribusi Daerah	35.895.605.572	49.085.884.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.219.035.031	10.219.035.031
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	19.451.777.410	19.451.777.410
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.388.003.873.000	1.389.819.035.970
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.388.003.873.000	1.389.819.035.970
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.098.344.000	1.603.138.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	598.344.000	1.103.138.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	500.000.000	500.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.892.294.926.126	1.907.955.161.518
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI	1.533.845.929.581	1.589.334.372.582
5.1.01	Belanja Pegawai	772.951.235.115	765.695.523.136
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	617.562.396.179	673.525.499.630
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.012.047	6.349.012.047
5.1.05	Belanja Hibah	129.715.636.240	132.481.124.769,
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.267.650.000	11.283.213.000
5.2	BELANJA MODAL	191.425.047.880	257.490.295.402
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.741.312.400	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.542.050.178	75.466.898.227
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.248.345.202	95.486.591.071



Kode	Uraian	Perda No. 5 Tahun 2023 tentang APBD 2024	Pergub No. 23 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD 2024
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.609.699.100	78.641.009.156
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	233.641.000	7.895.796.948
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000	0.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	41.673.877.482	5.496.906.618
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	41.673.877.482	5.496.906.618
5.4	BELANJA TRANSFER	205.660.292.820	209.604.098.485
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	205.410.292.820	206.629.098.485
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	250.000.000	2.975.000.000
	Jumlah Belanja	1.972.605.147.763	2.061.925.673.087
	Total Surplus (Defisit)	-80.310.221.643	-153.970.511.569
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	97.245.604.887	170.905.894.813
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	97.245.604.887	170.905.894.813
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.935.383.244	16.935.383.244
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.935.383.244	16.935.383.244
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	16.935.383.244	16.935.383.244
	Pembiayaan Netto	80.310.221.643	153.970.511.569
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0.00	0.00

Sumber : sipd-ri.kemendagri.go.id



Bab III

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

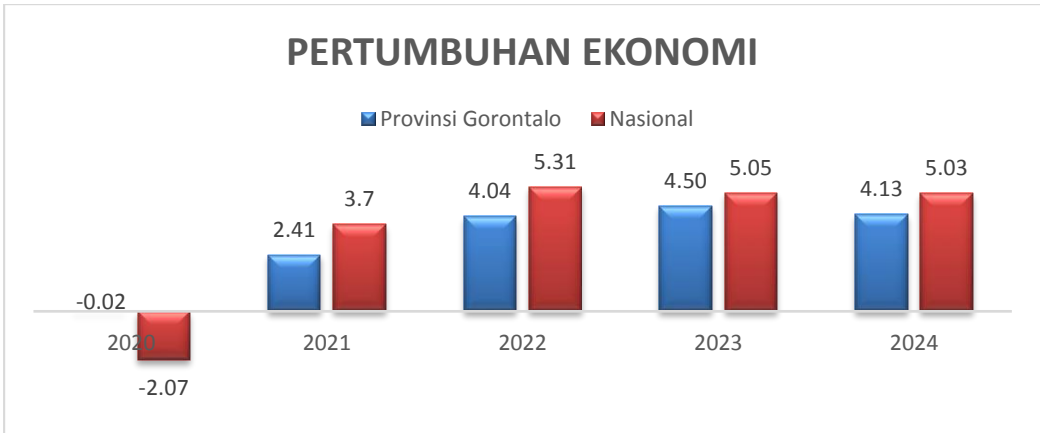
3.1. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

3.1.1. Capaian Kinerja Makro Daerah

1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Gorontalo tahun 2024 tumbuh sebesar 4,13 persen, sedikit mengalami pelambatan jika dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 4,50 persen. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 7,48 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,42 persen; serta Konstruksi sebesar 6,41 persen.

Grafik 3.1
 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Kinerja perekonomian Gorontalo ditunjang oleh beberapa kebijakan strategis dalam upaya mendorong ekonomi baik dari sektor pertanian, perikanan, kelautan, industri, pengembangan sektor UMKM dan pariwisata dan lain sebagainya. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2024 mencapai 32.949,62 Milyar Rupiah atau meningkat 4,1 persen dibanding tahun sebelumnya. PDRB Provinsi Gorontalo memberikan kontribusi terhadap Sulampua sebesar 2,52 persen dan menyumbang sebesar 0,25 persen dari total PDRB Nasional yang mencapai 12.920,3 Triliun Rupiah.

Laju pertumbuhan tertinggi bersumber dari kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pertumbuhan mencapai 7,48 persen, diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,42 persen, serta Konstruksi sebesar 6,41 persen.

Struktur PDRB Gorontalo menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 37,29 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,22 persen; serta



Konstruksi sebesar 11,34 persen. Sedangkan kontribusi sektor Industri Pengolahan hanya berkontribusi sebesar 4,39 persen mengalami penurunan dibanding tahun 2023 sebesar 4,42 persen.

Tabel 3.1
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha tahun 2022-2024 (Milyar Rupiah),
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB tahun 2024

Lapangan Usaha		PDRB ADHB			PDRB ADHK			Laju Pertumbuhan 2024**	Distribusi PDRB 2024**
		2022	2023*	2024**	2022	2023*	2024**		
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.073,20	19.386,98	20.344,28	10.907,95	11.365,50	11.719,48	3,11	37,29
B	Pertambangan dan Penggalian	519,28	562,13	608,56	353,96	375,69	399,12	6,24	1,12
C	Industri Pengolahan	2.170,69	2.273,93	2.396,85	1.332,27	1.338,40	1.381,62	3,23	4,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	23,96	25,65	26,07	27,24	28,95	29,48	1,83	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah & Daur Ulang	27,76	29,20	31,00	18,49	19,18	19,91	3,82	0,06
F	Konstruksi	5.189,74	5.717,04	6.186,44	3.274,17	3.464,07	3.686,20	6,41	11,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.220,17	7.074,66	7.757,16	3.757,01	4.128,18	4.437,00	7,48	14,22
H	Transportasi dan Pergudangan	2.668,65	3.040,11	3.296,35	1.693,94	1.798,58	1.887,77	4,96	6,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.076,17	1.156,14	1.250,17	720,53	761,86	810,81	6,42	2,29
J	Informasi dan Komunikasi	1.286,08	1.370,73	1.463,12	1.095,92	1.140,60	1.193,96	4,68	2,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.192,18	2.070,44	2.123,19	1.302,73	1.206,46	1.216,34	0,82	3,89
L	Real Estate	820,71	820,26	862,84	566,46	557,15	576,27	3,43	1,58
M, N	Jasa Perusahaan	42,80	42,33	42,98	27,66	26,51	26,80	1,10	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2.802,94	2.985,00	3.139,57	2.165,30	2.244,67	2.319,03	3,31	5,75
P	Jasa Pendidikan	2.124,00	2.249,90	2.276,92	1.415,29	1.474,89	1.455,94	-1,29	4,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.711,67	1.896,89	2.049,84	1.174,97	1.238,43	1.301,69	5,11	3,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	616,29	665,35	699,15	448,33	474,67	488,20	2,85	1,28
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		47.566,29	51.366,74	54.554,50	30.282,21	31.643,79	32.949,62	4,13	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Gorontalo yaitu 62,07 persen. Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB yaitu komponen Impor barang dan jasa sebesar 37,37 persen. Sedangkan aktivitas ekspor barang dan jasa berkontribusi sebesar 28,52 persen.

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo tahun 2024 komponen pengeluaran konsumsi Rumah Tangga merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,51 persen, dan komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 2,13 persen.

Tabel 3.2
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran tahun 2022-2024 (Milyar Rupiah),
Sumber Pertumbuhan dan Distribusi PDRB tahun 2024

Komponen		PDRB ADHB			PDRB ADHK			Sumber Pertumbuhan 2024**	Distribusi PDRB 2024**
		2022	2023*	2024**	2022	2023*	2024**		
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	29.262,76	31.731,73	33.863,07	18.598,10	19.393,35	20.188,16	2,51	62,07
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	349,11	381,91	429,72	231,69	243,59	266,10	0,07	0,79
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.902,71	9.207,63	9.467,29	5.417,75	5.446,55	5.466,82	0,06	17,35
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	13.224,42	14.206,44	14.893,44	8.873,49	9.187,36	9.516,56	1,04	27,30
5	Perubahan Inventori	685,41	738,72	727,47	327,07	338,25	339,11	0,00	1,33
6	Ekspor Barang dan Jasa	12.792,07	13.843,62	15.561,66	7.259,78	7.737,12	8.409,63	2,13	28,52



7	Impor Barang dan Jasa	17.650,20	18.743,33	20.388,15	10.425,67	10.702,44	11.236,76	1,69	37,37
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		47.566,29	51.366,74	54.554,50	30.282,21	31.643,79	32.949,62	4,13	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

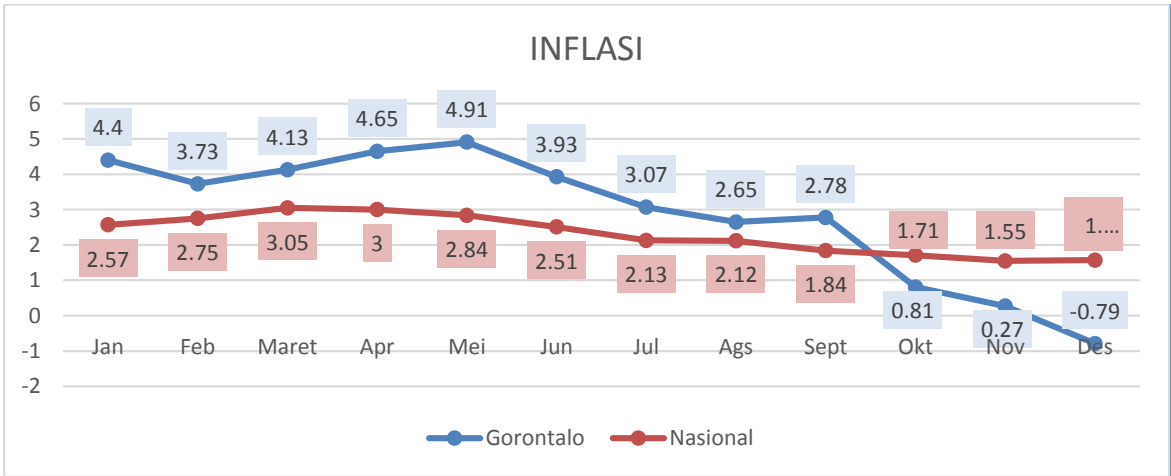
Aktivitas ekonomi Gorontalo menunjukkan kinerja positif memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB perkapita Provinsi Gorontalo. PDRB perkapita Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar Rp. 44,432 juta atau US\$ 2.803,48 meningkat dibanding tahun 2023 sebesar Rp. 42,34 juta. Namun demikian, hasil perhitungan PDRB perkapita tidak dapat mengukur tingkat kesejahteraan penduduk secara utuh, karena belum menggambarkan pemerataan pendapatan dan pola pengeluaran penduduk yang beragam. PDRB perkapita hanya menunjukkan rata-rata tingkat pendapatan suatu masyarakat. Upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dilaksanakan dalam mewujudkan prioritas pembangunan melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor strategis dan potensial, penguatan UMKM dan kapasitas SDM tenaga kerja.

2. Inflasi

Indeks harga konsumen merupakan ukuran biaya keseluruhan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Indeks harga konsumen digunakan untuk mengamati perubahan dalam biaya hidup sepanjang waktu. Indeks harga Konsumen merupakan persentase yang digunakan untuk menganalisis tingkat atau laju inflasi. Indeks harga konsumen juga merupakan indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur inflasi.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2024 secara umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Gorontalo, pada Desember 2024 terjadi deflasi (*y-on-y*) sebesar 0,79 persen, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,45 pada Desember 2023 menjadi 106,60 pada Desember 2024.

Grafik 3.2
Tingkat Inflasi *Year on Year (y-o-y)* Nasional dan Provinsi Gorontalo,
Januari – Desember 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Deflasi *y-on-y* Provinsi Gorontalo terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks pada empat kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,43 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,93 persen; kelompok transportasi sebesar 0,78 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,79 persen. Enam kelompok pengeluaran mengalami inflasi *y-on-y* yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,79 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,37 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,02 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,54 persen;

Bila dilihat menurut wilayah tempat tinggal, pada Maret 2024 dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 3,03 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 10,99 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,57 persen menjadi 4,99 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 22,97 persen menjadi 21,62 persen. Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp473.006,- per kapita per bulan dan pada September 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp487.578,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp14.572,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 3,08 persen. Pada September 2024, GKM untuk wilayah perkotaan tercatat sebesar Rp372.700,- dan perdesaan sebesar Rp385.233,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan di wilayah perdesaan kurang mengandung kalori dibandingkan pola konsumsi di perkotaan, sehingga untuk mendapatkan kalori yang standar (2100 kkal/hari) diperlukan harga yang lebih mahal.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar melihat berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang disajikan dalam bentuk indeks. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2023-Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar 2,879 turun 0,039 poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 2,918. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk yang berada jauh garis kemiskinan tahun 2024 cenderung lebih sedikit dan terus berkurang dibandingkan tahun 2023. Sementara Indeks Keparahannya Kemiskinan Maret 2024 tercatat sebesar 0,776 naik 0,036 poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 0,740.

Jika dibandingkan menurut wilayah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada September 2024 nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan tercatat sebesar 0,395 sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 3,957. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) di perkotaan tercatat sebesar 0,061, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 1,041.

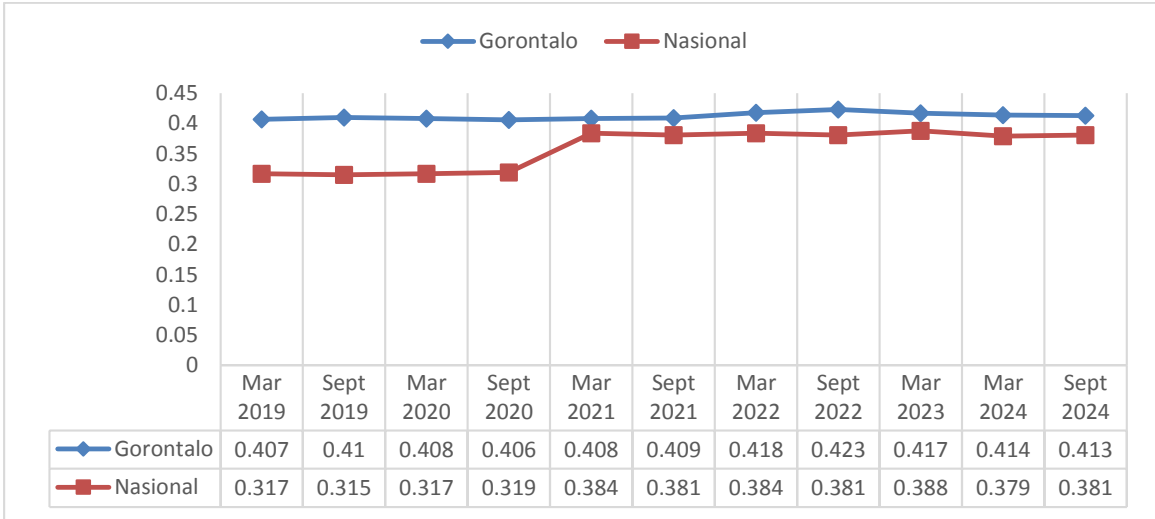
4. Indeks Gini

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Angka Gini Rasio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara nilai 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio sama dengan 0 (nol) menunjukkan ketimpangan pendapatan merata sempurna artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya. Sedang bila nilai Gini Rasio sama dengan 1 (satu) menunjukkan pendapatan timpang sempurna atau tingkat kesenjangan sebaran yang tinggi (kesenjangan sempurna).

Nilai Gini Ratio Gorontalo selama periode Maret 2019 - September 2024 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Ratio bernilai 0,413. Angka ini turun sebesar 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,414.



Grafik 3.4
Indeks Gini Provinsi Gorontalo dan Nasional
periode Maret 2019- September 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Tabel 3.3
Distribusi Pengeluaran Penduduk Gorontalo (persen)
Maret 2023, Maret 2024 dan September 2024

Wilayah/ Periode	Penduduk 40 persen Terbawah	Penduduk 40 persen Menengah	Penduduk 20 persen Teratas	Jumlah
Perkotaan				
Maret 2023	16,75	35,50	47,75	100
Maret 2024	17,34	35,07	47,59	100
September 2024	17,71	33,89	48,28	100
Perdesaan				
Maret 2023	16,64	35,58	47,78	100
Maret 2024	16,82	34,36	48,82	100
September 2024	16,63	36,26	47,11	100
Perkotaan + Perdesaan				
Maret 2023	15,87	35,48	48,65	100
Maret 2024	16,44	34,96	48,60	100
September 2024	16,57	35,09	48,35	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada September 2024 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perkotaan sebesar 17,71 persen dari total konsumsi penduduk perkotaan Gorontalo. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perdesaan tercatat sebesar 16,63 persen dari total konsumsi penduduk perdesaan Gorontalo. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan share konsumsi pada kelompok ini di wilayah perkotaan sedangkan penurunan share konsumsi di wilayah perdesaan dibandingkan Maret 2024. Menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan yang terjadi di wilayah perkotaan Gorontalo termasuk rendah sedangkan wilayah perdesaan tergolong sedang.

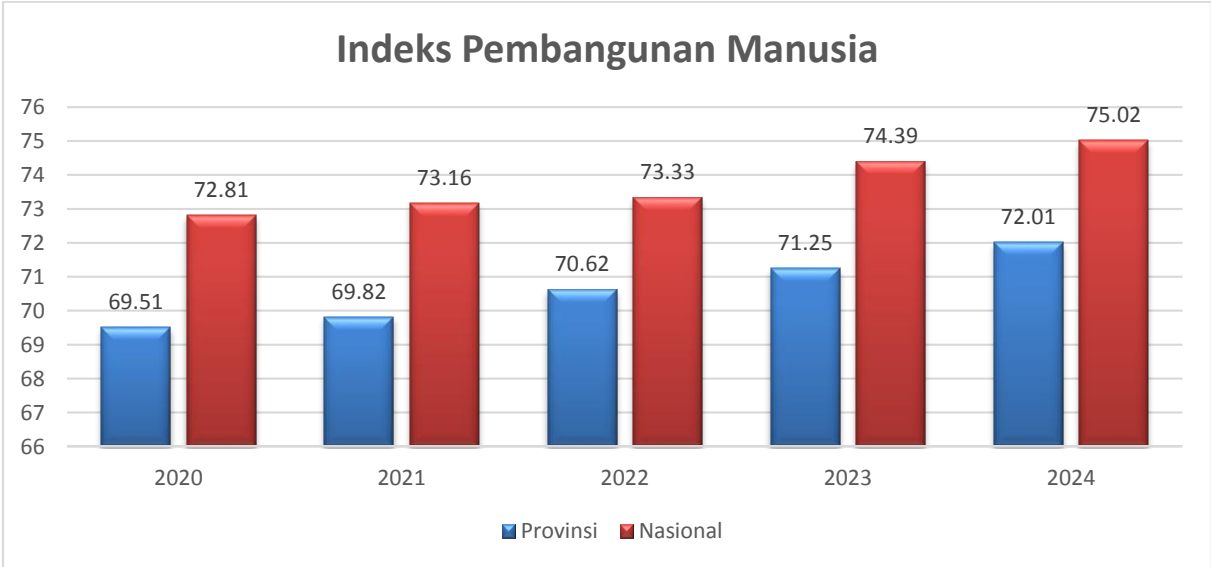


Secara keseluruhan pada September 2024, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah sebesar 16,57 persen dari pengeluaran seluruh penduduk yang ada di Gorontalo. Angka ini berarti Provinsi Gorontalo ada pada kategori ketimpangan sedang. Jika dibandingkan dengan Maret 2024, terjadi peningkatan konsumsi pada kelompok penduduk 40 persen terbawah sebesar 0,13 persen poin dari sebelumnya sebesar 16,44 persen. Demikian pula jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2023, konsumsi pada kelompok penduduk 40 persen terbawah naik 0,70 persen poin dari angka 15,87 persen di bulan Maret 2023. Perubahan persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen ke bawah pada September 2024 menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan di Provinsi Gorontalo semakin membaik.

5. Indeks Pembangunan Manusia

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo terus mengalami kemajuan. Selama 2020–2024, IPM Provinsi Gorontalo rata-rata meningkat sebesar 0,89 persen per tahun, dari 69,51 pada tahun 2020 menjadi 72,01 pada tahun 2024.

Grafik 3.5
 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo dan Nasional
 Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dalam kurun waktu tersebut IPM Provinsi Gorontalo rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan tersebut relatif lebih cepat dibandingkan rata-rata IPM Indonesia yang tumbuh sebesar 0,75 persen per tahun. Pertumbuhan IPM Gorontalo pada periode 2023-2024, yaitu mencapai 1,07 persen. Sementara pada IPM Indonesia, pertumbuhan pada periode 2023-2024 sebesar 0,85 persen. Meskipun secara rata-rata pertumbuhan IPM Gorontalo cenderung lebih cepat dibandingkan nasional, namun secara level, IPM Gorontalo masih di bawah IPM Indonesia. Gorontalo masuk ke dalam kategori IPM “TINGGI” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) bersama dengan 30 provinsi lainnya di Indonesia.

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 4,25 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 2,35 persen.



Sementara itu, pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sedikit melambat dari 0,40 persen menjadi 0,33 persen. Demikian juga pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) melambat dari 0,30 persen menjadi 0,08 persen.

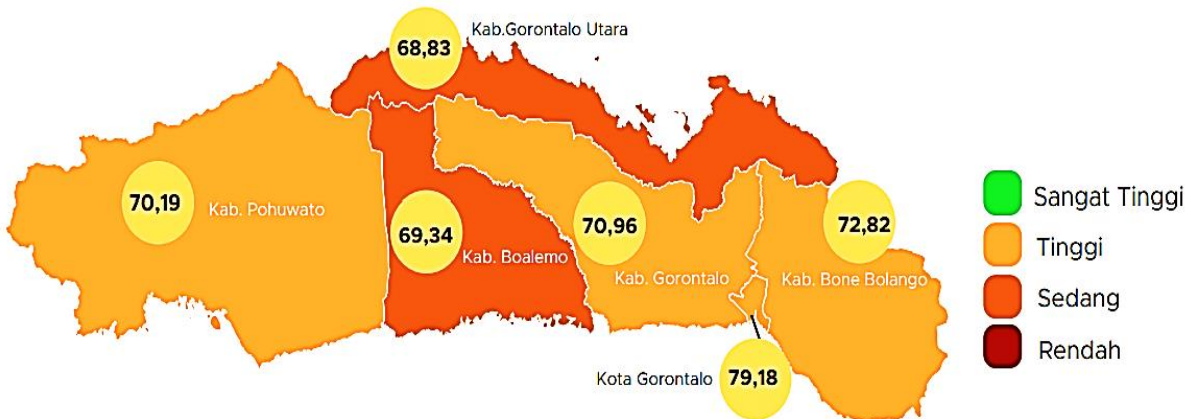
Tabel 3.4
Perkembangan Dimensi Penyusun IPM Tahun 2020-2024

Dimensi/ Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
GORONTALO						
Umur Panjang dan hidup sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	69,83	69,93	70,22	70,50	70,73
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,08	13,11	13,12	13,16	13,17
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,82	7,90	8,02	8,10	8,29
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Rill per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah		10.157	10.687	11.069	11.539
NASIONAL						
Umur Panjang dan hidup sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,37	73,46	73,70	73,93	74,15
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Rill per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tahun 2024, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota cukup bervariasi. IPM pada level Kabupaten/Kota berkisar antara 68,83 (Kabupaten Gorontalo Utara) hingga 79,18 (Kota Gorontalo). Pada tahun 2024, status pembangunan manusia di Kabupaten Pohuwato meningkat dari “sedang” menjadi “tinggi”, dengan capaian IPM sebesar 70,19. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah wilayah berstatus pembangunan manusia “tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 4, berstatus “sedang” ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 2.

Gambar 3.1
 Capaian dan Status Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Grafik 3.5
 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2021 – 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

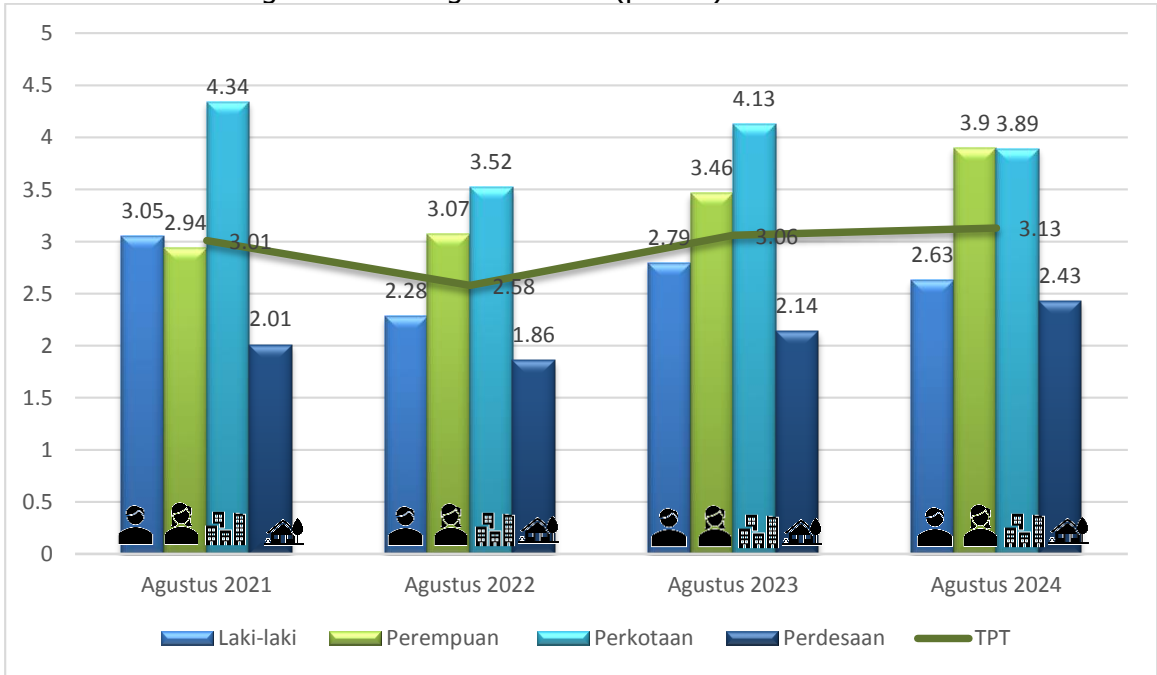
Berdasarkan data Sakernas pada Agustus 2024, jumlah angkatan kerja di Provinsi Gorontalo tercatat sebanyak 652.588 orang, mengalami kenaikan sebesar 1.163 orang dibandingkan Agustus 2023. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan dalam jumlah penduduk yang masuk ke dalam usia produktif dan siap bekerja. Namun, meskipun jumlah angkatan kerja meningkat, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Gorontalo mengalami penurunan sebesar 0,84 persen poin dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini menandakan bahwa meskipun lebih banyak penduduk yang termasuk angkatan kerja, tidak semua dari mereka aktif atau berpartisipasi dalam pasar kerja.



Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 juga mengalami peningkatan mencapai 632.184 orang atau bertambah 1.663 orang dari tahun sebelumnya. Sektor yang mengalami peningkatan terbesar adalah Informasi Komunikasi, Jasa Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan dengan tambahan 3.972 orang, menunjukkan pertumbuhan pada sektor jasa di Gorontalo.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami sedikit kenaikan pada Agustus 2024, yaitu sebesar 3,13 persen, naik 0,07 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan TPT ini menandakan bahwa meskipun terdapat peningkatan lapangan kerja, tantangan untuk menyediakan pekerjaan bagi seluruh angkatan kerja masih menjadi perhatian bagi Provinsi Gorontalo.

Grafik 3.6
 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT),
 Agustus 2021-Agustus 2024 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 2,63 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,90 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPT laki-laki turun sebesar 0,16 persen poin sedangkan TPT perempuan naik sebesar 0,44 persen poin.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (3,89 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,43 persen). Dibandingkan Agustus 2023, TPT perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,24 persen poin sedangkan TPT perdesaan meningkat sebesar 0,29 persen poin.

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga mempunyai pola yang hampir sama dari Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,34 persen. Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 1,12 persen.

Selama tiga tahun terakhir, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas. Pada Agustus 2024, persentase pengangguran tamatan Sekolah Menengah Atas sebesar 38,16 persen. Kemudian disusul oleh tamatan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 23,66 persen, dan SD ke bawah sebesar 16,68 persen.



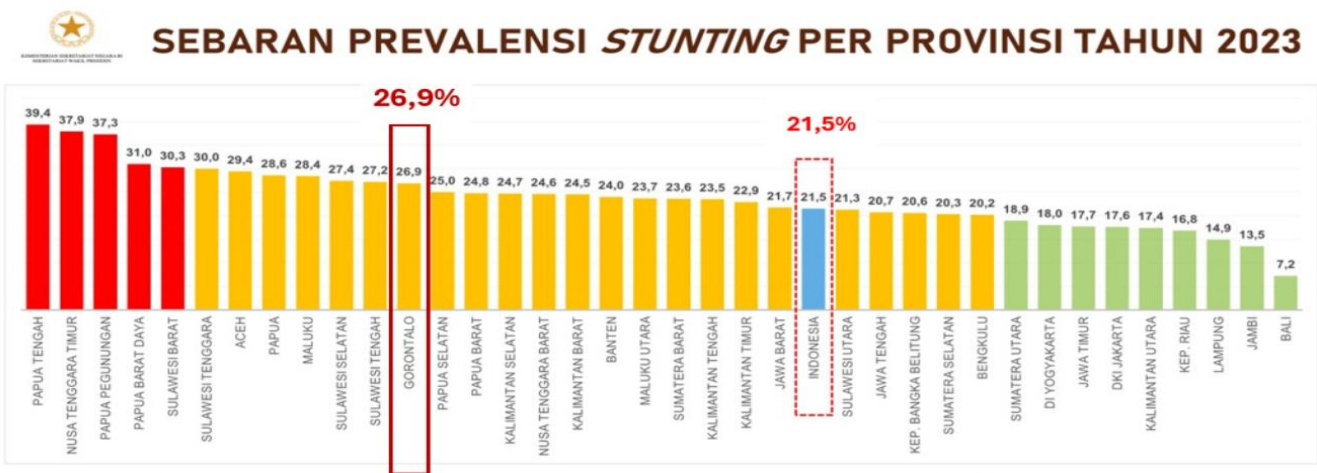
7. Stunting

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga mengalami gangguan perkembangan otak yang akan mempengaruhi kemampuan dan prestasi mereka. Selain itu, Stunting juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab Stunting adalah: 1) Praktek pengasuhan yang kurang baik; 2) Masih terbatasnya layanan kesehatan dan pembelajaran dini yang berkualitas; 3) Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi; 4) dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Memahami faktor-faktor penyebab tersebut, telah dilakukan berbagai macam upaya dalam penurunan angka Stunting. Pemerintah Indonesia menargetkan angka Stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024. Hal ini ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Berdasarkan data SKI 2023, prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 26,9%. WHO menyebutkan masalah Kesehatan dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20%. Lebih rinci angka prevalensi stunting per Provinsi tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.7
Prevalensi Stunting Provinsi se-Indonesia Tahun 2023



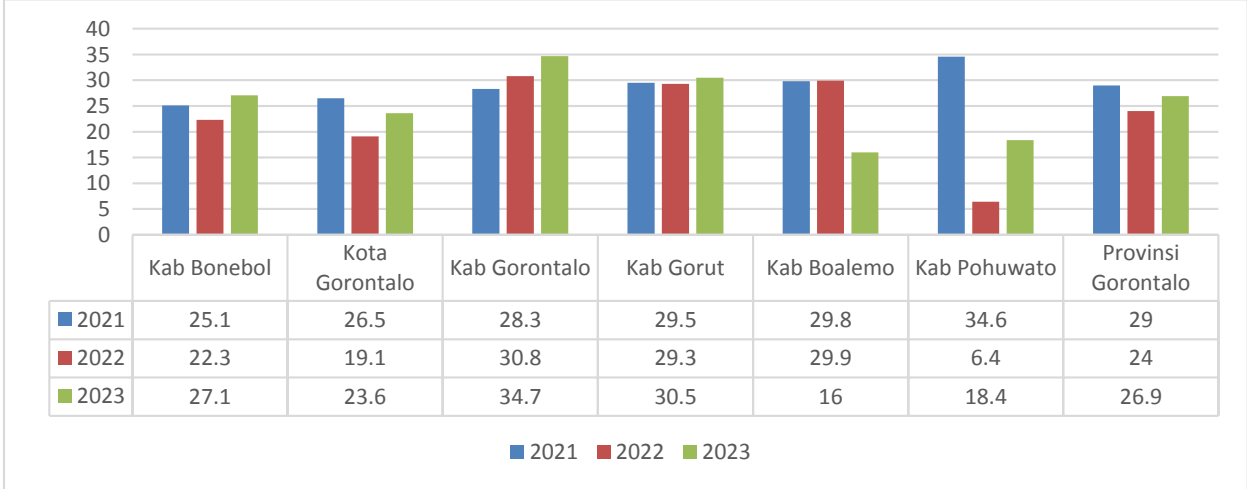
Sumber : Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 dan SKI 2023

Jika dilihat sebaran per Provinsi, sebanyak 9 (Sembilan) provinsi telah mempunyai prevalensi dibawah 20% bahkan 1 (satu) provinsi telah dibawah 10% yaitu Bali (7,2%). Namun demikian masih ada 5 (lima) provinsi yang mempunyai prevalensi diatas 30% (NTT, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat dan Papua Tengah).

Angka Prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo masih berada diatas rata-rata Nasional sampai dengan saat ini. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3,1% atau dari 23,8 pada tahun 2022 menjadi 26,9 pada tahun 2023. Sedangkan menurut data Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), angka stunting Gorontalo Tahun 2024 sebesar 10,77 persen. Kenaikan prevalensi stunting bukan hanya terjadi di Provinsi Gorontalo akan tetapi hampir di setiap wilayah se-Indonesia.



Grafik 3.8
Angka Prevalensi Stunting Provinsi dan Kabupaten/ Kota



Sumber : Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 dan SKI 2023

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat masih terdapat Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo yang memiliki angka prevalensi stunting diatas 20% mulai dari yang tertinggi yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Sementara Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo memiliki angka stunting dibawah 20%. Tentu saja dalam mencapai target 14% diperlukan kerja keras Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penurunan prevalensi stunting.

3.1.2. Realisasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah dalam RPD Tahun 2023-2026

Tabel 3.5
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Gorontalo
Dalam Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	2024		% Realisasi
			Target	Realisasi	
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	6,42	4,13	64,33
		Indeks Gini	0,396	0,413	95,88
		Inflasi	2-3	2,87	100
		Pendapatan Perkapita	36,71	44,43	121,03
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,49	3,13	111,50
		Persentase Kemiskinan	14,54	13,87	104,83
	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumberdaya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	38,98	37,29	96,66
		Indeks Ketahanan Pangan	86,04	81,95	95,24
		Nilai Tukar Petani (NTP)	105,09	109,05	103,77
		Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	113,18	105,29	93,03
		Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	97,82	95,69	97,82
	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah,	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	5,36	4,39	81,90



Tujuan	Sasaran	Indikator	2024		% Realisasi
			Target	Realisasi	
	Lapangan kerja dan daya saing perekonomian				
		Nilai Ekspor (juta USD)	19,52	60,1	307,89
		Realisasi PMA/PMDN (Triliun)	2,8	5,383 T	192,26
		Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	3%	2,29%	76,33
	Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa	Kemiskinan perdesaan	22,38	21,62	103,52
		Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)	6 Desa	93 Desa	1.550
	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	64,51	66,12	102,49
		Rasio Elektrifikasi (%)	99,70	99,99	100,29
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	7,38	7,69	95,97
		Persentase Cakupan Air minum Layak	95,75	-	-
		Persentase Cakupan Sanitasi Layak	80,08	-	-
		Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	65	87,76	135,02
		Rasio Konektivitas Antar Wilayah (%)	0,553	0,553	100
	Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	92	97,4	105,87
		Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%)	23	43,77	190,30
Peningkatan Sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	70,02	72,01	102,84
	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	8,28	8,29	100,12
		Harapan lama sekolah	13,24	13,17	99,47
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-18	71,63	77,19	107,76



Tujuan	Sasaran	Indikator	2024		% Realisasi
			Target	Realisasi	
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (satuan pendidikan)	SMA = 1:20 SMK = 1:15 SLB = 1 : 3	78/130 * 100 = 60%	60%
		Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah (%)	100%	100%	100%
	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup	68,4	70,73	103,41
		Prevalensi stunting	23	5,44 (Data EPPGBM)	425,93
	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Gender	87,13	88,24 *	101,27
		Indeks Perlindungan Anak	67,7	60,46*	89,31
		Indeks Pembangunan Pemuda	52,62	57,83	109,9
	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Persentase warisan budaya benda/tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Benda: 30 Tak Benda : 35	Benda: 30 Tak Benda : 35	100
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	69	72,71	105,38
	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	42,56	77,46	182
Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Penurunan emisi GRK (%)	N/A	N/A	N/A
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	74,82	78,5	104,92
	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim	Indeks Resiko Bencana	122,5	116,02	94,71
Terwujudnya Good and Clean Government		Nilai MCP (%)	94,1	81,7	86,82
		Indeks Reformasi Birokrasi	65,7	77,75	118,34
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	BB (Nilai)	68,88 (B)	80
		Indeks Kualitas Perencanaan	85	84,36	99,24
		Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	100
		Indeks Sistem Merit	300	327	109
		Nilai Maturitas SPBE	2,79	4,13	148,03



Tujuan	Sasaran	Indikator	2024		% Realisasi
			Target	Realisasi	
		Nilai Pengawasan Kearsipan	64 (Nilai)	70,74	110,53
	Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah	Indeks Demokrasi (%)	72	79,71	110,71

Sumber : RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 (diolah)



3.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.2.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

A.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
- a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

1) Peningkatan Mutu dan Kualitas Layanan Pendidikan
- b. Sasaran dan Program

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum Yang Adaptif	Indikator Sasaran : APM/APK	100%	77,46% 99,89%	8.60
		Rasio Siswa SMA/SMK per kelas	1:32	1:32	100%
		Rasio Guru per siswa	SMA 1:20 SMK 1:15 SLB 1:3	SMA 1:20 SMK 1:15 SLB 1:3	100
		Nilai Raport Pendidikan Provinsi Gorontalo	B	B	Baik
	Program pengelolaan Pendidikan	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	100%	77,46%	77,46%
		Persentase Warga Negara Usia 4-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	100 %	100%	100%
		Nilai Raport Rata-Rata Provinsi	Baik	Baik	Baik
		Rata-Rata Kemampuan Literasi SM dan Diksus	2 Nilai	SMA 62,17 SMK 55,11 SLB 19,96	
		Rata-Rata Kemampuan Numerasi SM dan Diksus	1.8 Nilai	SMA 58,71 SMK 52,95 SLB 28,26	
	Program Pendidikan Kurikulum Muatan Lokal	Tersusunnya Kurikulum SM dan Diksus Serta Tersedianya Buku Teks Pelajaran	3 Dok	1 Dok	33.33
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Mutu Layanan Pegawai Urusan	Persentase Mutu Layanan Pegawai	100	100	100



	Pemerintahan				
		Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100	100	100%
		Persentase Layanan Keuangan Pemerintahan Daerah	100	100	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Tata Pemerintahan	100	100	100%

- Adapun kinerja yang tidak tercapai target dikarenakan :
- Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah kurang dari target yang ditapkan karena :
 1. Angka putus sekolah/Anak Tidak Sekolah (ATS) yang cukup tinggi
 2. Banyaknya siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah berumur di bawah 16 tahun dan diatas 18 tahun.
 - Rata-Rata Kemampuan Literasi SM dan Diksus dan Rata-Rata Kemampuan Numerasi SM dan Diksus :
 1. Adanya perubahan kebijakan dalam hal pembobotan nilai literasi dan numerasi dari range 0-3 menjadi 0-100.
 2. Adanya kebijakan asesmen nasional terpusat.

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.7
 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendidikan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo
 Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	386.944.710.016	379.347.433.838	98,04	100	• Belum semua satuan Pendidikan yang memiliki Sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan asset oleh dinas Pendidikan dan kebudayaan • Adanya Beberapa asset kantor yang hibahkan ke dinas Pemuda dan olahraga • Adanya aplikasi yang digunakan oleh dinas Dikbud berakibat operator (SDM) yang mengoperasikan sangat diperlukan	• Perlu adanya kolaborasi, kordinasi Bersama stekholder dalam hal percepatan sertifikat tanah pada satuan Pendidikan • Perlu adanya tambahan anggaran untuk belanja modal di dinas Dikbud • Perlu adanya penguatan terhadap SDM baik di lingkup Dinas Pendidikan dan operator di satuan pendidikan
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1.760.777.234	1.759.418.356	99,92	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Perangkat Daerah						
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	375.041.272.632	367.762.922.893	98,06	100		
c.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	839.756.000	839.406.361	99,96	100		
d.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.381.687.250	3.292.751.946	97,37	100		
e.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.921.216.900	5.692.934.282	96,14	100		
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	168.958.049.222	157.628.052.194	93,29	100	• Focus aktifitas belanja disetiap sub kegiatan belum sepenuhnya berdampak terhadap nilai angka partisipasi murni (APM) dan nilai raport pendidikan • Aktifitas belanja di sub kegiatan masih berfokus pada belanja modal dan belanja barang jasa • Tingginya angka putus (APS) sekolah di Provinsi Gorontalo belum menjadi perhatian pada program kegiatan pengelolaan Pendidikan • Adanya kejadian Kahar (kebakaran) pada satuan pendidikan SMA Negeri 1 Boliyohuto dan SMAN 4 Gorontalo yang terjadi di tahun 2024 sehingga banyak mengganggu aktifitas belanja di tahun 2024 yang sudah direncanakan • Adanya rencana sekolah kejuruan	• Evaluasi berupa pemberian penguatan, pemahaman terhadap aktifitas belanja disetiap sub kegiatan yang mendukung dan meningkatkan nilai angka partisipasi murni (APM) dan nilai raport pendidikan. • Pembuatan kertas kerja berupa Analisa kebutuhan terhadap Aktifitas belanja pada sub kegiatan yang mendukung dan meningkatkan nilai angka partisipasi murni (APM) dan nilai raport Pendidikan. • Perlunya kebijakan pada setiap stekholder dalam penanganan angka putus sekolah (APS) di Provinsi Gorontalo • Perlunya adanya kebijakan dan kesepakatan bersama antara stekholder terkait



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
						yang berproses ke BLUD yang belum maksimal pembiyaannya pada tahun 2024 Adanya bantuan ke satuan Pendidikan berupa barang tetapi sarana dan prasarana belum tersedia	pembiayaan dan penggunaan dana tak terduga - Perlu adanya anggaran dalam menginterfensi percepatan SMK menjadi BLUD - Identifikasi kebutuhan harus sejalan dengan perencanaan dan penganggaran
a.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	85.966.151.161	83.047.675.263	96,61	100		
b.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	71.481.097.940	63.281.535.558	88,53	100	Adanya sisa retensi pekerjaan fisik dan sisa hasil tender	Perlu adanya koordinasi Kembali antara OPD terkait hasil tender yang bisa dimanfaatkan.
c.	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	11.510.800.121	11.298.841.373	98,16	100		
3	Program Pendidikan Kurikulum Muatan Lokal	252.898.950	244.790.454	96,79	100		
	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	252.898.950	244.790.454	96,79	100		
Jumlah		556.155.658.188	537.220.276.486	96,60	100		

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Outcome dari program adalah Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur.
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Output sub kegiatan adalah tersusunnya dokumen Renstra, Renja, DPA, RKA, LKPJ, LPPD, Sakip, Profl Pendidikan, Perjanjian Kinerja, Data Sektor, Cascading, Rencana Aksi, Buku Saku, Kalender Pendiidkan, Dokumen e-Monep.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.



Output sub kegiatan adalah Terpenuhinya Gaji Dan Tunjangan bagi 3.229 ASN dan Guru P3K terdiri dari 149 PNS Dinas Dikbud, 1.863 PNS Satuan Pendidikan dan 1.217 Guru P3K.

- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Output sub kegiatan adalah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Bulanan Triwulan dan Semesteran.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Output sub kegiatan adalah Jumlah PNS yang mengikuti (Pendidikan dan pelatihan)

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- jmSub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output sub kegiatan adalah meningkatnya Prasarana Perkantoran yang memadai dalam pelaksanaan tugas ASN.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output sub kegiatan adalah Jumlah pelayanan jasa administrasi perkantoran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Program Pengelolaan Pendidikan

Outcome dari program adalah terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

- Sub. Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru.

Output sub kegiatan adalah terbangunnya 5 (lima) Ruang, terdiri dari SMAN 1 Bone, SMAN 1 Limboto, SMAN 1 Telaga Biru, SMAN 1 Tilango, SMAN 5 Gorontalo yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Sub. Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula.

Output sub kegiatan adalah terbangunnya 3 (tiga) Ruang, terdiri dari SMA 1 Limboto Barat, SMAN 2 Gorontalo, SLBN 1 Kota Gorontalo yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.

Output sub kegiatan adalah Pembangunan Pagar Pesantren Al Khairat Kiya Mojo, Pembangunan Pagar Smas Muhammadiyah Batudaa, Bantuan Bangku Dan Meja Belajar SMA Muhammadiyah, Lanjutan Paving MA Kyai Modjo, rehabilitasi prasarana gedung sma negeri 5 dan sma negeri 6 kota gorontalo, Rehabilitasi Prasarana Gedung Sma Negeri 1 Telaga, pengadaan meubilaer sman 1 limboto, Pengadaan Meubilaer SMAN 1 Suwawa, Pembangunan Toilet SMAN 1 Suwawa, Pembangunan Kembali



Gedung SMA 1 Boliyohuto, Pagar SMAN 3 Gorontalo, Pembangunan Lanjutan Pagar Sekolah SMA 1 Limboto, Pembangunan Pagar Sekolah SMAN 1 Buntulia, Pembangunan Pagar SMAN 5 Kota Gorontalo, Pembangunan pagar SMA 1 Suwawa, Pembangunan Pagar SMAN 1 Paguat, Pembangunan Pagar SMAN 1 Bongomeme, Pembangunan Pagar SMAN N 6 Kota Gorontalo, pembangunan pagar sekolah SMAN 1 bone pantai kec. Bone pantai, Pembangunan Pagar SMA 1 Limboto Barat, Pembangunan Pagar SMAN 1 Kabila, Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAS Muhammadiyah Batudaa, Pembangunan Ruang OSIS SMAS Muhammadiyah Batudaa, Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 1 Bone, Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 1 Limboto Barat, Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 1 Tilango, Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Gorontalo Utara, Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 2 Wonosari, Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling SMAN 5 Gorontalo, Pembangunan Ruang OSIS SMAN 11 Gorontalo Utara, Pembangunan Ruang OSIS SMAN 1 Limboto Barat, Pembangunan Ruang Osis SMAN 2 Wonosari, Pembangunan Kembali Sman 4 Gorontalo, Pembuatan Jalan Sman 2 Tilmuta, Paving Blok Ma Alkhairat Kyai Mojo, Pagar Sman 3 Gorontalo, Pembangunan Pagar Sman 1 Botumoito, Pembangunan Pagar Sman 1 Tapa, Pembangunan Pagar Sman 5 Gorontalo Utara, Pembangunan Pagar Depan Sman 2 Limboto, Pembangunan Pagar Sma Al Islah Gorontalo, Pengadaan Meubelair Untuk Sma N 1 Suwawa Timur, Pengadaan Meubelair SMAN 1 Limboto, Pengadaan Meubelair SMAN 1 Telaga yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

- Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.
Output sub kegiatan adalah terbangunnya 2 (dua) Ruang, terdiri dari Rehab Ruang Kelas SMAN 1 Suwawa, SMAS Muhammadiyah Batudaa yang di biayai oleh Dana Alokasi khusus (DAK).
- Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil 63 Peserta didik. Berupa Beasiswa yang diserahkan ke satuan Pendidikan MAN Insan Cendekia 38 Orang, SMAT Wirabakti 28 Orang.
- Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMA.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 780 Peserta Didik.
- Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas.



Output sub kegiatan adalah jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS sebanyak 70 Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

- Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah sebanyak 980 Orang yang terdiri dari gtt dan ptt. Total Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan yang tersedia pada Sekolah Menengah Atas 506 orang. terdapat selisih yang signifikan sebab Sebagian guru telah beralih dari guru yang berstatus tenaga penunjang kegiatan/GTT menjadi Guru ASN PPPK.

- Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi sebanyak 107 Orang. 107 guru dimaksud telah difasilitasi kenaikan pangkat melalui Penilaian Angka Kredit (PAK) Integrasi. Secara nasional fasilitas tersebut telah dilaksanakan secara by system sejak pertengahan tahun 2023 sehingga memudahkan guru dalam mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat.

- Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan sebanyak 136 Satuan Pendidikan SMA.

- Sub kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU.

Output sub kegiatan adalah Pembangunan Ruang Tata Usaha SMAS Muhammadiyah Batudaa, Pembangunan Ruang Guru SMAN 11 Gorontalo Utara, Pembangunan Ruang Guru SMAN 1 Bone, Pembangunan Ruang Guru SMAN 1 Tilango, Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan SMAN 11 Gorontalo Utara, Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan SMAN 5 Gorontalo, Pembangunan Ruang Tata Usaha SMAN 1 Tilango yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

- Sub kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi.

Output sub kegiatan adalah Pembagunan Ruang Laboratorium Biologi SMAN 1 Limboto, Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya Smas Muhammadiyah Tolangohula yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah.



Output sub kegiatan adalah Pembangunan Ruang Perpustakaan SMAN 11 Gorontalo Utara yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Sub kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah.

Output sub kegiatan adalah Pembangunan Rumah Dinas Guru SMAN 11 Gorontalo Utara, Pembangunan Rumah Dinas Guru SMAN 2 Gorontalo Utara yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia.

Output sub kegiatan adalah Rehabilitasi Ruang Laboratorium Kimia Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMAS Muhammadiyah Batudaa yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Kepala Sekolah TU.

Output sub kegiatan adalah Rehabilitasi Ruang Tata Usaha Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMAN 1 Limboto yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah.

Output sub kegiatan adalah Rehabilitasi Ruang UKS Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMAN 1 Limboto yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik.

Output sub kegiatan adalah Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SMAS Muhammadiyah Batudaa, Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SMAN 5 Gorontalo, Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

- Sub kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.

Output sub kegiatan adalah Rehabilitasi Gedung Sman 5 Gorontalo Utara, Rehabilitasi Gedung SLBN Paguyaman, Rehabilitasi Asrama Sman 3 Gorontalo, Rehabilitasi Toilet Sman 6 Gorontalo yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

- Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik sebanyak 2000 Peserta didik yang mengikuti Lembaga sertifikasi profesi (LSP) sebanyak 400 orang dan Praktek kerja industri (Prakerin) 2096 orang.



- Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS sebanyak 60 Satuan Pendidikan SMK.
- Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik sebanyak 371 Peserta didik.
- Sub kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik.
Output sub kegiatan adalah Peralatan Hand Tractor Smkn 1 Popayato Timur, peralatan rotary smkn 1 wonosari, Pengadaan Peralatan Mesin Jahit Dan Mesin Bordir SMKN 4 Gorontalo, Pengadaan peralatan praktik utama - KK Nautika Kapal Niaga SMKS Taruna Bahari, Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SMKS Taruna Bahari, Pengadaan peralatan praktik utama - KK Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 Paguyaman Pantai, Pengadaan peralatan praktik utama - KK Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 1 Gorontalo Utara, Pengadaan peralatan praktik utama - KK Agribisnis Rumput Laut SMKN 1 Paguyaman Pantai, Pengadaan peralatan praktik utama - KK Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 2 Gorontalo Utara, Pengadaan peralatan praktik utama - KK Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Wonosari, Pengadaan peralatan praktik utama - KK Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 1 Wonosari, Pengadaan peralatan praktik utama - KK Kriya Kreatif Kayu dan Rotan SMKN 4 Gorontalo, Pengadaan peralatan praktik utama - KK Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 2 Gorontalo Utara, Peralatan Mesin Jahit & Bordir SMKN 4 Gorontalo yang dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK).
- Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah.
Output sub kegiatan adalah pembuatan jalan masuk paving stone smk ppn gorontalo telaga, pembangunan pagar smk ppn telaga, Penataan Halaman Upacara SMK 1 Bulango Selatan, bantuan bangku dan meja belajar smk 1 kota Gorontalo, bantuan bangku dan meja belajar smk 2 kota Gorontalo, bantuan bangku dan meja belajar smk 3 kota Gorontalo, pembangunan pagar smkn 1 botumoito, pembangunan pagar smkn 1 limboto, pembangunan pagar smkn 1 dungaliyo, pembangunan pagar smkn model bone bolango, pembangunan pagar smkn 2 limboto, pembangunan pagar smk 1 bulango selatan, Pembangunan Pagar SMKN 1 Marisa, Pembangunan Ruang Bimbingan Konseling (BK) Beserta Perabotnya SMKS Taruna Bahari, Pekerjaan Pembangunan Toilet (jamban) Beserta Sanitasinya SMKN 1 Boalemo, Pekerjaan Paving Blok SMKN 2 Limboto, Pembangunan Pagar SMKN 1 Batudaa, Pembuatan



papan nama SMKN 1 Marisa, Pagar SMKN 1 Boalemo, Pekerjaan paving blok SMKN 1 marisa, Pembangunan Pagar SMKN 1 Duhiadaa, Belanja Modal Asrama SMKN 1 Bone Raya yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

- Sub kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa.
Output sub kegiatan adalah Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMKN 1 Boalemo, Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa SMKN 1 Boalemo, Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya SMKN 1 Popayato - KK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 843 Orang. Total Jumlah Pendidik dan Tenaga kependidikan yang tersedia pada Sekolah Menengah Atas 436 orang. terdapat selisih yang signifikan sebab Sebagian guru telah beralih dari guru yang berstatus tenaga penunjang kegiatan/GTT menjadi Guru ASN PPPK.
- Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi sebanyak 121 Orang. 121 guru dimaksud telah difasilitasi kenaikan pangkat melalui Penilaian Angka Kredit (PAK) Integrasi. Secara nasional fasilitasi tersebut telah dilaksanakan secara by system sejak pertengahan tahun 2024 sehingga memudahkan guru dalam mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat. Terdapat 10 orang guru yang memperoleh fasilitasi beasiswa guru S1 Pendidikan Khusus.
- Sub kegiatan Pembangunan Ruang Laboratorium.
Output sub kegiatan adalah Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia Beserta Perabotnya SMKN 1 Paguyaman Pantai, Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia Beserta Perabotnya SMKN 1 Limboto, Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia Beserta Perabotnya SMKN 1 Bulango Utara, Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia Beserta Perabotnya SMKN 4 Gorontalo, Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika Beserta Perabotnya SMKN 1 Paguyaman Pantai, Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika Beserta Perabotnya SMKN 1 Bulango Utara, Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika Beserta Perabotnya SMKN 4 Gorontalo, Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi Beserta Perabotnya SMKN 1



Paguyaman Pantai, Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi Beserta Perabotnya SMKN 1 Bulango Utara, Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa Beserta Perabotnya SMKN 1 Paguyaman Pantai, Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa Beserta Perabotnya SMKN 1 Bulango Utara, Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa Beserta Perabotnya SMKN 4 Gorontalo, Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa Beserta Perabotnya SMKN 2 Gorontalo Utara, Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi Beserta Perabotnya SMKN 1 Limboto, Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMKS Taruna Bahari, Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa Beserta Perabotnya SMKS Taruna Bahari, Pekerjaan Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya SMKN 1 Boalemo, Pembangunan Laboratorium Komputer SMKN 1 Boalemo, pekerjaan Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya SMKS Teknologi Muhammadiyah Limboto, Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya SMK PPN Gorontalo yang dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK).

- Sub kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah.
Output sub kegiatan adalah Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya SMKS Taruna Bahari yang dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK).
- Sub kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah.
Output sub kegiatan adalah Rehabilitasi Ruang Kelas Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya SMKN 2 Gorontalo Utara yang dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK).

3. Kegiatan pengelolaan Pendidikan khusus

- Sub kegiatan pengadaan perlengkapan sekolah.
Output sub kegiatan adalah Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain dalam bentuk Pengadaan Pakaian Seragam sekolah ke 8 (delapan) satuan pendidikan.
- Sub kegiatan Penyediaan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik sebanyak 250 Peserta didik untuk biaya makan dan minum peserta didik anak berkebutuhan khusus di 8 satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB).
- Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik.
- Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus.



Output sub kegiatan adalah Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus sebanyak 175 Orang.

- Sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS sebanyak 8 Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB).

3) Program Pengembangan Kurikulum

Outcome dari program adalah terlaksananya Program Pengelolaan Pendidikan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah.

- Sub kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya sebanyak 45 Orang. Guru pengajar mata pelajaran muatan lokal yang terintegrasi terhadap beberapa mata pelajaran lainnya.

- Sub kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia sebanyak 2560 Buku. Buku bahan ajar sebagai panduan guru dalam membelajarkan materi mulok terkait dengan makanan khas Gorontalo.

3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 3.8
Kebijakan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Secara Proporsional		• Penyusunan Road Map Pemenuhan/Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk SMA, SMK, dan Pendidikan KhususBintek/Workshop/Coaching Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan • Bimtek/Workshop/Coaching Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan • Peningkatan Rekrutmen Guru Keahlian Ganda dan Guru Produktif baru • Pelaksanaan pemagangan dan pelatihan Guru Diksus di PPPPTK PLB • Rekrutmen Guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB
2	Meningkatkan kualitas Pembelajaran, Pengelolaan, dan		• Peningkatan kualitas Rembuk Pendidikan untuk memastikan ketersediaan dan Pemanfaatan data pendidikan dalam perencanaan kebijakan Pendidikan. • Penguatan koordinasi dan advokasi



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
	Pemenuhan Sarana Prasarana pada Satuan Pendidikan		pemerintah kabupate/kota, lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam pemenuhan SPM urusan Pendidikan. Penyusunan Road Map Pemenuhan Tata Kelola dan Sarana Prasarana Pendidikan untuk SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus.
3	Pengaturan Perizinan Pendidikan Menengah dan Khusus		Manajemen Kelembagaan Pendidikan Menengah dan Diksus.
4	Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas Pembelajaran		Peningkatan kualitas Kurikulum Muatan Lokal

4. Data berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 3.9

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sesuai Renstra
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan
 RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	100%	77,46%
2	Persentase Warga Negara Usia 4- 18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Khusus	100%	100%
3	Rata-Rata Kemampuan Literasi SM dan Diksus	2 Nilai	SMA 62,17 SMK 55,11 SLB 19,96
4	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SM dan Diksus	1,8 Nilai	SMA 58,71 SMK 52,95 SLB 28,26

5. Tindakanlajut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya.
- Mengingat Pendiidkan merupakan salah satu pilar utama dalam mempersiapkan masa depan peserta didik maka terkait hal tersebut dalam rangka menuntaskan problematika Pendidikan baik perbaikan infrastruktur, layanan dan mutu Pendidikan, penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan secara merata dan professional, termasuk memastikan Hak-hak Sertifikasi Guru yang belum terbayarkan sesuai ketentuan maka Pansus merekomendassikan perlunya penyelesaian berbagai permasalahan tersebut dengan pemenuhan sebagai syarat dan indeks pemebelajaran yang harus di penuhi.

URAIAN PENJELASAN :

Terkait Penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan secara merata dan profesional telah dilaksanakan melalui penempatan Guru PPPK yang dikukuhkan pada tahun 2023 sejumlah 880 orang. Sebagian guru PPPK dimaksud beroleh penempatan di daerah-daerah terpencil sehingga sebagian kebutuhan guru di daerah yang jauh dari perkotaan termasuk daerah khusus telah terpenuhi dan selanjutnya sertifikasi guru tahun 2023 telah disalurkan.



6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2024
 1. Medali Perunggu pada kegiatan FLS2N Tingkat Nasional, cabang lomba Tari Kreasi di wakili oleh SMAN 3 Gorontalo.
 2. Juara V Lomba Catur Tingkat Nasional pada Kegiatan O2SN PDBK atas nama Kuplan Daud asal Sekolah SLBN Tilamuta.
 3. Juara II Tingkat Nasional dalam Penatausahaan Ijazah SMA Tahun 2024
 4. Juara III Tingkat Nasional Lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN) Mata Pelajaran IPS an. Karmel Maria Romana Rawung SMP Katolik Santa Maria Gorontalo Jenjang Pendidikan dasar
 5. 12 orang siswa mendapatkan Medaly Of Excellent dalam lomba LKS tingkat nasional tahun 2024 di lampung yg diselenggarakan oleh Puspresnas Kemendikbudristek RI
6. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2024
 1. Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Gorontalo dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Layanan bagi Penyandang Disabilitas Nomor: 762/PEMKESRA/NK/XII/2024.
 2. Perjanjian Kerjasama antara Pemerinta Provinsi Gorontalo dan Universitas Bina Mandiri Gorontalo tentang Bantuan Biaya Pendidikan Program Sarjana Strata 1/Diploma IV Dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya, Universitas Bina Mandiri Gorontalo Tahun 2024, nomor : 420/DIKBUD/2799/Bid-PK/X/2024 dan 536/UBM/HK.07.00/2024 tanggal 03 Oktober 2024.
 3. Perjanjian Kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. PER/58/062024 dan 379/PEMKESRA/PK/VI/2024.
 4. Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dengan Insan Cendekia Gorontalo tentang beasiswa berprestasi bagi siswa orang tua berpenghasilan rendah melalui Program Pengelolaan Pendidikan No. 420/DIKBUD/2802/DSMA&DIKSUS/2024

B. Urusan Kesehatan

B.1 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
 - 1) Meningkatkan derajat kesehatan



b. Sasaran dan Program

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase (%)
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
	Sasaran 1:	Indikator Sasaran :			
1.	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta	1) Aki per 100.000 Kelahiran Hidup	183	154.8	118
		2) AKB per 1000 Kelahiran Hiduo	16	10.7	149.5
		3) Prevalensi wasting	5	3	167
		4) Kategori indeks SPM Provinsi	100	100	100
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase FKTP Terakreditasi Paripurna	80%	82%	102.5
		Jumlah RSUD yang melaksanakan layanan Priotitas KJSU minimal Utama	1 RSUD	1 RSUD	100
		Jumlah RSUD yang melaksanakan layanan Priotitas KJSU minimal Madya	3 RSUD	3 RSUD	100
		Persentase Pemenuhan Layanan Krisis Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100
		Persentase Prevalensi Anemia pada Bumil	7%	8%	88
		Prevalensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	10%	9.6%	104
		Persentasi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	2.5%	8.1%	31
		Persentase Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	100%	95%	95
		Persentase Tata Laksana Penyakit Menular dan Tidak Menular Sesuai Standar	100%	100%	100
		Persentase Pemenuhan Layanan KLB sesuai standar	100%	100%	100
		Jumlah Kab/Kota <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	1 Kab	2 Kab	200
		Jumlah Pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah dan faskes lainnya	1	1	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Layanan Krisis Kesehatan sesuai standar	100%	100%	100
		Persentase Pemenuhan Layanan KLB sesuai standar	100%	100%	100



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase (%)
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
	Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan Dan Makanan Minuman	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengendalian dan pengawasan sarana kefarmasian, alkes,PKRT, makanan dan minuman	6Kab/Kota	6 kab/kota	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Prevalensi Anemia pada Bumil	7%	78.6%	88
		Prevalensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	10%	9.6	104
		Persentasi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	2.5%	8.1%	31
		Persentase Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	100%	95%	95
2	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP OPD	89	80.20	100
		Persentase Pemenuhan Dokumen Penilaian SAKIP	100%	100%	100
		Persentase Realisasi Keuangan	98%	95.6%	98
		Persentase Temuan oleh Tim APIP	0%	0.07%	99.93
		Persentase Indeks BerAKHLAK	10%	90%	900

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.11
Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	85,234,879,300	80,717,273,166	94.7	100		
a.	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan	15,947,153,600	12,801,031,849	80.3	85	15% Pembayaran di tunda sampai tahun 2025, 1 pekerjaan pengadaan Water Treatmen Plan tdk	



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					terlaksana (Keg Labkesda)	
	b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	69,274,125,700	67,902,772,318	98.0	100		
	c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	13,600,000	13,468,999	99.0	100		
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	356,432,000	338,968,741	95.1	100		
	a. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	356,432,000	338,968,741	95.1	100		
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	121,063,500	109,626,322	90.6	100		
	a. Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	121,063,500	109,626,322	90.6	100		
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	195,418,000	194,589,600	99.6	100		
	a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan	131,482,000	130,769,500	99.5	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						
b.	Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	63,936,000	63,820,100	99.8	100		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	26,792,841,373	26,339,578,088	98.3	100		
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,530,090,200	1,479,638,974	96.7	100		
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20,845,906,663	20,763,398,279	99.6	100		
c.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121,490,000	117,754,662	96.9	100		
d.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	976,087,910	957,761,359	98.1	100		
e.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79,373,000	79,300,000	99.9	100		
f.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,565,543,600	2,292,222,543	89.3	100		
g.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	674,350,000	649,502,271	96.3	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Pemerintahan Daerah						
	JUMLAH	112,700,634,173	107,700,035,917	95.6	100		

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Outcome Program adalah :

- Persentase FKTP Terakreditasi Paripurna Target 80 terealisasi 82%
- Jumlah RSUD yang melaksanakan layanan Priotitas KJSU minimal Utama target 1 RS tercapai sesuai Realisasi 1 RS (RS Aloesaboe)
- Jumlah RSUD yang melaksanakan layanan Priotitas KJSU minimal Madya target 3 RS tercapai 3 RS (Aloe saboe, RSTN dan SR Dunda)
- Persentase Pemenuhan Layanan Krisis Kesehatan sesuai standar target 100% terealsasi sesuai target
- Persentase Prevalensi Anemia pada Bumil target 7 % Realisasi 8%
- Prevalensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) target 10% terealisaasi 9,6%
- Persentasi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), target 2,5% terealisasi 8.1%
- Persentase Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) target 100%, realisasi 95% (Kab Pohuwato tidak mencapai target)
- Persentase Tata Laksana Penyakit Menular dan Tidak Menular Sesuai Standar terealisasi sesuai target 100%
- Persentase Pemenuhan Layanan KLB sesuai standar terealisasi sesuai target 100%
- Jumlah Kab/Kota Universal Health Coverage (UHC) target 1 kab/Kota terealisasi 2 kab/Kota
- Pengembangan faskes lainnya target 1 Faskes terealisasi 1 (UPTD labkesda provinsi)

a. Pelaksanaan Program

- Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah :

- Persentase IKM target 90% Realisasi 92%
- Persentase PAD target 100% Realiasi melebihi target 123%
- Persentase Pembangunan Gedung dan fasilitas kesehatan Lainnya target 100% Realsaisi 85% (masih ada sisa pekerjaan yang dilaksanakan di tahun 2025).



- Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun Terealisasi.
- Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara mencapai target 1 paket.
- Sub kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya).
Output sub kegiatan adalah Jumlah Bahan Habis Pakai lainnya yang disediakan mencapai target.
- Sub kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin,serta Fasilitas Makanan dan Minuman.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya mencapai target.
- Sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan 1 Paket mencapai target.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah :

- Persentase Ibu Hamil Konsumsi TTD/MMS target 85%, realisasi 79%
- Persentase D/S target 90 %, Realiasi 93%
- Persentase ASI Eksklusif Target 55% realisai 43%
- Persentase Ibu Hamil yang mengkonsumsi PMT target 100%, realisasi 93%
- Persentasi Penduduk usia > 15 tahun yang dilakukan skrining kesehatan jiwa target 90% realiasi 77%
- Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan kesehatan kerja target 6 Kab/Kota terealsisi sesuai target
- Persentase Treatmen Coverage TB Target 90%, realisasi 79%
- Persentase ODHA yang ditemukan dan memulai pengobatan ARV target 90% Terealisai 95,4%
- Persentase Tata Laksana Kasus diare sesuai standar target 100%, realisasi 93%



- Persentase Tata Laksana Kasus pneumonia sesuai standar target 100% realisasi 96%
- Persentase KabKota yang melaksanakan skrining Hepatitis B pada ibu hamil terealisasi sesuai target 100
- Persentase Pasien kusta yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu target 90% terealisasi melebihi target yakni 97%
- Persentase Tata laksana kasus Rabies sesuai standar terealisasi sesuai target 100%
- Persentase Tata laksana Kasus malaria sesuai standar terealisasi sesuai target 100%
- Persentase Tata laksana kasus DBD sesuai standar target 100% realisasi 80%
- Persentase Penderita Hipertensi terkontrol target 90% terealisasi 21% (Realisasi rendah dikarenakan banyak petugas puskesmas blm tau cara menginput di aplikasi ASIK dan banyak masyarakat yg tdk patuh minum obat)
- Persentase Penderita Diabetes Melitus terkontrol target 90%, realisasi 4.5% (realisasi rendah dikarenakan banyak petugas puskesmas blm tau cara menginput di aplikasi ASIK dan masyarakat yg berkunjung ke puskesmas saat pemeriksaan gula darah sudah makan dari rumah jadi mempengaruhi hasil pemeriksaan)
- Persentase Pemenuhan layanan kesehatan KLB / Potensi KLB dilakukan sesuai standar tercapai sesuai target 100%
- Persentase Kabupaten/Kota melakukan respon Sinyal Peringatan Dini Penyakit Potensi KLB sesuai standar target 80% terealisasi 100%
- Persentase Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) target 50%, realisasi 44%
- Persentase Akses air minum layak terealisasi sesuai target 90%
- Persentase Akses air minum aman target 15% terealisasi 12%
- Persentase Sarana Air minum yang diawasi memenuhi syarat sesuai standar target 65% realisasi 78%
- Jumlah Kabupaten/Kota Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) terealisasi sesuai target 2 Kab/kota (Kota Gorontalo dan Boalemo)
- Tempat Pengelolaan Pangan memenuhi syarat sesuai standar target 62% realisasi 70%
- Persentase Kepesertaan aktif JKN target 98% realisasi 95.2%
- Jumlah Pasien Rujukan Luar Daerah yang dilakukan Tata Laksana sesuai standar target 20 Pasien realisasi 20 Pasien
- Jumlah Penerima Dana Talangan Sesuai kriteria yang ditentukan target 150 orang realisasi 9



- Persentase Pemenuhan dan validasi SPA Faskes target 60% realisasi 64%
- Persentase PKM dan RS yang mengimplementasi serta melaporkan INM tepat waktu target 100% realisasi 92%
 - Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar dengan target 12.573 terealisasi 100% sesuai target.
 - Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).
Output sub kegiatan adalah Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar dengan target 8.192 terealisasi 100% sesuai target.
 - Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular target 6 dokumen Laporan Kab/Kota, terealisasi sesuai target.
 - Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan target 6 Dokumen laporan kab/Kota, terealisasi sesuai target.
 - Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga target 6 Dokumen laporan kab/kota terealisasi.
 - Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji terealisasi sesuai target.
 - Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Orang Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis terealisasi sesuai target 75 orang.
 - Sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan terlaksana sesuai target 6 Dokumen.

- Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Output sub kegiatan adalah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat terlaksana sesuai target 6 Dokumen.
 - Sub kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
Output sub kegiatan adalah Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT), Target 2 Kabupaten terealisasi melebihi target yakni 6 Kab/kota sudah memiliki PSC.
 - 3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.
Output kegiatan adalah Persentase aktifitas pada sub kegiatan Pengelolaan data dan informasi kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan tercapai 100%.
 - Sub kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan target 1 Dokumen terealisasi sesuai target.
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Outcome program adalah :
- Persentase Pemenuhan Layanan Krisis Kesehatan sesuai standar target 100% terealisasi sesuai target
 - Persentase Pemenuhan Layanan KLB sesuai standar terealisasi sesuai target 100%
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.
Output kegiatan adalah :
 - a) Jumlah Kab/Kota yang memiliki Roadmap Pemenuhan tenaga sesuai standar untuk faskes diwilayahnya target 6 kab/Kota, realisasi 4 Kab/Kota (Kota dan Kab Pohuwato).
 - b) Persentase Puskesmas Tanpa Dokter target 0, realisasi 1% (dikarenakan masih ada 1 puskesmas yang tdk memiliki dokter).
 - c) Persentase RSUD dengan 4 Dokter Spesialis Utama dan 3 Dokter Spesialis Pendamping target 60%, realisasi 80%.
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Output sub kegiatan adalah Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat terealisasi 100%.
 - Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sesuai target 6 Dokumen.

3) Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

Outcome dari program adalah Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengendalian dan pengawasan sarana kefarmasian, alkes, PKRT, makanan dan minuman target 6 Kab/Kota terealisasi sesuai target.

a. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Penerbitan pengakuan pedagang Besar farmasi (PBF) cabang dan cabang PAK (Penyalur Alat Kesehatan).

Output kegiatan adalah :

- a) Persentase Puskesmas dan Kab/kota yang memiliki ketersediaan obat dan vaksin sesuai standar target 92% realisasi 100%.
- b) Persentase Alkes yang disampling memenuhi syarat target 93% terealisasi 96%.
- Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK.

Output sub kegiatan adalah Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak lanjut Penerbitan Perizinan terealisasi 3 Cabang Penyalur Alat Kesehatan dan 5 Cabang Pedagang Besar Farmasi yang tersebar di Kota Gorontalo dan kab Gorontalo.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Outcome dari program adalah :

1. Persentase Prevalensi Anemia pada Bumil target 7 % Realisasi 8%
2. Prevalensi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) target 10% terealisasi 9,6%
3. Persentase Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), target 2,5% terealisasi 8.1%
4. Persentase Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) target 100%, realisasi 95% (Kab Pohuwato tidak mencapai target)

a. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah Persentase Posyandu Aktif target 100% realisasi 98%.

- Sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi sesuai target 6 Dokumen.



2. Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah Kabkota yang mengimplementasikan GERMAS target 6 kab/Kota terealisasi 100% sesuai target.

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terealisasi sesuai target 6 Dokumen.

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan, Umum, Kepegawaian, penyediaan jasa, pengadaan serta Penalaksanaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai Ketentuan.

a. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah Persentase Pengelolaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan dilaksanakan sesuai standar dengan target 100%.

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah target 5 Dokumen terealisasi (RENSTRA, RENJA, DPA, RKA, RPD).

- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target 5 dokumen Laporan terealisasi (LPPD, LKPJ, LKIP, SPM, Profil).

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah 100% Penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah dilaksanakan sesuai standar Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 188 pegawai Dinas Kesehatan terealisasi terdiri dari gaji PNS 150 pegawai dan PPPK 35 Pegawai.

- Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.



Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target 1000 dokumen terealisasi sesuai target.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target 4 laporan terealisasi sesuai target.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah terlaksana sesuai standar.

- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan target 20 orang terealisasi 35 orang.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan sesuai standar 100%.

- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Output sub kegiatan adalah Jumlah 12 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan terealisasi sesuai target.

- Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan target 1 laporan terlaksana sesuai target.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Output kegiatan adalah Persentase unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diadakan sesuai standar 100%.

- Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan target 1 unit terealisasi.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Output kegiatan adalah persentase kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai standar 100%.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Output sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan target 1 Laporan terealisasi.



- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Output sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan terealisasi sesuai target.
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Output kegiatan adalah persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dilakukan pemerlihaaraan sesuai standar 100%.
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan target 10 unit terealisasi sesuai target.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara target 10 unit terealisasi sesuai target.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit terealisasi sesuai target.
- 3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2023-2026, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.12
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kesehatan
 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024
 Sesuai Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026
 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Angka Harapan Hidup	68.4	69.09
2	Prevalensi Stunting	23	10.77 (Data Aplikasi EPPGBM 2024)

- 4. Hal-Hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Indikator Tahun 2024
 - Angka Harapan Hidup di Provinsi Gorontalo meningkat dari tahun 2023 angkanya 68,83 menjadi 69,09 di tahun 2024 Angka harapan hidup yang tinggi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan salah satu faktor yang mempengaruhi angka Harapan hidup adalah Angka Kematian bayi, dan angka kematian Neonatal.
 - Prevalensi Stunting di Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil perhitungan aplikasi e-PPGBM di tahun 2024 adalah 10,77 data ini masih dalam proses penginputan oleh



puskesmas kab/kota. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi dalam hal penurunan prevalensi stunting adalah :

- 1) Bele mo'osehati tersebar di Kab/Kota di fungsikan sebagai tempat untuk menginterfensi dan mengawasi balita gizi buruk setiap harinya baik itu pemberian makan bergizi, penimbangan dan edukasi oleh tenaga kesehatan.
 - 2) Pemberian makanan Tambahan (PMT) Lokal utk balita Gizi buruk, BB Kurang dan Ibu hamil KEK, 3) PMT formula untuk gizi buruk
5. Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk Urusan Kesehatan, tidak mendapatkan rekomendasi DPRD ditahun sebelumnya.
 6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
 - a. UHC kepada pemda Prov Gorontalo.
 - b. 5 besar Nasional Persentasi penyelenggaraan Rekam Medik Elektronik di fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - c. Peringkat 1 Regional pelaporan Sistem Kewaspadaan Dan Respon (SKDR) penyakit
 - d. Pelaksanaan PIN polio tahap 1 dan 2 terbaik tkt Nasional
 - e. Pengelola SDM terbaik 4 Nasional
 - f. Pelaksana skrining Jantung kedua terbaik Nasional
 - g. Penatalaksanaan Hipertensi terkendali peringkat 2 Nasional
 - h. Peringkat 4 Nasional pada kegiatan penimbangan balita serentak
 - i. Peringkat 1 Nasional kegiatan skrening hipertensi
 - j. Peringkat 1 nasional ODHIV on ART dengan hasil VL tersupresi
 - k. Peringkat 1 capaian pemeriksaan VL HIV Provinsi menurut target GF 2024
 - l. Provinsi dengan Penerapan ILP Terbaik Regional Timur
 7. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo pada tahun 2024
 - a. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Kabupaten/Kota tentang percepatan penurunan masalah Gizi bagi Ibu Hamil dan balita.
 - b. Nota Kesepakatan & Rencana Kerja antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan BPJS Kesehatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2024.
 - c. Perjanjian Kerjasama antara Pemprov dengan Pemerintah Daerah Kab-kota tentang Sharing Pembiayaan Peserta Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBPU-BP) Pemerintah Daerah Program Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2024.
 - d. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan RS se-Kab/Kota tentang Pemberian Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat penerima manfaat program jaminan kesehatan non teregister tahun 2024.



- e. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dgn PT Ambulance Makasar Jaya tentang Paket Pelayanan Jenazah Pasien Rujukan luar Daerah asal provinsi Gorontalo tahun 2024.

f. Perjanjian kerjasama antara RSPAD Gatot Soebroto dengan Pemerintah Provinsi gorontalo tentang Pelayanan Medical check up Gubernur,wakil gubernur beserta keluarga. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD provinsi Gorontalo.

B.2

RSUD Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai RSUD Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo

1) Meningkatnya derajat kesehatan

b. Sasaran dan program

Tabel 3.13

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Semesta	- Net Death Rate (NDT)	<25/1000	9,41/1000	37,64
		- Angka kepuasan pasien	90%	87,17%	96,85
		- Angka kepuasan staf pegawai	90%	74,77%	83,077
		- Angka kejadian pembelian obat insidentil diluar pengadaan rutin (terprogram)	1%	-0,33%	
		- Cost Recovery Rate (CRR)	100%	98,74%	98,74
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Presentase Meningkatnya Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo	100%	79,99%	79,99%
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Presentase Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas SDMK Pada Fasilitas Kesehatan Provinsi RSUD Ainun Habibie	100%	100%	100%
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Presentase Meningkatnya kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi RSUD Ainun Habibie	100%	99,59%	99,59%

- 1) Pada Sasaran untuk Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan, terdapat 5 indikator sasaran yakni :

1. Net Death Rate (NDT).

NDR (*Net Date Rate*) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar. Pada tahun 2024 NDT ditargetkan pada nilai <25/1000
- III - 44



- atau dibawah dari 25 kematian per 1000 pasien. Berdasarkan Rekapitulasi Pelayanan Rawat Inap Tahun 2024 NDT mencapai nilai sebesar 9,41/1000 atau melebihi target yang telah ditetapkan (tercapai).
- Angka Kepuasan Pasien.

Angka kepuasan pasien RSUD Hasri Ainun Habibie pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 90 persen, berdasarkan data semester I sebesar berda pada angka 87,71% dan pada semester II berada pada angka 86,63% sehingga jika dirata-ratakan pada Tahun 2024 nilai indeks IKM adalah 87,17% masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun nilai kepuasan terendah yang menyebabkan angka kepuasan tidak mencapai target yakni nilai kepuasan masyarakat pada sarana dan prasarana rumah sakit yang belum memadai.
 - Angka Kepuasan Staf Pegawai.

Pada tahun 2024 angka kepuasan staf pegawai ditargetkan sebesar 90%. Berdasarkan hasil survey didapatkan Angka Kepuasan Pegawai Staf Pegawai sebesar 74,77% sehingga belum mencapai terget yang telah ditetapkan. Adapun faktor yang mendapai nilai kepuasan terendah adalah pada pengembangan dan pendidikan pegawai.
 - Angka Kejadian Pembelian Obat Insidentil diluar pengadaan rutin (terprogram).

Besaran persentase angka kejadian pembelian obat insidentil diluar pengadaan rutin (terprogram) mencapai target Indikator Kinerja Utama yakni sebesar 1% yakni -0,33% (angka negatif).
 - Cost Recovery Rate (CRR).

CRR merupakan indikator efisiensi untuk menentukan tingkat kemampuan dalam menyelesaikan biaya belanja rumah sakit untuk periode tertentu. CRR RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 100%. Berdasarkan hasil perhitungan CRR pada tahun 2024 mencapai 98,74% yang artinya belum mencapai target. Faktor yang mempengaruhi adalah meningkatnya belanja modal untuk investasi sebagai pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit dalam rangka peningkatan layanan dan persiapan kenaikan tipe rumah sakit dari Tipe C ke Tipe B.

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.14
 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kesehatan
 RSUD Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo
 Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	89.468.152.742	88.267.513.981	98,66	99,59	Adanya honor tenaga penunjang yang mengundurkan diri sehingga gaji tidak terbayarkan sesuai anggaran yang ditetapkan	Akan dilakukan perhitungan kembali /penyesuaian data jumlah tenaga penunjang untuk mengefisienkan



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
							penganggaran pada tahun selanjutnya
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.880.000	122.205.000	83,20	97,06	Adanya honor tenaga penunjang yang mengundurkan diri sehingga gaji tidak terbayarkan sesuai anggaran yang ditetapkan	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.035.430.833	21.265.347.201	96,51	99,21	Adanya honor tenaga penunjang yang mengundurkan diri sehingga gaji tidak terbayarkan sesuai anggaran yang ditetapkan	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	440.367.200	427.584.481	97,10	100	Silpa	
	Kegitan Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.347.200	348.619.302	71,53	100	Silpa	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	506.500.000	486.316.000	96,02	100	Silpa	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.121.246.800	4.965.710.094	96,96	97,05	Adanya honor tenaga penunjang yang mengundurkan diri sehingga gaji tidak terbayarkan sesuai anggaran yang ditetapkan	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.255.700	67.606.894	46,23	73,74	- Biaya pembayaran pajak kendaraan mobil ambulance dan jenazah sesuai pergub berbeda dengan pajak kendaraan lain - Biaya pemeliharaan mobil dinas kantor tersisa karena mobil telah dilakukan pemeliharaan secara berkala	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	60.584.125.009	60.584.125.009	100	100	Kegiatan ini merupakan pendapatan dan belanja BLUD dalam RBA	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	66.142.817.925	44.487.538.285,60	67,26	79,99	Terdapat kegiatan pembangunan gedung rawat inap yang putus kontrak	



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)		
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	65.965.417.925	44.310.427.485,60	67,17	79,94	Merupakan pembangunan gedung rawat inap (dana DAK 2024). Putus kontrak dilaksanakan pada tanggal 4 desember	
	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	177.400.000	177.110.800,00	99,84	100	Silpa	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	14.348.100.000	12.758.763.804	88,92	100	Silpa	
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	14.348.100.000	12.758.763.804	88,92	100	Silpa	
	JUMLAH	169.959.070.667,00	145.513.816.070,60	85,62	100		

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- Outcome dari program Presentase meningkatnya kualitas tata kelola layanan kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi dengan capaian sebesar 99,59% dari target 100%.
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Output kegiatan adalah Presentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai standar tercapai 97,06% dari target 100%, terdiri atas :
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKP.
Output sub kegiatan adalah tersedianya 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan capaian sesuai target tersedianya 1.
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
Output sub kegiatan adalah tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 Dokumen sesuai target.
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan



Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tersusun 1 Laporan sesuai target.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah Presentase Terpenuhinya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi serta Penyusunan Laporan Keuangan SKPD sebesar 99,21% dari target 100%.

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Output sub kegiatan adalah terpenuhinya jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN terealisasi sebanyak 152 orang/bulan sesuai target sebanyak 152 orang/bulan.

- Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Output sub kegiatan adalah terpenuhinya 1.800 Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sesuai target sebanyak 1.800 dokumen.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Output sub kegiatan adalah terpenuhinya 1 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tercapai sesuai target 1 laporan.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 11 laporan terpenuhi sesuai target sebanyak 11 laporan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah Prosentase Tersedianya Penatausahaan Kepegawaian sebesar 100% dari target 100%.

- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 30 orang mencapai target yakni sebesar 30 orang.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah Prosentase Terlaksananya Penatausahaan Administrasi Umum di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie sebesar 100% dari target 100%.

- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.



Output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket tercapai sesuai target sebesar 1 paket.

- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket tercapai sesuai target 1 paket.

- Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan sebanyak 1 paket tercapai sesuai target sebanyak 1 paket.

- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

Output sub kegiatan adalah tersedianya 1 Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu tercapai sesuai target sebanyak 1 laporan.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Output kegiatan adalah Presentase Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie sebesar 100% dari target 100%. Terdiri atas :

- Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Output sub kegiatan adalah tersedianya 1 Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan sesuai terget sebanyak 1 unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Output kegiatan adalah Tersedianya jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie sebesar 96,96% dari target 100%. Terdiri atas :

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

Output sub kegiatan adalah tersedianya 1 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang telah Disediakan dan mencapai target sebanyak 1 laporan, namun terdapat salah satu belanja yakni pada pembayaran air dan listrik yang belum dibayarkan untuk Bulan Desember karena baru akan masuk jumlah tagihan di Bulan Januari 2025.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output sub kegiatan adalah tersedianya 1 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sesuai target sebanyak 1 laporan.



- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Output sub kegiatan adalah tersedianya 1 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sesuai target.
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Output kegiatan adalah Prosentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie sebesar 73,74% dari target 100%
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 0 unit, tidak mencapai dari target 2 unit.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 9 unit dari target 10 unit.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 10 unit dari target 10 unit.
- 8. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.
Output kegiatan adalah Jumlah Laporan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi, Pelayanan Medis dan Penunjang RSUD dr. Hasri Ainun Habibie sebesar 100% dari target 100%.
 - Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.
Output sub kegiatan adalah Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan sebanyak 1 unit kerja tercapai sesuai target sebanyak 1 unit.
- 2) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
Outcome dari program adalah prosentase meningkatnya kualitas tata kelola layanan kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi rsud ainun habibie dengan capaian sebesar 79,99%, tidak mencapai dari target 100%.
 - a. Pelaksanaan program
 - 1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi.
Output kegiatan adalah Prosentase Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie sesuai standar sebesar 79,94% tidak mencapai dari target 100%. Terdiri atas sub kegiatan :



- Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit sebanyak 6 unit dan mencapai target sebanyak 6 unit.
 - Sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan.
Output sub kegiatan adalah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan sebanyak 31 unit dan mencapai sesuai target sebanyak 31 unit.
 - Sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit dengan target sebanyak 2 unit dan tidak mencapai target. Karena putus kontrak pembangunan rumah sakit.
 - Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan. Besar target sebanyak 6 unit dan hasil tercapai sesuai target sebanyak 6 unit.
 - Sub kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan sebanyak 1 unit tercapai sesuai target sebanyak 1 unit.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.
Output kegiatan adalah Tersedianya Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan sistem Informasi Kesehatan.
- Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.
Output sub kegiatan adalah tersedianya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan sebanyak 1 Dokumen dan telah tercapai sesuai target sebanyak 1 dokumen.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
Outcome dari program adalah Presentase meningkatnya kualitas tata kelola layanan kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi rsud ainun habibie sebesar 100% sesuai target 100%.



- a. Pelaksanaan program
1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi.
- Output kegiatan adalah terpenuhinya Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.
- Sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD dr. Hasri Ainun Habibie).
- Output sub kegiatan adalah Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat sebanyak 363 orang sesuai target dengan adanya pelatihan IHT, Sosialisasi, peningkatan pendidikan dan pelatihan Rumah sakit sebanyak 305 orang dan workshop/pelatihan untuk 58 orang, dengan rincian pada tahun 2024 berikut rincian :

Tabel 3.15
 Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi
 Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2024

No	Diklat/Seminar/Symposium	Perawat	Bidan	Dokter	Penunjang Medis	Tenaga Non Medis
1	Keperawatan Kardiovaskular Tingkat Dasar	2				
2	Kegawatdaruratan dan Perawatan pada Neonatus	4				
3	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo					1
4	Orientasi Pengembangan Site Surveilans Severe Acute Respiratory	1		1	1	
5	Workshop Inisiasi Pengobatan TBS RO Di Puskesmas	1		1	1	1
6	Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT Bagi Pengurus atau Pengelola Koperasi se Provinsi Gorontalo Tahun 2024					1
7	Pelatihan Tata Naskah Dinas Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo					1
8	Pelatihan Asuhan Gizi Pada Pasien Dewasa Penyakit Ginjal Kronik (PGK) dengan Pre-Dialis dan Hemodialisis	3			1	
9	Pelatihan Manajemen Pelayanan Rawat Inap Bagi Kepala Unit/Ruang di Rumah Sakit	3	1			
10	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di FKTP Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Dengan Metode Blanded Learning	1				
11	Mengikuti Pelatihan ACLS	1			1	
12	Pelatihan TOT Pelatihan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) Bagi Petugas Kesehatan Tingkat Pertama Tingkat Provinsi Gorontalo	1				
13	Pelatihan Pengembangan SDM Laboratorium				2	
14	Seminar dan Workshop Peran Ahli Bedah Dalam Transformasi Kesehatan Nasional			1		2
15	Pelatihan Pediatric Advance Life Support For Nursing	2				
16	Kongres Nasional dan PTT PDS PA			1		
17	Bimtek Menyusun Draft Perkada Tentang Merekrut dan mengelola Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non ASN					2



No	Diklat/Seminar/Simposium	Perawat	Bidan	Dokter	Penunjang Medis	Tenaga Non Medis
18	Kongres Dunia ke 23 Untuk Bronkologi dan Pulmonologi Intervensional/Kongres Dunia untuk Bronkoesofagologi			1		
19	Workshop dan Simposium Semarang Cardiology Update 2024					
20	Pelatihan ACLS (Advance Cardiac Live Support)	1				
21	Kongres Nasional Ilmu Kesehatan Anak Indonesia (Konika)					
22	Pelatihan TOT Pelatihan Kesehatan Lanjut Usia dan Geriatri Untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di FKTP Angkatan II Tahun 2024			1		
23	Seminar dan Workshop Hulontalo Annual Cardiovascular Meeting	3		3		
24	Symposium Dengan Tema "Beyond HIV And Covid-19, Expanding Horizons In Molecular Diagnostics"			1		
25	Pelatihan Pelayanan Prima Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo	2				1
26	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Terhadap Penyakit Infeksi Emerging di FKTP Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2024	1		1		
27	Internal Medicine Update 2 (GIMU 2) Dengan Topik "Update Management In Endocrine And Pulmonary System"			5		
JUMLAH		26	1	16	6	9

3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 3.16
Kebijakan Strategis RSUD Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Meningkatkan mutu layanan kesehatan
2	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas SDM Kesehatan pada Fasilitas Layanan Kesehatan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Meningkatkan mutu layanan kesehatan
3	Peningkatan Tata kelola yang transparan, akuntabel dan inovatif	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2005. Tentang. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
4	Pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya di Fasilitas layanan Kesehatan RS Ainun	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
5	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan RS Ainun	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
7	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peraturan Menteri kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kualitas dan efektivitas pelayanan kesehatan



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
8	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peraturan Menteri kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
9	Penguatan dan perbaikan proses bisnis dan SOP layanan	Peraturan Menteri kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
10	Pemantapan sistem informasi dalam tata kelola layanan (digitalisasi)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
11	Pemanfaatan teknologi cloud	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta
12	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta

4.

Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, Renstra RSUD Ainun Habibie tahun 2023-2026, dan perjanjian Kinerja tahun 2024

Tabel 3.17

Indikator Kinerja Urusan Kesehatan
RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo
Sesuai Renstra RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Angka Harapan Hidup	68.2	69.09

5.

Hal-Hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Kinerja Tahun 2024.
Umur Harapan Hidup saat Lahir/UHH (Tahun) Mengalami peningkatan sebesar 0,23 tahun (tumbuh 0,33%) dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan selama periode 2020—2023 yang sebesar 0,32%.
6.

Tindakanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.
RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo tidak mendapatkan Rekomendasi DPRD di tahun sebelumnya.
7.

Penghargaan Nasional Yang Diterima RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo Tahun 2024

➤

Penghargaan dari MENPAN RB sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2024 dengan nilai 4,2.

➤

Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dinilai oleh OMBUDSMAN RI dengan nilai 93,62 hasil katergori “Zona Hijau” dengan Opini Kualitas Tertinggi.



8. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh RSUD Ainun Habibie Provinsi Gorontalo pada tahun 2024

Tabel 3.18
 Daftar Perjanjian Kerjasama RSUD dr. Hasri Ainun

No	Judul MOU/PKS	Instansi Kerjasama	Nomor Surat	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Ket
1	Jasa Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3	PT. Tenang Jaya Sejahtera PT. Loyalitas Teje Group	800/RSUD-HAH/PKS/494/I/2024	9 Januari 2024	10 Januari 2025	
2	Addendum Jasa Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah B3	PT. Tenang Jaya Sejahtera PT. Loyalitas Teje Group	800/RSUD-HAH/PKS/35/II/2024	1 Februari 2024	-	
3	Pelayanan Pasien Umum dan BPJS	RSUD Otanaha	800/RSUD-HAH/PKS/308/III/2023	2 Januari 2024	31 Desember 2024	
4	Pelayanan Rujukan Pasien Umum dan BPJS	Klinik Sinergi Utama Sehati	1618/800/RSUD-HAH/PKS/IV/2024	25 April 2024	25 April 2026	
5	Penunjang Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional Dinas Terkait Pemenuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi.	PT. Karya Jaya Mandiri Persada	800/RSUD-HAH/PKS/003/I/2024	2 Januari 2024	31 Desember 2024	
6	Pelayanan Pemeriksaan Tes MMPI	PT. Keisya Setya Medika	100.3.7/RSUD-HAH/SPK/I/002.a/2024	2 Januari 2024	2 Januari 2026	
7	Pemanfaatan Sarana Rumah Sakit Untuk Praktek Klinik SMK Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo	SMK Kesehatan Bakti Nusantara Gorontalo	800/RSUD-HAH/PKS/2055/V/2024	21 Mei 2024	21 Mei 2026	
8	Pemanfaatan Sarana Rumah Sakit Untuk Praktek Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Negeri Gorontalo	100.3.7/RSUD-HAH/PKS/2192/VI/2024	3 Juni 2024	3 Juni 2026	
9	Pinjam Meminjam Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	RSUD Otanaha	100.3.7/RSUD-HAH/PKS/001.a/I/2024	3 Januari 2024	31 Desember 2024	
10	Pelayanan Rujukan Pasien Umum dan BPJS	Klinik Orthomedika	400.7/RSUD-HAH/PKS/1884/V/2024	6 Mei 2024	6 Mei 2026	
11	Pemeriksaan Laboratorium Viral Load	Dinas Kesehatan Provinsi	050/RSUD-HAH/PKS/1503/IV/2024	1 April 2024	-	
12	Pemeliharaan Pesawat Lift	PT. Citas Otis Elevator	400.7/RSUD-HAH/PKS/329/I/2024	2 Januari 2024	31 Desember 2024	
13	Peminjaman Obat-Obatan Antar Rumah Sakit	Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo	800/RSUD-HAH/SPK/1869/2024	3 Mei 2024	3 Mei 2026	
14	Pengujian Kalibrasi Peralatan Kesehatan	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Makassar	100.3.7/RSUD-HAH/PKS/2568/VII/2024	3 Juli 2024	3 Juli 2027	
15	Uji Laboratorium Kualitas Air dan Udara di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	PT. Water Laboratory Nusantara Indonesia	800/RSUD-HAH/MOU/1865/V/2024	3 Mei 2024	3 Mei 2025	



- C. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
- C.1 **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo**
1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

1) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

2) Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.19

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	Indikator Sasaran: Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	62%	87,76%	100%
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luasan irigasi yang ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara (Ha)	2467 Ha	5745 Ha	100%
		Indikator Sasaran : Panjang bangunan Infrastruktur pengendali Banjir	1,4 Km	16,87 Km	100%
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang Pengaman Pantai yang dibangun dan dipelihara	0,8 Km	0,13 Km	16,25%
		Panjang pengaman Sungai yang dibangun dan dipelihara	0,6 Km	16,74 Km	100%
		Indikator Sasaran : Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	64,51%	66,12%	100%
	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi dalam kondisi baik	425,42 Km	323,80 Km	76,11%
	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Milik Pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi untuk Kepentingan Strategis	1 Unit	3 Unit	100%
	Program Pengembangan Permukiman	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1 Kws	0	0
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang di kelola pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	5 Kws	5 Kws	100%
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah Drainase yang Dibangun pada Kawasan Strategis Provinsi	1 Unit	10 Unit	100%
		Indikator Sasaran : Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Layak	234.756 RT	0	0



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan dan Pengelolaan Air Minum	1 Keg	0	0
		Indikator Sasaran : Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sanitasi Layak	191.637 RT	0	0
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase kapasitas Sistem Air Limbah Domestik Regional yang Dapat Terlayani	100%	0	0
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	100%	100%	100%
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas Pemanfaatan Ruang	Indikator Sasaran : Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan arahan rencana tata ruang dan penataan bangunan gedung	100%	0	0
		Indikator Sasaran : Rasio Pemenuhan Rencana Tata Ruang Daerah	86%	100%	100%
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi	1 Dok	1 Dok	100%
3	Sasaran : Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD	Nilai SAKIP	B+	B+	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo	Presentasi peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas pengelolaan Sumberdaya Ogranisasi	100%	100%	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)	Presentasi peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas pengelolaan Sumberdaya Ogranisasi	100%	100%	100%

- a) Program pengembangan permukiman.
Target 1 Kws Capaian 0, hal ini dikarenakan Kinerja pada Program tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Anggaran pada Program ini hanya dialokasikan untuk kebutuhan administrasi perkantoran.
- b) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.
Target 1 Kegiatan Capaian 0, hal ini dikarenakan Kinerja pada Program tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Anggaran pada Program ini hanya dialokasikan untuk kebutuhan administrasi perkantoran.
- c) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.
Target 100% Capaian 0, hal ini dikarenakan Provinsi Gorontalo tidak memiliki Sistem Air Limbah Domestik Regional.
- d) Meningkatnya kualitas Pemanfaatan Ruang Target 100% Capaian 0 Karena Capaian Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan arahan rencana tata



ruang dan penataan bangunan gedung karena Tidak ada usulan terkait dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR).

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.20
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	33.730.847.975	27.759.479.272	82,30	88,13		
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13.253.669.225	13.179.658.271	99,44	99,92		
	- Sub kegiatan Operasi dan pemeliharaan stasiun Pompa Banjir	458.347.500	414.273.564	90,38	100		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronasi Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	30.776.000	30.472.885	99,02	100		
	- Sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	2.277.783.114	2.268.697.612	99,60	100		
	- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengamanan Pantai Lainnya	47.017.000	46.920.000	99,79	100		
	- Sub kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya	428.121.500	427.452.400	99,84	100		
	- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	10.000.000	0	0	0	Kinerja pada sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.	Telah dianggarkan Kembali di tahun anggaran 2025.
	- Sub kegiatan Pembangunan Kanal Banjir	4.953.775.093	4.946.672.287	99,86	100		
	- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Dan Tebing Sungai	4.434.628.468	4.433.398.780	99,97	100		
	- Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase utama perkotaan dan Pengaman Pantai	613.220.550	611.770.743	99,76	100		
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha-3000Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.477.178.750	14.579.821.001	71,20	80,49		
	- Sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10.000.000	9.795.000	97,95	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	15.423.539.000	9.663.279.402	62,65	74,10	Bahwa kinerja dalam subkegiatan ini belum sesuai target karena terdapat 1 pekerjaan fisik rehabilitasi jaringan irigasi DI. Tolinggula Realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar 44,32% dan Keuangan 57,29% (Putus Kontrak)	Bahwa paket pekerjaan dimaksud telah di anggarkan Kembali melauli DAK 2025 sebesar 4.936.575.250
	- Sub kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi	10.000.000	9.950.000	99,50	100		
	- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.957.973.450	3.833.168.796	96,85	100		
	- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	573.401.000	571.803.996	99,72	100		
	- Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	502.265.300	491.823.807	97,92	100		
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.107.910.700	803.153.163	72,49	100		
	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.107.910.700	803.153.163	72,49	100		
	- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SIstem Penyediaan Air Minum (Spam)	953.948.475	701.872.692	73,58	100		
	- Sub kegiatan Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	153.962.225	101.280.471	65,78	100		
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	667.695.450	633.278.527	94,85	100		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	667.695.450	633.278.527	94,85	100		
	- Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	102.093.450	95.140.741	93,19	100		
	- Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	565.602.000	538.137.786	95,14	100		
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	2.077.131.350	1.864.571.285	89,76	92,68		
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Lintas Daerah	2.077.131.350	1.864.571.285	89,76	92,68		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Kabupaten/Kota Dan Kawasan Strategis Provinsi						
	- Sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.077.131.350	1.864.571.285	89,76	92,78	1 Paket, Pekerjaan Pembangunan Drainase di Kelurahan Tenda Tidak dapat dilaksanakan	Dikarenakan bahwa paket dimaksud tidak masuk dalam ruas jalan kewenangan Provinsi
5	Program Pengembangan Permukiman	305.001.500	288.903.450	94,72	100		
	Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	305.001.500	288.903.450	94,72	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Sarana Pembangunan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	5.001.500	4.749.000	94,95	100		
	- Sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Di Kawasan Strategis Provinsi	300.000.000	284.154.450	94,72	100		
6	Program Penataan Bangunan Gedung	8.045.603.550	7.641.561.076	94,98	100		
	Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	8.045.603.550	7.641.561.076	94,98	100		
	- Sub kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	61.834.200	61.366.083	99,24	100		
	- Sub kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	434.999.850	432.963.936	99,53	100		
	- Sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	9.998.500	9.904.084	99,06	100		
	- Sub kegiatan Pembangunan, pemanfaatan, Pelestarian Dan Pembongkaran bangunan Gedung untuk Strategis Daerah Provinsi	7.538.771.000	7.137.326.973	94,67	100		
7	Program Penataan dan Bangunan Lingkungannya	11.161.795.285	10.923.037.937	97,86	100		
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota	11.161.795.285	10.923.037.937	97,86	100		
	- Sub kegiatan Penataan Banguna dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Parawisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya	9.471.319.585	9.254.512.572	97,71	100		
	- Sub kegiatan Penyusunan Rencana Dan Teknis Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.992.200	8.312.834	83,19	100		
	- Sub Kegiatan Supervisi Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan	1.474.275.850	1.472.975.465	99,91	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Nasional Dan Kawasan Strategis Lainnya						
	- Sub kegiatan Pembinaan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kabupaten/kota	206.207.650	187.237.066	90,80	100		
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	495.145.000	491.878.218	99,34	100		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	198.112.000	195.320.291	98,59	100		
	- Sub kegiatan Pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	156.510.000	154.431.181	98,67	100		
	- Sub kegiatan Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi	41.602.000	40.889.110	98,29	100		
	Kegiatan Penyelenggaraan system informasi jasa kostruksi (SIPJAKI) cakupan daerah Provinsi	297.033.000	296.557.927	99,84	100		
	- Sub kegiatan Peningkatan kapasitas pengelolaan SIPJAKI	297.033.000	296.557.927	99,84	100		
9	Program Penyelenggaraan Jalan	43.405.715.496	41.002.346.679	95,03	97,26		
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	43.405.715.496	41.002.346.679	95,03	99,74		
	- Sub kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	384.461.000	359.595.260	93,53	100		
	- Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	669.002.300	668.462.257	99,92	100		
	- Sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	46.712.000	46.336.100	99,20	100		
	- Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan	7.265.316.050	6.586.915.250	90,66	100		
	- Sub kegiatan Pembangunan Jembatan	114.886.000	5.832.500	5,08	12,96	Tidak Adanya ketersediaan anggaran sehingga tidak ada pembangunan Jembatan. Seharusnya pembangunan jembatan Bakti	Pembangunan Jembatan dimaksud, telah di anggarkan di 2025 melalui DAK
	- Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	1.991.491.511	1.986.613.157	99,76	100		
	- Sub kegiatan Penggantian Jembatan	1.395.032.185	1.332.042.170	95,48	100		
	- Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	27.827.840.800	26,633,383,825	91,15	100		
	- Sub kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	14.886.000	0	0	0	Tidak Tersedianya Anggaran	Tidak Tersedianya Anggaran
	- Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, strategi dan teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.597.982.000	2.371.810.458	91,29	100		
	- Sub kegiatan Pembangunan Jalan	395.764.450	393.210.550	99,35	100		
	- Sub kegiatan Survei Kondisi Jalan/Jembatan	702.341.200	618.145.152	88,01	100		
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.207.221.300	1.135.442.599	94,05	100		
	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	599.271.300	575.758.927	96,08	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	185.441.000	183.711.710	99,07	100		
	- Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	413.830.300	392.047.217	94,74	100		
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Tata Ruang	46.450.000	44.834.636	96,52	100		
	- Sub kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	31.450.000	31.272.136	99,43	100		
	- Sub kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten/Kota	15.000.000	13.562.500	90,42	100		
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	246.500.000	200.847.164	81,48	100		
	- Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	246.500.000	200.847.164	81,48	100		
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	315.000.000	314.001.872	99,68	100		
	- Sub kegiatan Oprasionalisasi Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	315.000.000	314.001.872	99,68	100		
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo	32.605.980.757	32.248.642.059	98.90	100		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.596.374.851	1.583.807.236	99.21	100		
	- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	873.910.200	873.380.373	99.94	100		
	- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	719.089.651	710.426.863	98.80	100		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.935.805.619	25.745.283.613	99.26	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.736.265.069	25.548.085.537	99.27	100		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	199.540.550	197.198.076	98.83	100		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	831.917.500	817.696.031	98.29	100		
	- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	831.917.500	817.696.031	98.29	100		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	549.829.320	541.690.940	98.52	100		
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	549.829.320	541.690.940	98.52	100		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.695.428.467	3.560.164.239	96.34	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.695.428.467	3.560.164.239	96.34	100		
12	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)	1.347.433.825	1.289.039.007	95,90	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	641.938.250	611.074.063	95,70	100		
	- Sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	641.938.250	611.074.063	95,70	100		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.000.575	127.932.260	98,41	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.000.575	127.932.260	98,41	100		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	575.495.000	550.032.684	95,58	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	575.495.000	550.032.684	95,58	100		
		136.157.482.188	126.081.333.272	92,60	100		

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Outcome dari program adalah :

- Luasan irigasi yang ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara sebesar 5.745 Ha dari target sebesar 2.467 Ha.
- Panjang pengaman Pantai yang dibangun dan dipelihara sebesar 0,13 Km dari target 0,8 Km.
- Panjang pengaman Sungai yang dibangun dan dipelihara sepanjang 16,74 Km dari target 0,6 Km

a. Pelaksanaan Program

- Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Output kegiatan adalah Luasan irigasi yang ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara seluas 5.745 Ha antara lain :

- Pemeliharaan 5.320 Ha
- Rehabilitasi Di Huludupitango 369 Ha
- Rehabilitasi Di Tolinggula 53 Ha
- OP Bendung Irigasi 3 Ha

- Sub kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan.

Output sub kegiatan adalah Kinerja pada sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Anggaran pada subkegiatan ini hanya dialokasikan untuk kebutuhan administrasi perkantoran.

- Sub kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.

Output sub kegiatan adalah Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (DAK) antara lain :

- Di Huludupitango = 4.058,5 M
- Di Tolinggula = 823,5 M



- Sub kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi.
Output sub kegiatan adalah Kinerja pada sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Anggaran pada subkegiatan.
 - Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.
Output sub kegiatan adalah Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Sepanjang 57,79 Km.
 - Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara antara lain :
 - a) Daerah Irigasi Bongo = 6.692,66 M3
 - b) Daerah Irigasi Bulia = 6.692,66 M3
 - c) Daerah Irigasi Huludupitango = 6.080,03 M3
 - Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.
Output sub kegiatan adalah anggaran pada subkegiatan ini hanya dialokasikan untuk kebutuhan administrasi perkantoran.
2. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- Output kegiatan adalah Panjang Pengaman Pantai yang dibangun 16,87 Km dari target 1,4 Km.
- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara sebanyak 3 Unit dari target 3 unit.
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi.
Output sub kegiatan adalah Kegiatan Komisi Irigasi Provinsi dan Kegiatan TKPSDA.
 - Sub kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai.
Output sub kegiatan adalah Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi sepanjang 0,54665 Km dari target 0,15 Km.
 - Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya.
Output sub kegiatan adalah Kinerja pada sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Anggaran pada subkegiatan ini hanya dialokasikan untuk kebutuhan administrasi perkantoran.
 - Sub kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya.



Output sub kegiatan adalah Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun sepanjang 0,1261Km dari Target 0,25 Km.

- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir.

Output sub kegiatan adalah anggaran pada subkegiatan ini hanya dialokasikan untuk kebutuhan administrasi perkantoran.

- Sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai.

Output sub kegiatan adalah Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara 14,84 Km dari target 0,3 Km.

- Sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai.

Output sub kegiatan adalah :

- a) DED Penanggulangan Banjir Sungai Desa Molamahu (Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, Gambar, Invoice, RAB).
- b) AKNOP Pengendali Sedimen Kab. Bone Bolango (Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, Gambar, Invoice, RAB).
- c) DED Perkuatan Tebing Sungai Taluhubongo (Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, Gambar, Invoice, RAB).

2) Program Penyelenggaraan Jalan.

Outcome dari program adalah Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi dalam kondisi baik sebesar 323,80 Km dari target 425,42 Km.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Stratgeis Provinsi yang dibangun dan dipelihara sebesar 323,80 dari target 425,42 Km.

- Sub kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi. Output sub kegiatan adalah Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi, antara lain :

- a) Pengawasan rekonstruksi jalan Taluditi Wonggarasi = 0,65 Km
- b) Pengawasan pemeliharaan berkala ruas jalan isimu batudaa dan peningkatan jalan tenilo pilolodaan iluta = $3,5 \text{ KM} + 0,6 \text{ Km} = 4,1 \text{ Km}$.
- c) Pengawasan Rekonstruksi Jalan Pangadaan Bakti = 2,7 Km.
- d) Pengawasan Rekonstruksi Saleh Kadir (Hunggaluwa-Duhuwalolo) = 2 Km.

- Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan.

Output sub kegiatan adalah Sebanyak 35 Jembatan Yang Terdapat di 6 Ruas, antara lain :

- a) Beringin – Tenggela (1 Jembatan)
- b) Saleh Kadir (Dehuwalolo-Hunggaluwa 3 Jembatan)

- c) Gorontalo - Batudaa – Isimu (15 Jembatan)
- d) Boidu – Longalo – Dulamayo (6 Jembatan)
- e) Runi Hemeto (Pongongaila – Buhu 4 Jembatan)
- f) Pilolalenga – Biluhu Tengah (5 Jembatan)
- g) Jembatan Kamboja
- Sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.
Output sub kegiatan adalah Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya, Sepanjang total luas jalan provinsi diluar jalan strategis provinsi yaitu 467,17 Km.
- Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan.
Output sub kegiatan adalah Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 5,95 Km dari target 8 Km.
- Sub kegiatan Pembangunan Jembatan.
Output sub kegiatan adalah tidak Adanya ketersediaan anggaran sehingga tidak ada pembangunan Jembatan
- Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan.
Output sub kegiatan adalah panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin sepanjang 151,35 Km dari target 150 Km Ruas tersebar.
- Sub kegiatan Penggantian Jembatan.
Output sub kegiatan anggaran hanya pembayaran sisa pekerjaan sebelumnya yang selesai pada bulan februari 2024. sehingga sisa pembayarannya dilanjutkan pada APBDP 2024. jumlah jembatan yang diganti yang terdapat di ruas jalan provinsi ataupun di ruas jalan strategis provinsi.
- Sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan.
Output sub kegiatan adalah Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala yaitu : Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Isimu-Batudaa 3,5 Km.
- Sub kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar.
Output sub kegiatan adalah Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar seharusnya ruas jalan Kabila – Tapa dengan target 2 Km, realisasi 0 Km karena tidak adanya ketersediaan anggaran.
- Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
Output sub kegiatan adalah :
 - a) DED Ruas Jl. Brigjen Piola Isa Kota Gorontalo.
 - b) DED Ruas Jl. Palma Kota Gorontalo.
 - c) Ded Jembatan Desa Karya Murni Ruas Jalan Tangkobu-Pentadu (Segmen Tangkobu-Girisa).



- d) DED Jembatan Desa Pangea Ruas Jalan Wonggahu-Saritani.
- e) DED Jembatan Desa Puncak STA 3+600 Ruas Jalan Mulyonegoro-Karya Mukti.
- f) DED Jembatan Desa Puncak STA 5+930 Ruas Jalan Mulyonegoro-Karya Mukti.
- g) DED Jembatan Desa TUWEYA STA 12+350 Ruas Jalan Taluditi – Wonggarasi.
- h) DED Jembatan Desa Tuweya STA 14+600 Ruas Jalan Taluditi – Wonggarasi.
- i) Perencanaan Jalan Provinsi dan Perencanaan Jembatan Provinsi.
- Sub kegiatan Pembangunan Jalan.
Output sub kegiatan adalah Panjang jalan yang dibangun di provinsi Gorontalo.
- Sub kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan.
Output sub kegiatan adalah Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya yaitu : 467,17 Km Jalan Provinsi dan 176,44 Km Jalan Strategis Provinsi.

3) Program Penataan Bangunan Gedung

Outcome dari program adalah jumlah bangunan milik pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi untuk kepentingan strategis sebanyak 3 unit dari target 1 unit yaitu :

- Pembangunan Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo
- Ubahsuai Sarana Prasarana Halaman Kejaksaan Tinggi Gorontalo
- Rehabilitasi Atap Gedung Laboratorium UPTD BPMJB Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah Bangunan Milik Pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi untuk Kepentingan Strategis Yaitu :

- Pembangunan Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
- Ubahsuai Sarana Prasarana Halaman Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
- Rehabilitasi Atap Gedung Laboratorium UPTD BPMJB Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo.
- Sub kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat.
Output sub kegiatan adalah anggaran pada subkegiatan ini hanya dialokasikan untuk kebutuhan administrasi perkantoran.
- Sub kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.



Output sub kegiatan adalah :

- a) Ubahsuai Sarana Prasarana Halaman Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
- b) Rehabilitasi Atap Gedung Laboratorium UPTD BPMJB Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo.

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek.

Output sub kegiatan tidak terlaksananya penyelenggaraan penerbitan dan perpanjangan lisensi arsitek karena tidak adanya usulan terkait penerbitan lisensi arsitek.

- Sub kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

Output sub kegiatan adalah Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi, Dokumen Kontrak, gambar dan spesifikasi teknis Pembangunan Gedung Kantor Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

4) Program Pengembangan Permukiman

Outcome dari program adalah Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah kinerja pada kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Anggaran pada kegiatan ini hanya dialokasikan untuk kebutuhan administrasi perkantoran.

- Sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi.

Output sub kegiatan adalah Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi, Kinerja pada kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Anggaran pada subkegiatan ini hanya dialokasikan untuk kebutuhan administrasi perkantoran.

- Sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi.

Output sub kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Perencanaan SPAM Kabupaten Gorontalo.

5) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

Outcome dari program adalah Jumlah Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan yang di kelola pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah di 5 Kawasan.



a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Output kegiatan adalah terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan yang di kelola pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah di 5 Kawasan yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

- Sub kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya.

Output sub kegiatan adalah penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang berjumlah 50 paket dan tersebar di 5 Kawasan.

- Sub kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Output sub kegiatan adalah anggaran pada subkegiatan ini hanya dialokasikan untuk kebutuhan administrasi perkantoran.

- Sub kegiatan Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya.

Output sub kegiatan adalah :

- Perencanaan Sarana Prasarana Infrastruktur Kota Gorontalo.
- Perencanaan Sarana Prasarana Infrastruktur Kab. Bone Bolango.
- Perencanaan Sarana Prasarana Infrastruktur Kab. Gorontalo.
- Perencanaan Sarana Prasarana Infrastruktur Kab. Gorontalo 2.
- Perencanaan Sarana Prasarana Infrastruktur Kab. Boalemo.
- Perencanaan Sarana Prasarana Infrastruktur Kab. Pohuwato.
- Pengawasan Sarana Prasarana Infrastruktur Kab. Bone Bolango.
- Pengawasan Sarana Prasarana Infrastruktur Kab. Gorontalo.
- Pengawasan Sarana Prasarana Infrastruktur Kab. Gorontalo 2.
- Pengawasan Sarana Prasarana Infrastruktur Kab. Boalemo.
- Pengawasan Sarana Prasarana Infrastruktur Kab. Pohuwato.
- Sub kegiatan Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Output sub kegiatan adalah Terdapat 2 Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, yaitu :

- Pemeliharaan Taman Patung Habibie, Kabupaten Gorontalo.
- City Center, Kabupaten Bone Bolango.



- Patung Langga, Kabupaten Bone Bolango.

6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Outcome dari program adalah Jumlah Drainase yang dibangun pada kawasan strategis provinsi sejumlah 10 Unit dari target 1 unit.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi.

Output kegiatan adalah terlaksananya Pembangunan 10 Sistem Drainase Perkotaan 10 Drainase yang tersebar di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten, 1 Paket Pembangunan Drainase Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo Tidak Memenuhi Syarat Teknis.

- Sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.

Output sub kegiatan adalah :

- Pembangunan Drainase Desa Dutohe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango.
- Pembangunan Drainase Desa Ombulo Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo.
- Pembangunan Drainase Desa Iloheluma Kec. Tilongkabila Kab. Bone Bolango.
- Pembangunan Drainase Desa Bua Kec. Batudaa Kab. Gorontalo.
- Pembangunan Drainase Desa Dambalo Kec. Popayato Kab. Pohuwato.
- Pembangunan Drainase Desa Padengo Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato.
- Pembangunan Drainase Desa Tridharma Kec. Pulubala Kab. Gorontalo.
- Pembangunan Drainase Desa Iluta Kec. Batudaa Kab. Gorontalo.
- Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Iluta Kec. Batudaa Kab. Gorontalo.
- Pembangunan Plat Duicker Desa Olimohulo Kec. Asparaga Kab. Gorontalo.

7) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Outcome dari program adalah Jumlah koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengelolaan air minum.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.



Output kegiatan adalah jumlah layanan akses air minum yang dapat berkontribusi.

- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Output sub kegiatan adalah Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya.

- Sub kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota.

Output sub kegiatan adalah Menunggu konfirmasi dari kementerian. PKS antar kab/kota. Spam regional belum ada bahkan SPAM regional belum jadi. Akan terlalu cepat jika dilaksanakan perjanjian kerjasamanya dari saat ini.

8) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Outcome dari program adalah Persentase kapasitas Sistem Air Limbah Domestik Regional yang dapat terlayani sebesar 0% dari target 100% dikarenakan Provinsi Gorontalo tidak memiliki Sistem Air Limbah Domestik Regional.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

Output kegiatan adalah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional sejumlah 0% dari target 100%.

- Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

Output sub kegiatan adalah dilaksanakannya Konsultasi Publik Jakstrada Air Limbah antar Kabupaten/Kota pada Bulan Oktober 2024 dari target 100 Orang tercapai.

- Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).

Output sub kegiatan adalah Pemutakhiran Roadmap Sanitasi Provinsi Gorontalo.

9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

Outcome dari program adalah Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli sebesar 100% dari target 100%. Seluruh peserta yang mengikuti pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli telah tersertifikat pelatihan ahli.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.

Output kegiatan adalah SDM bidang konstruksi yang bersertifikat dan terbina pada tahun 2024 berjumlah 70 orang, terdiri dari 20 orang tenaga ahli muda



bangunan gedung yang tersertifikat dan 50 orang peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi.

- Sub kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli.
Output sub kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan tenaga ahli muda bangunan gedung yang diikuti oleh 20 orang peserta.

- Sub kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan yaitu :

- GAPENSI Provinsi Gorontalo.
- ASKONAS Provinsi Gorontalo.
- ASPEKINDO Provinsi Gorontalo.
- GAPEKSINDO Provinsi Gorontalo.
- GAPEKNAS Provinsi Gorontalo.
- HATSINDO Provinsi Gorontalo.
- Ketua GATAKI Provinsi Gorontalo.
- PERTAPIN Provinsi Gorontalo.
- Ketua IAKI Provinsi Gorontalo.
- ATTAKE Provinsi Gorontalo.
- ASTATI Provinsi Gorontalo.
- PERKINDO Provinsi Gorontalo.
- GABPEKNAS Provinsi Gorontalo.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi.

- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya.

10) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Outcome dari program adalah Jumlah Dokumen Rencana Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi sebesar 1 dokumen dari target 1 Dokumen.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi.

Output kegiatan adalah Dokumen Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043.

- Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi.
Output sub kegiatan adalah Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi, Dokumen Persetujuan Substansi Tanggal 16 Januari 2024



Nomor B/PB.05.01/179/I/2024 Tentang Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043.

- Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang.

Output sub kegiatan adalah dilaksanakan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sampai 2043 pada Tanggal 7 November 2024 di Hotel Aston sebanyak 185 Orang.

2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang.

Output kegiatan adalah Salah satu muatan substansi Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sampai 2043 adalah Kawasan Strategis Provinsi dimana sesuai dengan amanat PP Nomor 21 Tahun 2021 sudah tidak ada lagi penyusunan dokumen perda tentang KSP namun semuanya telah diakomodir pada perda RTRW Provinsi Gorontalo.

- Sub kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Output sub kegiatan adalah laporan sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sampai 2043 pada Tanggal 7 November 2024 di Hotel Aston.

- Sub kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota.

Output sub kegiatan adalah :

- Telah dilaksanakan sinkronisasi revisi RTRW Kabupaten Pohuwato dengan Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sampai 2043 pada Tanggal 12 September 2024.
- Telah dilaksanakan sinkronisasi revisi RTRW Kabupaten Boalemo dengan Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sampai 2043 pada Tanggal 14 November 2024.

3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah 1 Dokumen penilaian terkait SIWASTEK, merupakan gabungan dari seluruh laporan Kabupaten/Kota.

- Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Output sub kegiatan adalah Laporan Hasil Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang memuat hasil evaluasi perkabupaten/kota pada Bulan Desember 2024.

4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.



Output kegiatan adalah tersedianya dokumen pengendalian pemanfaatan ruang pada tahun 2024 yang memuat tahapan penanganan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang pada badan air danau limboto dan ruang milik jalan (RUMIJA) Gorontalo Outer Ring Road.

- Sub kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang.

Output sub kegiatan adalah Jumlah kasus yang ditangani pada sub kegiatan ini belum dapat selesai secara keseluruhan karena :

- Pelanggaran penataan ruang yang ada pada badan air danau limboto sedang dalam tahapan Mediasi oleh tim persuasif pada bulan november dan menghasilkan pemberian kesempatan selama 14 hari kepada pemilik untuk melaksanakan pembongkaran secara mandiri.
- Pelanggaran pemanfaatan ruang di ruang milik jalan (RUMIJA) Gorontalo Outer Ring Road Segmen I dan II, telah disampaikan surat peringatan pelanggaran pemanfaatan ruang dan tahapan selanjutnya akan dilanjutkan di tahun 2025.

11) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo

Outcome dari program adalah Presentasi peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas pengelolaan Sumberdaya Organisasi sebesar 100% dari target 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah Peningkatan keterpaduan perencanaan dan kinerja perangkat daerah telah 100% terlaksana, dibuktikan dengan tersusunnya 7 dokumen perencanaan dan 3 laporan evaluasi kinerja Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo.

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Antara lain :

- Rencana Kerja Tahun 2025.
- Dokumen Rencana Kerja Anggaran 2025.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2025.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan 2024.
- Dokumen LAKIP 2023.
- Dokumen LPPD 2023.
- Dokumen LKPJ 2023

- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Antara Lain :



- Laporan Evaluasi Renja Tahun 2023
 - Laporan Hasil Rapat Koordinasi Ke-PU-an Kabupaten/Kota.
 - Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Output kegiatan adalah Persentase Peningkatan pengelolaan keuangan perangkat daerah sebesar 100 % dari target 100%.
- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Output sub kegiatan adalah Capaian Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 236 orang dari target 260 Orang, capaian tidak memenuhi target dikarenakan ada beberapa pegawai yang pension dan mutasi pegawai.
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Output kegiatan adalah Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 105 orang dari target 100 orang pada Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
Output sub kegiatan adalah :
 - Diklat PKA berjumlah 4 orang.
 - Diklat PKN berjumlah 1 Orang.
 - Kegiatan Sosialisasi penerapan SIPEDAS yang berjumlah 50 orang.
 - Sosialisasi Penerapan Arsip Fisik dan Digital yang berjumlah 50 Orang.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Output kegiatan adalah Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor. Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 14 Paket dari target 5 paket.
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 14 Paket dari target 5 paket.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Output kegiatan adalah Jumlah pelaporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Jumlah pelaporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 Laporan dari target 1 Laporan.



- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Output sub kegiatan adalah 1 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 12) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)
- Outcome dari program adalah Presentasi peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas pengelolaan Sumberdaya Ogranisasi sebesar 100% dari target 100%.
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.
Output kegiatan adalah Jumlah retribusi daerah yang dapat dikelola 503 Laporan dari target 550 Laporan.
 - Sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
Output sub kegiatan adalah Laporan Pengujian Material dan Alat berat. PAD Pengujian Material sebesar Rp. 443.619.000 dan Alat Berat sebesar Rp. 20.230.000. Total 463.849.000.
 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Output kegiatan adalah Jumlah paket penyediaan peralatan uji material.
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.
 3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Output kegiatan adalah Jumlah laporan penyediaan peralatan uji material.
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, dan perjanjian Kinerja tahun 2024

Tabel 3.21
 Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan
 Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo
 Sesuai Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan
 Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	6 Dok	0
2	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0,28 Km	0



No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
3	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (DAK)	5 Km	4,882 Km
4	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	0	0
5	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	100 Km	57,794.86 Km
6	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	7 Bendung	3 Bendung
7	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit
8	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun		1,358 Km
9	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai yang disusun,	6 Dok	3 Dok
10	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,25 Km	0,1261 Km
11	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi	0,15 Km	0,5467 Km
12	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,3 Km	14,84 Km
13	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara	0,5 Km	0
14	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	2 Lembaga	2 Lembaga
15	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	3 Unit
16	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	5 Km	9,45 Km
17	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	0	35 Jembatan
18	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	160 Km	467,17 Km
19	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	8 Km	5,95 Km
20	Jumlah Jembatan yang Dibangun	5	0
21	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	150 Km	151 Km
22	Jumlah Jembatan yang Diganti	0	0
23	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	3 Km	3,5 Km



No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
24	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	2 Km	0
25	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	2 Dok	9 Dok
26	Pembangunan Jalan	2 Km	0
27	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	467,17 Km	643,61 Km
28	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	24 Orang	0
29	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	1 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung
30	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	10 Lisensi	0
31	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1 Dok	1 Dok
32	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kws	5 Kws
33	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dok	0
34	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	5 Dok	11 Dok
35	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	6 Kab/Kota	2 Kab/Kota
36	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	10 Sistem Drainase Perkotaan
37	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	0	0



No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
38	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM	3 Kab/Kota	0 Kab/Kota
39	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100 Orang	100 Orang
40	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	0	1 Dok
41	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	90 Orang	20 Orang
42	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	20 Lembaga	13 Lembaga
43	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Orang	0
44	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi	1 Dok	1 Dok
45	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	185 Orang
46	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Lap	1 Lap
47	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dok	2 Dok
48	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0	6 Lap
49	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1 Kasus	0

4. Hal-Hal Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Kinerja Tahun 2024
- a. Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun rencana 6 Dokumen Realisasi 0 Dokumen karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

b. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan, target 0,28 Km Realisasi 0 karena karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

c. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (DAK) target 5 Km Realisasi 4,882 Km yaitu :

DI Huludupitango = 4.058,5 M dan DI Tolinggula = 823,5 M. tidak mencapai target dikarenakan keterbatasan anggaran.

d. Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi, tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.



- e. Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara target 100 Km Realisasi 57,794.86 Km yaitu :
 - Pemeliharaan = 5.320 Ha
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Huludupitango = 369 Ha
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tolinggula = 53 Ha
 - OP Bendung Irigasi = 3 Ha
- f. Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara yaitu :
 - Daerah Irigasi Bongo = 6.692,66 M3
 - Daerah Irigasi Bulia = 6.692,66 M3
 - Daerah Irigasi Huludupitango = 6.080,03 M3
- g. Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara target 3 Unit Realisasi 3 Unit
- h. Panjang Kanal Banjir yang Dibangun 1,358 Km yaitu Pekerjaan Beton U-Ditch (Saluran Gendong) = 1,358 KM.
- i. Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai yang disusun antara lain :
 - DED Penanggulangan Banjir Sungai Desa Molamahu (Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, Gambar, Invoice, RAB)
 - AKNOP Pengendali Sedimen Kab. Bone Bolango (Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, Gambar, Invoice, RAB)
 - DED Perkuatan Tebing Sungai Taluhubongo (Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, Gambar, Invoice, RAB)
- j. Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun dari target 0,25 Km dengan realisasi 0,1261 Km dikarenakan keterbatasan anggaran.
- k. Panjang Sungai yang Dinormalisasi/ Direstorasi target 0,15 Km Realisasi 0,5467 Km.
- l. Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara dari target 0,3 Km dengan Realisasi 14,84 Km.
- m. Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia
- n. Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi dari target 2 Lembaga dengan Realisasi 2 Lembaga.
- o. Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara dengan target 3 Unit Realisasi 3 Unit.
- p. Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi target 5 Km Realisasi 9,45 Km.
- q. Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin sebanyak 35 Jembatan.



- r. Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya target 160 Km Realisasi 467,17 Km
- s. Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan target 8 Km Realisasi 5,95 Km dikarenakan keterbatasan anggaran
- t. Jumlah Jembatan yang Dibangun, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia
- u. Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin target 150 Km Realisasi 151 Km
- v. Jumlah Jembatan yang Diganti, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia
- w. Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala target 3 Km Realisasi 3,5 Km
- x. Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia
- y. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi target 2 Dok Realisasi 9 Dok
- z. Pembangunan Jalan, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia
- aa. Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya target 467,17 Km Realisasi 643,61 Km
- bb. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
- cc. Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan target 1 Bangunan Gedung, Realisasi 2 Bangunan Gedung
- dd. Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang, Tidak terlaksananya penyelenggaraan penerbitan dan perpanjangan lisensi arsitek karena tidak adanya usulan terkait penerbitan lisensi arsitek
- ee. Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi target 1 Dok Realisasi 1 Dok
- ff. Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata target 2Kws Realisasi 5 Kws
- gg. Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia
- hh. Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan target 5 Dok Realisasi 11 Dok



- ii. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan target 6 Kab/Kota Realisasi 2 Kab/Kota yaitu :
 - Pemeliharaan Taman Patung Habibie, Kabupaten Gorontalo
 - City Center, Kabupaten Bone Bolango
 - Patung Langga, Kabupaten Bone Bolango
- jj. Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun target 1 Sistem Drainase Perkotaan, Realisasi 10 Sistem Drainase Perkotaan
- kk. Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya target 0 realisasi 0 karena belum adanya Lembaga system penyediaan air minum (SPAM)
- ll. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM, Menunggu konfirmasi dari kementerian. PKS antar kab/kota. Spam regional belum ada bahkan SPAM regional belum jadi. Akan telalu cepat jika dilaksanakan perjanjian kerjasamanya dari saat ini
- mm. Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) target 100 Orang Realisasi 100 Orang
- nn. Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun target 0 Dok Realisasi 1 Dok
- oo. Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih, Terlaksananya Pelatihan tenaga ahli muda bangunan gedung yang diikuti oleh 20 orang peserta
- pp. Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi target 20 Lembaga Realisasi 13 Lembaga karena pendaftar hanya 13 Lembaga
- qq. Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya, kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia
- rr. Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi target 1 Dok Realisasi 1 Dok
- ss. Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi target 100 Orang Realisasi 185 Orang
- tt. Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat target 1 Lap Realisasi 1 Lap
- uu. Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota target 1 Dok Realisasi 2 Dok
- vv. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah target 0 Lap Realisasi 6 Lap
- ww. Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang target 1 Kasus Realisasi 0 Karena, Jumlah kasus yang ditangani pada sub kegiatan ini belum dapat selesai secara keseluruhan dikarenakan :
 - Pelanggaran penataan ruang yang ada pada badan air danau limboto sedang dalam tahapan Mediasi oleh tim persuasif pada bulan november dan menghasillan pemberian kesempatan selama 14 hari kepada pemilik untuk melaksanakan pembongkaran secara mandiri.



- Pelanggaran pemanfaatan ruang di ruang milik jalan (RUMIJA) Gorontalo Outer Ring Road Segmen I dan II, telah disampaikan surat peringatan pelanggaran pemanfaatan ruang dan tahapan selanjutnya akan dilanjutkan di tahun 2025.
5. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan nasional di tahun 2024.
 6. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo pada tahun 2024.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo tidak melaksanakan perjanjian kerjasama/MOU di tahun 2024.

D. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

D.1 **Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo**

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo.
 - 1) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
 - 2) Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan.
 - b. Sasaran dan Program

Tabel 3.22

Target dan Realisasi Sasaran Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur ekonomi dan layanan dasar	Indikator : Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	100%	100%	100%
		Indikator : Persentase Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	100%	0	0
	Program pengembangan perumahan	Persentase terhadap kebutuhan pelayanan dasar pada pemenuhan kebencanaan	100%	100%	100%
		Indikator :	25 Ha	7,69 Ha	30,76%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
		Luas Kawasan kumuh yang ditangani			
	Program kawasan permukiman	Persentase terhadap penataan Kawasan permukiman dan peningkatan kualitas permukiman kumuh provinsi	25%	7,69 Ha	30,76%

- 1) Persentase Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Target 100% Capaian 0 Karena Tidak adanya ketersediaan anggaran untuk masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah.
- 2) Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar Target 25 Ha Capaian 7,69 Ha Karena Keterbatasan Anggaran sehingga hanya bisa menangani total Kawasan kumuh sebesar 7,69 Ha.

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.23

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program Pengembangan Perumahan	967.000.600	960.959.697	99,38	100		
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	97.732.050	97.354.780	99,61	100		
	- Sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	97.732.050	97.354.780	99,61	100	Sisa anggaran beberapa belanja rutin pendukung aktivitas subkegiatan	Perhitungan kebutuhan belanja dimaksud lebih dioptimalkan
	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	401.712.350	396.711.147	98,76	100		
	- Sub kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	297.187.850	292.951.737	98,57	100	Sisa anggaran beberapa belanja rutin pendukung aktivitas subkegiatan	Perhitungan kebutuhan belanja dimaksud lebih dioptimalkan
	- Sub kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	94.541.000	94.190.084	99,63	100	Sisa anggaran beberapa belanja rutin pendukung aktivitas subkegiatan	Perhitungan kebutuhan belanja dimaksud lebih dioptimalkan



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	9.983.500	9.569.326	95,85	100	Sisa anggaran beberapa belanja rutin pendukung aktivitas subkegiatan	Perhitungan kebutuhan belanja dimaksud lebih dioptimalkan
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	467.556.200	466.893.770	99,86	100		
	- Sub kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	467.556.200	466.893.770	99,86	100	Sisa anggaran beberapa belanja rutin pendukung aktivitas subkegiatan	Perhitungan kebutuhan belanja dimaksud lebih dioptimalkan
2	Program kawasan Permukiman	3.491.028.801	3.485.802.057	99,85	100		
	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	189.999.425	189.362.374	99,66	100		
	- Sub kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	164.999.550	164.639.274	99,78	100	Sisa anggaran beberapa belanja rutin pendukung aktivitas subkegiatan	Perhitungan kebutuhan belanja dimaksud lebih dioptimalkan
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	24.999.875	24.723.100	98,89	100	Sisa anggaran beberapa belanja rutin pendukung aktivitas subkegiatan	Perhitungan kebutuhan belanja dimaksud lebih dioptimalkan
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	3.301.029.376	3.296.439.683,	99,86	100		
	- Sub kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) H	2.021.475.475	2.020.480.895	99,95	100	Sisa anggaran beberapa belanja rutin pendukung aktivitas subkegiatan	Perhitungan kebutuhan belanja dimaksud lebih dioptimalkan
	- Sub kegiatan Pelaksanaan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)Ha sampai dengan di Bawah 15(Lima Belas) Ha	1.279.553.901	1.275.958.788	99,72	100	Sisa anggaran beberapa belanja rutin pendukung aktivitas subkegiatan	Perhitungan kebutuhan belanja dimaksud lebih dioptimalkan
	TOTAL	4.458.029.401	4.446.761.754	99,75	100		

1) Program pengembangan perumahan.

Outcome dari program adalah Persentase Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dasar pada Pemenuhan Kebencanaan sebesar 100% dari target 100%.

a. Pelaksanaan Program



1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

Output kegiatan adalah dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang dilaksanakan.

- Sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi.

Output sub kegiatan adalah dokumen Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan.

2. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi.

Output kegiatan adalah Persentase Jumlah Dokumen dan Laporan Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang dilaksanakan.

- Sub kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana :

- Rakor dan pembinaan SPM Perumahan Rakyat Tingkat Provinsi Gorontalo di Kota Gorontalo pada Bulan Februari 100 orang.
- Rakor dan pembinaan SPM Perumahan Rakyat Tingkat Provinsi Gorontalo di Tilamuta, Kabupaten Boalemo pada Bulan November 50 orang.

- Sub kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan. Output sub kegiatan adalah dokumen data penerima bantuan Rumah Korban Bencana.

- Sub kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan.

3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi

Output kegiatan adalah Jumlah Unit Rumah yang Terbangun/ Rehabilitasi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 6 unit dari target 4 unit.

- Sub kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi.

2) Program Kawasan Permukiman.



Outcome dari program adalah Persentase Terhadap Penataan Kawasan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Provinsi sebesar 6,69% dari target 25%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

Output kegiatan adalah Jumlah Laporan Kegiatan Penyadaran Publik, Koordinasi, dan Sinkronisasi yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Kegiatan FGD Desa Rumbia dan Desa Patoameme;
- 2) Kegiatan FGD Desa Salilama.
- 3) Kegiatan FGD Desa Bulalo.
- 4) Kegiatan FGD Desa Bongo Nol dan Desa Tangkobu

- Sub kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.

Output sub kegiatan adalah jumlah orang yang mengikuti penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh sebanyak 300 Orang dari target 300 orang.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

Output kegiatan adalah Luasan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi yang ditangani sebesar 7,69 Ha Dari Target 25 Ha.

- Sub kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) H.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

- Kota Gorontalo (Kel. Buliide, Kec. Kota Barat = 2 Unit)
- Kabupaten Bone Bolango (Desa Bubebaru, Kec. Suwawa = 5 Unit)
- Kabupaten Gorontalo Utara (Desa Moluo, Kec. Kwandang = 4 Unit dan Desa Tolongio, Kec. Anggrek = 4 Unit)
- Kabupaten Boalemo : Desa Tangkobu, Kec. Paguyaman = 1 Unit
Desa Bongo Nol, Kec. Paguyaman = 1 Unit
Desa Dulohupa, Kec. Wonosari = 1 Unit
Desa Potoameme, Kec. Botumoito = 1 Unit
Desa Bendungan, Kec. Managgu = 3 Unit



- Kabupaten Pohuwato (Desa Sipayo, Kec. Paguat = 2 Unit).
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)Ha sampai dengan di Bawah 15(Lima Belas) Ha. Output sub kegiatan adalah Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang dipugar :

Luhu = 6,32 Ha
 Kramat = 0,0025 Ha
 Bendungan = 0,44 Ha
3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, dan perjanjian Kinerja tahun 2024

Tabel 3.24
 Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo
 Sesuai Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang terkena Relokasi Program Provinsi yang terverifikasi	0 Dok	0 Dok
2	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dok	1 Dok
3	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	100 Orang	150 Orang
4	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	1 Dok	1 Dok
5	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	100 Orang	0
6	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	2 Unit Rumah	6 Unit Rumah
7	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	4 Lap	1 Lap
8	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	300 Orang	300 Orang
9	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	400 Unit Rumah	24 Unit Rumah
10	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang dipugar	19 Ha	6,7587 Ha

4. Hal-Hal Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Kinerja Tahun 2024.
- 1) Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang terkena Relokasi Program Provinsi yang terverifikasi target 0 realisasi 0 karena tidak tersedianya anggaran pada subkegiatan ini.
 - 2) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan target 100 orang realisasi 0 karena Kinerja pada kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang



tersedia. Anggaran pada subkegiatan ini hanya dialokasikan untuk kebutuhan administrasi perkantoran.

- 3) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman target 4 lap realisasi 1 lap karena keterbatasan anggaran dan hanya menghasilkan 1 lap yaitu Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota.
- 4) Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha target 400 unit rumah realisasi 24 unit rumah karena keterbatasan anggaran dan hanya menghasilkan 24 unit rumah yaitu :
 - Kota Gorontalo : Kel. Buliide, Kec. Kota Barat = 2 Unit
 - Kabupaten Bone Bolango : Desa Bubebaru, Kec. Suwawa = 5 Unit
 - Kabupaten Gorontalo Utara : Desa Moluo, Kec. Kwandang = 4 Unit
Desa Tolongio, Kec. Anggrek = 4 Unit
 - Kabupaten Boalemo : Desa Tangkobu, Kec. Paguyaman = 1 Unit
Desa Bongo Nol, Kec. Paguyaman = 1 Unit
Desa Dulohupa, Kec. Wonosari = 1 Unit
Desa Potoameme, Kec. Botumoito = 1 Unit
Desa Bendungan, Kec. Managgu = 3 Unit
 - Kabupaten Pohuwato : Desa Sipayo, Kec. Paguat = 2 Unit
- 5) Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang dipugar target 19 Ha realisasi 6,7587 Ha karena keterbatasan anggaran dan hanya menghasilkan 6,7587 Ha yaitu :
 - Luhu = 6,32 Ha
 - Kramat = 0,0025 Ha
 - Bendungan = 0,44 Ha
5. Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tidak menerima rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.
6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tidak menerima penghargaan nasional di tahun 2024.
7. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo pada tahun 2024.



Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, tidak melaksanakan Perjanjian Kerjasama/MOU di tahun 2024.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

E.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo
 - 1) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama
 - 2) Meningkatkan stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah
 - 3) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
 - b. Sasaran dan Program

Tabel 3.25
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)	Ket
			Target (%)	Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)	(7)
1	Sasaran : Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan	Persentase Pelayanan Sekber FKUB	100	100	100	
	a. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Partisipan Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat	100	100	100	
	b. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Yang Terdeteksi	100	100	100	
2	Sasaran : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pementapan demokrasi	Capaian rencana aksi daerah penanganan konflik sosial	80	87	108	Menggunakan Hasil B.08 dikarenakan belum ada rilis B.12 dari Tim TPKS Kemendagri
		Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula	100	100	100	
		Peningkatan Partisipasi Pemilih	80	88,35 88,10 88,11 88,01	110 110 110 110	-Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden -DPR RI -DPD RI



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)	Ket
			Target (%)	Realisasi (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)	(7)
				79,89	99	- DPRD Prov - PILGUB
	a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Capaian Penguatan Wasbang & Cinta Tanah air Serta Nilai-Nilai Pancasila	100	100	100	
	b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Pemilih	100	100	100	
	c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	100	100	100	
3	Sasaran : Percepatan reformasi birokrasi	- Peningkatan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) - Survey Kepuasan Masyarakat	B Baik	BB Sangat Baik		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100	100	100	

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.26
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	5.475.040.002	5.439.839.559	99.36	100	-	-
a.	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	90.068.180	90.019.899	99.95	100	-	-
	Sub kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.068.180	90.019.899	99.95	100	-	-
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.250.662.157	4.237.389.569	99.69	100	-	-
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.154.899.507	4.141.650.320	99.68	100	-	-
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	95.762.650	95.739.249	99.98	100	-	-



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
c.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	509.415.140	507.008.250	99.53	100	-	-
	<i>Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>509.415.140</i>	<i>507.008.250</i>	<i>99.53</i>	<i>100</i>	-	-
d.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.894.525	605.421.841	96.88	100	-	-
	<i>Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>624.894.525</i>	<i>605.421.841</i>	<i>96.88</i>	<i>100</i>	-	-
2	Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	945.500.000	933.599.311	98.74	100	-	-
a.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	945.500.000	933.599.311	98.74	100	-	-
	<i>Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	<i>145.500.000</i>	<i>140.965.931</i>	<i>96.88</i>	<i>100</i>	-	-
	<i>Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka</i>	<i>800.000.000</i>	<i>792.633.380</i>	<i>99.08</i>	<i>100</i>	-	-
3	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga Pendidikan melalui Pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	85.197.652.778	84.927.877.045	99.68	100	-	-
a.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	85.197.652.778	84.927.877.045	99.68	100	-	-
	<i>Sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>280.000.000</i>	<i>213.558.657</i>	<i>76.27</i>	<i>100</i>	-	-
	<i>Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>73.822.309.347</i>	<i>73.626.334.113</i>	<i>99.73</i>	<i>100</i>	-	-



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.095.343.431	11.087.984.275	99.93	100	-	-
4	Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	3.102.872.492	3.100.991.414	99.94	100	-	-
a.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	3.102.872.492	3.100.991.414	99.94	100	-	-
	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3.102.872.492	3.100.991.414	99.94	100	-	-
5	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	836.840.000	835.750.381	99.87	100	-	-
a.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	836.840.000	835.750.381	99.87	100	-	-
	Sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	511.840.000	510.786.481	99.79	100	-	-
	Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	325.000.000	324.963.900	99.99	100	-	-
6	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	2.643.120.000	2.615.898.042	98.97	100	-	-
a.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.643.120.000	2.615.898.042	98.97	100	-	-
	Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	414.320.000	409.343.427	98.80	100	-	-



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	<i>Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>						
	<i>Sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	671.480.000	662.889.889	98.72	100	-	-
	<i>Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</i>	1.557.320.000	1.543.664.726	99.12	100	-	-
	Jumlah	98.201.025.272	97.853.955.752	99.65	100	-	-

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

Outcome dari program adalah Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output sub kegiatan adalah 2 (dua) jumlah dokumen perencanaan yang terdiri dari perencanaan penganggaran dan evaluasi pelaksanaan anggaran melalui program dan kegiatan. Selain itu pula evaluasi hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat BB untuk tahun 2024.

2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah

- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Output sub kegiatan adalah penyediaan gaji dan tunjangan ASN lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo yang dilakukan pembayaran setiap bulan.

- Sub sub kegiatan koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Output kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan triwulan dan tahunan dalam rangka pengawasan penatausahaan keuangan.
3. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

- Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Output sub kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana kantor yang memadai. Selain itu pula dalam mendukung pemeliharaan sarana prasarana perkantoran yakni berupa pemeliharaan gedung dan kantor, operasional dan pengadaan barang dan jasa kantor.

4. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

- Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

Output sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa dalam pelaksanaan pelayanan jasa kantor, sebagaimana dalam target 8 jasa dan terealisasi 8 jasa meliputi belanja jasa keamanan, kebersihan, tagihan listrik, tagihan air, telpon, Jasa Pengolahan Sampah, belanja TV Berlangganan dan Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan kendaraan bermotor.

2) Program peningkatan peran partai politik dan lembaga Pendidikan melalui politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

Outcome dari program adalah persentase peningkatan partisipasi pemilih.

a. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

- Sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Output sub kegiatan adalah jumlah kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun dari rapat tim pengkaji dan tim internal Badan Kesbangpol. Sesuai target yang direncanakan 6 dokumen dan telah terealisasi melalui hasil dalam rapat pembahasan tim pengkaji yakni 14 dokumen terkait kajian tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- Sub kegiatan pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Output sub kegiatan adalah jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah yang memperoleh pemahaman tentang pendidikan politik melalui tatap muka dengan target yakni 150 orang. Guna mendukung suksesnya Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo, realisasi dari



pelaksanaan kegiatan ini yakni 700 orang sehingga melebihi target yang ditetapkan.

Sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo menganggarkan pendanaan kegiatan dimaksud kepada penyelenggara berdasarkan :

- Surat Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 47/31/I/ 2024 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024.

Penganggaran ini untuk pembayaran sisa hibah berupa uang kepada penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo, sebelumnya telah dibayarkan pada tahun anggaran 2023.

Selain itu dalam pelaksanaan sub kegiatan ini telah dilaksanakan penyaluran bantuan keuangan partai politik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 321/31/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Rincian Besaran Bantuan Keuangan Bagi Masing-masing Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Periode 2019-2024 Berdasarkan Jumlah Perolehan Suara Sah Hasil Pemilu 2019. Adapun 10 Partai Politik yang menerima bantuan keuangan partai politik sebagai berikut :

Tabel 3.27
 Daftar Partai dan Perolehan Suara Hasil Pemilu
 Tahun 2019-2024

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah	Besaran Bantuan Per Suara	Ket
1	Partai Kebangkitan Bangsa	14.214	1.643	
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	55.306	1.643	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	90.847	1.643	
4	Partai Golongan Karya	140.292	1.643	
5	Partai Nasional Demokrat	74.350	1.643	
6	Partai Keadilan Sejahtera	53.441	1.643	
7	Partai Persatuan Pembangunan	74.961	1.643	
8	Partai Amanat Nasional	62.898	1.643	
9	Partai Hati Nurani Rakyat	36939	1.643	
10	Partai Demokrat	49.298	1.643	



Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 telah dianggarkan anggaran bantuan keuangan Partai Politik Periode 2024– 2029 melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 420/31/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Rincian Besaran Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Periode 2024-2029 Berdasarkan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilu Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.28
Hasil Perolehan Suara Sah Pilkada 2024

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Sah	Besaran Bantuan Per Suara	Jumlah Bantuan Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa	38.326	Rp. 1.643	Rp. 62.969.618
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	74.904	Rp.1.643	Rp123.067.272
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	104.739	Rp.1.643	Rp172.086.177
4	Partai Golongan Karya	112.316	Rp.1.643	Rp184.535.188
5	Partai Nasional Demokrat	109.583	Rp.1.643	Rp180.044.869
6	Partai Keadilan Sejahtera	62.712	Rp.1.643	Rp103.035.816
7	Partai Persatuan Pembangunan	76.266	Rp.1.643	Rp125.305.038
8	Partai Amanat Nasional	52.812	Rp.1.643	Rp86.770.116
9	Partai Hati Nurani Rakyat	21.937	Rp.1.643	Rp36.042.491
10	Partai Demokrat	46.081	Rp.1.643	Rp75.711.083
Jumlah		699.676	Rp.1.643	Rp1.149.567.668

Dalam penyaluran bantuan keuangan partai politik ini dilakukan verifikasi oleh tim berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 262/31/VII/2024, tanggal 9 Juli 2024 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024. Tim veifikasi ini terdiri dari :

- Ketua – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo
- Sekretaris – Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
- Anggota tim ada 4 yakni :
 - Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo
 - Inspektur Provinsi Gorontalo
 - Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
 - Koordinator Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo
- Tim Sekretariat :
 - Sekretaris Badan Kesbangpol (Ketua)
 - Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda, Perencana Ahli Muda dan Pelaksana pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.



Verifikasi ini bertujuan agar terlaksananya kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Sub kegiatan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah terkait dengan perkembangan situasi politik di Provinsi Gorontalo dan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 diwilayah Provinsi Gorontalo. Untuk target capaian ini 19 laporan sedangkan realisasi mencapai 32 laporan.

Dalam sub kegiatan ini juga terdapat dana hibah pengamanan pilkada serentak tahun 2024 sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 233/31/VI/2024, tanggal 19 Juni 2024 Tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Pemerintah Pusat Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024.

Tabel 3.29
Daftar Pemberian Hibah Partai Politik

No	Nama Partai Politik	Alamat	Besaran Hibah
1	Kepolisian Daerah Gorontalo	Jl. Ahmad A. Wahab No. 17, Desa Pantungo, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, 96211	Rp 7.771.249.000
2	Komando Resor Militer 133/Nani Wartabone	Jl. Trans Sulawesi, Desa Tolotio, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo.	Rp 1.000.000.000
3	Kejaksaan Tinggi Gorontalo	Jl. Tinaloga No.1, Toto Selatan, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango, Gorontalo, 96128	Rp 400.000.000
4	Pangkalan TNI AL Gorontalo	Jl. R. Atje Slamet No. 160, Leato Selatan, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Gorontalo 96116	Rp 250.000.000
5	Komando Sektor II Satuan Radar 224 Gorontalo	Jl. Trans Sulawesi, Desa Dambalo, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo 96252	Rp 250.000.000
T o t a l			Rp. 9.671.249.000

- 3) Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Outcome program adalah persentase potensi konflik yang terdeteksi.



a. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial.

- Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Output sub kegiatan adalah jumlah dokumen program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitas kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang disusun. Adapun penyusunan dokumen dimaksud diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan dokumen capaian rencana aksi penanganan konflik sosial yang dihimpun dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab/Kota dan Provinsi Gorontalo serta instansi vertikal, selanjutnya dievaluasi oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dokumen dimaksud yakni 3 (tiga) dokumen rencana aksi yaitu :
 - Dokumen data dukung B.04 (Jan-April)
 - Dokumen data dukung B.08 (Mei-Agustus)
 - Dokumen data dukung B.12 (Sept-Des)

Untuk B.12 tahun 2024 sampai dengan saat ini belum dipublis oleh Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional Kementrian Dalam Negeri. Berikut capaian data evaluasi renaksi :

Peringkat Tahun 2023	Peringkat Tahun 2024
Evaluasi B.12 : 37	Evaluasi B.12 : -

- Kegiatan pengawasan orang asing melalui rapat koordinasi, dalam rapat koordinasi dengan agenda membahas penguatan tim pemantauan orang asing, organisasi masyarakat asing dan tenaga kerja asing di Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dilaksanakan pada 18 Oktober 2024 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo menghadirkan pemateri Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Gorontalo yakni Divisi Keimigrasian Kemenkumham Provinsi Gorontalo dan Polda Gorontalo.
- Sub kegiatan pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Output sub kegiatan adalah jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah.

Dalam penyusunan laporan ini melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemantauan terkait deteksi dini dan cegah dini potensi konflik yang terjadi di wilayah Kab/Kota Se – Provinsi Gorontalo dan luar Provinsi Gorontalo, dengan menyusun laporan per triwulan tahun 2024.
- b. Kegiatan rapat koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah dengan agenda sebagai berikut :
 - Membahas Perkembangan dan Situasi Keamanan Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 H Tahun 2024 di Prov. Gorontalo, Rabu 29 Mei 2024 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Provinsi Gorontalo
 - Pembahasan Terkait Dengan West Papua, Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI), Penanggulangan Tanah Longsor dan Banjir serta Sitausi Keamanan dan Ketertiban Lainnya Yang Ada di Provinsi Gorontalo Rabu, 23 Juli 2024 bertempat di Café Grande Bistro Kota Gorontalo.
 - Perkembangan Situasi Keamanan Wilayah Wilayah Jelang Pelantikan Presiden - Wakil Presiden Terpilih dan Kesiapan Penetapan Jelang Penetapan Calon Kepala Daerah Pada Pilkada 2024 di Provinsi Gorontalo, Selasa 17 September 2024 di Grande Bistro, Kelurahan Heledulaa, Kota Timur, Provinsi Gorontalo;
 - Perlaksanaan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih tahun 2024, Selasa 15 Oktober 2024 di Grande Bistro, Kelurahan Heledulaa, Kota Timur, Provinsi Gorontalo;
 - Kesiapan pengamanan dan pemetaan potensi ATHG jelang perayaan Nataru 2025 di Provinsi Gorontalo Rabu 18 Desember 2024 Tempat Grande Bistro Jl. Medi Botutihe Kel. Heledulaa Kec. Kota Timur Kota Gorontalo.

- Sub kegiatan pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi
- Output sub kegiatan adalah jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi melalui rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terlaksananya kegiatan rapat ini dalam tahun anggaran 2024 sebanyak 19 (Sembilan belas) kali dari target 6 kali pelaksanaan rapat. Pelaksanaan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo untuk memastikan situasi senantiasa aman dan nyaman



bagi keberlangsungan pembangunan daerah, adapun pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Rapat Forkopimda Diperluas dalam rangka Kesiapan Pengamanan Kampanye Rapat Umum/Kampanye Terbuka dan Perkembangan Stabilitas Harga Bahan Pokok Masyarakat, Senin 22 Januari 2024 bertempat di aula rumah dinas Gubernur Gorontalo.
- b. Rapat Forkopimda Diperluas dalam rangka dukungan stabilitas dan kesiapan penyelenggara pemilu menjelang masa tenang dan pemungutan suara pelaksanaan pemilu tahun 2024, Jumat 9 Februari 2024 bertempat di aula rumah dinas Gubernur Gorontalo.
- c. Penerbitan Alat Peraga Kampanye (APK) dan peninjauan kesiapan logistik jelang pemilu tahun 2024 oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Gorontalo dan Tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sabtu dan Senin 10 - 12 Februari 2024 bertempat di Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo dan Kab. Bone Bolango serta KPU Kota Gorontalo dan KPU Kab. Gorontalo.
- d. Peninjauan kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) jelang Pemilu 2024 dan peninjauan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Tempat Pengumuman Suara (TPS) oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Gorontalo dan Tim Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa-Rabu 13 - 14 Februari 2024 bertempat di Kota Gorontalo dan Kab. Bone Bolango.
- e. Rapat Forkopimda diperluas dalam rangka Perkembangan Situasi Pasca Pleno Penetapan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Prov. Gorontalo dan Kesiapan Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1445 H, Selasa 5 Maret 2024.
- f. Rapat Forkopimda Terbatas bersama Bupati dan Forkopimda Kabupaten Pohuwato Dalam Rangka Evaluasi dan Finalisasi Penyelesaian Tali Asih oleh PT Pets, Minggu 31 Maret 2024 Bertempat di Ruang kerja Kapolres Pohuwato Kab. Pohuwato.
- g. Rapat Forkopimda di Perluas Dalam Rangka Persiapan Kunjungan Kerja Presdien RI di Provinsi Gorontalo, Kamis 18 April 2024 Bertempat di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.
- h. Rapat Forkopimda di Perluas Dalam Rangka Finalisasi Agenda Kunjungan Kerja Presdien RI di Provinsi Gorontalo, Sabtu 20 April 2024 Bertempat di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.
- i. Rapat Forkopimda Diperluas dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Penanganan Permasalahan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kab. Pohuwato Senin, 20 Mei 2024 bertempat Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo.



- j. Rapat Forkopimda Terbatas Dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato Senin, 24 Juni 2024 bertempat Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo.
- k. Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Tingkat Provinsi Gorontalo yang dihadiri oleh Forkopimda Provinsi/Kab/Kota, Bupati dan Walikota, Ketua KPU Provinsi/Kab/Kota, Ketua Bawaslu Provinsi/Kab/Kota, Ketua Partai dan Pimpinan OPD terkait tanggal 3 Juli 2024 bertempat di Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.
- l. Rapat Forkopimda Diperluas Dalam Rangka Membahas Perkembangan Isu-isu Aktual dan Persiapan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten, Kota dan Provinsi Bertempat di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Kamis 1 Agustus 2024.
- m. Rapat Forkopimda Dalam Rangka Membahas Perkembangan Situasi dan Isu-isu Faktual Bertempat di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Selasa 20 Agustus 2024.
- n. Rapat Forkopimda Terbatas Dalam Rangka Membahas Perkembangan Situasi Provinsi Gorontalo Bersama Para Rektor Bertempat di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Selasa 27 Agustus 2024.
- o. Rapat Forkopimda Membahas Perkembangan Kampanye dan Kesiapan Logistik Pilkada Serentak 2024, Jumat 11 Oktober 2024 bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo.
- p. Rapat Forkopimda Terbatas dalam rangka kesiapan untuk menghadiri Rapat Koordinasi Nasional seluruh Pemerintah Daerah terkait dengan Sosialisasi Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia, Pembahasan atas kesiapan kunjungan wakil menteri dalam negeri dalam rangka untuk melihat dan meninjau Desk Pilkada Provinsi Gorontalo dan pembahasan penetapan upah minimum (UMP) Provinsi Gorontalo, bertempat Aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo Rabu 6 November 2024.
- q. Monitoring kesiapan logistik, kesiapan TPS dan pemungutan serta perhitungan suara Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo 26 -27 November 2024.
- r. Rapat Forkopimda diperluas dalam rangka kesiapan perayaan Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025 Jumat 20 Desember 2024 Bertempat di aula rumah dinas Gubernur Gorontalo, Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Heledulaa Selatan, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo.
- s. Peninjauan Tempat-Tempat Ibadah Gereja Dan Kesiapan Pospam Natal & Tahun Baru 2024 tanggal 24 Desember 2024 di Kota Gorontalo.

4) Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Outcome program adalah persentase capaian penguatan wasbang & cinta tanah air serta nilai-nilai Pancasila.

a. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

- Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

Output sub kegiatan adalah jumlah orang yang mengikuti pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilakukan secara tatap muka dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi pelajar SMA/SMK sederajat, mahasiswa, Ormas dan masyarakat. Selain itu pula adanya kegiatan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih kepada masyarakat dalam rangka menyemarakkan HUT Ke 79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024 di Lapangan Taruna Kamis 1 Agustus 2024 oleh Pj. Gubernur Gorontalo bersama Forkopimda Provinsi Gorontalo.

Sebagaimana target pelaksanaan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan dan Cinta Tanah Air sebanyak 75 orang peserta dan telah terealisasi sesuai dengan target.

- Sub kegiatan Pelaksanaan tugas Paskibraka

Output sub kegiatan adalah jumlah dokumen pelaksanaan tugas paskibraka, pelaksanaan kegiatan ini terkait membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Provinsi Gorontalo sama seperti wilayah lain yang mengadakan seleksi untuk anggota Pasukan pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) yang dilaksanakan disetiap tahunnya untuk semua siswa SMA/SMK, MA sederajat diwilayah Provinsi Gorontalo. Seluruh anggota Paskibraka dituntut untuk melewati beberapa tahapan seleksi yang diawali dari Tingkat sekolah, Tingkat Kabupaten dan Kota, serta Ketingkat Provinsi dan Nasional sesuai Petunjuk Tehknis yang merujuk pada Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2022 dan Peraturan BPIP No. 3 Tahun 2022 tentang Kepaskibrakaan. Untuk itu pada tahapan seleksi ini di harapkan bisa memperoleh para calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka baik di Tingkat Provinsi maupun yang dikirim ke Tingkat Nasional benar – benar memiliki fisik, mental dan kemampuan yang baik.

Sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor : 000.10.3/376/polpum tanggal 12 Januari 2023 hal Proses Pengalihan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2023 bahwa



Program Paskibraka yang semula pada Dinas Pemuda dan Olahraga dialihkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2023, pada pelaksanaannya penganggaran telah dimulai pada tahun 2024.

- 5) Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
- Outcome program adalah persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat.

- a. Pelaksanaan program
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- Sub kegiatan Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Output sub kegiatan adalah jumlah dokumen program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yang disusun, terkait pelaksanaan kegiatan yakni penguatan dan pengawasan serta verifikasi ormas dan 1 dokumen database Ormas yang terhimpun dalam Buku Direktori Organisasi Kemasyarakatan. Dengan target capaian 23 dokumen dan realisasi 76 dokumen penguatan dan pengawasan serta verifikasi ormas tahun 2024.

Tabel 3.30

Daftar Ormas yang terdaftar di Badan Kesbang dan Politik Prov. Gorontalo Desember 2024

No	Bentuk Ormas	Status SKT/AHU	Jumlah
1	Berbadan Hukum - Perkumpulan - Yayasan	Aktif Aktif	95 22
2	Tidak Berbadan Hukum	Aktif	51
Jumlah			168

Berdasarkan data diatas jumlah Ormas yang terdaftar 168, memiliki Badan Hukum Aktif 117 dan tidak berbadan hukum aktif 51 ormas.

Selain itu terdapat penyaluran dana hibah kepada organisasi massa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo pada tahun anggaran 2024 sesuai :

- Surat Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 112/31/III/2024 tentang Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan Dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024.
- Surat Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 428/31/X/2024 tentang Penetapan Hibah Berupa Uang Kepada Kepolisian Daerah Gorontalo



Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024.

6) Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.
Outcome program adalah persentase partisipan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

- a. Pelaksanaan program
1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

- Sub kegiatan penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Output sub kegiatan adalah jumlah kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang disusun terkait dokumen laporan perkembangan stabilitas dan ketersediaan sembako, pelaksanaan kegiatan dengan target 12 dokumen setiap bulan.

- Sub kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah.

Output sub kegiatan adalah jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah terkait pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencegahan penyakit masyarakat tentang peredaran miras di Provinsi Gorontalo dan pelaksanaan monitoring kegiatan peningkatan kapasitas generasi muda dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 3.31
Kebijakan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Hibah kepada penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo	- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri NOMOR 900.1.9.1/948/SJ Tanggal 21 Februari 2024 Tentang Percepatan Pencairan Hibah Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024 - Surat Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 47 / 31 / I / 202	- Dukungan/penyaluran pendanaan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024 Pemerintah Provinsi kepada KPU dan Bawaslu serta Pengamanan Pilkada melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi - Tahun 2023 realisasi anggaran Rp. 9.650.452.800 dan Tahun 2024



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024.	anggaran Rp. 14.475.679.200 - Tahun 2023 realisasi anggaran Rp. 34.000.000.00 dan Tahun 2024 anggaran Rp. 56.523.000.000
2	Hibah untuk pelaksanaan pengamanan pemilu serentak tahun 2024	Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 233/31/VI/2024 tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Pemerintah Pusat Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024	Dalam rangka pelaksanaan pengamanan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024

4.

Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, dan perjanjian Kinerja tahun 2024

Tabel 3.32

Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo

Sesuai Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Penguatan dan Peran FKUB, FKDM, FPK, dan Ormas	11 Ormas	76 Ormas
2	Capaian rencana aksi penanganan konflik social	80 %	87 %
3	Partisipasi Politik Melalui Pemahaman Pendidikan Politik Kepada Masyarakat dan Pemilih Pemula	100 %	100%

E.2 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

1.

Tujuan dan Sasaran
- a.

Tujuan yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

- Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah.
- b.

Sasaran dan Program

Tabel 3.33

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Peningkatan kententeraman dan ketertiban masyarakat serta pematapan demokrasi	Indikator Sasaran : Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	63%	63%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	87%	87%
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran	100%	100%	100%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.34
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	5.172.881.235	5.077.855.859	98,16	93,37	Belum tersedianya layanan pengaduan masyarakat pada Satpol Provinsi Gorontalo	Penyediaan layanan aduan Masyarakat melalui aplikasi media digital.
1a	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4.443.110.570	4.363.160.122	98,20	99,62	Belum adanya pelayanan gangguan trantibum	Pembentukan Unit Pelayanan atau pemanfaatan media elektronik sebagai penerima layanan aduan
	- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	3.457.244.052	3.417.055.181	98,84	100	Kurangnya pelaksanaan Patroli Gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan pelaksanaan Patroli di daerah-daerah gangguan ketentraman dan ketertiban umum
	- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	10.834.371	9.477.400	87,48	100	Belum adanya Peta Rawan Gangguan Trantibum	Menyusun Peta Rawan Gangguan Trantibum Provinsi
	- Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	542.885.933	532.154.830	98,02	100	Sarana Prasarana Masih Minim terutama peralatan dan perlengkapan Anggota yang menangani Penanganan Unjuk Rasa	Pemenuhan sarana dan prasarana dilaksanakan secara bertahap
	- Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	137.070.425	127.358.200	92,91	95,61	Belum tersedianya data keseluruhan Satlinmas Kabupaten/Kota yang terbaru	Melaksanakan Pendataan Satlinmas di Kabupaten/Kota
	- Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	105.720.661	104.316.146	98,67	100	-	-



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	165.293.191	159.731.065	96,63	100	Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas yang memahami Tupoksi masih kurang.	Menambah pengetahuan dan keterampilan aparat Satpol PP dan Satlinmas melalui pelatihan pengembangan
	- Sub kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	24.061.937	13.067.300	54,31	54,58	Pelaksanaan SPM belum sesuai dengan pedoman	Menyusun Rencana Aksi SPM Satpol PP
1b	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	632.328.116	620.954.357	98,20	97,52	Kurangnya Koordinasi antara pengusul perda dengan Satpol PP	Melaksanakan koordinasi dengan para OPD Pengusul Perda/Perkada
	- Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	459.215.439	458.516.617	99,85	98,81	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah (Perda)	Mensosialisasikan Perda kepada masyarakat melalui radio, surat kabar, dan siaran TV lokal
	- Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	143.016.309	142.600.400	99,71	100	-	-
	- Sub kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	30.096.368	19.837.340	65,91	66,11	Pelaksanaan Sidang ditempat selama tahun 2024 tidak ada	Pelaksanaan penangan pelanggaran perda/perkada dilakukan dengan non-yustisi
1c	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	97.442.549	93.741.380	96,20	100	Belum terbentuknya sekretariat PPNS	Mengusulkan pembetulan secretariat PPNS yang terpusat
	- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	97.442.549	93.741.380	96,20	100	Masa aktif Kartu identitas PPNS habis	Mengusulkan untuk dilakukan perpanjangan untuk PPNS
2	Program Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	455.153.848	444.678.080	97,70	99,88	- Kurang Aparatur Pemadam Kebakaran yang dimiliki - Kurang Aparatur Pemadam yang tersertifikasi	- Mengusulkan Aparatur Pemadam Kebakaran untuk mengikuti Diklat Pemadam
2a	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	400.338.600	391.972.880	97,91	99,97	Peta Rawan Bencana perlu dilakukan pembaharuan	Merencanakan Revisi Peta Rawan Bencana Kebakaran
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan,	369.596.000	362.423.900	98,06	100	Belum tersedianya data jumlah kebakaran Provinsi	Melakukan Pendataan Jumlah Kejadian Kebakaran provinsi yang dilaksanakan



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						melalui koordinasi dengan pemadam kab/kota
	- Sub kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	30.742.600	29.548.980	96,12	99,64	-	-
2b	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	54.815.248	52.705.200	96,15	100	-	-
	- Sub Kegiatan Pengawasan penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	54.815.248	52.705.200	96,15	100	Pelaksanaan pengawasan pencegahan kebakaran dan non kebakaran belum optimal	Meningkatkan pelaksanaan pengawasan pencegahan kebakaran dan non kebakaran
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	6.384.698.532	6.186.960.740	95,76	99,99		
3a	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.534.350	855.428.152	92,33	99,96	-	-
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	926.534.350	855.428.152	92,33	99,96	-	-
3b	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	490.016.375	416.226.697	84,94	100	-	-
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	490.016.375	416.226.697	84,94	100	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang tidak sesuai pedoman	Menyusun Rencana Kebutuhan Barang sesuai pedoman
3c	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.213.000	180.209.776	100	100	-	-
	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	180.213.000	180.209.776	100	100	Kurangnya pelatihan teknis bagi aparat Satpol PP dan Pemadam kebakaran	Menambah pengetahuan danketerampilan aparat Satpol PP dan Pemadam Kebakaran melalui pelatihan pengembangan
3d	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.227.100	72.130.700	95,32	100	-	-
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.653.450	37.601.179	99,86	100	-	-
	- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.573.650	34.529.521	99,87	100	-	-
3e	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.791.651.707	4.738.909.415	98,90	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.662.277.757	4.609.921.260	98,88	100		
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	129.373.950	128.988.155	99,70	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD						
	JUMLAH	12.088.677.615	11.785.438.679	97,49	99,73		

1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Outcome dari program adalah Persentase Peningkatan Ketentraman,dan Ketertiban Umum. Target persentase capaian program ini adalah 100% dan realisasi capaian adalah 100%. Pencapaian outcome dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan target 100 Pelanggaran/Pengaduan dengan realisasi 41 Pelanggaran/Pengaduan, persentase capaian 41%. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dengan target 16 Perda/Perkada yang ditegakkan dengan realisasi capaian 10 Perda/Perkada yang di tegakkan, dengan persentase capaian 63% dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi dengan target jumlah PPNS yang mendapatkan pembinaan sebanyak 50 PPNS dengan realisasi capaian 50 PPNS dengan persentase capaian 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani, Target 100 Pelanggaran/Pengaduan, realisasi capaian 41 Pelanggaran/pengaduan.

- Sub kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.

Output sub kegiatan adalah jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan target 100 kasus dengan kasus yang dapat dicegah sebanyak 100 Kasus dengan capaian 100%. Adapun kasus gangguan yang telah dilakukan pencegahan yaitu: unjuk rasa,penertiban PKL, Tawuran, Pengrusakn Fasilitas Umum, Penertiban Bangunan Liar,Penertiban Anaka Jalanan, Pembinaan Disiplin Anak Sekolah, Pelanggaran Reklame, Gelandangan dan Pengemis, Yustisi, Pencemaran Lingkungan, Penertiban alat peraga kampanye, pengamanan dan pengawalan.

- Sub kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.



Output sub kegiatan adalah 10 Kali Pelaksanaan Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan. Penindakan yang dilaksanakan selama tahun 2024, meliputi :

- a) Penindakan unjuk rasa pada tanggal, 11 Juni 2024 di Kantor Gubernur Gorontalo, oleh Aliansi FSPMI Menuntut Menuntut Dan Meminta Kepada Pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo Terkait Menolak PP Tapera, Menolak Kris BPJS Kesehatan, Menolak UKT (Uang Kuliah Tunggal) Mahal, Menolak Outsourcing , Menolak Omnibuslaw.
- b) Penindakan unjuk rasa pada tanggal, 13 Juni 2024 di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo oleh Massa Aksi HMIG Berjumlah 150 OrangMasa Aksi Menuntut Dan Meminta Kepada Pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo Terkait Menolak PP Tapera, Menolak Kris BPJS Kesehatan, Menolak UKT (Uang Kuliah Tunggal) Mahal, Menolak Outsourcing ,Menolak Omnibuslaw.
- c) Penindakan unjuk rasa pada tanggal, 5 Juli 2024 di Rumah Dinas Gubernur Provinsi Gorontalo oleh Massa Aksi HMIG Berjumlah 300 Orang, Masa Aksi Menuntut Dan Meminta Kepada Pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo Terkait Menolak PP Tapera, Menolak UU TNI Polri , Menolak UU Penyiaran Yang Akan Segera Di terbitkan Dan Sejauh mana Pemerintah Provinsi Gorontalo menolak atas rancangan undang undang tersebut.
- d) Penindakan unjuk rasa pada tanggal, 14 Agustus 2024 di Kantor Gubenur Gorontalo dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo oleh Massa aksi Forum Perjuangan Rakyat Menuntut adanya aktivitas oleh beberapa perusahaan pertambangan di bidang galian C dan B di duga telah melakukan penyerobotan Lahan Hutan produksi terbatas/Hutan Lindung di Wilayah Kecamatan Paguyaman Kab. Boalemo serta di duga tidak memiliki bukti kepemilikan tanah/lahan galian secara SAH berdasarkan aturan yang berlaku dan beberapa dampak kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh aktivitas perusahaan tersebut.
- e) Penindakan unjuk rasa pada tanggal, 20 Agustus 2024 di Kantor Kesbangpol Provinsi Gorontalo dan Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, oleh sebanyak 30 orang massa aksi menuntut persoalan terjadinya pengibaran bendera organisasi papua merdekan dan menanyakan kinerja dari kesbangpol.
- f) Penindakan unjuk rasa pada tanggal, 29 Agustus 2024 di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, oleh sebanyak 100 orang massa Aksi berasal dari beberapa perguruan tinggi di provinsi gorontalo, menuntut persoalan Soal Penolakan Revisi Undang" Yang di sahkan Putusan MK Dan para Masa aksi Juga menuntut Berbagai Parpol DPC Yang berada di provinsi



Gorontalo Membuat surat Penolakan Terkait revisi Undang" Pilkada Tersebut. Masa Berjumlah Kurang lebih 100 Orang.

- g) Penindakan unjuk rasa pada tanggal, 9 September 2024, DPRD Provinsi Gorontalo, oleh sebanyak 150 orang massa Aksi yang tergabung dalam Aliansi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), menuntut Meminta Kepada Para ANGGOTA Dewan Yang Baru Di lantik Agar Menyelsaikan Persoalan Yang Terjadi Di Provinsi Gorontalo. dan meminta kepada para anggota dewan Yang baru di lantik Untuk Menepati janji Kampanye.
- h) Penindakan unjuk rasa tanggal, 16 Oktober 2024, Kantor Gubernur Gorontalo oleh Aliansi Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia menuntut adanya perbaikan dan evaluasi kebijakan, serta penertiban distribusi BBM solar bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Pemerintah Provinsi.
- i) Penindakan unjuk rasa tanggal, 25 Oktober 2024, di Dinas Transmigrasi Provinsi Gorontalo oleh Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Peduli Lingkungan, menuntut pemerintah segera mencabut izin operasi pertambangan yang merusak, serta memastikan adanya tindakan pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang terdampak.
- j) Penindakan unjuk rasa pada tanggal, 25 Oktober 2024 pada Dinas Transmigrasi Provinsi Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo oleh Aliansi Gempar menuntut Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk merespon dengan tegas dan tepat untuk mengatasi permasalahan lingkungan.
- Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
Output sub kegiatan adalah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi yaitu Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Target 1 dokumen, realisasi capaian 1 dokumen. Pelaksanaan rakor trantibum di selenggarakan pada tanggal 17 Mei 2024 bertempat di Hotel Citra Ayu Kabupaten Boalemo yang di hadiri oleh unsur Satpol PP Kabupaten/Kota.
- Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
Output sub kegiatan adalah 1 Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Target 1 dokumen, realisasi capaian 1 dokumen.
Pemberdayaan Linmas dilaksanakan melalui Apel Siaga dalam rangka persiapan pengamanan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang dirangkaikan dengan Lomba Pos kamling, Siskamling dan Ketangkasan Satlinmas yang di selenggarakan pada hari/tanggal, Senin 23



September 2024 bertempat di Lapangan Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

- Sub kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

Output sub kegiatan adalah 2 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, target 2 dokumen, realisasi capaian 2 dokumen. Pelaksanaan Kerja sama meliputi :

- a) Kerja Sama Antar Lembaga melalui sosialisasi upaya penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pencegahan kejahatan dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024 yang di selenggarakan pada hari/tanggal, Rabu 7 Februari 2024 bertempat Hotel Eljie Syariah, Kota Gorontalo yang di hadiri oleh Direktur Binmas Polda Gorontalo, Kepala dinas P2PA Provinsi Gorontalo, Unsur KesbangPol Provinsi Gorontalo, Satpol PP Kabupaten/Kota Se Provinsi Gorontalo.
- b) Kerja Sama Antar Lembaga Bersama Satpol PP dan Polri melauai optimalisasi peran satlinmas dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum pada penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Gorontalo Tahun 2024, yang di selenggarakan pada hari/tanggal, Rabu 4 Desember 2024 bertempat Hotel Eljie Syariah, Kota Gorontalo.

- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.

Output sub kegiatan adalah 50 SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya antara lain melalui Pelatihan mental dan fisik yang bekerja sama dengan Polres Gorontalo.

- Sub kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.

Output sub kegiatan adalah 1 laporan layanan dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani (Laporan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024).

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Output kegiatan adalah 16 Perda/Perkada yang di tegakkan.

- Sub kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Output sub kegiatan adalah 10 (Lima Belas) Perda/Pergub Provinsi yang ditegakkan yaitu :

- a. Pergub Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Disipling Pegawai Aparatur Sipil Negara



- b. Perda Nomor, 1 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- c. Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya
- d. Perda Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- e. Perda Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol
- f. Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- g. Perda Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Provinsi Gorontalo
- h. Perda Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah
- i. Perda Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Danau Limboto
- j. Perda Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Gorontalo
- Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP telah dilaksanakan sebanyak 6 Laporan :

- a. Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur melalui Operasi Yustisi. Pada Selasa, 14 Februari 2023 dalam rangka penegakan Perda Nomor No.10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Aloe Saboe Kota Gorontalo Dan RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango. Terdapat 6 Pelanggar Perda/Perkada yang ditindaklanjuti dengan keluarkannya teguran tertulis.
- b. Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur melalui Operasi Yustisi. Pada Sabtu, 19 Oktober 2024 dalam rangka penegakan Perda Nomor No.1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum terhadap Pedagang Kali Lima (PKL) di Wilayah Kota Gorontalo meliputi: Jalan Kalimadu, Jalan Aryo Katili, Jalan Eks Andalas dan Jalan Dua Susun.
- c. Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur melalui Operasi Yustisi. Pada Selasa, 5 November 2024 dalam rangka penegakan Perda Nomor No.10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango dan Perda Nomor. Terdapat 1 Pelanggar Perda/Perkada yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan teguran tertulis.
- d. Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Rabu,



06 November 2024 terkait dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum, Perda No 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 – 2030. Terdapat 1 Pelanggar perda/perkada yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan teguran tertulis.

- e. Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Rabu, 06 November 2024 terkait dengan Perda Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Zainal Umar Sidiki Kab.Gorontalo Utara, RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Kabupaten Gorontalo, SMA Negeri 5 Gorontalo Utara. Tidak ditemukan Pelanggar perda/perkada yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan teguran tertulis.
 - f. Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur melalui operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Jumat, 15 November 2024 terkait dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Terdapat beberapa unit mobil kontainer yang terparkir di ruas jalan GORR kemudian dilakukan pemanggilan terhadap pemilik kendaraan tersebut.
- Sub kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, dengan target 4 dokumen, realisasi capaian 0 dokumen. Pada tahun 2024 pelanggar perda Satpol PP juga melakukan tindakan penertiban non-yustisial untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tindakan ini dilakukan tanpa melibatkan proses peradilan.

3. Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

Output kegiatan adalah 50 PPNS yang mendapatkan Pembinaan.

- Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda, Target 50 PPNS, realisasi capaian 50 PPNS. Pelaksanaan pengembangan kapasitas dan karier PPNS dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) PPNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme Satpol PP dan PPNS dalam menjalankan tugas dan fungsi. Rakor PPNS dilaksanakan pada 7 Maret 2024 bertempat di Hotel El Madinah Kota Gorontalo yang di hadiri oleh PPNS Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo serta unsur Polri dari POLDA Gorontalo.



2) Program Peningkatan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Outcome dari program adalah Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran target 100% dengan realisasi capaian 100%. Pencapaian outcome diperoleh melalui kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dengan target 1 Dokumen, dengan realisasi capaian 1 dokumen dengan persentase 100% dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan target 30 kali pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan realisasi capaian 30 laporan dengan persentase 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dengan target 1 dokumen.

Output kegiatan adalah 1 Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal.

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Output sub kegiatan adalah 1 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Pelaksanaan kegiatan melalui Rapat Koordinasi dalam rangka evaluasi dan koordinasi dalam pelaksanaan penanganan kebakaran, yang dilaksanakan pada tanggal, 4 Oktober 2024 bertempat di Hotel Eljie Kota Gorontalo, yang di hadiri oleh unsur pemadam kebakaran dari pemerintah kabupaten/kota.

- Sub kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Output kegiatan adalah Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan jumlah aparatur pemadam sebanyak 50 orang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Se Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan pada hari/tanggal Kamis, 3 November 2024 bertempat di Hotel Eljie Syariah Kota Gorontalo dan di hadiri oleh Aparatur Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota se



provinsi gorontalo dengan menghadirkan narasumber unsur POLRI, PMI, Unsur Damkar.

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Output kegiatan adalah 30 Laporan Hasil Pengawasan, Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

- Sub kegiatan Pengawasan penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Output sub kegiatan adalah 30 Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran yang dilaksanakan melalui edukasi dan simulasi kesiapsiagaan serta mitigasi kebakaran di beberapa sekolah-sekolah, Hotel, Perkantoran, Aset Pemerintah Provinsi, perumahan padat penduduk di Kota Gorontalo maupun di Kabupaten.

3. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi.

Outcome dari program adalah Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Output kegiatan adalah 1 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Output sub kegiatan adalah 1 Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 12 selama bulan.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah 20 Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Output sub kegiatan adalah 20 Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan antara lain :2 unit Laptop, 1 Unit Komputer, 2 Unit Kursi Kerja ,1 Unit Meja Kerja,2 Unit Ac,1 Unit TV, 7 Meter Gorden, Pakaian Dinas Lapangan, 1 Unit Drone, 3 Unit HT, Bahan Bakar, Pelumas, Bahan Baku Bangunan,Peralatan Kebersihan, Suku Cadang Kendaraan, Alat Kantor Lainnya.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah 20 Orang Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.



- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
Output sub kegiatan adalah 20 Orang Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan anatar lain : Bimtek dan Diklat Teknis.
- 4. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Output kegiatan adalah 8 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi yang di susun antara lain Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja, KAK, RAB, RKA, LKPJ,LPPD,LAKIP.
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah.
Output sub kegiatan adalah 5 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah antara lain : Dokumen Renja, Perjanjian Kinerja, KAK, DPA, RKA.
 - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Output sub kegiatan adalah 3 Dokumen Perangkat Daerah yang disusun antara lain : Dokumen LKPJ,LPPD,LAKIP.
- 5. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Output kegiatan adalah 4 Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Antara lain Laporan Kinerja dan Realisasi Anggaran yang di evaluasi setiap triwulan I,II,II dan IV dan Perubahan Anggaran APBD selama 1 Tahun Anggaran.
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Output sub kegiatan adalah 39 Orang PNS menerima Gaji dan tunjangan selama 1 Tahun Anggaran.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.
Output sub kegiatan adalah 4 Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Antara lain Laporan Kinerja dan Realisasi Keuangan yang di evaluasi setiap triwulan I,II,II dan IV dan Perubahan Anggaran APBD selama 1 Tahun Anggaran.



3. Kebijakan strategis yang ditetapkan

Tabel 3.35
Kebijakan Strategis Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	- Penegakan Perda dan Perkada - Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman - Pelindungan masyarakat	Perda No. 1 Tahun 2019 Tentang Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	- Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum di provinsi gorontalo - Peningkatan Peran Satuan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota. - Peningkatan Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran

4. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, dan perjanjian Kinerja tahun 2024

Tabel 3.36
Indikator Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo
Sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	63%

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Kinerja.

- 1) Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum memenuhi target yang telah ditetapkan, di pengaruhi :
 - Belum terbentuk sistim pelayanan pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sehingga Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani pada tahun 2024 belum semuanya bersumber dari pengaduan masyarakat tetapi bersumber dari informasi intelijen Satpol PP dilapangan yang kemudian ditindaklanjuti melalui pelaksanaan Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.
 - Kurangnya Koordinasi Antar OPD Pengusul Perda/Perkada dengan Satpol PP, sehingga jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan Satpol PP Provinsi Gorontalo Tahun 2024 belum optimal.
 - Belum adanya peta rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
 - Belum tersusunya Sekretariat PPNS yang terpusat.
 - Masa Aktif Kartu Identitas PPNS beberapa anggota telah habis.
 - Peta Rawan Kebakaran perlu dilakukan permbaharuan.
 - Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman dan Ketertiban umum, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan penerapan spm tahun 2024 yaitu Tidak



ada jumlah Warga Negara yang terkena dampak akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan perda dan perkada.

E.1 **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo**

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo
 - Peningkatan ketahanan terhadap mitigasi dan dampak bencana
 - Peningkatan tata kelola pemerintahan bidang kebencanaan yang baik
 - b. Sasaran dan Program

Tabel 3.37
 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana	Indikator Sasaran : Indeks Ketahanan Bencana	0.48-0.83	0,46	95,14%
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat yang berperan dalam pengurangan resiko bencana	100%	100%	100%
2	Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang kebencanaan	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP	B	BB	100%
		Persentase Hasil Temuan	100%	100%	100%
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Provinsi Gorontalo.	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana SDM aparatur serta perencanaan, monev dan pelaporan	100%	100%	100%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.39
 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

N O	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program penanggulangan bencana	1.000.000.000	996.050.733	99,60 %	100%		
	Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	400.000.000	397.523.743	99,38%	100%	Kurangnya dana operasional sehingga tidak semua wilayah Kab/Kota terlayani	Koordinasi Lintas Sektor Bappeda dan Keuangan terkait usulan anggaran
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	350.000.000	348.832.830	99,66%	100%	Kurangnya SDM yang memenuhi syarat dalam penanganan Darurat Bencana	Mengkoordinasikan dengan BNPB terkait pelatihan teknis penguatan kapasitas SDM di lingkup BPBD Provinsi Gorontalo
	Kegiatan Penataan sistem dasar penanggulangan Bencana	250.000.000	249.694.160	96.84%	100%	BPBD Kab/Kota belum menerapkan secara penuh SPM Sub Urusan Bencana karena minimnya anggaran	Koordinasi dengan Bappeda Kab/Kota terhadap pemenuhan anggaran SPM Sub Urusan Bencana



N O	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
2	Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	9.177.754.427	8.925.234.148	97,25%	100%		
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	354.896.092	354.540.635	9,90%	100%		
	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.114.431.635	6.038.191.845	8,75%	100%		
	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	50.000.000	49.919.086	99,84%	100%		
	Kegiatan Penyediaan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.757.574.800	1.651.591.399	94,29%	100%		
	Kegiatan Penyediaan jasa dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	840.851.900	830.991.183	98,83%	100%		
	JUMLAH	10.117.754.427	9.921.284.881	98,06%	100%		

- 1) Program penanggulangan bencana
- Outcome dari program adalah Persentase masyarakat yang berperan dalam penanggulangan resiko bencana.
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
- Output kegiatan adalah presentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- Sub kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.

Output sub kegiatan adalah Jumlah aparaturnya terkait dengan kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana. Pada kegiatan tahun 2024 yang dilakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana yaitu Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango dalam target 120 aparaturnya yang akan diberi pelatihan sudah tercapai 100% di dua Kabupaten tersebut.

- Sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Output sub kegiatan adalah jumlah laporan pelaksanaan gladi kesiapsiagaan.Pada tahun 2024 dilaksanakannya kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Bencana di Kabupaten Bone Bolango dengan peserta seluruh stakeholder terkait.
2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- Output kegiatan adalah Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.



- Sub kegiatan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Respon Cepat Darurat Bencana. Kejadian Bencana yang terjadi di tahun 2024 antara lain Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan, dll (90 Kali terjadi di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo).

Tabel 3.40
Data Kejadian dan Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo selang Tahun 2024

No	Wilayah	Jenis Bencana (Kali Kejadian)								Ket (KKJ)
		Banjir	Banjir Bandang	Banjir ROB	Tanah Longsor	Kekeringan	Angin Puting Beliung	Cuaca Ekstrem	Gempa Bumi	
1.	Kota Gorontalo	7	3		14		1			25
2.	Kab. Gorontalo	6				1	1			8
3.	Kab. Boalemo	6	1		4		1	1		13
4.	Kab. Pohuwato	16			1			4		21
5.	Kab. Bone Bolango	8	4		2		1			15
6.	Kab. Gorontalo Utara	5	1		2					8
	Total Kejadian Provinsi Gorontalo	48	9		23	1	4	5	9	90

Sumber : BPBD Provinsi Gorontalo, 2024

- Sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang terjadi di Provinsi Gorontalo. Dimana target 100 korban bencana telah terdistribusikan semua (sesuai target).
 - Sub kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.(sesuai target).
3. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
- Output kegiatan adalah Presentase Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
- Sub kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana.
Output sub kegiatan adalah dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana. Pada tahun 2024 target 1 kerjasama antar lembaga tercapai.
 - Sub kegiatan Penanganan Pasca Bencana Provinsi.
Output sub kegiatan adalah jumlah dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang disusun. Tahun 2024 terpenuhi 2 Dokumen yaitu Dokumen JITUPASNA dan R3P.



2) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Outcome dari program adalah Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana SDM Aparatur serta Perencanaan , Monev dan Pelaporan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Dokumen LAKIP,LPPD, Renja dan SPIP (sesuai target).
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
Output kegiatan adalah Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Persentase /Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sesuai target 53 orang.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Output kegiatan adalah Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Output kegiatan adalah Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.(tercapai 100%).

3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, dan perjanjian Kinerja tahun 2024

Tabel 3.41

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo
Sesuai Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Indeks Resiko Bencana Indeks Ketahanan Daerah	122,5	116,02
2	Indeks Tata Kelola Pemerintahan - Nilai Sakip - Persentase Hasil Temuan	BB 100 %	BB 100%

F. Urusan Sosial

F.1 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
 - Terwujudnya pemenuhan hak sosial dasar masyarakat
 - Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan



b. Sasaran dan Program

Tabel 3.42
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial
Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat	Indikator sasaran : Persentase warga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	11%	43.77%	397%
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS perorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	65%	65%	100%
		Persentase PSKS kelembagaan sosial yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	65%	65%	100%
		Persentase SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikasi kompetensi	0	0	0
		Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi	0	0	0
		Persentase warga KAT yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar	0	0	0
		Persentase penerbitan izin penyelenggaraan UGB/PUB yang tertib aturan	50%	50%	100%
	Program penanganan warga negara migran korban kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilayani	100%	37.5%	37.5%
	Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang Disabilitas yang meningkat keberfungsian sosialnya	100%	40%	40%
		Persentase anak terlantar yang meningkat keberfungsian sosialnya	100%	100%	100%
		Persentase lanjut usia terlantar yang meningkat keberfungsian	100%	100%	100%
		Persentase gelandangan dan pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya	0	0	0
		Persentase PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang meningkat keberfungsian sosialnya	100%	100%	100%
		Persentase anak yang mendapatkan orsang tua angkat yang sah secara hukum	100%	85%	85%
	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam menerima pemenuhan kebutuhan dasar	12%	12.99%	108%
		Persentase keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya	0.27%	0.30%	111%
		Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulant	20 Orang	15 Orang	75%
		Persentase lembaga pemerintah/non pemerintah yang memanfaatkan DTKS dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan	35%	35.5%	101%
	Program penanganan bencana	Cakupan penanganan korban bencana alam dan sosial	1.200 Orang	54.095 Orang	4.507,8%
		Cakupan warga masyarakat yang aktif dalam penanggulangan bencana	0	0	0
	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang meningkat fungsinya sebagai media pelestarian nilai kepahlawanan,	100%	100%	100%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
		keperintisan, keuangan dan kesetiakawanan sosial			
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD	Indikator sasaran : Indeks kepuasan masyarakat	B	A-	A-
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase layanan administrasi, sarana prasarana, SDM aparatur serta perencanaan dan pelaporan	100%	100%	100%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.43
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Sosial Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.588.058.797	11.061.630.015	95.46	97.90		
1a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	827.877.012	826.099.820	99.79	99.95		
	- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	603.414.862	602.214.800	99.80	99.93		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.437.100	11.051.071	96.62	100		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.078.150	50.039.600	99.92	100		
	- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.946.900	162.794.349	99.93	100		
1b	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	8.442.289.661	8.343.594.471	98.83	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.307.739.661	8.209.659.330	98.82	100		
	- Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	110.550.000	110.125.911	99.62	100		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.000.000	23.809.230	99.21	100		
1c	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	212.040.000	211.836.946	99.90	100		
	- Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.100.000	44.020.000	99.82	100		
	- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	111.180.000	111.069.721	99.90	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56.760.000	56.747.225	99.98	100		
1d	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	625.030.900	478.946.554	76.63	79.64		
	- Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.200.000	13.842.510	65.29	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	282.169.730	157.890.000	55.96	55.96		
	- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	192.468.100	183.549.400	95.37	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.557.420	36.463.752	99.74	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.856.200	16.512.100	87.57	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	9.129.450	6.149.000	67.35	67.69		
	- Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	47.500.000	47.465.992	99.93	100		
	- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.150.000	17.073.800	99.55	100		
1e	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	782.700.000	715.615.523	91.43	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000	172.915.523	72.05	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	542.700.000	542.700.000	100	100		
1f	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	698.121.224	485.536.701	69.55	83.50		
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.267.600	45.911.200	78.79	85.90		
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	362.738.000	229.278.981	63.21	88.73		
	- Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	167.673.624	101.505.420	60.54	60.58		
	- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	109.442.000	108.841.100	99.45	100		
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.801.075.135	1.791.395.615	99.46	99.87		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp)	(%)	(%)		
2a	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	110.598.275	107.896.594	97.56	97.81	Kurangnya informasi terhadap penyelenggaraan UGB dan penyelenggaraan PUB sehingga tidak mengurus izin	Melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap penyelenggaraan (UGB dan PUB)
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	110.598.275	107.896.594	97.56	97.81		
2b	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.690.476.860	1.683.499.021	99.59	100		
	- Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	74.290.240	74.275.428	99.98	100		
	- Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	556.419.986	549.974.208	98.84	98.85		
	- Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.059.766.634	1.059.249.385	99.95	100		
3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	128.602.000	119.102.510	92.61	93.49		
3a	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	128.602.000	119.102.510	92.61	93.49		
	- Sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	128.602.000	119.102.510	92.61	93.49		
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.305.663.720	2.922.490.993	88.41	88.73		
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	589.668.800	370.858.678	62.89	63.57	- Anggaran penyedia permakanan hanya terealisasi 4 rang dari jumlah target 10 - Adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana secara keseluruhan karena pelaksanaan layanan nanti	- Diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya layanan panti bagi penyandang disabilitas terlantar - Untuk memaksimalkan kebutuhan dengan perencanaan yang telah ditetapkan



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp)	(%)	(%)		
4a						dilaksanakan pada bulan September Bahwa dalam penyediaan obat-obatan melalui e-purchasing, hanya terdapat 1 penyedia, dan ada beberapa obat yang akan disediakan dalam panti tidak tersedia atau tidak sesuai Ketidaksesuaian antara sub kegiataan dan pelaksanaan kegiatannya sehingga layanan dapat maksimal	Perlu adanya tambahan penyedia sehingga banyak pilihan dan terpenuhinya obat-obatan yang telah rencanakan sesuai kebutuhan klien Diperlukan adanya penyesuaian antara sub kegiatan dan pelaksanaan kegiatannya sehingga layanan dapat maksimal
	- Sub kegiatan Penyediaan Permakanan	188.326.000	17.839.200	9.47	11.73		
	- Sub kegiatan Penyediaan Sandang	40.000.000	39.992.150	99.98	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	200.422.800	185.237.800	92.42	92.42		
	- Sub kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.000.000	0	0	0		
	- Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	98.878.000	71.806.800	72.62	71.88		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	60.042.000	55.982.728	93.24	93.97		
4b	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.094.369.700	1.087.604.329	99.39	99.72	Belum tersedianya Panti Sosial Anak Terlantar atau Lembaga Pengasuhan Anak sebagai pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dalam upaya perlindungan, pengasuhan, pengembangan dan rehabilitasi sosial bagi Anak Terlantar untuk meningkatkan persentase Anak Terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial	Menjalin kerjasama dengan 2 (dua) Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yaitu LKSA Al Inayah, Kab. Bone Bolango dan LKSA Darul Mutmain Tabongo untuk pemenuhan layanan rehabilitasi sosial dasar Anak dalam panti
	- Sub kegiatan Penyediaan Makanan	573.350.000	569.809.300	99.38	100		
	- Sub kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	40.054.000	37.724.125	94.35	94.34		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub kegiatan Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	51.800.000	51.485.548	99.39	99.39		
	- Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	429.165.700	428.585.356	99.86	99.89		
4c	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.282.103.220	1.128.066.538	87.98	88.19		
	- Sub kegiatan Penyediaan Permakanan	300.000.000	224.692.999	74.90	74.94		
	- Sub kegiatan Penyediaan Sandang	100.000.000	86.601.304	86.60	86.61		
	- Sub kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	135.000.000	129.092.920	95.62	95.62		
	- Sub kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	34.745.720	3.999.948	11.51	11.51		
	- Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	302.460.000	294.473.130	97.34	94.94		
	- Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	289.457.500	288.610.586	99.71	99.71		
	- Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	19.540.000	17.992.900	92.08	92.08		
	- Sub kegiatan Pemulasaraan	20.000.000	5.000.000	25	75		
	- Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	80.900.000	77.602.751	95.92	95.70		
4d	Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	339.522.000	335.961.448	98.95	99		
	- Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	339.522.000	335.961.448	98.95	99		
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	8.080.394.875	8.001.348.674	99.02	99.98		
5a	Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	50.000.000	48.342.100	96.68	96.68		
	- Sub kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI	50.000.000	48.342.100	96.68	96.68		
5b	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	8.030.394.875	7.953.006.574	99.04	100		
	- Sub kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.848.081.500	5.775.191.091	98.75	100		
	- Sub kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.034.899.375	2.030.474.113	99.78	100	Untuk Bantuan Sosial UEP & PEKKA pada APBD-P tidak dialokasikan biaya untuk :	Pada APBD-P untuk bantuan sosial UEP & PEKKA dialokasikan anggaran untuk verifikasi, Bimtek dan Monitoring



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp)	(%)	(%)		
						- Verifikasi dan Identifikasi - Bimtek - Monitoring	
	- Sub kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	147.414.000	147.341.370	99.95	99.98	Pelaksanaan identifikasi administrasi penyandingan nama usulan untuk bantuan sosial di DTKS harus melalui Aplikasi SIKS-NG, sedangkan selama ini menggunakan DTKS non aplikasi yang diterbitkan oleh kemensos pada tahun 2022. Untuk melihat DTKS yang UP-DATE, kami tidak memiliki akses ke Aplikasi, akses tersebut hanya dimiliki oleh orang tertentu yang terdaftar di PUSDATIN	Adanya akses ke Aplikasi SIKS-NG untuk dapat menyandingkan nama usulan calon penerima bantuan
6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.087.432.140	1.016.931.963	93.52	95.52		
6a	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.087.432.140	1.016.931.963	93.52	95.52		
	- Sub kegiatan Penyediaan Permakanan	842.235.000	823.449.363	97.77	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Sandang	120.000.000	119.850.000	99.88	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	70.197.140	67.531.200	96.20	100		
	- Sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	25.000.000	6.101.400	24.41	25		
	- Sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	30.000.000	0	0	100	Anggaran tidak terealisasi kegiatan fisiknya terlaksana	Kebutuhan psikososial telah terpenuhi dari para donatur
7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	600.791.350	598.948.680	99.69	100		
7a	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	600.791.350	598.948.680	99.69	100		
	- Sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	600.791.350	598.948.680	99.69	100		
	JUMLAH	26.592.018.017	25.511.853.450	95.94	97.30		

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
- Outcome dari program adalah Persentase (%) layanan administrasi, sarana prasarana, sdm aparatur serta perencanaan dan pelaporan mencapai 100%.
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.



Output sub kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Forum OPD Urusan Sosial, Rakor SPM Urusan Sosial dan Penyusunan Renja.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Output sub kegiatan adalah tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen.

- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Output sub kegiatan adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sejumlah 8 laporan (LKPJ, LPPD, SPM, LAKIP, SAKIP RB, RENJA, SPIP, DATA SEKTOR).

- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Output sub kegiatan adalah tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sejumlah 3 laporan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Output sub kegiatan adalah terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 70 Orang.

- Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Output sub kegiatan adalah terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD sejumlah 1 dokumen.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Output sub kegiatan adalah tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sejumlah 1 laporan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

Output sub kegiatan adalah terlaksananya pengadaan pakaian dinas sejumlah 1 paket.

- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Output sub kegiatan adalah terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 15 orang.

- Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan.

Output sub kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diikuti 160 orang.



4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Output sub kegiatan adalah terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan sebanyak 1 paket.
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Output sub kegiatan adalah terlaksananya Penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan sebanyak 3 paket.
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Output sub kegiatan adalah terlaksananya penyediaan paket Peralatan Rumah Tangga yang dilaksanakan sebanyak 3 paket.
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
Output sub kegiatan adalah terlaksananya penyediaan paket bahan logistik kantor yang dilaksanakan sebanyak 3 paket.
 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Output sub kegiatan terlaksananya penyediaan paket Barang Cetak dan Penggandaan yang dilaksanakan sebanyak 6 paket.
 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan / Material.
Output sub kegiatan adalah terlaksananya penyediaan paket bahan/material yang dilaksanakan sebanyak 1 paket.
 - Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
Output sub kegiatan adalah tersusunnya laporan fasilitas kunjungan tamu 1 laporan.
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Output sub kegiatan adalah tersusunnya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Output sub kegiatan adalah tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 2 laporan.
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Output sub kegiatan adalah tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 3 laporan.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Output sub kegiatan adalah terlaksananya penyediaan jasa Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 unit.



- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Output sub kegiatan adalah terlaksananya penyediaan jasa kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar kan Pajak dan Perizinannya sebanyak 11 unit.

- Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Output sub kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebanyak 55 unit.

- Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Output sub kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit.

2) Program pemberdayaan sosial.

Outcome dari program adalah :

- Persentase (%) PSKS perorangan yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mencapai 100%
- Persentase (%) PSKS kelembagaan sosial yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial mencapai 100%
- Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikasi kompetensi mencapai 0%
- Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi mencapai 0%
- Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar mencapai 0%
- Persentase (%) penerbitan izin penyelenggaraan UGB/PUB yang tertib aturan mencapai 100%

b. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.

Output sub kegiatan adalah terlaksananya pengawasan dan perizinan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang (UGB dan PUB) dari target 12 sebanyak 6 Dokumen teralisasi.

2. Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.

- Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi.

Output sub kegiatan adalah sebanyak 30 PSM di Kabupaten Boalemo mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap tugas pokok dan fungsi. Melalui kegiatan ini, para PSM mendapat kesempatan berdiskusi secara mendalam



mengenai kendala lapangan serta berbagi pengalaman sukses yang dapat diterapkan kembali di wilayah kerja masing-masing. Hasilnya, PSM yang terlatih mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- Sub kegiatan peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi.

Output sub kegiatan adalah Bimtek yang diikuti oleh 77 TKSK Provinsi Gorontalo memberikan fokus pada pengembangan keterampilan teknis, pengelolaan administrasi, serta peningkatan kemampuan komunikasi. Para peserta juga dilatih untuk memahami dinamika sosial masyarakat dengan pendekatan yang berbasis data, sehingga intervensi sosial yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran. TKSK kini lebih siap menjalankan peran sebagai ujung tombak pelayanan sosial di kecamatan masing-masing.

- Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi.

Output sub kegiatan adalah :

- a) Terlaksananya bimbingan teknis (Bimtek) laporan pertanggungjawaban bantuan sosial di kota gorontalo dan kabupaten boalemo, di ikuti oleh 92 lembaga. WKSBM 69 lembaga, karang taruna 20 lembaga dan LKSA 3 lembaga, bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan sosial.
- b) Terselenggaranya bimtek penguatan kapasitas karang taruna di kota gorontalo memperkuat peran mereka sebagai motor penggerak pembangunan sosial di desa dan kelurahan.
- c) Dilaksanakannya launching dan sosialisasi SIDAK SOSIAL serta Bimtek LKS/LKSA di kota gorontalo bertujuan memperkuat system pengelolaan kesejahteraan sosial melalui penerbitan SIOP, penginputan data PMKS dan laporan TKSK. Para peserta juga mendapatkan pemahaman mendalam tentang akreditasi dan strategi peningkatan kualitas layanan.
- d) Terwujudnya bimtek penguatan kapasitas WKSBM berfokus pada peningkatan kemampuan majelis taklim, takmirul masjid dan rukun duka dalam merancang dan melaksanakan program kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

- 3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.

Outcome dari program adalah Persentase (%) warga negara migran korban tindak kekerasan yang dilayani mencapai 37.5%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.

- Sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.

Output sub kegiatan adalah terfasilitasi warga Negara migran/terlantar yang dipulangkan ke daerah asal dari target 16 orang namun terealisasi 6 orang.

Target tersebut tidak tercapai disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

- Jumlah warga migran yang melaporkan dan ditindaklanjuti hanya 6 orang
- Kurang optimalnya koordinasi dalam penanganan warga migran

4) Program Rehabilitasi Sosial.

Outcome dari program adalah :

- Persentase (%) penyandang disabilitas yang meningkat keberfungsian sosialnya mencapai 40%
- Persentase (%) anak terlantar yang meningkat keberfungsian sosialnya mencapai 100%
- Persentase (%) lanjut usia terlantar yang meningkat keberfungsian sosialnya mencapai 100%
- Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya mencapai 0%
- Persentase (%) PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang meningkat keberfungsian sosialnya mencapai 100%
- Persentase (%) anak yang mendapatkan orang tua angkat yang sah secara hukum mencapai 85%

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti.

- Sub kegiatan Penyediaan Permakanan.

Output sub kegiatan adalah Jumlah orang pada panti disabilitas Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan target 10 orang namun terealisasi 4 orang disabilitas, dikarenakan Panti disabilitas baru mulai beroperasi pada bulan September 2024. Sudah beberapa kali melakukan penjangkauan ke beberapa klien namun belum mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga.



- Sub kegiatan Penyediaan Sandang.
Output sub kegiatan adalah Jumlah orang pada panti disabilitas yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi dari target 10 orang namun terealisasi 4 orang disabilitas, dikarenakan Panti disabilitas baru mulai beroperasi pada bulan September 2024. Sudah beberapa kali melakukan penjangkauan ke beberapa klien namun belum mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga.
 - Sub kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses.
Output sub kegiatan adalah tersedianya 1 unit asrama untuk 10 orang klien disabilitas.
 - Sub kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti.
Output sub kegiatan adalah -
 - Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari – hari.
Output sub kegiatan adalah Jumlah orang pada panti disabilitas yang mendapatkan bimbingan aktivitas hidup sehari – hari dari target 10 orang namun terealisasi 4 orang, dikarenakan Panti disabilitas baru mulai beroperasi pada bulan September 2024. Sudah beberapa kali melakukan penjangkauan ke beberapa klien namun belum mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga.
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar.
Output sub kegiatan adalah Jumlah 2 Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi.
2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti.
- Sub kegiatan Penyediaan Makanan.
Output sub kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar permakanan 45 Anak dalam panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sesuai dengan kewenangan provinsi dalam pemenuhan SPM yang bekerja sama dengan LKSA milik masyarakat (LKSA Al Inayah, LKSA Darul Mutmain, RPSA Amal Sholeh).
 - Sub kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
Output sub kegiatan adalah terpenuhinya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi 30 Anak pada 2 LKSA (LKSA Al Inayah dan LKSA Darul Mutmain).
 - Sub kegiatan Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti.
Output sub kegiatan adalah terpenuhinya akses ke layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti bagi 30 Anak pada 2 LKSA (LKSA Al Inayah dan LKSA Darul Mutmain).



- Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti.
Output sub kegiatan adalah tersedianya 2 dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.
- 3. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti.
 - Sub kegiatan Penyediaan Permakanan.
Output sub kegiatan adalah jumlah orang pada panti lanjut usia Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan target 23 orang terealisasi 23 orang lanjut usia.
 - Sub kegiatan Penyediaan Sandang.
Output sub kegiatan adalah jumlah Orang pada panti lanjut usia Kewenangan Provinsi yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun sebanyak 23 Lanjut Usia.
 - Sub kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah diakses.
Output sub kegiatan adalah tersedianya 1 unit asrama untuk 23 orang lanjut usia.
 - Sub kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial.
Output sub kegiatan adalah jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi sebanyak 23 Lansia.
 - Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial.
Output sub kegiatan adalah jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi sebanyak 23 Lansia.
 - Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari – hari.
Output sub kegiatan adalah jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari Hari Kewenangan Provinsi sebanyak 23 Lansia.
 - Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga.
Output sub kegiatan adalah jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi dari target 5 orang teralisasi melebihi target yaitu sebanyak 6 Orang.
 - Sub kegiatan Pemulasaraan.
Output sub kegiatan adalah jumlah lanjut usia yang mendapatkan Pemulasaran sebanyak 2 Orang.
 - Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti.



Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar 4 Dokumen.

4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.

- Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA sebanyak 3 Dokumen.

5) Program perlindungan dan jaminan sosial.

Outcome dari program adalah :

- Presentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam menerima pemenuhan kebutuhan dasar mencapai 100%
- Persentase (%) keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya mencapai 100%
- Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan mencapai 75%
- Persentase (%) lembaga pemerintah / non pemerintah yang memanfaatkan DTKS dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan mencapai 35.5%

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.

- Sub kegiatan Pengangkatan Anak antar WNI.

Output sub kegiatan adalah jumlah Anak yang mendapatkan pertimbangan izin pengangkatan orang tua asuh/orang tua angkat sebanyak 17 Anak.

2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.

- Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Output sub kegiatan adalah Terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga miskin sebanyak 23.000 keluarga penerima manfaat (KPM).

- Sub kegiatan Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Output sub kegiatan adalah :

- Jumlah penerima bantuan UEP & PEKKA sebanyak 532 KPM (524 KPM APBD Induk & 8 KPM APBD-P) dan semuanya telah tersalurkan bantuannya (100%) dengan nilai total bantuan sebesar Rp. 1.330.000.000
- Prosentase Keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya adalah sebesar 8,8% atau 44 KPM dari jumlah 500

KPM (penerima UEP tahun 2022) yang telah dilakukan evaluasi pada tahun ini.

- Sub kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.
Output sub kegiatan adalah Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulant mencapai 44 KPM (dari jumlah 500 KPM penerima UEP tahun 2022) yang telah dilakukan evaluasi pada tahun ini, namun setelah dilakukan evaluasi kembali secara mendetail, terdapat 15 KPM yang diberikan bantuan untuk Pengembangan Usahanya, dengan nominal bantuan Rp.5 juta untuk masing-masing KPM. Total nilai bantuan untuk 15 KPM UEP Pengembangan yaitu Rp. 75 Juta.

6) Program penanganan bencana.

Outcome dari program adalah :

- Cakupan penanganan korban bencana alam dan sosial sebanyak 54.094 orang
- Cakupan warga masyarakat yang aktif dalam penanggulangan bencana 0%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

- Sub kegiatan Penyediaan Permakanan.
Output sub kegiatan adalah jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Layanan Permakanan dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Kewenangan Provinsi sebanyak 54.094 Orang/Jiwa yang tersebar di wilayah kabupaten/kota.
- Sub kegiatan Penyediaan Sandang.
Output sub kegiatan adalah jumlah Orang yang Mendapatkan seragam sekolah yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi sebanyak 450 orang.
- Sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi.
Output sub kegiatan adalah jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi pada masa tanggap darurat sebanyak 2 unit.
- Sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi sebanyak 90 orang.
- Sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial.
Output sub kegiatan adalah terlaksananya pelayanan dukungan psikososial bagi penyintas.

7) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Outcome dari program adalah Persentase (%) taman makam pahlawan yang meningkat fungsinya sebagai pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial mencapai 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

- Sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.



Output sub kegiatan adalah :

- Taman Makam Pahlawan (TMP).
Taman Makam Pahlawan (TMP) merupakan makam para pejuang kemerdekaan maupun veteran yang berkontribusi dalam memperjuangkan dan membela kemerdekaan dari penjajah. Taman Makam Pahlawan (TMP) berada di Desa Pentadio, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.
- Makam Pahlawan Nasional (MPN).
Makam Pahlawan Nasional (MPN) merupakan makam Bapak. Nani Wartabone yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pahlawan Nasional. Makam Pahlawan Nasional (MPN) berada di Desa Bube Baru, Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.
Kedua Makam ini berdasarkan nilai fungsinya telah 100% pemanfaatannya sebagai objek pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial, hal ini di tunjukkan dengan adanya kegiatan ziarah momentum hari-hari besar tertentu, yang dilakukan baik oleh TNI/Polri maupun oleh institusi lainnya.

3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, dan perjanjian Kinerja tahun 2024

Tabel 3.44
Indikator Kinerja Urusan Sosial
Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	92%	97.4%
2	Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial	23%	43.77%

4. Hal-Hal Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024.
- Program Pemberdayaan Sosial berupa intervensi terhadap warga pada Komunitas Adat Terpencil yang menjadi indicator outcome pada program dimaksud sesuai dengan Permendagri no. 90/2019 sudah bukan kewenangan Pemerintah Provinsi namun masih tercantum dalam Rentra Dinas Soisal.
 - Rekomendasi RTL : penjelasan akan melakukan penyusuaian target dan indikator pada Rentra 2025-2029.
 - Program Pemberdayaan Sosial berupa presentase SDM kesejahteraan sosial yang memiliki sertifikat kompetensi. Kegiatan ini belum sempat dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya.
 - Rekomendasi RTL : berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk membentuk Tim penilai sertifikasi kompetensi SDM Kesos.



- Program Pemberdayaan Sosial berupa presentase Lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi. Kegiatan ini belum sempat dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya.
 - Rekomendasi RTL : berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk membentuk Tim penilai Lembaga Kesos.
- 5. Tindakanlanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya.
 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Untuk Urusan Sosial tidak mendapatkan Rekomendasi DPRD ditahun sebelumnya.
- 6. Penghargaan nasional yng diterima Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tahun 2024.
 Piagam Penghargaan dari **panrb** yang diberikan kepada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Linkup Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan nilai A- Kategori “Sangat Baik” Tahun 2024.
- 7. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada tahun 2024.
 - Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputin Wilayah Suluttenggomaltut tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
 - Perjanjian Kerjasama Antara Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo dan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tentang Dukungan Program Bantuan Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Gorontalo.

3.2.2 *Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar*

A. *Urusan Tenaga Kerja*

A.1 *Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo*

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
 - Meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian.
 - Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan
 - b. Sasaran dan Program

Tabel 3.45
 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja	Indikator Sasaran : Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	26,5%	24,23%	91,43%
	Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih	25%	25%	100%
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar	25%	53,46%	213,84%
2	Sasaran :	Indikator Sasaran :			



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%	100%
	Program Hubungan Industrial	Persentase Jumlah Perusahaan yang dibina dalam pencegahan perselisihan hubungan industrial	25%	25%	100%
3	Sasaran : Meningkatkan ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan	Indikator Sasaran : Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	3,49%	5,45%	156,16%
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Jumlah Perusahaan yang dibina dan diperiksa	17%	33,33%	196,06%
4	Sasaran : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP DTK-ESDMT	BB	BB	100%
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%

Sasaran : Meningkatkan Jumlah Serapan Tenaga Kerja

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja dengan target tahun 2024 sebesar 26,5%. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun n dan tahun n-1. Pada tahun 2024, tercatat bahwa jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 7.096 orang, sedangkan capaian jumlah pencari kerja yang ditempatkan tahun sebelumnya adalah 5.712 orang. Dari data tersebut, maka didapatkan capaian persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja sebesar 24,23%.

Sasaran : Meningkatkan Kondisi Hubungan Industrial yang kondusif

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan sebesar 100%. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2024, tercatat bahwa jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan sebanyak 4 kasus dan jumlah jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang dilaporkan sebanyak 4 orang. Hal tersebut menggambarkan pencapaian persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan yaitu sebesar 100%.

Sasaran : Meningkatkan Ketaatan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan

Indikator kinerja sasaran ini adalah Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan sebesar 3,49 %. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dengan jumlah Perusahaan yang terdaftar pada WLKP Online. Pada tahun 2024, tercatat bahwa jumlah Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan sebanyak 240 perusahaan dan jumlah Perusahaan yang terdaftar pada WLKP Online sebanyak 4.405



perusahaan. Hal tersebut menggambarkan pencapaian persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan yaitu sebesar 5,45%.

Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi.

Indikator kinerja sasaran ini adalah Nilai SAKIP DTKESDMT dengan target nilai BB. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2024, SAKIP yang dievaluasi adalah SAKIP Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2023. Hasil penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang evaluasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo memperoleh nilai sebesar 78,11 dengan predikat BB (Sangat Baik).

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.46
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Tenaga Kerja Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	549.970.000	542.717.821	98,68	100		
1a	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kompetensi	549.970.000	542.717.821	98,68	100		
	- Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi	372.220.000	365.638.540	98,23	100	Adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan pemagangan karena adanya peraturan baru terkait Perusahaan yang menjadi Lokasi pemagangan harus terdaftar dalam aplikasi Siap Kerja (Ayo Magang Vokasi)	Sosialisasi ke Perusahaan terkait peraturan baru tersebut serta dibantu dalam pembuatan akun dan pendaftaran di aplikasi Siap Kerja (Ayo Magang Vokasi)
	- Sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kompetensi (UPTD BLK)	177.750.000	177.079.281	99,62	100		
2	Program penempatan tenaga kerja	314.100.350	313.156.040	99,70	100		
2a	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	314.100.350	313.156.040	99,70	100		
	- Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	314.100.350	313.156.040	99,70	100	Belum optimalnya data yang disampaikan oleh Disnaker Kab/Kota	Membuat komitmen dengan Disnaker Kab/Kota terkait penyampaian data tepat waktu dan data yang diberikan lebih detail (by name by address)
3	Program Hubungan Industrial	859.016.276	849.203.708	98,86	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
3a	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000	99.987.425	99,99	100		
	- Sub kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	100.000.000	99.987.425	99,99	100		
3b	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	759.016.276	749.216.283	98,71	100		
	- Sub kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	341.440.000	341.330.330	99,97	100		
	- Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	417.576.276	407.885.953	97,68	100		
4	Program pengawasan ketenagakerjaan	161.960.000	161.941.637	99,99	100		
4a	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	161.960.000	161.941.637	99,99	100		
	- Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	161.960.000	161.941.637	99,99	100		
5	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	13.890.893.617	13.596.156.876	97,88	100		
5a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	466.712.650	463.615.724	99,34	100		
	- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	191.551.400	188.541.826	98,43	100		
	- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	275.161.250	275.073.898	99,97	100		
5b	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.266.150	673.420.474	94,68	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.974.150	479.590.659	95,73	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BLK	210.292.000	193.829.815	92,17	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
5c	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Perangkat	12.287.591.319	12.050.589.758	98,07	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.199.191.319	11.962.808.540	98,06	100		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	88.400.000	87.781.218	99,30	100		
5d	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	425.323.498	408.530.920	96,05	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	425.323.498	408.530.920	96,05	100		
		15.775.940.243	15.463.176.082	98,02	100		

- 1) Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Outcome dari program adalah Persentase pencari kerja yang dilatih dengan target sebesar 25%. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan besarnya jumlah peserta pelatihan oleh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi dan UPTD Balai Latihan Kerja yang dibiayai APBD Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi dan UPTD Balai Latihan Kerja telah memberikan pelatihan bagi 80 orang pencari kerja dari target 80 orang, sehingga capaian Persentase pencari kerja yang dilatih sebesar 25%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelaksanaan Latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi.

Output kegiatan adalah 80 orang tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.

Target sebanyak 50 orang yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi. Aktivitas dari kegiatan ini adalah pemagangan dalam negeri yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu sebesar 50 orang peserta magang pada 8 perusahaan di Provinsi Gorontalo.

Berikut perusahaan Lokasi pemagangan dalam negeri tahun 2024 :

1. PT. Nenggapratama Prima Nusantara

2. PT. Gembira Grosir Sejahterah

3. PT. BFI Finance

4. Hotel Damhil

5. Hotel Citra Ayu

6. Arafah Akrilik
- III - 145

7. CV. Cahaya Ighniya

8. Adila Cake & Kukis

- Sub kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi.

Target sebanyak 30 orang yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi. Aktivitas dari kegiatan ini adalah pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo. Realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu sebesar 30 orang atau 100%. Pelatihan yang dilaksanakan adalah Pengelolaan Pakan Ikan dan Unggas di 2 (dua) lokasi yaitu :

1. Desa Jatimulyo Kec. Wonosari Kab. Boalemo sebanyak 15 orang peserta
2. Yayasan Putra Mandiri Kel. Molosipat U Kec. Sipatana Kota Gorontalo sebanyak 15 orang peserta, dimana kelima belas peserta tersebut merupakan penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas yaitu tuna wicara

2) Program penempatan tenaga kerja

Outcome dari program adalah Persentase jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dengan target sebesar 25%. Pada tahun 2024, capaian untuk indicator outcome ini yaitu sebesar 53,46%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

Output kegiatan adalah 6000 orang pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karirhub). Untuk pencapaian kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.
Target sebanyak 6000 orang pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online (karirhub). Capaian atas pelaksanaan sub kegiatan ini merupakan kompilasi data dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan. Pada tahun 2024 tercatat jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui system online adalah sebanyak 12.822 orang.

3) Program Hubungan Industrial

Outcome dari program adalah Persentase jumlah Perusahaan yang dibina dalam pencegahan perselisihan hubungan industrial dengan target sebesar 25%. Pada tahun 2024, capaian indicator outcome ini yaitu sebesar 25%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah 4 kasus hubungan industrial yang diselesaikan. Untuk pencapaian kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi. Target 50 perkara perselisihan yang terselesaikan. Capaian atas pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 4 perkara perselisihan yang terselesaikan dari 4 perkara yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Tidak tercapainya target penyelesaian perkara hubungan industrial ini menggambarkan kondisi hubungan industrial yang kondusif dikarenakan kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi lebih sedikit dari target.

2. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK).

Output kegiatan adalah 1 (satu) dokumen UMP yang ditetapkan. Untuk pencapaian kegiatan ini dilaksanakan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Penetapan upah minimum provinsi (UMP) dengan target 1 SK penetapan UMP.

Capaian atas pelaksanaan sub kegiatan ini adalah SK Gubernur Gorontalo Nomor 482/34/XII/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2025. Dalam SK Penetapan UMP tersebut, menetapkan UMP Provinsi Gorontalo Tahun 2025 sebesar Rp 3.221.731,-

- Sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

Target 2.301 tenaga kerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Capaian atas pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 2.301 orang atau 100%.

4) Program pengawasan ketenagakerjaan

Outcome dari program adalah Persentase jumlah perusahaan yang dibina dan diperiksa dengan target 17%. Pada tahun 2024 capaian indicator outcome ini sebesar 33,33%. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan jumlah Perusahaan yang dibina sebanyak 240 perusahaan dan jumlah Perusahaan yang diperiksa sebanyak 720 perusahaan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Output kegiatan adalah 240 perusahaan yang menerapkan Norma Ketenagakerjaan. Untuk pencapaian kegiatan ini dilaksanakan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan.



Target 420 perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan. Capaian atas pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 240 Perusahaan atau 57,14%. Selain itu penyelesaian kasus tindak pidana ketenagakerjaan tahun 2024 yaitu :

1. PT Bermuda Konsultan Kota Gorontalo Pelanggaran UU No.24 /2011 ttg BPJS.
2. PT. Royal Coconut Kab. Gorontalo Pelanggaran UU 3/1951 ttg pengawasan perburuhan (Tipiring)
3. PT. Petrolindo Energi Perkasa, Kab. Bone Bolango Pelanggaran UU No.6/2023 ttg Penetapan Perppu No 2/2022 ttg cipta kerja.

5) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Outcome dari program adalah persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah 6 dokumen yang terdiri dari 2 dokumen perencanaan dan 4 dokumen evaluasi perangkat daerah dan pada tahun 2024 telah terealisasi 6 dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah. Output kegiatan ini dicapai dari pelaksanaan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Capaian atas pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 2 dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu :
 - 1) Rencana Kerja (Renja) OPD
 - 2) Renstra Perubahan OPD
- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Capaian atas pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 4 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - 1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
 - 2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 - 3) Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ)
 - 4) Laporan Kinerja Triwulan

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan sebagaimana berikut :

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Output sub kegiatan adalah Capaian dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah 1 laporan akhir tahun SKPD.



- Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
Output sub kegiatan adalah 100 orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
- 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dilaksanakan melalui 1 (satu) sub kegiatan sebagaimana berikut :
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Output sub kegiatan adalah 10 paket sarana prasarana yang disediakan.
- 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi dan UPTD Balai Latihan Kerja.
Output sub kegiatan adalah 1 (satu) laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
- 3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 3.47

Kebijakan Strategis Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Gorontalo	Surat Keputusan Gubernur Nomor 474/34/XI/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Gorontalo	Meningkatkan persentase serapan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo melalui revitalisasi Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi

- 4. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, dan perjanjian Kinerja tahun 2024

Tabel 3.48

Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

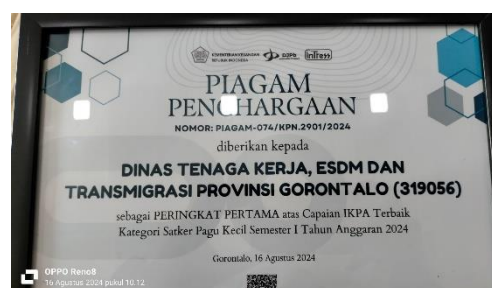
No	Kebijakan Strategis	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,49	3,13
2	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	59	61,57
3	Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja	26,50%	55,34%
4	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	100%	100%
5	Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	3,49%	5,45%

5. Hal-hal lain yang perlu disampaikan terkait capaian indikator.
 - Jumlah pengawas yang terbatas sementara jumlah perusahaan yang terus berkembang, terutama di sektor-sektor yang padat karya, menyebabkan pengawasan menjadi tidak maksimal. Pengawas ketenagakerjaan akan kesulitan untuk memantau setiap perusahaan dengan seksama. Akibatnya, banyak pelanggaran ketenagakerjaan yang tidak terdeteksi.
 - Bursa Kerja Khusus pada SMK berfungsi sebagai jembatan antara alumni SMK dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dengan adanya BKK, alumni SMK dapat dengan mudah menemukan peluang kerja sesuai dengan kualifikasi mereka, sementara perusahaan dapat dengan cepat mengakses calon tenaga kerja yang memenuhi kriteria.

Jumlah SMK di Provinsi Gorontalo sebanyak 60 SMK, sedangkan SMK yang telah memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK) sebanyak 29 BKK yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kota Gorontalo sebanyak 7 BKK
 2. Kabupaten Gorontalo sebanyak 9 BKK
 3. Kabupaten Boalemo sebanyak 8 BKK
 4. Kabupaten Pohuwato sebanyak 2 BKK
 5. Kabupaten Bone Bolango sebanyak 2 BKK
 6. Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 2 BKK
- Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pemagangan Dalam Negeri yang mengikutkan 223 orang peserta, 61,59% lulusan magang terserap di dunia usaha dunia industri.
6. Tindakanlanjutan Rekomendasi DPRD ditahun sebelumnya.
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo untuk Urusan Tenaga Kerja, tidak mendapatkan rekomendasi DPRD ditahun sebelumnya.
 7. Penghargaan nasional yng diterima Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tahun 2024.

Penghargaan yang diterima pada urusan ketenagakerjaan yaitu Penghargaan sebagai peringkat pertama atas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik kategori Satker Pagu Kecil Semester I Tahun Anggaran 2024



8. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo pada tahun 2024.
Pada tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo untuk Urusan Tenaga Kerja melaksanakan perjanjian Kerjasama/MoU yaitu :
 - 1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Gorontalo tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan standar industri PT. Sumber Alfaria



- Trijaya, Tbk Nomor 724/PEMKESRA/KB/XII/2024 Nomor 004/SAT-GTO/HC/XII/2024
Tanggal 9 Desember 2024 berlaku selama 5 (lima) tahun.
- 2) Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo dan Baznas Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Nomor 415 Tahun 2024 tanggal 415 Tahun 2024
Tanggal 9 Desember 2024 berlaku selama 1 (satu) tahun.
- 3) Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dan Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 2876/UN47.B9/KS/2024 Nomor 560/DTKESDMT/1203/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 berlaku selama 1 (satu) tahun.
- 4) Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya Universitas Bina Mandiri Gorontalo dengan UPTD Balai Latihan Kerja Provinsi Gorontalo tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Keterampilan Mahasiswa Nomor 425/UBM/MoA/HK.07.00/2024 Nomor 560/DTKESDMT-BLK/224/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024 berlaku selama 5 (lima) tahun.

- B. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
- B.1 **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo**
1. Tujuan dan Sasaran
- a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo
- Peningkatan kualitas Perempuan dan anak.

- Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
- b. Sasaran dan Program

Tabel 3.49

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Peningkatan kualitas Perempuan	Indikator Sasaran : Indeks pemberdayaan gender	67,70	71,11 (Capaian 2023)	105,04%
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi	0.02%	6.92%	3.46%
		Persentase ARG dalam APBD	6,33 %	0,23%	3.63 %
		Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100 %
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan	100%	100%	100%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang memperoleh penguatan dan pengembangan	44 DUDI	44 DUDI	100 %
2	Sasaran : Peningkatan Kualitas Anak	Indikator Sasaran : Indeks Pemenuhan Hak Anak	73,13	58,69 (Capaian 2023)	80.25%
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif	85 %	64.6%	76%
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase kabupaten/ Kota dengan peringkat kabupaten/kota Layak Anak	100 %	83,33%	83,33%
3	Sasaran : Meningkatkan kualitas urusannya pemerintahan OPD	Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur dengan target dan capaiannya sebesar 100%	100%	100%	100%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.50
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.025.935.470	4,903,805,238	97.57	98.16		
1a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	246,986,750	245,702,419	99.48	100		
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	246,986,750	245,702,418	99.48	100		
1b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,661,226,770	3,631,570,833	99.19	98.77		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,661,226,770	3,631,570,833	99.19	98.77		
1c	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.583.000	120,474,475	99.91	100		
	- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	120,583,000	120,474,475	99.91	100		
1d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.564.750	247,947,476	97.03	92.11		
	- Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	65,845,750	63,738,686	96.80	97.89		
	- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15,000,000	14,997,000	99.98	100		
	- Sub kegiatan Penyelenggaraan	174,719,000	164,794,961	94.32	78.44		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
1e	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651.210.000	591,559,164	90.84	99.10		
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132,000,000	111,711,600	84.63	98.19		
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519,210,000	507,164,328	97.68	100		
1f	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.364.200	89,415,376	98.95	98.95		
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.364.200	89,415,376	98.95	98.95		
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.893.942.777	1,891,101,863	99.85	99.06		
2a	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	393.942.777	392,760,949	99.70	98.11	Kurangnya pemahaman tentang Gender maupun PUG belum maksimal dipahami oleh seluruh pemangku kebijakan dan perencana atau vocal point, sehingga dalam memilih dan memilih anggaran yang responsif gender masih perlu diberikan penguatan ataupun advokasi dalam menganalisis RKA dalam dokumen Gender Analisis Patway (GAP) dan Gender Badjeting Statement (GBS)	Memberikan / melaksanakan sosialisasi, advokasi terhadap pemangku kebijakan dan memberikan pendampingan dalam membuat analisis RKA kedalam dokumen Gender Analisis Patway (GAP) dan Gender Badjeting Statement (GBS)
	- Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	266.620.327	265,953,776	99.75	100	Belum maksimalnya Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang di tuangkan dalam Renstra dan Renja OPD	Perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi OPD Lintas Sektor tentang PUG
	- Sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	127,322,450	126,876,821	99.65	96.21	Perlunya dukungan Kebijakan Daerah tentang Pengarustamaan Gender (PUG)	
2b	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1,500,000,000	1,500,000,000	100	100	Minimnya keterwakilan Perempuan Politik dalam Perwakilan yang belum memenuhi Kuota 30% dan Minimnya SDM Penegak Hukum Perempuan	Memberikan Penguatan Advokasi Sosialisasi terhadap cikal bakal bagi Perempuan Politik di Parlemen, Perempuan Penegak Hukum dan Perempuan pelaku usaha.
	- Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan	1,500,000,000	1,500,000,000	100	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi						
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	190,328,000	184,104,274	96.73	96.76	Belum adanya layanan pertimbangan Perlindungan Perempuan dan Anak terutama Unit Pelaksanaan teknis daerah terhadap Penanganan Kasus Perempuan dan Anak	Terbentuknya UPTD dan Rumah perlindungan terhadap pelayanan penanganan kekerasan Perempuan dan Anak
3a	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	190,328,000	184,104,274	96.73	96.76		Perlu adanya dukungan anggaran terhadap Operasional Penanganan, Pendampingan, Penjangkauan kasus korban kekerasan Perempuan dan Anak
	- Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	190,328,000	184,104,274	96.73	96.76		Perlu adanya Penguatan dan Sosialisasi terhadap Instansi terkait dalam penanganan kasus
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	106,323,014	105,982,780	99.68	99.68		
4a	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	106,323,014	105,982,780	99.68	99.68	Kurangnya SDM	Penambahan SDM
	- Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	106,323,014	105,982,780	99.68	99.68	Kurangnya Fasilitas Layanan peningkatan kualitas keluarga	Membentuk Lembaga Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	150,745,980	149,404,341	99.11	99.28		
5a	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	150,745,980	149,404,341	99.11	99.28	Kurangnya Data Pemenuhan Hak Anak	Perlu adanya anggaran sehingga terlaksana pelaksanaan kegiatan. Tersedianya data dari Kabupaten/Kota
	- Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	150,745,980	149,404,341	99.11	99.28	Kurangnya Dukungan Anggaran	
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	446,842,600	445,948,915	99.80	100		
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup	446,842,600	445,948,915	99.80	100	Belum adanya layanan pertimbangan Perlindungan Perempuan dan Anak	Terbentuknya UPTD dan perlindungan terhadap pelayanan



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
6a	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					terutama Unit Pelaksanaan teknis daerah terhadap Kasus Penanganan dan Anak.	penanganan kekerasan Perempuan dan Anak
	- Sub kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	446,842,600	x445,948,915	99.80	100	Belum tersedianya Rumah Perlindungan sebagai pelayanan dan penanganan terhadap kasus perempuan dan anak	Perlu adanya dukungan anggaran terhadap Operasional PenangananPendampingan, Penjangkauan kasus korban kekerasan Perempuan dan Anak
JUMLAH		7.814.017.841	6,419,997,058	82.16	98.82		

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
- Outcome dari program adalah persentasi peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur.
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan dengan Target 8 dokumen. Capaian Realisasi sudah terealisasi 8 Dokumen yakni Dokumen Renja, LKPJ, LPPD, RPJMD, Monev, Renstra, Rencana Aksi serta Pakta Integritas dan LKIP.
- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- Output sub kegiatan adalah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Dokumen perencanaan dimaksud terdiri dari Renstra, Renja, LKPJ, LPPD, RPJMD dan LKIP. Capaian realisasi dari kegiatan ini sudah mencapai Keuangan 99,48% dan Fisik 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Output kegiatan adalah Presentase kesesuain laporan keuangan.
- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Output sub kegiatan adalah Pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Output kegiatan adalah Presentase pengembangan pegawai yang sesuai kompetensi.
- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- Output sub kegiatan adalah Dokumen administrasi kepegawaian, dokumen monitoring, evaluasi dan kinerja pegawai, serta jumlah ASN P2PA Provinsi Gorontalo yang mengikuti pengembangan kompetensi yang ditargetkan sebanyak 3 orang. Keikutsertaan ASN dalam pengembangan kompetensi selama tahun 2024 adalah sebanyak 1 orang yakni Pelatihan



Kepemimpinan Adminsitrator 1 Orang dan Diklat Perbendaharaan sebanyak 3 Orang.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah Presentase sarana dan prasarana yang tersedia yang sesuai kompetensi.

- Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material.
- Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan tamu.
- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rakor SKPD.

Output sub kegiatan adalah :

- a) pelaksanaan berupa Penyediaan Bahan/ Material. Adapun hasil dari Penyediaan Bahan Material Berupa adalah pengadaan 2 unit computer, pengadaan 2 unit printer, Pengadaan 1 Unit Sound System, Bahan Dekorasi, Souvenir, dan Alat Listik sehingga Capaian realisasi dari kegiatan ini sudah mencapai Keuangan 96,80% dan Fisik 97,89%.
- b) pelaksanaan berupa Fasilitas Kunjungan Tamu. Adapun hasil dari Fasilitas Kunjungan Tamu berupa Makan Minum Jamuan Tamu seperti Tamu dari Kementrian dan Tamu dari Instansi Vertikal yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Capaian realisasi dari kegiatan ini sudah mencapai Keuangan 99,98% dan Fisik 100%.
- c) pelaksanaan berupa Penyelenggaraan Rakor SKPD. Adapun hasil dari Fasilitas Ini berupa Terlaksananya Rapat Koordinasi antar SKPD dan Kementrian guna penyatuan visi misi program tahun 2024. Capaian realisasi dari kegiatan ini sudah mencapai Keuangan 94,32% dan Fisik 78,44%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Output kegiatan adalah Presentase penyedia jasa penunjang dengan target 100. Capaian Presentase Kegiatan Keuangan sebesar 90,84% dan Fisik 99,10 %.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Output sub kegiatan adalah :

- a) Pelaksanaan berupa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini adalah pemenuhan belanja-belanja rutin kebutuhan OPD berupa Tagihan Listrik, Air, Jasa yang diberikan pada pihak ke tiga berupa jasa karawo pada festival karawo serta belanja pemeliharaan komputer Capaian realisasi dari kegiatan ini yakni Keuangan sebesar 84,63% dan Fisik 98,19 %.
- b) Pelaksanaan berupa Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Kegiatan ini adalah Pemenuhan belanja rutin berupa Jasa Tenaga

Pelayanan Umum, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan. Capaian realisasi dari kegiatan ini yakni Keuangan sebesar 97,68% dan Fisik 100%.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Output kegiatan adalah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 100. Capaian Presentase Kegiatan Keuangan sebesar 98,95% dan Fisik 98,95 %.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Output sub kegiatan adalah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan belanja-belanja rutin berupa bahan bakar minyak, pembayaran pajak kendaraan dan pemeliharaan alat angkut darat bermotor.

2) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.

Outcome dari program adalah :

- Persentase Perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi.
- Persentase ARG dan APBD.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah kewenangan Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah orang yang dilatih dalam PPRG terkait Penganggaran Responsif Gender yang ditargetkan 40 orang. Capaian kegiatan ini sebanyak 66 orang.

- Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi.
- Sub kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi.

Output sub kegiatan adalah Jumlah perangkat daerah (SKPD) yang di latih PPRG 33 OPD Memberikan pemahaman kepada OPD terkait Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang di tuangkan dalam Dokumen Perencanaan OPD.

2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi.

Output kegiatan adalah Presentase perempuan dalam dunia politik, hukum, sosial dan ekonomi dengan target 0.46 %. Capaian realisasi kegiatan ini yakni Keuangan 100 % dan capaian Fisik sebesar 100%.



- Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi.

Output sub kegiatan adalah tersalurnya hibah uang kepada organisasi Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW), Persatuan Istri Anggota Dewan (PIAD) dan Dharma Wanita.

3) Program Perlindungan Perempuan.

Outcome dari program adalah Persentase Perempuan yang mendapatkan Perlindungan Perempuan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah.

Output kegiatan adalah Jumlah aparat perangkat daerah yang mendapatkan advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi dengan target 50 orang. Capaian realisasi kegiatan ini yakni Keuangan 96,73 % dan capaian Fisik sebesar 96,76%.

- Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi.

Output sub kegiatan adalah terselenggaranya Advokasi & Pendampingan layanan Perlindungan Perempuan bagi kelompok perempuan dan pelaku dunia usaha di tingkat Provinsi.

4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Outcome dari program adalah Persentase Perempuan yang mendapatkan penguatan kapasitas kepemimpinan dan ekonomi.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang memperoleh peningkatan kapasitas dengan target 44 DUDI.

- Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi.

Output sub kegiatan adalah :

- a. Memperkuat kemampuan dan keterampilan orang tua melalui program pendidikan dan program pelayanan konseling.
- b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan kelompok profesi dan lembaga yang bekerja dengan anak melalui program/kegiatan

pelatihan konvensi ha kana untuk mewujudkan kab/kota layak anak menuju Provinsi Layak Anak.

- c. Melakukan kerjasama dengan kelompok profesi yang mencakup antara lain pekerja sosial, bimbingan konseling, psikolog, dokter, perawat, bidan, pendidik, pengacara/advokat, polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, pembimbing lembaga kemasyarakatan, dan pendamping dari kalangan lembaga swadaya masyarakat tentang hak anak dan perlindungan Anak.

5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah anak yang memperoleh layanan peningkatan kualitas hidup anak dengan target 200 anak.

- Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak.

Output sub kegiatan adalah terbentuknya Forum Anak Daerah Provinsi dan terselenggaranya pembekalan Forum anak provinsi & kab/kota.

6) Program Perlindungan Khusus Anak

Outcome dari program adalah Persentase forum anak yang dibentuk serta lembaga layanan perlindungan (pusat pelayanan terpadu) yang aktif.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Output kegiatan adalah Jumlah lembaga yang aktif dalam melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan Target 4 lembaga.

- Sub kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Organisasi yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi dengan 4 lembaga. Terlaksananya Pendampingan program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak di kabupaten kota.



3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 3.51

Kebijakan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Rencana Aksi Daerah Pembentukan UPTD PPA	Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2024 mengatur mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak	UPTD ini bertugas untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja agar Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Kekerasan pada anak di Provinsi Gorontalo agar lebih maksimal
2	Rencana Aksi Daerah berkaitan dengan Perlindungan Anak dan Perempuan	UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan ibu dan Anak	Meningkatkan Kesejahteraan Ibu dan Anak di Provinsi Gorontalo

4. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, dan perjanjian Kinerja tahun 2024

Tabel 3.52

Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Indikator	Target (2024)	Capaian (2024)
1	Indeks Pembangunan Gender	87,13	88,24 (Capaian 2023)
2	Indeks Perlindungan Anak	67,7	60,46 (Capaian 2023)

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Kinerja.
- Capaian Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo tahun 2024 masih menggunakan data tahun 2023 dengan angka sebesar 88,24%, dimana untuk capaian tahun 2024 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Capaian ini sudah melampaui target tahun 2024, dimana dalam 5 tahun terakhir Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo terus mengalami kenaikan.
 - Capaian Indeks Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tahun 2024 masih menggunakan data tahun 2023 dengan angka sebesar 60,46%, dimana untuk capaian tahun 2024 belum dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Capaian ini masih belum mencapai target karena capaian dimensi Indeks Perlindungan Anak yang masih cukup rendah antara lain : (a) Hak sipil dan kebebasan 52,40 , (b) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 77,21, (c) kesehatan dasar dan kesejahteraan 76,04 , (d) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 25,89, (e) perlindungan khusus 66,58.



C. Urusan Pangan

C.1 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
- a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo

- Peningkatan ketahanan pangan dan kualitas sumber daya ekonomi

- Peningkatan gizi masyarakat

- Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah
- b. Sasaran dan Program

Tabel 3.53

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran I : Meningkatnya panganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan daerah rawan pangan	Indikator Sasaran : Skor PPH Ketersediaan	77,66	78,83	101,5%
		Skor PPH Konsumsi	82	76,68	96,69%
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah yang tersedia	25%	7,7%	30,8%
	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	11%	25,97%	236,12%
2	Sasaran II : Meningkatnya kecukupan gizi masyarakat	Indikator Sasaran : Angka kecukupan protein (gram/kap/hr)	58	58,11	100,18%
		Angka kecukupan energi (kkal/kap/hr)	2.150	1.938	90.13%
	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tanaman (PSAT) yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	85%	97,6	114,82%
3	Sasaran III : Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP	71	78,1	110%
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	71%	78,1	110%

Sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Penyelenggaraan urusan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yaitu: 1) Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, 2) Penyelenggaraan ketahanan pangan, 3) Penanganan kerawanan pangan dan 4) Keamanan pangan.

Untuk mewujudkan pembangunan pangan di Provinsi Gorontalo dilaksanakan melalui 3 sasaran yakni : 1) Meningkatnya panganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan daerah rawan pangan; 2) Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat; 3) Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD. Dari ketiga sasaran



tersebut terdapat 5 (lima) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis. Pada Tahun Anggaran 2024, capaian kinerja secara menyeluruh dari seluruh indikator rata-rata mencapai kinerja yang bervariasi. Ada yang melampaui target adajuga indikator kinerja yang belum mencapai target. Secara detail capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

1) Sasaran I

Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan lokal dan penanganan daerah rawan pangan dengan indikator kinerjanya yakni :

- **Skor PPH konsumsi** dengan target 82 dan realisasinya sebesar 76,68 atau persentase capaian sebesar 96,69%. Skor PPh konsumsi yang tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh masih tingginya masyarakat mengkonsumsi karbohidrat terutama dari padi-padian dalam hal ini beras sebesar 25 point dari target ideal sebesar 22 point. Adapun konsumsi kacang-kacangan masih sangat rendah dari standar sebesar 10 point yang tercapai hanya 3 poin disusul dengan konsumsi umbi-umbian masih dimana hanya 0,63 point dari target ideal sebesar 6 point.
- **Skor PPH Ketersediaan** dengan target 77,66 pada tahun 2024 realisasinya mencapai 78,83. Capaian skor pph ketersediaan melampaui target/kenaikan 101,5% dipengaruhi oleh terpenuhinya ketersediaan pangan padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, biji/buah berminyak dan gula. Sedangkan ketersediaan yang masih kurang yakni pangan umbi-umbian, kacang-kacangan serta sayuran dan buah.

Sasaran ini dicapai melalui dua program yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Program Penanganan Kerawanan Pangan. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat indikator kinerjanya adalah persentase cadangan pangan pemerintah daerah yang tersedia Untuk target tahun 2024 dari indikator persentase cadangan pangan pemerintah daerah yang tersedia adalah sebesar 25% dari total cadangan pangan atau sebesar 30 ton, sedangkan realisasinya adalah 3,7 ton atau sebesar 7,7%. Program tersebut tidak mencapai target disebabkan anggaran yang dialokasikan pada kegiatan CPPD belum optimal karena masih diprioritaskan di kegiatan lain.

Adapun indikator kinerja dari program Penanganan Kerawanan Pangan adalah Persentase Daerah Rawan Pangan dimana target tahun 2024 adalah sebesar 11% dan untuk realisasinya mencapai 25,97% atau dengan kenaikan sebesar 236,12% dari target. Pelampaun tersebut dicapai oleh adanya penambahan bantuan pada revisi anggaran dari OPD lain ke Dinas Ketahanan Pangan dan tambahan dari APBD perubahan sehingga daerah rawan pangan yang ditangani porsinya lebih banyak dari target tahun 2024. Sehingga harapannya tidak ada lagi daerah rawan pangan komposit di tahun yang akan datang.

2) Sasaran II

Untuk sasaran 2 indikatornya adalah Meningkatnya Kecukupan Gizi Masyarakat dengan 2 indikator sasaran yaitu :

- **Angka Kecukupan Protein (gram/kap/hari)**, di tahun 2024 indikator sasaran Angka Kecukupan Protein ditargetkan sebesar 58,00 gram/kap/hari dan capaiannya melampaui target yakni sebesar 58,11 gram/kap/hari. Pelampauan capaian dari target dikarenakan meskipun konsumsi protein dari pangan hewani belum mencapai standar ideal tetapi telah tersubstitusi oleh protein dari produk padi-padian yang angka konsumsinya cukup besar.
- **Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hari)** dengan target tahun 2024 adalah 2.150 kkal/kap/hari dan realisasinya masih dibawah target adalah sebesar 1,938 kkal/kap/hari. Masih rendahnya angka kecukupan energi disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang dengan dominasi karbohidrat dari padi-padian tetapi kekurangan asupan dari kelompok pangan lain yang kaya energi. Karena padi-padian umumnya menjadi sumber utama karbohidrat, namun kandungan energi per satuan beratnya relatif rendah jika dibandingkan dengan makanan lain yang lebih padat energi (seperti lemak atau kacang-kacangan). Sehingga Jika kelompok pangan berlemak dan protein (yang menyumbang energi tinggi) dikonsumsi dalam jumlah sedikit, maka total energi harian yang dikonsumsi akan tetap rendah meskipun padi-padian dimakan dalam jumlah besar.

Adapun sasaran II dicapai melalui Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan indikatornya adalah Persentase pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan dimana target pada tahun 2024 adalah sebesar 85% dan realisasinya adalah sebesar 97,6%. Tingginya capaian tersebut dengan persentase 114,82 dikarenakan adanya peningkatan pengawasan peredaran pangan segar di pasaran, dan kesadaran pelaku usaha yang ingin melakukan registrasi dan atau sertifikasi pangan segarnya mengalami peningkatan.

3) Sasaran III

Sasaran tiga adalah Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan dengan indikator kinerja sasarnya adalah **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**. Pada tahun 2024 ditargetkan nilai SAKIP sebesar 71 poin dengan realisasinya sebesar 78,1 poin atau naik dengan persentase sebesar 110%. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya naiknya nilai perencanaan kinerja berupa kesesuaian antara indikator kinerja dengan dokumen perencanaan, naiknya nilai pengukuran kinerja dimana relevansi IKU dalam mengukur hasil kinerja, dan peningkatan nilai pelaporan kinerja dimana Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) semakin baik. Adapun program pendukung untuk sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikatornya sama dengan indikator sasarnya yakni nilai SAKIP.



2. Program dan Kegiatan

Dalam menunjang capaian Kinerja Tahun 2024, Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang ditunjang dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 12.188.019.824.- (Dua Belas Milyard Setatus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)**. Adapun Program/Kegiatan dan anggarannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.54
 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pangan
 Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	9.700.134.224	9.559.038.043	98,25	99,90		
1a	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	485.366.450	484.041.558	99,73	100		
	- Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	485.366.450	484.041.558	99,73	100		
1b	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	7.528.491.974	7.438.706.354	99,32	100		
	- Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.419.739.224	7.330.110.654	98,79	100		
	- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	108.752.750	108.595.700	99,86	100		
1c	Kegiatan administrasi kepegawaian daerah	55.445.000	54.806.700	98,85	100		
	- Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	55.445.000	54.806.700	98,85	100		
1d	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	952.433.100	937.236.525	98,40	100		
	- Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	952.433.100	937.236.525	98,40	100		
1e	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	678.397.700	644.246.906	94,97	99,50		
	- Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	678.397.700	644.246.906	94,97	99,50		
2	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	740.060.150	734.076.575	99,03	100		
2a	Kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	134.984.150	132.864.230	98,16	100		
	- Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	79.387.950	79.146.600	99,70	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub kegiatan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	55.596.200	53.717.630	96,62	100		
2b	Kegiatan pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan provinsi	127.540.000	126.955.760	99,54	100		
	- Sub kegiatan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah provinsi	127.540.000	126.955.760	99,54	100		
2c	Kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi	477.536.000	474.256.585	99,38	100		
	- Sub kegiatan promosi panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	282.856.000	280.058.750	99,01	100		
	- Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun	194.680.000	194.197.835	99,75	100		
3	Program penanganan kerawanan pangan	1.508.830.300	1.506.033.360	99,67	100		
3a	Kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi	45.680.000	45.499.200	99,60	100		
	- Sub kegiatan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan keamanan pangan provinsi dan kabupaten/kota	45.680.000	45.499.200	99,60	100		
3b	Kegiatan penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi	1.463.150.300	1.460.534.160	99,73	100		
	- Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan provinsi	66.754.300	66.513.360	99,64	100		
	- Sub kegiatan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1.396.396.000	1.394.020.800	99,83	100		
4	Program pengawasan keamanan pangan	238.995.150	238.467.933	99,77	100		
4a	Kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota	238.995.150	238.467.933	99,77	100		
	- Sub kegiatan rekomendasi keamanan pangan segar asal	49.257.000	49.139.801	99,76	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp)	(%)	(%)		
	tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota						
	- Sub kegiatan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota	189.738.150	189.328.132	99,78	100		
JUMLAH		12.188.019.824	12.037.615.911	99,18	99,98		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi baik fisik dan keuangan dengan nilai yang baik yakni capaian fisik sebesar 99,98 persen sementara capaian realisasi keuangan sebesar 99,18 persen. Adapun realisasi fisik tercapai karena semua output sub kegiatan dari pelaksanaan tahun 2024. Adapun realisasi keuangan tercapai dipengaruhi oleh administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel serta pemasukan SPJ yang tepat waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan Tabel di atas, berikut ini disampaikan uraian kegiatan untuk masing-masing Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Outcome dari Program ini adalah Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang tersedia dengan indikator target 25 %. Adapun untuk capaian tahun 2024 untuk persentase cadangan pangan pemerintah daerah adalah sebesar 7,7%.

a. Pelaksanaan Program

- Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan & Harga Pangan.

Output kegiatan adalah Terlaksananya Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan serta Jumlah Lembaga Distribusi Pangan dengan target 1 (satu) Dokumen. Pada Tahun 2024 capaian pelaksanaan Pemantauan stok, pasokan harga pangan sebanyak 1 (satu) dokumen.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.

Output sub kegiatan adalah :

- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dengan target 1 (satu) Dokumen. Untuk capaian tahun 2024 adalah 1 dokumen.
- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan merupakan cara Pemerintah untuk stabilitasi pasokan dan harga pangan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat serta untuk mempertahankan suatu harga barang atau jasa pada tingkat tertentu.
- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dilaksanakan oleh Petugas Pasar (Enumerator Harga) yang dilaksanakan setiap hari di lokasi pasar-



pasar tradisional maupun di distributor. Dimana data harga yang diperoleh kemudian dilaporkan ke Badan Pangan Nasional.

Tabel 3.59
Olah Data Harga Pangan Ecer (Rerata Harga Provinsi) Tahun 2024

N O	KOMODITI	B U L A N													
		JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI	
		HARGA (Rp.)	CV	HARGA (Rp.)	CV	HARGA (Rp.)	CV	HARGA (Rp.)	CV	HARG A (Rp.)	CV	HARG A (Rp.)	CV	HARG A (Rp.)	CV
1	Beras Premium	14.194	0,45	14.904	5,55	17.671	1,76	16.800	1,86	15.683	2,34	15.079	0,47	15.112	0,63
2	Beras Medium	13.042	0,50	13.635	4,36	16.019	2,42	15.232	2,24	14.264	2,26	13.328	0,55	13.412	0,99
3	Kedelai	12.951	1,98	12.493	1,43	12.467	0,27	12.119	0,39	12.114	0,56	12.031	0,20	12.022	3,59
4	Bawang Merah	45.839	2,67	38.976	7,39	34.686	2,03	51.547	19,78	48.257	5,63	45.737	6,83	35.430	18,11
5	Bawang Putih	39.873	1,71	40.603	0,90	47.345	10,14	49.988	5,15	50.628	5,28	47.956	1,15	45.009	3,64
6	Cabe Merah Kriting	31.677	36,41	26.968	28,80	35.963	29,11	33.421	12,77	33.894	2,81	52.400	21,13	45.826	8,28
7	Cabe Rawit Merah	44.149	53,13	28.660	25,15	49.739	18,39	59.245	16,67	60.401	5,56	69.163	16,42	46.230	4,25
8	Daging Sapi Murni	134.288	0,89	131.943	0,10	132.802	0,34	133.864	0,77	133.508	0,30	133.136	0,20	133.314	0,03
9	Daging Ayam Ras	32.991	1,89	35.291	0,82	36.356	2,09	35.055	1,20	33.249	2,29	33.654	0,84	33.961	1,00
10	Telur Ayam Ras	31.203	0,59	31.447	1,32	37.034	4,50	36.995	1,59	34.826	0,78	33.436	1,89	32.206	0,96
11	Gula Pasir Konsumsi	18.313	0,91	18.310	0,82	19.088	1,78	19.272	0,99	19.380	0,68	18.889	1,02	18.459	0,69
12	Minyak Kemasan	17.789	1,74	19.284	3,11	19.859	0,80	19.415	0,72	19.142	0,96	19.225	0,90	19.314	0,05
13	Tepung Terigu	10.696	1,22	10.279	0,80	10.488	0,69	10.333	0,24	10.296	1,29	10.156	1,00	10.153	1,03
14	Minyak Goreng Curah	14.415	1,54	16.639	9,86	18.453	5,27	17.338	3,32	16.781	2,04	16.698	1,61	17.182	1,42
15	Ikan Kembung	27.028	6,59	30.086	8,83	29.065	5,76	28.273	7,23	29.613	3,15	29.186	5,24	27.057	2,77
16	Ikan Tongkol	28.007	4,44	30.038	9,24	29.856	4,66	29.771	6,48	30.713	3,19	29.584	3,35	26.664	3,16
17	Ikan Bandeng	27.279	3,57	28.954	4,65	29.182	3,48	29.947	1,21	29.834	2,39	29.947	2,04	28.292	2,77
18	Garam Konsumsi	10.443	0,82	10.375	0,90	10.327	0,39	10.243	0,16	10.272	0,42	10.720	2,76	10.468	0,23
19	Tepung Terigu Kemasan	12.601	0,62	12.407	1,44	12.762	1,43	12.770	0,63	12.599	0,30	12.521	0,32	12.361	1,06

NO	KOMODITI	B U L A N										OLAH DATA			
		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER					
		HARGA (Rp.)	CV	HARGA (Rp.)	CV	HARGA (Rp.)	CV	HARGA (Rp.)	CV	HARGA (Rp.)	CV	HARGA (Rp.)	MAX	MIN	CV
1	Beras Premium	15.470	0,33	15.343	0,56	15.140	0,25	15.071	0,20	14.991	0,27	15.455	17.671	14.194	5,98
2	Beras Medium	13.522	0,36	13.504	0,75	13.460	1,04	13.083	0,42	12.945	0,59	13.787	16.019	12.945	6,81
3	Kedelai	11.892	0,74	11.597	1,04	10.641	1,17	10.224	1,39	10.069	0,27	11.211	12.031	10.069	7,74
4	Bawang Merah	26.685	3,41	31.836	6,48	34.327	5,15	44.921	10,28	47.031	8,36	40.439	51.547	26.685	19,24
5	Bawang Putih	44.620	0,94	44.401	0,81	44.640	1,15	46.105	4,43	47.773	3,42	45.745	50.628	39.873	7,20
6	Cabe Merah Kriting	49.586	3,48	43.471	5,30	42.213	6,71	38.304	5,98	35.025	9,46	39.062	52.400	26.968	19,67



NO	KOMODITI	B U L A N										OLAH DATA			
		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER		HARGA (Rp.)	MAX	MIN	CV
		HARGA (Rp.)	CV	HARGA (Rp.)	CV	HARGA (Rp.)	CV	HARGA (Rp.)	CV	HARGA (Rp.)	CV				
7	Cabe Rawit Merah	66.903	3,24	66.204	6,22	53.227	16,97	57.651	16,85	46.874	14,05	54.037	69.163	28.660	21,58
8	Daging Sapi Murni	133.468	0,42	133.203	0,09	133.121	0,10	133.231	0,10	133.599	0,30	133.290	134.288	131.943	0,43
9	Daging Ayam Ras	32.735	0,33	32.018	0,98	32.941	1,18	33.325	0,74	33.608	0,21	33.765	36.356	32.018	3,64
10	Telur Ayam Ras	31.598	0,50	31.387	1,21	31.230	1,13	30.675	0,42	31.110	0,74	32.762	37.034	30.675	7,01
11	Gula Pasir Konsumsi	18.325	0,24	18.286	0,33	18.493	0,35	18.371	1,05	18.315	0,46	18.625	19.380	18.286	2,22
12	Minyak Kemasan	19.486	0,64	19.633	0,50	20.048	0,76	20.049	0,34	20.213	0,98	19.455	20.213	17.789	3,27
13	Tepung Terigu	10.309	0,71	10.135	0,46	10.214	0,64	10.323	0,44	10.216	0,62	10.300	10.696	10.135	1,55
14	Minyak Goreng Curah	16.965	0,18	17.283	1,35	19.181	2,20	19.278	0,46	19.100	0,80	17.443	19.278	14.415	7,98
15	Ikan Kembung	26.378	4,74	27.260	2,50	26.369	4,34	26.296	2,15	27.162	3,24	27.814	30.086	26.296	4,90
16	Ikan Tongkol	26.481	4,05	27.184	3,18	26.474	4,60	26.631	1,23	27.180	3,12	28.215	30.713	26.474	5,82
17	Ikan Bandeng	25.559	2,76	24.937	3,46	23.903	1,67	24.477	1,04	24.231	3,76	27.212	29.947	23.903	8,94
18	Garam Konsumsi	10.496	1,12	10.410	0,62	10.346	0,41	10.386	0,21	10.430	0,53	10.410	10.720	10.243	1,19
19	Tepung Terigu Kemasan	12.587	0,36	12.535	0,15	12.505	0,60	12.582	0,42	12.538	1,04	12.564	12.770	12.361	0,95

Sumber : Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, 2025

Berdasarkan tabel diatas, untuk semester pertama hingga periode bulan Juli tahun 2024, dari 19 komoditi pangan yang ada, Harga Beras Medium sepanjang 2024 dalam status INTERVENSI. dikarenakan rerata harga bulanan sangat tinggi dibandingkan dengan HET (Rp. 12.500). Rerata haga tahunan Rp. 13.787, (10,29 %). Fluktuasi tertinggi di bulan Februari (4,36 %), harga tertinggi di Bulan Maret (Rp. 16.019). Harga terendah di Bulan Desember (Rp. 12.945). Kenaikan harga beras di bulan Februari ke Maret lebih dipengaruhi oleh pergesaran waktu panen, dan pengaruh dari permintaan yang meningkat di bulan tersebut karena ada HBKN Puasa dan idul fitri. Untuk beras premium juga mengalami Fluktuasi dimana Harga Beras Premium Sepanjang 2024 melebihi nilai yang di standarkan (CV 5 %), Hal ini lebih dipengaruhi oleh Kenaikan harga dari Februari ke bulan Maret serta penurunan setelahnya hingga bulan Mei. Harga Juni hingga Desember berfluktuasi dalam nilai yang wajar. Fluktuasi tertinggi di Bulan Februari (5,55 %), sementara Fluktuasi terendah 0,20 % (November). Harga Tertinggi di Bulan Maret (Rp. 17.671) Harga Terendah Bulan Januari (Rp. 14.194). Rerata Harga Rp. 15.455 (3,72 %) Lebih Tinggi dari HET. Sepanjang Tahun Harga beras premium di atas HET (Permendag No. 57/2023 HET beras Premum pulau Sulawesi Rp. 14.900).

- Salah satu upaya yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan adalah melalui Gerakan Pangan Murah yang didanai oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), pada tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 30 kali dengan 35 titik lokasi



yang berbeda-beda. Komoditi yang disediakan antara lain : Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe dan Telur seperti pada Tabel Realisasi Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Tahun 2024.

- Harga pangan yang digunakan dalam GPM menggunakan harga distributor dengan melibatkan distributor/retail/Vendor seperti BULOG, Alfamart, Indomart, Hypermart dan juga Distributor Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe dan Telur yang ada di wilayah provinsi.
- Dengan adanya pelaksanaan Gelar Pangan Murah diharapkan bisa membantu masyarakat dalam mengakses bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Tabel 3.60
 Realisasi Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Tahun 2024

NO	TANGGAL	LOKASI DESA/KELURAHAN/KECAMATAN	PENYELENGGARA/PELAKSANA	KET.
A.	GPM Yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo sejumlah 12 kali menggunakan Dana Dekonsentrasi bagian provinsi			
1.	07 Maret 2024	Lap. Kel.Wonggaditi Barat,Kec.Kota Utara Kota Gorontalo.	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
2.	28 Maret 2024	Lap. Tomulabutao Selatan Kota Gtlo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Bulan Ramadhan dan Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
3.	1 April 2024	Lap. Desa Isimu selatan Kec Tibawa Kab. Gorontalo.	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam Rangka HBKN Apel siaga Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
4.	16 April 2024	Lap. Kel.Pone Kec. Limboto Barat, kab. Gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Ketupat 1445 H tahun 2024
		Lap. Kel. Rksonegoro Kec. Tibawa Kab. Gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Ketupat 1445 H tahun 2024
		Lap. Desa Dungaliyo Kec. Dungaliyo,Kab.Gorontalo.	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Ketupat 1445 H tahun 2024
		Lap. Desa Payunga Kec. Batudaa, Kab.Gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Ketupat 1445 H tahun 2024
		Lap. Desa Limehe Barat, Kec.Tabongo, kab.Gorontalo.	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Ketupat 1445 H tahun 2024



NO	TANGGAL	LOKASI DESA/KELURAHAN/KECAMATAN	PENYELENGGARA/PELAKSANA	KET.
5.	13 Juni 2024	Lapangan kel.Bulotadaa Barat Kota Gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak daerah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 H tahun 2024
6.	1 Agustus 2024	Lapangan Taruna Remaja	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka Pencanangan HUT Ke-79 Proklamasi kemerdekaan RI tahun 2024
7.	22 Agustus 2024	Kel. Dembe I Kota Barat Kota Gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Tahun baru Islam 1446 H tahun 2024, dirangkaikan dengan HUT ke – 3 Bapanas RI tahun 2024
8.	29 Agustus 2024	Desa Talumelito Kec Telaga Biru kab. Gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka pengendalian inflasi dan dirangkaikan dengan HUT ke – 3 Bapanas RI tahun 2024
9.	13 September 2024	Desa Biluhu Timur, Kec. Batudaa Pantai Kab.gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 H tahun 2024.
10.	16 oktober 2024	Depan Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HPS Ke – 44 tk. Provinsi Gorontalo tahun 2024
11.	04 Desember 2024	Lapangan Padebuolo, Kec. Kota timur Kota gorontalo	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Nataru tahun 2024, dirangkaikan dgn HUT Ke-24 Provinsi Gorontalo.
12.	10 Desember 2024	Lapangan Desa Katialada, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara	DKP Provinsi Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HBKN Nataru tahun 2024
B.	GPM Yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sejumlah 5 kali menggunakan Dana Dekonsentrasi bagian provinsi			
13.	13 Juni 2024	Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo.	Dinas Pangan Kota Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak daerah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 H tahun 2024
14.	13 Juni 2024	Kompl Kantor Bank Sulutgo,Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pangan Kab. Gorontalo Utara.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak daerah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 H tahun 2024
15.	13 Juni 2024	Hal. Dinas Pangan Kab Pohuwato, Kec. Marisa	Dinas Pangan Kab.Pohuwato	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak daerah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 H tahun 2024



NO	TANGGAL	LOKASI DESA/KELURAHAN/KECAMATAN	PENYELENGGARA/PELAKSANA	KET.
16.	13 Juni 2024	Hal. Dinas Pertanian dan KP Kab. Bone Bolango, Kec. Tilongkabila	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kab. Bone Bolango.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak daerah dalam Rangka HBKN Jelang Hari Raya Idul Adha 1445 H tahun 2024
17.	16 oktober 2024	Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, kab. Gorontalo	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HPS Ke – 44 tk. Provinsi Gorontalo tahun 2024
C.	GPM Yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo sejumlah 13 kali menggunakan Dana Dekonsentrasi bagian Kabupaten/Kota			
18.	07 Maret 2024	Lapangan Taruna remaja, Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi Kota Gorontalo.	Dinas Pangan Kota Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
19.	07 Maret 2024	Lapangan Futsal Desa Tumbihe, Kec. Kabila Kab. Bone Bolango.	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kab. Bone Bolango.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
20.	07 Maret 2024	Lapangan Kelurahan Kayu bulan, Kecamatan Limboto, kab. Gorontalo.	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
		Lapangan Desa Paris, Kecamatan Mootilango, kab. gorontalo	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
		Lapangan Desa Suka Makmur, Kecamatan Tolangohula, Kab. Gorontalo.	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
21.	07 Maret 2024	Halaman Kantor Camat Kwandang, Kab. Gorontalo Utara.	Dinas Pangan Kab. Gorontalo Utara.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
22.	07 Maret 2024	Terminal Kompleks Pasar Minggu Tilamuta, kab. Boalemo.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Boalemo.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
23.	07 Maret 2024	Lapangan Ormas marisa Kab. Pohuwato.	Dinas Pangan Kab.Pohuwato	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah serentak Daerah dalam Rangka HBKN Jelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024



NO	TANGGAL	LOKASI DESA/KELURAHAN/KECAMATAN	PENYELENGGARA/PELAKSANA	KET.
24.	01 April 2024	Lapangan Buladu, kec. Kota Barat Kota Gorontalo.	Dinas Pangan Kota Gorontalo	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam Rangka HBKN Apel siaga Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
25.	01 April 2024	Alun-alun desa Moutong, kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango.	Dinas Ketahanan Pangan & Pertanian Kab. Bone Bolango.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam Rangka HBKN Apel siaga Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
26.	01 April 2024	Fouf Court Limboto, kel. Kayu bulan, Kab. Gorontalo.	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gorontalo.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam Rangka HBKN Apel siaga Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
27.	01 April 2024	Lapangan Desa Leboto, Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara.	Dinas Pangan Kab. Gorontalo Utara.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam Rangka HBKN Apel siaga Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
28.	01 April 2024	Alun-alun Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Boalemo.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam Rangka HBKN Apel siaga Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
29.	01 April 2024	Lapangan Desa Buntulia, Kec. Buntulia, kab. Pohuwato.	Dinas Pangan Kab.Pohuwato	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional dalam Rangka HBKN Apel siaga Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024
30.	16 Oktober 2024	Halaman Ktr Dinas ketahanan Pangan Kab. Gorontalo Utara	Dinas Pangan Kab. Gorontalo Utara.	Pelaksanaan SPHP Gerakan Pangan Murah dalam Rangka HPS Ke – 44 tk. Provinsi Gorontalo tahun 2024

- Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan (- Unit).

 - Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan tidak memiliki target untuk sub kegiatan ini, tapi melaksanakan tupoksi yang lain yaitu Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan target 1 Laporan.
 -
- 2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

Output kegiatan adalah Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi dengan target 30 Ton.

 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara dengan target 30 Ton. Namun dalam pelaksanaannya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi hanya dapat diaokasikan sebesar 3,7



ton dari target 30 ton. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran masih di proritaskan kepada penanganan kemiskinan di program yang lain.

Realisasi sub kegiatan ini disampaikan sebagai berikut :

- Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan untuk penanganan bencana, kerawanan pangan, kondisi darurat serta menjaga stabilisasi harga pangan di daerah. Cadangan pangan terdiri atas 2, yaitu : cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan Pangan Pemerintah adalah Cadangan Pangan Pemerintah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, baik DKP Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah dan cadangan pangan masyarakat dimana salah satunya dimanfaatkan untuk upaya penanganan kerawanan pangan transien.
- Alokasi CPPD Tahun 2024 sebesar 3.7 Ton dari target 30 Ton yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi pada Tahun 2024 sebanyak 3.7 Ton tersebut dialokasikan untuk daerah rawan pangan, daerah dengan masyarakat berpendapatan rendah dan pasca bencana.
- Penyaluran CPPD ini dilaksanakan berdasarkan SK Gubernur Gorontalo Nomor 335/23/VIII/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi. Alokasi CPPD pada Tahun 2024 diperuntukkan di 2 (dua) Kabupaten, yakni Kabupaten Gorontalo Pohuwato dan Boalemo dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.61
Realisasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

NO	URAIAN	VOL. (Kg)	LOKASI	WAKTU
I	Kab. Boalemo	2.700		
1	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	240	Desa Pentadu Timur Kec. Tilamuta	September 2024
2	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	310	Desa Lahumbo Kec. Tilamuta	September 2024
3	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	250	Desa Bajo Kec. Tilamuta	September 2024
4	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	200	Desa Mohungo Kec. Tilamuta	September 2024
5	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	360	Desa Buti Kec. Mananggu	September 2024
6	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	330	Desa Pontolo Kec. Mananggu	September 2024
7	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	450	Desa Keramat Kec. Mananggu	September 2024
8	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	140	Desa Salilama Kec. Mananggu	September 2024



NO	URAIAN	VOL. (Kg)	LOKASI	WAKTU
9	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	90	Desa Bendungan Kec. Mananggu	September 2024
10	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	120	Desa Mananggu Kec. Mananggu	September 2024
11	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	110	Desa Tabulo Selatan Kec. Mananggu	September 2024
12	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	40	Desa Kaaruyan Kec. Mananggu	September 2024
13	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	60	Desa Tabulo Kec. Mananggu	September 2024
II	Kab. Pohuwato	1000.		
1	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	490	Kel. Siduan Kec. Paguat	September 2024
2	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	40	Kel. Kemiri Kec.Paguat	September 2024
3	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	60	Kel. Petandu Kec. Paguat	September 2024
4	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	90	Kel. Molamahu Kec Paguat	September 2024
5	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	50	Kel. Maleo Kec. Paguat	September 2024
6	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	40	Kel. Bunuyo Kec.Paguat	September 2024
7	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	140	Kel. Sipayo Kec.Paguat	September 2024
8	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	70	Kel. Soginti Kec. Paguat	September 2024
9	Bantuan Beras Masyarakat Terdampak Rawan Pangan	20	Kel. Buhu Jaya Kec. Paguat	September 2024
JUMLAH		3.700		

3. Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Output kegiatan adalah terlaksananya Promosi Konsumsi Pangan sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan indikator 1 Dokumen dan 1 Laporan.

Untuk mencapai output diatas, ada 2 (dua) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu :

- Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan indikator 1 (satu) Dokumen. Adapun capaian kinerja Tahun 2024 adalah 1 (satu) Dokumen.



Kegiatan yang menunjang adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Pekarangan Pangan Harapan

Pekarangan Pangan Harapan adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka promosi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

- a) Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengembangan ayam kampung lokal yang diberikan kepada 2 Rumah Tangga yang berada di Kabupaten Gorontalo dengan alokasi bantuan terdiri dari anak Ayam 20 ekor, 1 unit kandang pembesaran, 1 buah wadah tempat makan, 1 buah wadah tempat minum serta 20 Kg pakan untuk masing-masing penerima manfaat.
- b) Salah satu manfaat mengkonsumsi ayam kampung adalah kandungan nutrisi yang dimiliki lebih kaya dibandingkan dengan ayam ras. Daging ayam kampung mengandung lebih sedikit lemak jenuh dan lebih banyak asam lemak omega-3 yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Sehingga dengan pelaksanaan kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan nutrisi terutama protein terhadap anggota keluarganya.
- c) Adapun alokasi bantuan pekarangan pangan harapan adalah seperti pada Tabel berikut

Tabel 3.62
 Alokasi Penerima Manfaat Bantuan
 Kegiatan Pekarangan Pangan Harapan Tahun 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	PAKET	KET.
			BANTUAN	
1	Mohammad Badu	Desa Diloniyohu	- 20 Ekor bibit ayam KUR	Data P3KE
		Kec. Boliyohuto	- 1 Unit Kandang Pembesaran	
		Kab. Gorontalo	- 1 Tempat Makan	
			- 1 Tempat Minum	
			- 25 kg pakan	
2	Yanser Bobihu	Desa Pilomonu	- 20 Ekor bibit ayam KUR	Data P3KE
		Kec. Mootilango	- 1 Unit Kandang Pembesaran	
		Kab. Gorontalo	- 1 Tempat Makan	
			- 1 Tempat Minum	
			- 25 kg pakan	

2) Kegiatan Gertam Cabe.

- Kegiatan ini merupakan gerakan tanam cabe dengan memanfaatkan lahan atau pekarangan rumah agar masyarakat bisa memenuhi sendiri kebutuhan cabe secara mandiri dan berdampak pada upaya menekan inflasi yang disumbang oleh cabe merah. Dengan menanam cabe di pekarangan masing-masing, selain masyarakat tidak perlu lagi membeli cabe untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, juga dapat menghemat pengeluaran belanja sehari-hari.



- Gerakan menanam cabe yang digencarkan ini disebutkan bertujuan untuk terus menekan inflasi di Provinsi Gorontalo. Ada beberapa variable penyumbang inflasi dan diantara variabel tersebut ada yang berkontribusi terbesar sebagai penyumbang inflasi terbesar yaitu *variable folatile foods* dimana didalam variable komoditi *folatile foods* terdapat beberapa komoditi. Salah satu komoditi pangan yang berkontribusi besar dalam variable tersebut yaitu komoditi cabe. Kondisi ini terjadi beberapa kali setiap tahun terutama pada hari-hari besar keagaman yang berlangsung setiap tahunnya dan juga karakteristik masyarakat gorontalo penikmat makanan pedas.
- Dalam pelaksanaannya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo tahun 2024 melalui dana APBD yang disalurkan di sekolah-sekolah Sekolah/ Madrasah, Instansi Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan dan masyarakat umum lainnya. Bibit cabe yang dibagikan sebanyak 7.500 pohon yang bersumber dari dana APBD induk sebanyak 2500 pohon dan 5000 pohon dari dana APBD Perubahan. Penyaluran bantuan bibit cabe dilaksanakan pada Bulan Juli-November 2024. Diharapkan dengan adanya bantuan bibit ini bisa menekan terjadinya inflasi di Provinsi Gorontalo. Seperti kita ketahui bersama, Cabe merupakan salah satu komoditi penyumbang Inflasi di Provinsi Gorontalo yang disebabkan oleh tingginya angka konsumsi cabe dan disertai dengan kurangnya produksi di beberapa tempat.

Tabel 3.63

Daftar Penerima Bantuan Gertam Cabe Sumber Dana APBN dan APBD Perubahan Tahun 2024

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JUMLAH BIBIT CABAI	KET
1	SMA NEGERI 2	Kota Gorontalo	150 Pohon	
2	SMA NEGERI 4	Kota Gorontalo	150 Pohon	
3	SMA NEGERI 5	Kota Gorontalo	150 Pohon	
4	SMA NEGERI 6	Kota Gorontalo	150 Pohon	
5	SMA NEGERI 7	Kota Gorontalo	150 Pohon	
6	SMK NEGERI 1	Kota Gorontalo	150 Pohon	
7	SMK NEGERI 2	Kota Gorontalo	150 Pohon	
8	SMK NEGERI 3	Kota Gorontalo	150 Pohon	
9	SMK NEGERI 4	Kota Gorontalo	150 Pohon	
10	SMK NEGERI 5	Kota Gorontalo	150 Pohon	
11	SMA NEGERI 1 TELAGA	Kabupaten Gorontalo	200 Pohon	
12	SMA NEGERI 1 TAPA	Kabupaten Bone Bolango	200 Pohon	
13	SMA NEGERI 5 KWANDANG	Kabupaten Gorontalo Utara	200 Pohon	
14	SMA NEGERI 2 TILAMUTA	Kabupaten Boalemo	200 Pohon	
15	SMA NEGERI 1 BUNTULIA	Kabupaten Pohuwato	200 Pohon	
JUMLAH BIBIT CABE			2.500 Pohon	

Tabel 3.64

Daftar Penerima Bantuan Gertam Cabe Sumber Dana APBN dan APBD Perubahan Tahun 2024
(Lanjutan)

NO	NAMA PENERIMA MANFAAT	JUMLAH BIBIT CABE
1	SMA NEGERI 1 KOTA GORONTALO	200
2	MTs NEGERI 1 KOTA GORONTALO	250
3	MAN 1 MODEL KOTA GORONTALO	200



NO	NAMA PENERIMA MANFAAT	JUMLAH BIBIT CABE
4	SMA NEGERI 3 KOTA GORONTALO	200
5	SMK MODEL BOTUPINGGE KAB. BONE BOLANGO	200
6	SMKS PARIWISATA BATUDAA PANTAI KAB. GORONTALO	200
7	SMK NEGERI 1 BATUDAA KAB. GORONTALO	200
8	SMK NEGERI 1 DUNGALIYO KAB. GORONTALO	200
9	MAN 1 LIMBOTO KAB. GORONTALO	150
10	SMA NEGERI 1 LIMBOTO BARAT KAB. GORONTALO	150
11	SMA NEGERI 1 BOLIYOHUTO KAB. GORONTALO	200
12	MTs NEGERI 3 KAB. GORONTALO	50
13	SMA NEGERI 1 DULUPI KAB. BOALEMO	200
14	SMK NEGERI 3 PAGUYAMAN KAB. BOALEMO	200
15	SMA NEGERI 1 PAGUAT KAB. POHUWATO	200
16	SMK NEGERI 1 TALUDITI KAB. POHUWATO	200
17	UNIVERSITAS POHUWATO KAB. GORONTALO	200
18	SMA NEGERI 1 KWANDANG KAB. GORONTALO UTARA	200
19	BADAN KESBANGPOL PROVINSI GORONTALO	50
20	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	50
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI GORONTALO	50
22	DINAS PARIWISATA PROVINSI GORONTALO	50
23	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	50
24	DINAS DISKUMPERINDAG PROVINSI GORONTALO	50
25	KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI GORONTALO	50
26	BPS PROVINSI GORONTALO	50
27	BPKP PROVINSI GORONTALO	50
28	KOREM 133 NANI WARTABONE	200
29	POLDA GORONTALO	200
30	DPD APWI PROVINSI GORONTALO	50
31	DWP DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO	70
32	HANDOYO	10
33	SAGITA .W	10
34	HELMY TANTU	15
35	MUH. NASRUL	20
36	MAISUR R. BAH	15
37	SULTAN F. OLILINGO	15
38	SHINTO	10
39	AMIR .H	20
40	ALEX P	10
41	YULINDAWATI RAUF	10
42	SUKRI B	20
43	ROSMAN	10
44	MOH. RISKI MALIKI	30
45	LABASIR	20
46	FERDIANSYAH	10
47	INO DANIAL	25
48	SUWARTIN MUSA	10
49	HASNAH DJAMIL	20
50	FITRI SUKIMAN	10
51	BASRI AMIN	20
52	ASRI B	10
53	RUDI D	10
54	LUKMAN HUSAIN	20
55	FITRIANI MASA	10
56	NOVAL ISKANDAR	10
57	PURNOMO WINDU	10
58	IRWAN MUSTAMIN	10



NO	NAMA PENERIMA MANFAAT	JUMLAH BIBIT CABE
59	KINO NENTO	10
60	SEPTIANE RINDU	10
61	NAYA ARKA MARUF	10
62	FAHRUL ANTU	10
63	JOHN PURBA	10
64	NURUL ULOLI	10
65	JUSRAN PAKAYA	10
66	NAWIR	10
67	ZURIATI H	10
68	MARYAM ADAM	10
69	SASKIA ALIMUN	10
70	NURLELA MUSA	10
71	ELFIN WAHIDJI	10
72	ROHANA TUKI	10
73	RAMLAH TUKI	10
74	LIAN MBUINGA	10
75	HASNA DENGGO	10
76	ONI SULILIA	10
77	MARYAM SAMON	10
78	FAISAL	10
79	NIRU MARJUN	7
80	YOK	6
81	MARIA HIOLA	4
82	ASNI NOHO	4
83	NELLY MOKA	4
84	SAMSIA BUNGO	3
85	HANUM HULUKATI	5
86	TETI TUKI	7

- Sub kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Promosi.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun dengan indikator 1 Laporan. (Capaian Tahun 2024 adalah 1 Laporan).
- Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Capaian skor PPH provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah 76,68 dari target yang ditentukan pada angka 80.
- Masih rendahnya capaian PPH Konsumsi dari target yang telah ditentukan disebabkan karena konsumsi masyarakat Gorontalo masih bergantung pada beras dan belum tersosialisasikan secara luas akan pemahaman tentang Gerakan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

- Pada tahun 2024 ini juga telah dilaksanakan kegiatan B2SA Stunting, dalam bentuk pemberian beberapa bahan pangan untuk anak stunting antara lain : telur dan Susu untuk anak balita. Penerima bantuan berjumlah 225 anak yang ada di Kota Gorontalo 50 anak dan Kab. Gorontalo 175 anak.
- Semoga kedepannya pemerintah Provinsi Gorontalo bisa memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak terutama dari segi pemenuhan gizi agar bisa menekan perkembangan angka stunting di daerah.

2) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Outcome dari program adalah Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan dengan indikator 11% dengan capaian tahun 2024 adalah sebesar 25,97% Pelampaun tersebut dicapai oleh adanya penambahan bantuan pada revisi anggaran dari OPD lain ke Dinas Ketahanan Pangan dan tambahan dari APBD perubahan sehingga daerah rawan pangan yang ditangani porsinya lebih banyak dari target tahun 2024.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi.

Output kegiatan adalah tersusunnya Peta dan Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan dengan indikator target 1 (satu) Dokumen. Capaian Tahun 2024 1 (satu) Dokumen.

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia-Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Gorontalo 2024 disusun dengan tujuan antara lain : (1) Mengidentifikasi dan memetakan daerah-daerah yang rawan dan rentan pangan di Provinsi Gorontalo; (2) Mengetahui berbagai faktor penyebab kerawanan pangan; (3) Menentukan prioritas kecamatan untuk penanganan kerawanan pangan dan kerentanan pangan dan (4) Mengevaluasi kemajuan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo.

- Sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Indikator Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan dengan output 1 dokumen capaian tahun 2024 adalah 1 dokumen.

Indikator yang digunakan dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dapat digolongkan ke dalam dua komponen yaitu : Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Kronis, yang mencerminkan aspek ketersediaan pangan, akses terhadap pangan serta pemanfaatan pangan (9 indikator), dan Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Transien, dicerminkan melalui indikator kerentanan terhadap bencana alam dan bencana lainnya (3 indikator). Analisis data menggunakan perangkat lunak yang dibuat oleh Badan Ketahanan Pangan dalam bentuk Form MS Excel. Pemetaan dilakukan dengan menggunakan Software QuantumGis ver 3.20.1. Peta interaktif FSVA dibuat menggunakan Software Statplanet.

Gambar 3.2
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023



Berdasarkan analisis FSVA Provinsi Gorontalo tahun 2024, khusus untuk wilayah Kota Gorontalo, apabila di lihat dari kategori Prioritas secara komposit maka masih ada 1 kecamatan yang masuk prioritas 3 (rentan pangan) yakni di kecamatan Dumbo Raya. Sementara untuk wilayah kecamatan lain sudah masuk kategori prioritas 5 dan 6 (Tahan Pangan). Sebagai catatan, Analisis FSVA khusus untuk wilayah Kota diukur berdasarkan 8 indikator pengukuran, dimana indikator NCPR tidak diperhitungkan. Indikator-indikator yang paling berpengaruh secara umum terhadap ketahanan Pangan berdasarkan pada besaran skor masing-masing indikator berturut- turut yaitu tingkat kesakitan (skor 107), Penduduk miskin (Skor 30), Pengeluaran >65% (skor 22), lama sekolah Perempuan berumur 15 tahun atau lebih (skor 21). indikator lainnya memiliki skor sama atau kurang dari 10 sehingga dianggap kurang berpengaruh terhadap ketahanan dan kerentanan pangan Berdasarkan hasil Analisis FSVA Provinsi Gorontalo tahun 2024, khususnya untuk wilayah kabupaten, tidak ada lagi kecamatan yang masuk pada kategori rentan pangan, sehingga untuk menentukan skor pada wilayah rentan pangan tidak ada.

2. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi

Indikator Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi Terlaksanannya Penanganan Kerawanan Pangan dengan target outpunya tahun 2024 adalah 2 dokumen dan realisasinya adalah 2 dokumen.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi.

Indikator Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dengan output1 (satu) Dokumen. Capaian Tahun 2024 adalah 1 (satu) Dokumen.



Pada Tahun 2024 untuk menunjang kegiatan ini, telah dilaksanakan Kegiatan Pemberian Bantuan beberapa komoditi pangan terhadap masyarakat yang ada di daerah rawan pangan. Penentuan lokasi penerima manfaat dipilih berdasarkan Desa yang berada dalam kawasan daerah rawan pangan yang terdapat dalam Peta FSVA dan Peta SKPG, yang kemudian diusulkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab/Kota dan diverifikasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Kriteria penerima manfaat adalah penduduk asli yang berada di lokasi rawan pangan berdasarkan data DTKS dan BDT yang berada di masing-masing desa. Bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari Beras 5.5 Kg, Gula Pasir 1 Kg dan Minyak Goreng 1 Liter. Penyaluran bantuan sudah dilaksanakan pada bulan mei sampai dengan desember 2024.

Sub Kegiatan ini ditunjang dengan pelaksanaan pemberian bantuan pangan untuk masyarakat kurang mampu yang ada di daerah atau wilayah yang mengalami rentan pangan. Penentuan lokasi penerima manfaat adalah Desa yang terindikasi mengalami rawan pangan berdasarkan Peta FSVA, Analisis SKPG dan Data DTKS yang kemudian diusulkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kab/Kota dan diverifikasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi.

Bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari Beras 5 Kg, Gula Pasir 1 Kg dan Minyak Goreng 1 Liter. Penyaluran bantuan sudah dilaksanakan pada bulan mei - desember Tahun 2024 sebanyak 9.027 paket. Dimana untuk paket bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat rentan rawan pangan yang masing-masing tersebar di Kabupaten Boalemo sebanyak 5.991 Paket, Kab. Bone Bolango 90 Paket, Kabupaten Gorontalo 4.530 Paket, dan Kota Gorontalo 6.000 Paket.

Tabel 3.65

Daftar Penerima Bantuan PDRP tahun 2024

NO	KAB/KOTA	KEC	
1	KAB. GORONTALO	1	KEC. MOOTILANGO
		2	KEC. ASPARAGA
		3	KEC. BATUDAA
		4	KEC. BILUHU
		5	KEC. BONGOMEME
		6	KEC. DUNGALIYO
		7	KEC. LIMBOTO BARAT
		8	KEC. LIMBOTO
		9	KEC. TABONGO
		10	KEC. TELAGA BIRU
		11	KEC. TELAGA
		12	KEC. LIMBOTO
	JUMLAH		2000
2.	KAB. BOALEMO	1	KEC. TILAMUTA
		2	KEC. PAGUYAMAN
		3	KEC. DULUPI
		4	KEC. WONOSARI
		5	KEC. PAGUYAMAN PANTAI
	JUMLAH		1997



NO	KAB/KOTA	KEC	
3.	KOTA GORONTALO	1	KEC. KOTA UTARA
		2	KEC. KOTA TENGAH
		3	KEC. KOTA SELATAN
		4	KEC. DUMBO RAYA
		5	KEC. KOTA BARAT
		6	KEC. KOTA TIMUR
		7	KEC. SIPATANA
		8	KEC. DUNGINGI
	JUMLAH		3000
4.	Kab. Bone Bolango	1	KEC. BOLANGO ULU
		2	KEC. SUWAWA TIMUR
	JUMLAH		90

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi dengan Indikator 1 (satu) Dokumen. Capaian Tahun 2023 adalah 1 (satu) Dokumen. Adapun data yang dihasilkan berupa analisis stuasi pangan dan gizi tingkat Provinsi Gorontalo.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Outcome dari program adalah Persentase Pangan Segar Asal Tanaman (PSAT) yang memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan dengan indikator target 85 %.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Kabupaten/Kota dengan target output 15 Sertifikat dan 6 Dokumen. (Capaian Tahun 2024 adalah 27 Sertifikat dan 6 Dokumen).

- Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator target 6 Dokumen. (Capaian Tahun 2024 adalah 6 (enam) Dokumen). Pangan Segar Asal Tumbuhan merupakan pangan yang berisiko tinggi terhadap cemaran kimia, salah satunya residu pestisida yang jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat mengganggu kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan keamanan pangan yang dimulai dari tempat produksi sampai ke tingkat pedagang. Pengambilan sampel PSAT meliputi sayur-sayuran dan buah-buahan yang diuji kandungan pestisidanya dengan menggunakan Uji Rapid Test Kit. Rapid Test Kit Pestisida merupakan alat uji cepat kualitatif keamanan pangan untuk mendeteksi kandungan pestisida yang

- terdapat dalam bahan pangan. Hasil uji akan menunjukkan positif atau negatif kandungan pestisida. Selama kurun waktu tahun 2024 telah dilakukan pengujian sampel sebanyak 21 kali untuk 125 jenis komoditi.
- Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator terget 15 Sertifikat. (Capaian Tahun 2024 adalah 27 Sertifikat).

OKKPD Provinsi Gorontalo melalui UPTD BPMKP pada tahun 2024 telah menerbitkan Sertifikat sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sertifikat maupun registrasi terhadap kelompok tani yang sudah melakukan proses sertifikasi. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKPP-D) dengan persyaratan memenuhi aspek Produk aman untuk dikonsumsi.

Dalam upaya menyediakan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang bermutu, aman, sehat, dan layak konsumsi, Pemerintah membuat regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Permentan No. 53 tahun 2018 ini dimaksudkan untuk mendukung penguatan dan pemanfaatan sistem keamanan pangan. Secara umum regulasi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat selaku konsumen, karena masyarakat akan mudah memilih Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman, yaitu pangan yang memiliki nomor registrasi atau sertifikasi. Regulasi ini mengatur mengenai : (1) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan melalui pendataan, pendaftaran dan sertifikasi; (2) Pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota; (3) Merespon pelayanan pendaftaran secara online; dan (4) Mengakomodasi prinsip pengawasan keamanan pangan berdasarkan analisis resiko.

Pendaftaran/Registrasi PSAT merupakan salah satu bentuk penjaminan suatu bentuk ijin edar dengan pemberian dokumen yang menyatakan bahwa produk pertanian tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan. Dengan adanya Registrasi PSAT ini akan memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat/konsumen, serta akan mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk. Apabila terjadi sesuatu maka pemerintah mudah untuk melacak dan melakukan penelusuran kemungkinan terjadinya penyimpangan mutu maupun keamanan Pangan dari hulu hingga hilir.



3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan.
- Kebijakan strategis yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2024 mengacu pada kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, Penanganan Stunting dan Penangan Inflasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.66
Kebijakan Strategis Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
A 1	Pengentasan Kemiskinan Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui Bantuan Pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan pasca bencana.	SK Gubernur Nomor : 505/23/VII/2023 tentang Penetapan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Sebagai Penanggung Jawab Wilayah Percepatan Penurunan Stunting, Kemiskinan Ekstrim Dan Menjaga Inflasi Serta Indeks Harga Konsumen Di Provinsi Gorontalo SK Gubernur Gorontalo Nomor 99/28/II/2024 tentang Daftar Kegiatan Strategis di Provinsi Gorontalo SK Gubernur Nomor 73/23/II/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pangan Untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah Dan Terdampak Bencana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 (Kota Gorontalo dan Kab. Gorontalo SK Gubernur Nomor 252/23/VII/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pangan Untuk Masyaraka Berpendapatan Rendah Dan Terdampak Bencana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 (Kota Gorontalo) SK Gubernur Nomor 352/23/IX/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pangan Untuk Masyaraka Berpendapatan Rendah Dan Terdampak Bencana Yang Bersumber Dari Anggaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo	Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui pemberian bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan pasca bencana sejumlah 9.027 Paket di Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo, dan Kota Gorontalo



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
2		Tahun Anggaran 2024 (Kab. Gorontalo)	
	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia <i>Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Gorontalo tahun 2024</i>	UU No 18/ 2012 tentang Pangan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Mengidentifikasi dan memetakan daerah-daerah yang rawan rentan pangan di Provinsi Gorontalo
	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 62 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah SK Gubernur Gorontalo Nomor 335/23/VIII/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	Penyediaan dan tersalurkannya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanganan daerah rawan pangan, masyarakat berpendapatan rendah dan pasca bencana sebanyak 3.7 ton.
B 1	Penanganan Inflasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	SK Gubernur Nomor : 505/23/VII/2023 tentang Penetapan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Sebagai Penanggung Jawab Wilayah Percepatan Penurunan Stunting, Kemiskinan Ekstrem Dan Menjaga Inflasi Serta Indeks Harga Konsumen Di Provinsi Gorontalo Perbadan Pangan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Perbadan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan tas Perbadan Nomor 7 tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras. SK Gubernur 326/23/X/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022.	Terlaksananya Gerakan Pangan Murah sebanyak 35 kali yang di laksanakan pada Hari-hari besar keagamaan, daerah rawan pangan dan pasca bencana Pemantauan stok dan harga di produsen/ pasar-pasar/distributor oleh Tim Satgas Pangan pada saat menjelang HBKN dan adanya informasi masyarakat
2	Promosi Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	UU No 18/ 2012 tentang Pangan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Terlaksananya kegiatan Gerakan Tanam Cabai sebanyak 7.500 yang dialokasikan untuk 2500 bibit cabai di 15 Sekolah dan 5000 bibit cabai untuk sekolah dan masyarakat umum
3	Pengawasan Keamanan Pangan	UU No 18/ 2012 tentang Pangan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Terpenuhinya syarat keamanan dan mutu pangan bagi pangan segar asal tanaman pada petani. Tahun 2024



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
			telah dilakukan sertifikasi PSAT sebanyak 27 Sertifikat
C 1	Penanganan Stunting Pemberian Bantuan Makanan tambahan untuk anak stunting	UU No 18/ 2012 tentang Pangan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi SK Gubernur Nomor : 505/23/VII/2023 tentang Penetapan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Sebagai Penanggung Jawab Wilayah Percepatan Penurunan Stunting, Kemiskinan Ekstrem Dan Menjaga Inflasi Serta Indeks Harga Konsumen Di Provinsi Gorontalo	Penurunan anak stunting dengan pemberian makanan tambahan pada 225 anak stunting dan pemberian makanan Beragam Bergizi, seimbang dan Aman melalui dana APBN di 2 (dua) kelompok

4. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra OPD 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024.

Tabel 3.67

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pangan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Indeks Ketahanan Pangan	81	81,95

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Kinerja
- 1) Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, Provinsi Gorontalo berhasil mencatatkan kemajuan dalam upaya meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP Provinsi Gorontalo naik skor 81,63 menjadi 81,95 di tahun 2024. Ini menunjukkan Tingkat ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo berada pada angka yang cukup baik.
 - 2) Skor PPh konsumsi yang tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh masih tingginya masyarakat mengkonsumsi karbohidrat terutama dari padi-padian dalam hal ini beras sebesar 25 point dari target ideal sebesar 22 point. Adapun konsumsi kacang-kacangan masih sangat rendah dari standar sebesar 10 point yang tercapai hanya 3 poin disusul dengan konsumsi umbi-umbian masih dimana hanya 0,63 point dari target ideal sebesar 6 point.
 - 3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat indikator kinerjanya adalah persentase cadangan pangan pemerintah daerah yang tersedia Untuk target tahun 2024 dari indikator persentase cadangan pangan pemerintah daerah yang tersedia adalah sebesar 25% dari total cadangan pangan atau sebesar 30 ton, sedangkan realisasinya adalah 3,7 ton atau sebesar 7,7%. Program tersebut



- tidak mencapai target disebabkan anggaran yang dialokasikan pada kegiatan CPPD belum optimal karena masih diprioritaskan di kegiatan lain.

4) Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hari) dengan target tahun 2024 adalah 2.150 kkal/kap/hari dan realisasinya masih dibawah target adalah sebesar 1,938 kkal/kap/hari. Masih rendahnya angka kecukupan energi disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang dengan dominasi karbohidrat dari padi-padian tetapi kekurangan asupan dari kelompok pangan lain yang kaya energi.
6. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi pada tahun 2024.

MOU Selamatkan Pangan antara Dinas Ketahanan Pangan dan Hypermart Gorontalo sebagai Donatur berupa mendonasikan dan mendistribusikan Pangan berlebih dari Donatur kepada penerima (masyarakat) guna mengurangi Food Waste dan membantu masyarakat yang membutuhkan.

MOU Selamatkan Pangan antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Dharma Wanita Persatuan Unit Dinas Ketahanan Pangan dengan ruang lingkup mengumpulkan makanan yang berlebih dari berbagai sumber seperti toko, restoran dan produsen makanan dan mendistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

D. Urusan Pertanian

D.1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo.

- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

- Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan.

b. Sasaran dan program

Tabel 3.68

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang	Indikator : Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan arahan rencana tata ruang dan penataan bangunan gedung	100%	0	0
		Indikator : Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah.	85,7%	100%	100%
	Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Jumlah penyediaan bidang tanah untuk kepentingan umum yang tersertifikat	5 Dok	2 Dok	40%
	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Jumlah penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan	1 Kasus	1 Kasus	100%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah alokasi tanah yang dilaksanakan penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	2 Lokasi	1 Lokasi	50%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.69
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum	1.130.155.120	1.025.337.263	90,73	100		
	Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi.	1.130.155.120	1.025.337.263	90,73	100		
	- Sub kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.	1.130.155.120	1.025.337.263	90,73	100		
2	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	87.628.100	74.236.393	84,72	100		
	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	87.628.100	74.236.393	84,72	100		
	- Sub kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	87.628.100	74.236.393	84,72	100		
3	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	2.978.745.000	2.633.874.159	88,42	100		
	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.978.745.000	2.633.874.159	88,42	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.978.745.000	2.633.874.159	88,42	100		
JUMLAH		1.217.783.220	1.099.573.656	90,29	100		

- 1) Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Outcome dari program adalah Jumlah Penyediaan Bidang Tanah untuk Kepentingan Umum yang Tersertifikat.

a. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah Penyediaan Bidang Tanah untuk Kepentingan Umum yang Tersertifikat.

 - Sub kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- 2) Program penyelesaian sengketa tanah garapan

Outcome dari program adalah Jumlah penyelesaian Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan.

a. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah penyelesaian Konflik Sengketa dan Perkara Pertanahan.

 - Sub kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output sub kegiatan adalah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 3) Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

Outcome dari program adalah Jumlah Lokasi Tanah yang dilaksanakan Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.



- a. Pelaksanaan program
1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah Lokasi Tanah yang dilaksanakan Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 3.70
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pertanahan
 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi
 Gorontalo Tahun 2024
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	5 Dok	2 Dok
2	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dok	1 Dok
3	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	5 Dok	1 Dok

4. Hal-Hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Kinerja Tahun 2024.
- 1) Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum rencana 5 Dokumen Realisasi 2 Dokumen karena hanya menghasilkan 2 dokumen antara lain :

- Sertifikat berupa Panti Rehabilitasi Sosial yang terdapat di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango
 - Sertifikat SMAN 10 Di Kec. Biau Kabupaten Gorontalo Utara

2) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi rencana 5 Dokumen Realisasi 1 Dokumen karena hanya menghasilkan 1 dokumen yaitu dokumen hibah uang ke korem. Pelaksanaan kegiatan hibah uang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 600/PUPR-PKP/537/V/2023 Tanggal 30 Mei 2023 Tentang penyelenggaraan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.



E. Urusan Lingkungan Hidup

E.1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

- 1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
 - 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 2) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
 - b. Sasaran dan program

Tabel 3.71
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan hutan yang lestari	Indikator Sasaran : 1. Indeks kualitas air (IKA)	52 Poin	58.14 Poin (Sedang)	112%
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	91.03 Poin	92.73 Poin (Sangat Baik)	102%
		3. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	75.89 Poin	83.40 Poin (Baik)	110%
		4. Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan/ Persetujuan Lingkungan, Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.	76%	80%	105%
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemarannya	2 lokasi	2 lokasi	100%
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Limbah B3 yang terkelola sebesar 33.868 ton dalam 4 tahun	8.467 ton	9.771,42 ton	115%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	76%	80%	105%
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	100%	0%	0%
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diberikan	100%	0%	0%
2	Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang baik	1. Nilai SAKIP	BB	BB (78,15 atau Sangat Baik)	100
		2. Nilai Kepuasan Masyarakat	B	A (93,608 atau	100



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
				sangat baik)	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.72
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	95.040.000	95.040.000	100	100		
a.	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	31.680.000	31.680.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	31.680.000	31.680.000	100	100	Anggaran di tahun ini tidak mencukupi untuk melakukan pelaksanaan pemantauan uji kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membiayai tenaga penunjang kegiatan, sehingga pelaksanaan uji kualitas lingkungan hidup tidak dapat dilaksanakan yang berakibat pada tidak terinputnya data pemantauan pada website IKLH KLHK. Hal ini mengakibatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi menurun dibanding tahun sebelumnya.	• Mengoptimalk an data hasil pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH; • Mengefektifka n koordinasi dengan kabupaten/ko ta dalam rangka pemantauan kualitas lingkungan hidup.
b.	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	63.360.000	63.360.000	100	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	63.360.000	63.360.000	100	100	Tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk pembiayaan listrik Stasiun ONLIMO dan pulsa data, serta kebutuhan yang mendukung pelaksanaan pengumpulan data dari dinas teknis dan kegiatan rapat perumusan isu strategis daerah dengan pemerintah kabupaten/kota, telah mempengaruhi kelancaran operasional. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA DLHK Provinsi Gorontalo, menghambat upaya untuk mencapai target yang telah direncanakan	• Memaksimalkan tenaga penunjang kegiatan untuk melakukan pengecekan alat ONLIMO berupa pembersihan sensor dan mengganti air dalam wadah sensor secara berkala dan melakukan Parsing Data ONLIMO Stasiun GTLO 1 dan Stasiun GTLO 2 dengan pusat data ONLIMO KLHK • Kebijakan penganggaran tahun 2025 juga difokuskan pada penyelesaian isu utama daerah, seperti pembiayaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan serta penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi dan aktivitas tanpa izin
2	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	29.040.000	29.040.000	100	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
a.	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	29.040.000	29.040.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	29.040.000	29.040.000	100	100	- Belum beroperasinya UPTD Limbah B3 - Belum beroperasinya incinerator limbah fasyankes	- Segera mengoperasikan UPTD Limbah B3 - Mempercepat pengurusan Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO)
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	29.040.000	29.040.000	100	100		
a.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	29.040.000	29.040.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	29.040.000	29.040.000	100	100	Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membiayai tenaga penunjang kegiatan sehingga kegiatan pembinaan kepada para pelaku usaha tidak dapat dilaksanakan	Memaksimal kan koordinasi dengan para pelaku usaha dalam mendukung kepatuhan terhadap peraturan
4	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.042.280.000	1.031.743.140	98,99	100		
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1.042.280.000	1.031.743.140	98,99	100		
	- Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Provinsi	1.042.280.000	1.031.743.140	98,99	100	Terdapat sisa belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (APBD-P), belanja	Perlu dilakukan sinkronisasi harga barang berdasarkan harga aktual di E-Katalog,



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
						ini merupakan sisa belanja Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Viar untuk kelompok masyarakat (sesuai E-KATALOG) serta sisa belanja perjalanan dinas biasa. Pada saat verifikasi lokasi calon penerima kendaraan Viar, ditemukan bahwa pengelolaan sampah di beberapa lokasi masih belum optimal. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di tempat-tempat yang tidak semestinya, dan sebagian pengusul proposal belum menyediakan lokasi tempat pembuangan sampah sementara untuk menampung sampah yang diangkut dari rumah-rumah penduduk, pertokoan, dan median jalan.	peningkatan koordinasi dalam penganggaran, serta penguatan mekanisme pengendalian anggaran untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, dan akurat di tahun 2025. Untuk mengoptimalkan dan menghindari penyalahgunaan pemanfaatan kendaraan roda tiga (Viar) dalam kegiatan pengangkutan sampah rumah tangga dan sejenisnya di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, disarankan agar pemberian bantuan kendaraan Viar hanya ditujukan bagi kelompok yang benar-benar berperan dalam penanganan sampah, seperti pengelola Bank Sampah dan penunjang TPS 3R. Pemerintah kelurahan/de sa diharapkan mendorong pembentukan Bank Sampah



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
							di setiap kelurahan/de sa, sementara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu membantu menyusun skenario pemasaran untuk produk daur ulang sampah yang dihasilkan oleh Bank Sampah dan TPS 3R yang dikelola masyarakat
5	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	31.680.000	31.680.000	100	100		
a.	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	31.680.000	31.680.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	31.680.000	31.680.000	100	100	Dari hasil uraian pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat permasalahan yang dihadapi, yaitu beberapa kabupaten tidak mengajukan usulan untuk program Adiwiyata, baik di tingkat provinsi, nasional, maupun mandiri, karena sebagian sekolah di wilayah tersebut belum siap untuk menjalani proses penilaian serta tidak adanya dukungan dari masing-masing Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan terhadap Calon Sekolah Adiwiyata	DLHK Provinsi Gorontalo telah memberikan pembinaan kepada DLH Kabupaten/Kota terkait pencapaian tiga komponen penilaian Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS), yaitu: 1) Perencanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah; 2) Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah; dan 3) Pemantauan serta Evaluasi Gerakan tersebut. Pencapaian



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
							ketiga komponen penilaian ini perlu disosialisasikan ke sekolah-sekolah agar komponen tersebut dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik, sehingga pada saat verifikasi penilaian, sekolah sudah siap
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	26.390.087.298	26.225.121.370	99,37	100		
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	698.344.547	695.661.686	99,62	100		
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	416.184.252	415.822.911	99,91	100	- Terdapat sisa anggaran pada Belanja Kertas dan Cover, Belanja Bahan Cetak, Belanja Bahan Komputer, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, serta Belanja Perjalanan Dinas Biasa. - Pergeseran anggaran yang sering terjadi di awal tahun menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, sehingga menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan. - Seringkali, belanja yang tercantum dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) tidak sesuai dengan output yang dihasilkan, dimana alokasi	- Perlu dilakukan optimalisasi belanja serta pemantauan dan pengendalian penggunaan anggaran secara berkala di tahun 2025. - Membuat mekanisme yang lebih fleksibel dalam pengelolaan anggaran yang memungkinkan penyesuaian cepat terhadap pergeseran anggaran, serta memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat waktu.



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
						anggaran tidak efektif dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena perencanaan anggaran yang kurang mendetail dan tidak mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya, sehingga output yang diinginkan tidak tercapai atau tidak sesuai dengan alokasi yang direncanakan	• Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan penyeselarasan anggaran dengan output yang diinginkan, memastikan bahwa setiap belanja yang tercantum dalam RKA benar-benar mendukung hasil yang ingin dicapai. Penyusunan RKA harus lebih detil dan realistis, dengan melibatkan tim perencana dalam setiap tahapnya untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala agar setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dan berkontribusi pada pencapaian output yang telah direncanakan.
	- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	282.160.295	279.838.775	99,18	100	• Terdapat sisa anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kertas dan Cover, Belanja Bahan Komputer, Belanja Makan Minum Rapat, Belanja	• Perlu dioptimalkan perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan aktual, ditingkatkan efisiensi



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
						Makana dan Minuman Jamuan Tamu, dan Belanja Modal Personal Computer. • Monitoring dan evaluasi atas tindaklanjut hasil evaluasi AKIP internal belum dilaksanakan berkala, belum mendorong perbaikan yang signifikan serta belum digunakan sebagai dasar memberikan reward and punishment.	dalam pelaksanaan kegiatan, serta dilakukan penyesuaian anggaran berdasarkan harga pasar aktual, dengan fokus pada pemanfaatan anggaran sesuai pos yang telah ditetapkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran • Penetapan jadwal evaluasi berkala, mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja, serta penerapan reward and punishment berdasarkan evaluasi untuk mendorong pencapaian seluruh target kinerja.
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.657.038.078	23.559.779.730	99,59	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.491.638.078	23.394.427.706	99,59	100	Terdapat sisa gaji dan tunjangan ASN	Perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan jumlah pegawai dan tunjangan yang dibutuhkan
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	165.400.000	165.352.024	99,97	100	Terdapat sisa pada Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kertas dan Cover, serta Belanja Bahan Komputer	Perlu dilakukan penyesuaian anggaran agar lebih sesuai dengan volume penggunaan



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
c.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	516.841.173	514.497.564	99,55	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas)	130.863.923	129.194.265	98,72	100	Terdapat sisa anggaran pada belanja Bahan-Bahan Lainnya, Belanja Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, dan Belanja Modal Alat Pendingin	Perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan peralatan dan perlengkapan, penyesuaian anggaran berdasarkan hasil evaluasi, optimalisasi pengadaan melalui e-Katalog, serta pengendalian anggaran yang ketat dengan pemantauan berkala
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas)	31.177.257	31.177.025	99,99	100	Terdapat sisa anggaran pada belanja Cetak	Perlu untuk tetap melakukan evaluasi rutin dalam rangka memastikan perencanaan anggaran semakin akurat di masa mendatang
	- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dinas)	104.100.000	104.099.274	100	100		
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas)	250.699.993	250.027.000	99,73	100	Terdapat sisa anggaran pada Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Aktivitas Lapangan, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Perlu dilakukan optimalisasi perencanaan kebutuhan konsumsi berdasarkan data kegiatan sebelumnya, peningkatan koordinasi antar unit terkait dalam perencanaan aktivitas



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
							lapangan, serta pengendalian dan evaluasi berkala agar anggaran lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil
d.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731.903.500	693.896.815	94,81	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.103.500	149.186.815	79,73	100	Terdapat efisiensi penggunaan anggaran pada beban jasa air dan Belanja Tagihan Listrik	Terus meningkatkan upaya penghematan dan efisiensi penggunaan sumber daya di masa mendatang
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	544.800.000	544.710.000	99,98	100	Terdapat sisa anggaran pada belanja jasa pelayanan umum (APBD-P)	Perlu ditekankan bahwa kehadiran tenaga pelayanan umum sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah direncanakan, dan mereka diwajibkan untuk hadir sesuai jadwal kerja yang telah ditetapkan agar anggaran dapat digunakan secara maksimal dan efektif
e.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	785.960.000	761.285.575	96,86	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas)	773.970.000	749.295.575	96,81	100	Terdapat sisa anggaran pada Belanja Jasa KIR sebab Jasa KIR sudah non retribusi dan terdapat pula anggaran service suku cadang untuk roda dua yang tidak bisa peruntukan belanjanya pada dinas	Perlu dilakukan penyesuaian perencanaan anggaran ke depan agar lebih sesuai dengan kebijakan terkini dan kebutuhan riil dinas.



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALA HAN
			ANGGARAN (Rp)	KEU	FISIK		
				(%)	(%)		
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas)	11.990.000	11.990.000	100	100		
	JUMLAH	27.617.167.298	27.441.664.510	99,36	100		

1) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Outcome dari program adalah Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemarannya dengan target 0 lokasi dan capaian realisasi yaitu 2 lokasi atau melampaui target. Pada program ini tidak melaksanakan upaya pengendalian secara aktif, namun hanya pelaksanaan pengendalian secara pasif yakni dengan memaksimalkan data hasil pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH Tahun 2024 sehingga data hasil pemantauan yang dilakukan provinsi tidak terisi pada website pemantauan IKLH. Hal ini bisa dilihat pada salah satu contoh penginputan data untuk Indek Kualitas Air (IKA) Tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.73
Data Pemantauan Indeks Kualitas Air Provinsi Gorontalo

Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	22	66	66
P3E	0	0	0
PROVINSI	20	0	0
KAB/KOTA	25	26	20
TOTAL	67	92	86

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>

- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup.

Output kegiatan adalah Status Mutu Air Sungai dengan target Cemar Ringan, Status Mutu Air Danau dengan target Cemar Sedang, Status Trofik Danau Limboto dengan target Eutrofik Ringan, Status Mutu Udara dengan target Baik dan capaian realisasi dari semua status tersebut tidak mencapai target karena di Tahun 2024 Provinsi tidak melakukan pemantauan.

Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah memaksimalkan data hasil pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dalam penentuan IKLH Tahun 2024.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.

Output sub kegiatan adalah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan target 0



dokumen dan capaian realisasi 0 dokumen atau mencapai target. Output sub kegiatan ini telah tercapai sesuai perencanaan, yakni 0 dokumen, namun anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membiayai tenaga penunjang kegiatan, sehingga pelaksanaan uji kualitas lingkungan hidup tidak dapat dilaksanakan.

Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah memaksimalkan data hasil pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH dalam penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Tahun 2024.

2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Output kegiatan adalah lokasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diatasi dengan target 0 lokasi dan capaian realisasi adalah 0 lokasi atau mencapai target.

- Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

Output sub kegiatan adalah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Lintas Kab/Kota yang dilaksanakan dengan target 1 laporan dan capaian realisasi adalah 1 laporan atau telah mencapai target. Output sub kegiatan ini telah memenuhi target secara kuantitatif, namun secara kualitatif belum mencerminkan output yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membiayai tenaga penunjang kegiatan, sehingga pelaksanaan sosialisasi menjadi tidak optimal.

Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah melakukan pengecekan alat ONLIMO berupa pembersihan sensor dan mengganti air dalam wadah sensor secara berkala dan melakukan Parsing Data ONLIMO Stasiun GTLO 1 dan Stasiun GTLO 2 dengan pusat data ONLIMO KLHK.

2) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3).

Outcome dari program adalah Limbah B3 yang terkelola sebesar 33.868 ton dalam 4 tahun dengan target 0 ton dan capaian realisasi telah melebihi target yaitu 9.771,42 ton.

a. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah usaha/fasyankes yang terkelola pengelolaan Limbah B3 nya melalui kegiatan pengumpulan sebesar 1.848 ton dalam 4 tahun dengan target 12 (dua belas) fasyankes/unit usaha dan capaian realisasi yaitu 15 fasyankes/unit usaha atau telah melampaui target.



- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

Output sub kegiatan adalah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang sesuai Kewenangannya dengan target 0 dokumen dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 0 dokumen. Hal ini sesuai dengan perencanaan, dimana fokus kegiatan lebih pada koordinasi dan sinkronisasi tanpa memerlukan penyusunan dokumen formal.

3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Outcome dari program adalah Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan target 35% dan capaian realisasi yaitu 80% atau telah melampaui target. Capaian ini diperoleh dari pengumpulan data secara pasif. Meskipun anggaran yang berasal dari APBD hanya cukup untuk membiayai tenaga penunjang kegiatan, hasil capaian program ini menunjukkan efektivitas koordinasi dan sinergi dengan fasilitas layanan Kesehatan dan Perusahaan peserta proper dalam mendukung kepatuhan terhadap peraturan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah Pemegang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan target 25 unit usaha dan capaian realisasi yaitu 15 unit usaha atau belum mencapai target.

Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah evaluasi kinerja pembinaan dan pengawasan, penyesuaian rencana kegiatan untuk mencakup lebih banyak unit usaha, peningkatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan capaian target yang lebih baik di masa mendatang.

- Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

Output sub kegiatan adalah rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan dengan target 1 dokumen dan capaian realisasi yaitu 11 dokumen atau telah melampaui target yaitu 31 dokumen. Capaian ini menunjukkan hasil yang lebih dari yang diharapkan, meskipun anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membiayai tenaga penunjang kegiatan. Hal ini karena dipengaruhi oleh dukungan permohonan pemeriksaan dokumen yang sepenuhnya dibiayai oleh pemrakarsa



kegiatan/perusahaan swasta, yang berperan dalam kelancaran pelaksanaan dan pencapaian yang melampaui target.

4) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Outcome dari program adalah Cakupan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat dengan target 100% dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah masyarakat yang dilakukan pembinaan dengan target 250 orang dan capaian realisasi yaitu 250 orang atau telah mencapai target..

- Sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Provinsi.

Output sub kegiatan adalah pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan target 1 dokumen dan capaian realisasi telah sesuai target sebanyak 1 dokumen.

5) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Outcome dari program adalah Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diberikan dengan target 50% dan realisasi capaian telah melebihi target yakni 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah berupa Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup dengan target 12 penghargaan tidak tercapai, dengan realisasi sebanyak 0 penghargaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan penilaian, dimana anggaran yang tersedia hanya cukup untuk anggaran tenaga penunjang kegiatan.

Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah mengusulkan calon sekolah adiwiyata nasional kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK dan terdapat pencapaian yang membanggakan di tingkat nasional, dimana dua sekolah dari Gorontalo yang diusulkan berhasil meraih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024, yaitu SMP Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango dan SMP Negeri 2 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

- Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Output sub kegiatan adalah masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH dengan target 1 entitas dan capaian realisasi yaitu 0 entitas.

Pada tahun 2024, Provinsi Gorontalo tidak melaksanakan penilaian kinerja terhadap masyarakat/Lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia



pendidikan/filantropi karena anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membiayai tenaga penunjang kegiatan. Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah mengusulkan calon sekolah adiwiyata nasional kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KLHK dan terdapat pencapaian yang membanggakan di tingkat nasional, dimana dua sekolah dari Gorontalo yang diusulkan berhasil meraih Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024, yaitu SMP Negeri 1 Kabila Kabupaten Bone Bolango dan SMP Negeri 2 Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Di tahun 2024 ini juga, DLHK Provinsi Gorontalo melaksanakan pendampingan pemantauan/evaluasi Adipura di Provinsi Gorontalo yang dilakukan oleh tim penilai nasional, yakni tepatnya berlokasi di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango.

6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Outcome dari program adalah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100% dengan realisasi capaiannya yakni sebanyak 100% atau telah sesuai target.

a. Pelaksana Program

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dengan target 5 dokumen/laporan dan capaian realisasi melebihi target yaitu 13 dokumen/laporan.

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Output sub kegiatan adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 1 dokumen dan capaian realisasi yaitu 4 dokumen atau telah melampaui target. Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun di tahun 2023 yaitu Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025, Dokumen Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi TA. 2025, Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Belanja TA. 2025, dan Dokumen Kerangka Acuan Kerja TA. 2025.

- Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Output sub kegiatan adalah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 4 laporan dan capaian realisasi yaitu 9 laporan atau telah melampaui target. Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah tersusun di tahun 2024 yaitu : 1) Laporan Evaluasi Kinerja; 2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023; 3) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023; 4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Kehutanan Tahun 2023; 5) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023; 6) Laporan penilaian maturitas DLHK Provinsi Gorontalo; 7) Laporan Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian Dinas LHK Tahun 2023; 8) Laporan prognosa Dinas LHK Provinsi Gorontalo Tahun 2024; dan 9) Laporan Evaluasi

Pelaksanaan Kinerja dan Penyerapan Anggaran APBD DLHK Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi dengan target 100% dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 100%.

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Output sub kegiatan adalah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 225 orang/bulan dan capaian realisasi yaitu 225 orang/bulan atau telah sesuai target.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.

Output sub kegiatan adalah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target 1 laporan dan capaian realisasi yaitu 1 laporan atau telah sesuai target.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan dengan target 15 paket dan terealisasi yaitu sebanyak 16 paket atau telah melebihi target.

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output sub kegiatan adalah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan target 13 paket dan capaian realisasi yaitu 14 paket atau telah melampaui target. Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan di Tahun 2024 adalah : 1) pengharum mobil; 2) alat tulis kantor; 3) kertas dan cover; 4) benda pos; 5) bahan komputer; 6) perabot kantor 7) alat Listrik; 8) alat pembersih kantor; 9) pakaian karnaval karawo; 10) lemari arsip; 11) LCD Projector 12) AC split 13) kursi kerja pejabat; dan 14) kursi tamu.

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Output sub kegiatan adalah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 2 paket dan capaian realisasi yaitu 2 paket atau telah mencapai target. Paket cetakan dan penggandaan yang disediakan di tahun 2024 adalah 1) cetak spanduk dan dokumen; serta 2) cetak souvenir/cenderamata.

- Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Output sub kegiatan Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan target 1 laporan dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 1 laporan.

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Output sub kegiatan adalah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 7 laporan dan capaian realisasi yaitu 7 laporan atau telah mencapai target. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan kegiatan konsultasi yang dilaksanakan di tahun 2024 diantaranya adalah 1) Rapat



penyusunan SOP; 2) Rapat Pembinaan bagi Polisi Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan; 3) Rapat Pembinaan ASN dan TPK; 4) Rapat Sosialisasi Aplikasi Srikandi; Rapat Sosialisasi Jafung, Rapat Sosialisasi SIPD dan Rapat Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output kegiatan adalah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dengan target 2 laporan dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 2 laporan.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Output sub kegiatan adalah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 1 laporan dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 1 laporan.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Output sub kegiatan adalah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target 1 laporan dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 1 laporan.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Output kegiatan adalah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan target 31 unit dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 31 unit.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Output sub kegiatan adalah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dengan target 13 unit dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 13 unit.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Output sub kegiatan adalah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target 18 unit dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 18 unit.

3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 3.74
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,82	78,50 poin

Sumber website ppkl.menlhk tahun 2024



4. Hal – hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Indikator Kinerja.
- Indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini dicapai berkat penguatan regulasi yang mendorong kepatuhan dan partisipasi dari semua pihak terutama para pelaku usaha. Hal ini selaras dengan pencapaian indikator Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan/ Persetujuan Lingkungan, Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan realisasi 80% atau tercapai 105% dari target yang telah ditentukan.

- Berdasarkan data dari website <https://ppkl.menlhk.go.id> pada tahun 2023 nilai IKLH Provinsi berada pada 79.52 poin atau dengan kriteria BAIK dan menduduki peringkat ke-9 secara nasional, namun pada tahun 2024 nilai IKLH Provinsi menjadi 78.50 poin meski masih dengan kriteria BAIK namun menjadi peringkat ke-13 secara nasional.
5. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo tidak menerima penghargaan nasional ditahun 2024.
6. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo pada tahun 2024.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo tidak melaksanakan perjanjian Kerjasama/MOU ditahun 2024.

E.2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
- a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo.

- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- b. Sasaran dan Program

Tabel 3.75
 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan dan Penanganan Sampah	Indikator : Persentase pengelolaan sampah yang dikelola	2%	100%	100%
	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Jumlah sarana dan prasarana TPA Regional dalam kondisi baik	5 Unit	7 Unit	100%



2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.76
 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Lingkungan Hidup
 Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	3.279.654.967	3.139.211.877	95,72	100		
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	3.279.654.967	3.139.211.877	95,72	100		
	- Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	237.606.550	233.712.670	98,36	100	Sisa anggaran beberapa belanja rutin pendukung aktivitas subkegiatan	Perhitungan kebutuhan belanja dimaksud lebih dioptimalkan
	- Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.299.288.000	1.171.990.512	90,20	100	Sisa anggaran beberapa belanja rutin pendukung aktivitas subkegiatan	Perhitungan kebutuhan belanja dimaksud lebih dioptimalkan
	- Sub kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	1.742.760.417	1.733.508.695	99,47	100	Sisa anggaran beberapa belanja rutin pendukung aktivitas subkegiatan	Perhitungan kebutuhan belanja dimaksud lebih dioptimalkan
JUMLAH		3.279.654.967	3.139.211.877	95,72	100		

- 1) Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- Outcome dari program adalah Jumlah Sarana dan Prasarana TPA Regional dalam Kondisi Baik sebesar 7 Unit sel dari target 5 unit.
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- Output kegiatan adalah Sarana dan Prasarana TPA Regional dalam kondisi baik terdiri dari :
- Excavator = 2 unit
 - Dozer = 2 unit
 - Dump Truck = 3 unit
- Sub kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.
- Output sub kegiatan adalah Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan :
- Sosialisasi Daur Ulang Sampah sejumlah 75 orang masyarakat di desa marisa utara, kec. Marisa, kab. Pohuwato.
 - Sosialisasi Daur Ulang Sampah sejumlah 75 orang masyarakat di desa tabongo timur, kec. Tabongo, kab. gorontalo
 - Sosialisasi Daur Ulang Sampah sejumlah 75 orang masyarakat di desa tabongo timur, kec. Tabongo, kab. Gorontalo.



- Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun.
 - Sub kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA.
Output sub kegiatan adalah Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA dilaksanakan pada Sel III, Sel IV dan Sel V.
3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 3.77
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup
 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Provinsi Gorontalo Tahun 2024
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	100 Orang	150 Orang
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0	0
	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang	3 Unit	3 Unit

4. Hal-Hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Indikator.
- Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun o Dokumen realiasi 0 Dokumen karena Kinerja pada subkegiatan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia. Anggaran pada subkegiatan ini hanya dialokasikan untuk kebutuhan administrasi perkantoran.

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

F.1 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
- a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo.
- Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.



b. Sasaran dan Program

Tabel 3.78
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatkan tata kelola kependudukan, catatan sipil, dan pemerintahan desa	Indikator Sasaran : Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan (e-KTP)	100%	99,46%	99,46%
		Persentase terwujudnya pelayanan pencatatan sipil	100%	100%	100%
		Persentase sarana dan prasarana pengelola administrasi kependudukan	100%	100%	100%
	Program pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100%	99,46%	99,46%
	Program pencatatan sipil	Persentase terwujudnya pelayanan pencatatan sipil	100%	100%	100%
	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase sarana dan prasarana pengelola administrasi kependudukan	100%	100%	100%
2	Sasaran : Meningkatkan kualitas urusan penunjang pemerintahan DKPS-PMD Provinsi Gorontalo	Indikator : Nilai Sakip	B	BB	100%
		Indeks pembangunan data statistik	2,79	2,79	100%
		Indeks Budaya Kerja	28	28	100%
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	17,13	17,13	100%
		Indeks kepuasan masyarakat	100%	89,06%	89,06%
		Persentase peningkatan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur serta perencanaan Monev dan Pelaporan	100%	100%	100%
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase peningkatan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur serta perencanaan Monev dan elaporan	100%	100%	100%

- Wajib KTP di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 980.655 orang dari keseluruhan penduduk yang menjadi target pencapaian indikator kinerja, kemudian yang sudah melakukan rekam KTP adalah sebesar 900.567 orang. Maka persentase kepemilikan dokumen kependudukan akhir tahun 2024 telah mencapai 99,46 %, namun masih dibawah target 100% yang telah ditetapkan pada awal tahun. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan khususnya KTP-el.
- Untuk Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 89,06 % dengan Nilai IKM adalah 89,06. Berarti Realisasi tersebut masih berada dibawah target 100% yang sudah ditetapkan awal tahun. Tapi Berdasarkan Nilai Interval Konversi IKM, bahwa Indeks Kepuasan Masyarat dikategorikan **Sangat Memuaskan** jika mempunyai Nilai IKM 81,26 s/d 100 sehingga Kinerja Unit Pelayanan berpredikat **Sangat Baik**. Jadi walaupun Realisasi Nilai IKM 89,06 masih dibawah Target 100%, akan tetapi Nilai tersebut masih masuk dalam kategori **Sangat Memuaskan** dan Kinerja Unit Pelayanan memiliki predikat **Sangat Baik**.



2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.79
Realisasi Fisik dan Keuangan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERM ASALA HAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAH AN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	8.102.349.892	7.951.988.506	98,14	100		
1a	Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	395.543.400	395.177.674	99,91	100		
	- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	395.543.400	395.177.674	99,91	100		
1b	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	5.909.631.517	5.891.048.419	99,69	100		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	78.395.000	78.378.738	99,98	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.831.236.517	5.812.669.681	99,68	100		
1c	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.495.075	74.593.760	98,81	100		
	- Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.495.075	74.593.760	98,81	100		
1d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	683.519.700	618.340.877	90,46	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	683.519.700	618.340.877	90,46	100		
1e	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.038.160.200	972.827.776	93,71	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.038.160.200	972.827.776	93,71	100		
2	Program pendaftaran penduduk	113.892.500	113.780.200	99,90	100		
2a	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	113.892.500	113.780.200	99,90	100		
	- Sub kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	113.892.500	113.780.200	99,90	100		
3	Program pencatatan sipil	139.788.750	139.677.891	99,92	100		
3a	Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	139.788.750	139.677.891	99,92	100		
	- Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	139.788.750	139.677.891	99,92	100		
4	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	328.931.250	325.890.717	99,08	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
4a	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	175.856.700	173.201.420	98,49	100		
	- Sub kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	175.856.700	173.201.420	98,49	100		
4b	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	153.074.550	152.689.297	99,75	100		
	- Sub kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	153.074.550	152.689.297	99,75	100		
JUMLAH		8.684.962.392	8.531.337.314	98,23	100		

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Outcome dari program adalah Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan.
- a. Pelaksanaan Program
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 5 Dokumen . Target Kinerja adalah 1 Laporan. Adapun 5 Dokumen tersebut adalah LKIP, LKPJ, RENSTRA, RENJA dan LPPD.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

Output sub kegiatan adalah tersedianya Laporan Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebanyak 1 Laporan Keuangan Tahunan. Target Kinerja adalah 1 Laporan.
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Output sub kegiatan adalah Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN adalah 53 orang ASN . Target Kinerja adalah 49 orang, dimana realisasi pembayaran gaji ASN pada akhir periode tahun 2024 adalah 49 ASN.
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

Output sub kegiatan adalah 5 Orang yang mengikuti Kegiatan Bimtek. Target Kinerja adalah 5 Orang.



4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah 1 Paket, yaitu Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Pengadaan Perabot Kantor, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Pemeliharaan Komputer, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor, Belanja Modal 1 Paket Alat Peraga PAUD/TK, Belanja Modal Personal Computer 3 unit, Printer 4 Unit, Notebook/Laptop 2 unit, AC 6 unit. Target Kinerja sebanyak 1 Paket.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output sub kegiatan adalah 1 Laporan, Yang terdiri dari Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Jasa Tenaga Kebersihan, Jasa Tenaga Keamanan, Tagihan air dan Tagihan Listrik. Target Kinerja adalah 1 Laporan.

2) Program pendaftaran penduduk

Outcome dari program adalah Persentase kepemilikan dokumen kependudukan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

- Sub kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk adalah 1 Laporan. Target Kinerja adalah 1 laporan.

3) Program pencatatan sipil

Outcome dari program adalah Persentase terwujudnya pelayanan pencatatan sipil.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

- Sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil adalah 1 Laporan. Target Kinerja adalah 1 laporan.

4) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Outcome dari program adalah Persentase Sarana dan Prasarana Pengelola Administrasi Kependudukan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.

- Sub kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.



- Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan adalah 1 Laporan. Target Kinerja adalah 1 laporan.
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.
- Sub kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.
- Output sub kegiatan adalah Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan adalah 20 Orang. Target Kinerja adalah 20 Orang.
3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024.

Tabel 3.80

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Nilai Sakip	BB	BB
2	Indeks Pembangunan Data Statistik	2,79	2,79
3	Indeks Budaya Kerja	28	28
4	Nilai Pengelolaan Kearsipan	17,13	17,13
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	89,06
6	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100 %	100 %
7	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100 %	100 %
8	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan (e-KTP)	100 %	99,46 %
9	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100 %	99,46 %
10	Persentase terwujudnya pelayanan pencatatan sipil	100 %	100 %
11	Persentase Sarana dan Prasarana Pengelola Administrasi Kependudukan	100 %	100 %

4. Hal-Hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Indikator.
- a. Wajib KTP di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 980.655 orang dari keseluruhan penduduk yang menjadi target pencapaian indikator kinerja, kemudian yang sudah melakukan rekam KTP adalah sebesar 900.567 orang. Maka persentase kepemilikan dokumen kependudukan per tanggal 21 Desember 2024 telah mencapai 99,46 %.



- b. Dokumen Database Kependudukan diterbitkan secara berkala 2 kali dalam setahun, untuk skala Provinsi diterbitkan per semester yaitu semester pertama diterbitkan tiap tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember setiap tahun kalender Berdasarkan Release resmi dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berkaitan dengan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas PMD-Admindukcapil Provinsi Gorontalo dalam hal ini berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan proses Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta berkoordinasi dalam rangka memperoleh informasi secara berkala yang berkaitan dengan progres data kependudukan yang sementara dilaksanakan pencatatannya oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid dapat dipergunakan sebagai data/bahan/masukan untuk pembangunan database kependudukan kabupaten/kota, juga sebagai dasar dalam pemberian NIK kepada setiap penduduk, untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan pemilu dan untuk pelaksanaan pemilu Kepala Daerah serta dalam jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam rangka Pembangunan Database Penduduk Nasional.

- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dukcapil-PMD) Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Pelayanan Mobile Registrasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital dalam rangka untuk membantu kegiatan Registrasi IKD/KTP Digital yang juga dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten dan Kota se-Provinsi Gorontalo. KTP Digital ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama dalam mengantisipasi apabila KTP Elektronik tercecer. Bila hal itu terjadi, maka masyarakat dapat mengakses melalui Alat Komunikasi Android untuk dipergunakan dalam segala keperluan Identitas Diri. pengurusan KTP digital sangat mudah. Dimana, syarat utama mengurusnya, yakni memiliki smartphone serta sudah memiliki KTP Elektronik. Aplikasinya bahkan ini bisa di Download secara gratis di Playstore. IKD tidak menghilangkan fungsi KTP Elektronik, jadi keduanya saling melengkapi. KTP digital ini lebih mempermudah dan memiliki fungsi yang sama. Salah satunya mengantisipasi warga yang belum terjangkau IKD, misalnya para lansia dan lain sebagainya.

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

G.1 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo.
 - Meningkatkan daya saing dan kemandirian desa.



b. Sasaran dan Program

Tabel 3.81
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Dukcapil Pemdes Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis	Indikator Sasaran : Indeks desa membangun	18,11	18,11	100%
		Indeks pengembangan kawasan pedesaan	25%	25%	100%
	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase terwujudnya lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang lebih produktif dan mandiri	100%	100%	100%
	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya	0,58%	0,58%	100%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.82
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program administrasi pemerintahan desa	986.274.790	979.414.415	99,30	100		
1a	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	986.274.790	979.414.415	99,30	100		
	- Sub kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	294.907.390	294.585.357	99,89	100		
	- Sub kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	224.787.450	224.053.023	99,67	100		
	- Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	64.280.900	63.758.390	99,19	100		
	- Sub kegiatan Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	302.295.000	301.024.000	99,58	100		
	- Sub kegiatan Fasilitas Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	100.004.050	95.993.645	95,99	100		
2	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan	3.344.359.450	3.314.791.654	99,12	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	masyarakat hukum adat						
2a	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.344.359.450	3.314.791.654	99,12	100		
	- Sub kegiatan <i>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	101.821.200,-	101.818.373,-	100	100		
	- Sub kegiatan <i>peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>	278.351.550	273.748.601	98,35	100		
	- Sub kegiatan <i>Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>	101.823.400	101.810.600	99,99	100		
	- Sub kegiatan <i>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	2.862.363.300	2.837.414.080	99,13	100		
	JUMLAH	4.330.634.240	4.294.206.069	99,16	100		

- 1) Program administrasi pemerintahan desa
- Outcome dari program adalah Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya.
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Sub kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan sebanyak 1 Dokumen. Target Kinerja adalah 1 Dokumen.

- Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan.



Output sub kegiatan adalah jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba desa dan kelurahan sebanyak 1 Dokumen. Target Kinerja adalah 1 Dokumen.

- Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD.

Output sub kegiatan adalah Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD sebanyak 30 Orang. Target Kinerja adalah 30 Orang.

- Sub kegiatan Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis sebanyak 1 Dokumen. Target Kinerja adalah 1 Dokumen.

- Sub kegiatan Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen.

Target Kinerja adalah 1 Dokumen.

- 2) Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.

Outcome dari program adalah persentase Terwujudnya lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang lebih produktif dan mandiri.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum AdatJumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 1 Dokumen. Target Kinerja adalah 1 Dokumen.



- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 1 Lembaga dengan kegiatan Bimbingan Teknis LPM Dan Bimbingan Teknis Kader Posyandu. Target Kinerja adalah 1 Lembaga.
 - Sub kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebanyak 1 laporan yang kegiatannya antara lain Rapat Persiapan dan Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi alat Teknologi Tepat Guna (TTG) serta Pelaksanaan Gelar TTG Nasional di Provinsi NTB. Target Kinerja adalah 1 laporan.
 - Sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 1 Laporan. Target Kinerja adalah 1 Laporan.
3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024.

Tabel 3.83
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Gorontalo
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Kemiskinan Perdesaan	23,38	21,62
2	Peningkatan Status Desa	1 Desa Mandiri	93 Desa Mandiri
3	Indeks Desa Membangun	1 Desa Mandiri	93 Desa Mandiri
4	Indeks Pengembangan Kawasan Pedesaan	Mandiri	Mandiri
5	Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya	0,58 %	0,58 %
6	Persentase Terwujudnya lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang lebih produktif dan mandiri	100 %	100 %

4. Hal-Hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Indikator

- a) Dalam Indikator Kemiskinan Provinsi Gorontalo, untuk Kemiskinan Perdesaan pada awal tahun 2024 telah ditetapkan target Penurunan Kemiskinan Perdesaan adalah 23,38 %. Adapun pada akhir tahun 2024, Kemiskinan Perdesaan berhasil diturunkan menjadi 21,62 % berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jadi Realisasi tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan.
- b) Berdasarkan Indeks Pengembangan Kawasan Perdesaan dalam indikator Kinerja awal tahun 2024, target yang ditetapkan adalah Mandiri dan pada akhir tahun 2024 target Mandiri tersebut telah tercapai dengan persentase 100%. Adapun yang mendukung pencapaian target tersebut adalah terdapat 3 Bumdesma di Provinsi Gorontalo yang menyandang status Mandiri Berdasarkan Indeks Pengembangan Kawasan Perdesaan (IPKP) tahun 2024, yakni :
 - Bumdes Bersama Desa Bulalo dengan Kawasan Perdesaan Agro Ekopolitan.
 - Bumdes Bersama Saronde dengan Kawasan Perdesaan Wisata Ponelo Kepulauan.
 - Bumdes Bersama Wonosari Jaya dengan Kawasan Perdesaan Kecamatan Wonosari.
- c) Pada Indikator Kinerja Awal Tahun 2024, telah ditetapkan target 1 Desa yang akan ditingkatkan statusnya menjadi Desa Mandiri. Dan pada akhir Tahun 2024 terdapat 93 Desa yang meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Sehingga capaian Realisasi akhir tahun 2024 telah melebihi target dengan persentase 9.300%. sebelumnya desa dengan status mandiri pada akhir tahun 2023 sebanyak 93 Desa Mandiri, dan pada akhir tahun 2024 naik menjadi 186 Desa Mandiri. Keberhasilan membangun desa ini berkat sinergi, kolaborasi, dan kerja sama seluruh aparatur pemerintah dari tingkat Provinsi, Pemda Kabupaten, Kecamatan hingga desa, serta partisipasi yang luar biasa dari masyarakat terlebih lagi ditunjang dengan alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- d) Desa dengan status tertinggal yang ditahun 2023 ada sebanyak 3 desa dan pada tahun 2024 menjadi 2 desa. Jadi ada 1 desa dengan status tertinggal yang berhasil diantaskan, sehingga dari keseluruhan desa yang ada tersebar di Provinsi Gorontalo tersisa 2 Desa lagi yang berstatus desa tertinggal, serta untuk Desa yang berstatus Desa sangat tertinggal di Provinsi Gorontalo sudah tidak ada lagi.
- e) Desa dengan status desa berkembang yang semula 255 desa ditahun 2023, menjadi 178 desa pada tahun 2024. Sehingga terdapat sebanyak 77 desa yang mengalami peningkatan status dari Desa berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri.

Berikut ini adalah perkembangan status desa yang ada di Provinsi Gorontalo berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 :



Tabel 3.84

Perkembangan Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024

IDM TAHUN	IDKAB	KABUPATEN	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
2023	7501	GORONTALO	22	94	75	0	0
2023	7502	BOALEMO	3	36	40	3	0
2023	7503	BONE BOLANGO	40	88	32	0	0
2023	7504	POHUWATO	4	32	65	0	0
2023	7505	GORONTALO UTARA	24	56	43	0	0
TOTAL			93	306	255	3	0
IDM TAHUN	IDKAB	KABUPATEN	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
2024	7501	GORONTALO	59	94	38	0	0
2024	7502	BOALEMO	10	34	36	2	0
2024	7503	BONE BOLANGO	75	63	22	0	0
2024	7504	POHUWATO	7	39	55	0	0
2024	7505	GORONTALO UTARA	35	61	27	0	0
TOTAL			186	291	178	2	0

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

H.1 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

- Meningkatkan derajat kesehatan

b. Sasaran dan program

Tabel 3.89

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta	1. Aki per 100.000 Kelahiran Hidup	183	154.8	118
		2. AKB per 1000 Kelahiran Hidup	16	10.7	149.5
		3. Prevalensi wasting	5	3	167
	Program Pengendalian Penduduk	Dokumen Grand Desaian Kependudukan	1	1	100
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase KB Aktif	63.4%	67.6%	107



2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.90
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)		
1	Program Pengendalian Penduduk	59,610,000	59,506,000	100	100	-	-
1.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	59,610,000	59,506,000	100	100	-	-
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	91,360,000	89,552,218	98	100	-	-
2.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	91,360,000	89,552,218	98	100		
	Total Pagu	150,970,000	149,058,218	99	100	-	-

- 1) Program Pengendalian Penduduk.

Outcome dari program adalah jumlah dokumen Grand Desain yang disusun target 1 dokumen data GDPK terealisasi sesuai target yakni data pilar 1- pilar 5.

a. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.

Output kegiatan adalah Persentase data GDPK tersedia lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan tercapai 100%.

 - Sub kegiatan penyerasian kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Output sub kegiatan adalah jumlah dokumen hasil penyerasian kebijakan pembangunan daerah provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), terealisasi sesuai Target 6 dokumen.
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana.

Outcome dari program adalah meningkatnya Persentase KB aktif dari target 63,4% terealisasi 67,6% capaiannya melebihi target.

a. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal.

Output kegiatan adalah Jumlah laporan hasil pembinaan promosi dan konseling Kesehatan reproduksi target 1 laporan terealisasi sesuai target.



- Sub kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
Output sub kegiatan adalah jumlah Kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan KB sesuai standar terintegrasi dengan BKKBN diwilayahnya terealisasi sesuai target 6 Kab/kota.
- 4. Data berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2023-2026, Khusus Indikator Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.91

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Angka Harapan Hidup	68,4	69,09
2	Prevalensi Stunting	23	10.77 (Data Aplikasi EPPGBM 2024)

- 5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Indikator Tahun 2024
 - Angka Harapan Hidup di Provinsi Gorontalo meningkat dari tahun 2023 angkanya 68,83 menjadi 69,09 di tahun 2024 Angka harapan hidup yang tinggi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan salah satu faktor yang mempengaruhi angka Harapan hidup adalah Angka Kematian bayi, dan angka kematian Neonatal.
 - Prevalensi Stunting di Provinsi Gorontalo berdasarkan hasil perhitungan aplikasi e-PPGBM di tahun 2024 adalah 10,77 data ini masih dalam proses penginputan oleh puskesmas kab/kota. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh provinsi dalam hal penurunan prevalensi stunting adalah :
 - 1) Bele mo’osehati tersebar di Kab/Kota di fungsikan sebagai tempat untuk menginterfensi dan mengawasi balita gizi buruk setiap harinya baik itu pemberian makan bergizi, penimbangan dan edukasi oleh tenaga kesehatan.
 - 2) Pemberian makanan Tambahan (PMT) Lokal utk balita Gizi buruk, BB Kurang dan Ibu hamil KEK, 3) PMT formula untuk gizi buruk.

I. Urusan Perhubungan

I.1 Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

- 1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
 - Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
 - Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan.



b. Sasaran dan Program

Tabel 3.92
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perhubungan
Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program		Presentase (%)
			Tahun 2024		
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Perencanaan Penatausahaan Keuangan Dan Pengawasan	Nilai Sakip	A	A	A
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	80%	80%	100%
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Kantor Yang Tersedia Tepat Waktu	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Jumlah Sarpras Kantor Yang Tersedia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
		Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat/Bimtek	3 Orang	4 Orang	100%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		Jumlah Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Yang Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	100%
		Jumlah Laporan Keuangan Opd	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	Sasaran 1 : Meningkatnya Konektivitas Pelayanan Transportasi	Rasio Konektivitas Transportasi Darat	0,54	0,54	100%
		Rasio Konektivitas Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)	0,85	0,85	100%
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	On-Time Performance (OTP) Transportasi Aglomerasi Perkotaan (BRT)	100%	100%	100%
	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	14 Unit	14 Unit	100%
		Jumlah Gedung Terminal Yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	100%
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan Angkutan Kota Dalam Provinsi AKDP Per 1000 Keberangkatan	0	0	100%
		Jumlah Laporan Pengendalian Dan Pengawasan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	5 Kali	5 Kali	100%



2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.93
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perhubungan
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	8.386.702.765,00	8.322.237.388,90	99,23	100	- Terdapat kelebihan gaji dan tunjangan pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	- Perlu perhitungan kembali gaji dan tunjangan sesuai jumlah ASN pada Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo
1a	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	709.042.000,00	706.832.581,00	99,69	100		
	- Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	709.042.000,00	706.832.581,00	99,69	100		
1b	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	6.460.410.790,00	6.425.825.565,00	99,46	100		
	- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.383.725.790,00	6.349.152.090,00	99,46	100		
	- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semes teran SKPD	76.685.000,00	76.673.475,00	99,98	100		
1c	Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	176.289.000,00	173.854.452,00	98,62	100		
	- Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	176.289.000,00	173.854.452,00	98,62	100		
1d	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	567.566.000,00	552.433.984,90	97,33	100		
	- Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	567.566.000,00	552.433.984,90	97,33	100		
1e	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	473.394.975,00	463.290.806,00	97,87	100		
	- Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	473.394.975,00	463.290.806,00	97,87	100		
2	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	7.232.012.615,00	6.596.428.469,48	91,21	100		
2a	Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi	155.086.000,00	132.517.173,00	85,45	100		
	- Sub kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi	155.086.000,00	132.517.173,00	85,45	100		
2b	Kegiatan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	4.661.766.702,00	4.061.842.606,48	87,13	100		
	- Sub kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	4.661.766.702,00	4.061.842.606,48	87,13	100		
2c	Kegiatan Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi	848.074.913,00	845.955.480,00	99,75	100		
	- Sub kegiatan Penataan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	487.942.000,00	486.692.800,00	99,74	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	360.132.913,00	359.262.680,00	99,76	100		
2d	Kegiatan penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	1.552.085.000,00	1.541.131.210,00	99,29	100		
	- Sub kegiatan pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Provinsi	138.490.000,00	138.486.000,00	100	100		
	- Sub kegiatan penyediaan Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1.413.595.000,00	1.402.645.210,00	99,23	100		
2e	Kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	15.000.000,00	14.982.000,00	99,88	100		
	- Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.000.000,00	14.982.000,00	99,88	100		
3	Program Pengelolaan Pelayaran	138.168.400,00	137.818.200,00	99,75	100		
3a	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas	138.168.400,00	137.818.200,00	99,75	100		
	- Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha terkait berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas.	138.168.400,00	137.818.200,00	99,75	100		
JUMLAH		15.756.883.780	15.056.484.058	95,56	100		

1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah

Outcome dari program adalah Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan pelaporan dengan target 100%.



a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
 - Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi, 5 Dokumen.
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
 - Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Output sub kegiatan adalah Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia, 1 Tahun.
 - Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD.
Output sub kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan OPD, 12 Laporan.
3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
Output sub kegiatan adalah Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/bimtek, 4 Orang.
4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah
 - Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Output sub kegiatan adalah Jumlah sapas kantor yang tersedia, 1 Kegiatan.
5. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
Output sub kegiatan adalah Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu, 12 Laporan.

2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Outcome dari program adalah Persentase Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi dengan target 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi
 - Sub kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia, yaitu 6 Unit di Kabupaten Gorontalo.
2. Kegiatan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
 - Sub kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
3. Kegiatan Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi



- Sub kegiatan Penataan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi.
Output sub kegiatan adalah Jumlah laporan hasil pengamanan dan pengaturan kelancaran lalu lintas, 12 Laporan.
 - Sub kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan :
 - a. Rambu Lalu Lintas 12 Unit pada ruas Jalan Provinsi (Ruas Jalan Jhon Aryo Katili)
 - b. Daun Rambu Tambahan 3 Buah pada ruas Jalan Provinsi (Ruas Jalan Jhon Aryo Katili)
 - c. Rambu Tambahan 6 Buah pada ruas Jalan Provinsi (Ruas Jalan Jhon Aryo Katili)
 - d. Pita Penggaduh : - SDN 69 Kota Tengah 13.6 Meter $V=108.8M^2$
- SDN 88 Sipatana 13.6 Meter $V=108.8M^2$
4. Kegiatan penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi
- Sub kegiatan pengendalian dan pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Provinsi.
Output sub kegiatan adalah Jumlah penertiban izin angkutan secara terpadu bersama Polda Gorontalo dan Dishub Kab./Kota, 5 kali
 - Sub kegiatan penyediaan Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
Output sub kegiatan adalah:
 - Layanan Angkutan Perintis yang dilayani, 5 lintasan terdiri dari :
 - 1) Pangea – Wonosari - Wonggahu
 - 2) Terminal Duingi – Poduwoma
 - 3) Terminal Isimu – SMKN 1 Pulubala – SMAN 1 Pulubala Kab.Gorontalo
 - 4) Desa Sudomukti – SMAN 1 Boliyohuto Kab. Gorontalo
 - 5) Terminal Duingi – Tapa - Mongiilo
 - Layanan Angkutan Menunjang Obyek Wisata Unggulan terdiri dari :
 - 1) Pantai Botutonuo (Wisata Hiu Paus)
 - 2) Pemandian Objek Wisata Lombongo (Objek Wisata Danau Perintis)



- Layanan Angkutan Bus Siswa Gratis
Layanan antar jemput siswa SMU ini tersebar di lima daerah terpencil yang dilintasi setiap harinya yang terdiri dari :
 - 1) SMA Negeri 1 Biluhu Kab. Gorontalo
 - 2) SMA Negeri 1 Bone Kab. Bone Bolango
 - 3) SMAN 4 Gorontalo Utara Tolinggula Kab. Gorontalo Utara
 - 4) SMK Negeri 1 Taluditi Kab. Pohuwato
 - 5) SMK Negeri 1 Wanggarasi Kab. Pohuwato
 - Layanan Angkutan Perkotaan BRT
 - 1) Koridor 1 : Suwawa – Kabila – Kota Gorontalo
 - a) Koridor 1.1 : Suwawa – Kota Gorontalo (Via City Mall)
 - b) Koridor 1.2 : Suwawa – Kota Gorontalo (Via RS. Aloe Saboe)
 - Rute Tambahan : Botubarani – Leato – Tulumolo – Botupingge – Tamalate (SMAN 5 Kota Gorontalo – Jln Sultan Botutihe – Ipilo (SMAN 1 dan SMAN 8 Kota Gorontalo).
5. Kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
- Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam trayek kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan, 1 A plikasi
- 3) Program Pengelolaan Pelayaran
Outcome dari program adalah Persentase konektivitas pelayanan transportasi dengan target 100%.
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas.
 - Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha terkait berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut, atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri dan Depo Peti Kemas.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan sapras perhubungan, 12 laporan.



3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024.

Tabel 3.94
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perhubungan
Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024		Keterangan
		Target Renstra	Realisasi Renstra	
1	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	89	89	
2	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	5 Unit	5 Unit	
3	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	
4	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	
5	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang anrat Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	14 Unit	14 Unit	
6	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	
7	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	1 Unit	1 Unit	
8	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	
9	umlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait berupa Bongkat Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan laut, Tally mandiri dan depo peti kemas	12 Laporan	12 Laporan	
10	Jumlah jasa kantor yang tersedia tepat waktu	12 Laporan	12 Laporan	
11	Jumlah sapas kantor yang tersedia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	
12	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat/bimtek	3 Orang	4 Orang	
13	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	5 Dokumen	5 Dokumen	
14	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	
15	Jumlah laporan keuangan OPD	12 Laporan	12 Laporan	

4. Hal-hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Indikator.

Permasalahan :

- Terdapat 6 Terminal Tipe B yang berada di Kab/Kota yang merupakan kewenangan Provinsi namun sampai tahun 2024 baru 1 Terminal Tipe B yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo yaitu Terminal Tipe B Limboto Kab Gorontalo.
- Terdapat wilayah/daerah yang terisolir, sentra-sentra produksi dan objek wisata unggulan yang terlayani oleh angkutan umum dan belum masih kurangnya angkutan massal di perkotaan sehingga memerlukan adanya layanan angkutan yang lebih memadai.
- Terdapat beberapa sekolah SMA/SMK yang belum/tidak dilayanani angkutan umum.
- Masih minimnya layanan digitalisasi perizinan dan pengawasan angkutan umum.
- Terdapat beberapa ruas jalan yang belum terpasang fasilitas keselamatan LLAJ.
- Belum optimalnya layanan sistem ATCS pada simpang bersinyal.
- Terdapat beberapa badan usaha yang beraktifitas di Pelabuhan yang belum memiliki izin



- h. Dikawasan Timur Indonesia (Pulau Sulawesi) embarkasih haji hanya berada di Makassar sehingga mengalami penumpukan layanan haji yang berpusat di Makassar Sulawesi Selatan.

Solusi :

- a. Perlu adanya dukungan penyerahan Terminal Tipe B di Kab Kota ke Pemerintah Provinsi Gorontalo.
 - b. Dilakukan kegiatan Pelayanan Angkutan Perintis, Wisata dan BRT.
 - c. Dilakukan kegiatan layanan angkutan bus sekolah yang melayani SMA/SMK sesuai kewenangan Provinsi yang belum terlayani akses layanan angkutan umum.
 - d. Dilakukan kegiatan penertiban secara terpadu bersama Polda Gorontalo dan Dishub Kab/Kota sekaligus pengadaan sarana dan prasarana pengawasan angkutan jalan.
 - e. Dilakukan digitalisasi aplikasi layanan angkutan.
 - f. Pengadaan faskes LLAJ.
 - g. Pengembangan jumlah traffic light yang terpasang system jaringan ATCS.
 - h. Perlu adanya evaluasi dan monitoring badan usaha di pelabuhan sesuai kewenangan Gubernur di Pelabuhan yaitu (Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas).
 - i. Perlunya supporting Bandara Djalaluddin Gorontalo menjadi Bandara Embarkasi Haji di Kawasan Utara Pulau Sulawesi yang mengcover jemaah haji dari Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.
5. Tindakanjuz Rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.
Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo untuk Urusan Perhubungan, tidak mendapatkan Rekomendasi DPRD di tahun sebelumnya.
 6. Penghargaan Nasional Yang Diterima OPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo untuk Urusan Perhubungan, tidak menerima Penghargaan Nasional di tahun 2024.
 7. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo pada tahun 2024.
 - a. Perjanjian Kerja sama Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat Nomor : HK.201/6/22/PTDI-STTD-2024 dan Nomor : 280/PEMKESRA/KB/V/2024.
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
 - Penetapan usulan kebutuhan SDM bidang Perhubungan Darat.
 - Sosialisasi program, penerimaan dan seleksi SDM bidang Perhubungan Darat.
 - Penyelenggaraan Pendidikan tinggi SDM bidang Perhubungan Darat.
 - Pengusulan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SDM Bidang Perhubungan Darat.
 - Pemberdayaan SDM Bidang Perhubungan Darat.



- b. Kesepakatan bersama antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pengembangan Sumber Daya manusia Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan dan Pelatihan Vokasi di Provinsi Gorontalo Nomor : HK.201/3/12/Set.BPSDMP/2024 dan Nomor : 279/PEMKESRA/KB/V/2024.

Maksud dan Tujuan Kesepakatan ini meliputi :

- Meningkatkan fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Provinsi Gorontalo.
- Menjalin Kemitraan strategis dalam pelaksanaan Pembangunan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan dengan mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergi dan saling mendukung.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses Pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi Masyarakat Provinsi Gorontalo.

 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMENUHAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT Nomor : HK.201/5/22/PTDI-STTD-2024 Nomor : 280/PEMKESRA/KB/V/2024 Pada hari ini Rabu tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (8/5/2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini : I. PANDU YUNianto : Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD Bekasi, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 307 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PTDI-STTD Bekasi, yang beralamat di Jalan Raya Setu Nomor 89 Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU. II. ISMAIL PAKAYA : Penjabat Gubernur Gorontalo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39/P Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.	 KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN MELALUI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI DI PROVINSI GORONTALO NOMOR : HK.201/3/12/Set.BPSDMP/2024 NOMOR : 279/PEMKESRA/KB/V/2024 Pada hari ini Rabu, tanggal 08, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-5-2024), yang bertandatangan di bawah ini : 1. SUBAGIYO, selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berdasarkan Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas Nomor ST-MHB 6 Tahun 2024 tanggal 1 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. ISMAIL PAKAYA, Penjabat Gubernur Gorontalo, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39/P Tahun 2023 tanggal 11 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama di sebut PARA PIHAK dan masing-masing di sebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan;

J. **Urusan Komunikasi dan Informatika**

J.1 **Dinas Komunikasi, Informasi Dan Statistik Provinsi Gorontalo**

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo.
 - Meningkatkan kualitas penyediaan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi publik.
 - Peningkatan tata kelola pemerintahan bidang Kominfo dan Statistik



b. Sasaran dan Program

Tabel 3.95
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya jangkauan kualitas Teknologi dan layanan Informasi publik	Indikator Sasaran : Indeks SPBE	2.61 Informatif	4.13 Informatif	158%
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	68	73.22	108%
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Ketersediaan Informasi pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintah Daerah	100% Informasi Program Kegiatan Pemda	100% Informasi Program Kegiatan Pemda	100%
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi informatika	50 Sub Domain Pemda	50 Sub Domain Pemda	100%
2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP	B	BB	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	C	C	100%
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan Terintegrasi	100%	100%	100%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.96
Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.333.102.914	8.210.978.886	98.53	100	Masih terdapat belanja program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena kurangnya anggaran Tidak adanya pejabat struktural atau fungsional yang menangani perencanaan dan keuangan	Perlunya pembahasan lebih lanjut terkait program prioritas dan usulan penambahan anggaran untuk program dan kegiatan yang belum terakomodir. Melakukan pengusulan pada biro organisasi untuk penambahan jabatan struktural atau fungsional perencana
1a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	488.930.200	488.524.856	99.92	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	339.676.100	339.446.773	99.93	100		
	- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.254.100	149,78.083	99.88	100		
1b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.221.126.333	5.204.852.689	99.69	100		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	197.017.000	196.835.091	99.91	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.024.109.333	5.008.017.598	99.68	100		
1c	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.421.320	89.386.146	89.91	100		
	- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99,421,320	89.386.146	89.91	100		
1d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.184.991.740	1.145.239.593	96.65	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.184.991.740	1.145.239.593	96.65	100		
1e	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.338.633.321	1.282.975.602	95.84	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.338.633.321	1.282.975.602	95.84	100		
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.855.742.500	4.829.812.479	99.47	100	- Belum adanya dasar untuk menetapkan standar kerja sama media - Kurangnya peralatan live streaming sehingga masih menggunakan peralatan dari pihak lain	- Perlunya pembuatan juknis sebagai dasar kerja sama media - Perlunya pengadaan alat live streaming untuk mendukung kinerja dalam peliputan khususnya kegiatan pimpinan
2a	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	4.855.742.500	4.829.812.479	99.47	100		
	- Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	587.752.000	587.662.000	99.98	100		
	- Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	740.331.950	735.859.452	99.40	100		
	- Sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.661.074.000	1.660.059.830	99.94	100		
	- Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.866.584.550	1.846.231.197	98.91	100		
3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.781.373.200	2.768.264.214	99.53	100	- Tidak adanya anggaran untuk infrastruktur jaringan intra pemerintah (JIP) dan infrastruktur pusat data, khususnya update perangkat IT - Masih adanya aplikasi yang belum terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layana Pemerintah (SPLP) - Arsitektur SPBE belum disahkan	- Dibutuhkan pembahasan khusus untuk penganggaran infrastruktur jaringan dan pusat data - Dibutuhkan konsolidasi lebih lanjut terkait integrasi aplikasi



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
							Draft Arsitektur masih dibutuhkan Pembahasan lebih lanjut
3a	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	186.000.000	175.954.240	94.60	100		
	- Sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	186.000.000	175.954.240	94.60	100		
3b	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.595.373.200	2.592.309.974	99.88	100		
	- Sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	184.800.100	181.929.317	98.45	100		
	- Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2.410.573.100	2.410.380.657	99.99	100		
JUMLAH		15.970.218.614	15.809.055.579	98.99	100		

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi dengan target kinerja 100%.

a. Pelaksanaan Program

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi dengan target kinerja 7 Dokumen, terdiri dari Renstra, Renja, Rencana Kerja Tahunan, LPPD, LKIP, LKPJ, Evaluasi Renja. Capaian realisasi dari kegiatan ini sudah mencapai 100%.

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target Kinerja 3 Dokumen, terdiri dari Renstra, Renja, Rencana Kerja Tahunan.
- Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah dengan target 4 Dokumen, terdiri dari LPPD, LKIP, LKPJ, Evaluasi Renja.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.



Output kegiatan adalah Persentase Peningkatan Pelaporan Keuangan dalam bentuk SPJ dan LRA, serta pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN. Capaian realisasi dari kegiatan ini sudah mencapai 100%.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan target 1 Dokumen pertahun yaitu LKPD.

- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan dengan jumlah ASN 40 Orang.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM dengan target kinerja 10 Orang yang mengikuti pelatihan untuk pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pemda. Capaian realisasi dari kegiatan ini sudah mencapai 100%.

- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM dengan jumlah peserta 10 Orang.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah Persentase kesediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target kinerja 100% pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah berupa pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output sub kegiatan adalah persentase kesediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun hasil dari pengelolaan sarana dan prasarana pada tahun 2024 adalah pemeliharaan gedung kantor maupun peralatan mesin kantor, dan beberapa belanja modal seperti berikut ini :

Tabel 3.97
 Daftar Belanja Modal Tahun 2024

No	Uraian Belanja	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan Barang
1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Pengadaan CCTV	1	Paket
2	Belanja Modal Personal Computer	Pengadaan Laptop	3	Unit

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Output kegiatan adalah Persentase pemenuhan jasa peralatan perlengkapan kantor dengan target kinerja 100% adapun hasil kegiatan ini merupakan pemenuhan belanja- belanja rutin perangkat daerah dan yang lainnya seperti



Tenaga Ahli Media Centre 7 Orang, Listrik dan Sewa Tempat Videotron Bandara.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output sub kegiatan adalah Persentase pemenuhan jasa peralatan perlengkapan kantor dengan target kinerja 100%. Adapun hasil kegiatan ini merupakan pemenuhan belanja- belanja rutin perangkat daerah dan yang lainnya seperti Tenaga Ahli Media Centre 7 Orang, Listrik dan Sewa Tempat Videotron Bandara dan realisasi mencapai 100%.

2) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Outcome dari program adalah Meningkatnya Ketersediaan Informasi pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Output kegiatan adalah Persentase peningkatan kualitas pengelolaan dan komunikasi publik dengan target kinerja 100% kegiatan pemda yang dipublikasikan. Capaian tahun 2024 adalah 100% terdiri dari 903 Berita, 2702 Foto, 352 Berita Reels, 3 Media Cetak, 27 Media Online, 2 Media Elektronik, Hibah KPID.

- Sub kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan Target 12 Dokumen terkait Capaian tahun 2024 yang terdiri dari 903 Berita, 2702 Foto, 352 Berita Reels.

- Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan target 12 Dokumen penyebaran informasi melalui Radio Rakyat Hulondalo dan realisasi mencapai 100%.

- Sub kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan target 12 Dokumen pengelolaan Dana Hibah KID dan KPID dan realisasi mencapai 100%.

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

Output sub kegiatan adalah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan target 1 Dokumen Kerja Sama 3 Media Cetak, 27 Media Online, 2 Media Elektronik dan realisasi mencapai 100%.



- 3) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Outcome dari program adalah Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Aplikasi Informatika dengan target kinerja 50 Sub Domain Pemda.
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Daerah Provinsi Gorontalo.

Output kegiatan adalah Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan target kinerja 1 Dokumen sub domain yang ada dan terdaftar di Dinas Kominfo dan Statistik sebanyak 68 Sub Domain Aktif. Capaian pada kegiatan ini adalah 100%.

- Sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan target 1 Dokumen dan realisasi mencapai 100%.

 - 2. Kegiatan Pengelolaan e-govtment di Lingkup Pemetintah Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah Persentasi Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dengan target kinerja 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan ini untuk melakukan pemenuhan indikator penilaian SPBE dari Provinsi Gorontalo.

- Sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provins dengan target 1 Dokumen dan realisasi mencapai 100%.
 - Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan target 1 Dokumen dan realisasi mencapai 100%.
3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 3.98

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi



1	Maturitas SPBE	2.61	4.13

4. Penghargaan Nasional Yang Diterima OPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
- Terbaik I Foto Terbanyak (Anugrah Media Centre)
 - Terbaik II Foto Terbaik (Anugrah Media Centre)
 - Provinsi Terbaik Kontribusi Konten Audio Visual (Anugrah Media Centre)
 - Peringkat 7 Nasional Indeks SPBE Provinsi Gorontalo dengan Angka 4.13

K. **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

K.1 **Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo**

1. Tujuan dan Sasaran
- a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
- Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian.
- b. Sasaran dan Program

Tabel 3.99
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatkan kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah (Persentase), dan Meningkatkan Nilai Eksport (USD)	Indikator Sasaran : Jumlah Koperasi Berkualitas	20 Koperasi Sehat	20 Koperasi Sehat	100%
		Indikator : Jumlah UKM yang berdaya saing	70 UKM	43 UKM	61,43%
2	Sasaran : Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan.	Indikator : Nilai SAKIP	74,68	79,46	106,40
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Jumlah koperasi sehat	20 Koperasi Sehat	20 Koperasi Sehat	100%
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390 Orang	475 Orang	121%
	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah koperasi aktif	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	100%
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	140 Unit USaha	50 Unit Usaha	35,71%
	Program pengembangan UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	40 Unit Usaha	50 Unit Usaha	125%
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	100%	100%	100%



- ❖ Jumlah koperasi berkualitas di tahun 2024 sebanyak 20 koperasi dari target 20 koperasi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan koperasi yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan. (*terlampir*).
- ❖ Jumlah UKM yang Berdaya Saing capaian 43 UKM dari target 140 UKM. UKM ini telah mengikuti kurasi produk yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan bank Indonesia.
- ❖ Nilai SAKIP Dinas Kumperindag provinsi Gorontalo Tahun 2024 yaitu 79,46. Pencapaian indikator kinerja yang dikemukakan hanya bisa tercapai jika didukung oleh pendanaan yang memadai yang ditunjang dengan tingkat efisiensi penggunaan anggaran kegiatan dalam mencapai sasaran. Pendanaan dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tahun 2024.

2. Program dan Kegiatan

Pagu Awal Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang terdiri dari 6 (enam) program berjumlah sebesar Rp. 32.538.964.016,-. Dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun anggaran 2024, urusan koperasi usaha kecil menengah melakukan revisi-revisi pada beberapa item belanja di 4 (empat) program dengan total sebesar (Rp. 887.510.000,-) dan pada APBD-P sebesar (Rp. 451.115.000,-) Sehingga di akhir tahun 2024 pagu anggaran urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui sumber dana APBD berjumlah sebesar Rp. 31.200.339.016,- dengan total realisasi sebesar Rp. 31.055.710.021 dan silva Rp. 144.628.995,- Dalam pelaksanaan kegiatannya di tahun 2024 anggaran sebesar Rp. 2.710.000.000,- di tagging melalui sumber dana DID, dengan rincian :

- a. Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 2.710.000.000,- berupa Bantuan Bahan Produksi/Olahan (Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Tepung Terigu dan Susu Kental Manis) bagi UMKM (Kios/Warung Makan, Usaha Kue Kering/Basah dan Usaha Aneka Minuman) pada program Pengembangan UMKM.

Berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 900.1.14.5/BKPG/2320/VI/2024 perihal Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Rencana Penggunaan Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Gorontalo.

Adapun dari total Pagu Anggaran Tahun 2024 setelah perubahan untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp. 31.200.339.016,- rinciannya sebagai berikut :

- Belanja Pegawai	Rp.	9.691.630.216,-
- Belanja Modal	Rp.	-
- Belanja Barang & Jasa	Rp.	21.508.708.800,-
Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 31.055.710.021,-		



Realisasi Anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan untuk urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.100
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	Total Pagu Setelah Perubahan (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				ANGGARAN	FISIK	KEU		
				(Rp)	(%)	(%)		
1	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	77.755.475	77.755.475	77.523.325	100	99,71	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.755.475	77.755.475	77.523.325	100	99,71		
	Sub kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	77.755.475	77.755.475	77.523.325	100	99,71		
2	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	1.649.855.250	1.649.855.250	1.574.724.942	100	95,45	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.649.855.250	1.649.855.250	1.574.724.942	100	95,45		
	Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.649.855.250	1.649.855.250	1.574.724.942	100	95,45		
3	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	670.416.750	675.696.750	674.952.700	99,93	99,89	Fisik tidak mencapai 100% karena terdapat belanja fotocopy senilai Rp. 504.000,- yang tidak direalisasikan	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah	670.416.750	675.696.750	674.952.700	99,93	99,89		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	Total Pagu Setelah Perubahan (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				ANGGARAN	FISIK	KEU		
				(Rp)	(%)	(%)		
	Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
	Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	670.416.750	675.696.750	674.952.700	99,93	99,89		
4	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	1.267.183.250	1.293.583.250	1.275.335.035	100	98,59	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	1.267.183.250	1.293.583.250	1.275.335.035	100	98,59		
	Sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	132.000.000	158.400.000	157.908.000	100	99,69		
	Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	1.135.183.250	1.135.183.250	1.117.427.035	100	98,44		
5	Program pengembangan UMKM	16.258.400.000	15.115.145.000	15.114.181.261	100	99,99	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
	Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	16.258.400.000	15.115.145.000	15.114.181.261	100	99,99		
	Sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	16.258.400.000	15.115.145.000	15.114.181.261	100	99,99		
6	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	12.615.353.291	12.388.303.291	12.338.992.758	100	99,60	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	Total Pagu Setelah Perubahan (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				ANGGARAN	FISIK	KEU		
				(Rp)	(%)	(%)		
							yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214.472.275	489.736.075	488.758.974	100	99,80		
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.913.275	271.551.075	270.838.678	100	99,74		
	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.559.000	218.185.000	217.920.296	100	99,88		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.110.979.666	9.753.272.966	9.721.559.062	100	99,67		
	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.077.130.216	9.691.630.216	9.659.965.973	100	99,67		
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	33.849.450	61.642.750	61.593.089	100	99,92		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	553.632.000	469.510.000	468.234.790	100	99,73		
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	553.632.000	469.510.000	468.234.790	100	99,73		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.736.269.350	1.675.784.250	1.660.439.932	100	99,08		
	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.736.269.350	1.675.784.250	1.660.439.932	100	99,08		
		32.538.964.016	31.200.339.016	31.055.710.021	100	94,89		

**Pencapaian realisasi keuangan dibawah target 100% karena masih terdapat sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.*

Berdasarkan tabel diatas, maka total anggaran Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah setelah perubahan adalah sebesar Rp. **31.200.339.016,-** dari total anggaran pembangunan Dinas Kumperindag Tahun 2024 sebesar **Rp. 41.063.393.248,-** atau sebesar 75,98%. Dengan realisasi sebesar Rp. **31.055.710.021,-** atau sebesar 76,08 % dari total realisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebesar Rp. **40.817.064.768,-**

Adapun uraian program dan kegiatan pada tahun 2024 urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain :

1) Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan **Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel.** Jumlah anggaran pada program ini tidak mengalami perubahan dari pagu awal sebesar Rp. 77.755.475,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.523.325,- adapun total silva sebesar Rp. 232.150,- (sisa pada item belanja ATK, kertas & cover, bahan cetak, bahan komputer, makan minum rapat dan perjalanan dinas biasa).



Outcome dari program adalah jumlah koperasi sehat sebanyak 20 koperasi dengan capaian 20 koperasi yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan.

Jumlah anggaran pada program ini tidak mengalami perubahan dari pagu awal sebesar Rp. 77.755.475,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.523.325,- adapun total silva sebesar Rp. 232.150,- (sisa pada item belanja ATK, kertas & cover, bahan cetak, bahan komputer, makan minum rapat dan perjalanan dinas biasa).

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- Sub kegiatan peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, Tangguh serta akuntabel.

Output kegiatan adalah :

a) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi pada 25 koperasi dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Koperasi 20 Koperasi. Tujuan pelaksanaan kegiatan :

- Meningkatkan Efektifitas pelaksanaan Pengawasan Koperasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
- Meningkatkan fungsi Pengawasan Koperasi yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi;
- Meningkatkan Kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi dengan peraturan yang berlaku.

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Primer Provinsi Gorontalo dan pengawasan/monev koperasi penerima bantuan/penghargaan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo di Kabupaten/Kota.

b) Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi di Provinsi Gorontalo untuk menyatukan persepsi pemahaman tentang Peraturan Perkoperasian dan Pengawasan Koperasi bagi Pembina Koperasi sebanyak 40 orang, dengan menghadirkan Narasumber Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Utama dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.

c) Dalam pencapaian kinerja program yaitu jumlah koperasi sehat terdapat 4 (empat) aspek pemeriksaan kesehatan koperasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi No. 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi yaitu aspek tata kelola, aspek kinerja keuangan, aspek profil risiko dan aspek permodalan. Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat diberikan sertifikat kesehatan. Terhadap koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus



ditindaklanjuti dengan sanksi administratif. Sertifikat kesehatan atau sanksi administratif ditetapkan oleh deputi/perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota berdasarkan LHPKK.
 Adapun capaian Koperasi sehat tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.101
 Daftar Pemeriksaan Kesehatan Koperasi Primer Provinsi Gorontalo
 Tahun 2024

NO	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
1	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KESEHATAN DAERAH KKPKD	372/BH/V, Tgl. 26 November 1982 PAD. No.AHU-0002766.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 23 Desember 2022	Konsumen	Sehat
2	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WIYOWA	07/BH/518/DTKTK/IV/04, Tgl. 13 April 2004 PAD. No.AHU-0000740.AH.01.39.TAHUN 2024 Tgl. 28 Februari 2024	Konsumen	Sehat
3.	KOPERASI SERBA USAHA KARYA PRASETYA	36/BH/XXII/VII/2015 Tgl. 15 Juli 2015	Konsumen	Sehat
4.	KSP KARYA CIPTA DANA PROVINSI GORONTALO	33/BH/XXII/XII/2014 Tgl. 22 Desember 2014	Simpan Pinjam	Sehat
5.	KSP AL HIKMAT PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	31/BH/XXII/III/2014, Tgl. 21 Maret 2014	Simpan Pinjam	Sehat
6.	KPRI WIRA USAHA BARU	21/BH/XXII/III/2011, Tgl. 18 Maret 2011	Konsumen	Sehat
7.	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KARTIKA OTANAHA	1449/BH/V, Tgl. 8 Juni 1971 PAD No.AHU-000142.AH.01.27 TAHUN Tgl. 19 Oktober 2021	Konsumen	Sehat
8.	KSP DHANA PANEN RAYA	AHU-0015444.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl. 9 Pebruari 2022	Simpan Pinjam	Sehat
9.	KOPERASI KONSUMEN AUDITA MITRA SEJAHTERA	AHU-0005599.AH.01.29 TAHUN 2022 Tgl. 22 Oktober 2022	Konsumen	Sehat
10.	KOP. KONS. KARYAWAN TIRTA BONE PDAM KOTA GORONTALO	250/BH/V, Tgl. 23 Januari 2012 PAD No.AHU-0002276.AH.01.27.TAHUN 2021 Tgl. 11 Mei 2021	Konsumen	Sehat
11.	KOPERASI KONSUMEN PERMATA SEJAHTERA HULONTALAGI	AHU-0016261.AH.01.26 TAHUN 2022 Tgl.13 Maret 2022	Konsumen	Sehat
12.	KOPERASI PRODUSEN HUYULA MOMONGU LIPU	AHU-0004076.AH.01.29.TAHUN 2022 Tgl. 04 Agustus 2022	Produsen	Cukup Sehat
13.	KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA TERATAI LIMUTU	1685/BH/V, Tgl. 30 Oktober 1971 PAD No.AHU-0002091.AH.01.38.TAHUN 2023 Tgl. 05 September 2023	Konsumen	Cukup Sehat
14.	KOPERASI KONSUMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	AHU-0014715.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl. 12 Januari 2022	Konsumen	Cukup Sehat
15.	KOPERASI KONSUMEN BKPD MAJU BERSAMA	AHU-0001579.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 11 April 2023	Konsumen	Cukup Shat
16.	KOPERASI KONSUMEN BATARA BTN GORONTALO	450/BH/V/07, Tgl. 20 April 2007 PAD No.AHU-0002804.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 29 Desember 2022	Konsumen	Cukup Sehat
17	KOPERASI KONSUMEN MUSLIMAH AMANAH BERSATU	AHU-0002794.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 14 Juli 2023	Konsumen	Cukup Sehat



NO	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
18.	KOPERASI KONSUMEN SEHAT SEJAHTERA BERSAMA AINUN	AHU-00100002.AH.01.36.TAHUN 2021 Tgl. 27 April 2021	Konsumen	Cukup Sehat
19.	KOPERASI KONSUMEN AMPERA MANDIRI SEJAHTERA	AHU-0000422.AH.01.26.TAHUN 2019 Tgl. 19 November 2019	Konsumen	Cukup Sehat
20.	KOPERASI JASA NEZFA PANUA BERKAH	AHU-0001073.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 08 Mei 20223	Jasa	Cukup Sehat

Tabel 3.102
 Daftar Pengawasan dan Pemeriksaan/Monev Koperasi
 di Provinsi Gorontalo Tahun 2024

NO	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
1	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KESEHATAN DAERAH KKPKD	372/BH/V, Tgl. 26 November 1982 PAD. No.AHU-0002766.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 23 Desember 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
2	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WIYOWA	07/BH/518/DTKTK/IV/04, Tgl. 13 April 2004 PAD. No.AHU-0000740.AH.01.39.TAHUN 2024 Tgl. 28 Februari 2024	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
3.	KOPERASI SERBA USAHA KARYA PRASETYA	36/BH/XXII/VII/2015 Tgl. 15 Juli 2015	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
4.	KSP KARYA CIPTA DANA PROVINSI GORONTALO	33/BH/XXII/XII/2014 Tgl. 22 Desember 2014	S.Pinjam	Pengawasan dan Pemkes
5.	KSP AL HIKMAT PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	31/BH/XXII/III/2014, Tgl. 21 Maret 2014	S.Pinjam	Pengawasan dan Pemkes
6.	KPRI WIRA USAHA BARU	21/BH/XXII/III/2011, Tgl. 18 Maret 2011	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
7.	KOPERASI KONSUMEN PRIMER KARTIKA OTANAHA	1449/BH/V, Tgl. 8 Juni 1971 PAD No.AHU-000142.AH.01.27 TAHUN Tgl. 19 Oktober 2021	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
8.	KSP DHANA PANEN RAYA	AHU-0015444.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl. 9 Pebruari 2022	S. Pinjam	Pengawasan dan Pemkes
9.	KOPERASI KONSUMEN AUDITA MITRA SEJAHTERA	AHU-0005599.AH.01.29 TAHUN 2022 Tgl. 22 Oktober 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
10.	KOP. KONS. KARYAWAN TIRTA BONE PDAM KOTA GORONTALO	250/BH/V, Tgl. 23 Januari 2012 PAD No.AHU-0002276.AH.01.27.TAHUN 2021 Tgl. 11 Mei 2021	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
11.	KOPERASI KONSUMEN PERMATA SEJAHTERA HULONTHALAGI	AHU-0016261.AH.01.26 TAHUN 2022 Tgl.13 Maret 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
12.	KOPERASI PRODUSEN HUYULA MOMONGU LIPU	AHU-0004076.AH.01.29.TAHUN 2022 Tgl. 04 Agustus 2022	Produsen	Pengawasan dan Pemkes
13.	KOPERASI KONSUMEN SERBA USAHA TERATAI LIMUTU	1685/BH/V, Tgl. 30 Oktober 1971 PAD No.AHU-0002091.AH.01.38.TAHUN 2023 Tgl. 05 September 2023	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes



NO	NAMA KOPERASI	NO & TGL BADAN HUKUM DAN PAD KOPERASI	JENIS KOPERASI	KET.
14.	KOPERASI KONSUMEN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	AHU-0014715.AH.01.26.TAHUN 2022 Tgl. 12 Januari 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
15.	KOPERASI KONSUMEN BKPD MAJU BERSAMA	AHU-0001579.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 11 April 2023	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
16.	KOPERASI KONSUMEN BATARA BTN GORONTALO	450/BH/V/07, Tgl. 20 April 2007 PAD No. AHU-0002804.AH.01.38.TAHUN 2022 Tgl. 29 Desember 2022	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
17	KOPERASI KONSUMEN MUSLIMAH AMANAH BERSATU	AHU-0002794.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 14 Juli 2023	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
18.	KOPERASI KONSUMEN SEHAT SEJAHTERA BERSAMA AINUN	AHU-00100002.AH.01.36.TAHUN 2021 Tgl. 27 April 2021	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
19.	KOPERASI KONSUMEN AMPERA MANDIRI SEJAHTERA	AHU-0000422.AH.01.26.TAHUN 2019 Tgl. 19 November 2019	Konsumen	Pengawasan dan Pemkes
20.	KOPERASI JASA NEZFA PANUA BERKAH	AHU-0001073.AH.01.29.TAHUN 2023 Tgl. 08 Mei 20223	Jasa	Pengawasan dan Pemkes
21.	KOPERASI PEMASARAN TINDAHO BONE BOLANGO	AHU-0011889.AH.01.26.Tahun 2021 Tgl. 3 November 2022	Pemasaran	Pengawasan
22.	KOPERASI KONSUMEN SARIPI ALIYA MANDIRI	AHU-0002144.AH.01.29 TAHUN 2023 Tgl. 05 Juni 2023	Konsumen	Pengawasan
23.	KOPERASI KONSUMEN TANI NUSANTARA MANDIRI	AHU-0012526.AH.01.26.TAHUN 2021 Tgl. 2 Oktober 2021	Konsumen	Pengawasan
24	KOPERASI SIMPAN PINJAM PELITA (Primer Kab.Boalemo)	1691/BH/V Tgl. 30 Desember 1971	S. Pinjam	Pengawasan/ Monev bantuan
25.	KOPERASI SERBA USAHA TIRTA MALEO (Primer Kab. Pohuwato)	38/BH/VIII/2007 Tgl. 08 Agustus 2007.	Konsumen	Pengawasan/ Monev bantuan

2) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

Outcome dari program adalah Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya (target 390 orang) capaian 475 orang, yang memahami pengetahuan perkoperasian. Dukungan anggaran tahun 2024 untuk pelaksanaan program kegiatan ini berjumlah Rp. 1.649.855.250,- dengan realisasi mencapai Rp. 1.574.724.942,- atau 95,45% realisasi keuangan dan 100% realisasi fisik.

Pada program ini terdapat 2 (dua) sumber dana yaitu APBD sebesar Rp. 105.264.750,- dan DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi sebesar Rp. 1.544.590.500,- dengan realisasi DAK Non Fisik pada program ini sebesar Rp. 1.469.566.222,- (95,14% keuangan) sisa anggaran Rp. 75.130.308,- (belanja



perjalanan dinas biasa, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN.serta sisa belanja lainnya yang tidak dapat digunakan lagi).

Total Jumlah Pagu DAK Non Fisik PK2UKM 2024 sebesar Rp. 2.675.525.000,- yang terbagi atas DAK Non Fisik peningkatan kapasitas SDM Koperasi sebesar Rp. 1.544.590.500,- dan DAK Non Fisik peningkatan kapasitas SDM UMKM sebesar Rp. 1.130.934.500,-

a. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

Output kegiatan adalah :

a) Penyediaan penunjang kegiatan berupa belanja alat/bahan untuk Kegiatan kantor-kertas & cover, bahan komputer dan perjalanan dinas koordinasi evaluasi & pelaksanaan pelatihan SDM Koperasi.

b) Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta pelaku usaha bagi UKM di Provinsi Gorontalo (DAK Non Fisik PK2UKM).

Jumlah Pagu DAK Non peningkatan kapasitas SDM Koperasi sebesar Rp. 1.544.590.500,- dengan realisasi Rp. 1.469.566.222,- (95,14%), silva Rp. 75.014.278,-

Pencairan dana sebagaimana dimaksud dibayarkan sesuai tahapan yaitu Pencairan Tahap I berjumlah Rp. 735.044.000.- dan Tahap II berjumlah Rp. 809.546.500.- Peningkatan kapasitas SDM Koperasi.

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK tahun 2024, dilaksanakan 19 angkatan dengan jumlah peserta 475 orang yang berasal dari koperasi binaan Kab/Kota dan Provinsi. Untuk koperasi binaan Provinsi berjumlah 112 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari Pengurus Pengawas dan anggota Koperasi dalam mengelola koperasi agar lebih kuat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sehingga koperasi dapat mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Tahap I :

Pelaksanaan Tanggal 14 s.d 16 Mei 2024

1. Pelatihan Akuntansi Koperasi tingkat Prov. Gorontalo : 25 peserta
2. Pelatihan Nilai dasar & Jati Diri Koperasi tingkat Prov. Gorontalo : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 17 s.d 19 Mei 2024

3. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT : 25 peserta
4. Pelatihan Pengawasan Koperasi : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 05 s.d 07 Juni 2024

5. Pelatihan Akuntansi Koperasi Tkt Kab. Boalemo : 25 peserta



6. Pelatihan Nilai dasar Jati Diri II di Kab. Boalemo : 25 peserta
Pelaksanaan Tanggal 20 s.d 22 Juni 2024
7. Pelatihan Nilai dasar & Jati Diri Koperasi III di Kab. Gorut :
25 peserta
8. Pelatihan Nilai dasar & Jati Diri Koperasi IV di Kab. Pohuwato : 25
peserta
Pelaksanaan Tanggal 26 s.d 28 Juni 2024
9. Pelatihan Akuntansi Koperasi III Di Kab. Pohuwato

Tahap II

- Pelaksanaan Tanggal 18 s.d 20 September 2024
1. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT Tkt Kab. Pohuwato : 25
peserta
 2. Pelatihan Penerapan Akuntansi Digital Koperasi Tkt. Kab. Pohuwato :
25 peserta
Pelaksanaan Tanggal 25 s.d 07 September 2024
 3. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT Tkt. Kab. Boalemo : 25
peserta
 4. Pelatihan Penerapan Akuntansi Digital Koperasi Tkt. Kab. Boalemo :
25 peserta
Pelaksanaan Tanggal 16 s.d 18 Oktober 2024
 5. Pelatihan Mekanisme Penyelenggaraan RAT Tkt. Prov Gorontalo: 25
peserta
 6. Pelatihan Akuntansi Koperasi Tkt. Kab. Gorontalo Utara : 25 peserta
Pelaksanaan Tanggal 05 s.d 07 November 2024
 7. Pelatihan Akuntansi Koperasi Tkt. Prov Gorontalo : 25 peserta
 8. Pelatihan Pengawasan Koperasi Tkt. Prov. Gorontalo : 25 peserta
Pelaksanaan Tanggal 08 s.d 10 November 2024
 9. Pelatihan Koperasi Berbasis Bisnis Tkt. Prov Gorontalo : 25 peserta
 10. Pelatihan Kompetensi Bagi pengurus Tkt. Prov. Gorontalo : 25
peserta

3) Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.

Outcome dari program adalah Jumlah koperasi Jumlah Koperasi Aktif (target 20 Unit usaha, capaian 20 unit usaha).

Pagu awal sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha berjumlah Rp. 670.416.750,- pada tahapan APBD-P terdapat



tambahan anggaran sebesar Rp. 5.280.000,- (belanja bahan cetak, makan minum aktivitas lapangan, tambahan honor PTT dan perjalanan dinas biasa). Sehingga pagu setelah perubahan berjumlah Rp. 675.696.750,-. Adapun realisasi hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp. 674.952.700,- Silva kegiatan berjumlah Rp. 744.050,- (belanja bahan cetak Rp.504.000, sisa perjalanan dinas biasa, belanja makan minum aktivitas lapangan, belanja kertas serta belanja lainnya yang tidak dapat digunakan lagi).

- a. Pelaksanaan program
1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

 - Sub kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.
 Output sub kegiatan adalah :

a) Pelaksanaan Kegiatan Revitalisasi (Bedah) Koperasi dilaksanakan di Kabupaten /Kota Se-Provinsi Gorontalo sebanyak 9 Koperasi.

Tabel 3.103 Revitalisasi (Bedah) Koperasi			
NO	NAMA KOPERASI	LOKASI	JENIS KOPERASI
1	KOPERASI KONSUMEN SEHAT SEJAHTERA BERSAMA AINUN	Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo	Konsumen
2	KSU BUHUTA WAWU WAALAMA	Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo	Konsumen
3.	KOPERASI SIMPAN PINJAM FAJAR PESISIR	Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo	S.Pinjam
4.	KOPERASI KONSUMEN AMPERA MANDIRI SEJAHTERA	Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo	Konsumen
5.	KOPERASI SINAR MANDIRI SENSEI	Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato	Jasa
6.	KOPERASI HULAWA TINELO LIPU	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten Gorontalo Utara	Produsen
7.	KOPERASI KONSUMEN PASOLO CERIA BERSAMA	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten Gorontalo Utara	Konsumen
8.	KOPERASI PRODUSEN HULAWA BINA MANDIRI	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten Gorontalo Utara	Produsen
9.	KOPERASI KONSUMEN PASOLO INDAH JAYA	Kecamatan Sumalata Timu Kabupaten Gorontalo Utara	Konsumen

- b) Bantuan Dana Hibah Koperasi berupa uang kepada 3 (tiga) koperasi yaitu :
- Koperasi Pinus Jaya Sejahtera Desa Mootilango Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo badan Hukum Nomor : 007425/BH/M.KUKM.2/II/2018 tanggal



20 Februari 2018. NPHD nomor 202/DKUPP/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.

- Koperasi Produsen Bandayo Ar-Rahman Moosalamati, Kel. Huto'o Kec. Limboto badan Hukum 381/BH/DKPP/XII/2011 tanggal 05 Desember 2011. NPHD nomor 201/DKUPP/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.
- Koperasi Konsumen Saitama Mandiri Jaya, Desa Pasalae, Kec. Gentuma Raya, Kab. Gorontalo Utara. No Badan Hukum (BH) : AHU 0016221.AH.01.26. Tahun 2022. NPHD nomor 203/DKUPP/I/2024 tanggal 30 Januari 2024.

c) Honorarium tenaga Non ASN 1 orang x 12 bulan

4) Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM).

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

Outcome dari program adalah jumlah UKM yang berdaya saing (target 140 unit usaha dengan capaian kinerja 43 UKM). Adapun capaian realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 94,61% dari target 100%. Target kinerja program tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dalam mengintervensi kegiatan antara lain peningkatan kapasitas dan pendampingan kepada pelaku UKM khususnya untuk melakukan pembinaan (digitalisasi pemasaran) administrasi keuangan, dan bedah produk dalam upaya peningkatan daya saing UMKM.

Pagu anggaran 2024 setelah perubahan pada program ini berjumlah Rp. 1.293.583.250,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024 berjumlah Rp. 1.275.335.035,- dan silva sebesar Rp. 18.248.215,-. Pagu anggaran ini dari anggaran induk Rp. 1.267.183.250,- dan tambahan pada APBD-P sebesar Rp. 26.400.000,- untuk belanja jasa tenaga pelayanan umum yaitu kekurangan honorarium PTT 2 bulan.

a. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

- Sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan.

Pagu anggaran setelah perubahan Rp. 158.400.000,- dari pagu induk sub kegiatan ini sejumlah Rp. 132.000.000,- dimana pada APBD-P terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 26.400.000,- untuk belanja jasa tenaga pelayanan umum yaitu kekurangan honorarium PTT 2 bulan.



Output sub kegiatan adalah Honorarium jasa tenaga pelayanan umum (tenaga konsultan pendamping PLUT) 5 orang selama 12 bulan dalam rangka pendampingan kepada para pelaku UMKM.

- Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan. Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi serta pelaku usaha bagi UKM di Provinsi Gorontalo (DAK Non Fisik KUKM).

Peningkatan Kapasitas SDM UKM

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM UKM tahun 2024 dilaksanakan 2 angkatan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM UMKM dengan jumlah peserta 375 orang yang berasal dari Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo dan Kabupaten Pohuwato dan Sosialisasi penyuluhan hukum bagi UMKM dalam rangka peningkatan SDM bagi pelaku usaha serta pemahaman terhadap hukum bagi 150 UKM/IKM/Pelaku se Provinsi Gorontalo.

Jumlah pagu Anggaran untuk DAK Non Fisik Peningkatan Kapasitas SDM UKM Rp. 1.130.934.500,- penyerapan anggaran sampai dengan bulan Desember 2024 berjumlah Rp. 1.113.260.700,- dengan persentase keuangan 98,43 % dan persentase fisik 100 %, dengan silva berjumlah Rp. 17.673.800,- (belanja bahan lainnya, makan minum aktivitas lapangan, honorarium narasumber, iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN, biaya perjalanan dinas biasa).

Tahap I

Pelaksanaan Tanggal 14 s.d 16 Mei 2024

1. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis bagi UMKM Aneka Kripik : 25 peserta di Kabupaten Boalemo.
2. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis bagi UMKM Aneka Kue kering : 25 peserta di Kabupaten Boalemo.
3. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis bagi UMKM Aneka Kue kering : 25 Peserta di Kabupaten Pohuwato.

Pelaksanaan Tanggal 13 Mei 2024

4. Sosialisasi Penyuluhan Hukum bagi UMKM di Kab. Pohuwato : 50 peserta
5. Sosialisasi Penyuluhan Hukum bagi UMKM di Kab. Boalemo : 50 peserta

Pelaksanaan Tanggal 29 s.d 31 Mei 2024

6. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis Bagi UMKM Aneka Kue : 25 peserta di Kabupaten Bone Bolango

Pelaksanaan Tanggal 01 s.d 03 Juni 2024

7. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis Bagi UMKM Aneka Kripik : 25 peserta di Kabupaten Bone Bolango

Pelaksanaan Tanggal 30 s.d 01 Juni 2024



8. Diklat Penguatan Manajemen Bisnis Bagi UMKM Aneka Kue : 25 peserta di Kabupaten Gorontalo Utara
Pelaksanaan Tanggal 29 Mei 2024
9. Sosialisasi Penyuluhan Hukum bagi UMKM di Kab. Gorontalo Utara : 50 peserta

Tahap II

Pelaksanaan Tanggal 26 s.d 28 September 2024

1. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 peserta di Kabupaten Boalemo
2. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 peserta di Kabupaten Pohuwato

Pelaksanaan Tanggal 11 s.d 13 Oktober 2024

3. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 Peserta di Kabupaten Bone Bolango.

Pelaksanaan Tanggal 12 s.d 14 Oktober 2024

4. Diklat teknik pembuatan pola kreatif bagi UMKM : 25 peserta di Kabupaten Gorontalo Utara

Pelaksanaan Tanggal 08 s.d 10 November 2024

5. Diklat Desain Baju & Menjahit bagi UMKM : 25 peserta

Pelaksanaan Tanggal 11 Oktober 2024

6. Sosialisasi Penyuluhan Hukum Bagi UMKM : 50 peserta di Kabupaten Bone Bolango

Pelaksanaan Tanggal 10 Oktober 2024

7. Sosialisasi Penyuluhan Hukum Bagi UMKM : 50 peserta

5) Program pengembangan UMKM.

Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah, sub kegiatan Produksi & pengolahan, pemasaran Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi.

Pagu awal program ini berjumlah Rp. 16.258.400.000,- kemudian terdapat revisi pada beberapa belanja yang bersesuaian antara lain pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar (Rp. 1.083.200.000,-) dan tambahan pada perjalanan dinas biasa Rp. 185.000.000,- sehingga total revisi 2024 pada program ini (Rp. 898.200.000,-).

Pada tahapan APBD-P hingga finalisasi APBD-P terdapat pengurangan anggaran pada belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 911.000.000,- dan tambahan Rp. 450.000.000,- (APBD-P) serta pada beberapa belanja lainnya yang bersesuaian dengan total pada APBD-P (Rp. 245.055.000,-). Sehingga total pagu program ini setelah perubahan Rp. 15.115.145.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.114.181.261,- (99,45% keuangan) dan silva Rp. 963.739,-



Dalam pelaksanaan kegiatannya di tahun 2024 anggaran sebesar Rp. 2.710.000.000,- di tagging melalui sumber dana Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Gorontalo, berupa Bantuan Bahan Produksi, Berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 900.1.14.5/BKPG/2320/VI/2024 perihal Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Rencana Penggunaan Insentif Fiskal (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun Anggaran 2024 Provinsi Gorontalo.

Outcome dari program adalah jumlah UKM yang bertransformasi usaha (target kinerja 40 unit usaha, capaian 52 unit usaha).

- a. Pelaksanaan program
1. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.

- Sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

Output kegiatan adalah :

a) Terlaksananya Bantuan Bahan Produksi/Olahan Bagi UMKM, bantuan ini diperuntukan bagi UKM Olahan pangan, Kios, warung makan, aneka minuman Se Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada juknis yang berlaku. Pagu induk untuk belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat (bantuan bahan produksi olahan bagi UMKM) ini sebesar Rp. 15.832.800.000,- dengan realisasi di tahap I Rp. 12.035.852.268,- (2.264 penerima). sisa anggaran Rp. 3.796.947.732,- kemudian terdapat revisi penyesuaian (tambah/kurang/program/kegiatan/sub kegiatan) sebesar Rp. 1.083.200.000,- berdasarkan surat persetujuan pergeseran anggaran tanggal 06 Mei 2024 nomor 160/DPRD825/V/2024 sehingga sisa untuk tahap selanjutnya Rp. 2.713.747.732,- pada tahapan APBD-P terdapat tambahan anggaran Rp. 470.000.000- dan pada finalisasi APBD-P (Rp. 931.000.000).Sehingga sisa pagu untuk belanja ini setelah APBD-P Rp. 2.252.747.732,- dan diserahkan di tahap II. Adapun rekapan penerima bantuan Tahap I dan II Tahun 2024 :

Tabel 3.104

Penerimaan Bantuan Tahap I Tahun 2024

Rekapan Penerima Bantuan Tahap I Tahun 2024		
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima
1	Kota Gorontalo	4679
2	Kabupaten Gorontalo	3761
3	Kabupaten Boalemo	703
4	Kabupaten Pohuwato	468
5	Kabupaten Bone Bolango	533
6	Kabupaten Gorontalo Utara	1895



Total	12039

Tabel 3.105

Penerimaan Bantuan Tahap II Tahun 2024

Rekapan Penerima Bantuan Tahap II Tahun 2024		
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima
1	Kota Gorontalo	939
2	Kabupaten Gorontalo	719
3	Kabupaten Bone Bolango	470
4	Kabupaten Gorontalo Utara	136
Total		2264

- b) Benchmarking bagi pelaku UMKM yang diikuti oleh 20 pelaku usaha dari Kabupaten Boalemo ke Alverna Bakery, Lin’s Bakery di Jakarta.
- c) Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka verifikasi, validasi dan penyaluran bantuan UMKM di Provinsi Gorontalo.
- d) Honorarium pelaksana kegiatan (3 orang).
- 6) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan.

a. Pelaksanaan program

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (4 dokumen).

Di tahun 2024 telah dihasilkan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 7 Dokumen perencanaan yaitu Dokumen renja, renstra, RAK, RKA, KAK, RAB, SIRUP.

 - Rapat Koordinasi dan Evaluasi Triwulan II dan triwulan III Bidang Koperasi UMKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Boalemo
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah pendampingan pelaksanaan program kegiatan (standar kompetensi, pelayanan prima, pengelolaan ketersediaan barang).

- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (6 laporan).

Di tahun 2024 telah dihasilkan 8 Dokumen Monitoring dan Evaluasi yaitu Dokumen Rencana Aksi, LKPJ, LPPD, laporan evaluasi renja per triwulan, E-Monev, Lakip, Laporan Tahunan (LAPKIN APBN), laporan tahunan APBD masing-masing bidang.

 - Pelaksanaan rapat evaluasi program kegiatan



- Perjalanan Dinas Dalam Daerah money stimulan bantuan bagi UMKM tahun 2023, Money bantuan hibah koperasi tahun 2024, Money kinerja BPSK di Provinsi Gorontalo, money UKM yang berdaya saing, Pendampingan Pelaksanaan Program/Kegiatan (pemberdayaan koperasi, pelaksanaan pasar murah).
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (79 orang/bulan).
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 laporan capaian 100% dari target).
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output sub kegiatan adalah Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (target 31 paket, capaian 18 paket atau 58% karena keterbatasan anggaran). Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor perawatan berupa penyediaan bahan bakar dan pelumas, suku cadang kendaraan, sewa bangunan Gedung Dekranasa di bandara Jalaluddin, jasa konsultasi perencanaan arsitektur gedung kantor Dinas Kumperindag, pemeliharaan kendaraan dinas bermotor, pemeliharaan alat kantor dan pemeliharaan computer).
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 laporan).

3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 3.107

Kebijakan Strategis Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Hibah Kepada Koperasi	Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2023 tentang perubahan atas Pergub Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2021 Tentang Tatacara Penganggaran Pelaksanaan & Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah & Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	- Untuk penguatan modal dan pengembangan serta pemberdayaan koperasi - Meningkatkan pendapatan & kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat
		Keputusan Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Nomor 800/DKUPP/27/I/2023 tanggal 09 Januari 2024 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Bantuan Hibah bagi koperasi di provinsi Gorontalo	Pedoman pelaksanaan hibah bagi koperasi di Provinsi Gorontalo
		Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 52/16/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan penerima hibah berupa uang kepada koperasi melalui program pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo TA. 2024	Penetapan penerima hibah berupa uang kepada koperasi melalui program pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaanya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi
2	Stimulan Pengembangan Produk Bagi UMKM	Petunjuk Teknis Bantuan Bahan Produksi/Olahan bagi UMKM Tahun 2024	Pedoman pelaksanaan kegiatan stimulan pengembangan produk bagi UMKM
		Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 57/16/I/2024 tentang penetapan penerima bantuan bahan produksi dan olahan bagi UMKM melalui kegiatan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo TA. 2024	Penetapan penerima bantuan bahan produksi dan olahan bagi UMKM
		Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 447/16/XI/2024 tanggal 07 November 2024 tentang penetapan penerima bantuan bahan produksi dan olahan bagi UMKM melalui kegiatan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo TA. 2024	Penetapan penerima bantuan bahan produksi dan olahan bagi UMKM

4. Data berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 dan Renstra Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 3.108
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026



NO	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Jumlah Koperasi Sehat	20 Koperasi	20 Kop	100
2	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390 orang	475 orang	121,79
3	Jumlah Koperasi Aktif	20 unit usaha	20 unit usaha	100
4	Jumlah UKM yang berdaya saing	140 unit usaha	43 unit usaha	30,72
5	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	40 unit usaha	52 unit usaha	130

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Kinerja Tahun 2024.
- Data Capaian indikator kinerja program/kegiatan urusan koperasi tahun 2024 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.109
Capaian Indikator Kinerja Per Kegiatan Urusan Koperasi Tahun 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024	Persentase (%)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi	20	100
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	20	Dokumen	20	100
- <i>Peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan Perundang-undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta Akuntabel</i>	<i>Jumlah koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan tersedianya koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel</i>	20	Dokumen	20	100
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	475	121,79
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	390	Orang	475	121,79
- <i>Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi</i>	<i>Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian</i>	390	Orang	475	121,79
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif	20	Unit Usaha	20	100



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024	Persentase (%)
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20	Unit Usaha	20	100
- Peningkatan produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	20	Unit Usaha	20	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing	140	Unit Usaha	43	30,72
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	250	Unit Usaha	525	165,1
- Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	Jumlah unit usaha UMKM yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan	250	Unit Usaha	525	165,1
- Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UMKM dan kewirausahaan	318	Orang	525	165,1
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	40	Unit Usaha	52	130
Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah	40	Unit Usaha	50	125
- Produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	40	Unit Usaha	14.303	35.757,5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan,	100	%	100	100



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024	Persentase (%)
	penatausahaan keuangan dan pengawasan				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	10	Dokumen	15	150
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4	Dokumen	7	175
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6	Dokumen	8	133
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangan	87	Orang	79	90,8
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87	Orang	79	90,8
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	87	Orang	-	-
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	87	Orang	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan	31	Paket	18	58,07
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	31	Paket	18	58,07
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Laporan	1	100
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1	Laporan	1	100

- 1) Pada urusan Koperasi UKM terdapat 1 sub kegiatan yang tidak terpenuhi target kinerja karena tidak teranggarkan yaitu kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 2) Perkembangan Koperasi selang Tahun 2023 - 2024 sebagai berikut :



Tabel 3.110
Perkembangan Koperasi selang Tahun 2023-2024

No	Kabupaten / Kota	2023				2024			
		Aktif (Unit)	Tidak Aktif (unit)	Total Kop	R A T (unit)	Aktif (Unit)	Tidak Aktif (unit)	Total Kop	R A T (unit)
1	KOTA GORONTALO	196	146	342	90	203	146	349	63
2	KAB. GORONTALO	356	78	434	60	360	79	439	51
3	KAB. BOALEMO	92	61	153	12	93	61	154	4
4	KAB. POHUWATO	98	37	135	9	102	37	139	8
5	KAB. BONE BOLANGO	107	58	165	31	108	58	166	24
6	KAB. GORONTALO UTARA	95	40	135	13	56	80	136	14
7	PROV. GORONTALO	98	14	112	30	110	13	123	24
	JUMLAH	1402	434	1476	245	1023	474	1506	188

Perkembangan koperasi sejak tahun 2023-2024 mengalami pasang surut terlebih untuk koperasi yang melaksanakan RAT. Hal ini disebabkan karena :

- a. Ketersediaan modal koperasi sangat terbatas
- b. Sulitnya koperasi mengakses modal untuk pengembangan usaha
- c. Keterbatasan SDM pengelola koperasi
- d. Pasca covid-19 berdampak pada seluruh pelaku-pelaku usaha termasuk koperasi.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi ini yaitu :

- a. Pemerintah telah melaksanakan restrukturisasi usaha dan akses permodalan.
- b. Pemerintah telah membuka peluang usaha terhadap koperasi untuk membangun kemitraan lagi kepada seluruh stakeholder.
- c. Pemerintah mengupayakan peningkatan SDM melalui pelatihan perkoperasian.
- d. Pemerintah telah memprogramkan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UKM melalui program pembinaan, penyuluhan, FGD dan bedah koperasi serta hibah koperasi untuk pengembangan KUKM kedepan pasca pandemi covid-19.

Tahun 2024 kemudahan-kemudahan tersebut mulai diberikan kepada pelaku usaha agar koperasi dapat menuju koperasi modern dan UKM Naik kelas..

- 3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, memerlukan SDM Pengawas yang paham dan mengerti aspek pengawasan, namun saat ini masih terbatasnya anggaran dan pengetahuan SDM/ASN pengawas dan pemeriksa koperasi baik Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo terutama dalam pengisian kertas kerja pemeriksaan koperasi, sehingga pelaksanaan pengawasan belum maksimal.
- 4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan koperasi terdapat permasalahan yang hampir sama pada koperasi, antara lain :



- Belum dilakukannya tata kelola administrasi yang baik oleh pengurus, pengawas maupun pengelola terkait dengan daftar anggota, struktur pengurus, struktur pengawas termasuk tugas dan tanggungjawabnya serta menyangkut perizinan usaha dan masalah data keuangan.
 - Belum melaksanakan kewajibannya mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kegiatan koperasi dalam Rapat Anggota Koperasi.
- 5) Ditahun 2022 telah tersedia aplikasi sistem informasi data UMKM Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo "SiapAku". Yang berisi tentang data UMKM se-Provinsi Gorontalo yang up-date. Akan tetapi di Tahun 2023 dan 2024 tidak teranggarkan untuk biaya up dating data yang akan melibatkan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
6. Tindaklanjuti Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya.
- Pansus merekomendasikan perlunya stimulan dan keberpihakan serta anggaran untuk sektor UMKM perlu diseriusi, pemulihan ekonomi pasca covid bukan pada seminar, workshop dan agenda sejenis lainnya tapi pada political will daerah untuk memberdayakan sektor UMKM yang benar-benar kongkrit dan real untuk tumbuh kembangnya perekonomian daerah.
- Tanggapan :* Di tahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo telah memprogramkan stimulan bantuan bagi UMKM berupa bahan produksi yang telah direalisasikan di tahun 2024 kepada 14.303 UMKM (@Rp. 1.000.000,-) dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 14.288.600.000,- melalui program pengembangan UKM.
7. Penghargaan Nasional Yang Diterima Oleh Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
- Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tidak menerima penghargaan nasional di tahun 2024.
8. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2024.
- Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, untuk Urusan Koperasi tidak melaksanakan Perjanjian Kerjasama/MOU di tahun 2024.

L. Urusan Penanaman Modal

L.1 Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Gorontalo
 - Peningkatan pertumbuhan investasi
 - Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP.



b. Sasaran dan Program

Tabel 3.111
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya nilai realisasi investasi	Indikator Sasaran : Nilai Realisasi Investasi	2,8 Triliun	5,383 Triliun	192,14%
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase jumlah dokumen pengembangan iklim penanaman modal	40%	30%	75%
	Program promosi penanaman modal	Persentase jumlah dokumen LOI (Letter Of Intent)	25%	100%	400%
	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase kegiatan usaha yang mendapat pengawasan penanaman modal	24%	25,17%	104,88%
2	Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP	Indikator Sasaran : Predikat SAKIP Dinas PMPTSP	A	A	100%
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%
3	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik (Pelayanan Perizinan)	Indikator Sasaran : Predikat kinerja unit pelayanan publik (pelayanan perizinan)	A	A	100%
	Program pelayanan penanaman modal	Persentase jumlah izin dan non izin yang diterbitkan bagi pelaku usaha	24%	56,24%	234%
	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	97,00%	97,27%	100,28%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.112
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Penanaman Modal
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	391.922.000	369.154.482	94,19	100		
1a	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	391.922.000	369.154.482	94,19	100		
	- Sub kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	391.922.000	369.154.482	94,19	100		
2	Program Promosi	199.999.775	198.115.544	99,06	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Penanaman Modal						
2a	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	199.999.775	198.115.544	99,06	100		
	- Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	199.999.775	198.115.544	99,06	100		
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	388.497.600	388.384.972	99,97	100		
3a	Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	388.497.600	388.384.972	99,97	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	388.497.600	388.384.972	99,97	100		
	- Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	127.186.200	127.151.492	99,97	100		
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.561.629.650	1.518.074.534	97,21	100		
4a	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.561.629.650	1.518.074.534	97,21	100		
	- Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	557.780.650	553.715.624	99,27	100		
	- Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	214.938.000	213.629.208	99,39	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya						
	- Sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	788.911.000	750.729.702	95,16	100		
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	196.679.600	196.419.820	99,87	100		
5a	Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	196.679.600	196.419.820	99,87	100		
	- Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	196.679.600	196.419.820	99,87	100		
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.333.470.724	7.191.470.724	98,03	100		
6a	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	464.154.800	453.529.328	97,71	100		
	- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	174.106.000	164.444.570	94,45	100		
	- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	290.048.800	290.048.800	99,67	100		
6b	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.748.123.109	5.511.686.241	98,32	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.692.859.109	5.458.845.300	98,31	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.264.000	54.840.941	99,23	100		
6c	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.736.000	42.545.886	95,10	100		
	- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.736.000	42.545.886	95,10	100		
6d	Kegiatan Aministrasi Umum Perangkat Daerah	359.316.115	353.086.062	98,27	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	359.316.115	353.086.062	98,27	100		
6e	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	717.140.700	688.805.980	96,05	100		
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	717.140.700	688.805.980	96,05	100		
JUMLAH		9.930.199.349	9.719.802.849	97,88	100		

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Outcome dari program adalah Nilai Realisasi Investasi sebesar Rp 3.563 Triliun dari target Renstra Rp. 2,8 Triliun.
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi.
- Output kegiatan adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen buku Peta Potensi Investasi Provinsi Gorontalo 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi daerah-daerah potensi investasi di Provinsi Gorontalo terhadap komoditas unggulan daerah khususnya bidang pariwisata berdasarkan data hasil survey di kabupaten/kota dengan basis kecamatan.
- Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.
- Output sub kegiatan adalah 1 Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi Gorontalo tahun 2024. Dua lokus hasil penyusunan peta potensi pada tahun ini adalah Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo, dimana lokasi ini juga akan dimasukkan dalam aplikasi kementerian investai yaitu PIR yang merupakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Regional. Sisitim informasi ini merupakan sistim informasi geospasial

berbasis web yang menyediakan informasi mengenai potensi dan peluang investasi. Potensi Investasi Regional (PIR) bertujuan untuk membantu investor dalam mengambil keputusan dan menentukan daerah yang cocok untuk berinvestasi.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Outcome dari program adalah Nilai Realisasi Investasi sebesar Rp 3.563 Triliun dari target Renstra Rp. 2,8 Triliun.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah Kegiatan promosi yang dilaksanakan. Kegiatan promosi yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah berupa bisnis machining yang dilaksanakan 1 kali. Capaian dari kegiatan ini adalah 100%.

- Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.

Output sub kegiatan adalah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi. Pada tahun 2024 berupa kesepakatan kerjasama antara pelaku usaha besar dan UMKM, yaitu :

- 1) PT. Primerindo Kencana
- 2) PT. Matahari Putra Prima
- 3) Aston Gorontalo Hotel & Vilas
- 4) PT. Estu Prima Investa

3) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Outcome dari program adalah Nilai Realisasi Investasi sebesar Rp 3.563 Triliun dari target Renstra Rp. 2,8 Triliun.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan penanaman modal. Jumlah kegiatan usaha yang dibina dan diawasi tahun 2024 adalah sejumlah 755 kegiatan usaha dari target 160 kegiatan usaha.

- Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.

Output sub kegiatan adalah Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan sejumlah 75 kegiatan usaha dari target 75 Kegiatan Usaha dan 72 Pelaku Usaha.

- Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.



Output sub kegiatan adalah Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya 16 Pelaku Usaha dari terget 8 pelaku usaha.

- Sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah sejumlah 755 Pelaku Usaha dari terget 160 Pelaku usaha.

4) Program Pelayanan Penanaman Modal.

Outcome dari program adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan target predikat kinerja unit pelayanan publik berupa pelayanan prima. Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo merupakan pelayanan publik dengan kategori pelayanan prima.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah 1.406 Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan.

- Sub kegiatan Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Output sub kegiatan adalah jumlah izin dan non izin yang diterbitkan sejumlah 1.406 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.113

Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan

No.	SEKTOR	JUMLAH
1	Pertanian	30
2	Kelautan dan perikanan	642
3	Perindustrian	377
4	Perdagangan	3
5	Koperasi	1
6	Transportasi / perhubungan	41
7	Kesehatan, obat dan makanan	7
8	Pendidikan dan kebudayaan	1
9	Pariwisata	90
10	Ketenagakerjaan	0
11	Lingkungan hidup	137
12	Kehutanan	0
12	Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)	77
13	PUPR	0
TOTAL		1.406

- Sub kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.



Output sub kegiatan adalah Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang terfasilitasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan sejumlah 220 kegiatan usaha.

5) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Outcome dari program adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan target predikat kinerja unit pelayanan publik beruba palayanan prima. Berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo merupakan pelayanan publik dengan kategori pelayanan prima.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan yaitu data dan informasi yang diolah diuraikan dalam 4 Dokumen yaitu Dokumen survey kepuasan masyarakat; Dokumen indeks persepsi anti korupsi; Dokumen Indkes Persepsi Kualitas Pelayanan; Dokumen tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat.

- Sub kegiatan Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Output sub kegiatan adalah Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan. Berikut ini adalah uraian evaluasi kinerja pelayanan perizinan :

Tabel 3.114

Evaluasi Kinerja Pelayanan Perizinan Provinsi Gorontalo

NO	Dokumen	Nilai Tahun 2024			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Survey Kepuasan Masyarakat	97,94	95,04	97,16	98,97
2	Indeks Persepsi Anti Korupsi	90,16	97,18	97,26	97,083
3	Indkes Persepsi Kualitas Pelayanan	92,12	96,03	96,39	97,2

6) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Outcome dari program adalah Persentase pelaksanaan perencanaan evaluasi monitoring dan pelaporan, Persentase tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan umum dan kepegawaian 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

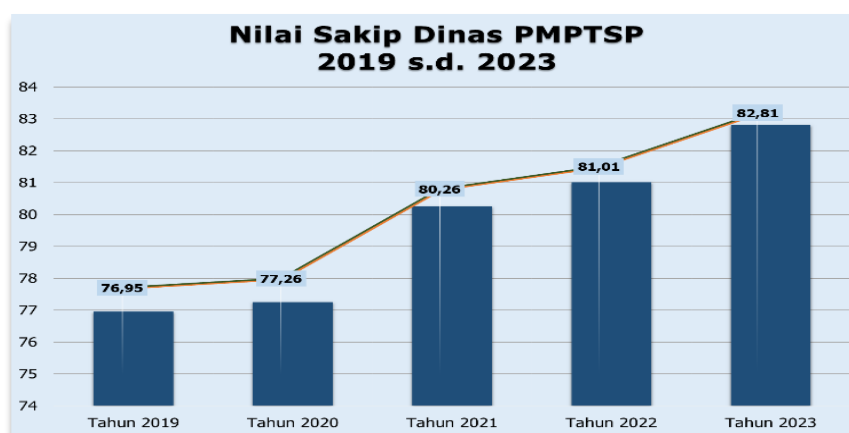
Output sub kegiatan adalah :

1. 3 Dokumen Perencanaan
 2. 1 Kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Output sub kegiatan adalah 5 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)
2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
3. Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ)
4. Laporan Evaluasi Kinerja triwulan
5. Laporan Hasil Evaluasi Renja

Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat A dengan nilai 82,81 capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana tahun sebelumnya adalah 81,01 merupakan nilai tertinggi kedua dari seluruh SKPD di Provinsi Gorontalo tahun 2024.

Grafik 3.9
Grafik Nilai SAKIP DPMPTP



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Output kegiatan adalah 1 dokumen laporan keuangan yang sesuai dengan SAP dan 100% tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi keuangan.
- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- Output kegiatan adalah Persentase pegawai yang mengikuti diklat sesuai rencana 100%.
- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Output kegiatan adalah 10 sarana prasarana yang tersedia dan 100% tingkat kepuasan pegawai terhadap sarana dan prasarana.
- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.



5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Output kegiatan adalah 6 jasa kantor yang tersedia tepat waktu.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 3.115

Kebijakan Strategis Urusan Penanaman Modal Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Penyusunan Peraturan Gubernur Gorontalo terkait dengan pelaksanaan perda perizinan berusaha	- Peraturan Gubernur Gorontalo terkait dengan pelaksanaan perda perizinan berusaha telah dilakukan harmonisasi dengan KUMHAM.	- Percepatan realisasi investasi - Memudahkan dan Mempercepat Pelayanan Perizinan berusaha bagi pelaku usaha - Pelaksanaan Pemberian fasilitas insentif dan disinsentif pelaku usaha - Fasilitasi Penerbitan NIB Pelaku usaha sektor UMKM
2	Penyelenggaraan Pelayanan perizinan secara gratis		- Memudahkan dan Mempercepat Pelayanan Perizinan berusaha bagi pelaku usaha - Percepatan realisasi investasi
3	Penyelenggaraan Pelayanan perizinan dengan <i>mobile service</i>		- Memudahkan dan Mempercepat Pelayanan Perizinan berusaha bagi pelaku usaha - Percepatan realisasi investasi
4	Pembangunan Aplikasi Gorontalo Online Single Submission oke (GOSSO)	- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	- Memfasilitasi izin dan non izin yang belum diakomodir dalam aplikasi OSS RBA - Memudahkan dan Mempercepat Pelayanan Perizinan berusaha bagi pelaku usaha - Percepatan realisasi investasi
5	Update Aplikasi Sistim INformasi Investasi Gorontalo New Generation (SIIG_NG)		- Mempromosikan potensi invastasi Provinsi Gorontalo

4. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024.

Tabel 3.116

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	CapaianTahun 2024	
		Target	Capaian
1	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi	2,8 T	3.563 T



Dari data diatas terlihat bahwa nilai realisasi investasi pada tahun 2024 telah melampaui target realisasi investasi tahun 2024 yaitu sebesar 3.563 T (Triwulan III) dari target 2,8 Triliun dan telah melebihi target yang ditetapkan.

5. Hal-hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Indikator.
 - a. Perlu dilakukan diskusi dengan pelaku usaha yang memiliki rencana investasi besar untuk memastikan rencana realisasi invetasi akan dilaksanakan stia tahunnya, hal ini dilakukan untuk menentukan penetapan target capaian realisasi investasi beberapa tahun kedepan.
 - b. Capaian kinerja realisasi investasi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 triwulan III dibandingkan dengan target kinerja dapat dilihat pada grafik di samping, dimana realisasi investasi pada tahun 2022 sebesar Rp.2,59 Triliun, tahun 2023 sebesar Rp.5,52Triliun dan tahun 2024 sampai dengan triwulan III sebesar Rp. 3,56 Triliun.

Grafik 3.9

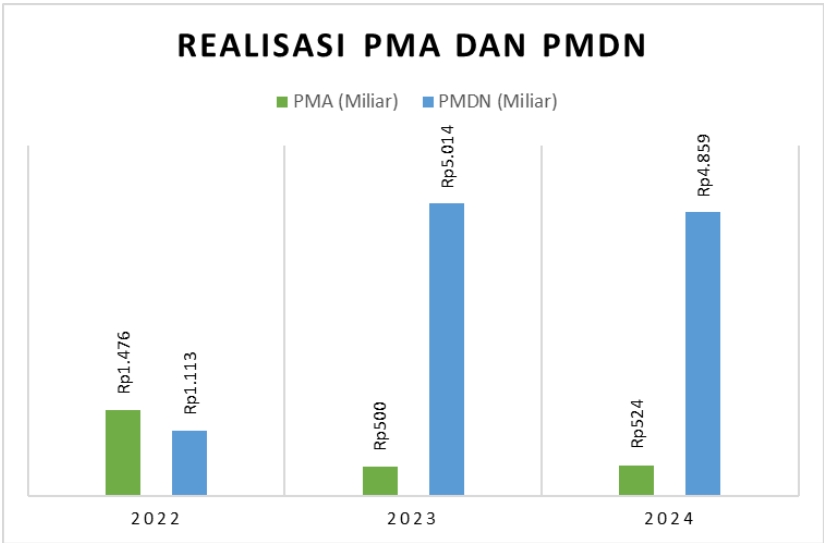
Capaian Realisasi Investasi Provinsi Gorontalo



- c. Perbandingan capaian realiasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 triwulan III dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Grafik 3.10
Realisasi Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri
Provinsi Gorontalo



6. Penghargaan Nasional Yang Diterima OPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
- Piagam penghargaan diterima Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Gambar 3.3
Piagam Penghargaan yang Diterima Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi
Gorontalo Tahun 2024

1) Penghargaan Zona Integritas dengan predikat WBK diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	2) Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Oleh OMBUDSMAN Republik Indonesia dengan Nilai 95,56 Kategori Zona Hijau
3) Penghargaan Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pengampu Area Intervensi Perizinan Monitoring Center For Prevention (MCP) Dengan Capaian Nilai Tertinggi 100%.	4) Penghargaan sebagai Organisasi Perangkat Daerah Terpatuh Dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan Tingkat Provinsi Gorontalo.



M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
M.1 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo
 - Peningkatan kualitas pemuda
 - Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
 - b. Sasaran dan program

Tabel 3.117
 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	52,62		
	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya	33%		
	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Persentase kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan	100%		
2	Sasaran : Meningkatkan partisipasi masyarakat kebugaran	Persentase partisipasi penduduk 10 tahun keatas yang melakukan olahraga/kebugaran jasmani daerah	50,00		
		Peringkat pada even olahraga nasional	25		
	Program pengembangan daya saing keolahragaan	Persentase atlet berprestasi di Tingkat Provinsi Nasional dan Internasional	100%		
3	Sasaran : Meningkatkan kualitas urusan penunjang pemerintahan	Nilai SAKIP	BB		
		Indeks kepuasan masyarakat	B		
		Indeks pengelolaan kearsipan	Kurang		
		Indeks budaya kerja	Kurang Baik		
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Meningkatnya kualitas tata pemerintahan	100%	100%	100%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.118
 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	7.045.735.096	6.942.488.983	98,53	100,00		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	401.878.800	398.547.032	99,17	100,00		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	401.878.800	398.547.032	99,17	100,00		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.051.282.296	4.999.291.017	99,70	100,00		
	- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.035.571.672	4.985.580.393	99,73	100,00		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	15.710.624	13.710.624	88,27	100,00		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.000.000	223.410.500	97,14	100,00		
	- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	230.000.000	223.410.500	97,14	100,00		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.362.574.000	1.321.240.434	96,97	100,00		
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	1.362.574.000	1.321.240.434	96,97	100,00		
2	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	2.091.149.121	2.047.285.319	97,90	100,00	• Angka partisipasi pemuda dalam kegiatan pembinaan masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah • Masih banyak organisasi kepemudaan yang kekurangan SDM yang kompeten dalam bidang pembinaan pemuda. Hal ini menyebabkan kegiatan pembinaan pemuda menjadi kurang efektif dan efisien. • Masih banyak pemuda yang tidak mengetahui informasi tentang kegiatan pembinaan pemuda yang dilaksanakan. Selain itu, akses pendanaan untuk kegiatan pembinaan pemuda juga masih terbatas. • Masih banyak kegiatan pembinaan pemuda yang bersifat rutin dan kurang inovatif. Kegiatan pembinaan pemuda tersebut juga kurang terintegrasi dengan kebutuhan dan minat pemuda.	• Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran untuk pembinaan pemuda. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembinaan pemuda dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). • Pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan perlu meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan pemuda. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk forum kerja sama yang melibatkan semua pihak yang terkait. • Pemerintah, pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan perlu meningkatkan kesadaran pemuda tentang pentingnya pembinaan pemuda. Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi tentang



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	2.091.149.121	2.047.285.319	97,90	100,00		program dan kegiatan pembinaan pemuda kepada pemuda.
	- Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	2.091.149.121	2.047.285.319	97,90	100,00		
3	Program pengembangan daya saing keolahragaan	32.280.887.455	32.166.838.276	99,83	100,00		
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	310.729.748	296.597.729	95,45	100,00	Adanya otonomi daerah sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2015, bahwa Indonesia masih memiliki permasalahan olahraga pendidikan. Diantaranya kenakalan pelajar meningkat termasuk kebugaran rendah, olahraga belum menjadi gaya hidup lagi akibat pengaruh kemajuan teknologi (adanya games, media sosial, Internet dan lain-lain), kurangnya fasilitas untuk PJOK dan ekstrakurikuler olahraga, serta kurangnya aktivitas fisik/olahraga untuk pelajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa usia 10-12 Tahun Se-Kota Gorontalo tingkat kesegaran jasmani dalam kondisi kurang. (sumber data : Syarif Hidayat Program Studi PKO, Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo)	- Perlunya kerjasama antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota serta lembaga terkait dalam mendukung serta pengembangan olahraga disatuan pendidikan baik jenjang SD, SMP maupun SMA / SMK dan SLB, guna mencapai target sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 4 yakni keolahragaan bertujuan untuk: a. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia; b. Menanamkan nilai moral dan akhlak mulia,sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
	- Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan dan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh	310.729.748	296.597.729	95,45	100,00	Belum didukung sepenuhnya dengan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan program kegiatan, hal ini menyebabkan	c. Mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; d. Memperkukuh ketahanan nasional; e. Mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Masyarakat dan Dunia Usaha					program kegiatan yang ada hanya dalam mempersiapkan berupa keikutsertaan pada event tingkat nasional seperti Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional dan Pekan Olahraga Tingkat Nasional.	bangsa; dan Menjaga perdamaian dunia. Maka diperlukan: ➢ Dukungan anggaran yang memadai dalam mensupport serta melakukan edukasi melalui satuan pendidikan tentang pentingnya olahraga bagi peserta didik;
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	4.538.851.407	4.445.747.932	99,27	100,00		➢ Penyediaan sarana dan prasarana baik di satdik maupun sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat pada ruang publik; ➢ Penyiapan tendik yang memenuhi standart PJOK; ➢ Kesiapan dalam setiap event regional/nasional maupun internasional.
	- Sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	4.538.851.407	4.445.747.932	99,27	100,00		
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	27.431.306.300	27.424.492.615	99,98	100,00		
	- Sub kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	27.431.306.300	27.424.492.615	99,98	100,00		
JUMLAH		41.417.771.672	41.156.612.578	99,60	100,00		

- 1) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
- Outcome dari program adalah terlaksananya pengembangan kapasitas pembinaan pemuda dan olahraga.
- a. Pelaksanaan program
1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi.
- Output kegiatan adalah Jumlah Pemuda kader Provinsi dari seluruh Kab./Kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya.
- Sub kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi.
- Output sub kegiatan adalah :
- a. Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD) 40 Orang (SKPD & Vertikal)
- b. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kepemudaan 50 Orang (Siswa & Siswi SMA – SMK se Provinsi Gorontalo)
- c. Pelaksanaan Kegiatan Festifal Kreatifitas Musik Pemuda 7 Grup (Kelompok Band)
- d. Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemuda 40 Orang (Eks Paskibraka)
- e. Pelaksanaan Seleksi Kreatifesia Pemuda 1 Orang



- f. Pelaksanaan Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) 35 Orang (Mahasiswa / Mahasiswi Perguruan Tinggi se Provinsi Gorontalo)
- g. Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor 2 Orang
- h. Pelaksanaan Sumpah Pemuda

2) Program pengembangan daya saing keolahragaan

Outcome dari program adalah terlaksananya Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.

- a. Pelaksanaan program
 - 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
Output kegiatan adalah Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Serta Sekolah Olahraga Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Dunia Usaha Yang Dikembangkan.
 - Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha.
Output sub kegiatan adalah peserta yang mengikuti kompetisi olahraga rekreasi tingkat provinsi dan tingkat nasional.
 - Tahun 2022 Olahraga Patumbu menjadi Juara I Nasional dan mendapatkan kategori olahraga favorit nasional pada Festival olahraga tradisional tahun 2022 di Solo, pelaku olahraga patumbu berasal dari komunitas olahraga tradisional Kabupaten Gorontalo;
 - Tahun 2023 Mengikuti POTRASNAS di kabupaten Kuningan Jawa Barat dsan jenis Olahraga yang diikuti Hadang, Terompah dan Enggran dengan peringkat 18;
 - Tahun 2024, Melaksanakan serta Mengikuti Turnamen Golf, Gate Ball dan Ofroad.
 - 2. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
Output kegiatan adalah Jumlah Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan.
 - Sub kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
Output sub kegiatan adalah jumlah atlet yang dibina di PPLP sebanyak 58 orang.

Tabel 3.119

Daftar atlet PPLP Provinsi Gorontalo

No	Jumlah Per Cabor		Nama Atlet	Cabang Olahraga	Ket
1	24	Atlit	Soni Pago	TAKRAW	
2			Yusuf Djailaini	TAKRAW	
3			Moh. Afrizal Djafar	TAKRAW	
4			Dirga Wahyu Ismail	TAKRAW	
5			Moh. Adrian Ayuba	TAKRAW	
6			Leviyanto Kuke	TAKRAW	
7			Mohamad Fahrul Male	TAKRAW	



No	Jumlah Per Cabor		Nama Atlet	Cabang Olahraga	Ket
8	8	Atlit	Nur Zahra Amelia Taha	TAKRAW	
9			Nadila Zaskia Wartabone	TAKRAW	
10			Nur'ain Lemba	TAKRAW	
11			Rezka Aditya Mustafa	TAKRAW	
12			Moh. Danil Wartabone	TAKRAW	
13			Febriansyah Gobel	TAKRAW	
14			Mohamad Haikal Hasan	TAKRAW	
15			Sultan Imran	TAKRAW	
16			Ghathfaan Faturahman Adam	TAKRAW	
17			Cristal Al Qhojali Bilontalu	TAKRAW	
18			Tri Nur Anggraini	TAKRAW	
19			Nurhayati Wahyuning Badaru	TAKRAW	
20			Hanif Algifar Safi'i	TAKRAW	
21			Muhammad Alfin J. Puhi	TAKRAW	
22			Farel Saputra Dehula	TAKRAW	
23			Nur Inda Kuna	TAKRAW	
24			Fahrudin R. Kadir	TAKRAW	
25	8	Atlit	Eugene Annabel Lisar	KARATE	
26			Zaskia Putri Salurante	KARATE	
27			Moh. Akbar Hamzah	KARATE	
28			Annisya Zulhija Radjak	KARATE	
29			Imanuel A.C. Walukow	KARATE	
30			Faithpele H.E. Walukow	KARATE	
31			Regyan Saputra Antuli	KARATE	
32			Nazmi Nadia Syafira	KARATE	
33	6	Atlit	Aldian S. Gafur	TAEKWONDO	
34			Abd. Rahmat Kobi	TAEKWONDO	
35			Fricilla Alifya Suleman	TAEKWONDO	
36			Fitrah Oktaviyanto Rabiasa	TAEKWONDO	
37			Fazra Katili	TAEKWONDO	
38			Siti Nursawalia S. Hamapu	TAEKWONDO	
39	5	Atlit	Adam Syukri Hudodo	TENIS MEJA	
40			Patrio Bakari	TENIS MEJA	
41			Rahman Ramadhan Tahir	TENIS MEJA	
42			Azril Aliyu	TENIS MEJA	
43			Rahmatia Padido	TENIS MEJA	
44	5	Atlit	Syifa Salsabila Musa	PENCAK SILAT	
45			Puput Pratiwi Putri Haryanto	PENCAK SILAT	
46			Chelsea Korin Punu	PENCAK SILAT	
47			Rahmat Lainjong	PENCAK SILAT	
48			Moh. Rizky Putra Adrian	PENCAK SILAT	
49	5	Atlit	Keyla R. Pakaya	ANGGAR	
50			Muhammad Reyhan Habibie	ANGGAR	
51			Syahril Ramadhan	ANGGAR	
52			Siti Aulia Tantu	ANGGAR	
53			Rahman Ardiansyah Ibrahim	ANGGAR	
54	2	Atlit	Aqbar Fauzan Bau	RENANG	



No	Jumlah Per Cabor		Nama Atlet	Cabang Olahraga	Ket
55			Muhammad Jagat Arira Napu	RENANG	
56	3	Atlit	Kesya Viandra Azahra S. Poli	ATLETIK	
57			Fikri Bila Leya	ATLETIK	
58			Febrian Kadja	ATLETIK	

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
- Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait.
- Sub kegiatan Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait.
- Output sub kegiatan adalah jumlah atlet yang mengikuti kompetisi sesuai cabang olahraga yang dibina.

Tabel 3.120

Daftar Perolehan Medali Atlet yang dibina

NO	CABANG OLAHRAGA	NAMA	JABATAN	ASAL DAERAH	KETERANGAN
1	ATLETIK				
		IZRAK UDJULU	ATLET	KOTA GORONTALO	PERAK
		MOH HADRIN MAHDANG	ATLET	KOTA GORONTALO	PERUNGGU
		JAILAN SALEH AHMAD	PELATIH	KAB. GORONTALO	PERAK
		AGUNG MULYAWAN	PELATIH	KAB. GORONTALO	PERUNGGU
4	BILIAR				
		LEO F. PULUHULAWA	ATLET	KOTA GORONTALO	PERAK
		HUSAIN PANEO	PELATIH	KOTA GORONTALO	PERAK
		HASIM GAWA	PELATIH	KOTA GORONTALO	PERAK
5	CATUR				
		GILANG IBAD SETIA PUTRA	ATLET	KOTA GORONTALO	PERAK
		SAFRIN SAIFI, SE	ATLET	KOTA GORONTALO	PERAK
		DRS. KASMEN LAHAY MM	ATLET	KAB. BONEBOL	PERAK
		SYAHIFUL YUNUS	ATLET	KAB. GORONTALO	PERAK
		EMAS FAJAR FATIKH	ATLET	KOTA GORONTALO	PERAK
		BENI ABDUL AZIS	PELATIH	KOTA GORONTALO	PERAK
		GUFRON YUNUS	PELATIH	KOTA GORONTALO	PERAK
6	E-SPORT				



NO	CABANG OLAHRAGA	NAMA	JABATAN	ASAL DAERAH	KETERANGAN
		MOH BAYU HABIBIE	ATLET	KOTA GORONTALO	PERUNGGU
		MOH. AKBAR PAUDIE	ATLET	KOTA GORONTALO	PERUNGGU
7	KARATE				
		FARADILA ADAM	ATLET	KAB. BONEBOL	PERAK
		SUPRIYANTO KADIR	PELATIH	KAB. BONEBOL	PERAK
9	TAEKWONDO				
		SILVANA LAMANDA	ATLET		EMAS
		SITI RAHMATIA MOOTALU	ATLET	KOTA GORONTALO	PERUNGGU
		AL ALIM ADAM	ATLET	KOTA GORONTALO	PERUNGGU
		JANUAR BUDIMAN LAHAY	PELATIH	KOTA GORONTALO	
		BONY FARAYTODI GOZAL	PELATIH	KOTA GORONTALO	
		SITI RAHAMA PANANI, S.SI	PELATIH	KOTA GORONTALO	
11	MUAYTHAI				
		FATIMAH CATHERINA HUSAIN	ATLET	KOTA GORONTALO	EMAS
		Ir. ALEKS OLIII, MSC	PELATIH	KOTA GORONTALO	EMAS
13	SEPAK TAKRAW				
		JELKY LADADA	ATLET	KAB. POHUWATO	EMAS & PERAK
		RADEN LATEKA	ATLET	KAB. GORONTALO	EMAS & PERAK
		ADRIANSYAH W RAMADHAN	ATLET	KAB. GORONTALO	EMAS & PERAK
		GELVIN A. USMAN	ATLET	KAB. GORONTALO	EMAS & PERAK
		HENDRA PAGO	ATLET	KOTA GORONTALO	EMAS & PERAK
		ABDUL HALIM S RADJIU	ATLET	KAB. BONEBOL	EMAS & PERAK
		HARSONO A. TAHA, S.PD	PELATIH	KAB. GORONTALO	EMAS & PERAK
		ERENS USMAN	PELATIH	KAB. GORONTALO	EMAS & PERAK
		ANGKY LAKORO	PELATIH	KAB. GORONTALO	EMAS & PERAK
17	GATEBALL				
		MAX DAVID TASIABE	ATLET		PERUNGGU
		BAYU SETIAWAN SINADIA	ATLET		PERUNGGU



NO	CABANG OLAHRAGA	NAMA	JABATAN	ASAL DAERAH	KETERANGAN
		YUSRAN CONO	ATLET		PERUNGGU
		MOHAMMAD ARIEL JULIANSYAH	ATLET		PERUNGGU
		GUNAWAN ISHAK S.M	ATLET		PERUNGGU
		DEDY FEBRIANTO NADJAMUDIN, ST	ATLET		PERUNGGU
		TRISTIAWATI AG MORIDU	PELATIH		PERUNGGU
		MOHAMAD FAIZAL HASIRU	PELATIH		PERUNGGU

Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 3.121

Kebijakan Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Mengembangkan potensi, pemberdayaan dan kreativitas pemuda	1. UU no 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan 2. Undang-undang Republik Indonesia (UU) Nomor 12 Tahun 2010 mengatur tentang Gerakan Pramuka, diantaranya : Pendidkan, kepramukaan, kelembagaan, Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah. 3. Perpres no 106 tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga. 4. Perpres no 43 tahun 2022 Tentang Strategis Lintas Sector Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.	1. Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan. 2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan. 3. Mengembangkan kapasitas kepramukaan melalui pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan yang difokuskan pada penyediaan data dan informasi kepramukaan secara elektronik, peningkatan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia serta dukungan terhadap sarana dan prasarana dan penyelenggaraann dan partisipasi pada kegiatan kepramukaan. 4. Pelatihan kepemimpinan, kepeloporan dan kepanduan. 5. Peningkatan SDM yang berkualitas melalui Workshop/FGD kepemudaan bagi wirausaha pemula. 6. Fasilitasi keikutsertaan pemuda dalam event kepemudaan nasional dan internasional.



2	Meningkatkan partisipasi, prestasi daerah dalam event olahraga	1. UU NOMOR 11 TAHUN 2022, PP NOMOR 18 TAHUN 2007 2. PP NOMOR 86 TAHUN 2021 3. PP NOMOR 46 TAHUN 2024 4. PERMENPORA 11 TAHUN 2024 5. PERMENPORA 14 TAHUN 2024 6. PERMENPORA 15 TAHUN 2024	1. Pengembangan sentra olahraga (SKO) dan klub olahraga untuk pembinaan atlet berprestasi termasuk penyandang disabilitas. 2. Peningkatan kegiatan penggalan atlet berbakat termasuk disabilitas. 3. Penyusunan Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD). 4. Pelaksanaan Training Center untuk persiapan kejurda/kejurnas. 5. Pelaksanaan kejuaraaan single event, multi event, olahraga pendidikan,dan 6. Fasilitasi Keikutsertaan pada jenjang kejuaraaan olahraga pendidikan (prapopnas, popnas, peparpenas, kejurnas) 7. Pembangunan Sport Centre (Di tambah Dengan Spesifikasi) 8. Peningkatan SDM Tenaga Keolahragaan melalui UPT Keolahragaan provinsi 9. Pelaksanaan Pembinaan Atlit Olahraga Pendidikan

3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 3.122
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Pemuda	52,62	57,83
2	Presentase Partisipasi Penduduk 10 Tahun Keatas Berolahraga/Kebugaran Jasmani Daerah	50,00	50,00
3	Nilai SAKIP	BB	A

4. Hal-Hal Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Indikator Tahun 2024
- Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD)
 - Pembinaan Atlit PPLP Gorontalo 58 Atlit dengan 8 Cabang Olahraga :
 - Cabang Olahraga Atletik
 - Cabang Olahraga Takraw
 - Cabang Olahraga Tekwondo
 - Cabang Olahraga Renang
 - Cabang Olahraga Karate
 - Cabang Olahraga Silat



- g. Cabang Olahraga Anggar dan

h. Cabang Olahraga Tenis Meja

5. Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, tidak mendapatkan rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.

6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Tabel 3.123

Tabel Penghargaan Tahun 2024

NO	NAMA	CABOR	NAMA EVENT	TAHUN	TEMPAT	PRESTASI			KET
						EMAS	PERAK	PERUNGGU	
1	Zaskia Putri Salurante	Karate	Kejurnas Piala Ketum PB FORKI	2024	Tangerang	1			
2	Zaskia Putri Salurante	Karate	Kejuaraan Karate SEAKAF	2024	Thailand	1			
3	Zaskia Putri Salurante	Karate	KEJURNAS Antar PPLP/PPLP-D dan SKO	2024	Sulut	1			
4	Annisya Zulhijah Radjak	Karate	KEJURNAS Antar PPLP/PPLP-D dan SKO	2024	Sulut		1		
5	Irvan Mailla Sahibu	Karate	KEJURNAS Antar PPLP/PPLP-D dan SKO	2024	Sulut			1	
6	Karmila Karim Hasan	Karate	KEJURNAS Antar PPLP/PPLP-D dan SKO	2024	Sulut			1	
7	Zaskia Putri Salurante	Karate	AKF	2024	Philiphine			1	
8	Zaskia Putri Salurante	Karate	JKS	2024	Jepang			1	
9	Salwa Sakina Toi	Pencak Silat	KEJURNAS Antar PPLP/PPLP-D dan SKO	2024	Kalsel			1	
10	keyla rahma pakaya	Anggar	Kejurnas Anggar	2024	Sumut		1	1	
11	Rahman Ibrahim	Anggar	Kejurnas Anggrar	2024	Sumut			1	
12	Rahan Habibie	Anggar	Kejurnas Anggar	2024	Sumut			1	
13	Cabang Olahraga Sepak Bola	Sepak Bola	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo		1		
14	Cabang Olahraga Sepak Takraw	Sepak Takraw	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo		1		
15	Cabang Olahraga Bola Volly Putra	Bola Volly	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo			1	
16	Cabang Olahraga Bola Basket Putra	Bola Basket	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo			1	
17	Cabang Olahraga Bulu Tangkis Beregu Putra	Bulu Tangkis	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo	1			
18	Cabang Olahraga Tenis Lapangan Beregu Putra	Tenis Lapangan	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo			1	
19	Cabang Olahraga Tinju Putra Youth Men's (46kg)	Tinju	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo			1	
20	Cabang Olahraga Tinju Putra Youth Men's (51kg)	Tinju	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo			1	
21	Cabang Olahraga Tinju	Tinju	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo			1	



NO	NAMA	CABOR	NAMA EVENT	TAHUN	TEMPAT	PRESTASI			KET
						EMAS	PERAK	PERUNGGU	
	Putra Youth Men's (54kg)								
22	Cabang Olahraga Tinju Putra Youth Men's (57kg)	Tinju	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo			1	
23	Cabang Olahraga Tinju Putra Youth Men's (60kg)	Tinju	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo		1		
24	Cabang Olahraga Tinju Putra Youth Men's (71kg)	Tinju	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo			1	
25	Cabang Olahraga Tinju Youth Women's (W52kg)	Tinju	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo			1	
26	Cabang Olahraga Tinju Youth Women's (W57kg)	Tinju	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo	1			
27	Cabang Olahraga Pencak Silat Kategori Tanding Kelas B Putri (diatas 43 –47 Kg)	Pencak Silat	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo		1		
28	Cabang Olahraga Pencak Silat Kategori Tanding Kelas C Putri (diatas 47 –51 Kg)	Pencak Silat	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo	1			
29	Cabang Olahraga Pencak Silat Kategori Tanding Kelas D Putra (diatas 51 –55 Kg)	Pencak Silat	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo			1	
30	Cabang Olahraga Pencak Silat Kategori Tanding Kelas D Putri (diatas 51 –55 Kg)	Pencak Silat	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo	1			
31	Cabang Olahraga Pencak Silat Kategori Tanding Kelas E Putra (diatas 55 –59 Kg)	Pencak Silat	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo			1	
32	Kategori Tanding Kelas E Putri (diatas 55 –59 Kg)	Pencak Silat	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo			1	
33	Kategori Tanding Kelas F Putra (diatas 59 – 63 Kg)	Pencak Silat	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo			1	
34	Kategori Tanding Kelas G Putra (diatas 63 – 67 Kg)	Pencak Silat	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo		1		
35	Kategori Tanding Kelas H Putra	Pencak Silat	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo			1	



NO	NAMA	CABOR	NAMA EVENT	TAHUN	TEMPAT	PRESTASI			KET
						EMAS	PERAK	PERUNGGU	
	(diatas 67 –71 Kg)								
36	Kategori Seni Jurus Tunggal Putra	Pencak Silat	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo	1			
37	Kategori Seni Jurus Tunggal Putri	Pencak Silat	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo		1		
38	Kategori Seni Jurus Ganda Putra	Pencak Silat	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo		1		
39	Kategori Seni Jurus Ganda Putri	Pencak Silat	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo		1		
40	Kategori Seni Jurus Regu Putra	Pencak Silat	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo		1		
41	Kategori Seni Jurus Regu Putri	Pencak Silat	Pra Popnas Zona V Gorontalo	2024	Gorontalo			1	
TOTAL						8	11	23	

7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2024.
- Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo tidak melaksanakan Perjanjian Kerjasama/MOU di tahun 2024.

N. Urusan Statistik

N.1 Dinas Komunikasi, Informasi Dan Statistik Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
- a. Tujuan yang akan di capai Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan bidang kominfo dan statistik.
- b. Sasaran dan Program

Tabel 3.124

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Statistik Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan data, dan informasi statistik sektoral yang berkualitas menuju satu data indonesia	Indikator Sasaran : Indeks Pembangunan Statuistik	20	2.08	104%
	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	77%	77%	100%



2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.125
 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Statistik
 Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program penyelenggaraan statistik sektoral	518.299.850	508.655.343	98.14	100	Perangkat mendukung pengolahan data Tidak SDM untuk bidang statistik belum ada	Ditambahkan fitur pengolahan data Diikutsertakan Pegawai dalam mengikuti BIMTEK Statistik
1a	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	518.299.850	508.655.343	98.14	100		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	332.556.550	332.149.484	99.88	100		
	- Sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	82.937.800	73.802.509	88.99	100		
	- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	102.805.500	102.703.350	99.90	100		
JUMLAH		518.299.850	508.655.343	98.14	100		

- 1) Program penyelenggaraan statistik sectoral
- Outcome dari program adalah Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah dengan target kinerja 77%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

Output kegiatan adalah Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan Daerah seperti. Capaian untuk kegiatan ini adalah 100%.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan target 1 Dokumen dan realisasi sudah mencapai 100%.

- Sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun dengan target 1 Dokumen dan realisasi sudah 100%.

- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral.



Output sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS dengan target 1 Dokumen dan capaian sudah 100%.

3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024.

Tabel 3.126

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Statistik
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Maturitas SPBE	2.61	4.13

4. Penghargaan Nasional Yang Diterima OPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
 - OPD Kolaboratif Dari BPS Provinsi Gorontalo

O. Urusan Persandian

O.1 Dinas Komunikasi, Informasi Dan Statistik Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo.
 - Meningkatkan kualitas penyediaan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi publik.
 - b. Sasaran dan Program

Tabel 3.127

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Persandian
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya jangkauan kualitas teknologi dan layanan informasi publik	Indikator Sasaran : Indeks SPBE	2,61	4.13	158%
		Indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik	68	73.22	108%
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Optimalisasi pelaksanaan keamanan informasi	100%	100%	100%



2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.128
 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Persandian
 Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	122.090.000	121.725.605	99.70	100	Kurangnya SDM Sandiman di Provinsi Gorontalo	Mengikut Sertakan SDN Dinas Kominfo untuk mengikuti Bimtek SANDI Man
1a	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	122.090.000	121.725.605	99.70	100		
	- Sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	122,090.000	121.725.605	99.70	100		
JUMLAH		122.090.000	121.725.605	99.70	100		

1) Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

Outcome dari program adalah Optimalisasi Pelaksanaan Keamanan Informasi dengan target kinerja 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik yang dilakukan selama 12 Bulan dengan capaian kinerja 100%.

- Sub kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan target 12 Dokumen dan realisasinya sudah 100%.

3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024



Tabel 3.129

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Persandian
Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Maturitas SPBE	2.61	4.13

P. Urusan Kebudayaan

P.1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo
 - Peningkatan pelestarian kebudayaan dan pemajuan kehidupan beragama berlandaskan nilai kebangsaan dan kearifan lokal.
 - b. Sasaran dan Program

Tabel 3.130

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatkan pelestarian warisan budaya dan pemberdayaan komunitas budaya sebagai bagian pembangunan daerah	Persentase warisan budaya benda/tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	100%	100%	100%
		Persentase komunitas budaya yang diberdayakan	100%	100%	100%
	Program pelestarian dan pengelola cagar budaya	Persentase cagar budaya yang ditetapkan pada perangkat provinsi	7 Obj	7 Obj	100%
	Program pengembangan kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan, taman budaya, tradisi budaya dan lembaga adat.	90%	90%	100%
	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya.	5 Obj	5 Obj	100%
	Program pengelolaan permuseuman	Persentase benda koleksi yang tersimpan di museum provinsi	100%	100%	100%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.131

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kebudayaan
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program Pengembangan Kebudayaan	300.023.300	278.209.009	92,73	100		
	Kegiatan Pesta Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	300.023.300	278.209.009	92,73	100		
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.081.905.950	965.950.172	89,28	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.081.905.950	965.950.172	89,28	100		
3	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	399.979.250	347.427.882	86,86	100		
	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	399.979.250	347.427.882	86,86	100		
4	Program Pengelolaan Permuseuman	3.265.514.663	2.925.289.857	89,58	100	terlambatnya dana DAK Non fisik Tahap II masuk ke KASDA, yaitu pada bulan September 2024 sebesar Rp. 900.000.000, sehingga ada beberapa kegiatan tidak bisa dimaksimalkan	penyaluran dana Tahap II dari Pusat, akan dikoordinasikan Kembali agar pada tahun berikut bisa lebih cepat.
	Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi	3.265.514.663	2.925.289.857	89,58	100		
JUMLAH		5.047.423.163	4.516.876.920	89,49	100		

1) Program Pengembangan Kebudayaan

Outcome dari program adalah Presentase Nilai Budaya yang dikembangkan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.

- Sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen yang tersusun dan diakui secara nasional dan internasional sebanyak 5 Objek (upiya karanji, elengge, longgo, tili ayah, ilabulo).

- Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional terdiri atas 5 laporan (Laporan Kegiatan Pekan Kebudayaan Daerah, Laporan Kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah, Laporan Kegiatan Bimtek Pemajuan Kebudayaan, Laporan Kegiatan Tenaga Kebudayaan, Laporan Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah).

2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Outcome dari program adalah jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya terdiri atas 3 lembaga (Lembaga Adat, Sanggar, dan Komunitas Budaya).

3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Outcome dari program adalah cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi.

- Sub kegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan terdiri atas 3 Objek (Makam Nani Wartabone, Kompleks Rumah Nani Watabone, Kompleks Makam Kuno Dunggala).

- Sub kegiatan Penetapan Cagar Budaya.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan terdiri atas 3 objek (Makam Nani Wartabone, Kompleks Rumah Nani Watabone, Kompleks Makam Kuno Dunggala).

- Sub kegiatan Pelindungan Cagar Budaya.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi terdiri atas 7 objek (Situs Makam Nani Wartabone, Situs Makam Kuno Dunggala, Pendaratan Soekarno, Benteng Otanaha, Benteng Fortje Laiden (orange), Benteng Kota Mas, dan SDN 61 Kota Timur).

- Sub kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya terdiri atas 30 Orang.

4) Program Pengelolaan Permuseuman

Outcome dari program adalah terlaksananya pelindungan pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu serta peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap Museum.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi.

- Sub kegiatan Pelindungan Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu.

Output sub kegiatan adalah Jumlah koleksi museum yang dilakukan pelindungan pengembangan dan pemanfaatan terdiri atas 20 Unit yang terdiri 2 buah koin Voc, 2 buah koin Wihelmina, 4 Uang Koin, 5 buah Uang Kertas, 1 buah Hukede/Tambaluda, 1 buah Nampankuningan /Baki, 3 buah Wadah Kuningan, 1 buah Sepeda Ontel Phoenix (Turangga), 2 buah Isiriki/Setrika, 2 buah Rebana, 1 buah Gergaji Kuningan Besar, 1 buah Pisau Lempar, 1 buah Televisi.



- Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman.
Output sub kegiatan adalah Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya terdiri atas 2 kegiatan yang melibatkan 50 orang.
- Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum.
Output sub kegiatan adalah jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum terdiri dari 6 kegiatan diantaranya Pameran Temporer, Belajar Bersama di Museum, Lomba Edukatif Kultural Museum, Sosialisasi Museum, Museum Keliling, Publikasi Museum.
- Sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum.
Output sub kegiatan adalah jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia terdiri dari 22 unit diantaranya 1 unit Pintu Gerbang/Jaramba, 1 unit Kanopi, 1 unit LCD, 2 unit Printer, 1 PC Komputer, 2 unit Kursi Roda, 1 unit Kamera Canon, 1 unit Sound System, 2 unit Tabung Pemadam Kebakaran, 1 unit Kipas Angin Tabung Air, 2 Unit Kipas Angin Dua Tingkat, 1 unit Pemangkas Rumput, 4 unit Tong Sampah, 1 unit Papan Number, 1 unit Pembatas Antrian, 1 unit GPS Garmin.

3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 3.132
Kebijakan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Pengembangan, pemanfaatan, aktualisasi nilai budaya, revitalisasi cagar budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo	Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo	Untuk Cagar Budaya Yang Telah Ditetapkan Diantaranya Makam Kuno Blonkod Dan Situs Nani Wartabone
2.	Peningkatan peran museum sebagai sarana penelitian, edukasi, rekreasi serta penguatan kapasitas Insan permuseuman dalam Mewujudkan Pelestarian Nilai Sejarah dan Warisan Budaya Berkelanjutan		Peran Museum Sebagai sarana penelitian, edukasi, rekreasi serta penguatan kapasitas Insan Permuseuman Telah dilaksanakan Kegiatanya dengan Melibatkan Seluruh Sektor Diantaranya Peserta Didik, Guru, Mahasiswa, Dosen, Masyarakat Lokal, Nasional Dan Mancanegara Serta Saat Ini Museum Gorontalo Memiliki ada 662 Koleksi.



4. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024.

Tabel 3.133
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan
 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Persentase Cagar Budaya Yang Ditetapkan Pada Peringkat Provinsi	7 Objek	7 Objek
2	Pesersentase Objek Pemajuan Kebudayaan, Taman Budaya, Tradisi Budaya dan Lembaga	90%	90%
3	Persentase Lembaga Kesenian Tradisional Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Objek	5 Objek
4	Persentase benda Koleksi Yang Tersimpan di Museum Provinsi	10 Koleksi	10 Koleksi

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Indikator
- Museum Tahun 2022 telah diakreditasi B oleh Kemendikbudristek sehingga membutuhkan Sarana dan Prasarana pendukung yang harus tersedia sesuai tipe akreditasi antara lain pembangunan Mushola, Laboratorium, Ruang Kerja Pegawai, Aula untuk pementasan pagelaran seni dan budaya, ruang pameran koleksi dan gudang.
 - Perlu Penambahan SDM di Bidang Museum (sejarah, arkeologi, bahasa Inggris) untuk menunjang pelayanan terhadap pengunjung.
 - Belum adanya komitmen terkait pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) serta dukungan terhadap penetapan cagar budaya oleh kabupaten/kota, sehingga pemerintah provinsi mengalami keterlambatan proses pengusulan ke pusat. Sehingga perlu pembahasan Bersama stakeholder terkait pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) di Kab/Kota.
 - Terdapat komunitas atau sanggar budaya yang belum memiliki izin pendirian (akta notaris), sehingga perlu bekerjasama dengan stakeholder dalam hal ini Notaris dan Dinas PTSP untuk mendorong sanggar budaya memiliki izin pendirian.
 - Belum adanya Taman Budaya. Olehnya perlu komitmen pemerintah daerah provinsi dalam hal penyediaan tanah untuk pembangunan taman budaya. Dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo sudah melakukan koordinasi terkait pembangunan taman budaya pada Kementerian Pendidikan.
 - Belum adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan Pengelolaan Pokok budaya, sarana dan prasarana yang menjadi kewajiban pemerintah daerah (Rumah Adat Gorontalo di TMII di Jakarta). Olehnya perlu dianggarkan Kembali kegiatan dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut.
 - Tidak tersedianya anggaran pendukung even dan pertunjukan seni budaya di Provinsi Gorontalo. Perlu Kerjasama dengan beberapa vendor atau penyedia event untuk pertunjukan tersebut di Provinsi Gorontalo.



- Kurangnya biaya operasional untuk penetapan warisan budaya tak benda (WBTB) provinsi Gorontalo berupa biaya pendokumentasian, tenaga ahli dan akomodasi, sehingga perlu penganggaran Kembali biaya operasional untuk penetapan WBTB Provinsi Gorontalo serta Kerjasama dengan balai pelestarian kebudayaan (BPK) Wilayah XVII Sulut-Gorontalo terkait pengembangan kebudayaan.
6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
- Terpilihnya 4 orang peserta utusan gorontalo pada Paduan Suara Gita Bahana Nusantara di Istana merdeka Jakarta pada upacara HUT Kemerdekaan RI tahun 2024, dan salah satunya menjadi Solois pada upacara 17 Agustus 2024.
 - Gold medal Gorontalo Inovasi Choir pada Bali International Choir Festival (BICF) tahun 2024 di Bali.
 - The Most Creative Song Performance Gorontalo Inovasi Choir Pada Bali International Choir Festival (BICF) tahun 2024 di Bali.
 - Warisan Budaya "Huyula" ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dan memperoleh sertifikat Penghargaan Pada Apresiasi Warisan Budaya Indonesia tahun 2024.
 - Warisan Budaya "Tidi Lo Tonggalo" ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dan memperoleh Sertifikat Penghargaan pada Apresiasi Warisan Budaya Indonesia tahun 2024.
 - Warisan budaya "Bahasa Gorontalo" ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dan memperoleh Sertifikat Penghargaan pada Apresiasi Warisan Budaya Indonesia Tahun 2024.
7. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2024.
- Kerjasama pemajuan kebudayaan daerah di wilayah masing-masing, diantaranya Balai Pelestarian Kebudayaan Sulut-go dan pemerintah kabupaten kota se Sulut dan Gorontalo.
 - Kerjasama pemajuan kebudayaan daerah khusus warisan budaya yang bersifat benda (Tangible) antara pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Balai Pelestarian Kebudayaan, Pemerintah daerah Kab/kota se Sulut Go.

Q. Urusan Perpustakaan

Q.1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo.
 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
 - Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat



b. Sasaran dan Program

Tabel 3.134
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Percepatan Reformasi Birokrasi	Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	92,81	109,18
		Nilai Sakip	70	76,86	109,8
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40%	40%	100
2	Sasaran : Percepatan Reformasi Birokrasi	Indikator Sasaran : Nilai Pengawasan Kearsipan	60,00	70,74	117,9
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Arsip	40%	40%	100
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	40%	40%	100
3.	Sasaran : Meningkatkan Kegemaran Membaca	Indikator Sasaran : Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	60	62,43	104,05
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan	50%	50%	100
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	50%	50%	100

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.135
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perpustakaan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran	Keu	Fisik		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program Pembinaan Perpustakaan	354.742.800	354.004.261	99,79	100	Masih terbatasnya Buku fisik dan digital, Masih kurangnya kapasitas tenaga pengelola Perpustakaan, Kurangnya Saprass Pendukung Perpustakaan	Pengadaan secara bertahap saprass dan bimtek bagi tenaga pengelola perpustakaan



No	Program/Kegiatan	Pagu 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran	Keu	Fisik		
			(Rp)	(%)	(%)		
1a	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	74.975.050	74.959.870	99,98	100		
1b	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	279.767.750	279.044.391	99,74	100		
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	152.630.675	151.192.848	99,06	100	Kurangnya pengarang/penulis daerah dalam menghasilkan buku, Kesulitan dalam memperoleh tahun terbit buku dari penerbit	Melakukan sosialisasi kepada penerbit penerbit buku, Pelatihan cara penulisan buku.
2a	Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah.	152.630.675	151.192.848	99,06	100		
JUMLAH		507.373.475	505.197.109	99,57	100		

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan
- Outcome dari program adalah Presentase Pembinaan Perpustakaan Kewenangan Provinsi dan Akreditasi Perpustakaan.
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi.
- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi.
- Output sub kegiatan adalah :
- Bimtek Tenaga Perpustakaan 30 orang. Sampai dengan tahun 2024 kami telah melatih 80 orang tenaga perpustakaan SMA/SMK yang tersebar di Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo. Pada Tahun 2025 direncanakan akan melakukan Bimtek untuk 30 Orang Tenaga Perpustakaan.
 - Akreditasi 64 Perpustakaan di tahun 2024. Sampai dengan tahun 2024 kami telah melakukan akreditasi 200 perpustakaan dan direncanakan pada tahun 2025 akan mengakreditasi 35 Perpustakaan.
2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi.
- Sub kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.
- Output sub kegiatan adalah :
- Layanan Perpustakaan keliling 10 lokasi SMA/SMK se-Provinsi Gorontalo dan Perpustakaan Inklusi Sosial di Kec. Tilongabila, Kec. Tibawa, dan Kec. Telaga Biru. Dari layanan perpustakaan keliling dan



inklusi sosial terdapat 2.251 jumlah masyarakat/siswa yang memanfaatkannya.

- Melaksanakan semarak literasi dalam rangka Bulan Literasi dengan 7 kegiatan yaitu :
 - Lomba Pidato Bahasa Inggris
 - Lomba Pidato Bahasa Gorontalo
 - Lomba Paiya Hungolopoli
 - Lomba Mewarnai
 - Pelatihan cara pembuatan roti
 - Pelatihan pembuatan resensi buku
 - Pelatihan Publik Speaking

Dari 7 kegiatan tersebut dapat menghadirkan kurang lebih 700 peserta.

2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah kuno

Outcome dari program adalah Jumlah Karya Cetak dan Bibliografi /Katalog Induk Daerah (BID/KID) yang tersedia pada perpustakaan umum daerah.

a. Pelaksanaan Program

- Kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah (KID) dan Bibliografi Daerah (BID).
 - Sub kegiatan Penerbitan Katalog Induk Daerah

Output sub kegiatan adalah Identifikasi BID dan KID, Pendataan KID dan BID, Cetak bibliografi dan katalog induk daerah 75 Buku, Pengadaan Buku Digital 1057 judul dan 1230 eksemplar, dengan rincian 100 judul fiksi dan 957 judul non fiksi. Adapun buku-buku digital tersebut dapat diakses melalui aplikasi layanan perpustakaan elektronik “iArpusGorontalo”.

3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 3.136
Kebijakan Strategis Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Tim Sinergi Provinsi Pengembangan Perpustakaan Melalui Transformasi Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial Prov. Gorontalo	Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 170 / 25/ VI / 2020	Tujuannya Terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.



4. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024.

Tabel 3.137
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan
 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun 2024
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	92,81
2	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	60	62,43

5. Hal-hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Indikator.
 - a. Jumlah Pemustaka pada tahun 2024 sebanyak 8.760 atau naik dibandingkan tahun 2023 sebanyak 6.550 pemustaka. Adapun yang memanfaatkan layanan perpustakaan elektronik melalui aplikasi “iArpusGorontalo” sebanyak 215 pemustaka. Apabila jumlah pemustaka dibagi dalam 2 kategori yaitu kategori masyarakat atau umum sebanyak 2.190 pemustaka, dan kategori pelajar sebanyak 6.570 pemustaka. Selanjutnya jika dikategorikan untuk gender maka didapat jumlah pengunjung untuk laki-laki sebanyak 2.628 pemustaka dan 6.132 pemustaka untuk Perempuan.
 - b. Indeks Pembagunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2022 sebesar 57,92 naik menjadi 70,39 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 sebesar 77,46. Sedangkan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat pada tahun 2022 sebesar 58,72, pada tahun 2023 naik 64,59 dan pada tahun 2024 turun menjadi 62,43.

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi ketika Tim Survey Perpustnas RI melakukan penilaian terhadap Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam survey Kegemaran Membaca Masyarakat di Kab/Kota se- Provinsi Gorontalo, Sarana dan Prasarana penunjang perpustakaan Kab/Kota masih sangat minim.

6. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi pada tahun 2024. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo telah melakukan Perjanjian Kerja Sama Nomor 012/PKS-iArpusGorontalo/AM/VI/2024 pada tanggal 20 Juni 2024 dengan PT Woolu Aksara Maya tentang Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik ‘iArpusGorontalo’.

R. Urusan Kearsipan

R.1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo
 - Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Pemerintahan
 - Meningkatnya Budaya Literasi Masyarakat



b. Sasaran dan Program

Tabel 3.138
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kearsipan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Percepatan Reformasi Birokrasi	Indikator sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	92,81	109,18
		Nilai Sakip	70	76,86	109,8
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40%	40%	100
2	Sasaran : Percepatan Reformasi Birokrasi	Indikator Sasaran : Nilai Pengawasan Kearsipan	60,00	70,74	117,9
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Arsip	40%	40%	100
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	40%	40%	100
3.	Sasaran : Meningkatnya Kegemaran Membaca	Indikator Sasaran : Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	60	62,43	104,05
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan	50%	50%	100
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	50%	50%	100

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.139
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kearsipan
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran	Keu	Fisik		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program Pengelolaan Arsip	413.011.100	398.830.165	96,57	100	Sering bergantinya pengelola arsip di OPD, belum adanya honor pengelola arsip. Kurangnya arsiparis	SK Pengelola Arsip OPD, Anjab dan ABK Arsiparis
	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	319.456.425	309.646.650	96,93	100		
	Kegiatan Pengelolaan Arsip	93.554.675	89.183.515	95,33	100		



No	Program/Kegiatan	Pagu 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran	Keu	Fisik		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Statis Daerah Provinsi						
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	98.431.600	96.730.620	98,27	100	Kurang tenaga arsiparis dalam penelusuran arsip, Keterbatasan tempat penyimpanan arsip	Penambahan tenaga arsiparis, Pembangunan Depo Arsip
	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	58.837.500	58.567.220	99,54	100		
	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kab/Kota	39.594.100	38.163.400	96,39	100		
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.007.086.347	8.908.217.891	98,90	100	Kurangnya pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Pengadaan Sapras secara bertahap
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.339.171.983	7.252.655.166	98,82	100		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.198.602.064	1.192.649.225	99,50	100		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	231.398.850	230.897.578	99,78	100		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.913.500	182.892.700	97,33	100		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	49.999.950	49.123.222	98,25	100		
JUMLAH		9.518.529.047	9.403.778.676	98,79	100		

1) Program Pengelolaan Arsip

Outcome dari program adalah Pendampingan, Pengelolaan, dan Pengawasan Kearsipan disetiap OPD Provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Kab/Kota.



a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi

- Sub kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi.

Output sub kegiatan adalah Rapat Persiapan kegiatan, Sosialisasi, dan Bimtek Pengelolaan Arsip 150 orang (34 OPD Provinsi) dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab/Kota. Selain itu kami juga melakukan Pengawasan Arsip Internal (OPD Provinsi) dan Pengawasan Arsip Eksternal (Kab/Kota).

2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi

- Sub kegiatan Akuisisi Arsip Statis.

Output sub kegiatan adalah Rapat Kegiatan, Bimtek Arsip Statis 100 orang peserta lingkup OPD Provinsi Gorontalo dengan target 100 arsip statis dari OPD Provinsi Gorontalo harus diserahkan ke LKD. Tahun 2025 direncanakan akan melaksanakan Bimtek bagi Pengelola Arsip di SMA/SMK, Ormas, Orsospol yang menjadi kewenangan provinsi.

2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Outcome dari program adalah Sosialisasi kepada masyarakat tentang cara-cara perlindungan dan penyelamatan arsip khususnya bagi lokasi rawan bencana serta penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan dibubarkan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi.

- Sub kegiatan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan, dan Penyimpanan Akibat Bencana.

Output sub kegiatan adalah Sosialisasi penyelamatan arsip akibat bencana 100 orang di Kecamatan Tolinggula Kab. Gorontalo Utara yang merupakan lokasi rawan bencana banjir. Kegiatan ini kami lakukan bekerjasama dengan Pemerintah Kab. Gorontalo Utara, Dinas BPBD Provinsi dan Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kab/Kota.

- Sub kegiatan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi.

Output sub kegiatan adalah Bimtek bagi pengelola arsip OPD yang digabung/dibubarkan 50 orang, 100 Daftar arsip.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo.



- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output sub kegiatan adalah Pembayaran honor PTT 18 org, Pelaksanaan rapat, Pelayanan surat menyurat, pembayaran biaya operasional kantor.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output sub kegiatan adalah 3 Paket Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Pengadaan Instalasi Listrik Kantor Rp 100.000.000,- Pengadaan AC Rp 51.500.000,- Pengadaan Laptop 15.913.500,-
3. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.

Output sub kegiatan adalah 3 laporan Keuangan yaitu Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran.
4. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output sub kegiatan adalah 4 Dokumen Perencanaan yaitu Dokumen Lakip, Dokumen LPPD, Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, dan Dokumen Target dan Realisasi Anggaran.
5. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Output sub kegiatan adalah Pembayaran gaji dan tunjangan 53 orang ASN.

3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 3.140
 Kebijakan Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
1.	Penerapan Aplikasi SRIKANDI dalam proses surat menyurat. - Ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Gorontalo No.13 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip	Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang SPBE, Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, Peraturan ANRI No.4 Tahun 2021 Tentang Aplikasi SRIKANDI. - Peraturan Gubernur Gorontalo No.13 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip yang berlaku di Pemerintahan Daerah - Peraturan Gubernur No.42 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. - Instruksi Gubernur No.712 Tahun 2023 tentang Penggunaan Aplikasi SRIKANDI	Tujuannya penerapan arsip berbasis digital. Masalah yang diselesaikan yaitu pengurangan pemakaian kertas dalam pengelolaan arsip, pengadministrasian arsip secara digital, mengurangi tumpukan arsip



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang Diselesaikan
		dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo	

4. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 3.141

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kearsipan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Nilai SAKIP	70	76,86
2	Nilai Pengawasan Kearsipan	60,00	70,74

5. Hal-hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Indikator

- Jumlah Arsip Dinamis sebanyak 13.996 Arsip
- Jumlah Arsip Inaktif 10 Tahun sebanyak 11.000 Arsip
- Arsip Statis sejumlah 798 Arsip
- Arsip Foto sejumlah 321 Arsip
- Arsip Video / Film sebanyak 15 Arsip

Data Bidang Kearsipan yang diperoleh sampai dengan Tahun 2024.

3.2.3 Urusan Pilihan

A. Urusan Pertanian

A.1 Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo

- Tujuan dan Sasaran
 - Tujuan yang akan dicapai Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
 - Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
 - Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
 - Sasaran dan program

Tabel 3.142

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase (%)
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran : Meningkatkan Luas Tanam, Produksi, Produktivitas dan Populasi Komoditi Potensial bersumber dari pertanian yang ramah lingkungan dan berdampak pada kemandirian pangan	1) Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan :			



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase (%)
			Target	Realisasi	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi padi (0,2% Tahun) Ton	230.365	252.789	109,73
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas Padi (0,1%Thn) Ku/Ha	47,03	51,21	108,90
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteliner	Produksi Jagung (0,2% tahun) ton	754.783	1.501.353	198,91
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Produktivitas Jagung (0,1%Thn) Ku/Ha	45,38	49,98	110,13
	Program Penyuluhan Pertanian	Produksi Kedelai (0,1% tahun) ton	175,4	4.692	2.675,21
		Produktivitas Kedelai (0,1%Thn) Ku/Ha	13,00	14,01	107,79
		2) Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura :			
		Produksi Cabai (1.5 % thn) Ton	13.448	11211	83,37
		Produktivitas Cabai (1 %/Thn) Ton/ Ha	9,36	9,18	98,08
		Produksi Bawang Merah (1%/thn) Ton	458,90	193	42,06
		Produktivitas Bawang Merah (1%/Thn) Ku/Ha	43,70	2,83	6,48
		Penambahan Luas areal tanam buah-buahan (Ha)	110	117	106,36
		3) Produksi dan Produktivitas Perkebunan :			
		Luas Tanam Kelapa (ha)	70.017	70.129	100,16
		Produksi kelapa (0,2%/thn) Ton	62.115	65.827	105,98
		Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	1.361	1.429	105,00
		Luas Tanam Kopi (Ha)	1.529	1.405,0	91,89
		Produksi Kopi (0,2%/thn) ton	130,82	126	96,32
		Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	193,16	213	110,27
		Luas Tanam Kakao (Ha)	14.220	12.813	90,11
		Produksi Kakao (0,2%/thn) ton	3.457	1.931	55,86
		Produktivitas Kakao (Kg/Ha)	701,80	561	79,94
		Luas Tanam Cengkeh (Ha)	13.617	13.595	99,84
		Produksi Cengkeh (0,2%/thn) ton	1.009	1.065	105,55
		Produktivitas Cengkeh (kg/ha)	311	308	99,04
		4) Populasi Sapi (1.5% Tahun) Ekor	269.600	154.612	57,35
		5) Populasi Unggas (5%/Tahun) Ekor	2.604.210	851.914	32,71
		6) Populasi Kambing (2%/Tahun) Ekor	112.035	17.780	15,87
2	Sasaran : Meningkatnya Penataan Lembaga Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Perencanaan, Penetausahaan Keuangan dan Pengawasan				



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase (%)
			Target	Realisasi	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persebtase Peningkatan Penataan Lembaga, PenguatanManajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Kualitas Perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan (%)	100	100	100

Data Sementara Dinas Pertanian Tahun 2024

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.143
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pertanian
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	19.937.033.100	19.365.219.785	97,13	97,37		
	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	8.206.028.000	7.824.035.895	95,34	93,60		
	- Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	8.105.960.000	7.736.232.395	95,44	93,52	1. Adanya sisa anggaran pada pengadaan pengolahan tanah (Hand Traktor) karena pengadaannya melalui E-Katalog sektoral dimana harga satuannya dibawah dan dibandingkan dengan pengadaan melalui e-katalog local 2. Adanya sisa anggaran pada Pengadaan pekerjaan lantai jemur, dimana para pihak ketiga/penyedia mengajukan permintaan pembayaran harga 95% karena tidak dapat mengajukan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % karena waktu yang sudah tidak memungkinkan	1. Pelaksanaan kegiatan di laksana di awal-awal tahun terutama kegiatan fisik 2. Alatsintan yang tidak bisa di adakan oleh perusahaan lokal sehingga di alihkan ke pengadaan e-katalog sectoral.
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	100.068.000	87.803.500	87,74	100		
	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	4.479.811.600	4.422.415.154	98,72	100		
	- Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	3.636.949.600	3.581.637.784	98,48	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan (UPTD)	691.896.000	689.848.570	99,70	100		
	- Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	150.966.000	150.928.800	99,98	100		
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	171.822.000	171.348.000	99,72	100		
	- Sub Kegiatan Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	171.822.000	171.348.000	99,72	100		
	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	4.936.746.500	4.866.891.319	98,58	100		
	- Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	430.424.500	428.852.679	99,63	100	Penyebaran bantuan pakan ke pemohon bantuan tergantung dengan ketersediaan DOC yang diproduksi oleh UPTD-BPT Distan	Manajemen distribusi yang lebih efektif berdasarkan skala prioritas dari proposal yang diterima
	- Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	4.506.322.000	4.438.038.640	98,48	100	Merebaknya Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) saat berlangsungnya penyaluran bantuan Ternak Sapi	Mengisolasi dan Melakukan pemantauan secara rutin terhadap bantuan bibit ternak sapi yang sudah disalurkan diseluruh wilayah provinsi Gorontalo
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.142.625.000	2.080.529.417	97,10	100		
	- Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.142.625.000	2.080.529.417	97,10	100	Kebutuhan pakan ternak yam sangat dibutuhkan di awal tahun sehingga proses pengadaan harus dipercepat	Dengan metode pelaksanaan E-Katalog Lokal, dan Mengusulkan Etalase Produk Pakan ternak
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasnana Pertanian	3.806.832.000	3.763.614.331	98,86	100		
	Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	3.806.832.000	3.763.614.331	98,86	100		
	- Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	100.068.000	87.667.500	87,61	100		
	- Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (DAK)	3.706.764.000	3.675.946.831	99,17	100		
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.423.736.000	1.397.215.832	98,14	99,99		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	793.795.500	767.577.332	96,70	99,99		
	- Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	609.187.500,00	583.058.432	95,71	99,99	Vaksin dan obat obatan belum memenuhi kebutuhan dalam rangka pengendalian penyakit hewan menular seluruh wilayah provinsi gorontalo.	Mengajukan permohonan bantuan vaksin dan obat onbatan,logistik ke kementrian pertanian
	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis Pada Hewan	184.608.000,00	184.518.900	99,95	100	Banyaknya kasus kejadian penyakit hewan menular (PHM) di provinsi gorontalo	Melaksanakan kegiatan surveilans secara periodik
	Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	629.940.500	629.638.500	99,95	100		
	- Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	629.940.500	629.638.500	99,95	100	Belum terakreditasinya ruang lingkup pengujian lab keswan dan kesmavet; kurangnya sarana dan prasarana penunjang serta SDM laboratorium keswan dan kesmavet	Optimalisasi kinerja lab dan sarana prasana serta SDM Laboratorium keswan dan kesmavet
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	659.552.000	631.224.200	95,70	100		
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	659.552.000	631.224.200	95,70	100		
	- Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	531.984.000	505.912.000	95,10	100	Sisa honor tenaga ahli (Narasumber) Rp. 13.500.000,- dan sisa anggaran tenaga pembantu lapangan Rp. 8.177.000 banyaknya hari libur nasional	
	- Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	127.568.000	125.312.200	98,23	100	Sisa Honor PTT Rp. 2.054.000,- karena banyaknya hari libur nasional	
5	Program Penyuluh Pertanian	1.938.585.750	1.745.489.905	90,04	91,79		
	Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	202.568.000	202.289.610	99,86	99,98		
	- Sub Kegiatan Peningkatan dan Penyuluhan Pertanian	202.568.000	202.289.610	99,86	100		
	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.299.104.000	1.106.298.780	85,16	87,77		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	61.712.000	61.555.420	99,75	99,94		
	- Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (UPTD)	134.254.000	128.903.908	96,01	100	Masih kurangnya sarana prasarana pendukung kegiatan pelatihan melalui webinar dan pola e-learning untuk memenuhi jumlah peserta pelatihan diperlukan minimal 500 - 1000 partisipan namun yang tersedia berdasarkan anggaran yang ada hanya untuk 100 partisipan	1. Pemenuhan sarana prasarna pendukung kegiatan pelatihan melalui pola e-learning 2. Pemenuhan lisensi zoom pro+large meeting minimal 500 partisipan
	- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani (Readsi)	1.103.138.000	915.839.452	83,02	85,60	Bantuan alat perbenihan 3 Paket Rp. 150.000.000,- Tidak terealisasi karena keterlambatan surat Balasan Tindak Lanjut yang diterima oleh Provinsi, Penyedia tidak bersedia karena mengingat proses pengadaan yang pendek dan singkat dan Belum siapnya Kelompok tani untuk melakukan kontribusi dana sebesar 50% atau sebanyak Rp. 50.000.000,- /paket	Meminta untuk ada perpanjangan waktu untuk pelaksanaan kegiatan bantuan alat perbenihan.
	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	436.913.750	436.901.515	100,00	100		
	- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	436.913.750	436.901.515	100,00	100		
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40.788.588.894	39.793.461.184	97,56	99,96		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.243.835.960	1.177.655.243	94,68	99,77		
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	623.936.163	562.951.436	90,23	100		
	- Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	619.899.797	614.703.807	99,16	100		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.668.353.448	34.012.758.883	98,11	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.507.925.448	33.853.003.652	98,10	100	Sisa anggaran dari 7 pegawai yang pensiun dan 5 orang meninggal dunia	



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	160.428.000,00	159.755.231	99,58	100		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	458.277.000	458.267.500	100,00	100		
	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	458.277.000	458.267.500	100,00	100		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	708.620.200	702.314.334	99,11	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	708.620.200	702.314.334	99,11	100		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.709.502.286	3.442.465.224	92,80	99,65		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.034.834.611	1.873.683.685	92,08	99,60	1. Adanya aturan pembatasan penggunaan BBM dan penurunan harga BBM 2. Adanya fluktuasi beban listrik pada tahun berdasarkan tahun 2023 mengalami defisit (Hutang bebean) sehingga pada tahun 2024 anggaran listrik di naikkan. 3. Fluktuasi beban pembayaran air.	1. Mengikuti standar harga sesuai rekomendasi BPK 2. Menyesuaikan beban tertinggi pada tahun 2024 baik listrik maupun air
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BPPSBP)	405.926.000	403.661.334	99,44	100,00	Adanya aturan pembatasan penggunaan BBM dan penurunan harga BBM	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balintan)	428.300.500	364.905.846	85,20	100,00	Pemakaian listrik tergantung dari penggunaan alat laboratorium; Adanya aturan pembatasan penggunaan BBM dan penurunan harga BBM	optimalisasi pemanfaatan alat laboratorium; penyesuaian penggunaan BBM
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD LABVET)	191.674.500	178.400.058	93,07	100,00	Pemakaian listrik tergantung dari penggunaan alat laboratorium; Adanya aturan pembatasan penggunaan BBM dan penurunan harga BBM	optimalisasi pemanfaatan alat laboratorium; penyesuaian penggunaan BBM
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BPTP)	207.414.000	204.846.397	98,76	100,00	Adanya aturan pembatasan penggunaan BBM dan penurunan harga BBM Honor PTT 1.896.000 Karena Banyaknya hari libur nasional Belum terpenuhinya jabatan pelaksana administrasi	Pemenuhan jabatan pelaksana sesuai kebutuhan unit kerja



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
						keuangan dan perancang diklat.	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BPT)	441.352.675	416.967.904	94,47	100,00	Adanya aturan pembatasan penggunaan BBM dan penurunan harga BBM	penyesuaian penggunaan BBM
JUMLAH		68.554.327.744	66.696.225.237	97,29	98,98		

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Outcome dari program adalah :

- Rasio pemanfaatan sarana alsintan terhadap ketersediaan alsintan target 60% mencapai 100% dimana jumlah alsintan yang termanfaatkan sebanyak 1.106.
- Rasio ketersediaan benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan terhadap total benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan yang dibutuhkan Target 0.67 % mencapai 100% ketersediaan benih dilihat dari jumlah kebutuhan benih di tahun 2024. Dimana untuk jumlah bantuan benih sebanyak 76.129,66 Ha.
- Jumlah kelahiran ternak Target 11.6865. Capaian berada di angka 89% dimana jumlah kelahiran Pada tahun 2024 mencapai 10.112.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

- Sub kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian.

Output sub kegiatan :

- Telayaninya Pengolahan Tanah (Sawah) dikabupaten Gorontalo, Bone Bolango & Pohuwato sehingga ketepatan waktu tanam dapat dilakakukan sesuai dengan musin tanam 30 ha.
 - Tersalurnya motor sayur 8 unit di Kab Gorontalo dan Boalemo, kendaraan roda 3 sebanyak 1 unit di kabupaten gorontalo.
 - Tesedianya lantai jemur sebanyak 9 unit di Kab. Gorontalo, Boalemo, Gorontalo Utara.
 - Alat panen padi (pemangkas) 21 unit dikab gorut.
 - RMU 1 unit di Kab. Gorontalo Utara.
 - Pompa air 9 unit di Kab. Gorontalo, cultivator 6 unit Kab Gorontalo, power sprayer (piston) 2 unit Kab. Pohuwato, combine harvester 5 unit (Kab. Pohuwato, Kab. Gorontalo Utara dan Kab Gorontalo, Traktor roda 4 1 unit (Kab. Pohuwato) pupuk organik 1000 pack.
 - Alat penepung 1 unit di Kab. Gorontalo Utara.
 - Hand Sprayer sebanyak 1.128 unit di Kabupaten/Kota.
 - Traktor roda 2 sebanyak 20 unit di Kab Gorontalo, Kab. Pohuwato
- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian.



Output sub kegiatan adalah melakukan pertemuan rapat evaluasi dan koordinasi kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

2. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

- Sub kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan.

Output sub kegiatan adalah :

Tanaman Hortikultura :

- a) Tersedianya kebutuhan benih bermutu cabe 4 Ha dan tomat untuk 20 Ha.
- b) Tersedianya kebutuhan bibit Durian (Tersertifikasi) untuk 19,5 Ha
- c) Tersedianya kebutuhan bibit pisang untuk UMKM sebanyak 1.500 pohon
- d) Tersedianya kebutuhan benih semangka di Kabupaten Gorontalo seluas 7 Ha.

Tanaman Pangan :

- a) Tersedianya kebutuhan padi seluas 955 ha. (Kab. Pohuwato 10 ha, Kab. Boalemo 52,4 ha, Kab. Gorontalo Utara 32 ha, Kab. Gorontalo 768,8 ha, Kab. Bonebolango 57 ha, Kota Gorontalo 6 ha).
- b) Tersedianya kebutuhan benih jagung seluas 1469 ha. (Kab. Pohuwato 71 ha, Kab. Boalemo 212 ha, Kab. Gorontalo Utara 41,33 ha, Kab. Gorontalo 1.109,33 ha, Kab. Bonebolango 13 ha, Kota Gorontalo 23 ha.
- c) Tersedianya honor pengolah data statistik pertanian kabupaten/kota 15 Petugas.

Tanaman Perkebunan :

- a) Pengembangan Tanaman Cengkeh di Kab. Gorontalo Utara 5 Ha (tersertifikasi)
- b) Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit 16 Ha (tersertifikasi)
- c) Intensifikasi Tanaman Kakao (Sambung Samping) 5.000 pohon
- Sub kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan (UPTD).

Output sub kegiatan adalah Terlaksannya kegiatan Perbanyak benih Padi Sawah kelas BD 1 ha dan Kelas BP 2 ha, Bibit Durian Kelas BR 5000 Batang dan Bibit Cengkeh Kelas BR 3750 Butir.

- Sub kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih.

Output sub kegiatan adalah tersertifikasinya benih tanaman pangan 143 Sertifikat, tanaman hortikultura 45 sertifikat dan tanaman perkebunan 31 sertifikat.

3. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi.

- Sub kegiatan Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme

Output sub kegiatan adalah :

- a) Tersediannya data sebaran varietas sebanyak 201.408,17 Ha



- b) Data penilaian kelayakan pohon induk 451 pohon
 - c) Sertifikat tanda daftar varietas lokal 1 sertifikat Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.
 - 4. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.
 - Sub kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.
Output sub kegiatan adalah tersalurnya bantuan pakan sebesar 27.050 kg kepada kelompok penerima bantuan sebanyak 46 kelompok dan penerima perorangan sebanyak 114 orang Diseluruh wilayah kab/kota yang menyampaikan permohonan proposal.
 - Sub kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain.
Output sub kegiatan adalah tersalurkannya bantuan bibit ternak sapi sebanyak 400 ekor, Kambing 96 ekor.
 - 5. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi.
 - Sub kegiatan Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.
Output sub kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan pakan ternak di UPTD Balai Perbibitan Ternak dari Januari s/d Desember 2024 pakan ayam 67.093 Kg, Kosentrat sapi 26. 778.
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Outcome dari program adalah Rasio kebutuhan sumber-sumber air pertanian terhadap total ketersediaan sumber air Target 5,36 %.
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian.
 - Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani.
Output sub kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan di 6 kabupaten/kota.
 - Sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (DAK).
Output sub kegiatan adalah :
Tersediannya sarana pendukung perbenihan :
 - Green House 3 Unit
 - Jalan Produksi 1 Unit
 - Lantai Jemur 2 Unit
 - Gudang Penyimpanan Benih 1 Unit
 - Peralatan Laboratorium 1 Paket



- Jaringan Irigasi 1 Unit
- Sarana Pengairan Kebun Induk Hortikultura 2 Unit

3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Outcome daari program adalah :

- Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Target 67,17%. Tercapai 100% untuk Wilayah yang terkena dan dikendalikan untuk Rabies di 6 kabupaten kota, Antraks 3 Kabupaten dan PMK 6 Kabupaten kota.
- Persentase Penjaminan Pangan Asal Hewan (PAH) Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Target 100%. Terealisasi 100% dimana dari target sampel 1.220 terealisasi 6.560 sampel.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

- Sub kegiatan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Output sub kegiatan adalah :

- Tersedianya Obat-obatan Ternak 225 botol, vaksin rabies 3.000 dosis lengkap dengan sapras vaksinasi rabies, vaksin antraks 6.000 dosis.
- Terawasinya lalulintas hewan produk hewan dan media pembawa penyakit lainnya (HPM) di 4 pos cek poin perbatasan provinsi gorontalo.

- Sub kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis Pada Hewan.

Output sub kegiatan adalah terlaksananya surveilans di 6 kabupaten kota; tersediannya 1 unit alat USG hewan.

2. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan.

- Sub kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Output sub kegiatan adalah :

- Terlaksananya pengujian di labortorium keswan sejumlah 6.181 sampel.
- Terlaksananya pengujian di labortorium kesmavet sejumlah 379 sampel.

4) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Outcome dari program adalah Persentase Area Pertanian yang dikendalikan akibat serangan OPT dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) terhadap luas tanam target 5%. Tercapai 100% dimana untuk luasan areal yang dikendalikan seluas 13.446,30 Ha.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi.



- Sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Output sub kegiatan adalah :

- Terlaksananya kegiatan Diseminasi dan Workshop Trichoderma spesifik lokasi 1 kegiatan.
- Terlaksananya kegiatan Monitoring/evaluasi/supervisi kegiatan pengendalian OPT kabupaten/kota, pembinaan petugas POPT di Kabupaten kota.
- Sub kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Output sub kegiatan adalah : terlaksananya kegiatan monitoring penanganan DPI yang terdampak seluas 3.000 Ha di Kabupaten/Kota.

5) Program Penyuluhan Pertanian

Outcome dari program adalah :

- Persentase Kenaikan Jumlah SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya Target 0,02%. Terealisasi 100% dimana terdapat 241 orang meningkat kapasitasnya.
- Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya Target 0,05%. Terealisasi 100% dimana sebanyak 378 kelompok meningkat kapsitasnya.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.

- Sub kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Penyuluh Pertanian.

Output sub kegiatan adalah :

- Terlaksananya penilaian penyuluh pertanian teladan 13 orang.
- Insentif Koordinator 76 orang
- Honor THL TB PP 9 orang

2. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

- Sub kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.

Output sub kegiatan adalah terlaksananya koordinasi penyelenggaraan penyuluhan di Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango serta di 6 titik BPP (Limboto Barat, Asparaga, Tibawa, Bongomeme, Bone, Bulango Utara).

- Sub kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (UPTD).

Output sub kegiatan adalah :

- Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui pola e-Learning 41 orang penyuluh pertanian kabupaten dan kota.
- Terlaksananya pencapaian in formasi teknologi pertanian melalui pola webinar sebanyak 200 orang sudah bersertifikat.

- Sub kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani (Readsi).

Output sub kegiatan adalah :

- Knowledge Sharing Meeting 1 Paket
- Completion Meeting 1 Paket
- Pelatihan Penyegaran bagi Penyuluh 54 Orang
- Pelatihan bagi Penyuluh non pendamping READSI 54
- Rapat koordinasi sebanyak 3 paket

3. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani.

Output sub kegiatan adalah :

- Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi sebanyak 2 unit.
- Terlaksananya kegiatan Rembug Utama dan Pameran Expo KTNA 2024 serta sayembara logo dan maskot pelaksanaan penas
- Kegiatan Update dan Sinkronisasi Data Simluhtan yang terupdate di 5 Kabupaten dan 1 Kota.

6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Persentase Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.

- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Output sub kegiatan adalah :

- Terlaksananya rapat koordinasi dan sinkronisasi lingkup pertanian kabupaten kota sebanyak 1 kali.
- Terlaksananya rapat koordinasi lingkup dinas pertanian provinsi gorontalo 12 Kali pertemuan.
- Tersediannya dokumen perencanaan sebanyak 3 dokumen

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output sub kegiatan adalah :

- Terlaksananya rapat evaluasi kinerja perangkat daerah dinas pertanian tahun 2024 sebanyak 4 kali.
- Tersediannya dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 dokumen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Output sub kegiatan adalah jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.



- Output sub kegiatan adalah :

 - Terlaksananya Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
 - Terlaksananya Rekonsiliasi Data Laporan Tahunan
 - Jumlah dokumen penatausahaan dan laporan keuangan 1 Laporan

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Output sub kegiatan adalah Jumlah orang yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas aparatur pertanian 330 Orang.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output sub kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana kantor 1 paket.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output sub kegiatan adalah Jasa Peralatan kantor yang tersedia di 6 gedung bangunan (Bidang dan UPTD).

3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 3.144

Kebijakan Strategis Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Penataan dan Pengawasan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo	1) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2024 Tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah perlindungan peremuan dan anak, unit pelaksana tek nis daerah, penataan dan pengawasan alat mesin pertanian dan unit pelaksana teknis daerah 2) Menyelenggarakan layanan sistem dan metode standarisasi mutu, pengujian alsintan, pelaksanaan bimbingan teknis di bidang operasionalisasi, pemeliharaan dan pengujian alsintan, penataan alsintan, pelayanan peminjaman alsintan, pelayanan perbengkelan pelaksanaan pengawasan peredaran Alsintan.	- Terkelolanya pemanfaatan Alsintan Pra Panen dan Pasca Panen untuk petani dan kelompok tani - Efisiensi Biaya Produksi yang dikeluarkan petani - Sumber Restribusi (PAD) melalui peminjaman Alsintan



4.
Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Pertanian 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 3.145

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pertanian
Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 22024
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan :		
	• Produksi Padi (0,2% Tahun) Ton	230.365	252.789
	• Produktivitas Padi (0,1% Tahun) Ku/Ha	47,03	51,21
	• Produksi Jagung (0,2% Tahun) Ton	754.783	1.501.353
	• Produktivitas Jagung (0,1% Tahun) Ku/Ha	45,38	49,98
	• Produksi Kedelai (0,1% Tahun) Ton	175,4	4.692
	• Produktivitas Kedelai (0,1% Tahun) Ku/Ha	13,00	14,01
2	Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura :		
	• Produksi Cabai (1,5% Tahun) Ton	13.448	11.211
	• Produktivitas Cabai (1% Tahun) Ton/Ha	9,36	9,18
	• Produksi Bawang Merah (1%/Tahun) Ton	458,90	193
	• Produktivitas Bawang Merah (1%/Tahun) Ku/Ha	43,70	2,83
	• Penambahan Luas Areal Tanam Buah-Buahan (Ha)	110	117
3	Produksi dan Produktivitas Perkebunan :		
	• Luas Tanam Kelapa (Ha)	70.017	70.129
	• Produksi Kelapa (0,2%/Tahun) Ton	62.115	65.827
	• Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	1.361	1.429
	• Luas Tanam Kopi (Ha)	1.529	1.405
	• Produksi Kopi (0,2%/Tahun) Ton	130,82	126
	• Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	193,16	213
	• Luas Tanam Kakao (Ha)	14.220	12.813
	• Produksi Kakao (0,2%/Tahun) Ton	3.457	1.931
	• Produktivitas Kakao (Kg/Ha)	701,80	561
	• Luas Tanam Cengkeh (Ha)	13.617	13.595
	• Produksi Cengkeh (0,2%/Tahun) Ton	1.009	1.065
	• Produktivitas Cengkeh (Kg/Ha)	311	308
4	Populasi Sapi (1.5%/Tahun) Ekor	269.600	154.612
5	Populasi Unggas (5%/Tahun) Ekor	2.604.210	851.914
6	Populasi Kambing (2%/Tahun) Ekor	112.035	17.780

5.
Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

Piagam Penghargaan Oleh Kepala Badan PPSDMP Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas Keberhasilan Sebagai Satker Dana Dekonsentrasi dengan Kinerja Anggaran Terbaik I Periode Semester II Tahun 2024 Kategori Anggaran 1 s.d 5 Miliar (APBN).



B. Urusan Kelautan dan Perikanan

B.1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
- a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo

 - Meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
 - Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian.
 - Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.
- b. Sasaran dan Program

Tabel 3.146
 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Tercapainya produksi kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan nelayan dan Pembudidaya.	Indikator Sasaran : Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	137.260 ton	138.310 ton	100,76%
		Pendapatan Nelayan (Rp./bln)	4.665.662 Rp./bln	4.671.510 Rp./bln	100,13%
		Produksi perikanan budidaya ikan laut dan payau (Ton)	55.875 ton	55.879 ton	100,03%
		Produksi benih ikan laut dan payau yang dihasilkan (Juta/ekor)	36 juta / ekor	36,1 juta/ ekor	100,27%
		Pendapatan pembudidaya ikan laut dan payau (Rp/bln)	4.453.677 Rp./bln	4.455.571 Rp./bln	100,04%
		Produksi Garam	576 ton	576,2 ton	100,03%
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (Ton)	137.260 ton	138.310 ton	100,76%
		Pendapatan Nelayan (Rp./bln)	4.665.662 Rp./bln	4.671.510 Rp./bln	100,13%
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya ikan laut dan payau serta rumput laut (Ton)	55.875 ton	55.879 Ton	100,03%
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD BPBLP)	Produksi benih ikan laut dan payau yang dihasilkan (Juta/ekor)	36 juta / ekor	36,1 juta / ekor	100,27%
		Pendapatan pembudidaya ikan laut dan payau (Rp/bln)	4.453.677 Rp./bln	4.455.571 Rp./bln	100,04%
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Produksi Garam	576 ton	576,2 ton	100,03%
2	Sasaran : Tersedianya bahan pangan kelautan dan perikanan untuk peningkatan konsumsi ikan bagi masyarakat	Indikator Sasaran : Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	100 %	100 %	100 %
		Luas kawasan konservasi perairan daerah yang di kelola (Ha)	4.364 Ha	4.364 Ha	100 %



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	100 %	100 %	100 %
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Luas kawasan konservasi perairan daerah yang di kelola (Ha)	4.364 Ha	4.364 Ha	100 %
3	Sasaran : Terwujudnya industri hilir (industri pengolahan dan pemasar) di sektor kelautan dan perikanan yang berdaya saing untuk pemenuhan ekspor/antar pulau sehingga meningkatkan pendapatan pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan	Indikator Sasaran : Nilai konsumsi Ikan	68,69 kg/kapt/thn	68,88 kg/kapt/thn	100,28%
		Pendapatan pengolah dan pemasar hasil perikanan	4.588.516Rp./bln	4.597.543Rp./bln	100,20%
		Produksi ikan yang di antar pulau/daerah/ekspor	4.522 Ton	4.688 Ton	103,67%
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapt/thn)	68,69 kg/kapt/thn	68,88 kg/kapt/thn	100,28%
		Pendapatan Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Rp./bln)	4.588.516,-Rp./bln	4.597.543,-Rp./bln	100,20%
		Produksi ikan yang di antar pulau/daerah atau ekspor (Ton)	4.522 Ton	4.688 Ton	103,67%
4	Sasaran : Penguatan akuntabilitas kinerja sektor kelautan dan perikanan	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP OPD	BB	A	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	A	

Catatan: * Capaian Kinerja masih bersifat sementara

2. Program dan Kegiatan

Alokasi Anggaran APBD dan APBD-P TA. 2024 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo sejumlah **Rp. 38.484.456.600,-** yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 11.694.408.510,-** (berupa belanja gaji dan tunjangan pegawai yang dialokasikan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo) dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 26.790.048.090,-**

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Urusan Kelautan dan Perikanan (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo) pada tahun 2024 memperoleh alokasi belanja langsung dana APBD dengan jumlah sebesar **Rp. 38.484.456.600,-** terbilang (*tiga puluh delapan milyar empat ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah*) dengan rata-rata capaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,32% (**Rp. 37.452.202.782**), dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut :



Tabel 3.147

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.088.053.681	17.539.771.719	96,97	100	-	-
a.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	972.145.474	969.610.973	99,74	100	-	-
	- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	664.560.324	663.660.870	99,86	100	-	-
	- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	307.585.15	305.950.103	99,47	100	-	-
b.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.694.408.510	11.535.626.738	98,64	100	-	-
	- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.267.778.110	11.109.700.809	98,60	100	-	-
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	426.630.400	425.925.929	99,83	100	-	-
c.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	281.199.000	279.677.000	99,46	100	-	-
	- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	281.199.000	279.677.000	99,46	100	-	-
d	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.163.711.525	1.144.191.645	98,32	100	-	-
	- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.163.711.525	1.144.191.645	98,32	100	-	-
e	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.976.589.172	3.610.665.363	90,80	100	-	-
	- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.976.589.172	3.610.665.363	90,80	100	-	-



No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	10.459.109.180	10.101.785.127	96,58	100	-	-
a	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	4.017.472.000	3.979.067.040	99,04	100	-	-
	- Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.878.168.000	3.840.842.340	99,04	100	-	-
	- Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	139.304.00	138.224.700	99,23	100	-	-
b	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	129.432.200	128.894.180	99,58	100	-	-
	- Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	76.716.000	76.587.500	99,83	100	-	-
	- Sub kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampaidengan 30 GT	52.716.200	52.306.680	99,22	100	-	-
c	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	4.017.472.000	3.979.067.040	99,04	100	-	-
	- Sub kegiatann Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	3.878.168.000	3.840.842.340	99,04	100	-	-
	- Sub kegiatan Penyediaan Data dan	139.304.000	138.224.700	99,23	100	-	-



No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Informasi Sumber Daya Ikan						
d	Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (UPTD PP Tenda, UPTD PP Gentuma, UPTD PP Tilamuta)	6.312.204.980	5.993.823.907	94,96	100	-	-
	- Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD PP Tenda, UPTD PP Gentuma, UPTD PP Tilamuta)	5.918.395.989	5.661.354.120	96,28	100	-	-
	- Sub kegiatan Pelaksanaan fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan (UPTD PP Tenda, UPTD PP Gentuma, UPTD PP Tilamuta)	393.808.991	332.469.787	91,85	100	-	-
3.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	781.628.350	730.206.440	93,42	100	-	-
a	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	781.628.350	730.206.440	93,42	100	-	-
	- Sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	134.038.000	130.318.600	97,23	100	-	-
	- Sub kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	542.181.000	495.691.500	91,43	100	-	-
	- Sub kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	105.409.350	104.196.340	98,85	100	-	-
4.	Program Pengelolaan	2.377.390.189	2.358.972.717	99,23	100	-	-



No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Perikanan Budidaya						
a	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	69.804.600	69.587.500	99,69	100	-	-
	- Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	69.804.600	69.587.500	99,69	100	-	-
b	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	2.307.585.589	2.289.385.217	99,21	100	-	-
	- Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Bidang dan UPTD BPBLP)	1.718.732.289	1.700.909.217	99,15	100	-	-
	- Sub kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	588.853.300	588.476.000	99,68	100	-	-
5.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	4.107.988.550	4.071.765.686	99,12	100	-	-
a	Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2.922.868.550	2.891.199.186	98,92	100	-	-



No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	2.922.868.550	2.891.199.186	98,92	100	-	-
b	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.185.120.000	1.180.566.500	99,62	100	-	-
	- Sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.185.120.000	1.180.566.500	99,62	100	-	-
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.670.286.650	2.649.701.093	99,23	100	-	-
a	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	48.707.950	48.593.380	99,76	100	-	-
	- Sub kegiatan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (Satu) Daerah Provinsi	48.707.950	48.593.380	99,76	100	-	-
b	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	551.581.800	550.428.768	99,79	100	-	-
	- Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang	551.581.800	550.428.768	99,79	100	-	-



No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing (Bidang dan UPTD)						
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.069.996.900	2.050.678.945	99,07	100	-	-
	- Sub kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.069.996.900	2.050.678.945	99,07	100	-	-
Jumlah		38.484.456.600	37.452.202.782	97,32	100	-	-

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Gorontalo Tahun 2024, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan beberapa program dan kegiatan APBD. Program/kegiatan tersebut antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Output kegiatan adalah* terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan selama 1 (satu) tahun. Tersusunnya dokumen Laporan Monev Program/Kegiatan Tahun 2024 sebanyak 6 Dokumen yaitu 1) Dokumen LAKIP, 2) LPPD, 3) LKPJ, 4) Laporan Realisasi Kegiatan, 5) Laporan Monev DAK, dan 6) Laporan Evaluasi Renja).
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Output kegiatan adalah* : 1) tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo sebanyak 88 orang selama 12 bulan, 2) Terciptanya Pelayanan administrasi keuangan yang Prima dan



profesional selama 12 bulan dan tersusunnya dokumen Laporan Keuangan sebanyak 1 (satu) Dokumen.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Output kegiatan adalah Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Melalui Bimbingan Teknis / Diklat Teknis dan pembinaan ASN.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output kegiatan adalah pelayanan administrasi berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output kegiatan adalah pelayanan administrasi berupa penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam pelayanan administrasi perkantoran selama 12 (dua belas) bulan.

2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil.

- Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

Output kegiatan adalah tersedianya Sarana Mesin Tempel 15 PK sebanyak 55 unit dan sudah diserahkan kepada pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten/Kota, dengan rincian alokasi penerima sebagai berikut : 1) Kota Gorontalo sebanyak 10 Unit

2) Kabupaten Gorontalo sebanyak 6 Unit

3) Kabupaten Boalemo sebanyak 8 Unit

4) Kabupaten Pohuwato sebanyak 6 Unit

5) Kabupaten Bone Bolango sebanyak 3 unit

6) Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 22 unit.

Untuk alokasi bantuan kapal 5 GT dengan mesin dalam 55 HP yang sudah disalurkan kepada pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten/Kota tahun 2024 sebanyak 3 unit dan 1 unit Alat tangkap jaring Pajeko, dengan rincian alokasi penerima kapal 5 GT dengan mesin dalam 55 HP sebagai berikut :

1) Kabupaten Bone Bolango sebanyak 3 Unit

2) Kabupaten Boalemo sebanyak 1 Unit Alat tangkap jaring Pajeko

2. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.



- Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT.
- Sub kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT.

Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Penerbitan Izin Kapal, Andon dan STKA, sosialisasi perizinan implementasi pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 M, gerai fasilitasi penerbitan izin sampai dengan 10 GT, jasa tenaga pelayanan umum, perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi pusat dalam rangka penerbitan izin kapal, perjalanan dinas Koordinasi MOU Andon di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Selain itu, perjalanan dinas dalam rangka cek fisik kapal perikanan, sosialisasi perizinan implementasi pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 M, Verifikasi Penerbitan Izin kapal Perikanan, Verifikasi Penerbitan Izin Kapal Perikanan yang ada di Kabupaten/Kota.

3. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil.
 - Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
 - Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan.

Output kegiatan adalah terlaksananya Rapat Evaluasi Pemanfaatan Asuransi Nelayan dan Sertifikat Hak Tanah (SEHAT) Nelayan sebanyak 1 kegiatan, pelaksanaan Sinkronisasi Data Statistik Perikanan Tangkap sebanyak 1 kegiatan, pelaksanaan sosialisasi Perizinan dan Implementasi Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai 12 Mil sebanyak 1 kegiatan, Alat Tulis Kantor (ATK) sebanyak 1 paket Untuk Penerbitan Izin Kapal, Andon kapal, STKA, Komputer Supplies sebanyak 1 paket Untuk Penerbitan Izin Kapal, Andon, STKA, Penerbitan Izin Kapal, Andon, STKA, Rapat Evaluasi Penerapan Log Book Tk. Provinsi sebanyak 1 kegiatan, Jasa Narasumber/Tenaga Ahli, untuk kegiatan operasional selama 1 tahun, Jasa Tenaga Pelayanan Umum untuk 3 orang, dan perjalanan dinas dalam kota dan biasa terkait dengan kegiatan koordinasi dan konsultasi dibidang pengelolaan sumber daya ikan selama 1 tahun.

4. Kegiatan Penetapan Lokasi pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda, UPTD PPI Gentuma dan UPTD PPI Tilamuta).
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan.
 - Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan.

Output kegiatan adalah terlaksananya Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan pada 3 (tiga) UPTD Pelabuhan



Perikanan dengan rincian aktivitas kegiatan antara lain: ATK Pelayanan Kepelabuhanan sebanyak 1 paket, Rapat Kegiatan Pelayanan Kepelabuhanan sebanyak 1 paket, Jasa Tenaga Pelayanan Umum selama 1 tahun, Tagihan Listrik Pabrik Es dan Cool Storage selama 1 tahun dan perjalanan dinas dalam kota dan biasa dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan fungsi pelabuhan perikanan selama 1 tahun.

3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

- Sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil.
- Sub kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil.

Output kegiatan adalah terfasilitasinya BBM dan Pelumas kapal pengawas selama 1 tahun, terlaksananya operasi pengawasan ruang laut sampai dengan 12 mil selama 1 tahun, terfasilitasinya perjalanan dinas dalam kota dan biasa dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan fungsi pelabuhan perikanan selama 1 tahun.

4) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.

- Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut.

Output kegiatan adalah terfasilitasinya ATK untuk menunjang operasional kegiatan selama 1 tahun, terfasilitasinya perjalanan dinas dalam kota selama 1 tahun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat (Bidang dan UPTD BPBLP).

- Sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Output kegiatan adalah terfasilitasinya ATK untuk menunjang operasional kegiatan selama 1 tahun, terfasilitasinya bahan obat- obatan, vitamin dan



probiotik untuk menunjang operasional balai selama 1 tahun, terfasilitasinya pakan induk udang vaname selama 1 tahun, terfasilitasinya jasa penunjang tenaga pelayanan umum untuk 1 tahun dan terfasilitasinya perjalanan dinas dalam kota untuk menunjang pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun.

5) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.

- Sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat.

Output kegiatan adalah terlaksananya pembinaan dan monev kelompok masyarakat konservasi selama 1 tahun, Peralatan Monitoring Kawasan Konservasi (Alat Selam) (DAK) sebanyak 1 paket, dan Perjalanan Dinas Dalam Kota selama 1 tahun.

2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

- Sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Output kegiatan adalah terlaksananya kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat sebanyak 1 paket, Percontohan Pembangunan Rumah Tunnel Garam sebanyak 1 paket, Penunjang DAK Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat sebanyak 1 paket dan Jasa Tenaga Penunjang Pada Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 2 orang, Identifikasi dan Supervisi serta Pengawasan ke Kab/Kota Pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat (DAK) sebanyak 1 kegiatan selama 1 tahun.

6) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

- Sub kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah Jumlah Pelaku Pemasar yang terfasilitasi sarana roda dua motor bercoolbox (Pedagang Ikan Bersepeda dan Penunjang Program SLIN) sebanyak 69 orang, pedagang ikan yang terfasilitasi bantuan motor bercoolbox yaitu : Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Sistem Logistik Ikan Nasional, Pengumpulan Data Logistik Hasil Perikanan, Verifikasi Calon Penerima Bantuan, Pelayanan dan Pendampingan Bantuan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Pengadaan Sarana Pemasaran Program Sistem Logistik Ikan (bantuan motor bercoolbox (69 unit). Rincian

alokasi penerima bantuan motor bercoolbox yang tersebar di kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut :

- Kota Gorontalo sebanyak 6 Unit
- Kabupaten Gorontalo sebanyak 27 Unit
- Kabupaten Boalemo sebanyak 6 unit
- Kabupaten Pohuwato sebanyak 7 unit
- Kabupaten Bone Bolango sebanyak 17 unit
- Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 6 Unit

2. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

- Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi/Konsultasi ke Pusat (kegiatan Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan / Good Manufacture Practise), terfasilitasinya alat tulis kantor (ATK) sebagai operasional penunjang kegiatan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan.

3. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (Bidang & UPTD BP2MDPP).

- Sub kegiatan Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing.
- Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar.

Output kegiatan adalah terlaksananya bantuan bahan baku ikan untuk pencegahan stunting untuk ibu hamil dan menyusui (KEK) yang tersebar di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 100 orang, terlaksananya bantuan bahan baku ikan untuk LKSA sebanyak 38 LKSA dengan rincian sebagai berikut :

- Kota Gorontalo sebanyak 9 LKSA
- Kabupaten Gorontalo sebanyak 11 LKSA
- Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 5 LKSA
- Kabupaten Boalemo sebanyak 1 LKSA
- Kabupaten Pohuwato sebanyak 4 LKSA
- Kabupaten Bone Bolango sebanyak 8 LKSA

3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan



Kebijakan strategis yang ditetapkan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Tabel 3.148
 Kebijakan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

NO .	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Bantuan Kapal Perikanan 5 GT dengan mesin dalam 55 HP (4 Unit)	Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 228 / 24 / VI / 2024 tentang Pemberian hibah barang kepada Koperasi Nelayan melalui program perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	Mendukung ketahanan pangan, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap, meningkatkan pendapatan nelayan, alih teknologi sekaligus menumbuhkan semangat wirausaha, kemandirian dan daya saing pada kegiatan penangkapan ikan.
2	Bantuan Mesin Tempel 15 PK (sebanyak 45 Unit)	Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 327 / 24 / VIII / 2024 dan Nomor: 501 / 24 / XII / 2024 tentang pemberian hibah barang atau jasa kepada masyarakat nelayan melalui program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2024.	Mendukung ketahanan pangan, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap, meningkatkan pendapatan nelayan, alih teknologi sekaligus menumbuhkan semangat wirausaha, kemandirian dan daya saing pada kegiatan penangkapan ikan.
3	Bantuan Coolbox (sebanyak 62 unit)	Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 535 / 24 / XII / 2024 tentang Pemberian hibah barang berupa Coolbox kepada masyarakat melalui program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024.	Mendukung sistem logistik ikan dan peningkatan konsumsi ikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana pemasaran produksi perikanan bagi pedagang ikan.
4	Bantuan bercoolbox Motor bagi pedagang ikan (sebanyak 69 unit)	Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 511 / 24 / XII / 2024, Nomor: 272 / 24 / VII / 2024 dan Nomor: 446 / 24 / XI / 2024 tentang Pemberian hibah barang berupa motor bercoolbox kepada masyarakat melalui program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2024.	Mendukung sistem logistik ikan dan peningkatan konsumsi ikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana pemasaran produksi perikanan bagi pedagang ikan.
5	Bantuan bahan baku ikan untuk pencegahan Stunting (sebanyak 100 paket)	Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 93 / 24 / II / 2024 tentang Pemberian bantuan bahan baku ikan untuk pencegahan stunting untuk ibu hamil dan menyusui (KEK) melalui program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	Mendukung peningkatan konsumsi ikan serta pencegahan stunting
6	Bantuan bahan baku ikan untuk LKSA (sebanyak 38 LKSA)	Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor: 120 / 24 / III / 2024 tentang Pemberian Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga melalui program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2024	Mendukung peningkatan konsumsi ikan bagi anak-anak yang tinggal di lembaga kesejahteraan sosial (LKSA)
7	Dokumen perencanaan Terumbu Karang	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 27	Menciptakan solusi jangka panjang yang dapat mengatasi permasalahan yang ada dan memastikan kelestarian



NO .	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2020 tentang Pemantauan dan Pengelolaan Ekosistem Laut, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo tentang Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir. Dasar hukum perencanaan data spasial sebaran terumbu karang di kawasan Teluk Gorontalo melibatkan berbagai peraturan yang berfokus pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem laut, pengelolaan ruang pesisir, serta konservasi sumber daya alam	ekosistem terumbu karang yang sangat vital bagi keberlanjutan lingkungan dan ekonomi masyarakat yang bergantung padanya

4. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024.

Tabel 3.149

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2024	
		Target	Realisasi
1	NTN-Pi	97,82 indeks	97,74 indeks
2	Produksi perikanan Tangkap (ton)	137.260 ton	138.310 ton
3	Pendapatan Nelayan (Rp./bln)	4.665.662 Rp./bln	4.671.510 Rp./bln
4	Produksi perikanan budidaya ikan laut dan payau (Ton)	55.875 ton	55.879 ton
5	Produksi benih ikan laut dan payau yang dihasilkan (Juta/ekor)	36 juta / ekor	36,1 juta / ekor
6	Pendapatan pembudidaya ikan laut dan payau (Rp/bln)	4.453.677 Rp./bln	4.455.571 Rp./bln
7	Produksi Garam	576 ton	576,2 ton
8	Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)	100 %	100 %
9	Luas kawasan konservasi perairan daerah yang di kelola (Ha)	4.364 Ha	4.364 Ha
10	Nilai konsumsi Ikan	68,69 kg/kapt/thn	68,88 kg/kapt/thn
11	Pendapatan pengolah dan pemasar hasil perikanan	4.588.516,-Rp./bln	4.597.543,-Rp./bln



12	Produksi ikan yang di antar pulaukan / daerah / ekspor	4.522 Ton	4.688 Ton
13	Nilai SAKIP OPD	B	A

5. Hal-hal lain yang perlu disampaikan.

Dari total pagu anggaran tahun 2024 Rp. 38.484.456.600, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) senilai Rp. 1.032.253.818 yang dirinci sebagai berikut :

1) Program penunjang urusan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Pada sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor antara lain Bahan Bakar Minyak (UPTD PP GENTUMA) dan Pelumas senilai Rp. 6.293.000, Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (UPTD PP TENDA) senilai Rp. 5.206.000, Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (UPTD BP2MDPP) senilai Rp. 3.338.000.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan) yang terdiri dari Bahan Bakar Minyak dan Pelumas senilai Rp. 28.270.200, Tagihan Air senilai Rp. 14.723.234, tagihan listrik senilai Rp. 49.867.526, jasa internet senilai Rp. 6.574.380, Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp. 14.738.820 dan Perjalanan Dinas Biasa senilai Rp. 4.389.868. Selanjutnya, sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PP TENDA) antara lain Tagihan Air senilai 8.171.352, Tagihan Listrik senilai Rp. 8.131.820 dan Tagihan Listrik Operasional Pabrik Es senilai Rp. 44.684.449., Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BP2MDPP) yang terdiri dari Jasa Tenaga Pelayanan Umum senilai Rp. 4.060.000, Tagihan Listrik senilai Rp. 11.422.827., Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PP GENTUMA) antara lain Tagihan Listrik senilai Rp. 14.435.458, Perjalanan Dinas Biasa senilai Rp. 3.217.501., Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD PP TILAMUTA) antara lain Bahan Bakar Minyak dan Pelumas senilai Rp. 2.706.000, Tagihan Air senilai Rp. 8.287.022, Tagihan Listrik senilai Rp. 32.966.208., Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD BPBLP) yang terdiri dari Jasa Tenaga Pelayanan Umum senilai Rp. 10.450.000, Tagihan Air senilai Rp. 23.382.340, Tagihan Listrik senilai Rp. 62.278.827.

c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN antara lain Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp. 124.345.266 dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS senilai Rp. 33.732.035.

2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

a. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat.

- Pada sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Jasa Tenaga Administrasi senilai Rp. 16.800.000.
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil.
 - Pada sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap antara lain Pengadaan Mesin Tempel 15 PK (E - Katalog) senilai Rp. 23.405.000, Pengadaan Mesin Tempel 15 PK (APBD-P) senilai Rp. 6.600.400, Pengadaan Mesin Tempel 15 PK senilai Rp. 4.938.400.
 - b. Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi.
 - Pada sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan antara lain Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Drainase Kawasan UPTD PP Tenda (DAK) senilai Rp. 12.682.540, Rehabilitasi Cold Storage PP Tilamuta (DAK) (UPTD PP Tilamuta) senilai Rp. 8.112.050, Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Drainase Kawasan Pelabuhan Perikanan Tilamuta (DAK) senilai Rp. 11.161.498, Fasilitas Instalasi Air Bersih (Tawar) Pelabuhan Perikanan Tilamuta (DAK) senilai Rp. 4.055.550, Lanjutan Pembangunan Dermaga Bongkar (PP Gentuma) senilai Rp. 204.180.187, Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Drainase Kawasan Pelabuhan Perikanan Gentuma (DAK) senilai Rp. 10.528.316.
 - Pada sub kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan antara lain Pemasangan Instalasi Daya Pabrik Es (APBD-P) (UPTD PP TENDA) senilai Rp. 58.460.715.
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.
 - Pada sub kegiatan Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi antara lain Pengadaan Sarana Pemasaran Ikan (Motor bercoolbox) senilai Rp. 5.900.000, Pengadaan Sarana Pemasaran Ikan (Motor bercoolbox)-APBD-P senilai Rp. 12.610.000.
- 5) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- a. Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.
 - Pada sub kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat antara lain Pengadaan Speedboat Kawasan Konservasi (DAK) senilai Rp. 29.550.000.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.



- Pada sub kegiatan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antara lain Geo membran Lahan Garam (DAK) Rp. 3.160.000.
- 6) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.
- Pada sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil antara lain Jasa Tenaga ABK Kapal Pengawas Perikanan senilai Rp. 3.170.000.
 - Pada sub kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) antara lain Pengadaan Perahu POKMASWAS (DAK) senilai Rp. 15.100.000 dan Insentif POKMASWAS senilai Rp. 30.450.000.
6. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

Tabel 3.150

Penghargaan nasional yang diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024

N o	Nama penghargaan	Tgl/bln/thn pemberian penghargaan	Pemberi penghargaan	Skala (internasional/ nasional)	Tingkatan/ juara ke	Keterangan (penghargaan diberikan terkait apa)	Foto sertifikat/piagam / piala
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Produsen Data Kolaboratif dan Responsif dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	18 September 2024	Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo	Skala Provinsi	-	Sebagai Produsen Data Kolaboratif dan Responsif dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
2.	Kategori Implementasi Proses Bisnis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024	26 September 2024	BPS Provinsi Gorontalo	Skala Provinsi	Terbaik I	Sebagai Kategori Implementasi Proses Bisnis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024	
3.	Hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan periode bulan Agustus 2024	07 Desember 2024	DJPT Kementerian Kelautan Perikanan	Skala Nasional	Baik	Untuk hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan periode bulan Agustus 2024	



N o	Nama penghargaan	Tgl/bln/thn pemberian penghargaan	Pemberi penghargaan	Skala (internasional/ nasional)	Tingkatan/ juara ke	Keterangan (penghargaan diberikan terkait apa)	Foto sertifikat/ piagam / piala
4.	Hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan periode bulan November 2024	07 Desember 2024	DJPT Kementerian Kelautan Perikanan	Skala Nasional	Baik	Untuk Hasil penilaian evaluasi kinerja Pelabuhan Perikanan periode bulan	

7. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo pada tahun 2024.

Objek perjanjian Kerjasama ini adalah andon penangkapan ikan. Pelaksanaan perjanjian Kerjasama meliputi 36 (tiga puluh enam) jumlah kapal Andon :

- 1) Alat penangkap ikan (API) dan alat bantu penangkapan ikan
- 2) Jumlah dan ukuran kapal yang diizinkan
- 3) Jumlah anak buah kapal (ABK)
- 4) Tempat pendaratan ikan
- 5) Persentase ikan hasil tangkapan yang didaratkan
- 6) Monitoring dan evaluasi

Tabel 3.151
Kapal Yang Telah Memiliki Surat Tanda Keterangan ANDON (STKA)

Nama Kapal	Nomor dan Tanggal STKA	Nomor SIPI dan GT Kapal	Alat Tangkap	Daerah Tujuan
KM. FRIMA SURYA BAHARI	ST08007/7598/2023	45.22.7598.03.00046	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	06/01/2023	26 GT		
F3-02	ST08015/7598/2023	45.23.7597.03.00002	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DKP PROVINSI SULAWESI TENGAH
	09/01/2023	18 GT		
ELGIBOR	ST08045/7597/2023	45.22.7597.03.00077	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	12/01/2023	24 GT		
ALS 01	ST08044/7597/2023	45.23.7597.03.00005	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	13/01/2023	30 GT		
FRIMA EXPRES	ST08052/7597/2023	45.22.7597.03.00007	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	16/01/2023	29 GT		
PUTRA LAUT MX	ST08049/7597/2023	45.22.7597.03.00002	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	16/01/2023	20 GT		
SINAR LAUT	ST08057/7597/2023	45.23.7597.03.00009	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DKP PROVINSI SULUT
	18/01/2023	23 GT		



Nama Kapal	Nomor dan Tanggal STKA	Nomor SIPI dan GT Kapal	Alat Tangkap	Daerah Tujuan
BERKAH ANUGERAH 01	ST08117/7597/2023	45.23.7597.03.00016	Pukat cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal	DKP PROVINSI SULUT
	27/01/2023	29 GT		
PUTRI KEMBAR	ST08123/7597/2023	45.23.7597.03.00013	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DKP PROVINSI SULUT
	30/01/2023	18 GT		
SINAR MODELOMO	ST08146/7597/2023	45.23.7597.03.00014	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DKP PROVINSI SULUT
	30/01/2023	19 GT		
BONANZA STAR	ST08165/7597/2023	45.22.7598.03.00070	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULUT
	02/02/2023	22 GT		
NELAYAN 2017-957	ST08278/7597/2023	45.23.7597.5263.00020	Pancing Ulur Tuna	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	08/02/2023	25 GT		
SAHABAT-04	ST08279/7597/2023	45.22.7597.58.00068	Huhate	DPMPTSP PROVINSI SULUT
	08/02/2023	27 GT		
DENIS MANDIRI	ST08347/7597/2023	45.22.7597.03.00027	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULUT
	15/02/2023	27 GT		
KM. RR MINA GEMILANG	ST08472/7597/2023	45.23.7597.5267.00022	Pukat cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal	DKP PROVINSI SULUT
	23/02/2023	26 GT		
MANGGUNG JAYA 07	ST08532/7597/2023	45.23.7597.03.00028	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DKP PROVINSI SULUT
	27/02/2023	26 GT		
KM. ANDRA JAYA	ST08566/7597/2023	45.22.7597.56.00051	Pancing Ulur	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	28/02/2023	8 GT		
INKA MINA 928	ST08576/7597/2023	45.22.7597.03.00016	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	01/03/2023	30 GT		
KM. FRIMA JAYA	ST08877/7597/2023	45.22.7597.03.00082	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	14/03/2023	17 GT		
KM. NELAYAN 2016 120	ST09003/7597/2023	45.23.7597.5263.00039	Pancing Ulur Tuna	DKP PROVINSI SULUT
	20/03/2023	13 GT		
KM. NELAYAN 2016 51	ST09035/7597/2023	45.23.7597.5263.00036	Pancing Ulur Tuna	DKP PROVINSI SULUT
	21/03/2023	26 GT		
TIMUR JAYA 306	ST09198/7597/2023	45.22.7597.5267.00073	Pukat cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULUT
	29/03/2023	22 GT		
SAHABAT-05	ST09354/7597/2023	45.22.7597.5267.00074	Pukat cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULUT
	10/04/2023	24 GT		
CAHAYA BINEC	ST09594/7597/2023	45.23.7597.03.00052		



Nama Kapal	Nomor dan Tanggal STKA	Nomor SIPI dan GT Kapal	Alat Tangkap	Daerah Tujuan
	10/05/2023	28 GT	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DKP PROVINSI SULUT
MERPATI -02	ST09684/7597/2023	45.23.7597.5267.00056	Pukat cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	22/05/2023	21 GT		
MERPATI-03	ST09687/7597/2023	45.23.7597.03.00057	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DKP PROVINSI SULUT
	22/05/2023	29 GT		
GALAXY SAKTI	ST09697/7597/2023	45.23.7597.03.00021	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DKP PROVINSI SULUT
	23/05/2023	24 GT		
NELAYAN 2016 24	ST09724/7597/2023	45.23.7597.03.00051	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	06/06/2023	26 GT		
AMANDA EXPRES	ST09810/7597/2023	45.22.7597.03.00101	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	07/06/2023	25 GT		
ALS 01	ST09810/7597/2023	45.23.7597.03.00005	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	07/06/2023	30 GT		
NELAYAN 2016 22	ST09794/7597/2023	45.23.7597.5267.00012	Pukat cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	07/06/2023	26 GT		
NELAYAN 2016-28	ST09792/7597/2023	45.22.7597.5267.00088	Pukat cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	07/06/2023	25 GT		
AL-MUNAWARAH 07	ST09837/7597/2023	45.22.7597.613.00107	HAND LINE	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	08/06/2023	12 GT		
ALESIA - 03	ST09847/7597/2023	45.22.7597.03.00100	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	08/06/2023	28 GT		
PUTRA LESTARI N. MAX	ST09859/7597/2023	45.23.7597.03.00018	Pukat Cincin Pelagis Kecil (Purse Seine) Dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	12/06/2023	19 GT		
KM. MULTI NIAGA FRIMA	ST09897/7597/2023	45.23.7597.5267.00041	Pukat cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal	DPMPTSP PROVINSI SULTENG
	17/06/2023	27 GT		

C. Urusan Pariwisata

C.1 Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
- a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo

- Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian.



b. Sasaran dan program

Tabel 3.152
 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif	Indikator : - Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan Nusantara	2 Hari	2,3 hari	115%
		- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	6.500 Orang	4.055 Orang	62,38%
		- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	650.000 Perjalanan	3.437.439 Perjalanan	528,84%
		- Jumlah lokasi prioritas yang difasilitasi kegiatan ekonomi kreatif	8 Lokasi	8 Lokasi	100%
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah obyek wisata yang dikembangkan	6 Obyek Wisata	6 Obyek Wisata	100%
	Program pemasaran pariwisata	Jumlah dokumen dan laporan pengembangan promosi pemasaran pariwisata	18 Dokumen/Laporan	18 Dokumen/Laporan	100%
	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Jumlah subsektor industri kreatif yang difasilitasi	6 Subsektor	6 Subsektor	100%
	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten	176 Orang/Laporan	176 Orang/Laporan	100%
2	Sasaran : Penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, Penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	Indikator : Persentase penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan.	100%	100%	100%
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, kualitas dokumen perencanaan dan keuangan, dan sumber daya aparatur.	100%	100%	100%



2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.153
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pariwisata
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program Pemasaran Pariwisata	1.769.778.500	1.772.107.860	100.31	100		
	Kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi	1.769.778.500	1.772.107.860	100.31	100		
	- Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1.020.678.800	1,019,777,158	99.91	100		
	- Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya, Baik Dalam dan Luar Negeri	466.095.800	470,009,885	100.84	100		
	- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	283.003.900	282,320,817	99.76	100		
2	Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	1.345.366.200	1.335.775.656	99.29	100		
	Kegiatan pengelolaan daya Tarik wisata provinsi	728.134.350	720,478,400	98.95	100		
	- Sub Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehab Saprasi Dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	728.134.350	720,478,400	98.95	100		
	Kegiatan pengelolaan Kawasan strategis pariwisata	400.454.300	399,268,837	99.70	100		
	- Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.	400.454.300	399,268,837	99.70	100		
	Kegiatan pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	122.254.000	122.210.050	99,96	100		
	- Sub kegiatan penguatan jejaring tata kelola destinasi pariwisata Tingkat provinsi	122.254.000	122.210.050	99,96	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Kegiatan penetapan tanda daftar usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten Kota dalam satu daerah provinsi	94.523.550	93.818.369	99,25	100		
	- Sub kegiatan pengelolaan investasi pariwisata provinsi	94.523.550	93.818.369	99,25	100		
3	Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	334.036.550	330.407.108	98.91	100		
	Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif	334.036.550	330.407.108	98.91	100		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	334.036.550	330.407.108	98.91	100		
4	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	225.000.000	222.162.609	98.74	100		
	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	225.000.000	222.162.609	98.74	100		
	- Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	75.000.000	72.615.180	96.82	100		
	- Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	150.000.000	149.547.429	99.70	100		
5	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	9.014.474.214	8.749.713.288	97.06	100		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	288.256.000	277.356.285	96.22	100		
	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	288.256.000	277.356.285	96.22	100		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.343.079.464	6.190.204.034	97.59	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.269.279.464	6.118.947.315	97,60	100		
	- Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	73.800.000	71.256.719	96.55	100		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	129.872.000	108.206.424	83.32	100		
	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	129.872.000	108.206.424	83.32	100		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.191.065.700	1.128.999.548	94.79	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.191.065.700	1.128.999.548	94.79	100		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.062.201.050	1.044.946.997	98.38	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.062.201.050	1.044.946.997	98.38	100		
JUMLAH		12.688.655.464	12.410.166.521	97.81	100		

- 1) Program pemasaran pariwisata
- Outcome dari program adalah Jumlah Dokumen dan Laporan Pengembangan Promosi Pemasaran Pariwisata. Target kinerja pada program ini sesuai renstra tahun 2024 adalah 18 Dokumen/Laporan yang didalamnya terdapat satu kegiatan dan 3 sub kegiatan.
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.
- Output kegiatan adalah ketiga Sub Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai target.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
- Output sub kegiatan adalah :
- Pelaksanaan Event Gorontalo Karnaval Karawo
 - Pelaksanaan Event Festival Boliyohuto Karnival
 - Pelaksanaan Event Festival Gebyar Safar
 - Pelaksanaan Event IMI FEST / Festival Otomotif



- Penyelenggaraan Event Gebyar Ketupat Boliyohuto
- Penyelenggaraan Gebyar Tumbilotohe
- Dukungan Event Kab/Kota, Komunitas & Masyarakat
- Tourism On The Spot
- Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya, Baik Dalam dan Luar Negeri
Output sub kegiatan adalah :
 - Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
 - Dukungan Event Kabupaten/ Kota, Komunitas Pariwisata dan Event Masyarakat
 - Pembuatan Video Konten
- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Output sub kegiatan adalah :
 - Penyusunan Profil Ekonomi Produk Wisata Geopark
 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2) Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata.

Outcome dari program adalah jumlah obyek wisata yang dikembangkan. Target kinerja program pada renstra tahun 2024 adalah 6 Obyek wisata, dimana obyek wisata yang dikembangkan merupakan potensi wisata Provinsi Gorontalo yang di kelompokkan menjadi obyek wisata pantai, obyek wisata laut dan pulau, obyek wisata alam dan pegunungan, obyek wisata adat, religi dan situs sejarah, obyek wisata buatan dan obyek wisata kuliner. Pada Program ini terdapat 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan pengelolaan daya Tarik wisata provinsi.

Output kegiatan adalah telah sesuai target. Pada kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan, yaitu Pengadaan, Pemeliharaan, Rehab Saprass Dalam Daya Tarik Wisata Provinsi.

- Sub kegiatan Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehab Saprass Dalam Daya Tarik Wisata Provinsi.
Output sub kegiatan adalah :
 - Belanja Perencanaan Paket Pekerjaan Konstruksi
 - Belanja Pengawasan Paket Pekerjaan Konstruksi
 - Belanja Pemeliharaan Gedung Museum Pendaratan Soekarno
 - Belanja Pemeliharaan Bangunan Terbuka di OW Unggulan Edu
 - Belanja Pembuatan Papan Pusat Informasi Geopark (Geosite)
 - Belanja Modal Penataan Saluran Air Panas
 - Belanja Modal Pembuatan Taman di OW Edu Agrowisata Lombongo
 - Belanja Pengadaan Sarana Prasarana Penunjang dan Renovasi Gedung Kantor Geopark



- Belanja Penataan, Renovasi Amenitas di Area Fasilitas Kolam Pemandian Edu Agro Wisata Lombongo.
2. Kegiatan pengelolaan Kawasan strategis pariwisata.
- Output kegiatan adalah sudah sesuai target. Pada kegiatan ini terdapat 1 Sub kegiatan yakni Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
- Sub Kegiatan Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
- Output sub kegiatan adalah :
- Pelaksanaan Sosialisasi Geopark Gorontalo
 - Belanja Jasa Tenaga Penunjang Kegiatan Geopark
 - Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisata (produk yang dihasilkan berupa dokumen antara lain Dokumen Pendukung Pengembangan Geopark Gorontalo Sebagai Destinasi Pariwisata, Dokumen Pengembangan Nautical Tourism Provinsi Gorontalo dan Dokumen Gastronomy Tourism Provinsi Gorontalo).
3. Kegiatan pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi.
- Output kegiatan adalah telah sesuai target. Pada kegiatan ini terdapat 1 Sub kegiatan yakni Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi.
- Sub kegiatan penguatan jejaring tata kelola destinasi pariwisata Tingkat provinsi.
- Output sub kegiatan adalah :
- Bahan baku dan Alat Kebersihan untuk Obyek Wisata Unggulan
 - Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa alat kebersihan, alat kelistrikan dan bahan baku bangunan (semen, seng, pasir, kerikil, besi) yang diserahkan ke destinasi destinasi unggulan khususnya lokasi prioritas dengan mekanisme by proposal).
4. Kegiatan penetapan tanda daftar usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi.
- Output kegiatan adalah telah sesuai target Pada kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan yakni Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi.
- Sub kegiatan pengelolaan investasi pariwisata provinsi
- Output sub kegiatan adalah :
- Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
 - Workshop IPRO
- 3) Program pengembangan ekonommi kreatif, melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Outcome dari program adalah jumlah subsector industry kreatif yang difasilitasi, dengan target 6 subsektor (Kuliner, Fesyen Kriya, Music, Seni Pertunjukan dan Photography).

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif

Output kegiatan adalah telah dilaksanakan sesuai target, pada kegiatan ini terdapat 1 Sub Kegiatan yakni Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif.

Output sub kegiatan adalah :

- PELAKSANAAN KEGIATAN HACF
- Rapat Koordinasi Pentahelix
- Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat berupa Alat Musik Tradisional dan Modern serta seni pertunjukan serta bahan pendukung lainnya (berdasarkan proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan)
- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan berupa honor pelaku music dan pertunjukan
- Belanja Hibah Sanggar Seni Desa Sidomukti berupa Alat Musik Tradisional dan Modern serta bahan pendukung lainnya (baju untuk penari dan pelaku music)

4) Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Outcome dari program adalah jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berkompeten. Target kinerja pada program ini sesuai renstra untuk tahun 2024 sebanyak 176 Orang. Pada Program ini terdapat 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan.

Output kegiatan adalah jumlah peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

- Sub kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata.

Output sub kegiatan adalah :

- Fasilitasi Kekayaan Intelektual (Fasilitasi Pendaftaran Paten Merk untuk Pelaku Usaha)
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- Sub kegiatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif.

Output sub kegiatan adalah :

- Bimbingan Teknis Temu Teman Industri Kreatif (TEMATIK) Sub Sektor Musik. Bimtek ini bertujuan untuk memperkenalkan tren terkini dan peluang baru industri music, membangun jaringan dan kolaborasi antar pelaku industri music dan memfasilitasi akses terhadap sumber daya dan informasi terkait pengembangan karir di bidang music dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi Kreatif di Destinasi Wisata. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi pelaku ekraf di destinasi wisata sehingga dapat menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing dengan jumlah peserta sebanyak 76 orang.
- Penguatan Usaha melalui Fasilitasi Transformasi Digital para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku ekraf sulam karawo dalam menciptakan desain motif yang lebih bervariasi, inovatif dan kreatif dan berdaya saing dan mampu menciptakan peluang pasar produk kreatif baik domestik maupun internasional dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

5) Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Outcome dari program adalah Persentase Peningkatan sarana Prasarana Perkantoran, Kualitas Dokumen Perencanaan dan Keuangan dan Sumber Daya Aparatur.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Output kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.

- Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Output sub kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.

2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah.

Output kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.

- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Output sub kegiatan adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.

- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.

Output sub kegiatan adalah jumlah laporan keuangan SKPD.

3. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah.

Output kegiatan adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan.



- Sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
Output sub kegiatan adalah jumlah pegawai berdasarkan tupoksi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
 - 4. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
Output kegiatan adalah Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
 - Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Output sub kegiatan adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
 - 5. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
Output kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
 - Sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
Output sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra OPD 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 3.154			
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026			
No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	3%	2,24%

Sumber Data BPS Provinsi sampai dengan Triwulan III
Keterangan : Diambil dari lapangan usaha Akomodasi dan Makan Minum terhadap Total PDRB Provinsi Gorontalo.

4. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo untuk Urusan Pariwisata pada Tahun 2024.
- Penghargaan Gorontalo Karnaval Karawo sebagai 110 Event terpilih Kharisma Event Nusantara 2024.
5. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo pada tahun 2024.
- 1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Gorontalo tentang :
- “Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Digital di Provinsi Gorontalo”** dengan nomor :



- 631/PEMKESRA/KB/X/2024
- 100/PEM-KSD/20/2024
- 100.3.7.1/Kesber/26/Bag.K.S/X/2024
- 24/17/KB/X/2024
- 100/PEM-PHWT/MoU/38/X/2024
- 100/PEM-KES/KB/06/X/2024
- 05/GORUT-KESBER/X/2024
- 26/37/P/Gto/B
- 057/DEKRANASDA/X/2024

Tanggal 5 Oktober 2024

Maksud dan tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital sebagai bagian dukungan manajemen perencanaan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

- Letter Of Intent (Dokumen yang menyatakan niat untuk melakukan suatu tindakan tertentu di masa depan) :
 - LOI dengan ASITA
 - LOI dengan UMKN RIZKI KUE KARAWO
 - LOI dengan FAKULTAS SASTRA BUDAYA UNG
 - LOI dengan FAKULTAS KELAUTAN DAN TEKNOLOGI PERIKANAN UNG
 - LOI dengan LPPM UNG

D. Urusan Kehutanan

D.1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

- Tujuan dan Sasaran
 - Tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
 - Peningkatan kualitas lingkungan hidup
 - Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
 - Sasaran dan program

Tabel 3.155

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Kehutanan
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan hutan yang lestari	Indikator Sasaran : 1. Indeks Kualitas Lahan (IKL);	80.18 poin	81.10 poin (Baik)	101%
		2. Luas lahan kritis yang direhabilitasi.	293 Ha	330 Ha	112%
	Program Pengelolaan Hutan	Presentase Luas kawasan hutan yang dikelola	0,40%	0,46%	115%



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
2	Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang baik	Indikator Sasaran 1. Nilai SAKIP;	BB	BB (78,15 atau Sangat Baik)	100
		2. Nilai Kepuasan Masyarakat.	B	A (93,608 atau Sangat Baik)	100
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.156
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Kehutanan
Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp.)	(%)	(%)		
1	Program Pengelolaan Hutan (Dinas)	3.534.220.000	3.524.126.822	99,71	100		
	Program Pengelolaan Hutan (KPH I dan II Gorontalo Barat)	843.031.061	834.405.480	98,98	100		
	Program Pengelolaan Hutan (KPH IV Gorontalo Utara)	272.132.970	267.256.256	98,21	100		
	Program Pengelolaan Hutan (KPH V Boalemo)	149.995.000	149.906.175	99,94	100		
	Program Pengelolaan Hutan (KPH VI Gorontalo)	1.061.640.000	1.046.756.650	98,60	100		
a.	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (DINAS)	39.480.000	39.480.000	100	100		
	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (KPH I dan II Gorontalo Barat)	843.031.061	834.405.480	98,98	100		
	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (KPH IV Gorontalo Utara)	202.132.970	197.259.056	97,59	100		
	Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (KPH VI Gorontalo) DBH DR	1.001.640.000	986.949.000	98,53	100		
	- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan (DINAS)	39.480.000	39.480.000	100	100		



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp.)	(%)	(%)		
	- Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (KPH I dan II Gorontalo Barat)BH DR	843.031.061	834.405.480	98,98	100	Terdapat sisa anggaran terbesar pada Belanja Modal Kendaraan Bermotor. Selain itu, sisa anggaran yang cukup signifikan juga terdapat pada Belanja Modal Komputer Unit Lainnya. Sisa2 anggaran tersebut merupakan hasil dari efisiensi dalam pengadaan barang melalui e-Katalog. Sisa anggaran lainnya, tercatat pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor.	Perlu dilakukan sinkronisasi harga barang berdasarkan harga aktual di E-Katalog, peningkatan koordinasi dalam penganggaran, serta penguatan mekanisme pengendalian anggaran untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, dan akurat di tahun 2025.
	- Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi (KPH IV Gorontalo Utara) DBH DR	202.132.970	197.259.056	97,59	100	Terdapat sisa anggaran terbesar pada Belanja Modal Komputer unit lainnya. Selain itu, sisa anggaran yang cukup signifikan juga terdapat pada Belanja Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Alat Pendingin, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya dan Belanja Modal Mebel. Sisa2 anggaran tersebut merupakan hasil dari efisiensi dalam pengadaan barang melalui e-Katalog. Sisa anggaran lainnya, tercatat pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor.	Perlu dilakukan sinkronisasi harga barang berdasarkan harga aktual di E-Katalog, peningkatan koordinasi dalam penganggaran, serta penguatan mekanisme pengendalian anggaran untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, dan akurat di tahun 2025.
	- Sub kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (KPH VI Gorontalo) DBH DR	1.001.640.000	986.949.000	98,53	100	Terdapat sisa anggaran terbesar pada Belanja Modal Kendaraan	Perlu dilakukan sinkronisasi harga barang berdasarkan harga aktual di E-Katalog, peningkatan koordinasi dalam



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp.)	(%)	(%)		
						Bermotor. Selain itu, sisa anggaran yang cukup signifikan juga terdapat pada Belanja Modal Komputer Unit Lainnya. Sisa2 anggaran tersebut merupakan hasil dari efisiensi dalam pengadaan barang melalui e-Katalog. Sisa anggaran lainnya, meskipun lebih kecil, tercatat pada Belanja Modal Personal Computer dan Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).	penganggaran, serta penguatan mekanisme pengendalian anggaran untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien, tepat sasaran, dan akurat di tahun 2025.
b.	Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (DINAS)	60.720.000	60.720.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani (DINAS)	60.720.000	60.720.000	100	100		
c.	Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (DINAS)	3.287.500.000	3.277.406.822	99,69	100		
	- Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (DINAS)	3.287.500.000	3.277.406.822	99,69	100	Terdapat sisa anggaran terbesar pada Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman yang merupakan hasil dari efisiensi dalam pengadaan barang melalui e-Katalog (sisa hasil penawaran) Selain itu, sisa anggaran yang cukup signifikan juga terdapat pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebagai sisa dari pembayaran upah kelompok tani.	Perlu dilakukan penyesuaian anggaran berdasarkan kebutuhan riil, optimalisasi perencanaan dan pengadaan melalui e-Katalog, serta pengendalian dan pemantauan anggaran secara berkala untuk memastikan penggunaan dana yang lebih efisien dan tepat sasaran.



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)		
d.	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (DINAS)	88.440.000	88.440.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (DINAS)	30.360.000	30.360.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DINAS)	58.080.000	58.080.000	100	100		
e.	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (DINAS)	58.080.000	58.080.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (DINAS)	58.080.000	58.080.000	100	100		
f.	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (KPH IV Gorontalo Utara)	70.000.000	69.997.200	100	100		
	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (KPH V Boalemo)	149.995.000	149.906.175	99,94	100		
	Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (KPH VI Gorontalo) DBH DR-DAU	60.000.000	59.807.650	99,68	100		
	- Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (KPH IV Gorontalo Utara)	70.000.000	69.997.200	100	100		
	- Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (KPH V Boalemo)	149.995.000	149.906.175	99,94	100	Terdapat sisa anggaran pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa, dengan sisa anggaran tersebut merupakan dana yang tidak memungkinkan untuk dibelanjakan lagi.	Melakukan evaluasi perencanaan anggaran agar lebih realistis sesuai kebutuhan, meningkatkan akurasi perencanaan perjalanan dinas, serta mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan anggaran di tahun berikutnya untuk menghindari dana yang tidak terserap.
	- Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (KPH VI Gorontalo) DBH DR-DAU	60.000.000	59.807.650	99,68	100	Terdapat sisa anggaran pada Belanja Cetak, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Belanja Kertas	Melakukan evaluasi perencanaan anggaran secara lebih cermat dan realistis, menyesuaikan alokasi dana berdasarkan kebutuhan yang lebih akurat, serta meningkatkan pengawasan dan pemantauan penggunaan anggaran secara berkala



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)		
						dan Cover, Belanja Bahan Komputer, serta Belanja Alat Tulis Kantor, dengan sisa anggaran tersebut merupakan dana yang tidak lagi dibelanjakan lebih lanjut.	agar anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien pada tahun berikutnya.
2	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (DINAS)	29.040.000	28.160.000	96,97	100		
a.	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (DINAS)	29.040.000	28.160.000	96,97	100		
	- Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (DINAS)	29.040.000	28.160.000	96,97	100	Terdapat sisa anggaran pada Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Perlu ditekankan bahwa kehadiran tenaga pelayanan umum sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah direncanakan, dan mereka diwajibkan untuk hadir sesuai jadwal kerja yang telah ditetapkan agar anggaran dapat digunakan secara maksimal dan efektif
3	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	93.720.000	93.720.000	100	100		
a.	Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (DINAS)	93.720.000	93.720.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (DINAS)	93.720.000	93.720.000	100	100		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (KPH I dan II Gorontalo Barat)	238.845.628	236.097.190	98,85	100		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (KPH III Pohuwato)	358.508.626	353.602.790	98,63	100		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (KPH IV Gorontalo Utara)	237.815.610	237.080.430	99,69	100		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (KPH V Boalemo)	309.078.700	303.674.022	98,25	100		



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (KPH VI Gorontalo)	249.787.157	245.947.645	98,46	100		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo)	351.714.066	351.020.395	99,80	100		
a.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (KPH I dan II Gorontalo Barat)	50.065.628	50.053.256	99,97	100		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (KPH III Pohuwato)	195.117.926	195.003.100	99,94	100		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (KPH IV Gorontalo Utara)	53.771.425	53.604.000	99,69	100		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (KPH V Boalemo)	82.063.039	82.054.800	99,99	100		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (KPH VI Gorontalo)	35.811.747	35.743.441	99,81	100		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo)	202.041.066	201.776.395	99,87	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH I dan II Gorontalo Barat)	13.933.350	13.921.800	99,92	100	• Terdapat sisa anggaran pada Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Benda Pos, Belanja Bahan komputer dan Belanja Perabot kantor. Sisa anggaran tersebut merupakan dana yang tidak memungkinkan untuk dibelanjakan lagi.	• Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan anggaran secara lebih akurat, meningkatkan efisiensi pengadaan barang, serta memastikan alokasi anggaran yang lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan operasional di masa mendatang.
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH III Pohuwato)	149.852.926	149.776.500	99,95	100	Terdapat sisa anggaran pada belanja modal mebel dan Belanja Modal Personal Computer. Sisa2 anggaran tersebut merupakan hasil dari efisiensi dalam pengadaan barang melalui e-Katalog. Sisa anggaran lainnya tercatat pada Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan-Bahan	Meningkatkan akurasi perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan aktual, mengoptimalkan proses pengadaan barang melalui e-Katalog, serta memperkuat pengendalian dan pemantauan penggunaan anggaran agar alokasi dana dapat lebih efisien dan tepat sasaran di masa mendatang.



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp.)	(%)	(%)		
						Bangunan dan Konstruksi, Belanja Bahan-Bahan Lainnya, Belanja Kertas dan Cover, Belanja Perabot Kantor, Belanja Benda Pos, dan Belanja Alat Listrik	
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH IV Gorontalo Utara)	23.791.425	23.698.000	99,61	100	Terdapat sisa anggaran pada belanja ATK, kertas dan cover, benda pos, bahan komputer, perabot kantor dan alat listrik yang tidak memungkinkan untuk dibelanjakan lagi.	Melakukan evaluasi dan perencanaan anggaran yang lebih cermat di tahun mendatang untuk memastikan bahwa alokasi anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan nyata, serta meningkatkan koordinasi antar unit kerja untuk menghindari sisa anggaran yang tidak dapat digunakan. Selanjutnya, perlu dilakukan pemantauan secara berkala agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan prioritas kegiatan yang lebih mendesak atau strategis.
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH V Boalemo)	38.878.039	38.870.800	99,98	100	Terdapat sisa anggaran pada belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi, ATK, Belanja Kertas dan Cover, Belanja -Bahan Komputer, Belanja Perabot Kantor, dan Belanja Alat Listrik, yang tidak memungkinkan untuk dibelanjakan lagi serta sisa belanja modal alat pendingin hasil dari efisiensi dalam pengadaan barang melalui e-Katalog.	Melakukan evaluasi dan perencanaan anggaran yang lebih cermat di tahun mendatang untuk memastikan bahwa alokasi anggaran lebih sesuai dengan kebutuhan nyata, serta meningkatkan koordinasi antar unit kerja untuk menghindari sisa anggaran yang tidak dapat digunakan. Selanjutnya, perlu dilakukan pemantauan secara berkala agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan prioritas kegiatan yang lebih mendesak atau strategis.



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp.)	(%)	(%)		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH VI Gorontalo)	17.345.181	17.306.375	99,78	100	Terdapat sisa anggaran pada belanja ATK, kertas dan cover, bahan komputer, perabot kantor dan alat/bahan kegiatan kantor lainnya yang tidak memungkinkan untuk dibelanjakan lagi	Perlu dilakukan pemantauan secara berkala agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.
	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo)	143.397.566	143.145.851	99,82	100	Terdapat sisa anggaran pada belanja Bahan Baku, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Kertas dan cover, Belanja persediaan dokumen/adminis trasi tender, Belanja Bahan komputer, Belanja perabot kantor, Belanja alat Listrik, Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, Belanja Pompa air (DAP), Belanja kendaraan bermotor beroda dua, Belanja alat pendingin ruangan (AC) yang tidak memungkinkan untuk dibelanjakan lagi.	Perlu dilakukan pemantauan secara berkala agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KPH I dan II Gorontalo Barat)	1.289.778	1.289.778	100	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KPH III Pohuwato)	1.100.000	1.100.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KPH IV Gorontalo Utara)	836.000	836.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KPH V Boalemo)	810.000	810.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan	916.566	916.566	100	100		



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp.)	(%)	(%)		
	Penggandaan (KPH VI Gorontalo)						
	- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo)	1.233.500	1.233.500	100	100		
	- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (KPH III Pohuwato)	6.875.000	6.844.500	99,56	100	Terdapat sisa Belanja makanan dan minuman jamuan tamu yang tidak memungkinkan untuk dibelanjakan lagi.	Perlu dilakukan pemantauan secara berkala agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.
	- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (KPH V Boalemo)	2.375.000	2.375.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (KPH VI Gorontalo)	5.000.000	4.998.000	99,96	100	Terdapat sisa Belanja makanan dan minuman jamuan tamu yang tidak memungkinkan untuk dibelanjakan lagi.	Perlu dilakukan pemantauan secara berkala agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.
	- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo)	5.000.000	4.990.335	99,81	100	Terdapat sisa Belanja makanan dan minuman jamuan tamu yang tidak memungkinkan untuk dibelanjakan lagi.	Perlu dilakukan pemantauan secara berkala agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KPH I dan II Gorontalo Barat)	34.842.500	34.841.678	100	100		
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KPH III Pohuwato)	37.290.000	37.282.100	99,98	100	Terdapat sisa Belanja makanan dan minuman rapat dan belanja perjalanan dinas biasa yang tidak memungkinkan untuk dibelanjakan lagi.	Perlu dilakukan pemantauan secara berkala agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KPH IV Gorontalo Utara)	29.144.000	29.070.000	99,75	100	Terdapat sisa Belanja perjalanan dinas yang tidak memungkinkan untuk dibelanjakan lagi.	Perlu dilakukan pemantauan secara berkala agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KPH V Boalemo)	40.000.000	39.999.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KPH VI Gorontalo)	12.550.000	12.522.500	99,78	100	Terdapat sisa Belanja makanan dan minuman rapat dan belanja perjalanan dinas biasa yang tidak memungkinkan	Perlu dilakukan pemantauan secara berkala agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp.)	(%)	(%)		
						untuk dibelanjakan lagi.	
	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo)	52.410.000	52.406.709	99,99	100	Terdapat sisa Belanja makanan dan minuman rapat yang tidak memungkinkan untuk dibelanjakan lagi.	Perlu dilakukan pemantauan secara berkala agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal.
b.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KPH I dan II Gorontalo Barat)	139.820.000	137.373.300	98,25	100		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KPH III Pohuwato)	107.885.700	106.097.700	98,34	100		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KPH IV Gorontalo Utara)	127.883.500	127.515.150	99,71	100		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KPH V Boalemo)	176.554.986	172.572.783	97,74	100		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KPH VI Gorontalo)	129.215.410	127.008.635	98,29	100		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo)	112.861.000	112.432.000	99,62	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KPH I dan II Gorontalo Barat)	21.020.000	19.203.300	91,36	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KPH III Pohuwato)	18.125.700	16.387.700	90,41	100	Terdapat sisa anggaran belanja tagihan air sebagai efisiensi pemakaian air	Melakukan evaluasi kebutuhan air secara berkala, menyesuaikan anggaran di tahun berikutnya berdasarkan pola konsumsi yang lebih efisien, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung operasional secara lebih hemat dan berkelanjutan.
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KPH IV Gorontalo Utara)	40.763.500	40.395.150	99,10	100	Jadwal Pembayaran Jasa Internet yang melewati tanggal penagihan sehingga memperlambat jadwal realisasi bulanan.	Merubah tanggal pembayaran pada awal bulan berjalan.
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KPH V Boalemo)	31.354.986	31.112.783	99,23	100	Terdapat sisa anggaran belanja tagihan listrik dan belanja internet	Melakukan evaluasi kebutuhan listrik dan internet secara berkala, menyesuaikan anggaran di tahun berikutnya



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp.)	(%)	(%)		
							berdasarkan pola konsumsi yang lebih efisien, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya listrik dan penggunaan internet untuk mendukung operasional secara lebih hemat dan berkelanjutan.
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KPH VI Gorontalo)	39.455.410	38.298.635	97,07	100	Sisa anggaran pada belanja tagihan air di salah satu resort terjadi karena permintaan air tidak dapat dipenuhi oleh PDAM. Hal ini disebabkan oleh kualitas air yang keruh dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan, sehingga tagihan air tidak dapat diajukan. Sisa anggaran pada tagihan listrik di salah satu resort di KPH VI terjadi karena meteran listrik di lokasi tersebut hilang. Meskipun telah dilakukan pelaporan ke PLN dan upaya permintaan pemasangan meteran baru, hingga saat ini proses pemasangan masih menunggu tindak lanjut dari pihak PLN.	Berkoordinasi dengan PDAM untuk solusi kualitas air, percepatan tindak lanjut pemasangan meteran listrik oleh PLN, eksplorasi sumber air dan energi alternatif, serta evaluasi rutin pengelolaan anggaran untuk memastikan efisiensi dan pemenuhan kebutuhan operasional resort.
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo)	25.741.000	25.312.000	98,33	100	Terdapat sisa anggaran belanja tagihan air dan listrik sebagai efisiensi pemakaian air dan listrik.	Melakukan evaluasi kebutuhan air dan Listrik secara berkala, menyesuaikan anggaran di tahun berikutnya berdasarkan pola konsumsi yang lebih efisien, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan Listrik untuk mendukung operasional secara lebih hemat dan berkelanjutan.



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KPH I dan II Gorontalo Barat)	118.800.000	118.170.000	99,47	100	Terdapat sisa anggaran pada Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum.	Perlu ditekankan bahwa kehadiran tenaga pelayanan umum sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah direncanakan, dan mereka diwajibkan untuk hadir sesuai jadwal kerja yang telah ditetapkan agar anggaran dapat digunakan secara maksimal dan efektif
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KPH III Pohuwato)	89.760.000	89.710.000	99,94	100	Terdapat sisa anggaran pada Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Perlu ditekankan bahwa kehadiran tenaga pelayanan umum sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah direncanakan, dan mereka diwajibkan untuk hadir sesuai jadwal kerja yang telah ditetapkan agar anggaran dapat digunakan secara maksimal dan efektif
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KPH IV Gorontalo Utara)	87.120.000	87.120.000	100	100	Terdapat sisa anggaran pada Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum.	Perlu ditekankan bahwa kehadiran tenaga pelayanan umum sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah direncanakan, dan mereka diwajibkan untuk hadir sesuai jadwal kerja yang telah ditetapkan agar anggaran dapat digunakan secara maksimal dan efektif
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KPH V Boalemo)	145.200.000	141.460.000	97,42	100	Terdapat sisa anggaran pada Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Perlu ditekankan bahwa kehadiran tenaga pelayanan umum sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah direncanakan, dan mereka diwajibkan untuk hadir sesuai jadwal kerja yang



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)		
							telah ditetapkan agar anggaran dapat digunakan secara maksimal dan efektif
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KPH VI Gorontalo)	89.760.000	88.710.000	99,94	100	Terdapat sisa anggaran pada Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Perlu ditekankan bahwa kehadiran tenaga pelayanan umum sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah direncanakan, dan mereka diwajibkan untuk hadir sesuai jadwal kerja yang telah ditetapkan agar anggaran dapat digunakan secara maksimal dan efektif
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo)	87.120.000	87.120.000	100	100		
c.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KPH I dan II Gorontalo Barat)	48.960.000	48.670.634	99,41	100		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KPH III Pohuwato)	55.505.000	52.501.990	94,59	100		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KPH IV Gorontalo Utara)	56.160.685	55.961.280	99,65	100		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KPH V Boalemo)	50.460.675	49.046.439	97,20	100		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KPH VI Gorontalo)	84.760.000	83.195.569	98,15	100		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo)	36.812.000	36.812.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KPH I dan II Gorontalo Barat)	48.960.000	48.670.634	99,41	100	Terdapat sisa belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan serta belanja BBM dan pelumas sebagai	Penyesuaian anggaran pajak, bea, dan perizinan berdasarkan kebutuhan aktual, optimalisasi penggunaan BBM melalui perencanaan perjalanan yang lebih efisien, serta penerapan monitoring



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
			(Rp.)	(%)	(%)		
						upaya efisiensi penggunaan BBM	berkala untuk memastikan efisiensi tetap terjaga dan anggaran digunakan secara optimal.
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KPH III Pohuwato)	53.065.000	50.101.990	94,42	100	Terdapat sisa belanja pembayaran pajak sebagai upaya efisiensi penggunaan BBM	Penyesuaian anggaran pajak, bea, dan perizinan berdasarkan kebutuhan aktual, serta penerapan monitoring berkala untuk memastikan efisiensi tetap terjaga dan anggaran digunakan secara optimal.
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KPH IV Gorontalo Utara)	52.300.685	52.101.280	99,76	100	Terdapat sisa belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan serta belanja BBM dan pelumas sebagai upaya efisiensi penggunaan BBM	Penyesuaian anggaran pajak, bea, dan perizinan berdasarkan kebutuhan aktual, optimalisasi penggunaan BBM melalui perencanaan perjalanan yang lebih efisien, serta penerapan monitoring berkala untuk memastikan efisiensi tetap terjaga dan anggaran digunakan secara optimal.
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KPH V Boalemo)	48.630.675	47.226.439	97,11	100	Terdapat sisa belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan, belanja suku cadang, serta belanja BBM dan pelumas sebagai upaya efisiensi penggunaan BBM.	Penyesuaian anggaran untuk pembayaran pajak, bea, dan perizinan sesuai kebutuhan aktual, optimalisasi penggunaan dan pemeliharaan suku cadang, serta pengaturan pemakaian BBM dan pelumas yang lebih efisien melalui perencanaan operasional yang lebih baik dan monitoring berkala.
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KPH VI Gorontalo)	79.480.000	77.915.569	98,03	100	Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.500.000 pada Jasa KIR karena layanan Jasa KIR sudah non retribusi.	Melakukan penyesuaian anggaran di masa mendatang berdasarkan kebijakan terbaru



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISI K		
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(%)		
	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo)	34.982.000	34.982.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KPH III Pohuwato)	2.440.000	2.400.000	98,36	100	Terdapat sisa anggaran pada Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin yang tidak memungkinkan untuk dibelanjakan lagi.	Melakukan evaluasi kebutuhan pemeliharaan secara lebih cermat di masa mendatang
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KPH IV Gorontalo Utara)	3.860.000	3.860.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KPH V Boalemo)	1.830.000	1.820.000	99,45	100	Terdapat sisa anggaran pada Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Perawatan AC yang tidak memungkinkan untuk dibelanjakan lagi.	Melakukan evaluasi kebutuhan pemeliharaan secara lebih cermat di masa mendatang.
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KPH VI Gorontalo)	5.280.000	5.280.000	100	100		
	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo)	1.830.000	1.830.000	100	100		
	JUMLAH	7.729.528.818	7.671.753.855	99,25	100		

- 1) Program pengelolaan hutan
- Outcome dari program adalah Presentase Luas kawasan hutan yang dikelola dengan target 0% dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 0%.
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.
- Output kegiatan adalah Dokumen Pengelolaan Rencana Tata Hutan dengan target 0 dokumen dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 0 dokumen.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan.



Output sub kegiatan adalah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi dengan target 0 dokumen dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 0 dokumen.

- Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH.

Output sub kegiatan adalah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun dengan target dan realisasi yakni sebagai berikut :

- a. KPH Unit I dan II Gorontalo Barat dengan target 1 unit dan capaian realisasi yaitu 14 unit atau telah melampaui target. Anggaran pada sub kegiatan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Sisa DBH DR.
- b. KPH Unit IV Gorontalo Utara dengan target 5 unit dan capaian realisasi yaitu 5 unit atau mencapai target. Anggaran pada sub kegiatan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) dan Sisa DBH DR.
- c. KPH Unit VI Gorontalo dengan target 7 unit dan capaian realisasi yaitu 7 unit atau mencapai target. Anggaran pada sub kegiatan ini bersumber dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) dan Sisa DBH DR.

2. Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.

Output kegiatan adalah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia dengan target 0 dokumen dan capaian realisasi yaitu 0 dokumen atau telah mencapai target.

- Sub Kegiatan Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutan.

Output sub kegiatan adalah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan target 0 dokumen dan capaian realisasi yaitu 0 dokumen atau telah mencapai target.

3. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.

Output kegiatan adalah Luas hutan yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara dengan target 260 Ha dan capaian realisasi yaitu 330 Ha atau telah melebihi target.

- Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara.

Output sub kegiatan adalah Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara dengan target 260 Ha dan capaian realisasi yaitu 330 Ha atau telah melebihi target. Lokasi pelaksanaan Pembangunan hutan rakyat atau rehabilitasi hutan dan lahan berada di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara.

4. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Output kegiatan adalah kegiatan perlindungan hutan yang dilaksanakan dengan target 0 kegiatan dan capaian realisasi yaitu 0 kegiatan atau telah sesuai target.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan. Output sub kegiatan adalah laporan pertemuan/rapat koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan dengan target 0 dokumen dan capaian realisasi yaitu 0 dokumen atau telah mencapai target.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Output sub kegiatan adalah Laporan Patroli/Sosialisasi yang dilaksanakan dalam Satu Tahun dengan target 0 laporan dan capaian realisasi yaitu 0 laporan atau telah sesuai target.

5. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/Tahun.

Output kegiatan adalah industri HHK yang dibina dan diawasi dengan target 0 industri dan capaian realisasi yaitu 0 industri atau telah sesuai target.

- Sub kegiatan Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 m³/Tahun.

Output sub kegiatan adalah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah dengan target 0 unit pengolahan dan capaian realisasi yaitu 0 unit pengolahan atau telah sesuai target.

6. Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Output kegiatan adalah unit pengolahan HHBK dengan target 3 unit manajemen dan capaian realisasi yaitu 3 unit manajemen atau telah sesuai target.

- Sub kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Unit Manajemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH dengan target dan realisasi yakni sebagai berikut :

- a. KPH Unit IV Gorontalo Utara dengan target 1 unit manajemen dan capaian realisasi yaitu 1 unit manajemen atau telah sesuai target.
- b. KPH Unit V Boalemo dengan target 1 unit manajemen dan capaian realisasi yaitu 1 unit manajemen atau telah sesuai target.
- c. KPH Unit VI Gorontalo dengan target 1 unit manajemen dan capaian realisasi yaitu 1 unit manajemen atau telah sesuai target. Anggaran pada sub kegiatan ini berasal dari DBH DR.

2) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan.

Outcome dari program adalah Jumlah KTH/KUPS yang meningkat kelasnya dengan target 0 KTH/KUPS dan capaian realisasi yaitu 0 KTH/KUPS atau telah sesuai target.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

Output kegiatan adalah Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang diberikan penyuluhan dan pemberdayaan dengan target 0 KTH/KUPS dan capaian realisasi yaitu 0 KTH/KUPS atau telah sesuai target.

- Sub kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.

Output sub kegiatan adalah luas kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial dengan target 0 Ha dan capaian realisasi yaitu 0 Ha atau telah sesuai target.

3) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Outcome dari program adalah Persentase DAS yang dikelola dengan target 5,56% dan capaian realisasi telah melebihi target yaitu 5,66%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah DAS yang dikelola dengan target 6 DAS dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 6 DAS.

- Sub kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS.

Output sub kegiatan adalah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS dengan target 0 dokumen dan capaian realisasi yaitu 0 dokumen atau telah sesuai target.

4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program adalah Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target 100% dengan realisasi capaiannya yakni sebanyak 100% atau telah sesuai target.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output kegiatan adalah paket Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan dengan target 57 paket dan terealisasi dengan capaian sebanyak 59 paket atau telah melebihi target.

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output sub kegiatan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan dengan target dan realisasi yakni sebagai berikut :

a. KPH Unit I dan II Gorontalo Barat dengan target 6 paket dan capaian realisasi yaitu 6 paket atau telah sesuai target. 6 paket Peralatan dan Perlengkapan



- Kantor yang Disediakan yakni paket : 1) ATK; 2) Kertas dan Cover; 3) Benda Pos; 4) Bahan Komputer; 5) Perabot Kantor; dan 6) Alat listrik.
- b. KPH Unit III Pohuwato dengan target 10 paket dan capaian realisasi yaitu 11 paket atau telah melebihi target. 11 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan yakni paket : 1) Bangunan Konstruksi; 2) Bahan lainnya; 3) ATK; 4) Kertas dan Cover; 5) Benda Pos; 6) Perabot Kantor; 7) Alat listrik; 8) Kendaraan bermotor roda dua; 9) Mebel; 10) Alat pendingin; dan 11) Personal komputer.
 - c. KPH Unit IV Gorontalo Utara dengan target 7 paket dan capaian realisasi yaitu 7 paket atau telah sesuai target. 7 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan yakni paket : 1) ATK; 2) Kertas dan Cover; 3) Benda Pos; 4) Bahan komputer; 5) Perabot kantor; 6) Alat listrik; dan 7) Peralatan studio audio.
 - d. KPH Unit V Boalemo dengan target 12 paket dan capaian realisasi yaitu 12 paket atau telah sesuai target. 12 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan yakni paket : 1) Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi; 2) Bahan-bahan Lainnya; 3) ATK; 4) Kertas dan Cover; 5) Benda Pos; 6) Bahan Komputer; 7) Perabot Kantor; 8) Alat Listrik; 9) Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya; 10) Alat Pendingin; 11) Personal komputer; 12) Komputer Unit Lainnya.
 - e. KPH Unit VI Gorontalo dengan target 8 paket dan capaian realisasi yaitu 8 paket atau telah sesuai target. 8 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan yakni paket : 1) ATK; 2) Kertas dan Cover; 3) Benda Pos; 4) Bahan Komputer; 5) Perabot Kantor; 6) Alat Listrik; 7) Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya; 8) Alat Pendingin.
 - f. KPH Unit VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo dengan target 14 paket dan capaian realisasi yaitu 15 paket atau telah melebihi target. 15 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan yakni paket : 1) Bahan Bangunan dan Konstruksi; 2) Bahan Baku; 3) ATK; 4) Kertas dan Cover; 5) Benda Pos; 6) Dokumen/administrasi tender; 7) Bahan Komputer; 8) Perabot Kantor; 9) Alat Listrik; 10) Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya; 11) Jasa upah buruh; 12) Pompa air (dap); 13) Kendaraan bermotor beroda dua; 14) Alat pendingin ruangan; dan 15) Laptop.
- Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
Output sub kegiatan adalah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan target 6 paket dan capaian realisasi yaitu 6 paket atau telah sesuai target.
 - Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
Output sub kegiatan adalah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan target 4 laporan dan capaian realisasi yaitu 4 laporan atau telah sesuai target.



- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Output sub kegiatan adalah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 6 laporan dan capaian realisasi yaitu 6 laporan atau telah sesuai target.
- 2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Output kegiatan adalah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dengan target 12 laporan dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 12 laporan.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Output sub kegiatan adalah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target 6 laporan dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 6 laporan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
Output sub kegiatan adalah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan target 6 laporan dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 6 laporan.
- 3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Output kegiatan adalah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan target 24 unit dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 24 unit.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Output sub kegiatan adalah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya dengan target 12 unit dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 12 unit.
- Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Output sub kegiatan adalah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target 12 unit dan capaian realisasi telah sesuai target yaitu 12 unit.
- 3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo 2023-2026, Khusus Indikator Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.157
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Kehutanan
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2024
 Sesuai Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Penurunan Emisi GRK	-	-

- 4. Hal-Hal Lain Yang Perlu Disampaikan.
 - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
Permasalahan yang dihadapi :



- 1) Terdapat ketidaksesuaian rencana design bangunan;
- 2) Masih terbatasnya penyedia/vendor yang terdaftar pada sistem e -purchasing khususnya pada kendaraan roda empat;
- 3) Kurangnya informasi pengguna jasa terhadap regulasi dan sistim pengadaan barang dan jasa.

Solusi :

- 1) Melakukan revisi design gambar bangunan berdasarkan kebutuhan material dan bahan;
 - 2) Perlu dilakukan sosialisasi sistem e-procurement kepada pengguna jasa dan penyedia untuk jenis barang yang mendesak;
 - 3) Membangun komitmen yang jelas oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan berbasis teknologi.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Permasalahan yang dihadapi :
 - 1) Tagihan air yang akan melonjak jika terjadi kebocoran pipa;
 - 2) Fluktuasi Pemakaian Listrik yang Meningkat;
 - 3) Jadwal Pembayaran Jasa Internet yang melewati tanggal penagihan sehingga memperlambat jadwal realisasi bulanan.

Solusi :

- 1) Melakukan revisi anggaran;
 - 2) Mengoptimalkan penggunaan energi dengan mengatur penggunaan listrik sesuai kebutuhan;
 - 3) Merubah tanggal pembayaran pada awal bulan berjalan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Persamalahan yang dihadapi :
 - 1) Kesulitan dalam mengidentifikasi kinerja tenaga penunjang

Solusi :

- 1) Membuat sistem penilaian kinerja berbasis output yang jelas, yang menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran dan pembayaran gaji tenaga penunjang.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Permasalahan yang dihadapi :
 - 1) Barang yang telah direncanakan pada E-Catalog sering tidak tersedia;
 - 2) Keterbatasan dana yang tersedia dapat menghambat pengadaan peralatan yang diperlukan secara optimal;
 - 3) Sulitnya mendapatkan barang yang sesuai spesifikasi dan kualitas yang diinginkan di pasar dapat menghambat pelaksanaan kegiatan.

Solusi :

- 1) Mengajukan permohonan perubahan metode pemilihan, menyampaikan Justifikasi teknis;

- 2) Melakukan analisis untuk memprioritaskan pengadaan peralatan yang paling mendesak dan penting, sehingga anggaran yang terbatas dapat digunakan secara efisien;
 - 3) Melakukan riset pasar secara berkala untuk mengetahui tren dan ketersediaan barang, sehingga dapat merencanakan pengadaan dengan lebih baik.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Permasalahan yang dihadapi :
- 1) Penjadwalan rapat koordinasi yang melibatkan banyak pihak sering kali sulit dilakukan karena adanya kesibukan dan jadwal yang tumpang tindih antar pejabat dan SKPD yang terlibat;
 - 2) Keterbatasan jumlah personel yang terlibat dalam penyelenggaraan rapat atau adanya kekurangan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan dan mengikuti rapat;
 - 3) Sering kali hasil rapat tidak terdokumentasi dengan baik, atau tindak lanjut dari keputusan yang diambil dalam rapat tidak terpantau, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak diimplementasikan dengan optimal.

Solusi :

- 1) Merencanakan jadwal rapat dengan waktu yang cukup jauh sebelumnya agar setiap pihak dapat menyesuaikan jadwal mereka serta Menerapkan jadwal yang fleksibel dengan opsi waktu alternatif untuk memudahkan semua pihak yang terlibat untuk hadir;
- 2) Menambah jumlah staf yang dilibatkan dalam persiapan dan pelaksanaan rapat, serta memastikan adanya pembagian tugas yang jelas dan memanfaatkan teknologi untuk menyelenggarakan rapat secara daring (online) jika memungkinkan, sehingga menghemat waktu dan sumber daya;
- 3) Menyusun notulen rapat secara rinci dan cepat, serta memastikan bahwa hasil rapat didistribusikan kepada semua pihak yang terlibat dan membuat sistem monitoring dan evaluasi untuk menindaklanjuti keputusan rapat serta memastikan implementasi berjalan dengan baik.

E. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

E.1 Dinas Tenaga Kerja, ESDM Dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
 - Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
 - Meningkatkan ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim.



b. Sasaran dan Program

Tabel 3.158
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Pembangunan rendah karbon	Indikator Sasaran : Persentase bauran energi terbarukan	13,58%	12,35%	90,94%
	Program pengelolaan energi terbarukan	Persentase pemanfaatan potensi energi terbarukan	2,40%	1,95%	81,25%
	Program pengelolaan aspek kegeologian	Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah	43%	29%	67,44%
	Program pengelolaan mineral dan batubara	Persentase pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan	100%	100%	100%
2	Sasaran : Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenaga Listrikan	Indikator sasaran : Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang Listrik	39,74%	34,96%	87,97%
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik	39,74%	34,96%	87,97%

1) Sasaran : Pembangunan Rendah Karbon

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase bauran energi terbarukan dengan target tahun 2024 sebesar 13,58%. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah realisasi pemanfaatan energi dari sektor EBT dengan jumlah total pemanfaatan energi.

Tercatat data bauran energi sebagai berikut : Capaian porsi EBT 12,35%, minyak bumi sebesar 53,14 %, gas bumi sebesar 13,64% dan batubara sebesar 20,87%. Dari data tersebut menggambarkan banwa capaian tahun 2024 tidak mencapai target atau sebesar 90,94%.

2) Sasaran : Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase Persentase Jumlah Rumah tangga terpasang listrik sebesar 39,74%. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik dan jumlah rumah tangga sasaran yang belum berlistrik.

Data awal Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tercatat bahwa jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang belum berlistrik sebanyak 7.255 RTS. Jumlah rumah tangga sasaran yang mendapatkan instalasi Listrik gratis pada tahun 2023 sebanyak 65 RTS, sehingga rumah tangga sasaran yang telah terpasang Listrik sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 2.471 RTS. Hal tersebut menggambarkan capaian Persentase jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik sebesar 34,06%.



2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.159
 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
 Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program pengelolaan energi terbarukan	146.089.300	144.893.099	99,18	100		
1a	Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	90.815.300	89.855.700	98,94	100		
	- Sub kegiatan Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	90.815.300	89.855.700	98,94	100	Adanya penundaan kegiatan pengawasan karena Lokasi kegiatan umumnya berada di daerah terisolir dan akses mencapai lokasi terkendala cuaca ekstrem	Melaksanakan kegiatan setelah cuaca lebih kondusif
1b	Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	55.274.000	55.037.399	99,57	100		
	- Sub kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	55.274.000	55.037.399	99,57	100		
2	Program pengelolaan aspek kegeologian	105.750.000	105.708.200	99,96	100		
2a	Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	105.750.000	105.708.200	99,96	100		
	- Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	105.750.000	105.708.200	99,96	100		
3	Program pengelolaan mineral dan batubara	161.960.000	161.919.967	99,98	100		
3a	Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah	161.960.000	161.919.967	99,98	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil						
	- Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	161.960.000	161.919.967	99,98	100		
4	Program pengelolaan ketenagalistrikan	397.646.200	392.299.183	98,66	100		
4a	Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	56.065.800	56.065.500	100,00	100		
	- Sub kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	56.065.800	56.065.500	100,00	100		
4b	Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	341.580.400	336.233.683	98,43	100		
	- Sub kegiatan Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	341.580.400	336.233.683	98,43	100	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dikarenakan keterlambatan data usulan penerima manfaat	Koordinasi dengan pihak
JUMLAH		811.445.500	804.820.449	99,18	100		

1) Program pengelolaan energi terbarukan
 Outcome dari program adalah Persentase pemanfaatan potensi energi terbarukan dengan target sebesar 2,40%. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan membandingkan pemanfaatan potensi energi terbarukan di Provinsi Gorontalo.
 Pada tahun 2024 tercatat bahwa pemanfaatan potensi energi terbarukan sebesar 36,21 mw dari total potensi energi terbarukan Provinsi Gorontalo sebesar 1.852 mw atau dengan persentase sebesar 1,95%.



a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi.

Output kegiatan adalah 1 dokumen pengelolaan energi terbarukan. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah.

Output sub kegiatan adalah target sebanyak 1 laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah dan realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu sebesar 1 laporan atau 100%.

2. Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi.

Output kegiatan adalah 1 dokumen pengelolaan konservasi energi. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi.

Output sub kegiatan adalah target sebanyak 1 laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi.

2) Program pengelolaan aspek kegeologian

Outcome dari program adalah Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah dengan target 43%. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan membandingkan jumlah dokumen konservasi Air Tanah yang disusun dan jumlah zona konservasi Air Tanah. Pada tahun 2024, kegiatan yang mendukung pencapaian outcome tidak dilaksanakan karena tidak mendapatkan alokasi anggaran, sehingga capaian outcome sampai dengan tahun 2024 masih sama dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 29%. Nilai tersebut diperoleh dari 2 (dua) data zona konservasi yang tersedia dari 7 (tujuh) zona konservasi air tanah. Hal itu menggambarkan pencapaian outcome dari target yang ditetapkan tahun 2024 adalah sebesar 67,44%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi

Output kegiatan adalah 1 laporan pengendalian dan pemanfaatan air tanah. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari sub kegiatan sebagai berikut :



- Sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.
Output sub kegiatan adalah target sebanyak 1 laporan hasil pengendalian dan pengawasan implementasi nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi dan realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu 1 laporan atau 100%.

3) Program pengelolaan mineral non logam dan batuan

Outcome dari program adalah Persentase pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan dengan target 100%.. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan membandingkan jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda dan jumlah usaha tambang sesuai kewenangan provinsi. Tercatat pada tahun 2024 telah diterbitkan 28 rekomendasi teknis usaha tambang yang sesuai kewenangan provinsi yang tidak melanggar perda dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rekomendasi Teknis IUP Batuan Tahap Eksplorasi berjumlah 14 Rekomtek
- b. Rekomendasi Teknis IUP Batuan Tahap Operasi produksi berjumlah 8 Rekomtek
- c. Rekomendasi Teknis SIPB berjumlah 6 Rekomtek

Hal tersebut menggambarkan Persentase pengawasan dan pembinaan usaha pertambangan mencapai 100%.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.

Output kegiatan adalah 1 laporan hasil pengendalian dan pengawasan wilayah izin usaha pertambangan. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.

Output sub kegiatan adalah target sebanyak 1 laporan hasil pengendalian pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil dan realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu 1 laporan atau 100%.

4) Program pengelolaan ketenagalistrikan

Outcome dari program adalah Persentase jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang listrik sebesar 39,74%. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan membandingkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik dan jumlah rumah tangga sasaran yang belum berlistrik. Data awal Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo tercatat bahwa jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang belum berlistrik sebanyak 7.255 RTS. Jumlah rumah



tangga sasaran yang mendapatkan instalasi Listrik gratis dengan daya 900VA pada tahun 2024 sebanyak 65 RTS, sehingga rumah tangga sasaran yang telah terpasang Listrik sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 2.536 RTS. Hal tersebut menggambarkan capaian Persentase jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik sebesar 34,96% atau 87,97% dari target yang ditetapkan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah 3 dokumen rekomendasi izin operasi yang diterbitkan. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.

Output sub kegiatan adalah target sebanyak 2 rekomendasi izin operasi yang diterbitkan dan realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu 3 rekomendasi atau 150%.

2. Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

Output kegiatan adalah 65 Kepala Keluarga penerima manfaat dari kelompok Masyarakat tidak mampu. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu.

Output sub kegiatan adalah target sebanyak 60 keluarga penerima manfaat Listrik gratis dari kelompok Masyarakat tidak mampu dan realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu 65 keluarga atau 108,33%. Pelaksanaan pemasangan instalasi Listrik gratis berlokasi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 364/34/IX/2024 dan 468/34/IX/2024 terdiri dari :

a) Kota Gorontalo	: 2 rumah tangga
b) Kabupten Gorontalo	: 18 rumah tangga
c) Kabupaten Boalemo	: 8 rumah tangga
d) Kabupaten Bone Bolango	: 8 rumah tangga
e) Kabupaten Gorontalo Utara	: 29 rumah tangga

3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024



Tabel 3.160
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2024
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1.	Rasio Elektrifikasi	99,7%	99,99%
2.	Persentase bauran energi terbarukan	13,58%	12,35%
3.	Persentase Jumlah Rumah Tangga terpasang listrik	39,74%	34,96%

F. Urusan Perdagangan

F.1 Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
 - meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian.
 - b. Sasaran dan program

Tabel 3.161
 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Perdagangan
 Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah), Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD)	Indikator : Jumlah Nilai Eksport	\$14.807.701,00	\$52.967.332,45	
	Program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting	28 Laporan	43 Laporan	153,58
	Program pengembangan ekspor	Jumlah komoditi unggulan yang dieksport	7 Komoditi	8 Komoditi	Program ini tidak mendapat porsi anggaran karena keterbatasan fiskal daerah untuk melaksanakan



No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
					kegiatan pendukung
	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%

- Keterangan :
- Jumlah Nilai Eksport Tahun 2024 berjumlah \$52.967.332,45 data ini diperoleh dari penerbitan Surat Keterangan Asal dan BPS Provinsi Gorontalo.
 - Komoditi Export 2024 yaitu molases, wood pelet, santan beku, minyak mentah, kelapa parut, jagung, ikan, kepiting.
 - Tahun 2024 terdapat 1 program yang tidak mencapai target kinerja karena tidak teranggarkan di tahun 2024 (keterbatasan fiskal daerah) yaitu program pengembangan export.

2. Program dan Kegiatan

Total Pagu setelah perubahan 2024 untuk urusan Perdagangan sebesar Rp. 7.720.000.982,- dengan realisasi Rp. 7.622.759.003,- (capaian fisik 99,99% dan keuangan 96,23%) dan silva Rp. 97.241.979,-

Ditahun 2024 untuk urusan perdagangan melaksanakan 3 (tiga) program, 5 (lima) kegiatan. Pagu awal untuk urusan perdagangan ini sebesar Rp. 2.920.037.100,- kemudian revisi sebesar Rp. 2.817.283.882,-, pada sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pada beberapa belanja yang bersesuaian antara lain Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (termasuk tambahan Insentif Fiskal periode 3 sebesar Rp. 2.961.150.000,- dan pergeseran antar OPD berkurang Rp. 370.650.100) serta belanja lainnya seperti makan minum aktifitas lapangan.

Pada tahapan APBD-P 2024 sebesar Rp. 1.982.680.000,- yaitu pada kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan sebesar Rp. 1.427.180.000,- dan kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota Rp. 555.500.000,-

Pada tahun 2024 Anggaran pada sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi telah ditagging melalui sumber dana IF berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 900.1.14.5/BKPG/2320/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Insentif Fiskal IF (IF Kinerja Tahun Sebelumnya) Tahun 2024 sebesar Rp. 3.774.379.000,-dan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 900.1.14.5/BKPG/6996/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024 tentang penggunaan sisa



insentif fiskal tahun 2023 dan sebelum (akumulatif) di tahun 2024 sebesar Rp. 1.793.752.085,-

Tagging anggaran ini tidak menambah anggaran pada sub kegiatan yang dimaksud. Tagging anggaran sisa insentif fiskal tahun 2023 dan sebelum (akumulatif) di tahun 2024 sebesar Rp. 1.793.752.085,- Tagging anggaran sebesar Rp. 1.793.752.085,- realisasinya akan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada sub kegiatan ini.

Total Pagu Anggaran Tahun 2024 setelah perubahan urusan perdagangan adalah sebesar Rp. 7.720.000.982,- dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp. -
- Belanja Barang/Jasa Rp. 7.720.000.982,-
- Belanja Modal Rp. -

Realisasi Anggaran pada per 31 Desember 2024 sebesar Rp 7.622.759.003,-

Tabel 3.162
 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perdagangan
 Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	TOTAL PAGU SETELAH PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				ANGGARAN	FISIK	KEU		
				(Rp)	(%)	(%)		
1	Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	29.616.750	29.616.750	29.467.120	100	99,49	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	29.616.750	29.616.750	29.467.120	100	99,49		
	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	29.616.750	29.616.750	29.467.120	100	99,49		
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.474.200.100	5.718.663.982	5.652.890.227	100	98,85	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
	Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1.474.200.100	5.718.663.982	5.652.890.227	100	98,85		
	- Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	103.400.000	124.080.000	123.978.000	100	99,92		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	TOTAL PAGU SETELAH PERUBAHAN 2024	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
				ANGGARAN	FISIK	KEU		
				(Rp)	(%)	(%)		
	Lintas Kabupaten/Kota							
	- Sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.370.800.100	5.594.583.982	5.528.912.227	100	98,83		
3	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	1.416.220.250	1.971.720.250	1.940.401.656	100	98,81	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran ditahun selanjutnya secara maksimal
	Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	1.253.616.750	1.809.116.750	1.778.113.248	100	98,29		
	- Sub kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	1.253.616.750	1.809.116.750	1.778.113.248	100	98,29		
	Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	123.166.750	123.166.750	122.853.360	100	99,75		
	- Sub kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian	53.322.000	53.322.000	53.134.150	100	99,65		
	- Sub kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	69.844.750	69.844.750	69.719.210	100	99,82		
	-							
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	39.436.750	39.436.750	39.435.048	100	99,99		
	- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	39.436.750	39.436.750	39.435.048	100	99,99		
JUMLAH		2.920.037.100	7.720.000.982	7.622.759.003	100	96,23		

1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Outcome dari program adalah Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi dengan target 2 dokumen dan capaian 1 dokumen *yaitu Dokumen Surat keterangan asal dari* dari 5 (lima) perusahaan yaitu PT. Pabrik Gula Gorontalo, PT. Biomas Jaya Abadi, PT. Milenium Agro Selebes, PT. Seger Agro Nusantara.



Target kinerja tidak tercapai karena 1 sub kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan target 1 dokumen tidak dilaksanakan karena bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Untuk pelaksanaan program ini didukung oleh anggaran sampai Desember 2024 sejumlah Rp. 29.616.750,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024 berjumlah Rp. 29.467.120,- (99,29% keuangan dan 100% fisik), pada program ini tidak terdapat revisi maupun perubahan pada APBD-P 2024. Adapun silva pada program ini Rp. 149.630 pada beberapa belanja. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena adanya sisa belanja yang tidak dapat dimanfaatkan lagi.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API).

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal dengan target 9 dokumen, capaian 47 dokumen yaitu dokumen Surat Keterangan Asal. Output adalah :

a) Pendataan pengawasan monitoring dan evaluasi ekspor di pelabuhan dan identifikasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo.

Tujuan pelaksanaan kegiatan :

- Pelaksanaan pendataan, monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor di kabupaten/kota.
- Tersusunnya data pelaku usaha/eksportir yang menggunakan SKA dan identifikasi permasalahan eksportir terhadap penggunaan aplikasi SKA.

Adapun realisasi export tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.163

Rekap Realisasi Ekspor Berdasarkan Komoditi
Selang Bulan Januari – Desember 2024

NO	JENIS KOMODITI	JUMLAH KOMODITI (KG)	NILAI EKSPOR (USD)	NEGARA TUJUAN	EKSPORTIR
1	MOLASES	32.634.272	5.496.316,65	KOREA	PT. PABRIK GULA GORONTALO
2	WOOD PELET	186.815.057	25.587.390,69	KOREASELATAN,JE PANG	PT. BIOMAS JAYA ABADI
3	SANTAN BEKU	473.503	473.503	CINA	PT. MILENIUM AGRO SELEBES
4	MINYAK MENTAH	179.205	157.637,00	CINA	PT. MILENIUM AGRO SELEBES
5	KELAPA PARUT	6.947.162	12.005.749,50	EROPA,CHINA,SAU DI ARABIA	
6	JAGUNG	32.900.000	9.120.637,50	FILIPINA	PT. SEGER AGRO NUSANTARA



NO	JENIS KOMODITI	JUMLAH KOMODITI (KG)	NILAI EKSPOR (USD)	NEGARA TUJUAN	EKSPORTIR
7	IKAN	38.649,64	123.097,51	SINGAPURA MALAYSIA,JEPANG	
8	KEPITING	450,1	3.000,60	SINGAPURA, JEPANG	
	J U M L A H	259.988.299	52.967.332,45		

Tabel 3.164
Penerbitan SKA
Yang Dokumennya Telah Diterima dengan Lengkap dan Benar
Tahun 2024

No	Tgl. Terbit	No. SKA	Invoice Number	Nama Eksportir	Nama Importir
1	05-Jan-24	0000001/GTL/2024	SKA-SB-2312-03/YCM038	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO.,GUANGDONG, CHINA
2	05-Jan-24	0000002/GTL/2024	SKA-SB-2312-05/YCM040	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO.,GUANGDONG, CHINA
3	09-Jan-24	0000003/GTL/2024	INV.0280/BJA/APB/I/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO. TOKYO 104-8429 JAPAN
4	19-Jan-24	0000004/GTL/2024	SKA-SB-2312-06/YCM041	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
5	22-Jan-24	0000005/GTL/2024	SKA-SB-2312-07/YCM042	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
6	30-Jan-24	0000006/GTL/2024	INV.006/BJA/APB/I/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. TOKYO 104-8429 JAPAN
7	01-Feb-24	0000007/GTL/2024	SKA-MP-2401-01	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY CHINA
8	01-Feb-24	0000008/GTL/2024	SKA-SB-2401-03/YCM045	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
9	01-Feb-24	0000009/GTL/2024	SKA-SB-2401-01/YCM043	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
10	01-Feb-24	0000010/GTL/2024	SKA-SB-2401-04/YCM046	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
11	05-Feb-24	0000011/GTL/2024	SKA-SB-2401-02/YCM044	PT MILLENIUM	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO.,



No	Tgl. Terbit	No. SKA	Invoice Number	Nama Eksportir	Nama Importir
				AGROINDO SELEBES	GUANGDONG, CHINA
12	07-Feb-24	0000012/GTL/2024	003/FD-TLM/I/2024	PT PABRIK GULA GORONTALO	UM KOREA GANGNAM-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA
13	07-Feb-24	0000013/GTL/2024	005/FD-TLM/I/2024	PT PABRIK GULA GORONTALO	UM KOREA GANGNAM-GU, SEOUL, REPUBLIC OF KOREA
14	13-Feb-24	0000014/GTL/2024	INV.031/BJA/HAN/II/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. TOKYO 104-8429 JAPAN
15	15-Feb-24	0000015/GTL/2024	SKA-SB-2401-05/YCM047	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
16	20-Feb-24	0000016/GTL/2024	SKA-SB-2401-08/YCM050	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
17	20-Feb-24	0000017/GTL/2024	SKA-SB-2401-07/YCM049	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
18	20-Feb-24	0000018/GTL/2024	SKA-SB-2401-06/YCM04 8	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
19	29-Feb-24	0000019/GTL/2024	SKA-MP-2402-01	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA
20	29-Feb-24	0000020/GTL/2024	SKA-SB-2402-01/YCM051	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
21	01-Mar-24	0000021/GTL/2024	INV.067/BJA/APB/II/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD. TOKYO 104-8429 JAPAN
22	19-Mar-24	0000022/GTL/2024	SKA-MP-2401-02	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA
23	19-Mar-24	0000023/GTL/2024	SKA-SB-2402-03/YCM053	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO., GUANGDONG, CHINA
24	19-Mar-24	0000024/GTL/2024	SKA-MP-2402-02	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY XIAMEN



No	Tgl. Terbit	No. SKA	Invoice Number	Nama Eksportir	Nama Importir
					CITY, FUJIAN, CHINA
25	19-Mar-24	0000025/GTL/2024	SKA-SB-2402-02/YCM052	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO.,
					GUANGDONG, CHINA
26	20-Mar-24	0000026/GTL/2024	INV.093/BJA/HAN/III/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO.,TOKYO 104-8429 JAPAN
27	22-Mar-24	0000027/GTL/2024	SKA-SB-2402-04/YCM054	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO.,
					GUANGDONG, CHINA
28	28-Mar-24	0000028/GTL/2024	SKA-SB-2403-02/YCM056	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU FENGYIN TRADING CO.,
					GUANGDONG, CHINA
29	29-Apr-24	0000029/GTL/2024	INV.128/BJA/APB/IV/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO., LTD.
					TOKYO 104-8429 JAPAN
30	08-Mei-24	0000030/GTL/2024	SKA-SB-2404-01/YCM055	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU YEHUANG FOODS CO., GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA
					CHINA
31	13-Mei-24	0000031/GTL/2024	INV.052/BJA/ITC/V/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	ITOCHU CORPORATION, TOKYO, 107-8077, JAPAN
32	28-Mei-24	0000032/GTL/2024	SKA-MP-2404-01	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY, XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA
33	14-Jun-24	0000033/GTL/2024	INV.190/BJA/APB/VI/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU,
					TOKYO 104-8429 JAPAN
34	05-Jul-24	0000034/GTL/2024	SKA-MP-2405-01	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	XIAMEN CIVI ELECTRONIC COMMERCE COMPANY, TOWER WUHAN BUILDING, XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA
35	16-Jul-24	0000035/GTL/2024	INV.237/BJA/APB/VII/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
36	02-Agu-24	0000036/GTL/2024	01/YGU/INV/SAMPLE/VII/2024	PT YASMIR GLOBALINDO UTAMA	ROERIT MAHAYANTI
					RRUGA HAKI SHEHU 38, 1001 TIRANA
					ALBANIA
37	02-Agu-24	0000037/GTL/2024	02/YGU/INV/SAMPLE/VII/2024	PT YASMIR GLOBALINDO UTAMA	STEFANO BIAGGI, DANPROM SA VIA PAOLO TORRIANI



No	Tgl. Terbit	No. SKA	Invoice Number	Nama Eksportir	Nama Importir
					5, 6850 MENDRISIO SWITZERLAND
38	12-Agu-24	0000038/GTL/2024	SKA-SB-2407-01/YCM057	PT MILLENIUM AGROINDO SELEBES	GUANGZHOU YEHUANG FOODS CO., GUANGZHOU, GUANGDONG, CHINA
					CHINA
39	15-Agu-24	0000039/GTL/2024	INV.292/BJA/APB/VIII/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
40	26-Agu-24	0000040/GTL/2024	INV.327/BJA/HAN/VIII/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
41	27-Agu-24	0000041/GTL/2024	010/FD-TLM/VIII/2024	PT PABRIK GULA GORONTALO	GINEBRA SAN MIGUEL, INC.
					ST.,MANDALUYONG CITY, PHILIPPINES
42	13-Sep-24	0000042/GTL/2024	013/FD-TLM/IX/2024	PT PABRIK GULA GORONTALO	GINEBRA SAN MIGUEL, INC.
					ST.,MANDALUYONG CITY, PHILIPPINES
43	18-Sep-24	0000043/GTL/2024	INV.357/BJA/APB/IX/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
44	07-Okt-24	0000044/GTL/2024	INV.369/BJA/APB/X/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
45	18-Okt-24	0000045/GTL/2024	INV.432/BJA/APB/X/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
46	11-Nov-24	0000046/GTL/2024	INV.467/BJA/APB/XI/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN
47	16-Des-24	0000047/GTL/2024	INV.517/BJA/APB/XII/2024	PT BIOMASA JAYA ABADI	HANWA CO, CHUO-KU, TOKYO 104-8429 JAPAN

2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Outcome dari program adalah Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan target 28 Laporan, Capaian 43 Laporan yaitu 12 Laporan pemantauan harga dan 31 laporan pelaksanaan Operasi pasar.

a. Pelaksanaan Program

- Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
 - Sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota.



Output sub kegiatan adalah 12 laporan, capaian 12 laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota.

Pagu awal sub kegiatan ini yaitu Rp. 103.400.000,- dan tambahan pada APBD-P sebesar Rp. 20.680.000,- sehingga pagu akhir hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp. 124.080.000,- dengan realisasi Rp. 123.978.000,- dengan realisasi keuangan 99,67% dan fisik 100%.

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu 12 laporan, capaian 12 laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota.

Pelaksanaan sub kegiatan :

a) Pemantauan, Pengumpulan, dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting yang dilaporkan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan harga barang pokok dan barang penting bertujuan untuk :

- Mengetahui perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara periodik;
- Mengantisipasi terjadinya kondisi yang mengganggu kegiatan perdagangan nasional, yang meliputi gangguan pasokan dan/atau kondisi harga barang pokok dan/atau barang penting berada diatas harga acuan atau dibawah harga acuan;
- Mengetahui tingkat disparitas harga antar waktu dan antar wilayah;
- Bahan masukan untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi barang pokok dan barang penting dalam rangka stabilisasi harga.

Pelaksanaan pemantauan harga tidak terlepas dari permasalahan teknis dan non teknis, seperti adanya perbedaan harga antara petugas pemantau harga di kabupaten kota dan provinsi terhadap pasar pantauan yang sama.

Sebagai upaya dalam menyamakan persepsi serta ketaatan/ketepatan waktu dan substansi materi terkait pelaporan pemantauan pasar dan harga barang kebutuhan pokok, maka diperlukan ha-hal diantaranya :

- Pelaporan terkait ketersediaan dan kondisi harga barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan yang terkonfirmasi dengan petugas dari dinas terkait di kota/kabupaten;



- Ketepatan data dan kepatuhan batas waktu pelaporan merupakan hal yang sangat penting, sehingga para petugas pendataan dan pelaporan harus benar-benar memperhatikan hal ini termasuk validitas datanya.
- b) Pemantauan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Menyambut Ramadhan dan Idul Fitri.
Pemantauan ketersediaan dan stok barang kebutuhan jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445H/2024M dilaksanakan tanggal 5 April 2024 di tiga gudang distributor yakni gudang PT Awet Sarana Sukses, PT Cipta Langgeng Mitra Sukses, dan PT Manggala Utama Distrindo. Dua gudang lainnya yakni di Hypermart Gorontalo dan gudang Bulog Sub Divre Gorontalo.
Berdasarkan peninjauan tercatat stok beras ada 850 ton, gula 920 ton. Minyak goreng 170 ton dan terigu 131 ton. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dengan harga yang stabil.
- c) Honorarium pengolah data harga dan informasi harga barang pokok dan barang penting.
- Sub kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah laporan pelaksanaan Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dengan capaian 31 laporan dari target 4 laporan.
Anggaran induk sub kegiatan ini berjumlah Rp. 1.370.800.100,- kemudian mengalami revisi sebesar Rp. 2.817.283.882,-
Revisi anggaran termasuk tambahan anggaran melalui IF periode 3 2023 sebesar Rp. 2.961.150.000,- berdasarkan Surat Persetujuan DPRD Nomor : 160/DPRD/435/III/2024 tanggal 05 Maret 2024 yaitu Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat serta beberapa belanja lainnya yang bersesuaian.
Pada tahapan APBD-P 2024 mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 1.406.500.000,- Adapun tambahan anggaran terdapat pada beberapa belanja antara lain belanja bahan cetak, belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 1.327.195.000,-; belanja makan minum rapat, sewa alat kantor dan perjalanan dinas pendukung kegiatan. sehingga total pagu sub kegiatan ini setelah perubahan sebesar Rp. 5.594.583.982- dengan realisasi Rp. 5.528.912.227,- (99,02% keuangan, fisik 100%).



Output sub kegiatan adalah Jumlah laporan pelaksanaan Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dengan capaian 31 laporan dari target 4 laporan.

- a) Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi tahun 2024 yang dilaksanakan 31 kali di kabupaten kota se Provinsi Gorontalo, dengan jumlah penerima 35.600 penerima.

Kegiatan fasilitasi Operasi Pasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) wilayah Gorontalo, dengan menyediakan produk antara lain Beras, Gula Pasir, Minyak Goreng, dan Terigu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, utamanya Komoditi Beras, dengan pertimbangan harga beras yang terus meningkat, tidak diimbangi dengan pasokan yang mulai berkurang, ditambah peningkatan permintaan menjelang bulan Ramadhan 1445.

Kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya wilayah yang masuk dalam objek pantauan perhitungan inflasi daerah, dimana kegiatan ini akan turut mempengaruhi perhitungan inflasi nasional, yang meliputi wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Sasaran Operasi Pasar adalah masyarakat umum, dan lokasi pelaksanaannya bertempat di pasar tradisional, yang buka secara mingguan, sesuai dengan jadwalnya masing-masing.

Lokasi kegiatan Operasi Pasar di fokuskan di 3(tiga) wilayah, antara lain : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Lebih spesifik lagi Operasi Pasar menyasar pada masyarakat yang berbelanja di Pasar Tradisional mingguan, sesuai dengan jadwalnya masing-masing, mulai dari Pukul 07.00 Wita sampai dengan selesai.

Masyarakat diberikan kesempatan berbelanja sesuai dengan antriannya, dan dibatasi untuk setiap warga hanya dapat berbelanja maksimal 1 item/ orang. Dalam giat ini, BULOG menyediakan produk beras SPHP ukuran 5 kg, dijual dengan harga Rp. 10.400/kg, Gula Pasir dijual dengan harga Rp. 18.000/kg, Minyak Goreng dijual dengan harga Rp. 14.000/liter, dan terigu dijual dengan harga Rp11.000/kg. Setiap hari OP dilaksanakan di 2(dua) lokasi pasar tradisional, dan terbatas hanya dapat melayani untuk 200(Dua Ratus) warga masyarakat.



b) Pasar Murah Bersubsidi

Pelaksanaan program dan kegiatan pasar barang kebutuhan pokok bersubsidi atau yang juga dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Pasar Murah Bersubsidi, Pemerintah Provinsi Gorontalo menyediakan dan menjual komoditi yang turut mempengaruhi inflasi yaitu :

- Beras kemasan 5 Kg dijual dengan harga Rp.25.000 atau @Rp.5.000/Kg;
- Gula Pasir kemasan 1 Kg dijual Rp.10.000/Kg;
- Minyak Goreng kemasan botol 1 liter dijual Rp.10.000/Liter;
- Telur kemasan 10 butir dijual Rp.10.000/pack atau @Rp.1.000/butir;
- Cabai Rawit dikemas dalam tas 0,5 Kg atau 0,25 Kg dijual Rp.10.000;
- Bawang Merah dikemas dalam tas 0,5 Kg dijual Rp.10.000/0,5 Kg;
- Bawang Putih dikemas dalam tas 0,5 Kg dijual Rp.10.000/0,5 Kg;
- Ayam Broiler dikemas dalam tas 1 Ekor dijual Rp 20.000;
- Ikan Tuna dikemas dalam *vacum seal* 0,5 Kg dijual Rp.20.000/0,5 Kg.

Untuk selang bulan Januari sampai dengan Desember 2024, kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Gorontalo, sebagai berikut :

Tabel 3.165
Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi Yang Dilaksanakan Tahun 2024

TITIK KE-	TANGGAL	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	KOTA/KAB	JUMLAH PAKET
1	09-Mar-24	SIMPANG 3 GORR TAPA DESA TALULOBUTU	TAPA	BONE BOLANGO	1500
2	10-Mar-24	KELURAHAN LIBUO	DUNGINGI	KOTA GORONTALO	1000
3	14-Mar-24	LAPANGAN DESA LUWOO	TALAGA JAYA	KABUPATEN GORONTALO	1500
4	26-Mar-24	KEJARI LIMBOTO DESA PONE	LIMBOTO BARAT	KABUPATEN GORONTALO	1500
5	02-Apr-24	KEJAKSAAN TINGGI DESA TOTO SELATAN	Kabila	BONE BOLANGO	2000
6	04-Apr-24	MAKO LANAL GORONTALO KEL. LEATO SELATAN	Dumbo Raya	KOTA GORONTALO	1000
7	06-Apr-24	POLDA GORONTAL DESA TULADENGGI	Telaga	KABUPATEN GORONTALO	1500
8	14-Apr-24	LAPANGAN DESA BULOTA	Limboto	KABUPATEN GORONTALO	1000
9	16-Apr-24	MAKOREM 133 NW DESA TRIDHARMA	Pulubala	KABUPATEN GORONTALO	1800



TITIK KE-	TANGGAL	KELURAHAN / DESA	KECAMATAN	KOTA/KAB	JUMLAH PAKET
10	18-Apr-24	PESANTREN SALAFIYAH DESA BANUROJA	Randangan	POHUWATO	1000
11	22-Apr-24	KOMP. PERKEBUNAN KAKAO DESA POLOHUNGO	Dulupi	BOALEMO	1000
12	27-Apr-24	KEMENKUMHAM DESA TOTO SELATAN	Kabila	BONE BOLANGO	1000
13	29-May-24	LAPANGAN DESA PANGGULO	Botupingge	BONE BOLANGO	1500
14	04-Jun-24	LAP. GARUDA PUTRA KEL. LEATO SELATAN	Dumbo Raya	KOTA GORONTALO	1000
15	05-Jun-24	AULA SERBAGUNA DESA MONGGUPO	Atinggola	GORONTALO UTARA	1500
16	05-Jun-24	KANTOR DESA MOLANTADU	Tomilito	GORONTALO UTARA	700
17	09-Jun-24	PASMOLIM KEL. KAYUBULAN	Limboto	KABUPATEN GORONTALO	1500
18	13-Jun-24	RUJAB WAGUB KEL. TANGGIKIKI	Sipatana	KOTA GORONTALO	1000
19	05-Jul-24	LAPANGAN DESA PENTADU	PAGUAT	POHUWATO	900
20	05-Jul-24	AULA DESA KARANGETANG	DENGILO	POHUWATO	300
21	05-Sep-24	LANAL GORONTALO KEL. LEATO SELATAN	DUMBO RAYA	KOTA GORONTALO	600
22	14-Oct-24	ALUN ALUN TILAMUTA DESA LIMBATO	TILAMUTA	BOALEMO	1000
23	16-Oct-24	HAL. KEJARI LIMBOTO DESA PONE	LIMBOTO BARAT	KABUPATEN GORONTALO	1000
24	19-Oct-24	KANTOR DESA PENTADIO BARAT	TELAGA BIRU	KABUPATEN GORONTALO	1000
25	22-Oct-24	TELAGA PARK DESA BULILA	TELAGA JAYA	KABUPATEN GORONTALO	1000
26	24-Oct-24	LAP. BASULAPA DESA ISIMU SELATAN	TIBAWA	KABUPATEN GORONTALO	1000
27	29-Nov-24	PASMOLIM KEL. KAYUBULAN	LIMBOTO	KABUPATEN GORONTALO	1500
28	06-Dec-24	RUJAB WAGUB KEL. TANGGIKIKI	SIPATANA	KOTA GORONTALO	1000
29	12-Dec-24	LAPANGAN DESA HUIDU	LIMBOTO BARAT	KABUPATEN GORONTALO	1000
30	14-Dec-24	STM/SMK 3 KEC. KOTA TENGAH	PULUBALA	KOTA GORONTALO	1000
31	18-Dec-24	GEREJA IMANUEL KEL. TENDA	HULONTHALANGI	KOTA GORONTALO	1300
Total					35.600

Dari tabel pelaksanaan diatas dapat dilihat bahwa perbandingan setiap pelaksanaan pasar murah bersubsidi dapat dirata-ratakan sebanyak 1000 penerima manfaat. Dan untuk sebaran pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi di wilayah kabupaten kota dapat disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.166

Rekapitulasi Pelaksanaan Pasar Murah Bersubsidi di Wilayah Kabupaten/Kota

REKAPITULASI PER KAB/KOTA	PELAKSANAAN	PENERIMA
KOTA GORONTALO	8 KALI	7.900
KABUPATEN GORONTALO	12 KALI	15.300
BONE BOLANGO	4 KALI	6.000
POHUWATO	3 KALI	2.200
BOALEMO	2 KALI	2.000
GORONTALO UTARA	2 KALI	2.200
JUMLAH		35.600

Adapun banyaknya volume komoditi yang dijual pada kegiatan pasar murah bersubsidi yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.167

Banyaknya Volume Komoditi Yang Dijual

KOMODITI	VOLUME	SATUAN
BERAS	178.000	KG
MINYAK GORENG	35.600	LTR
GULA PASIR	35.600	KG
TELUR	356.000	BUTIR
BAWANG MERAH	17.800	KG
CABE RAWIT	17.175	KG
BAWANG PUTIH	500	KG
AYAM	4.500	EKOR
IKAN TUNA	500	PAKET/0,5 KG

- c) Pelaksanaan Intervensi Pasar terhadap Komoditi Beras di Pasaran. Yaitu subsidi harga terhadap komiditi beras bagi para pedagang pengecer beras di Pasar Sentral Kota Gorontalo dan Pasar Kayubulan Kabupaten Gorontalo mengingat harga beras di pasaran mencapai Rp. 17.000.-18.000/kg dan Rp. 14.000.-15.500/liter.

Dalam upaya stabilisasi harga barang dan menyiapkan ketersediaan barang pokok yang cukup terjangkau bagi masyarakat dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Suci Ramadhan 1445 H / 2024 M (Hari Besar Keagamaan Nasional/HBKN), serta mempertimbangkan harga beras di pasaran yang masih tinggi dan sebagai tindaklanjut terhadap Hasil Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo tanggal 14 Maret 2024 guna stabilitas harga dan pasokan komoditas beras maka upaya dan langkah konkrit yang diputuskan pada pertemuan dimaksud untuk stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan pemenuhan barang kebutuhan pokok.

- 3) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Outcome dari program adalah Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen target 7 Dokumen, Capaian 7 Dokumen.

Alokasi Anggaran awal Sebesar Rp. 1.416.220.250,- tambahan APBD-P sebesar Rp. 555.500.000,- yaitu belanja penunjang kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara lain honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK serta pada beberapa belanja yang bersesuaian, sehingga total anggaran setelah perubahan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.971.720.250,- dengan



realisasi sebesar Rp. 1.940.401.656,- (96,36 persen keuangan dan 100 persen realisasi fisik). Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di tSeluruh Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen, capaian 297 kasus dari target 11 kasus.

- Sub kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen.

Pelaksanaan sub kegiatan ini didukung oleh anggaran awal sebesar Rp. 1.253.616.750,- kemudian terdapat tambahan anggaran melalui finalisasi APBD-P sebesar Rp. 555.500.000,- yang diperuntukkan untuk penunjang kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) antara lain kekurangan honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK sebesar Rp.535.500.000,-. Dan perjalanan dinas Rp. 20.000.000,- Sehingga total pagu anggaran hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.809.116.750,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.778.113.248,- dan silva sebesar Rp. 31.003.502,- yang merupakan sisa pembayaran honorarium majelis sidang dan sekretariat yang tidak ditagih lagi Rp. 31.000.000,- karena target kinerja anggota BPSK yang tidak tercapai. Adapun realisasi Fisik mencapai 100% dan keuangan 99,67%.

Output sub kegiatan adalah :

- a) Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain sidang BPSK, honorarium majelis sidang dan sekretariat BPSK. Penyelesaian Sengketa Konsumen dilaksanakan bila ada pengaduan konsumen dan apabila terindikasi akan merugikan konsumen misalnya ada promo penjualan, klausula baku yang akan merugikan konsumen, penjualan barang yang tidak sesuai ataupun merugikan konsumen dan lain-lain sesuai peraturan perlindungan Konsumen maka penyelesaian sengketa konsumenn di laksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan juga Oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Sasaran Pelaksanaan kegiatan Untuk melindungi Konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- b) Jumlah Monitoring dan evaluasi BPSK di Kabupaten/Kota.
- c) Jumlah Pengaduan Konsumen Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebanyak 268 Kasus pengaduan, dan yang diselesaikan 253 kasus antara lain tentang Pengaduan Klausula Baku, Pengaduan permasalahan pembiayaan, liter/timbangan, penjualan LPG diatas harga Het, penjualan makanan/minuman ditoko-toko (diserahkan ke BPOM Kabupaten/Kota/pembinaan). Harga yang tidak bersesuaian dengan pembelian.
- d) Pengaduan Konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai ketentuan yang berlaku :
 - BPSK Kota Gorontalo, 40 kasus yang ditangani dan penyelesaian sengketa secara mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus klausula baku/pembiayaan;
 - BPSK Kabupaten Gorontalo ditahun 2023 jumlah kasus 34, yang diselesaikan melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus klausula baku/pembiayaan;
 - BPSK Kabupaten Boalemo, ditahun 2024 jumlah kasus 108, yang diselesaikan melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus klausula baku/pembiayaan/PLN;
 - BPSK Kabupaten Bone Bolango ditahun 2024 jumlah kasus klausula baku/pembiayaan 29 yang diterima;
 - BPSK Kabupaten Pohuwato ditahun 2024 jumlah kasus yang ditangani 33 kasus, yang diselesaikan melalui mediasi-konsiliasi-arbitrase. Jenis kasus klausula baku/pembiayaan;
 - Kabupaten Gorontalo Utara, ditahun 2024 jumlah kasus 24 yang diterima dan diselesaikan melalui konsiliasi-mediasi-arbitrase. Jenis kasus klausula baku/pembiayaan;
 - Provinsi Gorontalo, terdiri atas 29 kasus antara lain 5 kasus liter/timbangan (pasar tradisional/toko), 8 kasus LPG dijual diatas harga HET, 6 kasus makanan dan minuman yang sudah berjamur. 10 kasus pembelian yang harganya tidak bersesuaian, Penyelesaian kasus ini melalui pembinaan/mediasi.
2. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
Indikator kinerja kegiatan ini jumlah pengujian dan sertifikasi mutu produk dengan target 153 dokumen, capaian 145 dokumen yaitu Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang 141 dokumen dan 4 sertifikat kesesuaian mutu (SKM) komoditi jagung.



- Sub kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian.

Jumlah pagu yang mendukung pelaksanaan sub kegiatan hingga 31 Desember 2024 ini sejumlah Rp. 53.322.000,- tidak terdapat revisi dan finalisasi APBD-P. dengan realisasi sebesar Rp. 53.134.150,- atau 99.65 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik.

Indikator kinerja adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang, target 150 Dokumen capaian 141 Dokumen Laporan Hasil Pengujian untuk 7 komoditi (jagung, beras, rumput laut, biji cacao, kopi, VCO, lada putih). Ketidakcapaian atas target sub kegiatan ini disebabkan karena laboratorium belum memiliki peralatan untuk pengujian parameter tertentu (cemaran logam dalam minyak goreng, rumput laut, biji cacao) sesuai keinginan pelanggan dan tidak maksimalnya anggaran untuk pengambilan sampel.

Output sub kegiatan adalah :

- a) Pengambilan sampel (contoh uji) di kabupaten/kota.

Tujuannya adalah :

- Memenuhi permintaan pelanggan agar sampel yang diambil mewakili populasi;
- Menjaga kompetensi analis.

- b) Pengujian komoditi akreditasi dan non akreditasi serta pengujian produk pangan olahan.

Tujuannya adalah :

- Memenuhi kualitas/mutu barang/produk agar sesuai standar nasional maupun internasional.

- c) Penyediaan bahan kimia serta bahan penunjang laboratorium.

Tujuannya adalah :

- Menjamin agar pengujian dapat berlangsung dengan lancar dan baik.

- d) Partisipasi Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium.

Tujuannya adalah :

- Memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi laboratorium;
- Menilai dan mengevaluasi kompetensi personil/analis;
- Memastikan keabsahan hasil pengujian.

Uji Profisiensi dan Uji Banding antar laboratorium yang diikuti meliputi :

- Uji Profisiensi Beras oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Paskapanen Pertanian, Kementerian Pertanian tanggal 12-16 Agustus 2024 dengan hasil sangat memuaskan (*satisfactory*);
- Uji profisiensi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu



Kementerian Perdagangan tanggal 22 Juli – 2 Agustus 2024, laporan hasil belum diterbitkan;

- Uji banding beras yang diselenggarakan oleh BPSMB Kalimantan Timur tanggal 24 Juni – 5 Juli 2024, dengan hasil sangat memuaskan (*satisfactory*);
- Uji banding biji kakao yang dilaksanakan oleh UPTD BPSMB Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung tanggal 11-18 November 2024, laporan hasil belum diterbitkan;
- Uji banding lada putih yang dilaksanakan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Kalimantan Timur tanggal 7 – 18 Oktober 2024, laporan hasil belum diterbitkan.

e) Penyediaan ATK seperti tinta printer, kertas dan bahan cetak/penggandaan.

- Sub kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi.

Jumlah pagu awal untuk pelaksanaan sub kegiatan ini sejumlah Rp. 69.844.750,- kemudian pada tahapan finalisasi APBD-P terdapat revisi anggaran tambah kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (pembayaran pajak, bea dan perizinan ke belanja perjalanan dinas biasa) sehingga pagu setelah perubahan Rp. Rp. 69.844.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.719.210,- atau 99.82 % untuk capaian realisasi keuangan dan 100% capaian realisasi fisik, silva Rp. 125.540,-.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan, target 3 sertifikat dan capaian sebanyak 4 sertifikat kesesuaian mutu (SKM) komoditi jagung serta belum ada sertifikat produk yang diterbitkan.

Output sub kegiatan adalah :

- a) Pengawasan mutu produk di kabupaten/kota.

Tujuannya adalah :

- Menjamin keamanan keselamatan dan lingkungan dari produk
- Memastikan terwujudnya perlindungan konsumen

- b) Reakreditasi Laboratorium oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Pelaksanaan setiap 5 tahun sekali dengan tujuan :

- Memastikan bahwa laboratorium pengujian memiliki kualitas yang memadai sesuai standar yang ditetapkan.
- Memberikan keyakinan kepada pelanggan/masyarakat bahwa layanan laboratorium memenuhi standar yang diterima, baik nasional dan internasional.

- Sub kegiatan verifikasi mutu produk.

Indikator kinerja adalah Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau dengan target 3 komoditi.

Untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator ini tidak dapat dilaksanakan karena tidak mendapat porsi anggaran dampak keterbatasan fiskal daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 164/MPP/KEP/6/1996 Tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu. Dimana terdapat 4 (empat) Komoditi yaitu kopi, biji kakao, kelapa sawit dan lada putih.

3. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja kegiatan ini jumlah pelaku usaha yang diawasi dengan target 40 pelaku usaha, capaian 45 pelaku usaha.

- Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen.

Indikator kinerja adalah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi dengan target 12 laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi dengan capaian 100 % yaitu 12 laporan pengawasan yang dilaksanakan di Kabupaten/kota.

Pagu anggaran 2024 yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 39.436.750,- dengan realisasi anggaran hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp. 39.435.048,- dengan silva Rp. 1.702,- Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,99%.

- a) Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan Pengawasan Perdagangan, Lokasi Pengawasan se Provinsi Gorontalo yaitu terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yakni Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Barang beredar dan/atau Jasa dan Pengawasan Perdagangan dilakukan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN).

Pelaksanaan Pengawasan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dinas kabupaten/Kota dan lintas sektoral untuk melakukan pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, dan pengawasan kegiatan perdagangan baik ditingkat distributor maupun pengecer (toko-toko, pedagang-pedagang pasar tradisional, Swalayan, supermarket minimarket dan kios-kios) dengan tujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kuantitas barang beredar dan jasa serta memperkuat daya saing produk dalam negeri



sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan.

1. Untuk Barang :

- Standar
- Label dalam bahasa Indonesia
- Petunjuk Penggunaan
- Jaminan Layanan Purna Jual
- Cara Menjual
- Pengiklanan
- Kalusula Baku

2. Untuk Jasa :

- Standar
- Jaminan dan/atau garansi yang di sepakati dan/atau di perjanjikan
- Kalusula Baku

3. Untuk Pengawasan Perdagangan Meliputi :

- Perizinan di bidang perdagangan
- Perdagangan Barang yang diawasi,di larang dan/atau diatur
- Distribusi
- Pendaftaran Barang produk dalam negeri dan asal inpor yang terkait dengan K3L (keamanan, keselamatan, Kesehatan dan lingkungan hidup)
- Pemberlakuan SNI kualifikasi secara wajib
- Pendaftaran Gudang
- Penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan/atau penting
- Perdagangan melalui sistim elektronik

Hasil pengawasan barang beredar dan atau/jasa :

- Terdapatnya Besi, celokan, kabel, kipas angin yang belum sesuai dengan Standar Nasional dan masih terdapatnya barang yang tidak memiliki label harga pada barang yang diperdagangkan.
- Masih banyak terdapat barang-barang kadaluarsa yang bercampur dengan barang-barang yang masih layak di konsumsi, berupa Biskuit, minuman dan bahan untuk pembuatan kue terdapat pada gudang-gudang dan penyelesaiannya di dilaporkan ke BPOM dan diselesaikan oleh Dinas Kabupaten/Kota.

Pengawasan Perdagangan antara lain :

- Distribusi
 - 1) Pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi



- Pola Distribusi dari Produsen
 - Distributor, Agen ke Pengecer
 - Distribusi Barang
- 2) Distribusi barang yang dilarang, diawasi, dan diatur
- Minuman beralkohol, pupuk bersubsidi, gula rafinasi, barang berbahaya.
- 3) Pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan penting
- Perizinan
Gudang-gudang (Tanda daftar Gudang, Siup, TDP, TDPUD, SIUP-MB).
 - Ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting.
 - Pasar rakyat
 - Pusat-pusat perbelanjaan
 - Toko swalayan
 - Gudang
 - Sarana perdagangan lainnya

Hasil Pengawasan :

- 1) Masih terdapatnya penjualan minyak kita yang diatas harga Het misalnya di pasar-pasar tradisional;
- 2) Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak mempunyai tanda daftar gudang;
- 3) Terdapatnya minuman beralkohol yang kadarnya 4.5% masih di jual di toko-toko tidak mempunyai izin;
- 4) Masih terdapatnya gudang-gudang yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- 5) Distributor Minuman beralkohol yang izinnya sudah menghampiri (dalam proses penegakan Hukum oleh kepolisian);
- 6) Banyak sub pangkalan-pangkalan Gas LPG yang Nakal menjual Gas LPG sudah melebihi Harga HET.

Tabel 3.168

Data pengawasan Perlindungan Konsumen
Di Provinsi Gorontalo. Tahun 2024

NO	URAIAN (KATEGORI TEMUAN)	JUMLAH	KETERANGAN
1	KASUS ALAT UKUR UTTP	20	liter/Timbangan
			(Pasar2 Tradisional)
			(diserahkan Di Kab/Kota)
2	SNI (Wajib)	41	Mainan anak
			Tusuk Kontak
			Kabel Listrik
			Kipas Angin



NO	URAIAN (KATEGORI TEMUAN)	JUMLAH	KETERANGAN
			Konfor Gas
3	Harga Pada Barang	25	Tidak adanya label Harga Pada barang yang di Perdagangan di Kab-Kota.
4	Perbedaan Harga antara pajangan dab mesin hitung	10	Perbedaan Harga pada pajangan dan kasir
5	Minyak Goreng Curah	5	Di jual tidak sesuai dengan Harga HET
6	KADALUARSA	10	Kab/Kota Di serahkan Ke B'POM
7	Makanan dan Minuman	6	Makanan dan minuman belum kadaluarsa tapi sudah berjamur
JUMLAH TEMUAN		117	

3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 3.169
Kebijakan Strategis Tahun 2024

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Penyelenggaraan Pasar Barang kebutuhan Pokok di daerah	Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Barang Kebutuhan Pokok di Daerah Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah SK Gubernur Gorontalo Nomor 403/16/X/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Subsidi kegiatan pasar murah bersubsidi pada penyelenggaraan pasar kebutuhan pokok di daerah. Instruksi Gubernur Gorontalo Nomor 800/DKUPP/451/III/2024 tanggal 6 Maret 2024 tentang pelaksanaan pasar barang kebutuhan masyarakat bersubsidi	acuan dan arahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan kegiatan operasi pasar, pasar murah non subsidi dan pasar murah bersubsidi
2	Pelaksanaan intervensi pasar terhadap komoditi beras dipasaran	Hasil Rapat TPID tanggal 15 Maret 2024 Instruksi Gubernur Gorontalo Nomor 800/DKUPP/instruksi/233/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024 tentang Pelaksanaan intervensi pasar terhadap komoditi beras dipasaran	Stabilisasi Harga, Pengendalian Inflasi dan memenuhi barang kebutuhan pokok masyarakat bulan Ramadhan 1445 H

4. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024



Tabel 3.170
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perdagangan
 Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

NO	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Persentase (%)
1.	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	2 Dok	1 Dok	50
2.	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	28 Lap	43 Lap	153,58
3.	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	7 Komoditi	8 komoditi	114,29
4.	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	7 Dok	7 dok	100

5. Hal-Hal Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Kinerja Tahun 2024
- a. Pada urusan perdagangan yang tidak mendapat porsi anggaran karena keterbatasan fiskal daerah sehingga target indicator kinerja tidak tercapai yaitu:
- 1 program pengembangan export

- 2 kegiatan yaitu kegiatan penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di Tingkat daerah Provinsi; kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida Tingkat daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

- 3 sub kegiatan yaitu fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya melalui sstem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sub kegiatan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi; sub kegiatan verifikasi mutu produk.
- b. Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik tidak dilaksanakan di tahun 2023 karena berkenaan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2022 yang telah mencabut peraturan sebelumnya, maka segala kewenangan pengecer terdaftar, yang dokumen perizinannya sebelumnya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Penanaman Modal dan PTSP, DICABUT, dan diberikan kesempatan kepada pengecer untuk dapat menyesuaikan dokumen perizinannya menjadi distributor atau kantor cabang distributor. (Kedua) Semua Kewenangan perizinan untuk menjadi distributor atau kantor cabang distributor bahan berbahaya, berada di Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi hanya terbatas dalam mengeluarkan dokumen



- rekomendasi gudang penyimpanan bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi serta penyimpanannya.
- c. Tahun 2024 BPSMB melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 3 komoditi, yaitu jagung, biji kakao dan kopi. Komoditi jagung untuk ekspor ke Philipina sebanyak 32.900 ton jagung kering, serta komoditi biji kakao dan kopi untuk pasar domestik dan lokal.
 - d. Pada bulan Juli 2024 telah dilaksanakan asesmen eksternal oleh Komite Akreditasi Nasional dalam rangka reakreditasi Laboratorium Pengujian LP-510-IDN, dan telah memperoleh sertifikat akreditasi KAN.
 - e. Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen, Audit Internal serta Kaji Ulang Dokumen yang telah dilakukan selama Tahun 2024 guna memenuhi amanat SNI ISO/IEC 17025:2017 Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi.
 - f. Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen, Audit Internal serta Kaji Ulang Dokumen yang telah dilakukan selama Tahun 2024 guna memenuhi amanat SNI ISO/IEC 17025:2017 Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi.
 - g. Pelaksanaan Kaji Ulang Manajemen, Audit Internal serta Kaji Ulang Dokumen yang telah dilakukan selama Tahun 2024 guna memenuhi amanat SNI ISO/IEC 17025:2017 Sistem Manajemen Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi;
 - h. Tahun 2024 BPSMB telah melakukan finalisasi layanan pengujian berbasis teknologi informasi melalui sistem aplikasi SIMPELJITU, bekerjasama dengan Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo;
 - i. Data Capaian indikator kinerja program/kegiatan urusan perdagangan tahun 2023 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.171
 Capaian Indikator Kinerja Per Kegiatan Tahun 2024
 Urusan Perdagangan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Persentase (%)
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi dan diawasi	Dok	2	1	50
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Dok	9	47	522,2
- <i>Koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA</i>	<i>Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal</i>	<i>Dok</i>	<i>9</i>	<i>47</i>	<i>522,22</i>



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Persentase (%)
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan barang penting	Laporan	28	43	153,58
Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	16	43	100
- Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha Distribusi Barang Lintas Kab/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota	Laporan	12	12	100
- Operasi pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan	4	31	775
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Laporan	12	-	-
- Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	Laporan	12	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	Komoditi	7	8	114,29



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Persentase (%)
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	Pelaku Usaha	7	-	-
- Misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	7	-	-
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	Dokumen	7	7	100
Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kab/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	Kasus	11	297	2700
- Pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen	Jumlah badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang aktif	BPSK	6	6	100
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	Dokumen	153	145	94,78
- Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial Yang Dipantau	Komoditi	3	-	-
- Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang	Dokumen	150	141	94
- Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah sertifikasi produk yang diterbitkan	Sertifikat	3	4	133,34
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi	Pelaku Usaha	40	45	112,50
- Peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter ketentuan	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	Laporan	12	12	100



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Persentase (%)
perlindungan konsumen					

G. Urusan Perindustrian

G.1 Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
- a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

- Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian
- b. Sasaran dan Program

Tabel 3.172
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Meningkatnya kapasitas koperasi usaha kecil menengah (Jumlah), Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (persentase), dan meningkatnya nilai ekspor (USD)	Indikator Sasaran : Persentase peningkatan industri kecil menengah	0,84%	0,38%	45,24%
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah dokumen penerapan dan evaluasi pembangunan industri	36 Dok	36 Dok	100%
	Program pengendalian izin usaha industri	Jumlah izin yang difasilitasi dan di evaluasi	1 Dok	- Dok	-
	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Jumlah informasi industri dan fasilitasi pengolahan data industri	12 Dok	- Dok	-

Indikator kinerja urusan industry “Persentase peningkatan industri kecil menengah” tahun 2024 diperoleh dari :

(Jumlah industri tahun n - Jumlah industri tahun n-1)
 (Jumlah industri tahun n-1) x 100%

Dimana :

Jumlah industri tahun 2024 = 13.260 IKM
 Jumlah industri tahun 2023 = 13.210 IKM



- Jumlah IKM 2023 berdasarkan data SIIDIG per 18 Januari 2023 sejumlah 10.039 IKM (tercantum pada LKPJ 2023). Hasil updating per Januari 2024 sejumlah 13.210 IKM
- Jumlah industri tahun 2024 diperoleh dari data penumbuhan wirausaha batu ditahun 2024 yang dibiayai melalui dana Dekon karena terbatasnya anggaran untuk penumbuhan wirausaha baru melalui APBD 2024.

2. Program dan Kegiatan

Pagu awal anggaran urusan industri adalah sebesar Rp. 1.861.808.250,-. Kemudian revisi anggaran (Rp. 209.090.000,-) dan pada tahapan APBD-P mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 490.335.000,- sehingga total anggaran setelah perubahan tahun 2024 untuk program ini sebesar Rp. 2.143.053.250,-. Realisasi Anggaran pada program ini per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 2.138.595.744,- silva Rp. 4.457.506,-

Rincian Pagu Anggaran Tahun 2024 untuk urusan industri sebesar Rp. 3.500.429.405,- rinciannya sebagai berikut :

- Belanja Pegawai Rp. -
- Belanja Modal Rp. -
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.143.053.250

Realisasi Anggaran pelaksanaan Program/Kegiatan untuk urusan Perindustrian tahun 2024 tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 3.173
 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Perindustrian
 Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi Tahun 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran	Fisik	Keu		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI	1.861.808.250	2.143.053.250	2.138.595.744	100	99,79		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.861.808.250	2.143.053.250	2.138.595.744	100	99,79	Realisasi keuangan dibawah 100% karena ada sisa belanja kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi	Pemanfaatan anggaran tahun selanjutnya secara maksimal
Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.861.808.250	2.143.053.250	2.138.595.744	100	99,79		
- Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	388.561.750	728.251.750	727.654.648	100	99,92		



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu 2024	Total Pagu Setelah Perubahan 2024	Realisasi Tahun 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran	Fisik	Keu		
- Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.366.629.750	1.292.784.750	1.289.055.716	100	99,71		
- Sub kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	106.616.750	122.016.750	121.885.380	100	99,89		

Berdasarkan tabel diatas maka total anggaran urusan industri setelah perubahan adalah sebesar Rp. **2.143.053.250,-** dari total anggaran pembangunan Dinas Kumperindag Tahun 2024 sebesar **Rp. 40.878.393.248,-** atau sebesar 5,24%. Dengan realisasi sebesar **Rp. 2.138.595.744,-** atau sebesar 5,24% dari total realisasi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 40.817.064.768,-

Ditahun 2024 pada urusan industri terdapat 2 (dua) program yang tidak mendapat porsi anggaran karena keterbatasan fiskal daerah yaitu program pengendalian izin usaha industri dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional.

Adapun uraian program dan kegiatan pada tahun 2024 urusan industri yang dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain :

- 1) Program perencanaan dan pembangunan Industri

Outcome dari program adalah Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri. Adapun target Renstra 36 Dokumen. Tercapai.

Pagu awal program ini sejumlah Rp. 1.861.808.250,- kemudian terdapat revisi sebesar(Rp. 209.090.000,-) pada beberapa kegiatan . kemudian tambahan pada APBD-P Rp. 490.335.000,- antara lain pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada 2 (dua) kegiatan). Sehingga total pagu akhir Rp. 2.143.053.250,-. Pada progam ini capaian fisik 100%, dan realisasi keuangan 99,79% karena terdapat sisa belanja yang tidak dimanfaatkan.

 - a. Pelaksanaan Program
 1. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
 - Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.

Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (target 12 Dokumen, capaian 12 Dokumen).

Dalam melaksanakan kegiatannya di tahun 2024 didukung oleh anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 728.251.750,- realisasi Rp.727.654.648,-



dengan silva Rp. 597.102,- antara lain pada belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat.

Adapun penganggaran induk APBD 2024 untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 388.561.750,-. Kemudian terdapat revisi antar belanja pada sub kegiatan ini sebesar (Rp. 3.090.000,-) dan tambahan anggaran melalui APBD-P sebesar Rp. 342.780.000,- yang diperuntukkan untuk kekurangan pembayaran Honorarium PTT (2 bulan) dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Bantuan Bahan dan Peralatan bagi IKM) Rp. 278.100.000,- serta perjalanan dinas Identifikasi verifikasi fasilitasi bantuan IKM untuk tahun 2024 sebesar Rp. 55.000.000,-.

Output sub kegiatan adalah :

- a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat bagi IKM Pangan dan Furniture yaitu Fasilitasi tempat usaha, bahan dan peralatan, listrik bagi IKM Pangan bagi 7 IKM pada pagu induk dan 12 penerima di APBD-P (*terlampir*).

Tujuan :

- Mendorong terciptanya Wira Usaha Baru yang mandiri dan professional yang mampu menciptakan lapangan kerja.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas produk.
- Meningkatkan pendapatan dan ekonomi masyarakat.
- Memanfaatkan peluang pasar lokal, regional dan nasional.

Pagu awal pada item belanja ini sebesar Rp. 310.545.000,- kemudian revisi antar OPD sebesar (Rp. 3.090.000,-) dan pada tahapan finalisasi APBD-P sebesar Rp. 278.100.000,- sehingga total anggaran pada belanja ini sebesar Rp. 585.555.000,- realisasi Rp. 584.959.098,- . silva Rp. 595.902,-

- b) Verifikasi, Pengawasan dan Pembinaan Industri Kecil Menengah.

Tujuan pelaksanaan kegiatan :

- Untuk memastikan kelompok usaha yang telah memasukkan proposal permohonan bantuan modal usaha telah memenuhi persyaratan.
- Pengembangan industri Pangan dan Furniture yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing.

Sasaran Pelaksanaan Kegiatan yaitu calon penerima bantuan IKM Pangan dan Furniture di Kabupaten/Kota.

- c) Terlaksananya pembayaran jasa tenaga pelayanan umum 2 orang.
- Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.



Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (target 12 Dokumen dan capaian 12 Dokumen).

Ditahun 2024 Pagu awal pada sub kegiatan ini berjumlah Rp. 1.366.629.750,- kemudian terdapat revisi sebesar (Rp. 206.000.000,-) yaitu pada item belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat revisi antar OPD sebesar (Rp. 206.000.000,-) dan revisi tambah kurang pada item belanja bahan lainnya dan sewa bangunan gedung kantor. Pada tahapan finalisasi APBD-P tambahan anggaran Rp. 132.155.000,- (belanja barang yang dijual/diserahkan kepada masyarakat Rp. 115.875.000, belanja jasa pelayanan umum 2 bulan Rp. 16.280.000,-, Sehingga total anggaran setelah perubahan pada sub kegiatan ini menjadi Rp. 1.292.784.750,- realisasi Rp. 1.289.055.716,- silva Rp. 3.729.034,- Anggaran ini untuk melaksanakan beberapa kegiatan seperti pada uraian dibawah ini.

Output sub kegiatan adalah :

- Bantuan Bahan dan Peralatan IKM Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut bagi 23 UKM/IKM/Pelaku usaha Industri sandnag, aneka dan kerajian serta IKM logam mesin.

Pagu awal pada item belanja ini sebesar Rp. 674.650.000,- kemudian revisi antar OPD sebesar (Rp. 206.000.000,-) dan pada tahapan finalisasi APBD-P sebesar Rp. 115.875.000,- sehingga total anggaran pada belanja ini sebesar Rp. 584.525.000,- realisasi Rp. 582.159.628,- silva Rp. 2.365.372,-

Tujuan pelaksanaan kegiatan : Menstimulir pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menyerap tenaga dan menekan angka pengangguran kerja serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sasaran pelaksanaan kegiatan yaitu UKM/IKM/Pelaku usaha Industri Kerajinan, Sandang, Aneka dan Kerajinan.

- Verifikasi dan Fasilitasi Bantuan Pengembangan WUB.

Tujuan pelaksanaan kegiatan : Untuk memastikan kelompok usaha yang telah memasukkan proposal permohonan bantuan modal usaha telah memenuhi persyaratan. Pengembangan industri kerajinan daerah yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing.

- Pameran dan Rakernas Dekranas

Tujuan pelaksanaan kegiatan :

- a. Mengikuti Pameran Produk Kerajinan Nusantara "Kriya Nusa 2024" di Jakarta dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) DEKRANAS Tahun 2024.



- b. Tujuan Pameran Kriyanusa 2024 yaitu untuk memfasilitasi perajin dalam mempromosikan dan memasarkan hasil kerajinannya serta meningkatkan rasa cinta dan bangga masyarakat Indonesia akan produk kerajinan Indonesia, selain itu sebagai ajang pembelajaran bagi para perajin untuk memperhatikan produk-produk yang dipamerkan.
- c. Tujuan Rakernas DEKRANAS yaitu untuk menambah wawasan bagi DEKRANAS dan DEKRANASDA Provinsi/Kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan kepada IKM Kerajinan sehingga produk kerajinan yang dihasilkan para perajin lebih berkualitas, memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar nasional maupun Internasional.

Sasaran pelaksanaan kegiatan yaitu Pelaku industri kerajinan sebanyak 3 orang.

- Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo

Tujuan pelaksanaan kegiatan : Meningkatkan kemampuan SDM IKM yang berdaya saing.

Sasaran Pelaksanaan kegiatan yaitu semua pelaku industri kerajinan.

Kegiatan Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo meliputi :

- a. Hibah kepada Dekranasda Provinsi Gorontalo senilai Rp. 300.000.000,- Nomor NPHD 351/DKUPP/IV/2024 tanggal 25 April 2024.
- b. Honor Tenaga Non ASN yang merupakan Penjaga Galeri dan Tenaga Administrasi Dekranasda sebanyak 2 orang.

- Sub kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

Indikator Kinerja Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (12 Dokumen).

Pagu awal anggaran sub kegiatan ini berjumlah Rp. 106.616.750,- kemudian ditahapan APBD-P mendapat tambahan anggaran sejumlah Rp. 15.400.000,- Total akhir pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 122.016.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.885.380,- (99,07% keuangan, fisik 100%).

Output sub kegiatan adalah : Verifikasi, pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi Industri Kecil Menengah. *Adapun tujuan pelaksanaannya* :

- Mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di Daerah;
- Menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan kabupaten;
- Mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.



Sasaran pelaksanaannya : terwujudnya IKM yang mandiri dan berdaya saing, maju dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 3.174

Kebijakan Strategis Tahun 2024

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Belanja Barang Atau Jasa yang Diserahkan bagi IKM	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024	Sebagai Pedoman Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengembangan dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah belanja barang yang diserahkan Tahun Anggaran 2024
2	Hibah Kepada Dekranasda	Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2023 tentang perubahan atas Pergub Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2021 Tentang Tatacara Penganggaran Pelaksanaan & Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah & Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Dalam upaya pengembangan industri kerajinan melalui Dekransda Provinsi Gorontalo.
		Keputusan Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Nomor 800/DKUPP/06/I/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan dana Hibah Bagi Dekranasda Provinsi Gorontalo	
		Keputusan Gubernur Nomor 153/16/IV/2024 tentang Penetapan penerima Hibah berupa uang kepada Dekranasda Provinsi Gorontalo melalui program perencanaan dan pembangunan Industri Kegiatan Penyusunan Penerapan Evaluasi rencana pembangunan industri Provinsi pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo TA. 2024	

4. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024



Tabel 3.175
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian
 Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

NO	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program Tahun 2024			Keterangan
		Target	Realisasi	Persentase (%)	
1	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36 Dok	36 Dok	100	
2	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1 Dok	- Dok	-	Tidak mendapat porsi anggaran di 2024 karena keterbatasan fiskal daerah
3	Jumlah informasi industri & fasilitas pengolahan data industr	12 Dok	- Dok	-	Tidak mendapat porsi anggaran di 2024 karena keterbatasan fiskal daerah

5. Hal-Hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Kinerja Tahun 2024.

Data capaian indikator kinerja program/kegiatan Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.176
 Capaian Indikator Kinerja Urusan Industri Tahun 2024

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja 2024	Persentase (%)
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	36	Dokumen	36	100
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	36	Dokumen	36	100
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	12	Dokumen	12	100
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12	Dokumen	12	100
- Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	12	Dokumen	12	100



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja 2024	Persentase (%)
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Izin yang di fasilitasi & Dievaluasi	1	Dokumen	-	-
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi	1	Dokumen	--	-
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan/atau dalam rangka perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1)Industri besar; 2)Industri kecil dan industri menengah yang lokasinya lintas kab/kota, 3)Kawasan Industri, dan perizinan perluasan kawasan Industri yang merupakan PMDN yang berlokasi lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1	Dok	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah informasi industri & fasilitasi pengolahan data industri	12	Dokumen	-	-
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12	Dokumen	-	-
- Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain lingkup Provinsi melalui Sistem	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	12	Dokumen	-	-



Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan 2024		Realisasi Kinerja 2024	Persentase (%)
Informasi Industri Nasional (SIINas)					

- a) Di tahun 2024 terdapat 2 (dua) program karena keterbatasan fiskal daerah, maka tidak teranggarkan sehingga yang tidak mencapai target kinerja yaitu program pengendalian izin usaha industri dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional.
- b) Pada sub kegiatan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat terdapat anggaran belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut yaitu :

sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	517.305.000
<i>APBD Induk (setelah revisi) 2024:</i>	
Bantuan bagi Industri kecil Menengah (IKM) berupa Bahan/Peralatan : .	239.205.000
~ Bantuan Bahan & Peralatan IKM (7 IKM) @ Rp. 23.175.000	162.225.000
~ Fasilitas Pemasangan Listrik 3 IKM @ Rp. 3.000.000	9.000.000
~ Fasilitas Tempat Usaha 3 IKM @ Rp. 22.660.000	67.980.000
<i>APBD-P 2024 :</i>	
Bantuan bagi Industri kecil Menengah (IKM) berupa Bahan/Peralatan :	278.100.000
~ Bantuan Bahan & Peralatan IKM (12 IKM) @ Rp. 23.175.000	278.100.000
sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	584.345.000
<i>APBD Induk (setelah revisi) 2024:</i>	
Bantuan bagi Industri kecil Menengah (IKM) berupa Bahan/Peralatan :	468.470.000
~ Bantuan Bahan & Peralatan IKM (18 IKM) @ Rp. 23.175.000	417.150.000
~ Fasilitas Pemasangan Listrik 2 IKM @ Rp. 3.000.000	6.000.000
~ Fasilitas Tempat Usaha 2 IKM @ Rp. 22.660.000	45.320.000
<i>APBD-P 2024 :</i>	
Bantuan bagi Industri kecil Menengah (IKM) berupa Bahan/Peralatan :	115.875.000
~ Bantuan Bahan & Peralatan IKM (5 IKM) @ Rp. 23.175.000	115.875.000
Total	1.101.650.000



- c) Tahapan Penyusunan RPIP telah selesai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2024 Nomor 9 Tahun 2022.

Adapun RPIK pada tahun 2023 telah tersusun 2 dokumen RPIK yaitu Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato dan progress hingga tahun 2024 masih ditahapan pengusulan PERDA.

6. Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya.

Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo untuk urusan Perindustrian tidak mendapatkan rekomendasi DPRD di tahun sebelumnya.

7. Penghargaan Nasional Yang Diterima Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024.

Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo untuk urusan Perindustrian tidak menerima penghargaan nasional di tahun 2024.

8. Perjanjian Kerjasama/MOU Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Pada Tahun 2024.

Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo untuk urusan perindustrian tidak melaksanakan perjanjian Kerjasama/MOU di tahun 2024.

H. Urusan Transmigrasi

H.1 Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

- Meningkatkan daya saing dan kemandirian desa

b. Sasaran dan Program

Tabel 3.177
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sasaran : Meningkatnya ekonomi pedesaan berbasis potensi local dengan pendekatan kluster Kawasan strategis	Persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	91,34	36,22	39,65
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pembangunan satuan permukiman transmigrasi	100	50	50
	Progran Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan Masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan	79	31,50	39,87



Sasaran : Meningkatnya Ekonomi Pedesaan Berbasis Potensi Lokal dengan Pendekatan Klaster Kawasan Strategis.

Indikator kinerja sasaran ini adalah persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan dengan target tahun 2024 sebesar 91,34%. Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan dan jumlah Masyarakat transmigrasi binaan. Pada tahun 2024, tercatat bahwa jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan sebanyak 230 KK dan jumlah Masyarakat transmigrasi binaan sebanyak 635 KK . Hal tersebut menggambarkan pencapaian persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan yaitu sebesar 36,22% (tidak mencapai target yang ditetapkan). Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.178
 Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Transmigrasi
 Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	135.360.000	135.110.860	99,82	100		
1a	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	135.360.000	135.110.860	99,82	100		
	- Sub kegiatan Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	135.360.000	135.110.860	99,82	100	Pelaksanaan pemberian bantuan tidak sesuai jadwal dikarenakan perubahan metode pengadaan dari awalnya e-katalog menjadi pengadaan langsung	Lebih cermat dalam pengelompokan metode pengadaan
2	Program pengembangan Kawasan Transmigrasi	238.900.000	230.080.790	96,31	100		
	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	238.900.000	230.080.790	96,31	100		
	- Sub kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka	238.900.000	230.080.790	96,31	100	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi warga transmigrasi disebabkan cuaca	Melaksanakan kegiatan setelah kondisi cuaca lebih kondusif



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Pemantapan Satuan Permukiman					ekstrem dan kondisi medan	
JUMLAH		374.260.000	365.191.650	97,58	100		

- 1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Outcome dari program adalah Persentase Pembangunan satuan permukiman transmigrasi dengan target sebesar 100%. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan membandingkan jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun dan jumlah satuan permukiman binaan. Pada tahun 2024 tercatat bahwa jumlah satuan permukiman transmigrasi yang dibangun sebanyak 2 SP dan jumlah satuan permukiman transmigrasi binaan sebanyak 4 SP sehingga capaian Persentase Pembangunan satuan permukiman transmigrasi sebesar 50%. Tidak tercapainya target outcome ini dikarenakan terbatasnya anggaran untuk pembangunan kawasan transmigrasi, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal ke semua Lokasi transmigrasi binaan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Output kegiatan adalah 2 satuan permukiman transmigrasi yang dibangun. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari sub kegiatan sebagai berikut :

 - Sub kegiatan Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal).

Output sub kegiatan adalah target sebanyak 2 paket bantuan non standar yang diberikan kepada transmigran dan realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu sebanyak 2 paket atau 100%. Paket bantuan yang diberikan adalah sarana prasarana penunjang pertanian pada 3 (tiga) kelompok dimana masing-masing kelompok berjumlah 10 orang, sehingga jumlah Masyarakat yang mendapatkan bantuan sebanyak 60 orang. Bantuan tersebut dialokasikan di Kimtrans Motihelumo Kab. Gorontalo Utara dan Kimtrans Pangea SP3 Kab. Boalemo.
- 2) Program pengembangan Kawasan Transmigrasi

Outcome dari program adalah Persentase peningkatan Masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan dengan target 79%. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan membandingkan jumlah Masyarakat yang diberikan penguatan dan jumlah Masyarakat transmigrasi binaan. Pada tahun 2024 bahwa jumlah Masyarakat yang diberikan penguatan sebanyak 200 orang dan jumlah Masyarakat transmigrasi yang ada sebanyak 635 orang sehingga capaian Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan sebesar 31,50%. Tidak tercapainya target



outcome ini dikarenakan terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi warga transmigrasi, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal ke semua Lokasi transmigrasi binaan.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan.
Output kegiatan adalah 2 satuan permukiman transmigrasi yang dikembangkan. Untuk pencapaian kegiatan ini dapat dijabarkan dari sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sub kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman.
Output sub kegiatan adalah target sebanyak 2 Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dan realisasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu 2 SP atau 100%. Pelaksanaan sub kegiatan ini berupa pembinaan mental dan spiritual kepada 200 orang warga transmigrasi.

3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Tabel 3.179
Kebijakan Strategis Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Provinsi Gorontalo	Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 215/34/VI/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi Tingkat Provinsi Gorontalo	Merupakan tindaklanjut dari amanah Perpres Nomor 50 tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KIPT), yang bertujuan untuk mengintegrasikan program transmigrasi dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. KIPT juga bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan program transmigrasi.

4. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024.

Tabel 3.180
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Persentase jumlah Masyarakat transmigrasi yang dikembangkan	91,34	36,22
2	Persentase pembangunan Satuan Permukiman Transmigrasi	100	50
3	Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan	79	31,50

5. Hal-hal lain yang perlu disampaikan terkait capaian indikator.
 - Lokasi transmigrasi yang masih dibina pada tahun 2024 sebagaimana table berikut :



Tabel 3.181
Lokasi Transmigrasi Yang Masih Dibina Tahun 2024

No.	KABUPATEN / NAMA KAWASAN	UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (UPT) BINA			JUMLAH KK
		UPT	DESA	KECAMATAN	
I.	Kabupaten Boalemo				
	* Kawasan Pawonsari				
	- No. SK 9 Tahun 2016				
	- Tgl. 29 Januari 2016	Pangea SP3	Saritani	Wonosari	150
II.	Kabupaten Pohuwato				
	* Kawasan Taluditi				
	- No. SK 91 Tahun 2016	Sandalan	Panca Karsa 1	Taluditi	165
	- Tgl. 29 Desember 2016				
III.	Kabupaten Gorontalo Utara				
	* Kawasan Sumalata				
	- No. SK 71 Tahun 2018	Motihelumo	Motihelumo	Sumalata Timur	145
	- Tgl. 28 Agustus 2018				
	Jumlah				460

- Lokasi transmigrasi yang sudah diserahkan pada tahun 2024 sebagaimana table berikut :

Tabel 3.182
Lokasi Transmigrasi Yang Sudah Diserahkan Tahun 2024

No.	KABUPATEN / NAMA KAWASAN	UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (UPT) SERAH			JUMLAH KK
		UPT	DESA	KECAMATAN	
I.	Kabupaten Gorontalo				
	* Kawasan Pulubala				
	- No. SK 9 Tahun 2016				
	- Tgl. 29 Januari 2016	Bukit Aren	Bukit Aren	Pulubala	150
II.	Kabupaten Boalemo				
	* Kawasan Paguyaman Pantai	Lito SP1	Lito	Paguyaman Pantai	186
	- No. SK 91 Tahun 2016				
	- Tgl. 29 Desember 2016				
	Jumlah				611

Lokasi transmigrasi tersebut masih diintervensi Pemerintah Provinsi Gorontalo karena masih ada beban penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) warga transmigrasi dengan rincian sebagai berikut :

- Kimtrans Bukit Aren Kec. Pulubala Kab. Gorontalo
 - Total SHM : 450 Bidang
 - Realisasi SHM : 141 Bidang
 - Sisa beban SHM : 309 Bidang
- Kimtrans Lito Kec Paguyaman Pantai Kab. Boalemo
 - Total SHM : 372 Bidang
 - Realisasi SHM : 155 Bidang
 - Sisa beban SHM : 217 Bidang



Permasalahan yang dihadapi terkait masih banyaknya beban SHM yang belum terbit dikarenakan lahan usaha warga transmigrasi yang belum *clean and clear*.

4.2.3 Urusan Penunjang

A. Perencanaan dan Penelitian

A.1 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan
 - Meningkatnya Mutu Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - b. Sasaran dan Program

Tabel 3.183
 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024 Penunjang urusan
 Perencanaan dan Penelitian

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	a. Presentasi Keselarasan Muata RKPD dengan RPD 2023-2026; b. Presentasi Keselarasan Muatan Renja OPD dengan RKPD; c. Presentasi Keselarasan RKA dengan RKPD	100	99,09	100
1.1	Program: Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD	100	98,05	100
1.2	Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD	100	99,51	100
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi	b. Jumlah Pemanfaatan Hasil Kelitbanan c. Jumlah Inovasi dan Teknologi yang termanfaatkan	100	97,54	100
2.1	Program: Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti	100	97,54	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	100	98,17	100
3.1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan, serta Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100	98,17	100



2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.184
 Realisasi Fisik Dan Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
 Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH
			ANGGARAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.117.793.941	13.802.170.039	97,76	100		
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1.502.626.756	1.475.149.682	98,17	100		
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	971.355.756	954.933.763	98,31	100		
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	531.271.000	520.215.919	97,92	100		
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	9.716.683.835	9.657.526.690	99,39	100		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.616.683.835	9.558.213.850	99,39	100		
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000	99.312.840	99,31	100		
1.3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	200.413.550	178.831.100	89,23	100		
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.413.550	178.831.100	89,23	100		
1.4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.500.593.700	1.365.539.076	91,00	100		
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.500.593.700	1.365.539.076	91,00	100		
1.5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.197.476.100	1.125.123.491	93,96	100		
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.197.476.100	1.125.123.491	93,96	100		
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	971.992.000	953.051.149	98,05	100		
2.1	<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	560.761.500	554.698.357	98,92	100		
	- Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	560.761.500	554.698.357	98,92	100		
2.2	<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	167.439.800	155.595.508	92,93	100		
	- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	167.439.800	155.595.508	92,93	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH
			ANGGARAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)		
2.3	<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	243.790.700	242.757.284	99,58	100		
	- Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	70.554.500	70.246.320	99,56	100		
	- Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	173.236.200	172.510.964	99,58	100		
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.430.801.050	2.418.781.567	99,51	100		
3.1	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	727.752.250	723.706.627	99,44	100		
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	146.199.900	143.331.688	98,04	100		
	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	59.120.000	58.789.020	99,44	100		
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	18.500.000	18.169.484	98,21	100		
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	213.079.900	212.877.174	99,90	100		
	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	290.852.450	290.539.261	99,89	100		
3.2	<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i>	995.336.325	988.588.846	99,32	100		
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	215.345.600	215.126.242	99,90	100		
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	215.413.250	213.467.819	99,10	100		
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	564.577.475	559.994.785	99,19	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH
			ANGGARAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)		
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	707.712.475	706.486.094	99,83	100		
	- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	121.160.475	120.808.559	99,71	100		
	- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	113.074.000	112.936.895	99,88	100		
	- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	97.112.000	96.904.012	99,79	100		
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	252.390.000	252.188.131	99,92	100		
	- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	123.976.000	123.648.497	99,74	100		
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	832.735.184	812.245.372	97,54	100		
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	324.868.534	308.499.701	94,96	100		
	- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	324.868.534	308.499.701	94,96	100		
4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	113.248.000	113.058.083	99,83	100		
	- Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	113.248.000	113.058.083	99,83	100		
4.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	201.444.050	200.236.362	99,40	100		
	- Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	119.690.250	118.795.860	99,25	100		
	- Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	81.753.800	81.440.502	99,62	100		
4.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	193.174.600	190.451.226	98,59	100		
	- Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	93.434.900	93.127.650	99,67	100		
	- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	99.739.700	97.323.576	97,58	100		
JUMLAH		18.353.322.175	17.986.248.127	98,00	100		



1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Outcome dari program ini adalah Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD, target 100%

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

(2)Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Output Sub Kegiatan:

- a) Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
- b) Forum Gabungan OPD;
- c) Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Gorontalo;
- d) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo, Musrenbang Regional Sulawesi, Rakortekrenbang dan Musrenbang Tingkat Nasional;
- e) Proses koordinasi dan konsultasi selama proses penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD tahun 2024;
- f) Fasilitasi RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Kota serta keikutsertaan pada Musrenbang Kab/Kota.

2. Kegiatan: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

(1) Sub Kegiatan: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Output Sub Kegiatan:

- a) Koordinasi Data Tingkat Provinsi Gorontalo dalam rangka Satu Data Indonesia;
- b) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Gorontalo.

3. Kegiatan: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2)Sub Kegiatan: Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi

Output Sub Kegiatan:

- a) Pengendalian Dokumen Perencanaan Provinsi dan Penguatan pengendalian dokumen perencanaan Kabupaten/Kota;
- b) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional;
- c) Pengendalian, Pengembangan Teknologi Informasi dalam Tahapan Perencanaan Pembangunan.

(3) Sub Kegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah



Output Sub Kegiatan:

- a) Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2023 baik secara internal Tim Penyusun LKPJ Gubernur maupun bersama dengan pihak terkait lainnya, meliputi SKPD Provinsi, Instansi vertikal, dll;
- b) Evaluasi dan koordinasi teknis penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja/RKPD/Renstra/RPJMD se-Provinsi Gorontalo;
- c) Evaluasi dan pelaporan terhadap hasil Perencanaan Pembangunan Jangka pendek secara triwulan (Triwulan I,II, III, IV);
- d) Evaluasi dan analisa terhadap progres capaian indikator pembangunan daerah sesuai target perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang; sehingga diharapkan proses pelaksanaan pembangunan secara periodik dapat di jaga koridor pelaksanaannya sebagaimana target yang ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra, atau dalam RKPD maupun Renja;
- e) Evaluasi terhadap program pembangunan daerah sesuai dengan program pembangunan nasional, ini sesuai dengan amanat PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, sehingga dapat berjalan secara berkualitas, efektif dan efisien;
- f) Monitoring dan evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan DAK provinsi gorontalo, menjaga konsistensi pelaporan Kabupaten/Kota dan Provinsi atas pelaksanaan program dan kegiatan DAK di wilayah provinsi Gorontalo. Monev ini untuk mendorong pelaporan DAK kepada Pemerintah Pusat bisa lebih baik dari tahun 2023 yang terkategori masih rendah oleh Sekber DAK Kemendagri RI. Serta menginventarisir dan meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana DAK.

2) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Outcome dari program ini adalah Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD, target 100%

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

(1)Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Output Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
- b. Koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan;
- c. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.



- (2)Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- Output Sub Kegiatan:
- Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan di Kabupaten/Kota;
 - Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Pemerintahan.
- (3)Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- Output Sub Kegiatan:
- Koordinasi dan Evaluasi Sinergitas Bidang Pemerintahan;
 - Harmonisasi dan Sinergitas Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SDG's di Provinsi Gorontalo;
 - Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
- (4)Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Output Sub Kegiatan:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Bidang Pendidikan);
 - Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- (5)Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- Output Sub Kegiatan:
- Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia.
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
- (1)Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- Output Sub Kegiatan:
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
 - koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
 - Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.



(2)Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.

Output Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi dan Evaluasi Sinergitas Bidang Perekonomian;
- b. Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.

(3)Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Output Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA;
- b. koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA;
- c. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

(1)Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD).

Output Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Sektor CK dan PKP);
- b. koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur (sektor Tata Ruang dan prasarana perhubungan);
- c. Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan.

(2)Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Output Sub Kegiatan:

- a. Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur (sektor infrastruktur, perhubungan);
- b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Sektor CK dan PKP);
- c. Berita Acara Pembahasan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan.

(3)Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Output Sub Kegiatan:

- a. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Sektor CK dan PKP)



- b. Monev Perencanaan Pembangunan Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air;
 - c. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (sektor tata ruang, prasarana perhubungan);
 - d. Laporan Hasil Monitoring Evaluasi Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan.
- (4) Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
- Output Sub Kegiatan:
- a. Koordinasi dan Evaluasi Sinergitas Bidang Infrastruktur (sektor tata ruang, prasarana perhubungan);
 - b. Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (sektor tata ruang, prasarana perhubungan).
- (5) Sub Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.
- Output Sub Kegiatan:
- a. Koordinasi dan Evaluasi Sinergitas Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air;
 - b. Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Prasarana Sumber Daya Air.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program ini adalah Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan, target 100%

- a. Pelaksanaan Program
 - 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - (1) Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output Sub Kegiatan:

 - a) Laporan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah, 1 Dokumen;
 - b) Laporan LAKIP, LPPD, RENSTRA dan Renja BAPPEDA, 4 Dokumen;
 - c) Dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi.
 - (2) Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output Sub Kegiatan:

 - a) Forum BAPPEDA Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Kementerian Lembaga, 1 Kegiatan;
 - b) Forum Lintas SKPD antar BAPPEDA Provinsi dengan Kabupaten/Kota, 3 Kegiatan;



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - (1)Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - Output Sub Kegiatan:
 - a) Jumlah dokumen keuangan bulanan/semesteran tahun berjalan.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - (1)Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - Output Sub Kegiatan:
 - a) Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan formal.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - (1) Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Output Sub Kegiatan:
 - a) Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (1) Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - Output Sub Kegiatan:
 - a) Jumlah kebutuhan administrasi dan pelayanan pada Sekretariat BAPPEDA.

4) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Outcome dari program ini adalah Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti, target 100%

- a. Pelaksanaan Program
 1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
 - (1) Sub Kegiatan: Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.
 - Output Sub Kegiatan:
 - a) Pelaksanaan Rakor Kelitbangan Kabupaten/Kota;
 - b) Pelaksanaan Seminar/ Beda Buku;
 - c) Koordinasi Kementerian/ Lembaga;
 - d) Koordinasi Riset Kabupaten/Kota;
 - e) Penyusunan Dokumen Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ-PID) Provinsi Gorontalo 2025-2030.
 2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
 - (1)Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial.
 - Output Sub Kegiatan:
 - a) Penyusunan Police Brief "Model Pengembangan Integrasi Tanaman Pangan-Ternak Berbasis Teknologi & Ekosistem Hilirisasi dalam meningkatkan struktur social pada masyarakat di Provinsi Gorontalo".



3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

(1)Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Output Sub Kegiatan:

a) Kajian Identifikasi UMKM Potensial dalam Mendukung Upaya Promosi Kawasan Geopark Gorontalo.

 (2)Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup.

Output Sub Kegiatan:

a) Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Rinduk untuk Pengembangan Geopark;
 b) Laporan pelaksanaan fasilitasi pengembangan geopark Gorontalo dan pelaksanaan rencana aksi kerjasama Provinsi Gorontalo dan Ehime Prefektur.
4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

(1) Sub Kegiatan: Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.

Output Sub Kegiatan:

Kajian Rencana Bangun Kawasan Pertanian Organik Terintegrasi Ultra Low Cost di Kota Gorontalo

a) Pelaksanaan Seminar Proposal
 b) Pelaksanaan Seminar Hasil
 c) Koordinasi Riset Kabupaten/Kota;
 d) Koordinasi Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi Negeri Gorontalo.

 (2)Sub Kegiatan: Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

Output Sub Kegiatan:

a) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Kelitbangan.
3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Renstra OPD tahun 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2023

Tabel 3.185
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
 BAPPPEDA Provinsi Gorontalo
 Sesuai RPJMD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1.	Persentase Keselarasan Muatan RKPD dengan RPD 2023-2026	100%	100%
2.	Presentasi Keselarasan Muatan Renja OPD dengan RKPD	100%	100%
3.	Presentasi Keselarasan Muatan RKA dengan RKPD	100%	100%
4.	Jumlah Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	4 Kajian	4 Kajian



No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
5.	Jumlah Inovasi dan Teknologi yang termanfaatkan	2 Inovasi	2 Inovasi
6.	Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	BB (73,00)	A (80,92)

4. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tabel 3.186
Kebijakan Strategis yang ditetapkan
Bappeda Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD Pelaksana
1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tanggal 19 September 2024	Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Visi Gorontalo Madani yang Maju dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045	Seluruh Stakeholder Pembangunan
1	Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Gorontalo Tahun 2026-2026	Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024 tentang RAD Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	Meningkatkan pengembangan perkebunan Kelapa Sawit dan Pemanfaatan Kelapa Sawit sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan serta mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.	Bappeda, Dinas Pertanian

B. Keuangan

B.1 Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan yang akan dicapai Badan Keuangan Provinsi Gorontalo adalah meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan



b. Sasaran dan Program

Tabel 3.187
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan (Keuangan)
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan /Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2024		Persentase
	Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan Daerah	Penetapan APBD (paling lambat 31 Desember)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
		Persentase Penyerapan APBD	96	95,07	99,03
		Ketepatan Penyampaian LKPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	100	100	100
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketepatan Waktu penyusunan laporan keuangan daerah	1 Dokumen BMD	1 Dokumen BMD	100
3	Program pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan PAD	7	7,37	105,29

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.188
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATAS I PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp.)	(%)	(%)		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	71.422.099.762,00	62.014.875.666,00	91,16	96,34	- Kegiatan terkait peningkatan terhadap mutu pelayanan administrasi terhadap wajib pajak perlu ditingkatkan. - Penggunaan aplikasi belum terintegrasi untuk perencanaan, evaluasi dan monitoring. - Masih membutuhkan komunikasi lebih intens antar pembuat aplikasi	- Membutuhkan usaha lebih intens untuk integrasi seluruh aplikasi baik itu perencanaan, evaluasi dan pelaporan. - Perlu penyamaan persepsi antar OPD tentang pentingnya aplikasi terkoneksi
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	829.404.550,00	817.642.783,00	98,55	98,58		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	394.988.450,00	386.130.605,20	97,76	98,85		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	434.416.100,00	427.985.252,00	98,52	99,28		



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp.)	(%)	(%)		
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.447.531.253,00	58.290.265.520,00	91,87	97,19		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	63.396.591.753,00	58.239.705.279,00	91,87	97,19		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.939.500,00	50.560.241,00	99,26	100,00		
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	356.094.900,00	259.336.672,00	72,83	77,89		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	356.094.900,00	259.336.672,00	72,83	77,79	- Terdapat belanja makanan dan minuman rapat dan honorarium nara sumber yang tidak terserap secara optimal	- Lebih cermat dalam menyusun rencana anggaran yang dibutuhkan
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.361.363.313,00	2.839.636.501,00	93,01	94,14		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.043.947.080,00	1.580.499.199,00	77,33	79,39	- Terdapat belanja sewa, belanja pemeliharaan dan belanja modal yang tidak terserap secara optimal	- Melaksanakan proses penagihan dimaksimalkan sampai di triwulan I dan II baik untuk belanja modal, belanja sewa dan belanja pemeliharaan
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD-P3D. Kota Gorontalo	264.729.875,00	264.043.653,00	99,74	100,00		
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD-P3D. Kab. Gorontalo	255.605.358,00	252.563.438,00	98,81	98,62		
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD-P3D. Kab. Boalemo	163.222.100,00	157.810.050,00	96,68	97,35		
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD-P3D. Kab. Pohuwato	228.866.000,00	180.304.650,00	78,78	81,94		
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD-P3D. Kab. Bone Bolango	181.541.675,00	181.332.000,00	99,88	100,00		
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD-P3D. Kab. Gorontalo Utara	223.451.225,00	223.083.511,00	99,84	100,00		
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.427.705.746,00	2.964.343.699,79	89,32	93,93		
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.350.611.100,00	1.067.131.492,00	79,01	85,44		
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD-P3D. Kota Gorontalo	543.671.900,00	491.256.041,00	90,36	96,03		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD-P3D. Kab. Gorontalo	385.179.971,00	365.084.787,00	94,78	99,14		



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp.)	(%)	(%)		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD-P3D. Kab. Boalemo	231.052.350,00	220.903.525,00	95,61	97,60		
5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD-P3D. Kab. Pohuwato	334.804.725,00	305.656.731,00	91,29	89,80		
6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD-P3D. Kab. Bone Bolango	312.585.800,00	268.689.272,00	85,96	97,39		
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD-P3D. Kab. Gorontalo Utara	269.799.900,00	245.621.851,79	91,04	92,12		
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	224.959.150.309	216.552.133.141	94,24	98,09	- kesalahan penginputan rekening belanja pada aplikasi SIPD Masih sering terjadi	- Pelatihan penggunaan aplikasi FMIS dan SIPD secara berkala
						- Sumber daya manusia yang memahami operasional SIPD masih sering berganti tanpa regenerasi yang berkala	- Sosialisasi secara berkala tentang penempatan rekening belanja sesuai dengan paeraturan perundang-undangan yang berlaku
						- Penganggaran kegiatan yang relatif berubah dan tidak sesuai dengan perencanaan	- Penggantian personil harus melihat tugas yang dilaksanakan
							- Penganggara n kegiatan harus lebih selektif dengan perencanaan dan memperhatikan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan
2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	454.951.000,00	437.702.793,00	96,21	96,93		
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	91.039.450,00	89.752.884,00	98,59	99,08		
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	64.474.500,00	59.293.999,00	91,97	92,26		
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	199.436.250,00	194.890.568,00	97,72	98,76		
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100.000.800,00	93.765.342,00	93,76	94,36		



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp.)	(%)	(%)		
2.2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	284.564.800,00	266.171.224,00	93,54	100,00		
1	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	284.564.800,00	266.171.224,00	93,54	100,00		
2.3	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	7.724.083.556,00	7.634.675.699,00	98,84	100,00		
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	351.829.300,00	324.127.628,00	92,13	99,48		
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	199.959.250,00	189.253.127,00	94,65	96,07		
3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	6.707.443.806,00	6.704.280.161,00	99,95	100,00		
4	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	464.851.200,00	417.014.783,00	89,71	97,35		
2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	878.745.850,00	832.077.751,00	94,69	98,79		
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	259.932.800,00	230.101.998,00	88,52	96,61		
2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	425.412.300,00	417.857.831,00	98,22	99,65		
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	193.400.750,00	184.117.922,00	95,2	99,84		
2.5	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	215.101.005.103,00	206.913.452.884,99	91,39	92,85		



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp.)	(%)	(%)		
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	8.471.906.618,00	7.301.497.713,00	86,18	88,17	- Penyaluran Bantuan Keuangan berupa Dana Tidak Terduga tidak terserap secara optimal	- Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan tambahan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Insentif Fiskal Daerah dan disalurkan ke kas daerah diakhir tahun 2024, sisa Dana IF tersebut akan dialokasikan kembali pada APBD TA. 2025 melalui mekanisme pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan Pergub Penjabaran APBD TA. 2025
2	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	206.629.098.485,00	199.611.955.171,99	96,60	97,52	- Belanja Dana Bagi Hasil tidak terserap secara optimal	
2.6	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	515.800.000,00	468.052.789,00	90,74	100,00		
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	515.800.000,00	468.052.789,00	90,74	100,00		
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.570.481.800,00	1.539.594.698,00	97,95	98,08	- Pemahaman tentang prosedur dalam pengelolaan barang milik daerah perlu ditingkatkan. - Pemahaman tentang penggunaan aplikasi Simda BMD perlu ditingkatkan - Kesalahan penginputan rekening belanja modal pada Simda BMD masih sering terjadi.	- Pelatihan penggunaan aplikasi Simda BMD secara berkala - Sosialisasi tentang mekanisme pengelolaan barang milik daerah - Penggantian personil harus melihat tugas yang dilaksanakan. - Adanya integrasi antar aplikasi yang compatable dan efisien
3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.241.847.275,00	1.207.075.000,00	97,01	99,82		



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp.)	(%)	(%)		
1	Penyusunan Standar Harga	353.424.450,00	348.987.303,00	98,74	99,68		
2	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	241.272.700,00	229.671.415,00	95,19	99,78		
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	647.150.125,00	628.416.282,00	97,11	100,00		
IV	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.810.149.480,00	5.254.467.447,00	97,95	98,45	- Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, 41.17% di tahun 2024.	- Sosialisasi pentingnya keterlibatan masyarakat wajib pajak terhadap pembangunan idealnya dilakukan secara berkala dengan metode yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi maupun trend ekonomi.
							- Dilakukan pengkajian mendalam untuk eksplorasi dan eksploitasi potensi PAD secara optimal
						- Belum adanya integrasi antara Aplikasi SIPAMOR dengan SIPD sehingga data realisasi untuk pendapatan harus diinput lagi ke SIPD	- Pengembang SIPD membuka ruang untuk Sipamor masuk sehingga tidak perlu lagi dilakukan penginputan secara manual.
4.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.810.149.480,00	5.254.467.447,00	91,36	96,58		
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	536.144.080,00	484.402.265,00	90,35	94,64		
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	338.423.800,00	316.629.890,00	93,56	98,70		
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	629.900.000,00	618.208.085,00	98,14	100,00		
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	322.121.700,00	313.173.178,00	97,22	99,94		
5	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	165.049.400,00	160.508.794,00	97,25	98,72		
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah UPTD-P3D. Kota Gorontalo	443.636.000,00	407.826.949,00	91,93	99,70		



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU 2024 (Rp.)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp.)	(%)	(%)		
7	Penagihan Pajak Daerah UPTD-P3D. Kota Gorontalo	240.000.000,00	231.150.000,00	96,31	100,00		
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah UPTD-P3D. Kab. Gorontalo	665.960.000,00	598.032.997,00	89,8	95,19		
9	Penagihan Pajak Daerah UPTD-P3D. Kab. Gorontalo	415.500.000,00	409.886.539,00	98,65	100,00		
10	Penetapan Wajib Pajak Daerah UPTD-P3D. Kab. Boalemo	344.470.000,00	189.468.073,00	55	73,26		
11	Penagihan Pajak Daerah UPTD-P3D. Kab. Boalemo	189.000.000,00	180.750.000,00	95,63	95,69		
12	Penetapan Wajib Pajak Daerah UPTD-P3D. Kab. Pohuwato	383.754.000,00	298.847.943,00	77,87	96,35		
13	Penagihan Pajak Daerah UPTD-P3D. Kab. Pohuwato	208.207.500,00	202.178.200,00	97,1	100,00		
14	Penetapan Wajib Pajak Daerah UPTD-P3D. Kab. Bone Bolango	336.308.000,00	295.592.159,00	87,89	100,00		
15	Penagihan Pajak Daerah UPTD-P3D. Kab. Bone Bolango	127.500.000,00	127.350.000,00	99,88	100,00		
16	Penetapan Wajib Pajak Daerah UPTD-P3D. Kab. Gorontalo Utara	327.200.000,00	283.545.875,00	86,66	89,73		
17	Penagihan Pajak Daerah UPTD-P3D. Kab. Gorontalo Utara	136.975.000,00	136.916.500,00	99,96	100,00		
Jumlah		303.761.881.351,00	285.361.070.951,99	95,32	97,74		

Uraian Penjelasan :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Provinsi.

Outcome dari program ini adalah persentase peningkatan layananan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur serta perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Output : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 7 (tujuh) dokumen
Dokumen tersebut berupa RKA SKPD Tahun 2024, DPA SKPD Tahun 2024, RKAP Tahun 2024, DPPA SKPD Tahun 2024, Rencana Kerja Tahun 2025, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, Laporan Peta Proses Bisnis Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024
- b. Evaluasi kinerja perangkat daerah
Output : Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah sebanyak 9 (sembilan) dokumen
Dokumen tersebut berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024, Laporan Evaluasi Renja Tahun 2024, Laporan Data Sektor Tahun 2024, Laporan Pencapaian Target Program dan Kegiatan

SKPD, Dokumen Manajemen Risiko (MR), Maturitas SPIP, dan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan :

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang

Tahun 2024 capaian serapan anggaran Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebesar Rp58.239.705.279,- atau 91,87%.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Output : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 5 (lima) dokumen

Dokumen tersebut berupa Laporan Buku Kas Umum, Laporan Register SP2D, Laporan Pertanggungjawaban Administratif, Laporan Pertanggungjawaban Operasional, Laporan Realisasi Bulanan dan Kendali Kegiatan, Laporan Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan Tahunan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan :

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Output: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 40 (empat puluh) orang

Tahun 2024 telah dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan Pengelolaan Keuangan melalui Aplikasi SIPD bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Keuangan SKPD se-Provinsi Gorontalo. Adapun peserta yang mengikuti diklat sebanyak $\pm$ 180 peserta. Selanjutnya pada Bulan November Tahun 2024 juga telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesamsatan dan Pelayanan di Bidang-bidang lingkup Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Terdapat pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Kepemimpinan Administrator (PKA) Badan Keuangan Provinsi Gorontalo mengutus 3 (tiga) pejabat Administrator untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 22 (dua puluh dua) paket

Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dalam penyediaan sarana dan prasarana tahun 2024 telah melaksanakan pengadaan belanja melalui e-Katalog dan Mbizmarket. Terdapat beberapa UPTD-P3D juga sudah menggunakannya yaitu UPTD-P3D. Kota Gorontalo dan UPTD-P3D. Kabupaten Bone Bolango, dan untuk pengadaan Gedung dan bangunan melalui proses pengadaan dengan menggunakan Aplikasi LPSE sehingga pelaksanaannya mencapai 93,01%.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan kegiatan :

Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 1 (satu) laporan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di dalamnya mencakup seluruh kegiatan yang ada pada UPTD-P3D. Kabupaten dan Kota lingkup Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Adapun serapan keuangannya mencapai 89,72%.

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Outcome dari program ini adalah persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan daerah.

Pelaksanaan Program :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Output : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun sebanyak 2 (dua) dokumen

Penyampaian Rancangan Awal KUA dan PPAS 2025 dari Kepala Daerah kepada DPRD dilaksanakan pada minggu ke I bulan Agustus 2024.

b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 2 (dua) dokumen

Output : Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun

Setelah penyampaian Rancangan Awal KUA dan PPAS 2024 dari Kepala Daerah kepada DPRD dilaksanakan tepat waktu pada minggu ke II bulan Juli 2024 selanjutnya dilaksanakan pembahasan bersama DPRD yang menghasilkan perbaikan atau perubahan atas Rancangan KUA dan PPAS 2024 sehingga untuk penandatanganan nota kesepakatan dilaksanakan pada minggu ke IV bulan Juli 2024.

c. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Output : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebanyak 2 (dua) dokumen

Adapun proses penyusunan APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2025 mulai dari penyampaian Rancangan Awal KUA PPAS 2025, pembahasan bersama DPRD yang menghasilkan Kesepakatan KUA PPAS dan dilanjutkan dengan proses penyusunan RKA-SKPD Tahun 2025, asistensi TAPD dan review APIP atas R-APBD kemudian pembahasan bersama DPRD dimana mencapai persetujuan bersama Gubernur dan DPRD.

d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Output : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sebanyak 2 (dua) dokumen

Telah dilaksanakannya evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI atas APBD Perubahan Tahun 2024 dimana Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Penjabaran Perubahan APBD telah



sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyerahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 ke DPRD telah sesuai dengan jadwal yaitu paling lambat 01 Oktober 2024, dimana Pemerintah Provinsi Gorontalo menyerahkan tanggal 04 Agustus 2024.

2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan kegiatan :

- a. Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

Output : Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota sebanyak 12 (dua belas) dokumen

Terlaksananya evaluasi pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 se-Provinsi Gorontalo secara maksimal, tepat waktu (15 hari kerja) dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan APBD Kabupaten/Kota TA. 2025 juga telah dilaksanakan tepat waktu.

3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Pelaksanaan kegiatan :

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Output : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Terdapat jumlah dokumen SP2D yang terverifikasi sebanyak 50.176 Nomor SP2D

- b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Output : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD sebanyak 2 (dua) dokumen

Terdapat jumlah otorisasi penerbitan anggaran kas dan SPD /Program/Kegiatan/SKPD lingkup Provinsi Gorontalo

- c. Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Output : Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah sebanyak 1 (satu) dokumen

Jumlah realisasi anggaran untuk sub kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah di bawah target disebabkan adanya belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan berupa Biaya Bunga Pinjaman yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan anggaran yang sudah tersedia pada DPA SKPD Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024, sudah dikompensasi pada saat penyaluran Dana PEN kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur, sedangkan untuk pembayaran biaya provisi sebesar 1% telah dibayarkan sesuai dengan permintaan pembayaran/invoice melalui APBD Tahun 2024.

- d. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank



Output : Jumlah Dokumen Kerjasama sebanyak 1 (satu) dokumen

Terdapat 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah Provinsi Gorontalo dan PT. Bank SulutGo tentang Penempatan Dana Deposito.

4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Pelaksanaan kegiatan :

a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

Output : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sebanyak 2(dua) laporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Un Audited telah diserahkan kepada BPK RI sesuai dengan jadwal yang ditetapkan setelah sebelumnya dilaksanakan rekonsiliasi dan proses akuntansi lainnya sesuai dengan SAP.

b. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi

Output : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Un Audited telah diserahkan kepada BPK RI sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Audited telah diperiksa oleh BPK RI dengan Nomor 01.A/LHP/XIX.GOR/05/2024 tanggal 27 Mei 2024.

c. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Output : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) dokumen

Telah disahkannya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024 dan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024.

d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan kegiatan :

1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Output : Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sebanyak 1 (satu) laporan

Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima Dana Insentif Fiskal dari Kementerian Keuangan RI sebesar Rp7.682.882.000,-

2) Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi

Output : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi sebanyak 1 (satu) laporan



Pengelolaan dana bagi hasil Provinsi tahun 2024 sebesar Rp199.603.513.267,00,- atau 96,60%

- e. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

Pelaksanaan kegiatan :

- 1) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah

Output : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah sebanyak 1 (satu) dokumen

Telah dilaksanakan pula Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah melalui Aplikasi SIPD lingkup Provinsi Gorontalo.

Telah dilakukannya koordinasi dan konsultasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri baik Ditjen Bina Keuangan Daerah maupun Pusdatin Kemendagri dalam implementasi Aplikasi SIPD.

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas (SIM-PD) milik Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 13 tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan gubernur gorontalo nomor 32 tahun 2024 tentang perjalanan dinas.

3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Outcome dari program ini adalah Ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah.

Pelaksanaan Program :

- a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pelaksanaan kegiatan :

- 1) Penyusunan Standar Harga

Output : Jumlah dokumen standar harga yang disusun sebanyak 1 (satu) dokumen

- Telah diterbitkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Standar Harga Satuan Regional Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025.
- Telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 210/29/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Rencana Keubutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- Tersedianya dokumen berupa Buku Standar Harga Satuan Regional Tahun 2025 telah dicetak sebanyak 50 buah buku.

- b. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Output : Jumlah Dokumen Kebijakan yang diterbitkan sebanyak 1 (satu) dokumen

Telah dilaksanakan identifikasi potensi pemanfaatan barang milik daerah. Terdapat beberapa perjanjian sewa barang milik daerah diantaranya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan PT. Bank SulutGo dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada UPTD-P3D Kota Gorontalo. Terdapat beberapa



pemanfaatan barang milik daerah sebagai salah satu bentuk optimalisasi asset diantaranya :

- Pemanfaatan gedung bangunan ICS (Integrated Cold Storege)
- Pemanfaatan tanah/lahan oleh PT. HARIM
- Pemanfaatan gedung bangunan Bele li Mbui

c. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Output : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah sebanyak 1 (satu) dokumen

- Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan penerapan Aplikasi e-BMD lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2024.
- Telah dilaksanakan pemusnahan asset rusak berat di beberapa SKPD sebagai tindaklanjut dari hasil sensus barang milik daerah.
- Pelaksanaan penyusunan IPA (Indeks Penilaian Aset) dimana hasil Indeks Penilaian Aset untuk Pemerintah Provinsi Gorontalo berada pada poin 2,16 setelah dievaluasi oleh Tim dari Kemendagri.

4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Outcome dari program ini adalah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pelaksanaan Program :

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan Kegiatan :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah

Output : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 1 (satu) dokumen

- Telah diterbitkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Telah dilaksanakan pendataan dan penagihan tunggakan Pajak Alat Berat
- Telah dilaksanakan Penandatanganan PKS antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Bank SulutGo terkait Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dengan sosialisasi layanan berbasis digital.
- Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Samsat terkait optimalisasi pendapatan pajak daerah.
- Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan asli daerah melalui sosialisasi, membuka layanan-layanan yang mendekatkan ke wajib pajak, penegakan hukum, door to door, dan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
- Tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2024 sebesar 41,17% terjadi peningkatan dari tahun 2023

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Output : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah dan Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah sebanyak 1 (satu) laporan



- Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Badan Keuangan Provinsi Gorontalo melaksanakan penandatanganan MoU dengan Universitas Ichsan Gorontalo dalam rangka penyusunan proyeksi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Telah diluncurkan Samsat Link sebagai salah satu inovasi Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan pendapatan pajak daerah.
 - Telah operasikan mobil samsat midnight, samsat car free day.
 - Kegiatan stock opname notice pajak dilaksanakan setiap 3 bulan
 - Proses pengadaan notice pajak dilakukan melalui e-katalog.
 - Terlaksananya rekonsiliasi Pemakaian SKKP dan TBPKP
 - Penyiapan aplikasi SIPAMOR yang mengakomodir Opsen PKB dan BBNKB.
 - Dokumen Laporan Hasil penyaluran karcis Retribusi ke SKPD (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo)
 - Dokumen berupa potongan karcis Retribusi yang diserahkan ke SKPD (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo)
4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Output : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
- Terlaksananya Kegiatan Rapat Kerja APPDI sebanyak 2 (dua) kali
 - Terupdatenya NJKB dan pemutakhiran data kendaraan pada Aplikasi Samsat Diterbitkannya dokumen NKJB Tahun 2024
 - Telah direlokasi tempat Kantor Bersama Samsat Pembantu Sumalata ke Kantor Bersama Samsat Pembantu Atinggola guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
 - Telah beroperasinya Warkop Samsat midnoght dengan menggunakan qris untuk mendorong digitalisasi dan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak
5. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Output : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah sebanyak 1 (satu) laporan
- Tersedianya dokumen capaian dana perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus Fisik dan Keuangan dan DID
 - Tersedianya dokumen laporan penyaluran dana bagi hasil pajak rokok ke Kabupaten/Kota
6. Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Output : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
- Telah dilaksanakan pemungutan piutang pajak kendaraan bermotor melalui door to door dan Razia kendaraan bermotor.



- Adapun untuk realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mengalami kenaikan sebesar 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya, namun untuk realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mengalami penurunan sebesar 1,19% dari tahun sebelumnya.

7. Penagihan Pajak Daerah

Output : Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak

Laporan Realisasi Tunggakan Pajak Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor

3. Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

Tabel 3.189
Kebijakan Strategis yang ditetapkan
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pembukaan kantor Samsat Pembantu	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak yang dapat berpotensi meningkatkan pendapatan pajak dari sisi pajak kendaraan bermotor
2	Elektronifikasi Pembayaran pajak dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Mendukung program Pemerintah dalam penggunaan layanan non tunai

4. Data berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Renstra OPD Tahun 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 3.190
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Sesuai RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Peningkatan Pendapatan Daerah (Rp, Trilyun)	1,92	1,88	1,87	1,86
2	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP

5. Hal-hal lain yang dilaporkan terkait kinerja 2024

a. Peningkatan Pendapatan Daerah

Untuk capaian kinerja pertumbuhan pendapatan asli daerah sebesar 7,37% atau terdapat peningkatan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2024 sebesar Rp464.829.608.588,- dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp432.906.096.022,- atau meningkat sebesar Rp31.923.512.566,-. Faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dimaksud terdapat pada sektor pajak kendaraan bermotor dan retribusi. Adanya penurunan daya beli kendaraan bermotor yang dapat disebabkan oleh kondisi ekonomi daerah yang tidak stabil dan cenderung menurun serta adanya inflasi yang tinggi dan kenaikan harga kendaraan sangat mempengaruhi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor. Adapun tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang masih rendah setiap tahunnya yakni tingkat kepatuhan



wajib pajak tahun 2024 sebesar 41,17 % dibandingkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2023 sebesar 39.01%. Terdapat peningkatan sedikit 2.16% dari tahun 2023.

b. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kiat-kiat untuk mendapatkan opini WTP dari BPK secara garis besar sebagai berikut:

1. Memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Menyusun laporan keuangan yang akurat dan lengkap
3. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif
4. Mengungkapkan informasi secara jelas dan detail
5. Melaksanakan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan

Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas

1. Pahami dan Terapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2. Persiapkan Data dan Dokumen yang Lengkap dan Akurat
3. Lakukan Rekonsiliasi secara Berkala
4. Terapkan Pengendalian Internal yang Kuat
5. Gunakan Sistem Akuntansi yang Tepat dan Terintegrasi
6. Penyusunan Laporan Keuangan dengan Teliti dan Cermat
7. Tindak Lanjut terhadap Temuan Audit

Bidang Anggaran :

- 1) Penyusunan APBD tepat waktu dan berkualitas yang menjadi salah satu penilaian dalam mendapatkan alokasi DID (Dana Insetif Daerah) sebanyak 2 (dua) kali.
- 2) Penyampaian Ranperda APBD 2024 beserta dokumen terkait lainnya kepada Kementerian Dalam Negeri RI kedua di seluruh Indonesia yang sudah menggunakan aplikasi SIPD
- 3) Penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2024 beserta dokumen terkait lainnya kepada Kementerian Dalam Negeri RI pertama di seluruh Indonesia yang juga menggunakan aplikasi SIPD
- 4) Penganggaran Mandatory Spending terpenuhi, yakni penganggaran belanja daerah yang sudah diatur oleh Undang-undang. Tujuan Mandatory Spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan social dan ekonomi daerah, antara lain penganggaran Pendidikan, kesehatan serta belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
- 5) Penyempurnaan Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIMPDP) memungkinkan adanya transparansi dan kurangnya tumpang tindih penugasan sehingga berdampak pada efisiensi belanja perjalanan dinas.

Bidang Aset :

- 1) Kegiatan pengelolaan RKBMD & RKPMBD ini didasari adanya temuan Itjen Kemendagri atas pengelolaan yang kurang optimal khususnya pada perencanaan kebutuhan BMD dan pemeliharaan BMD. Di tahun 2023 telah dilaksanakan RKBMD & RKPMBD untuk tahun

anggaran 2024, sebagaimana ketentuan Permendagri untuk pelaksanaan penelaahan RKBMD & RKPBMMD.

Bidang Perbendaharaan :

- 1) Regulasi yang mengatur tentang Kasda Online yang telah diterapkan ditahun 2024 dengan versi terbaru dimana ada beberapa fitur tambahan dalam hal verifikasi dokumen berupa NPWP yang sudah terkoneksi dengan pajak, karena Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo selaku PPKD dan bertindak sebagai BUD mempunyai fungsi *Maker, Checker, Approved* karena sudah menerapkan Kasda Online maka beralih fungsi menjadi tugas dan tanggung jawab BUD sebagaimana telah diatur dalam PKS antara Pihak Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pihak Perbankan.
- 2) Penyampaian laporan alokasi DAU tahun 2024 dilakukan tepat waktu yakni setiap tanggal 14 dibulan berjalan untuk alokasi DAU bulan berikutnya.
- 3) Pembayaran Potongan Pihak Ketiga (PFK) tidak melewati tahun anggaran karena secara otomatis sudah terintegrasi dengan Kasda Online.
- 4) Penyampaian SPJ dari setiap OPD mengalami kemajuan yakni tidak melewati batas waktu 30 hari.
- 5) Tidak ada lagi pemeriksaan/verifikasi dokumen fisik tagihan karena telah diberlakukan ketentuan sesuai Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 18 Tahun 2021 dimana OPD yang mengajukan tagihan hanya melampirkan SPM, SPTJM dan Surat Pernyataan Verifikasi dari OPD yang bersangkutan.

Bidang Pendapatan :

- 1) Telah dibukanya Kantor Samsat Pembantu Wonosari di Kabupaten Boalemo untuk memperlancar, mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak.
- 2) Telah dilaksanakan rekonsiliasi data transfer bagi hasil pajak daerah antara Bidang Pendapatan Provinsi Gorontalo dengan Bidang Pendapatan Kab./Kota dan Bidang Akuntansi Provinsi Gorontalo dengan Bidang Akuntansi Kab./Kota.
- 3) Guna peningkatan pendapatan daerah telah dilakukan kegiatan penagihan pajak secara Door to door dan Razia bersama pihak Kepolisian dan UPTD Samsat se-Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini sangat efektif dan besar pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan daerah.
- 4) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2024 tidak mencapai target yang diharapkan bahkan untuk mengoptimalkan pendapatan dari sisi pajak kendaran bermotor, target pajak BBNKB dialihkan ke pajak PKB sebesar 6 miliar rupiah. Hal ini terjadi karena adanya penurunan daya beli kendaraan baru mencapai 40% menurut GAIKINDO.

Bidang Akuntansi :

- 1) Telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023



2) Telah diterbitkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

6. Penghargaan Nasional yang diterima OPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024

- 1. Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas keberhasilan Menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2023 dengan Capaian WTP
- 2. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dalam hal ini UPTD-P3D. Kabupaten Gorontalo, berhasil mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB dengan nilai 4,26 dengan predikat A- Tahun 2023.

C. Pengawasan

C.1 Inspektorat Provinsi Gorontalo

- 1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai
Tujuan yang akan dicapai adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
 - b. Sasaran dan Program
 - Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD
 - Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan

Tabel 3.191
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1.	Sasaran: - Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Indikator Sasaran: - Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD yang Bersertifikat Profesi	2 orang	2 orang	100%
		- Nilai LKIP Inspektorat	BB	BB	100%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indikator Program: - Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
2.	Sasaran: - Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kualitas Pengawasan	Indikator Sasaran: - Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	100%
		- Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100%
		- Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	100%
		- Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	100%
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Indikator Program: - Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	80%	74,32%	92,9%
		- Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	90%	90%	100%



	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indikator Program: - Jumlah OPD Yang Menerapkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	2 OPD	2 OPD	100%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.192

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	Pagu 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024			Perma salahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)		
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.012.602.424	18.665.765.911	98, 18	100	Tidak ada	
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	259.098.775	255.914.298	98, 77	100		
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.924.734.461	15.634.052.649	98, 17	100		
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.060.550	397.239.018	95, 71	100		
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	947.291.600	926.087.000	97, 76	100		
	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.119.811.950	1.112.320.916	99, 33	100		
	6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.605.088	340.152.030	98, 14	100		
B.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.662.816.900	2.638.132.340	99, 07	100	Tidak ada	
	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.199.894.025	2.178.698.089	99, 04	100		
	2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	462.922.875	459.434.251	99, 25	100		
C.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.428.352.000	1.396.477.534	97, 77	100	Tidak ada	
	1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	209.790.000	209.173.445	99, 71	100		



	Fasilitasi Pengawasan						
	2. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1.218.562.000	1.187.304.089	97, 43	100		
J U M L A H		23.103.771.324	22.700.375.785	98, 25	100		

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari Program ini adalah :

Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100%

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Ouput Kegiatan adalah :

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi tercapai 100% dengan total 9 dokumen.

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 3 dokumen atau realisasi capaian 100%.

2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah kinerja sebanyak 6 dokumen atau realisasi capaian 100%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Ouput Kegiatan adalah :

Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 95,28%.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 110 orang.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Output : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 275 dokumen atau realisasi capaian 100%.

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Output : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 2 dokumen atau realisasi capaian 100%.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Ouput Kegiatan adalah :

Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) orang.

1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Output :Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) orang atau realisasi capaian 100%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Ouput Kegiatan adalah :

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebanyak 17 (tujuh belas) paket.



1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 17 (tujuh belas) paket.
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output Kegiatan adalah :
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 4 (empat) laporan.
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 4 (empat) laporan.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan selama satu tahun dengan capaian realisasi 100%.
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan selama satu tahun dengan capaian realisasi 100%.
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output Kegiatan adalah :
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sebanyak 57 (lima puluh tujuh) BMD (Barang Milik Daerah).
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 6 unit atau capaian 100%.
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 50 unit atau capaian 100%.
 3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Output : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi sebanyak 1 unit atau capaian 100%.
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan
Outcome dari Program ini adalah :
Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK sebesar 74,32% dan Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP sebesar 90%.
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Output Kegiatan adalah :
Jumlah laporan pengawasan internal sebanyak 316 (tiga ratus enam belas) laporan.
 1. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah



Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 19 laporan.

2. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 63 laporan.

3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja

Output : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 125 laporan.

4. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota

Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota sebanyak 60 laporan.

5. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal

Output : Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk sebanyak satu dokumen.

6. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Output : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sebanyak 48 dokumen.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Output Kegiatan adalah :

Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu sebanyak 21 (dua puluh satu) laporan.

1. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Output : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu sebanyak 21 laporan.

3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Outcome dari Program ini adalah :

Jumlah OPD yang menerapkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sebanyak 2 (dua) OPD.

➤ Pelaksanaan Program

1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Output Kegiatan adalah :

Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun sebanyak 1 (satu) kebijakan.

2. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Output : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun sebanyak satu dokumen.

2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Output Kegiatan adalah :

Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah.



3. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah.
 4. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah.
 5. Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi
 Output : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah.
 6. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
 Output : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas sebanyak sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah.
3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra OPD 2023-2026, Khusus Indikator Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.193
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1.	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
2.	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	80%	74,32%
3.	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	90%	90%
4.	Jumlah OPD Yang Menerapkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	2 OPD	2 OPD

D. Pendidikan dan Pelatihan

D.1 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Gorontalo
 - Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan



b. Sasaran dan Program

Tabel 3.194

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Percepatan reformasi birokrasi melalui pengembangan kompetensi SDM Aparatur	Persentase pengembangan kompetensi SDM Aparatur	30% 736 Orang	128% 3152 Orang	428
		Nilai akreditasi lembaga penyelenggaraan pelatihan	B (81,00)	A (91,00)	112
	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat, bimtek, workshop, seminar, coaching, kursus, penataran, sosialisasi, orientasi, dan jalur pengembangan kompetensi klasikal yang sejenis.	21,29 501 Orang	84,79 1995 Orang	398
2	Sasaran : Meningkatkan kualitas urusan penunjang OPD	Nilai SAKIP	B (60,01)	A (81,55)	136
	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	124	124

2. Program dan Kegiatan

Tabel. 3.195

Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.425.895.254	10.966.997.672	95,98	100		
A	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	431.653.050	430.951.490	99,84	100		
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	210.424.600	209.945.504	99,77	100		
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	221.228.450	221.005.986	99,90	100		
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.492.606.816	8.039.820.839	94,67	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.352.698.966	7.900.153.725	94,58	100		
2)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	139.907.850	139.667.114	99,83	100		
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.628.000	415.585.156	99,99	100		
1)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	415.628.000	415.585.156	99,99	100		
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	629.501.300	628.850.382	99,90	100		
1)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	629.501.300	628.850.382	99,90	100		
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.456.506.088	1.451.789.805	99,68	100		
1)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.456.506.088	1.451.789.805	99,68	100		
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.366.525.165	1.359.623.192	99,49	100	1) Penyelenggaraan Orientasi PPPK pada perencanaan awal hanya akan diselenggarakan untuk 500 peserta, sedangkan jumlah PPPK Pemerintah Provinsi Gorontalo yang belum mengikuti Orientasi PPPK sebanyak 1299 orang. 2) Tidak tersedianya anggaran penyelenggaraan PKA untuk memenuhi kompetensi	1) Penyelenggara melakukan penyesuaian kurikulum yang awalnya menggunakan kurikulum MOOC dari LAN RI dan kurikulum muatan lokal, menjadi hanya menggunakan kurikulum MOOC untuk mengefisiensikan anggaran dan seluruh PPPK sebanyak 1299 orang dapat mengikuti Orientasi PPPK. 2) Setelah diinventarisir sisa anggaran dari pelaksanaan Orientasi PPPK dan dilakukan pengusulan



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
						bagi Pejabat Administrat or Pemerintah Provinsi Gorontalo.	tambahan anggaran, maka PKA dapat diselenggarakan.
A	Pengembangan Kompetensi Teknis	238.513.750	233.733.266	98,00	100		
1)	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	238.513.750	233.733.266	98,00	100		
B	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.128.011.415	1.125.889.926	99,81	100		
1)	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	76.378.625	75.859.450	99,32	100		
2)	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	58.356.450	58.345.790	99,98	100		
3)	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	199.382.165	198.629.425	99,62	100		
4)	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	40.011.450	39.802.837	99,48	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
5)	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	753.882.725	753.252.424	99,92	100		
JUMLAH		12.792.420.419	12.326.620.864	96,36	100		

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari Program ini adalah Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%, target tersebut sudah dapat tercapai dengan penjelasan sebagai berikut. BPSDM Provinsi Gorontalo turut menghasilkan PAD dari retribusi penyewaan bangunan sebesar Rp. 51.163.063,00, retribusi ini diperoleh dari penyewaan gedung asrama dan auditorium oleh K/L/D/I.

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output dari kegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah. Dokumen perencanaan dimaksud terdiri dari Renja, LKPJ, LPPD, LKIP, dan pemenuhan-pemenuhan dokumen evaluasi SAKIP. Target kegiatan ini sudah terpenuhi seluruhnya dengan dengan persentase 100%, berdasarkan telah tersusunnya seluruh dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Output dari kegiatan ini adalah dokumen verifikasi/pengujian penatausahaan laporan keuangan dalam bentuk SPJ, serta pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN. Target kegiatan ini sudah terpenuhi seluruhnya dengan persentase 100%, berdasarkan telah tersusunnya seluruh dokumen SPJ dan terpenuhinya seluruh hak ASN berupa gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan pegawai.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Output dari kegiatan ini adalah ASN BPSDM Provinsi Gorontalo yang mengikuti pengembangan kompetensi yang ditargetkan sebanyak 25 orang. Pada tahun 2024, ASN BPSDM Provinsi Gorontalo yang diikutsertakan untuk mengikuti pengembangan kompetensi yang terpenuhi adalah sebanyak 52 orang sehingga didapati bahwa *output* kegiatan sudah terpenuhi sesuai target yang telah ditentukan. Untuk jenis pengembangan kompetensi dari yang diikuti dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.196
 Rekapitulasi Pengembangan Kompetensi ASN BPSDM Provinsi Gorontalo
 Tahun 2024

No.	Pengembangan Kompetensi yang Diikuti	Jumlah ASN
1	<i>Training of Trainers</i> Orientasi Angggota DPRD	13 orang
2	<i>Training of Trainers</i> Pemanfaatan Data Regsosek melalui SEPAKAT	1 orang
3	<i>Workshop</i> Penggunaan Media Digital Dalam Rangka Mendukung Platform Digital Manajemen ASN	3 orang
4	<i>Workshop</i> Penggunaan Media Digital dalam Menunjang Kinerja Organisasi	35 orang
TOTAL		52 orang

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan rutin Perangkat Daerah berupa pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan taman, pengadaan BBM untuk kendaraan dinas dan non-kendaraan, pemeliharaan komputer dan printer, pemeliharaan kendaraan dinas, dan pengelolaan sarana dan prasarana lainnya. Seluruh *output* kegiatan ini sudah tercapai sesuai target yang telah ditentukan dengan persentase 100%.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan rutin Perangkat Daerah berupa pembayaran tagihan listrik, pembayaran jasa tenaga kebersihan dan keamanan, pembayaran jasa Pegawai Tetap yang bertugas mengelola sarana dan prasarana kantor, dan kebutuhan rutin lainnya. Seluruh *output* kegiatan ini sudah tercapai sesuai target yang telah ditentukan dengan persentase 100%.

2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Outcome dari Program ini adalah Persentase SDM aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat, bimtek, workshop, seminar, coaching, kursus, penataran, sosialisasi, orientasi, dan jalur pengembangan kompetensi klasikal yang sejenis. Target pada tahun 2024 yang ditentukan untuk *outcome* program ini adalah sebesar 21,29% atau sebanyak 501 orang dari target jumlah ASN yang akan mengikuti bangkom yang ditetapkan pada dokumen Renstra 2023-2026 sejumlah 2353 orang. Adapun jumlah peserta dari seluruh pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo di tahun 2024 adalah sebanyak 1995 orang, sehingga sehingga realisasi *outcome* program pengembangan sumber daya manusia sampai dengan tahun 2024 sebesar 84,79%. Realisasi *outcome* yang sudah memenuhi target ini disebabkan terdapat beberapa penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan di luar perencanaan pada dokumen Renstra 2023-2026, salah satunya adalah Orientasi PPPK yang kebijakan terkait pelaksanaannya ditetapkan setelah tersusunnya RPD 2023-2026. Seluruh pengembangan kompetensi yang merupakan *outcome* dari Program Pengembangan Sumber Daya Manusia di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.197

Rekapitulasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
BPSDM Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Jenis
1	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Bagi PPK Tipe C Blended Learning di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo	29	Teknis
2	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Bagi PPK Tipe C Metode MOOC di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo	97	Teknis
3	Pelatihan Kompetensi Pejabat Pengadaan Metode MOOC Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo	35	Teknis
4	Arsitektur SPBE	25	Teknis
5	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Level 1 Metode MOOC Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo	175	Teknis
6	Pelatihan Tata Naskah Dinas	36	Teknis
7	Orientasi Anggota DPRD Kab/Kota	170	Teknis
8	Pelatihan Pelayanan Prima	35	Teknis
9	Orientasi PPPK	1299	Manajerial
10	PKN II	4	Manajerial
11	Pengiriman Peserta Pelatihan Dasar CPNS IPDN XXX	17	Manajerial
12	PKA	40	Manajerial
13	Sertifikasi PBJ Level 1	30	Sertifikasi Kompetensi
14	Pengiriman Peserta <i>Training of Trainers</i> Pembinaan Ideologi Pancasila	3	Pengembangan Kapasitas Widyaiswara
TOTAL		1995	

Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ditetapkan alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN diprioritaskan untuk pengembangan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, BPSDM Provinsi Gorontalo telah melakukan persiapan untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah, dengan prioritas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara Pengeluaran (BP). Adapun perbandingan jumlah BP dan PPK di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang sudah memiliki sertifikat pelatihan pengelolaan keuangan daerah dengan yang belum dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.198
 Perbandingan Jumlah Pejabat Penatausahaan Keuangan
 dan Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Sertifikat Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah pada
 Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah	Kepemilikan Sertifikat	
			Sudah	Belum
1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	32	13	19
2	Bendahara Penerimaan	43	19	24
TOTAL		75	32	43

Berdasarkan tabel di atas, bagi PPK dan BP yang belum memiliki sertifikat pelatihan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 43 orang akan diikutsertakan dalam pelatihan pengelolaan keuangan daerah dengan substansi materi dari Kementerian Dalam Negeri, adapun bagi PPK dan BP yang sudah memiliki sertifikat pelatihan akan diikutsertakan pada Uji Sertifikasi Kompetensi yang akan diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo di tahun 2025.

a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis

Output dari kegiatan ini adalah Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis dengan target sebesar 24,14% atau 270 orang dari total target hingga akhir tahun 2026 sebanyak 870 orang. BPSDM Provinsi Gorontalo melaksanakan 8 pelatihan teknis sebagaimana telah dijelaskan pada Tabel 4 dengan total peserta sebanyak 602 orang atau 69,20% dari total target sehingga *output* dari kegiatan ini sudah berhasil terealisasi dengan baik. Pelatihan-pelatihan tersebut diselenggarakan secara mandiri oleh BPSDM Provinsi Gorontalo dan terdapat pula yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Diantara 8 pelatihan tersebut, terdapat beberapa pelatihan yang diselenggarakan secara *blended learning* dan *e-learning* dan tentunya lebih menguntungkan dari sisi efisiensi anggaran dan peserta pelatihan dapat diakomodir dengan jumlah yang lebih banyak. Adapun Model Pembelajaran 10:20:70 yang mulai diterapkan pada tahun 2022 masih diterapkan hingga tahun 2024 yang diikuti dengan beberapa perbaikan sehingga model pembelajaran ini lebih berdampak pada pendalaman kompetensi peserta yang dikembangkan dan efisiensi anggaran.

Sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 4, bahwa BPSDM Provinsi Gorontalo telah menyelenggarakan Pelatihan Kompetensi PBJ bagi ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut adalah jumlah jumlah SDM PBJ Pemerintah Provinsi Gorontalo yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi setelah dilaksanakannya Pelatihan Kompetensi PBJ di tahun 2024:



Tabel 3.199
 Jumlah SDM PBJ Bersertifikasi
 Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah	Memiliki Sertifikat PPK Tipe C/B/A	Memiliki Sertifikat PBJ Level 1	Memiliki Sertifikat PPK Tipe C/B/A
1	Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen	96	7	35	22
2	Pejabat Pengadaan	18	1	16	1
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	201	3	36	4

b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional *Output* dari kegiatan ini adalah Persentase SDM Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Sertifikasi dengan target sebesar 19,23% atau 266 orang dari total target hingga akhir tahun 2026 sebanyak 1383 orang. BPSDM Provinsi Gorontalo melaksanakan 2 pelatihan manajerial, 1 sertifikasi kompetensi, dan fasilitasi 21 ASN untuk mengikuti pelatihan manajerial dan fasilitasi 3 ASN Widyaiswara untuk mengikuti *Training of Trainer (ToT)*, dengan total peserta sebanyak 1393 orang atau 100,72% dari total target sehingga *output* dari kegiatan ini sudah berhasil terealisasi dengan baik. Untuk rincian penyelenggaraan pelatihan manajerial, seritifkasi kompetensi dan fasilitasi peserta pelatihan dapat dilihat sebagaimana telah dijelaskan pada tabel Tabel 4. Adapun faktor-faktor penunjang *output* pada kegiatan ini adalah penyusunan dokumen *Human Capital Development Plan (HCDP)*, pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan, dan pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan K/L/D.

Terkait penyusunan dokumen HCDP, BPSDM Provinsi Gorontalo telah menyusun dokumen tersebut berdasarkan pengumpulan data dari ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah dianalisis dan diolah menjadi sebuah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi yang menentukan target prioritas ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

BPSDM Provinsi Gorontalo telah melakukan re-akreditasi sebagai penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS dengan hasil memperoleh nilai 91,011 dengan predikat “A”. Predikat “A” yang diperoleh merupakan perolehan yang sama juga ketika pelakanaan reakreditasi sebelumnya, sehingga perolehan ini menunjukkan kapasitas BPSDM Provinsi Gorontalo dalam menjaga kualitas penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

Pada tahun 2024, BPSDM Provinsi Gorontalo turut melaksanakan kerjasama penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan K/L/D yang menunjang kinerja BPSDM Provinsi Gorontalo. Untuk seluruh bentuk kerjasama dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.200

Perjanjian Kerja Sama

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Perjanjian Kerja	Keterangan
1.	PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN RI tentang Penyelenggaraan Akreditasi Program Pelatihan Dasar (LATSAR) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo	800/BPSDM/IV/160/PKS/2024
2.	PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	800/BPSDM/VIII/327/PKS/2024
3.	PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	800/BPSDM/VIII/328/PKS/2024
4.	PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	800/BPSDM/VIII/329/PKS/2024
5.	PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	800/BPSDM/VIII/330/PKS/2024
6.	PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	800/BPSDM/VIII/331/PKS/2024
7.	PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	800/BPSDM/VIII/332/PKS/2024



3. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Pada tahun 2024, BPSDM Provinsi Gorontalo menetapkan strategi untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja utama, adapun strategi tersebut mengarah pada sistem pembelajaran dan kerjasama penyelenggaraan pelatihan antar lembaga yang menghasilkan *output* pelatihan yang banyak namun minim pembiayaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.201
 Kebijakan Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dengan Model Pembelajaran 10 : 20 : 70	Keputusan Gubernur Gorontalo No. 347/27/X/2022	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN yang lebih berdampak pada pendalaman kompetensi peserta yang dikembangkan dan efisiensi anggaran.
2.	Penyelenggaraan Pelatihan Kompetensi PBJP dengan Model <i>Massive Online Open Course</i> (MOOC)	- Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa - Pedoman Pengembangan Kompetensi Non Klasikal LAN RI	Terlaksananya pelatihan dengan <i>output</i> jumlah peserta lebih banyak dan mencakup peserta dari luar Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan anggaran yang lebih efisien.
3.	Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi dalam bentuk <i>Human Capital Development Plan</i> (HCDP)	- Peraturan LAN RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS	Tersusunnya dokumen perencanaan pengembangan kompetensi yang diharapkan menjadi salah satu pedoman dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan.

4. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra OPD 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Pada Tahun 2024, BPSDM Provinsi Gorontalo mampu memenuhi seluruh target capaian indikator kinerja yang telah ditentukan, yaitu Presentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur yang sebesar 30% atau 736 orang dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dengan nilai B. Realisasi indikator kinerja Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar 128% atau sebanyak 3152 orang yang mengikuti segala jenis pengembangan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo, maupun pengembangan kompetensi yang difasilitasi oleh BPSDM Provinsi Gorontalo.

Perolehan Akreditasi BPSDM Provinsi Gorontalo sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan berhasil dipertahankan, yakni pada re-akreditasi BPSDM Provinsi Gorontalo sebagai Penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS yang memperoleh nilai 91,011 dengan predikat “A” berdasarkan Sertifikat LAN RI Nomor 550/K.1/PDP.09 tanggal 19 Juli 2024. BPSDM Provinsi Gorontalo juga ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang terakreditasi dengan predikat “Terakreditasi Istimewa” berdasarkan Sertifikat BPIP Nomor



11/DL.00.02/06/2024/Ka.BPIP tanggal 27 Juni 2024. Capaian Indikator Kinerja BPSDM Provinsi Gorontalo s.d tahun 2024 secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.202
 Indikator Kinerja Pembangunan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2024
 Sesuai Renstra adan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	30% 736 orang	128% 3152 orang
2	Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan	B	A

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian realisasi indikator kinerja persentase pengembangan kompetensi SDM Aparatur sudah melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan terdapat beberapa kebijakan pengembangan kompetensi yang ditetapkan Pemerintah Pusat setelah penetapan Renstra 2023-2026, seperti pelaksanaan Orientasi PPPK yang diikuti oleh sebanyak 1299 PPPK Pemerintah Provinsi Gorontalo serta terdapat pula pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan atas kerjasama dengan K/L/D/I yang muncul ketika tahun berjalan, seperti Pelatihan Kompetensi PBJ Model MOOC yang dilaksanakan atas kerja sama dengan LKPP RI. Untuk megantisipasi hal tersebut pada periode berikut, akan dilakukan perbaikan analisis perencanaan melalui perencanaan pengembangan kompetensi dengan peserta dari K/L/D/I.

5. Hal-hal Lain yang Perlu Dilaporkan

Tahun 2024 merupakan tahun pertama BPSDM Provinsi Gorontalo tidak menghasilkan PAD dari retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan setelah ditetapkannya PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah menghapus jenis retribusi pelayanan penyelenggaraan pelatihan dan pelatihan. Kebijakan ini berdampak pada tidak leluasnya BPSDM Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi dan sertifiikasi ASN, terutama ASN Kabupaten/Kota yang juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Di sisi lain, ditetapkan pada UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN bahwa pengembangan kompetensi merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh ASN sehingga ketetapan ini menjadi tantangan besar bagi seluruh seluruh BPSDM Provinsi untuk menjadi wadah pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN di daerah. Perubahan pola pengelolaan keuangan pada BPSDM Provinsi Gorontalo menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) menjadi salah satu solusi utama yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dengan penerapan PPK-BLUD, BPSDM Provinsi Gorontalo akan memiliki keleluasaan dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang lebih responsif terhadap kebutuhan Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa ketergantungan pada satu sumber dana saja. Di sisi lain,



perencanaan pengembangan kompetensi di Provinsi Gorontalo harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah untuk menciptakan SDM yang sesuai dengan kebutuhan Pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pengembangan kompetensi secara terintegrasi pada BPSDM Provinsi Gorontalo juga diperlukan untuk menentukan arah kebijakan pengembangan kompetensi yang relevan dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional.

6. Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo pada tahun 2024

Berikut disampaikan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara BPSDM Provinsi Gorontalo dengan K/L/D/I pada tahun 2024:

- b) PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN RI tentang Penyelenggaraan Akreditasi Program Pelatihan Dasar (LATSAR) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo
- c) PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- d) PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- e) PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- f) PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- g) PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- h) PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Perolehan Akreditasi BPSDM Provinsi Gorontalo sebagai Lembaga Penyelenggara Pelatihan berhasil dipertahankan, yakni pada re-akreditasi BPSDM Provinsi Gorontalo sebagai Penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS yang memperoleh nilai 91,011 dengan predikat "A" berdasarkan Sertifikat LAN RI Nomor 550/K.1/PDP.09 tanggal 19 Juli 2024. BPSDM Provinsi Gorontalo juga ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang terakreditasi dengan predikat "Terakreditasi Istimewa" berdasarkan Sertifikat BPIP



Nomor 11/DL.00.02/06/2024/Ka.BPIP tanggal 27 Juni 2024. Capaian Indikator Kinerja BPSDM Provinsi Gorontalo s.d tahun 2024 secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.203
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendidikan dan Pelatihan
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo Tahun 2024
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	
		Tujuan/Masalah yang Diselesaikan	
1	Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur	30% 736 orang	128% 3152 orang
2	Akreditasi Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan	B	A

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian realisasi indikator kinerja persentase pengembangan kompetensi SDM Aparatur sudah melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan terdapat beberapa kebijakan pengembangan kompetensi yang ditetapkan Pemerintah Pusat setelah penetapan Renstra 2023-2026, seperti pelaksanaan Orientasi PPPK yang diikuti oleh sebanyak 1299 PPPK Pemerintah Provinsi Gorontalo serta terdapat pula pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan atas kerjasama dengan K/L/D/I yang muncul ketika tahun berjalan, seperti Pelatihan Kompetensi PBJ Model MOOC yang dilaksanakan atas kerja sama dengan LKPP RI. Untuk megantisipasi hal tersebut pada periode berikut, akan dilakukan perbaikan analisis perencanaan melalui perencanaan pengembangan kompetensi dengan peserta dari K/L/D/I.

2. **Hal-hal Lain yang Perlu Dilaporkan**

Tahun 2024 merupakan tahun pertama BPSDM Provinsi Gorontalo tidak menghasilkan PAD dari retribusi pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan setelah ditetapkannya PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah menghapus jenis retribusi pelayanan penyelenggaraan pelatihan dan pelatihan. Kebijakan ini berdampak pada tidak leluasnya BPSDM Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi dan sertifiikasi ASN, terutama ASN Kabupaten/Kota yang juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Di sisi lain, ditetapkan pada UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN bahwa pengembangan kompetensi merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh ASN sehingga ketetapan ini menjadi tantangan besar bagi seluruh seluruh BPSDM Provinsi untuk menjadi wadah pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN di daerah. Perubahan pola pengelolaan keuangan pada BPSDM Provinsi Gorontalo menjadi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) menjadi salah satu solusi utama yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dengan penerapan PPK-BLUD, BPSDM Provinsi Gorontalo akan memiliki keleluasaan dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang lebih responsif terhadap kebutuhan



Pemerintah Kabupaten/Kota tanpa ketergantungan pada satu sumber dana saja. Di sisi lain, perencanaan pengembangan kompetensi di Provinsi Gorontalo harus diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah untuk menciptakan SDM yang sesuai dengan kebutuhan Pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pengembangan kompetensi secara terintegrasi pada BPSDM Provinsi Gorontalo juga diperlukan untuk menentukan arah kebijakan pengembangan kompetensi yang relevan dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional.

3. **Perjanjian kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Gorontalo pada tahun 2024**

Berikut disampaikan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara BPSDM Provinsi Gorontalo dengan K/L/D/I pada tahun 2024:

- a) PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN RI tentang Penyelenggaraan Akreditasi Program Pelatihan Dasar (LATSAR) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo
 - b) PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
 - c) PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
 - d) PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
 - e) PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
 - f) PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
- PKS antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo tentang Penyelenggaraan Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

E. Kepegawaian

E.1 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan Yang Akan Dicapai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.
- b. Sasaran dan Program
Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah adalah
:



- 1. Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD.
- 2. Percepatan reformasi birokrasi.

Tabel 3.204
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Fungsi Penunjang
Badan Kepegawaian Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase (%)
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Meningkatnya kualitas urusan penunjang pemerintahan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	88,56	110
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100
2	Percepatan Reformasi Birokrasi	Persentase Kenaikan Indeks Profesionalitas ASN	96	79,44 (32,11%)	82,75
		Persentase Kenaikan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	87,5	76,86 (55,27%)	87,84
	Program Kepegawaian Daerah	Presentase Layanan Kepegawaian Daerah yang dilaksanakan	90	100	111

2. Program dan Kegiatan

Tabel. 3.205
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Fungsi Penunjang
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.290.592.047	9.185.243.874	98,86	100		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	287.352.252	287.352.252	99,79	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	287.352.252	287.352.252	99,79	100		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.067.378.572	7.989.300.748	99	100		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	90.260.578	90.002.060	99,71	100		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.977.117.994	7.899.298.688	99,02	100		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	436.668.300	430.343.465	98,55	100		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	436.668.300	430.343.465	98,55	100		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498.601.450	478.247.409	95,92	100		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498.601.450	478.247.409	95,92	100		
2	Program Kepegawaian Daerah	1.110.266.175	1.095.310.749	98,65	100		
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	360.648.700	356.287.282	98,79	100		
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	53.584.200	50.209.969	93,70	100		
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	104.002.600	103.158.430	99,19	100		
	Pengelolaan Sistem Infomasi Kepegawaian	157.299.700	157.236.283	99,96	100		
	Pengelolaan Data Kepegawaian	45.762.200	45.682.600	99,83	100		



NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	524.737.250	514.624.243	98,07	100		
	Pengelolaan Mutasi ASN	111.149.950	103.865.493	93,45	100		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	52.867.400	52.087.262	98,52	100		
	Pengelolaan Promosi ASN	360.719.900	358.671.488	99,43	100		
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	130.871.825	130.689.930	99,90	100		
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	130.871.825	130.689.930	99,90	100		
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	94.062.400	93.709.294	99,62	100		
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31.191.000	31.102.114	99,72	100		
	Pembinaan Disiplin ASN	62.871.400	62.607.180	99,58	100		
JUMLAH		10.400.858.222	10.280.554.623	99	100		

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, **Outcome** dari program yaitu:
- Presentase Pelaksanaan Programa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- a. Pelaksanaan Program
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **Output** kegiatan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan monitoring dan evaluasi. Target 5 dokumen dengan capaian 14 dokumen. Terdiri dari Dokumen Rencana Kerja (RENJA) , Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) , Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi, Evaluasi Rencana Kerja, Data Sektor, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Elektronik Monitoring, Evaluasi, Pelaporan APBD (E-Monep), Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta kegiatan rapat-rapat evaluasi program dan kegiatan



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD **Output** kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD. Target 1 laporan dengan capaian 1 laporan yaitu dokumen mengenai Laporan Keuangan

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Output** kegiatan adalah Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target 4 unit/paket dan capaian 8 unit/paket. Terdiri dari:

- Pembayaran biaya Belanja Modal 8 Unit Laptop

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor **Output** kegiatan adalah Jumlah laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Target 1 Laporan dengan capaian 1 Laporan. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sifatnya rutin berupa pengadaan dan pembiayaan berbagai keperluan kesekretariatan Instansi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran dan administrasi. Seperti pembayaran listrik, air, telp, makan minum kegiatan, makan minum tamu, makan minum rapat dsb.

2) Program Kepegawaian Daerah, **Outcome** dari program antara lain :

- Presentase Kenaikan Indeks Profesionalitas ASN;
- Presentase Kenaikan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN;

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

Output kegiatan yaitu terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan terdiri dari:

- a). Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, Output kegiatan yaitu jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN dan PPPK. Target 2 Dokumen capaian 3 Dokumen terkait PPPK, Kebutuhan Jabatan, dan IPDN, antara lain :
- Memfasilitasi penyerahan Surat Perjanjian Kinerja (SPK) PPPK Guru Tahun 2023 sebanyak 880 orang
 - Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan menjadi PPPK sebanyak 17 orang
 - Memfasilitasi Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Praja IPDN
 - Memfasilitasi Penyerahan Surat Keputusan CPNS IPDN Tahun 2024 sebanyak 10 orang & Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2024
 - Penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS Lulusan IPDN Tahun 2024 sebanyak 3 orang
 - Memfasilitasi penempatan CPNS lulusan IPDN Tahun 2023
 - Penerbitan persetujuan kebutuhan jabatan fungsional sebanyak 19 Jabatan



- Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK T.A. 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
 - b). Fasilitas Lembaga Profesi, Output kegiatan yaitu jumlah Lembaga profesi ASN yang difasilitasi. Target 2 Lembaga capaian 2 Lembaga.
 - Pada tahun 2024 kegiatan KORPRI yaitu sebagai berikut :
 - 1) Rapat Kerja Korpri dengan peserta 112 orang dan Musyawarah IV Korpri Provinsi Gorontalo dengan peserta 103 orang
 - 2) Apel Korpri Korpri Provinsi Gorontalo diselenggarakan 2 kali pada tanggal 19 Februari 2024 dan 29 November 2024
 - 3) Pelaksanaan MTQ Korpri Tahun 2024 dengan jumlah peserta 112 orang
 - 4) Melakukan verifikasi santunan bagi PNS Provinsi sebanyak 678 orang
 - Kegiatan Pembekalan ASN Purna Bakti yang diselenggarakan oleh OPD masing-masing pada tahun 2024
 - c). Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, output kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan system informasi kepegawaian. Target 1 Sistem Informasi dengan capaian 1 layanan Sistem Informasi Manajemen ASN (SimASN). Dimana terdiri dari:
 - Layanan Kenaikan Pangkat
 - Layanan Kenaikan Gaji Berkala
 - Layanan Cuti
 - Layanan Tugas Belajar
 - Layanan Karya Satya
 - Layanan Pensiun
 - d). Pengelolaan Data Kepegawaian, output kegiatan yaitu Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian. Target 5.400 arsip dengan capaian 5.400 arsip yang terpelihara. Peremajaan Arsip Digital Tahun 2024 terdiri dari :
 - Arsip SK Kenpa
 - Arsip SK KGB
 - Arsip SK Jabatan
 - Arsip SKP
 - Arsip Ijazah
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN.

Output kegiatan yaitu terlaksananya kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, dengan Sub Kegiatan terdiri dari:

- a). Pengelolaan Mutasi ASN, output kegiatan yaitu Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah. Target 2 Dokumen dengan capaian 2 Dokumen. Terdiri dari :
 - Pelantikan Pejabat Eselon II : 13 Orang
 - Pelantikan Pejabat Eselon III : 2 Orang
 - Mutasi keluar Provinsi : 27 orang
 - Mutasi masuk provinsi : 33 orang



b). Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN. Output kegiatan yaitu jumlah pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN. Target 2 Laporan dengan capaian 2 Laporan, Terdiri dari Laporan Kenaikan Pangkat dan Laporan Pensiun, antara lain :

- Kenaikan pangkat bulan April 154 orang
- Kenaikan pangkat bulan Juni 58 orang
- Kenaikan pangkat bulan Agustus 28 orang
- Kenaikan pangkat bulan Oktober 67 orang
- Kenaikan pangkat bulan Desember 55 orang
- Pegawai Pensiun pada tahun 2024 yaitu 169 orang

c). Pengelolaan Promosi ASN. Output kegiatan yaitu Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi ASN. Target 2 Dokumen dengan Capaian 2 Dokumen. Terdiri dari Dokumen Pelaksanaan Manajemen Talenta, dan Ujian Dinas, antara lain :

- Pelaksanaan Pelantikan melalui Manajemen Talenta berjumlah 15 orang
- Ujian Dinas
 - Ujian Dinas Tk. I : 87 Orang
 - Ujian Dinas Tk. II : 3 Orang
 - UPKP : 11 Orang

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Output kegiatan adalah Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan yaitu :

a). Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN. Output kegiatan yaitu Jumlah Aparatur yang mendapatkan Bantuan Studi Tugas Belajar dan izin belajar. Target 30 orang dengan capaian 80 orang. Terdiri dari:

Tabel 3.206
Data Usul Penerbitan Rekomendasi Tugas Belajar

Pendidikan	Jalur		Jumlah
	Mandiri	Non Mandiri	
S1	8		8
S2	50	3	53
S3	2		2
Profesi	5		5
Jumlah	65	3	68

Tabel 3.207
Data Usul Penerbitan SK Tugas Belajar

Pendidikan	Jalur		Jumlah
	Mandiri	Non Mandiri	
S1	7		7
S2	20	3	23
S3	2		2
Profesi	4		4
Jumlah	33	3	36



Tabel 3.208

Data Usul Pencantuman Gelar

Pendidikan	Jumlah
S1	18
S2	40
S3	4
Jumlah	62

Tabel 3.209

Data Usul Bantuan Akhir Studi & Bantuan Beasiswa Tugas Belajar

Pendidikan	Jumlah
Bantuan Akhir Studi	
S1	1
S2	1
S3	2
Bantuan Beasiswa Tugas Belajar	
S2	1

4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Output kegiatan yaitu Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub fokus terdiri dari:

a). Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, output kegiatan adalah Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Target 2 Dokumen dengan capaian 2 Dokumen. Terdiri dari:

 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur melalui sosialisasi peningkatan pemahaman pegawai ASN terhadap pengelolaan kinerja, Pembuatan Draft Peraturan Gubernur tentang E-TPP dan Draft Keputusan Gubernur terkait Pedoman teknis penilaian, pengurangan, penundaan,dan sistem imformasi tambahan penghasilan pegawai di lingkungan pemerintah provinsi Gorontalo, draft Peraturan Gubernur tentang Ketentuan Presensi.
 - Tersedianya dokumen :
 - Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/pidana
 - Jumlah ASN yang berkala : 2.721 orang
 - Satya Lencana : 420 orang
 - Cuti : 6078 orang

b). Pembinaan Disiplin ASN, output kegiatan adalah jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan. Target 30 orang dengan capaian 370 orang, antara lain :

 - Jumlah Kasus : 2661 Orang
 - Jumlah Penanganan : 370 Orang



- Jumlah tidak terbukti : 298 orang
- Jumlah yang dijatuhi hukuman disiplin : 72 orang

3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra OPD 2023-2026

Tabel 3.210

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penunjang
 Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Indikator Kinerja Tujuan Indeks Sistem Merit	302	327
2	Indikator Kinerja Sasaran Presentase Kenaikan Indeks Profesionalitas ASN	96 %	79,44 (32,11%)
3	Indikator Kinerja Sasaran Presentase Kenaikan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	87,5 %	76,86 (55,27%)

4. Hal-hal lain yang perlu dijelaskan terkait capaian indikator kinerja tahun 2024

Target yang ada merupakan capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN yaitu 96% dengan realisasi sebesar 79,44% dan Target nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN yaitu 87,5% dengan realisasi sebesar 76,86%, namun, untuk Persentase Kenaikan nilai Indeks Profesionalitas ASN dan Persentase Kenaikan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN Terjadi peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 , Target Persentase Kenaikan Indeks Profesionalitas ASN yaitu 30% realisasinya 32,11% dan untuk Target Kenaikan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN yaitu 50% realisasinya 55,27% dapat dikatakan sudah mencapai target capaian kenaikan.

F. Sekretariat Daerah

F.1 Biro Umum dan Pimpinan Setda Provinsi Gorontalo

➤ Biro Umum

- Tujuan dan Sasaran
 - Tujuan
 - Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
 - Sasaran
 - Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Pimpinan



Tabel 3.211

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Fungsi Penunjang
Biro Umum dan Pimpinan Setda Provinsi Gorontalo tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase(%)
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Sasaran : Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Pimpinan	Presentase Fasilitasi Pelayanan Umum dan Pimpinan	100	100	100
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Presentase Fasilitasi Pelayanan Umum dan Pimpinan	100	100	100

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.212

Realisasi Fisik Dan Keuangan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pemerintahan Daerah
Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(RP)	(%)	(%)		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15,155,138,548	14,183,562,142	93.59	99.85		
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138,944,675	136,238,177	98.05	100		
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	107,456,675	106,798,866	99.39	100		
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31,488,000	29,439,311	93.49	100		
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,739,005,643	6,565,818,532	97.43	100		
	Sub Kegiatan : Koordinas Penyusunan Laporan Keuangan	6,614,965,018	6,442,226,692	97.39	100		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	124,040,625	123,591,840	99.64	100		
3	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	114,746,000	113,278,298	98.72	100		
	Sub Kegiatan : Penatausahaan BMD pada SKPD	114,746,000	113,278,298	98.72	100		
4	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79,148,000	79,148,000	100.00	100		
	Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	79,148,000	79,148,000	100.00	100		



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(RP)	(%)	(%)		
	Fungsi						
5	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,390,364,150	1,204,011,794	86.60	99.73		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,390,364,150	1,204,011,794	86.60	99.73		
6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,394,591,060	2,071,604,729	86.51	99.78		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,394,591,060	2,071,604,729	86.51	99.78	- Terdapat beberapa item Belanja Modal yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ada beberapa barang yang tidak bisa dibeli karena SSH yang tersedia tidak sesuai dengan harga di lapangan, - Kemudian ada belanja Video Tron yang tidak bisa direalisasikan karena masih akan dikaji lagi dengan Dinas Kominfo yang bertanggungjawab terhadap penganggarannya	- Melakukan Pengakajian terkait SSH yang tersedia disesuaikan dengan kondisi lapangan -Melakukan Koordinasi dengan Dinas Kominfo terkait Penganggarannya
7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,491,910,220	3,237,093,510	92.70	99.92		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	752,651,200	719,461,212	95.59	100.00		
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2,739,259,020	2,517,632,298	91.91	99.85	-Belanja Pemeliharaan Asrama Bogor dan Lenteng Agung tidak bisa diserap secara maksimal karena Pihak ke 3 sebagai penyedia belum mau bekerja sama terkait penyediaan barangnya dan RAB dari Pihak Penyedia tidak sesuai dengan anggran di Biro Umum.	-Melakukan Koordinasi dengan Penyedia Sebelum Menentukan Besaran Harga Barang yang akan dibeli agar bisa disesuaikan dengan SSH Gorontalo
8	Kegiatan : Fasilitasi Keprotokolan	806,428,800	776,369,102	96.27	98.46		



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(RP)	(%)	(%)		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	205,539,100	178,991,917	87.08	95,38	ada beberapa belanja yang belum bisa direalisasikan dikarenakan kondisi dilapangan kegiatan pimpinan yang belum membutuhkan anggaran tersebut	Efisiensi dalam penyusunan anggaran, sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan kebutuhan
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	390,200,000	387,992,585	99.43	100		
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	210,689,700	209,384,600	99.38	100		
	TOTAL	15,155,138,548	14,183,562,142	93.59	99.85		

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- Outcome dari program adalah persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM Aparatur, dengan target dan capaian mencapai persentase 100 .
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Output kegiatan adalah Jumlah dokumen Perencanaan yang dihasilkan antara lain Renstra 2023-2026, Renja 2024, RKA SKPD, DPA SKPD, PK 2024, RAK tahun 2024, RKT 2024, RKAP SKPD, DPAP SKPD. LAKIP,LPPD,LKPJ
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Output kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan yaitu 1 laporan keuangan.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- Ouput Kegiatan adalah Laporan kegiatan penata usahaan barang
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Output dari kegiatan adalah Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/kompetensinya melalui diklat/bimtek yang diikuti ASN antara lain Diklat dan Workshop Perencanaan, Diklat Kearsipan, Diklat Pelaporan Pengaduan Pelayanan Publik, Diklat Manajemen Kepegawaian, dan diklat lainnya.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output Kegiatan adalah Laporan layanan dan manajemen administrasi perkantoran pada Biro Umum dan lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,
- Ouput dari kegiatan adalah Jumlah Paket pengadaan yang disediakan di kantor Gubernur Gorontalo. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ouput Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan, Bangunan Kantor Gubernur dan Rumah Dinas Pimpinan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah



g. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Output Kegiatan adalah Jumlah laporan koordinasi dan sinergitas Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lainnya berupa laporan fasilitasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan di Lingkungan Sekretariat Daerah kegiatan ini juga mendanai aktivitas pelayanan penyediaan fasilitas kegiatan pimpinan

3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 dan Renstra Setda Provinsi Gorontalo tahun 2023- 2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 2.213

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pemerintahan Daerah Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Indikator Tujuan		
	-Indeks Kematangan Organisasi	100	100
	-Nilai Sakip OPD	BB	A
2	Indikator Sasaran		
	Persentase Fasilitasi Pelayanan Umum dan Pimpinan	100	100

➤ **Pimpinan Setda Provinsi Gorontalo**

1. Tujuan

Tujuan Yang Akan Dicapai Pimpinan Setda Provinsi Gorontalo Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

2. Sasaran dan Program

Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD

Tabel 3.214

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Biro Umum dan Pimpian Setda Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase ()
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8=5/4*100)
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	IKM	80	89,81	112
		LKIP Biro	1 Lap	1 Lap	1
	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo	IKM	80	89,81	112
		LKIP Biro	1 Lap	1 Lap	1



3. Program dan Kegiatan

Tabel 3.215
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (Pimpinan Setda) Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	UPAYA MENGATASI
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(RP)	()	()		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.850.960.954	24.482.695.875	85	91,70		
1	Kegiatan :Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.378.409.789	2.179.454.554	85,04	100		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.378.409.789	2.179.454.554	91.63	100		
2	Kegiatan : Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	1.715.098.091	1.288.039.328	75.10	75.10		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	185.698.091	0	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum di realisasikan dikarenakan untuk tahun 2024 Bapak Pj Gubernur Gaji dan Tunjangan mereka masih melekat di Kementrian dia Bertugas	Koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan guna kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan pimpinan
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	179.400.000	178.160.000	99,31	100	Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak di serap dikarenakan Kepala Daerah Belum Membutuhkan Medical Check Up di Tahun 2024	Koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan guna kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan pimpinan
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100.000.000	0	0	0		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.250.000.000	1.109.879.328	88.79	100		
3	Kegiatan : Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	24.757.453.074	21.015.201.993	84.88	100		



	Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	6.610.776.000	5.703.218.078	86.27	100		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	18.146.677.074	15.311.983.915	84.38	100		
	JUMLAH	28.850.960.954	24.482.695.875	84,46	91,70		

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari Presentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi persentase 91,70

 - a. Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Output : Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan ini berupa penyediaan gaji dan tunjangan bagi Sekda, Asisten, dan Staf ahli.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Output : Kegiatan ini berupa penyediaan Gaji bagi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tahun 2024 kemarin karena Gubernur masih di jabat dari pejabat dari kementrian gaji masih dari kementrian, Pakaian Dinas , Medical Chek Up, dan Operasional
 - c. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Output : kegiatan adalah jumlah kegiatan Rumah Tangga Kepala Daerah (Gubernur). Digunakan untuk memenuhi kebutuhan Operasional di Lingkup Rumah Dinas serta kegiatan rutin dalam rangka menunjang operasional Kepala Daerah, kegiatan pelayanan tamu dalam maupun luar daerah, kegiatan open house Idul Fitri/Idul Adha, kegiatan buka puasa bersama jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo. Terdapat pula output lain berupa pengadaan kebutuhan rumah tangga gubernur, Wakil Gubernur, dan Pimpinan Setda seperti Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use), Pengadaan Mebelair dll. jumlah kegiatan Kedinasan Kepala Daerah (Gubernur) baik kegiatan kedinasan Gubernur didalam maupun luar daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. jumlah kegiatan kedinasan pemerintahan Provinsi Gorontalo antara lain kegiatan : Kunjungan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke Kab/Kota, Kegiatan Silaturahmi dan Halal Bi Halal KKIG, Pelayanan Tamu Luar dan dalam Provinsi, Tamu Kenegaraan, kegiatan kemahasiswaan, Studi banding dari daerah lain, kegiatan TAPD, kegiatan Sosialisasi dsb. Jumlah kegiatan pemerintahan Provinsi antara lain : Kegiatan Evaluasi Pemeriksaan penyelenggaran pemerintahan, kegiatan Upacara Kenegaraan (HUT RI), lomba olahraga dan kesenian dalam rangka memeriahkan HUT Proklamasi RI, kegiatan dzikir dan tabligh akbar dalam rangka HUT Provinsi Gorontalo dan Kegiatan Hari Patriotik 23 Januari 1942 tingkat Provinsi Gorontalo dan 1 Paket Jasa Event Organizer dalam rangka Fasilitas Kegiatan Pemerintah Provinsi Gorontalo.



4. Data berdasarkan Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026

Tabel 3.216

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pemerintahan Daerah (Biro Umum Setda Provinsi Gorontalo) Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Indikator Tujuan		
	-Indeks Kematangan Organisasi	100	100
	-Nilai Sakip OPD	BB	A
2	Indikator Sasaran		
	-IKM	80	89,81
	-LKIP Biro	1 Lap	1 Lap

F.2 Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo

- Tujuan yang akan dicapai OPD
 - Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
 - Peningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan dan Agama
- Sasaran dan Program

Tabel 3.217

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase
			Target (%)	Realisasi (%)	(%)
	Sasaran : Meningkatnya agenda perubahan reformasi birokrasi melalui pemerintahan dan otonomi daerah	Indikator Sasaran : Persentase PD yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100	100	100
	Program : Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Indikator Program : Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD tepat waktu	100	100	100
	Sasaran : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Rakyat	Indikator Sasaran : Persentase Lembaga bina mental spiritual yang ditingkatkan kapasitasnya	100	100	100
	Program : Kesejahteraan Rakyat	Indikator Program : Persentase Lembaga bina mental spiritual yang ditingkatkan kapasitasnya	100	100	100
	Sasaran : Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Daerah	Indikator Sasaran : - IKM Biro - LKIP Biro	80 1 Laporan	89,37 1 Laporan	111,71 1 Laporan



	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indikator Program : - IKM Biro - LKIP Biro	80 1 Laporan	89,37 1 Laporan	111,71 1 Laporan

3. Program dan Kegiatan

Tabel 3.218
Realisasi Fisik dan Keuangan
Urusan Penunjang (Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo)
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Anggaran	Keu	Fisik		
			(Rp)	(%)	(%)		
1.	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.462.732.732	5.214.499.215	95,46	100	-	-
a.	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.678.437	155.520.482	96,19	100	-	-
	- Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	161.678.437	155.520.482	96,19	100	-	-
b.	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	255.117.000	247.606.571	97,06	100	-	-
	- Sub Keg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	255.117.000	247.606.571	97,06	100	-	-
c.	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.992.385.461	3.772.150.546	94,48	100	-	-
	- Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.992.385.461	3.772.150.546	94,48	100	-	-
d.	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.203.000	524.602.209	98,39	100	-	-
	- Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	533.203.000	524.602.209	98,39	100	-	-
e.	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.348.834	514.619.407	98,90	100	-	-
	- Sub Keg. Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor	520.348.834	514.619.407	98,90	100	-	-
2.	Prog. Pemerintahan dan Otonomi Daerah	949.513.270	920.233.655	96,92	100	-	-
1.	Keg. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	275.707.688	268.164.322	97,26	100	-	-
	- Sub Keg. Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	60.000.000	57.918.994	96,53	100	-	-
	- Sub Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	113.169.688	108.581.349	95,95	100	-	-
	- Sub Keg. Fasilitasi Penataan Wilayah	102.538.000	101.663.979	99,15	100	-	-
2.	Keg. Fasilitasi Kerjasama Daerah	336.120.050	321.536.464	95,66	100	-	-
	- Sub Keg. Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	104.454.600	101.047.876	96,74	100	-	-
	- Sub Keg. Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	104.059.200	96.021.584	92,28	100	-	-
	- Sub Keg. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	127.606.250	124.467.004	97,54	100	-	-



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu 2024 (Rp)	Realisasi Tahun 2024			Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
			Anggaran	Keu	Fisik		
			(Rp)	(%)	(%)		
3.	Keg. Pelaksanaan Otonomi Daerah	337.685.532	330.532.869	97,88	100	-	-
	- Sub Keb. Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	233.645.956	229.956.867	98,42	100	-	-
	- Sub Keg. Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	-	-	-	-	-	-
	- Sub Keg. Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	104.039.576	100.576.002	96,67	100	-	-
3.	Prog. Kesejahteraan Rakyat	29.503.456.368	29.274.426.441	99,22	100	-	-
a.	Keg. Fasilitas Pembinaan Mental Spritual	24.590.800.274	24.365.856.185	99,09	100	-	-
	- Sub Keg. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spritual	374.767.700	368.370.182	98,29	100	-	-
	- Sub Keg. Fasilitas Kelembagaan Bina Spritual	24.216.032.574	23.997.486.003	99,10	100	-	-
b.	Keg. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.826.656.094	4.824.526.917	99,96	100	-	-
	- Sub Keg. Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4.826.656.094	4.824.526.917	99,96	100	-	-
c.	Keg. Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	86.000.000	84.043.339	97,72	100	-	-
	- Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	86.000.000	84.043.339	97,72	100	-	-
	Jumlah	35.915.702.370	35.409.159.311	98,59	100	-	-

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program ini adalah : IKM Biro dan LKIP Biro.

Pelaksanaan Program :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah

Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluating Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



Output Sub Kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, dengan capaian target 6 Dokumen, RKA 2025, DPA 2024, RENJA 2025, RENSTRA, LPPD 2024, LKPJ 2024, LKIP 2024, Evaluasi Renja 2024, dan Data sektor 2024.

Dokumen yang terealisasi yakni DPA, Renstra, Renja, SAKIP, LKPJ, SKM dan LPPD.

b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Output kegiatan adalah Presentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan.

Output Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan target 15 orang, tercapai sejumlah 17 orang.

- Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan LPPD (2 orang)
- Bimtek Penyusunan SOP dan Standar Pelayanan (3 orang)
- Bimtek Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Gorontalo
- Sosialisasi Penatausahaan BMD Tahun 2024
- Workshop Pelaksanaan Study PERA
- Penginputan Maturitas SPIP
- Pelatihan Kepemimpinan Nasional PKN Tingkat II Angkatan VII Tahun 2024
- Pelatihan Tata Naskah Dinas
- Bimtek Analisis Gender dan Gender Action Budget dlm Dok Perencanaan Daerah Bagi Perencana Provinsi Gorontalo
- Sosialisasi & Bimtek Sstem Pengendalian Disiplin ASN SIPEDAS (3 orang)
- Penguatan Kapasitas ASN Pengolah Data di Lingkup Provinsi Gtlo, Penginputan Data Statistik Sektoral Tahun 2024
- Evaluasi dan Coaching Clinic Pengelolaan Persediaan SKPD

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Output Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.

Yakni : Perbaikan ruangan kerja, pengadaan Laptop dan pengadaan AC.

d. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Output kegiatan adalah Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Pemberian gaji dan tunjangan kepada 34 orang PNS pada Biro Pemerintahan dan Kesra.

Output Sub Kegiatan : Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.

Sub kegiatan ini memuat seluruh anggaran kegiatan untuk meningkatkan pelayanan pada Biro Pemerintahan dan Kesra.

2) Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Outcome dari Program ini adalah : Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LPPD tepat waktu.

Pelaksanaan Program

a. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Tugas Pemerintahan

1. Sub Kegiatan : Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan

Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan dengan capaian target 1 dokumen.

Aktifitas yang dilaksanakan :

- Melaksanakan persiapan penamaan rupabumi unsur alami Provinsi Gorontalo Tahun 2024 bersama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).
- Melaksanakan uji akurasi dalam rangka Pemuktahiran Basis Data Unsur Rupabumi Indonesia Skala Menengah bersama dengan BIG.
- Melaksanakan pengumpulan data nama Rupabumi/Toponimi "Teluk" yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi.
- Hasil pengajuan data rupabumi yang telah di bukukan dalam Gazetir nasional berupa penamaan rupabumi pulau dan penamaan rupabumi teluk.

2. Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan Wilayah

Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah, dengan capaian target sebanyak 2 dokumen yakni : Dokumen Fasilitasi Perapatan Pilar Batas antar daerah.

Aktifitas yang dilaksanakan :

- Rapat Koordinasi Batas Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara.
- Koordinasi terkait Permendagri Batas Wilayah antara Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Tengah (Kab. Gorontalo Utara dengan Kab. Buol).
- Penegasan Batas Desa oleh Badan Informasi Geospasial, Biro Pemerintahan dan Dinas PMD Provinsi Gorontalo.

Progres Penegasan Batas Wilayah di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2024 yakni :

- Segmen batas wilayah antara kabupaten/Kota, terdapat 9 segmen yaitu :
 1. Batas antara Kabupaten Bone Bolango dengan Kabupaten Gorontalo Utara telah ditetapkan melalui Kepmendagri No. 90 tahun 2014
 2. Batas antara Kabupaten Pohuwato dengan Kabupaten Gorontalo Utara telah ditetapkan melalui Kepmendagri No. 91 tahun 2014
 3. Batas antara Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Gorontalo Utara telah ditetapkan melalui Kepmendagri No. 92 tahun 2014



4. Batas antara Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Gorontalo telah ditetapkan melalui Kepmendagri No. 93 tahun 2014
 5. Batas antara Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Pohuwato telah ditetapkan melalui Kepmendagri No. 32 tahun 2016
 6. Batas antara Kota Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo telah ditetapkan melalui Kepmendagri No. 70 tahun 2017
 7. Batas antara Kabupaten Bone Bolango dengan Kota Gorontalo telah ditetapkan melalui Kepmendagri No. 72 tahun 2017
 8. Batas antara Kabupaten Bone Bolango dengan Kabupaten Gorontalo telah ditetapkan melalui Kepmendagri No. 73 tahun 2017
 9. Batas antara Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kabupaten Gorontalo telah ditetapkan melalui Kepmendagri No. 9 tahun 2019
- Segmen batas wilayah antara Provinsi telah terbit Permendagri terdiri dari 3 segmen yaitu :
1. Batas Wilayah antara Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Utara, yang terletak di Kab. Gorontalo Utara berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, ditetapkan melalui Permendagri No. 92 Tahun 2017
 2. Batas Wilayah antara Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Utara, yang terletak di Kab. Bone Bolango berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara, ditetapkan melalui Permendagri No. 92 Tahun 2017
 3. Batas Wilayah antara Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Utara, yang terletak di Kab. Bone Bolango berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara, ditetapkan melalui Permendagri No. 92 Tahun 2017.
- Segmen batas wilayah antara Provinsi yang belum terbit Permendagri terdiri dari 2 segmen, yaitu :
1. Batas Wilayah antara Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Tengah, yang terletak di Kab. Pohuwato berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah,
 2. Batas Wilayah antara Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Tengah, yang terletak di Kab. Gorontalo Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Permasalahan Batas Wilayah di Provinsi Gorontalo :

Batas wilayah yang disengketakan kedua daerah terbagi menjadi dua segmen yaitu :

1. Segmen satu antara Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara dengan Desa Umu, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol.
2. Segmen dua ada di Desa Cempaka Putih dan Desa Papualangi di Kecamatan Tolinggula yang berbatasan dengan hutan di Kabupaten Buol.
3. Sengketa bermula saat terbitnya Keputusan Mendagri No. 59 Tahun 1992 saat Gorontalo masih menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Jika merujuk pada



keputusan tersebut maka Desa Cempaka Putih dan Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula masuk Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

4. Penarikan garis batas Segemen Desa Umu (Wumu), menyusuri Sungai Tolinggula yang melewati Desa Tolinggula Ulu, Tolinggula Tengah, Tolite Jaya, Ilomangga dan Tolinggula Pantai, Kabupaten Gorontalo Utara

Hal itu dinilai bertentangan dengan Peta Keresidenan Manado No. 700 tahun 1898 yang menyatakan tapal batas merujuk pada Bukit Wumu, Bukit Dengilo dan Pegunungan Pangga atau yang dikenal dengan Kerajaan Papualangi sebagai bagian dari wilayah Kwandang (wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, sebelum dimekarkan jadi Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara).

Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum

Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum SPM dengan capaian target sebanyak 6 Dokumen pengampu SPM yakni :

- Laporan Penerapan SPM urusan Kesehatan
- Laporan Penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum
- Laporan Penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat
- Laporan Penerapan SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban
- Laporan Penerapan SPM urusan Pendidikan
- Laporan Penerapan SPM urusan Sosial

b. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah

1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD dengan target sebanyak 6 Dokumen, yang terealisasi sebanyak 31 Dokumen dan 1 Kegiatan yakni :

- Dokumen ijin cuti kampanye wakil walikota
- Dokumen ijin cuti kampanye Bupati Gorontalo
- Dokumen pelantikan Bupati Bone Bolango
- Dokumen PAW anggota DPRD Kab. Pohuwato
- Ijin perjalanan dinas keluar negeri Bupati Gorontalo
- Ijin keluar negeri (alasan penting) ibadah haji) Ketua DPRD Kab. Pohuwato
- Ijin keluar negeri (alasan penting) ketua DPRD Kab. Boalemo
- Dokumen usulan Pj. Bupati Boalemo
- Dokumen serah terima jabatan Pj. Gubernur
- Dokumen ijin perjalanan dinas keluar negeri Pj. Gubernur
- Administrasi usul pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo periode 2024 - 2029 (6 dokumen)
- Administrasi usul pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Provinsi periode 2024-2029 (1 dokumen)



- Administrasi usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Pohuwato dan Gorontalo Utara (3 dokumen)
- Administrasi usul pengangkatan Pjs. Bupati Gorontalo dan Pjs. Bupati Bone Bolango (2 dokumen)
- Administrasi usul Pengangkatan Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Kota Gorontalo, Kab. Bonbol, Kab. Gorontalo, Kab. Pohuwato (4 dokumen)
- Administrasi Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Pohuwato (1 dokumen)
- Pengukuhan Pjs. Bupati Gorontalo dan Pjs. Bupati Bone Bolango (1 kegiatan)
- Administrasi izin Perjalanan Dinas Luar Negeri ke Malaysia Pj. Gubernur Gorontalo (1 Dokumen)
- Administrasi Usul Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo (2 Dokumen)
- Administrasi Usul Pengangktan Pj. Bupati Gorontalo Utara (1 Dokumen)

2. Sub Kegiatan : Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan

Output Sub Kegiatan : Jumlah dokumen hasil pengembangan otonomi dan penatan urusan yang dilaksanakan dengan capaian target sebanyak 1 dokumen. Tahun 2024 karena adanya rasionalisasi anggaran, jadi untuk sub kegiatan ini di Nol kan anggarannya.

3. Sub Kegiatan : Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan

Output Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan capaian target sebanyak 1 dokumen yakni dokumen LPPD.

Aktifitas yang dilaksanakan :

- Koordinasi Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Tambahan IKK Tahun 2023.
- Rapat Persiapan Penyusunan LPPD Tahun 2024.
- Mendampingi Tim Daerah dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) KAbupaten dan Kota Tahun 2024 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.
- Koordinasi terkait Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023.
- Evaluasi LPPD Provinsi Tahun 2023 by system (SI-LPPD).
- Validasi LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2023 by system (SI-LPPD).
- Rapat Persiapan Penyusun LPPD Provinsi Tahun 2024 (Menunggu harmonisasi permendagri, Permendagri jika sudah di acc berarti ada perubahan IKK).

c. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerja Sama Daerah

1. Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama antar Pemerintah

Output Sub Kegiatan : Jumlah Kerja Sama antar Pemerintah yang difasilitasi, dengan target 5 Dokumem, yang tercapai sebanyak 16 dokumen yakni :



- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo tentang Percepatan Penurunan Masalah Gizi bagi Ibu Hamil dan Balita.
- Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tentang Sinergitas program strategis kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- Kesepakatan Bersama Antara Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan Dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi Di Provinsi Gorontalo.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Politeknik Transportasi Darat Dan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tentang Pemenuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat.
- Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Gorontalo Dan Badan Pelindung Pekerja Migran Industri Tentang Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Bpjs Ketenakerjaan Cabang Gorontalo Dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Bpjs Ketenakerjaan Cabang Gorontalo Dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Nota Kesepakatan Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Dan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Wilayah Provinsi Gorontalo.
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tentang Pengembangan Potensi Daerah Dan Peningkatan Pelayanan Publik.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Dan Sinergi Pemungutan Opsen.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Dan Sinergi Pemungutan Opsen.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Dan Sinergi Pemungutan Opsen.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Dan Sinergi Pemungutan Opsen.



- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 - Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tentang Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Dan Sinergi Pemungutan Opsen.
 - Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputan Wilayah Suluttenggomalut Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta
- Output Sub Kegiatan : Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi, dengan target sebanyak 3 dokumen, yang tercapai sebanyak 16 dokumen yakni :
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Provinsi Gorontalo Dan PT. Ambulance Makassar Jaya Tentang Paket Pelayanan Jenazah Pasien Rujukan Luar Daerah Asal Provinsi Gorontalo Tahun 2024.
 - Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Lbh. Universitas Negeri Gorontalo Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.
 - Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Lbh. Universitas Gorontalo Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.
 - Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Lbh. Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Sultan Amai Gorontalo Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.
 - Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Lbh. Rumah Rakyat Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.
 - Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Lkbh. Pgri Provinsi Gorontalo Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.
 - Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Lkbh. Universitas Ichsan Gorontalo Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.
 - Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.
 - Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Yayasan Pendidikan Dan Pendampingan Hukum Gorontalo Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.



- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Rumah Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Pt. Woolu Aksara Maya Tentang Pemanfaatan Aplikasi Ilibrary Untuk Menunjang Smart City Di Provinsi Gorontalo.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Pt. Woolu Aksara Maya Tentang Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik "IARPUSGORONTALO".
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Gorontalo Dan Yayasan Pendidikan Islam Dwiwarna Tentang Peningkatan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia Dinprovinsi Gorontalo.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Pt. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo.
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Bupati Walikota Se Provinsi Gorontalo Dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provijnsi Gorontalo Tentang Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Di Provinsi Gorontalo.
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Sumber Alfaria Trijaya Tbk Branch Gorontalo Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Sesuai Dengan Standar Industri Pt Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

3. Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Output Sub Kegiatan : Jumlah Kerja Sama yang dievaluasi, dengan target sebanyak 5 dokumen, yang tercapai sebanyak 13 dokumen yang sudah berakhir masa berlakunya kemudian diperpanjang, yakni :

Kerja Sama antar Pemerintah dan pihak ketiga yang di perpanjang :

- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Lbh. Universitas Negeri Gorontalo Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Lbh. Universitas Gorontalo Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Lbh. Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Sultan Amai Gorontalo Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Lbh. Rumah Rakyat Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.



- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Lkbh. PGRI Provinsi Gorontalo Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Lkbh. Universitas Ichsan Gorontalo Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Yayasan Pendidikan Dan Pendampingan Hukum Gorontalo Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Rumah Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat Tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Bpjs Ketenakerjaan Cabang Gorontalo Dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Bpjs Ketenakerjaan Cabang Gorontalo Dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Pt. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo.
- Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputan Wilayah Suluttenggomallut Tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

3) **Program Kesejahteraan Rakyat**

Outcome program ini adalah Presentase Lembaga Bina Mental Spritual yang ditingkatkan kapasitasnya.

Pelaksanaan Program :

a. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual

Output kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Bina mental Spritual

1. Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spritual

Output Sub Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana Spritual yang Dikelola.

Aktifitas berupa :

Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan hari-hari besar keagamaan :

- Pelaksanaan Tonggeyamo dalam rangka menentukan awal bulan Ramadhan
- Pelaksanaan Tadarus Al-Qur'an dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
- Pelaksanaan pembagian Takzil/makanan untuk Buka Puasa oleh seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.



- Pelaksanaan Safari Ramadhan dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
- Pelaksanaan Doa dalam rangka malam Tumbilotohe
- Pelaksanaan Tonggeyamo penentuan 1 Syawal
- Pelaksanaan shalat Idul Fitri dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan adat dan budaya :

- Upacara adat "Mopotilolo atau upacara adat penyambutan tamu kepada pejabat negara atau tokoh penting yang baru pertama kali berkunjung di Provinsi Gorontalo.
- Penganugerahan gelar Adat Gorontalo kepada putra/putri daerah yang telah berjasa untuk Provinsi Gorontalo.

Tabel 3.219

Daftar Pejabat Yang Diterima Secara Adat Mopotilolo Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL PELAKSANAAN MOPOTILOLO
1	BRIGJEN POL Drs. PUJI PRASETIYANTO HADI, MM	KAPOLDA GORONTALO	3 MARET 2024
2	MAYJEN TNI CHANDAR WIJAYA	PANGDAM XIII MERDEKA	19 MARET 2024
3	DR. BUDI KARYA SUMADI	MENTERI PERHUBUNGAN RI	21 APRIL 2024
4	Ir. BUDI GUNADI SADIKIN	MENTERI KESEHATAN RI	24 MEI 2024
5	LETJEN TNI SUHARYANTO	KEPALA BNPB RI	16 JULI 2024
6	I DEWA GEDE WIRAJANA, SH, MH	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO	30 AGUSTUS 2024
7	I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI	MENTERI PPPA RI	27 SEPTEMBER 2024
8	Ir. SAKTI WAHYU TRINGGONO, MM	MENTERI PERIKANAN DAN KELAUTAN RI	16 OKTOBER 2024
9	DR. BIMA ARYA SUGIARTO	WAKIL MENTERI DALAM NEGERI RI	14 NOVEMBER 2024
10	VERONICA TAN	WAKIL MENTERI PPPA	9 DESEMBER 2024

2. Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual

Output Sub Kegiatan : Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi dengan capaian target 150 lembaga.

Aktifitas berupa :

a. Fasilitasi Penyelenggaraan Embarkasi Haji Antara Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang belum memiliki embarkasi haji penuh. Olehnya kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji dilaksanakan melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi.



Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1005 Tahun 2023 tentang Kuota Jamaah Haji Indonesia Tahun 1445 H/2024 M, kuota jamaah haji Provinsi Gorontalo berjumlah 978 orang, dan surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 467 Tahun 2023 tentang Penetapan Kuota Haji Tambahan Tahun 1444 H / 2023 M, Provinsi Gorontalo beroleh kuota tambahan sebanyak 48 orang.

Dari total kuota jamaah haji yang dialokasikan untuk Provinsi Gorontalo, data terakhir dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo jumlah Jamaah haji yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) ditambah petugas haji berjumlah 1.005 orang.

Tabel 3.220
 Daftar Jamaah Haji Provinsi Gorontalo
 Tahun 1445 H / 2024 M

No	Kab/Kota	Kloter			Jumlah
		10	12	14	
1.	Kota Gorontalo	396	0	0	396
2.	Kab. Gorontalo	0	211	104	315
3.	Kab. Boalemo	49	0	0	49
4.	Kab.Pohuwato	0	77	0	77
5.	Kab. Bone Bolango	0	117	1	118
6.	Kab. Gorontalo Utara	0	40	0	40
7.	Petugas Kloter	5	5	0	10
Total		450	450	105	1.005

- b. Fasilitas pelayanan Hibah dan Bantuan Sosial
- Hibah dan Bantuan Sosial diberikan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- Penerima Hibah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo yaitu sebagai berikut :
- Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 77/1/II/2024
 - Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 217/1/VI/2024
 - Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 230/1/VI/2024
 - Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 325/1/VIII/2024



Tabel 3.221

Berikut adalah jumlah penerima Hibah dan Bansos serta realisasinya :

No	Uraian	Jumlah penerima	Jml yang telah disalurkan	Jml yang tidak mencairkan
1	Badan/lembaga/Ormas	5	5	0
2	Tempat Ibadah	278	224	54
3	Yayasan dan lembaga lainnya	35	33	2
4	TPQ	35	29	6
5	Majelis Taklim	199	168	31
6	Pondok Pesantren	5	1	0
JUMLAH		553	460	93

- b. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar

Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi Kesra Pelayanan Dasar.

 - Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial

Output Sub kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan Kesehatan dan Sosial.

Aktifitas yang dilakukan :

 - Rapat penetapan penerima Bantuan Studi
 - Fasilitasi pelayanan Beasiswa
 - FGD kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah

Tabel 3.222

Bantuan Studi/Beasiswa Tahun 2024

NO	JENJANG	JUMLAH PENERIMA
1	ATMI Solo	19 Orang
2	STTD	14 Orang
3	Kedokteran Spesialis	4 Orang
4	Kedokteran Umum	2 Orang
5	S1 Umum	498 Orang
6	S2 Umum	91 Orang
7	S3 Umum	25 Orang
8	D3 Umum	35 Orang
JUMLAH		688 ORANG



- c. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- Output kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
1. Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- Output Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan.
- Aktivitas berupa :
- Koordinasi dengan kabupaten Kota terkait kebijakan Kesra Non Pelayanan Dasar
 - Koordinasi penyusunan kebijakan pada program kesejahteraan rakyat
 - penyusunan dokumen analisis Gender pada Piro Pemerintahan dan Kesra

4. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 dan Renstra OPD 2023-2026, khusus Indikator Kinerja tahun 2024

Tabel 3.223

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
 Biro Pemerintahan dan Kesra Tahun 2024
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1.	Presentase PD yang menyampaikan LPPD tepat Waktu	100 %	100 %
2.	Persentase Lembaga Bina Mental Spiritual yang ditingkatkan Kapasitasnya	100 %	100 %
3.	IKM Biro	80	89,37
4.	LKIP Biro	1 Laporan	1 Laporan

F.3 Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo

1. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan yang akan dicapai OPD

Tujuan dari OPD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

b. Sasaran dan program tahun 2024

- Terwujudnya Penataan Organisasi
- Terwujudnya tatakelola pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah



Tabel 3.224
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan
Sekretariat Daerah (Biro Organisasi) tahun 2024

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator kinerja (tujuan/impact/outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase
			Target (%)	Realisasi (%)	
1	Sasaran : Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Indikator sasaran : Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100
		Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB>Baik	78,50	66,88	85,19
		Persentase PD dengan tingkat Nilai SAKIP dengan Kategori Baik (BB)	75,01	68,88	91,82
	Program: Penataan Organisasi	Indikator program Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100	100
		Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB>Baik	78,50	66,88	85,19
		Persentase PD dengan tingkat Nilai SAKIP dengan Kategori Baik (BB)	70	68,88	98,4
	Sasaran : Terwujudnya tatakelola pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah	Indikator program			
		IKM BIRO	80	84,821	106,02
		LAKIP BIRO	1 lap	1 Lap	1 Lap
	Program : Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Indikator program	100	100	100
		IKM BIRO	80	84,821	106,02
		LAKIP BIRO	1 lap	1 Lap	1 Lap

Sumber: Data Renstra Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.225
Realisasi Fisik dan Keuangan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sekretariat Daerah (Biro Organisasi) Provinsi Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	FISIK	KEU		
			(Rp)	(%)	(%)		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4.744.508.304	3.672.577.644	100	97,49		
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	226.757.800	226.603.915	100	99,93		



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	FISIK	KEU		
			(Rp)	(%)	(%)		
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	226.757.800	226.603.915	100	99,93	Informasi yang digunakan dalam menyusun perencanaan kurang memadai	Menyelenggarakan Rapat Perencanaan setiap Bulannya untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya dan mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan pada bulan berikutnya.
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.556.084.354	3.445.973.729	100	96,90		
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.475.096.454	3.365.432.209	100	96,84	Adanya Penambahan 1 orang pegawai di bagian Reformasi Birokrasi yang belum teranggarkan di tahun 2025	Membuat usulan penambahan anggaran Gaji dan tunjangan pegawai di tahun 2025
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	80.987.900	80.541.520	100	99,44	Adanya keterbatasan anggaran Arus kas sehingga ada beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaan SPJnya di karenakan masih harus menunggu perubahan anggaran kas	Melakukan penginputan anggaran dan tambahan SPD lebih di setiap awal Triwulan.
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0	0		
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	0	Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan Bimtek sehingga beberapa pegawai belum ditingkatkan kompetensinya	Meningkatkan anggaran Bimtek dari tahun sebelumnya, serta Membagi tugas dan peran pegawai berdasarkan peta jabatan
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.134.700	241.166.200	100	99,19		
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	243.134.700	241.166.200	100	99,19	Sarana dan Prasarana Penunjang pelayanan masih kurang memadai seperti laptop, yang harusnya menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh SKPD. Kendaraan Dinas Kepala Biro yang hampir tiap bulan harus dilakukan service.	Pada awal tahun anggaran 2025 telah direncanakan untuk penambahan sarana dan prasarana berupa 2 unit laptop dan pengadaan kendaraan Dinas Kepala Biro.



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	FISIK	KEU		
			(Rp)	(%)	(%)		
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.531.450	711.637.045	100	99,04		
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	718.531.450	711.637.045	100	99,04	Kurang adanya kontroling dalam mengelola surat menyurat sehingga menyebabkan keterlambatan penyampaian informasi yang penting.	Membagi peran pegawai dalam administrasi surat menyurat. Dengan membuatkan akun Srikandi kepada beberapa pegawai agar dapat dilakukan kontroling terhadap Surat masuk dan surat keluar, sehingga administrasi perkantoran berjalan dengan baik.
2.	Program Penataan Organisasi	1.075.402.806	1.053.077.197	100	97,92		
a.	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	438.871.175	418.376.110	100	95,33		
	- Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	212.740.000	192.518.446	100	90,49	adanya beberapa usulan pembentukan UPTD dan penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah yg belum masuk dalam dokumen perencanaan	Melibatkan Tim dalam pembahasan secara komprehensif
	- Fasilitasi Penataan Kelembagaan kab/kota	0	0	0		usulan pembentukan serta penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi perangkat daerah kabupaten/kota tidak sekaligus, sehingga pelaksanaan fasilitasi sering berulang pada satu kabupaten/kota yg sama.	untuk fasilitasi yg berulang dikomunikasikan dengan Kabupaten/Kota untuk share anggaran
	- Penataan Analisis Jabatan	226.131.175	225.857.664	100	99,87	1. kurangnya sumber daya yang mampu menganalisa dalam memfasilitasi seluruh OPD untuk penyusunan dokumen Anjab, ABK, SKJ dan Evajab 2. Masih kurangnya anggaran untuk memfasilitasi Anjab, ABK, SKJ dan Evajab kabupaten/kota	1. membentuk Tim penyusunan dokumen Anjab, ABK, SKJ dan Evajab dengan melibatkan SDM eksternal biro organisasi 2. Melaksanakan koordinasi disetiap



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	FISIK	KEU		
			(Rp)	(%)	(%)		
							kesempatan tanpa ada forum Resmi
b.	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	636.531.631	634.701.087	100	99,71		
	- Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	172.153.900	171.904.386	100	99,85	1. Belum optimalnya komitmen pimpinan perangkat daerah dalam melakukan intervensi pelaksanaan percepatan implementasi RB 2. Belum optimalnya kolaborasi disetiap leading sector dan stakeholder dalam meningkatkan eksptasi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo 3. Belum Optiumalnya monitoring dan evaluasi secara berkala di lingkungan perangkat daerah maupun di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota 4. Belum Optimalnya kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan intervensi pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah provinsi Gorontalo.	1. Pimpinan tertinggi di lingkup Pemerintah Provinsi perlu memberikan justifikasi ke pimpinan perangkat daerah dalam melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi 2. Perlu adanya penguatan – pengauatan yang dilakukan oleh pimpinan daerah (gubernur/Sekda) dalam rangka memberi pemahaman terkait mekanisme pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak 3. Membuat komitmen dan jadwal pelaksanaan kegiatan monev secara berkala dalam melihat sejauhmana perkembangan pelaksanaan Reformasi birokrasi di lingkup perangkat daerah provionsi Gorontalo dan pemda kabupaten/kota. 4. Perlu peningkatan kapasitas SDM melalui strategi bimtek dan workshop terkait percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup pemerintah provinsi Gorontalo.
	- Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	185.729.200	185.130.078	100	99,67	1. Pelaksanaan monitoring akuntabilitas kinerja Kab/Kota	1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada.



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	FISIK	KEU		
			(Rp)	(%)	(%)		
						dilakukan hanya 1 kali dalam 1 tahun. Sehingga permasalahan yang dihadapi di tingkat Pemerintah Kab/Kota dalam implementasi SAKIP belum dapat teridentifikasi secara lebih detail dan terinci. 2. Kapasitas SDM yang terbatas, sehingga pelaksanaan pendampingan khususnya dalam penyusunan pohon kinerja seluruh Perangkat Daerah belum optimal 3. Kualitas pelaporan kinerja tingkat Perangkat daerah juga masih perlu di tingkatkan, olehnya masih perlu dilakukan pendampingan yang terus menerus terutama terhadap Perangkat Daerah yang baru dibentuk	2. Membentuk Tim Kerja (Tim Kerja Peningkatan Nilai SAKIP dan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD). 3. Membentuk Tim Penyusun LKIP Daerah 4. Pengusulan penambahan anggaran di tahun 2024.
	- Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	0	0	0		1. Kurangnya kapasitas SDM pengampu pelaksanaan Budaya Kerja di setiap OPD dapat memperlambat proses internalisasi di setiap unit kerja. 2. Sumber daya anggaran yang kurang mendukung pelaksanaan kegiatan aktivasi Budaya Kerja yang sesuai dengan Road Map yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB. 3. Kurangnya semangat dan	1. Pendidikan dan pelatihan kepada pengampu budaya kerja di setiap OPD dilaksanakan, namun disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing OPD. 2. Sumber Daya Anggaran di berikan perhatian Kembali untuk peningkatan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	FISIK	KEU		
			(Rp)	(%)	(%)		
						motivasi Top Leader kepada seluruh jajaran pegawai.	dengan berkolaborasi dengan kegiatan lain. 3. Top Leader secara kontinyu memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh jajaran terkait pelaksanaan kinerja yang profesional dan mendukung core Value BerAKHLAK sebagai fondasi Budaya Kerja ASN
	- Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	108.669.398	108.132.822	100	99,51	Kurangnya pemahaman dan kepedulian OPD terhadap pentingnya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terus berupaya mendorong OPD dengan melakukan Pendampingan dan fasilitasi OPD dalam Penyusunan SOP
	- Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	169.979.133	169.533.801	100	99,74	Masih kurangnya pemenuhan Aspek Kebijakan Pelayanan, yang terdiri dari: 1. Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya dokumen SP dan maklumat pelayanan serta Publikasinya terhadap masyarakat sesuai amanah Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014 2. Masih kurangnya pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik (SPP) oleh OPD-OPD sesuai amanah UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Permen PAN RB No. 13 Tahun 2017 tentang pedoman SIPP 3. Masih minimnya keikutsertaan OPD dalam kompetisi inovasi pelayanan publik	1. Perlu adanya fasilitasi dan pengawalan yang intens dalam penyusunan dokumennya serta implementasi dan publikasinya terhadap masyarakat 2. Terus berupaya mendorong tiap instansi pemerintah agar menginput segala informasi pelayanan publik ke dalam SIPP sebagai media informasi elektronik satu pintu meliputi: penyimpanan



NO	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	FISIK	KEU		
			(Rp)	(%)	(%)		
							dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dan penyelenggara pelayanan publik terhadap masyarakat 3. Terus berupaya mendorong OPD untuk menciptakan ide terkait inovasi pelayanan publik dan melakukan fasilitasi keikutsertaannya dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kemenPAN RB
	total	5.870.911.110	5.678.458.086	100	96,72		

Sumber : Data Realisasi Keuangan Biro Organisasi Per 31 Desember 2024

Uraian Penjelasan Capaian Kinerja 2024

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome dari program ini adalah Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100%.

Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 5 kegiatan yang terdiri dari 7 Sub kegiatan. Adapun kegiatan yang masuk pada program penunjang urusan pemerintahan daerah yakni:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah, meliputi dokumen RKA 2025, DPA 2024, RENJA 2025, RENSTRA, LPPD 2024, LKPJ 2024, LKIP 2024, Evaluasi Renja 2024, dan Data sektor 2024.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pada Sub kegiatan ini terdapat Output 6 dokumen perencanaan yakni DPA, Renstra, Renja, SAKIP, LKPJ, dan LPPD.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan keuangan Biro Organisasi meliputi, LRA, NERACA, LKPD.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pada sub kegiatan ini terdapat output sebanyak 25 Orang ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Pada Sub Kegiatan ini terdapat output 3 laporan keuangan yakni Laporan realisasi anggaran, Neraca, dan CALK.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Output dari kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Pengembangan kompetensi

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada sub kegiatan ini terdapat Output yakni peningkatan kompetensi Pegawai sebanyak 10 Orang. Namun, pada tahun 2024 Sub kegiatan ini di Nol kan anggarannya.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Output dari kegiatan ini adalah jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran seperti, pengadaan alat kantor, meja, kursi, komputer, printer, pemeliharaan ruang kantor, dll.

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada sub kegiatan ini terdapat Output 3 paket sarana dan prasarana penunjan kegiatan perkantoran. Pada tahun 2024 jumlah sarana dan Prasarana pada Biro Organisasi terdapat Air Conditioner, Meja dan Kursi kerja, Meja dan Kursi Rapat, laptop, Komputer, Printer, Web cam, kendaraan dinas, Set alat Poadcast, televisi, dll.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output dari kegiatan ini adalah persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor meliputi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada sub kegiatan ini terdapat Output Presentasi Pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Sub kegiatan ini memuat seluruh anggaran kegiatan untuk meningkatkan pelayanan Biro Organisasi.

2) Program Penataan Organisasi

Outcome dari program ini adalah Terlaksananya Penataan Organisasi Provinsi dan Pembinaan Kabupaten/Kota.

a. Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah OPD Provinsi Gorontalo yang telah dilakukan Penataan Struktur/jabatan.

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi

Pada Sub kegiatan ini terdapat Output 1 dokumen pembentukan, penyempurnaan dan pembubaran 4 perangkat daerah Provinsi.

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan ini terdapat Output 6 dokumen Kab/kota yang terdiri dar rekomendasi dan persetujuan pembentukan, penyempurnaan dan pembubaran organisasi perangkat daerah Kab/Kota.



3. Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan

Pada sub kegiatan ini terdapat Output 4 dokumen yang terdiri dari Dokumen analisis jabatan dan ABK, dokumen evaluasi jabatan, dokumen standar kompetensi jabatan yang tersusun.
- b. Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah OPD Provinsi Gorontalo yang telah mengalami peningkatan nilai Sakip.

 1. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pada sub kegiatan ini terdapat output 33 Dok (1 PMPRB Pemda, 32 PMPRB OPD) hasil fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Pemprov Gorontalo dan pembinaan kab/kota.
 2. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pada sub kegiatan ini terddapat Output 34 Dok (1 Dokumen PK Pemda, 1 Dokumen LKIP Pemda, 32 Dokumen SAKIP OPD) yang telah di monitoring dan di evaluasi akuntabilitas kinerjanya
 3. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja

Pada sub kegiatan ini terdapat Output 1 dokumen hasil fasilitasi peningkatan budaya kerja dan budaya organisasi (Tim RB, dan Agen perubahan)
 4. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan

Pada sub kegiatan ini terdapat Output 3 dokumen peta proses bisnis, SP, dan SOP yang tersusun. Pada tahun 2024 sebanyak 32 OPD telah selesai menyusun Peta proses Bisnis, dan 1 dokumen peta proses bisnis Pemda
 5. Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Pada sub kegiatan ini terdapat Output 7 Dokumen hasil fasilitasi pelayanan publik . Pada tahun 2024 hasil kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun berada di Zona Hijau dengan nilai 90,41%.
4. Data berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 dan renstra OPD 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 3.226
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintah Provinsi Gorontalo
 Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2024
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
	Indikator Sasaran : 1. Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran 2. Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB>Baik 3. Persentase PD dengan tingkat Nilai SAKIP dengan Kategori Baik (BB) 4. IKM BIRO 5. LAKIP BIRO	100 78,50 75,01 80 1 LAP	100 66,88 68,88 84,821 1 LAP
	Indikator Program :		



	1. Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100
	2. Persentase PD yang telah mengimplementasikan RB>Baik	78,50	66,88
	3. Persentase PD dengan tingkat Nilai SAKIP dengan Kategori Baik (BB)	75,01	66,88
	4. IKM BIRO	80	84,821
	5. LAKIP BIRO	1 LAP	1 Lap

Sumber : Renstra Biro Organisasi

5. Hal-hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024
- Pada Dokumen Perencanaan Renstra Setda Provinsi Gorontalo Indikator program Persentase PD yang Telah mengimplementasikan RB>Baik belum mencapai target 78,50. Adapun realisasi capaian pada indikator tersebut 66,88, dengan presentase capaian 85,19%. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa PD yang belum mengimplementasikan RB >Baik.
 - Pada Indikator Program Persentase PD dengan tingkat Nilai SAKIP dengan Kategori Baik (BB) belum mencapai target 70. Adapun relisasi capaian pada indikator tersebut adalah 68,88 dengan presentase capaian 98,4%. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa PD yang memperoleh nilai sakip B.
 - Pada Indikator tujuan Indeks Kematangan Organisasi tidak terdapat target yang tertuang dalam Renstra Perubahan No. 69 Tahun 2023. Pada tahun 2024 Biro Organisasi belum melaksanakan kegiatan tersebut.
 - Pada Indikator Nilai Sakip OPD tidak terdapat target yang tertuang dalam Renstra Perubahan No. 69 Tahun 2023

F.4 Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo

1. TUJUAN DAN SASARAN

- Tujuan yang akan dicapai oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo :
 - Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
- Sasaran dan Program
 - Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Tabel 3.227

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo (Biro Hukum) Tahun 2024

No	Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kineja (Tujuan/Impact/Outcam	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	- Sasaran : Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi	- Persentase Produk Hukum Yang ditindaklanjuti (SK, Pergub dan Perda)	100 %	100 %	100 %
		- Persentase Produk Hukum (Ranperda) yang mendapat	100 %	100 %	100 %



No	Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kineja (Tujuan/Impact/Outcam	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Persentase
			Target (%)	Realisasi (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
	melalui Penataan Produk Hukum Daerah dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum	persetujuan Kementerian Dalam Negeri			
		- Persentase Bantuan Hukum yang difasilitasi Pendampingannya	100 %	100 %	100 %
	PROGRAM : Fasilitas Dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun dan Pendampingan Kasus Terkait Penyelenggara Pemerintah dan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin	100%	100%	100%
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	- Indeks Budaya Kerja	Belum Bagus	Bagus	Bagus
		- Nilai Pengawasan Kearsipan OPD	Sangat Kurang	72.96	Bagus
		- Indeks Pembangunan Statistik OPD	B	74	B
		- Indeks Kepuasan Masyarakat	B	89.815	B
	PROGRAM: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100%	100%	100%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.228
Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024
Biro Hukum

No	Program/ Kegiatan	Pagu 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(RP)	(%)	(%)		
1	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.247.257.850	2.081.378.722	92.62	100	- Rentang waktu fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota oleh Pemerintah Provinsi yang hanya dibatasi selama 15 hari sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 80	- Saat ini SDM yang dimiliki masih belum memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi yang makin banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan



No	Program/ Kegiatan	Pagu 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(RP)	(%)	(%)		
						Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sangat singkat - Kurangnya informasi kepada masyarakat pada peraturan daerah (Perda) tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dengan ditetapkannya Perda ini, membuka peluang bagi semua Organisasi Bantuan Hukum untuk memperoleh bantuan berupa dana (uang) dalam rangka pendampingan	kualifikasi di bidang Hukum. -
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.167.232.050	1.139.478.644	97.62	100		
	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.080.025.800	941.900.078	87.21	100		
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.625.619.428	4.425.812.429	95.68	100	Masih banyak jabatan pelaksana yang belum terisi oleh PNS sebagaimana hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan fungsi khususnya dalam hal ketepatan melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan fungsi di setiap sub. bagian kurang maksimal. Hampir semua sub. bagian di Biro Hukum masih membutuhkan pejabat pelaksana.	- Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, maka tentunya diharapkan sarana dan prasaran pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap - Distribusi Pegawai Negeri



No	Program/ Kegiatan	Pagu 2024 (Rp)	REALISASI TAHUN 2024			PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(RP)	(%)	(%)		
							Sipil (PNS) Badan Kepegawaian sebaiknya memperhatikan pemetaan jabatan yang sudah dilakukan oleh Biro Hukum.
							-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	267.367.400	248.574.539	92.97	100		
	Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.335.613.028	3.192.279.758	95.70	100		
	Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	130.367.600	124.363.752	95.39	100		
	Admnistrasi Umum Perangkat Daerah	470.882.900	449.600.738	95.48	100		
	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.780.000	160.166.000	99.62	100		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.960.000	114.510.402	99.61	100		
	Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjagng Urusan Pemerintah Daerah	145.648.500	136.317.240	93.59	100		
	TOTAL	6.872.877.278	6.507.191.151	94,68	100		

1) Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum

Program ini diharapkan akan memberikan *outcome* berupa Jumlah Peraturan Perundang-Undangan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Daerah, serta pendokumentasian Peraturan Perundang-Undangan dan pendampingan kasus terkait penyelenggara Pemerintahan dan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin

a. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan

Output kegiatan ini adalah jumlah Peraturan Daerah yang dibentuk selama satu tahun sebanyak 10 Rencana Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur (Pergub) yang dibentuk selama satu tahun sebanyak 50 Peraturan Gubernur, Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah yang dibentuk selama satu tahun sebanyak 300 SK.

- Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
- Pada Sub Kegiatan ini terdapat Output Produk Hukum Pengaturan yang disusun berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur



- Sub Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Penetapan
Pada sub kegiatan ini terdapat Output Produk Hukum Penetapan berupa Surat Keputusan (SK)
- Sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum lainnya
Pada sub kegiatan ini terdapat output Produk hukum yang di dokumentas dan dikelola informasi hukumnya
- Sub Kegiatan Fasilitasi dan valuasi Produk Hukum Kab/Kota
Pada sub kegiatan ini terdapat output produk hukum Kabupaten/kota yang difasilitasi dan di evaluasi.

b. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Output kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil pendampingan dan penyelesaian sengketa hukum yang ditangani selama 1 tahun sebanyak 6 (enam) laporan.

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
Pada sub kegiatan ini terdapat Output Laporan Hasil Pendampingan dan penyelesaian Sengketa Hukum
- Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
Pada sub kegiatan ini terapat Output Laporan Hasil Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin dan Laporan Capaian Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (Ranham)

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program ini adalah Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 100%.

Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 7 kegiatan yang terdiri dari 15 Sub kegiatan. Adapun kegiatan yang masuk pada program penunjang urusan pemerintahan daerah yakni:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah, meliputi dokumen RKA 2025, DPA 2024, RENJA 2025, RENSTRA, LPPD 2024, LKPJ 2024, LKIP 2024, Evaluasi Renja 2024, dan Data sektor 2024.

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pada Sub kegiatan ini terdapat Output 6 dokumen perencanaan yakni Renstra, Renja, SAKIP, LKPJ, dan LPPD.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Pada sub kegiatan ini terdapat Output 1 dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pada sub kegiatan ini terdapat Output 1 Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan keuangan Biro Hukum meliputi, LRA, NERACA, LKPD.



- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pada sub kegiatan ini terdapat output sebanyak 25 Orang ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
Pada Sub Kegiatan ini terdapat output tersusunnya 3 laporan keuangan yakni Laporan realisasi anggaran, Neraca, dan CALK.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Output dari kegiatan ini adalah jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dan pegawai yang mengikuti Diklat Pengembangan kompetensi
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pada sub kegiatan ini terdapat Output yakni peningkatan kompetensi Pegawai sebanyak 10 Orang.
 - Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
Pada sub kegiatan ini terdapat Output Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output dari kegiatan ini adalah jumlah pengadaan sarana dan prasarana penunjang perkantoran seperti, pengadaan alat kantor, meja, kursi, komputer, printer, pemeliharaan ruang kantor, dll.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pada sub kegiatan ini terdapat Output tersedianya jumlah sarana dan prasarana penunjan kegiatan perkantoran. Pada tahun 2024 jumlah sarana dan Prasarana pada Biro Organisasi terdapat Air Conditioner, Meja dan Kursi kerja, Meja dan Kursi Rapat, laptop, Komputer, Printer, Web cam, kendaraan dinas, Set alat Poadcast, televisi, dll.
 - Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Pada sub kegiatan ini terdapat Output 1 Laporan Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Output dari kegiatan ini adalah persentase jasa peralatan dan perlengkapan kantor meliputi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pada sub kegiatan ini terdapat Output Presentasi Pelayanan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Sub kegiatan ini memuat seluruh anggaran kegiatan untuk meningkatkan pelayanan Biro Hukum.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output dari kegiatan ini adalah Jumlah unit Kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional serta peralatan dan mesin lainnya
 - Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Pada sub kegiatan ini terdapat output 4 Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan



- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Output dari kegiatan ini adalah Persentase tersedianya layanan dan manajemen administrasi perkantoran.
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pada sub kegiatan ini terdapat Output 1 laporan Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
 - Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pada sub kegiatan ini terdapat Output 1 laporan peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
3. Data berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 dan renstra OPD 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 3.229

Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintah Provinsi Gorontalo
Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Tahun 2024
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
	Indikator Tujuan : 1. Indeks Kematangan Organisasi 2. Nilai Sakip OPD	49 BB	BB
	Indikator Sasaran : 1. Persentase Produk Hukum Yang ditindaklanjuti (SK, Pergub dan Perda) 2. Persentase Produk Hukum (Ranperda) yang mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri 3. Persentase Bantuan Hukum yang difasilitasi Pendampingannya	100 100 100	100 100 100
	Indikator Program : 1. Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun dan Pendampingan Kasus terkait Penyelenggara pemerintah dan bantuan hukum bagi masyarakat miskin 2. Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan	100 100	100 100

4. Hal-hal yang perlu disampaikan terkait capaian indikator kinerja tahun 2024

- Pada fasilitasi penyusunan perundang-undangan target indikator kinerja pada sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan Jumlah produk hukum daerah yang disusun berupa Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) yang dimana targetnya 10 Ranperda tidak mencapai target karena pada tahun 2024 peralihan/pergantian masa jabatan anggota DPRD sehingga masih ada Ranperda yang tidak sempat ditetapkan. Untuk target 50 Peraturan Gubernur (Pergub) capaian kinerja untuk tahun 2024 hanya 35 Peraturan Gubernur karena Bro Hukum hanya memfasilitasi, inisiasi rancangan Peraturan Gubernur adan di SKPD sebagai pengusul.
5. **Penghargaan** Nasional Yang Diterima OPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- 1) Biro Hukum Provinsi Gorontalo sebagai Support system Rencana Aksi Peduli HAM Tahun 2024 ada 3 (tiga) Kabupaten yang mendapatkan Penghargaan Kab/Kota Peduli Hak Asasi Manusia



F.5 Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan :
 - Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
- b. Sasaran :
 - Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Sekretariat Daerah

Tabel 3.230
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Penunjang Urusan
Biro Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Sasaran/Program Pemb. Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase %
			Target	Realisasi	
Meningkatnya Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Tata Laksana Pengadaan Barang dan Jasa		Tingkat Kematangan UKPBJ	1/9 Strategis	9/9 Proaktif	
I.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	IK1 : IKM Biro IK2 : LKIP Biro	100%	100%	100%
1.	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
2.	Kegiatan : Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	33 Org	35 Org	100%
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	33 Org	35 Org	100%
3.	Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	2 Paket	200%
4.	Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%
II.	Program : Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	1/9 Strategis	9/9 Proaktif	
1.	Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penyelenggaraan PBJ	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : - Pengelolaan Strategi	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	4 Laporan	4 Laporan	100%



No	Sasaran/Program Pemb. Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase %
			Target	Realisasi	
	Pengadaan Barang dan Jasa'				
	- Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	12 Laporan	12 Laporan	100%
	- Pemantauan & Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.	Kegiatan : Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Persentase layanan SPSE da pengembangan system informasi	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : - Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah laporan pengelolaan system pengadaan secara elektronik	1 Laporan	1 Laporan	100%
	- Pengembangan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Jumlah laporan pengembangan sistema informasi pengadaan barang dan jasa	1 Laporan	1 Laporan	100%
	- Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	1 Laporan	1 Laporan	100%
3.	Kegiatan : Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Persentase pendampingan, pembinaan SDM dan advokasi PBJ	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : - Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	30 Orang	30 Orang	100%
	- Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	a. Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.231
Realisasi Fisik dan Keuangan
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu 2024 Rp.	Realisasi Thn 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran Rp.	Keu %	Fisik %		
I.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.854.440.420,-	6.625.971.047,-	96,67	100	Keterbatasan sarana prasana antara lain: Sarpras yang dimilik guna menunjang operasional kinerja biro sebahagian besar bersumber dari mutasi biro P2E dan dinas PU, yang umur ekonomisnya telah habis dengan kisaran tahun pembelian 2002, 2003.	- Mengajukan usulan anggaran dan penambahan personil ke instansi terkait
1	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	308.080.000,-	303.998.109,-	98,68	100		
	Sub Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	308.080.000,-	303.998.109,-	98,68	100		
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	6.013.900.210,-	5.798.263.637,-	96,41	100		
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.013.900.210,-	5.798.263.637,-	96,41	100		
3	Administrasi umum perangkat daerah	55.590.000,-	54.750.000,-	98,49	100		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.590.000,-	54.750.000,-	98,49	100		



No	Program/Kegiatan	Pagu 2024 Rp.	Realisasi Thn 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Anggaran Rp.	Keu %	Fisik %		
4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	476.870.210,-	468.959.301,-	98,34	100	Kemampuan baterai UPS menurun, dimana sebahagian besar server telah mengalami read failure. Belum memiliki kendaraan operasional roda empat. Keterbatasan SDM	
	Sub Kegiatan : - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	476.870.210,-	468.959.301,-	98,34	100		
II.	Program : Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	100.000.000,-	1.369.567.542,-	98,12	100	Belum maksimalnya aplikasi e-protrack dalam mengakomodir evaluasi dan pengawasan pengadaan	Melaksanakan pengembangan aplikasi PBJ secara continue menyesuaikan dengan regulasi terbaru
1	Kegiatan : Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100.000.000,-	861.132.721,-	97,70	100		
	Sub Kegiatan : - Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	320.604.200,-	313.182.576,-	97,69	100		
	- Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	427.232.800,-	416.647.650,-	97,52	100		
	- Pemantauan & Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	133.594.500,-	131.302.495,-	98,28	100		
2	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	187.047.240,-	183.346.607,-	98,02	100		
	Sub Kegiatan : - Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	62.965.265,-	60.816.665,-	96,59	100		
	- Pengembangan Sistem Pengadaan secara Elektronik	85.664.600,-	84.264.060,-	98,37	100		
	- Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	38.417.375,-	38.265.882,-	99,61	100		
3	Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	327.393.250,-	325.088.214,-	99,30	100		
	Sub Kegiatan : - Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	118.864.322,-	118.775.322,-	99,93	100		
	- Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	147.661.002,-	146.409.902,-	99,15	100		
	b. Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan	60.867.926,-	59.902.990,-	98,41	100		
TOTAL PAGU		8.250.312.410	7.995.538.589	96,91	100		

Sumber Data : E-Monev

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Outcome dari program ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro dengan target 100% dan capaian 100%.

Pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 4 kegiatan yang terdiri dari 4 Sub kegiatan. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Target 100% dengan capaian 100% antara lain:
 - 6 (Enam) Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu Dokumen Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, LAKIP, Pakta Integritas (Perjanjian Kinerja), Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 2 (Dua) dokumen DPA-SKPD terdiri dari DPA Induk dan DPA Perubahan
 - 4 (Empat) Laporan Hasil Evaluasi Renja triwulan I, II, III dan IV.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Output kegiatan adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. Target 33 orang dengan capaian 35 orang :
 - 35 (Tiga Puluh Lima) orang yang menerima gaji dan tunjangan beban kerja dan prestasi kerja.
 - 27 (Dua Puluh Tujuh) orang yang menerima tunjangan kondisi kerja.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Output dari kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Target 1 paket, capaian 2 paket antara lain:
 - 3 (Tiga) buah laptop
 - 1 (Satu) unit kursi pejabat eselon III
- d. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output dari kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Target 1 laporan, capaian 2 laporan terdiri dari :
 - 1 (Satu) Laporan Persediaan Barang Pakai Habis
 - 1 (Satu) Laporan Barang Milik Daerah

2) Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

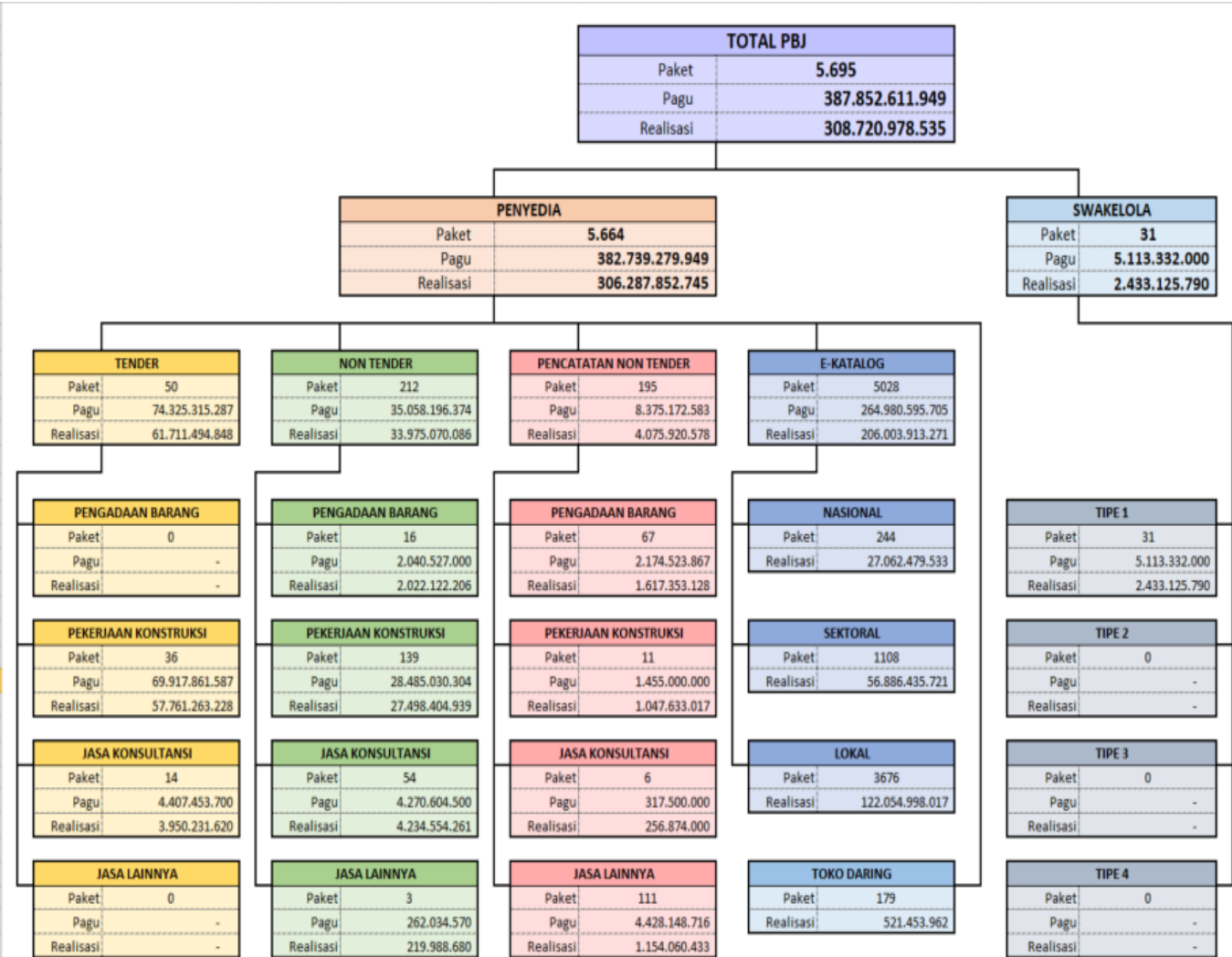
Outcome dari program ini adalah tingkat kematangan UKPBJ dimana target yang ditentukan 1/9 Strategis dengan capaian 9/9 Proaktif (tidak capai target).

Program ini terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan dengan 9 (Sembilan) sub kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa
Output dari kegiatan ini adalah presentase penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa. Target 100% dengan capaian 100% sbb:



Gambar 3.4
 Realisasi Paket Pengadaan Barang dan Jasa
 Per Tgl 31 Desember 2024



Sumber : Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo, 2025

- b. Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
- Output dari kegiatan ini adalah presentase layanan pengadaan secara elektronik dan pengembangan system pengadaan barang dan jasa. Target 100% dengan capaian 100% sbb:
- Terlaksananya layanan registrasi akun KPA, PPK, PP, Bendahara.
 - Terlaksananya pelayanan dan pendampingan aplikasi SPSE, SIRUP, SIKAP, Innaproc, e-catalog.
 - Terlaksananya peningkatan 17 standarisasi LPSE kabupaten/kota
 - Terlaksananya pengelolaan infrastruktur dan jaringan server Biro PBJ
 - Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan aplikasi e-protrac.
- c. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- Output dari kegiatan ini adalah presentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Target 100% dengan capaian 100% sbb:
- Terlaksananya pendampingan terhadap 34 OPD terkait permasalahan PBJ
 - Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM PBJ
 - Terfasilitasinya bimbingan teknis penjenjangan maupun diklat teknis PBJ
 - Terlaksananya penguatan kelembagaan kabupaten/kota



3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra OPD 2023-2024 Khusus Indikator Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.232

Indikator Kinerja Pembangunan

Biro Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024

Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	100%	100%
2	Tingkat Kematangan UKPBJ	1/9 Strategis	9/9 Proaktif

4. Hal-hal Lain Yang Perlu Disampaikan Terkait Capaian Indikator Kinerja

Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) adalah acuan untuk mengukur kesiapan dan kematangan UKPBJ dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa.

Tingkat kematangan UKPBJ diukur menggunakan model yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Terdiri dari beberapa level, yaitu:

Level 1 : Inisiasi (awal)

Level 2 : Esensi (terkelola)

Level 3 : Proaktif (terkelola dan terukur)

Level 4 : Strategis (terkelola, terukur, dan terkendali)

Level 5 : Unggul (terkelola, terukur, terkendali, dan terintegrasi)

Untuk standar minimum yang diharapkan adalah mencapai level 3, yaitu UKPBJ yang memiliki tata kelola profesional.

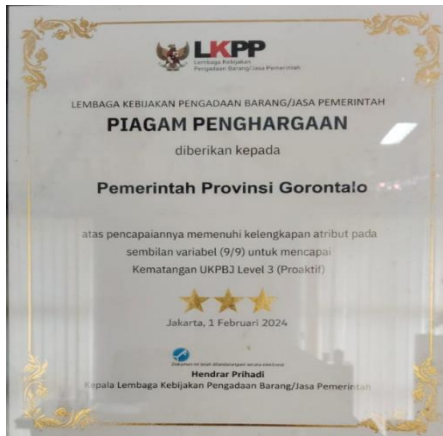
Pada tanggal 06 September 2022 melalui surat LKPP nomor 22322/KA/09/2022 telah menyampaikan apresiasi kepada UKPBJ Provinsi Gorontalo atas pencapaian pemenuhan kelengkapan atribut untuk mencapai tingkat kematangan level 3 (Proaktif). Dalam apresiasi tersebut disebutkan bahwa sesuai amanat pasal 29 Peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, UKPBJ Provinsi Gorontalo dapat mengajukan permohonan penilaian untuk ditetapkan sebagai UKPBJ Pusat Keunggulan Pengadaan (UKPBJ-PKP) di Tingkat Proaktif kepada LKPP paling cepat 1 (Satu) tahun setelah surat apresiasi diterbitkan.

Pada tahun 2024 melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo telah mengajukan permohonan ke LKPP agar UKPBJ Provinsi Gorontalo dapat dijadikan pilot project UKPBJ PKP namun sampai dengan saat ini regulasi Petunjuk Teknis mengenai Tata Cara Pengajuan sebagai UKPBJ-PKP yang akan diatur melalui Keputusan Deputi Pengembangan dan Pembinaan SDM belum diterbitkan.

5. Penghargaan Nasional Yang Diterima Opd Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- a. Tanggal 1 Februari 2024, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo atas pencapaian pemenuhan kelengkapan atribut pada sembilan variable (9/9) untuk mencapai kematangan UKPBJ level 3 (proaktif).

Gambar 3.5

Piagam Penghargaan LKPP terhadap Pencapaian Pemenuhan Kelengkapan Atribut pada Sembilan Variabel Kematangan UKPBJ Level 3



6. **Perjanjian Kerjasama/MOU yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi Tahun 2024**

- a. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Teknik dan Sains Universitas Bina Taruna dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Gorontalo tentang Penyelenggaraan Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akselerasi Pembangunan Daerah.

Nomor	:	029/MoA/FATEKS.UNBITA/ALLDIKTI.XVI/V/2024
		027/SET-BP/350/V/2024
Tanggal	:	06 Mei 2024
Masa Berlaku	:	5 (Lima) Tahun

F.6 Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023– 2026 terdapat 2 (Dua) tujuan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
- 2) Peningkatan Pemajuan Nilai Keagamaan sebagai Bagian Pembangunan Daerah.

b. Sasaran

Sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023– 2026 terdapat 9 (Sembilan) sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Tata Laksana Fasilitasi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar;
- 2) Terwujudnya Meningkatnya Kualitas Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 3) Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi melalui Penataan Produk Daerah dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- 4) Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi Melalui Melalui Peningkatan Tata Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan;
- 5) Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi Melalui Melalui Peningkatan Tata Laksana Pengadaan Barang dan Jasa;



- 6) Terwujudnya Percepatan 8 Agenda Reformasi Birokrasi Melalui Fasilitas dan Pendampingan Terhadap Perangkat Daerah;

7) Terwujudnya Percepatan Agenda Perubahan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Tata Laksana Pelayanan Pimpinan;

8) Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD;

9) Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola dan Kualitas Sarana Prasarana Bina Mental Spritual.

Tabel 3.233

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan

Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program		Persentase
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sasaran: Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Lingkup Sekretariat daerah	Nilai SAKIP OPD	71.51	BB	100%
		IKM Sekretariat Daerah	87	86.47	100%
	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	IKM Biro	80	80	100%
		LKIP Biro	1 Laporan	1 Laporan	100%
2	Sasaran: Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi Strategis	100%	100%	100 %
	Program : Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100 %
	Program : Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis	3 Dok	3 Dok	100%

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.234

Realisasi Fisik dan Keuangan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	PAGU 2024 (Rp)	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahn
			Anggaran (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)		
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	3.360.896.813	3.298.460.448	98.14	100		
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.178.408	164.025.449	99.91	100		
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.551.386.480	2.500.042.629	97.99	100		
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	27.182.000	26.862.180	98.82	100		
4.	Administrasi Umum Perangka Daerah	75.823.500	75.364.031	99.39	100		
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.438.000	64.900.000	99.18	100		
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	365.702.025	365.187.699	99.86	100		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.186.400	102.078.460	91.81	100		



No	Program/Kegiatan	PAGU 2024 (Rp)	Realisasi			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahn
			Anggaran (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)		
II.	Program Perekonomia dan Pebangunan	1.337.903.500	1.211.591.218	90.56	100		
6.	Pengelolaan Kebijakan dan koordinasi Perekonomian	899.635.500	775.590.640	86.21	100		
7.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	30.092.000	29.999.538	99.69	100		
7.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	408.176.000	406.001.040	99.47	100		
III.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	357.868.200	355.987.542	99.47	100		
8.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	485.411.716	478.558.873	99.46	100		
9.	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13.741.500	13.704.246	99.73	100		
Jumlah		5.056.668.513	4.866.039.208	96.23	100		

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.**

Outcome dari program ini adalah IKM Biro dan Lakip Biro target 100% capaian 100%

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah tercapainya 4 jumlah laporan dan 10 dokumen

perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan antara lain :

- 1) 8 (delapan) Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Dokumen Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, LAKIP, SAKIP, Pakta Integritas, SKP.
- 2) 2 (Dua) dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : Dokumen RKA/DPA dan KAK
- 3) 4 (empat) jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat : Laporan Renja Triwulan I, II, III Dan IV

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah tercapainya 100% Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan

Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan SKPD antara lain :

- 1) 28(Dua Puluh Delapan) orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
- 2) 1 (Satu) Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan Keuangan, Laporan Persediaan Barang, Laporan BMD.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah tercapainya 1 Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan dan 16 Orang Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan antara lain

- 1) 1 (Satu) Paket Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan : Pakaian Olahraga
- 2) 16 (Enam Belas) Orang ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan : Mengikuti Bimtek e-Monev, Bimtek SIPD, Bimtek Persediaan Barang, dan Bimtek lainnya sesuai undangan.



d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Output kegiatan adalah tercapainya 1 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor, 15 Laporan Penyelenggaraan Rapat SKPD, dan 2 dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD antara lain

- 1) 1 (Satu) Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan antara : Penyediaan Alat Listrik dan penyediaan pemeliharaan kantor alat pembersih
- 2) 15 (Lima Belas) Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Rapat Internal Biro yang dilaksanakan selama 12 kali dan Rapat koordinasi lainnya
- 3) 2 (Dua) Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : dokumen Maintenance aplikasi e-Monev tenaga ahli dan Pembantu tenaga ahli

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Output kegiatan ini adalah 2 (dua) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa yang Disediakan antara lain :

- 1) 1 (Satu) Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laporan
- 2) 1 (Satu) Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan antara lain : Laporan Kinerja Tenaga Penunjang Kegiatan (Non-Asn)

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Output Kegiatan ini adalah 7 (Tujuh) Unit Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional serta Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan antara lain tercapainya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan antara lain: Pengadaan Laptop, Printer, Komputer,dll

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output Kegiatan ini adalah 25 (Dua Puluh Lima) Unit Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang Dipelihara serta Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya antara lain Pembayaran Pajak,Bea dan Perizinan, Belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (Printer, Komputer, Laptop, dll)

2) Program Perekonomian dan Pembangunan.

Outcome dari program ini adalah Persentase Monitoring dan Evaluasi KebijakanEkonomi Strategis. Target 100%, capaian 100%.

a. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian.

Output kegiatan adalah 30 (Tiga Puluh) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro antara lain

- 1) 15 (Lima Belas) jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro adalah Dokumen hasil Kegiatan Rapat Koordinasi Inflasi Daerah yang dilaksanakan setiap hari Senin secara Hybrid yang dipimpin oleh Mendagri, Rapat HLM TPID, Rapat Koordinasi TPID, Capacity Building TPID, Sosialisasi Fakta dan Angka, Refleksi Ekonomi, Rakorev Pengendalian Ekonomi, Kegiatan Monitoring Harga dan ketersediaan Bahan Pokok



Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Tahun Baru, Study Banding TPID dan Analisis Kajian ekonomi

- 2) 15 (Lima Belas) jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro adalah Dokumen hasil Kegiatan Rapat KDEKS, Rapat BBM dan LPG, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penentuan Lokasi Zona Khas (Kuliner, Halal, Aman dan Sehat) Kabupaten/Kota, Kegiatan Monitoring Ketersediaan Stok BBM dan LPG Menjelang Ramadhan, natal dan Tahun Baru

b. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam

Output kegiatan adalah 15 (Lima Belas) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan antara lain Rapat Penyusunan Laporan Analisis Kajian Ekonomi, Monitoring ketersediaan dan distribusi Pupuk Bersubsidi, Monitoring Ketersediaan bantuan bibit Pertanian Kab/Kota

c. Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.

Output kegiatan adalah 24 (dua Puluh Empat) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan, Aneka Usaha dan Pendirian BLUD antara lain:

- 1) 12 (dua Belas) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan, Aneka Usaha adalah rapat Studi Banding Penguatan BUMD PT Gorontalo Fitrah Mandiri, Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se- Provinsi Gorontalo, Penyusunan Tarif Batas Atas & Tarif Batas Bawah Air Minum Kab/Kota, Workshop Penyusunan Rencana Bisnis & Anggaran BUMD, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
- 2) 12 (dua Belas) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD adalah Sosialisasi Penerapan BLUD pada SMKN se- Provinsi Gorontalo, Rapat Persiapan Studi Tiru, Koordinasi Kemendagri dan Kemendikbud terkait penerapan BLUD pada SMKN, Rapat Finalisasi Penilaian dokumen administratif SMKN, Rapat Penerapan BLUD pada SMKN di Provinsi Gorontalo

3) Program Kebijakan Administrasi Pembangunan.

Outcome dari program ini adalah Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dana APBD, APBN provinsi dan kabupaten/kota. Target 3 dokumen, capaian 3 dokumen

a. Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Output kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, APBN, dan Wilayah antara lain : pelaksanaan PraRapim, Rapim, Rakorev dan Rakor kegiatan strategis

b. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Output Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah antara lain Buku Rekam Jejak.



Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Tabel 2.235
Kebijakan Strategis Sekretariat Daerah
(Biro Pengendalian Pembangunan) Tahun 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum	Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 433/3/XI/2024 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo	Sebagai dasar untuk Kabupaten/Kota menetapkan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum
2.	pembentukan Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2024	Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 166/29/IV/2024 Tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 82/3/II/2024 tentang pembentukan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Gorontalo tahun 2024	Sistem yang diterapkan oleh Unit Pelayanan Teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya

3. Data Berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra OPD 2023-2026, Khusus Indikator Kinerja tahun 2024

Tabel 3.236
Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi
Pemerintahan Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan Tahun 2024
Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Ekonomi Strategis	100%	100%
2	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis	3 Dok	3 Dok

4. Hal – hal yang perlu di laporkan terkait capaian indikator Kinerja Tahun 2024
- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo tahun 2024 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 127/3/III/2024 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo. Kemudian pada bulan September 2024 SK tersebut direvisi karena adanya temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Keanggotaan TPID tersebut harus sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Berdasarkan Kepmendagri tersebut, maka Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 127/3/III/2024 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 396/3/X/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 127/3/III/2024 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo
 - Berdasarkan arahan Bapak Wakil Presiden selaku Ketua Harian KNEKS pada rapat pleno KNEKS ke-III bahwa “pengintegrasian rencana pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke



dalam rencana pembangunan nasional dan daerah, termasuk penyusunan Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MEKSI) sebagai kelanjutan masterplan sebelumnya”, maka penyusunan MEKSI perlu diselaraskan dengan RPJMN DAN RPJPN serta terimplementasi sampai pada RPJMD dan RPJPD di seluruh pemerintah provinsi di seluruh Indonesia.

- c. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Gorontalo dikukuhkan oleh Wakil Presiden pada tanggal 14 April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo nomor 122/3/III/2023 tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Gorontalo. Saat ini KDEKS Provinsi Gorontalo telah berkoordinasi dengan dinas terkait yang ada di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Gorontalo dalam rangka penguatan dan pengimplementasian Zona KHAS di seluruh kabupaten dan kota, program ini dalam rangka menselaraskan MEKSI dengan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045 nanti.
- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Gorontalo
- e. PT. Gorontalo Fitrah Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Gorontalo dan telah ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Gubernur nomor 237 tahun 2002 dengan Akta Pendirian Perusahaan PT Gorontalo Fitrah Mandiri nomor 32 tanggal 15 November tahun 2002. Badan Usaha Milik Daerah PT. Gorontalo Fitrah Mandiri mempunyai tugas melaksanakan usaha dibidang jasa dan bisnis lainnya yang berorientasi untuk mencari keuntungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan aspek moral dan pelayanan umum.
- f. Semua indikator keuangan PT. Gorontalo Fitrah Mandiri dikatakan sudah tidak sehat, penyebab utama yaitu :
 - likuiditas dan Solvabilitas sudah tidak ada lagi karena perusahaan tidak memiliki cukup aset likuit untuk menutupi seluruh kewajiban.
 - Lini Usaha sudah tidak ada yang menghasilkan pendapatan.
- g. Terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada BUMD PT. Gorontalo Fitrah Mandiri telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - Gubernur Gorontalo telah membentuk Tim Penyehatan BUMD untuk melakukan langkah-langkah membenahi BUMD PT. GFM sesuai SK Gubernur nomor 116/29/11/2020 dan direvisi dengan SK Wakil Gubernur nomor 366/3/IX/2021.
 - Tim Penyehatan bersama pengurus BUMD telah melakukan perbaikan Laporan Keuangan tahun buku 2019, 2020, 2021 dan 2022 dan selanjutnya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) tahun 2023, untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh aset-aset dan saham BUMD PT. GFM.
 - Pada bulan Januari 2023 membentuk Tim Panitia Seleksi Terbuka dengan SK Gubernur nomor 39/3/1/2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Komisaris dan Anggota Direksi PT. Gorontalo Fitrah Mandiri.



- Pada tanggal 13 Maret 2023 pemegang saham BUMD PT. GFM telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Pengangkatan Komisaris masa jabatan 2023 - 2027 dan Direksi masa jabatan 2023 - 2028.
- Tahun 2023 telah dianggarkan melalui Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan penyusunan naskah akademik Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Gorontalo Fitrah Mandiri yang merupakan perubahan Perda Nomor 35 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Gorontalo
- Tahun 2023 telah disusun Kajian/Laporan Analisis Investasi Daerah Pada BUMD Provinsi Gorontalo
- Pada tanggal 30 Juli 2024 dilaksanakan kegiatan Penguatan BUMD PT GFM (Study Banding Secara Online dengan PT. JATB Jawa Tengah) dalam rangka meningkatkan kinerja dan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Gorontalo.
- Pada tanggal 3 September 2024 Audiens bersama Pj Gubernur Gorontalo terkait Pengesahan Kemenkum HAM atas Akta Notaris No. 10 tahun 2023 tentang Pengangkatan Direktur dan Komisaris BUMD PT GFM.
- Pada tanggal 5 September 2024 dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut hasil Audiensi bersama Pj. Gubernur Gorontalo dihadiri Kaban Keuangan, Inspektur, Kepala Biro Ekbang dan Tim.Penyehatan BUMD
- Pada tanggal 20 November 2024 dilaksanakan Workshop Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran BUMD

h. Kendala atas upaya yg dilakukan :

- Kondisi daerah yang beberapa kali mengalami pergantian pemimpin daerah menjadi faktor permasalahan BUMD belum dapat diselesaikan.
- BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang telah menerapkan BLUD antara lain Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Persampahan, Pengolahan Limbah, Pasar, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Transportasi, Perparkiran, Terminal, Pariwisata, Konservasi, Stadion Olahraga, dan lain sebagainya. BLUD memberikan peluang yang besar kepada SMK untuk menerapkan pola tata kelola keuangan yang fleksibel. BLUD telah menunjukkan SMK menjadi lebih mandiri, produktif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.
- Adanya dorongan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar setiap daerah dapat mengubah status Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui Program Teaching Factory (TEFA).
- produk yang dihasilkan oleh siswa tidak hanya sebatas praktek saja untuk mempersiapkan siswa siap kerja tetapi juga bersifat pelayanan umum kepada masyarakat untuk dipasarkan dengan standar industri yang dimiliki.

- adanya SMK BLUD maka sekolah terlindungi secara hukum pendapatan dari layanan yang telah diberikan kepada publik. Sekolah dapat bereksprosi, berinovasi, dan mengembangkan seluruh potensi yang ada sesuai bidang keahlian sekolah untuk memperoleh pendapatan
 - adanya SMK BLUD akan mengurangi beban anggaran APBD Provinsi Gorontalo karena adanya penghasilan dari pengelolaan BLUD yang pola pengelolaannya berdasarkan pada Fleksibilitas Keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan.
 - Dari jumlah 40 SMKN se Provinsi Gorontalo, ada 15 SMKN Pusat Keunggulan yang diharapkan bisa menjadi SMK BLUD, dan ada 3 SMKN yang sudah mengusulkan Dokumen Administratifnya untuk dinilai yaitu SMKN 2 Kota Gorontalo, SMKN 1 Limboto dan SMKN 1 Boalemo.
 - Berdasarkan amanat Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD pasal 47-48 telah dibentuk Tim Penilai BLUD Provinsi Gorontalo yang diketuai oleh Sekretaris Daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 166/29/IV/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 82/3/II/2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Gorontalo
 - Pada Bulan Oktober 3 SMKN sudah mengajukan Dokumen Administratif untuk dinilai oleh TIM Penilai dan pada bulan November sudah dilakukan Penilaian Dokumen Administratif 3 SMKN dan tanggal 20 Desember 2024 sudah dilakukan Penilaian Akhir dan penandatanganan Berita Acara dan Rekomendasi untuk Gubernur Gorontalo tentang Penetapan BLUD SMK di Provinsi Gorontalo.
 - Januari 2025 sementara Proses SK Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD SMKN di Provinsi Gorontalo.
5. Penghargaan Nasional yang diterima OPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024
- Nominasi TPID Provinsi berkinerja terbaik Kawasan Sulawesi (Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 222 Tahun 2024)

Gambar 3.6
Piagam Penghargaan Nominasi TPID Provinsi Berkinerja Terbaik





G. Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo

1. Tujuan
- Tujuan yang diharapkan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
2. Sasaran dan Program
- Berdasarkan tujuan diatas, maka sasaran yang akan dicapai adalah penjabaran tujuan yang dilakukan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo dalam jangka waktu tahunan, sampai empat tahun mendatang sebagai berikut :
1. Penataan Produk Hukum Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD.

Tabel 3.237
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024
Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Program Tahun 2024		Presentase
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	[6=5/4*100]
1.	Penataan produk hukum daerah	Presentase produk legislatif yang terealisasi menjadi PERDA	5	5	100
		Presentase PERDA yang efektif	5	5	100
	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/Pendidikan dan Pelatihan	10	10	100
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) SKPD	B Baik	BB Sangat Baik	
		Peningkatan Pengawasan Kerasipan	29	29	100

3. Program Dan Kegiatan

Tabel 3.238
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Pendukung Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024

NO	PROGRAM	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
1.	Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	66.560.275.350	60.771.931.550	91.30	100		
	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	7.046.379.050	6.100.090.597	86.57	100	Kegiatan terlaksana dengan baik dan tidak menemui permasalahan	



NO	PROGRAM	PAGU 2024	REALISASI TAHUN 2024			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			ANGGARAN	KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)		
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	22.172.161.199	21.627.200.691	97.54	100	Kegiatan terlaksana dengan baik dan tidak menemui permasalahan	
	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	35.773.312.912	31.612.962.118	88.37	100	Kegiatan terlaksana dengan baik dan tidak menemui permasalahan	
	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	1.568.422.189	1.431.678.144	90.13	100		
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	49.522.047.880	48.596.929.424	98.13	100		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	360.416.950	332.019.475	92.12	100	Kegiatan terlaksana dengan baik dan tidak menemui permasalahan	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.584.236.501	8.507.747.574	99.10	100	Kegiatan terlaksana dengan baik dan tidak menemui permasalahan	
	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	26.320.698.308	26.039.205.267	98.93	100	Kegiatan terlaksana dengan baik dan tidak menemui permasalahan	
	Kegiatan Adminstrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	1.022.134.400	936.279.096	91.60	100	Kegiatan terlaksana dengan baik dan tidak menemui permasalahan	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.704.297.451	6.454.053.045	96.26	100	Kegiatan terlaksana dengan baik dan tidak menemui permasalahan	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.947.355.520	4.573.517.305	92.44	100	Kegiatan terlaksana dengan baik dan tidak menemui permasalahan	
	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	1.582.908.750	1.472.103.212	92.99	100	Kegiatan terlaksana dengan baik dan tidak menemui permasalahan	
	TOTAL	116.082.323.230	109.086.856.524	93.97	100		

1) Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Kegiatan :

Outcome dari program ini adalah Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD. Program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

- 1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda, Output adalah Jumlah Peraturan Daerah (Perda). Jumlah Perda sesuai target Renstra 2023-2026 berjumlah 5 Perda dan tahun ini bisa terealisasi 5 Perda

✓ Perda-Perda yang telah disahkan di DPRD Provinsi Gorontalo

1. Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2044
3. Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
4. Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045
5. Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025

b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

- 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis / Orientasi DPRD

Output sub kegiatan ini adalah Jumlah Bimbingan Teknis/Orientasi DPRD yang diikuti 45 Anggota DPRD dalam rangka peningkatan kapasitas dan target Renstra 2023-2026 sebanyak 26 Dokumen dan terealisasi 26 Dokumen

- 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Kerjasama dengan Media Massa dan Media Elektronik

Kegiatan ini berupa MOU antara Sekretariat DPRD dengan Pihak Media Cetak dan Media Elektronik, belanja surat kabar dan majalah yaitu Gorontalo Post dan Radar untuk 45 Anggota DPRD dan Pejabat di Sekretariat, belanja jasa penyiaran dan peliputan untuk TVRI Gorontalo, Mimoza TV dan RRI Gorontalo, kegiatan Coffe morning, Kopi lolango. Semua kegiatan dewan berupa Rapat-rapat Paripurna, Paripurna Istimewa dan semua kegiatan DPRD. Sesuai target Renstra 2023-2026 ada 8 Dokumen dan Realisasinya 8 Dokumen.

c. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses yang outputnya Jumlah Pelaksanaan Reses oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. Kegiatan Reses dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing – masing Anggota DPRD. Sesuai Renstra 2023-2026 target 3 kali dan realisasi kegiatan Reses sudah sesuai target yaitu 3 kali Reses yang dilaksanakan dalam dua masa persidangan. Reses masa persidangan 2023-2024 dilaksanakan 2 kali dan reses masa persidangan 2024-2025 dilaksanakan 1 kali.

- 2) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja yang outputnya jumlah kunjungan kerja DPRD dalam daerah yang dilakukan Anggota DPRD guna mengevaluasi semua pekerjaan yang dilakukan Eksekutif. Sesuai Renstra 2023-2026 ada 96 Laporan dan realisasi Kunjungan Kerja yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRD sudah sesuai target 96 kali.

d. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang outputnya Jumlah Laporan Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya Kegiatan ini meliputi kegiatan-kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan daerah lainnya, Koordinasi menambah pengetahuan dan wawasan ASN Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Koordinasi dan Konsultasi ke Sekretariat Kab/Kota dalam hal penyamaan persepsi dalam memfasilitasi Tugas dan Fungsi Sekretariat terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD dan Kegiatan ini dilakukan sebanyak 20 kali dan sudah sesuai target Renstra 2023-2026.

2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari program ini adalah Persentase Peningkatan layanan administrasi ,Sarana Prasarana dan SDM Aparatur. Program ini terdapat 7 (Tujuh) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Output kegiatan ini sesuai Renstra 2023-2026 ada 6 Dokumen. Jumlah dokumen Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yaitu Dokumen berupa Laporan LKPJ, LPPD, Renja, LKIP, Data E Monev, Data Sirup dan Penginputan SIPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Output Kegiatan ini merupakan penyediaan dana untuk Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyediaan dana Gaji dan Tunjangan lainnya untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
- 2) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan. Output berupa penyusunan laporan keuangan, neraca dan CaLK. Kegiatan ini sudah sesuai target yaitu 3 Dokumen Laporan Keuangan.

c. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

Sub Kegiatan Penyelenggaran Administrasi Keuangan DPRD merupakan Output pembayaran Gaji dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang berjumlah 45 orang.

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Outputnya adalah Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Bimtek sesuai Tugas dan Fungsi. Kegiatan dalam rangka menambah pengetahuan kepada PNS Sekretariat berupa Diklat, Bimtek dan Studi Komparasi untuk meningkatkan pengetahuan dalam hal ini memberikan masukan dan arahan yang diperlukan kepada Anggota DPRD



- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Outputnya Jumlah Unit Sarana yang akan diadakan. Kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan dibutuhkan dalam hal pelayanan terhadap kegiatan Dewan Ditahun 2023 Pengadaan berupa belanja modal yaitu : Pengadaan Alat Pendingin (Air Cooler), Peralatan Studio Video dan Film, Peralatan Komputer lainnya, Komputer unit lainnya, Mebel, Meja Makan, Kitchen Set, Meja Kerja Pejabat, Alat Pendingin, Peralatan Permainan, Infokus dan Speaker Aktif
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Output Pembuatan surat menyurat, pengurusan administrasi kepegawaian, belanja rutin seperti listrik, telfon dan air. Kegiatan ini sesuai target yakni 100 % dalam pelaksanaannya.
- g. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
 Sub Kegiatan Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Outputnya adalah Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas DPRD, kegiatan ini berupa Dialog Interaktif yang dilaksanakan Anggota DPRD untuk mengetahui masalah yang terjadi di masyarakat dan memberikan penyelesaiannya. Kegiatan ini di lakukan di Kab/Kota se Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini mencapai target yaitu 40 kali dalam setahun dan kegiatan ini kegiatan rapat-rapat yang dilaksanakan Komisi-komisi baik Komisi I,II,III dan IV dalam hal menerima permasalahan-permasalahan masyarakat, rapat kerja dengan SKPD Provinsi terkait program kerja Pemerintah Provinsi.

4. **Data berdasarkan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026 dan Renstra OPD 2023-2026, khusus Indikator kinerja tahun 2024**

Tabel 3.239
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Pendukung
 Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024	
		Target	Realisasi
1	Presentase produk legislatif yang terealisasi menjadi PERDA	5 Perda	5 Perda
2	Presentase PERDA yang efektif	5 Perda	5 Perda
3	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/Pendidikan dan Pelatihan	10	10
4	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) SKPD	B	BB
5	Peningkatan Pengawasan Kerasipan	29	29

H. Badan Penghubung Provinsi Gorontalo

- 1. Tujuan dan Sasaran
 - a. Tujuan yang akan dicapai Badan Penghubung Provinsi Gorontalo
 - Peningkatan kualitas pelayanan fasilitasi pimpinan
 - b. Sasaran dan program
 - Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi pimpinan.



Tabel 3.240
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2024		PRESENTASE KINERJA TAHUN 2024 %
			TARGET	REALISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8=5/4*100)
	SASARAN : - Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Terlaksananya Pelayanan kelembagaan dan fasilitasi Keprotokolan Pimpinan	100	97,31	95,39
	POGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pameran Produk unggulan dan seni budaya daerah	100	96,06	94,56
	PROGRAM : Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan pada penghubung Makassar	100	96,70	97,18

2. Program dan Kegiatan

Tabel 3.241
Realisasi Fisik dan Keuangan Urusan Fungsi Penunjang
Badan Penghubung Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI Tahun 2024			REALISASI TAHUN 2023
			ANGGARAN	KEUANGAN	FISIK	FISIK
			(RP)	(%)	(%)	(%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.735.565.451	5.146.754.676	89,73	100,00	100,00
	1.1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.679.491.224	2.266.985.397	84,60	100,00	100,00
	1.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.024.014.227	2.849.174.459	94,21	100,00	100,00
	1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	32.060.000	30.594.820	95,42	100,00	100,00
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.175.028.500	1.170.258.162	99,59	100,00	100,00
	2.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	973.892.500	969.192.987	99,51	100,00	100,00
	2.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.136.000	201.065.175	99,96	100,00	100,00
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.130.420.000	1.124.286.306	99,42	100,00	100,00
	3.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.130.420.000	1.124.286.306	99,45	100,00	100,00
	Program Pelayanan Penghubung					
1.	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.415.254.654	1.370.626.886	96,84	100,00	100,00
	1.1 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	449.990.000	437.930.000	97,31	100,00	100,00



NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (RP)	REALISASI Tahun 2024			REALISASI TAHUN 2023
			ANGGARAN	KEUANGAN	FISIK	FISIK
			(RP)	(%)	(%)	(%)
	1.2 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	115.084.480	110.551.896	96,06	100,00	
	1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	850.179.174	822.144.990	96,70	100,00	100,00
JUMLAH		9.456.268.605	8.811.926.030	93,18	100	100

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Outcome dari Program ini Meningkatnya kualitas manajemen administrasi dukungan sarana prasarana dan SDM yang berkompeten.

a. Pelaksanaan Program

1. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Output kegiatan adalah paket kegiatan dengan Pagu Anggaran Rp. 2.679.491.224 kegiatan rutin kantor yang meliputi Belanja Bahan Gas, ATK, Belanja Bahan Cetak, Alat listrik, Bahan pakai lainnya, MMR dan MMT, Belanja jasa tenaga pelayanan umum, jasa transaksi keuangan, jasa/jalan tol, tagihan telepon, tagihan listrik, paket pengiriman, asuransi BMD, iuran kebersihan, jasa angkut sampah dan belanja pakaian adat daerah (karawo) dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 2.266.985.397,- Presentase 84,60%.

2. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output Kegiatan ini adalah kegiatan dengan Pagu Anggaran Rp.3.024.014.227,- Kegiatan yang meliputi Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Tunjangan Keluarga PNS, Tunjangan Jabatan PNS, Tunjangan Fungsional PNS, Tunjangan Beras PNS, Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dan Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 2.849.174.459,- presentase 94,21%.

3. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan administrasi dan keuangan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 32.060.000,- Kegiatan yang meliputi belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak dengan Realisasi keuangan sebesar Rp. 30.594.820,- presentase 95,42%.

4. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan; Jumlah Penyelenggaraan Rapat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 973.892.500,- yang meliputi belanja BBM dan Pelumas, Sewa Sarana Mobilitas Darat, Sewa Bangunan Gedung Kantor, Sewa Rumah Dinas Kepala Kantor, Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya, Belanja Modal Personal Komputer dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 969.192.987,- presentase 99,51 %.

5. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Output kegiatan ini adalah jumlah laporan pelaksanaan Rapat dan Konsultasi keluar daerah, dengan Pagu Anggaran Rp. 201.136.000,- dengan Rincian Belanja Perjalanan Dinas Luar/Dalam Daerah dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 201.065.175,- presentase 99,96%.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Output kegiatan ini adalah jumlah penyediaan jasa pemeliharaan barang milik daerah, dengan Pagu Anggaran Rp. 1.130.420.000,- dengan rincian Belanja Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja Jasa Service, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga dan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.124.286.306,- presentase 99,45%.

2) Program Pelayanan Penghubung

Outcome kegiatan ini adalah Persentase Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui diklat/bimtek

1. Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat
Output kegiatan ini Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan formal dengan Pagu Anggaran Rp. 449.990.000,- yang meliputi rincian Belanja Bahan Cetak, Cenderamata/Souvenir, Belanja Jasa Tenaga Keamanan, Belanja MMR dan MMT, Belanja Sewa Mobilitas Darat Roda 4, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 437.930.000,- presentase 97,31%.
2. Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
Output kegiatan ini Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitas/ kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan formal dengan Pagu Anggaran Rp. 115.084.480,- yang meliputi rincian Belanja Bahan Cetak, Cenderamata/Souvenir, Belanja Jasa Pungutan Pajak/Iuran, Belanja MMR dan MMT, Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Honorarium, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 110.551.896,- presentase 96,06%.
3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
Output kegiatan ini adalah Jumlah Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD di Badan Penghubung Makassar dengan pagu Anggaran Rp. 850.179.174,- berdasarkan rincian belanja BBM dan Pelumas, Belanja Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja ATK, Bahan Cetak, Materai, Catridge, Alat Listrik, Alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, MMR dan MMT, Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Belanja Jasa Jalan/Tol, Tagihan Telepon, Tagihan Listrik, Langganan Surat Kabar/majalah, Paket Pengiriman, Jasa Pembayaran PNBP, Sewa Mobilitas Darat, Sewa Bangunan Gedung Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Penumpang, Beban Pajak Kendaraan bermotor,



Jasa Service, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Modal Kursi Tamu, dan Belanja Modal Personal Komputer, dengan realisasi Rp. 822.144.990,- presentase 96,70%.

- Data Berdasarkan RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2007-2025 dan Renstra OPD tahun 2023-2026, khusus indikator kinerja tahun 2024

Tabel 3.242
 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Penunjang
 Badan Penghubung Daerah Tahun 2024
 Sesuai Renstra dan RPD Provinsi Gorontalo 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024		Capaian Tahun 2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terlaksananya Pelayanan kelembagaan dan fasilitasi Keprotokolan Pimpinan	100%	97,31	100%	95,39
2	Terlaksananya Kegiatan Pameran Produk unggulan dan seni budaya daerah	100%	96,06	100%	94,56
3	Persentase Pelayanan pada penghubung Makassar	100%	96,70	100%	97,18

3.2 TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Tabel 3.243
Rekomendasi Tindaklanjut DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Gubernur Tahun Sebelumnya (Tahun 2023)

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT OPD	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Pansus mengkhawatirkan penggunaan tools keuangan berupa SIPD RI yang terpusat di Pusdatin Kemendagri akan mempengaruhi percepatan Realisasi penyerapan Anggaran yang muaranya akan menghambat capaian kinerja program kegiatan yang telah direncanakan. Dikhawatirkan akumulasi keterlambatan serapan anggaran akan membengkak dan diakhir tahun akan mempengaruhi capaian kinerja pemerintahan	- Melakukan bimtek bagi SDM untuk update informasi dan pengembangan fitur-fitur yang ada dalam SIPD - Berkoordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri - Fasilitas jaringan internet yang lancar dan memadai	Implementasi SIPD secara tepat dan didukung oleh pelatihan bagi aparatur yang terlibat serta infrastruktur yang memadai akan mempermudah pemantauan dan administrasi yang lebih efisien, SIPD memungkinkan pemerintahan untuk lebih cepat dan akurat dalam mengelola anggaran serta melaksanakan program pembangunan yang sudah direncanakan.
2	Masalah Pendapatan Daerah Memperhatikan komposisi perbandingan dana Transfer dengan Pendapatan Asli Daerah 73 % : 27% menggambarkan ketergantungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap Dana Transfeer masih sangat dominan. Oleh sebab itu Pansus merekomendasikan perlu diupayakan kiat-kiat untuk menggali opsen pendapatan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan bantuan atau dari sumber-sumber pendapatan lainnya. dan untuk memaksimalkan upaya pengelolaan pendapatan daerah tersebut, maka pansus	- Perda Prov. Gorontalo nomor 1 tahun 2024 Pajak dan Retribusi Daerah - Pergub nomor 35 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 1 tahun 2024	• Komposisi PAD terhadap dana transfer sampai dengan tahun 20224 sebesar 27% : 73% terkait Rekomendasi Pansus LKPJ untuk menggali pendapatan daerah dari sector pajak mineral bukan logam akan diintensifkan. Hanya saja potensi pajak mineral bukan logam yang menjadi kewenangan kabupaten/kota masih sangat rendah. Sesuai pasal 83 UU HKPD tarif opsen pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan 25% dari besaran pajak MBLB terutang. • Terkait pembentukan perangkat daerah baru yang menangani pendapatan Pemerintah



	merekomendasikan untuk segera dibentuk OPD baru yakni Dinas Pendapatan Daerah yang diharapkan OPD ini akan berkonsentrasi penuh terhadap pendapatan daerah		Provinsi Gorontalo pada dasarnya mengikuti perundang-undangan yang mensyaratkan minimal skor yang harus dipenuhi untuk membentuk unit perangkat daerah baru. Pada 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk membentuk unit perangkat daerah baru.
3	Memperhatikan kompleksitas permasalahan aset pemerintah Provinsi Gorontalo yang tidak selesai-selesai dari tahun ke tahun, maka pansus merekomendasikan perlunya Pemerintah Provinsi segera membentuk Pansus yang fokus menangani dan menyelesaikan permasalahan aset tersebut.	Pembentukan Kasus Penanganan Aset tahun 2024	Telah dibentuk Pansus Khusus penanganan Aset tahun 2024 dengan menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh beberapa OPD terkait.
4	Stimulus dan Kebijakan Anggaran untuk Sektor UMKM Pansus merekomendasikan perlunya stimulus dan keberpihakan kebijakan serta anggaran untuk sektor UMKM perlu diseriusi. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid bukan pada seminar, workshop dan agenda sejenis lainnya. tapi pada Political Will Daerah untuk memberdayakan sektor UMKM yang benar-benar kongkrit dan real untuk tumbuh kembangnya perekonomian daerah.	Telah teranggarkan dalam DPA SKPD Program Pengembangan UMKM Dinas Koperasi UKM Industri dan Perdagangan	Ditahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo telah memprogramkan kegiatan Stimulan bantuan bagi UMKM berupa bahan produksi yang telah direalisasikan di tahun 2024 kepada 14.303 UMKM (@Rp.1.000.000,) dengan jumlah anggaran sebanyak RP.14.288.600,- melalui program pengembangan UKM.



5	Pemekaran OPD Dinas PUPR dan Penataan Ruang Pemukiman Memperhatikan beban tubas dan beban organisasi yang diemban OPD Dinas PUPR, Penataan Ruang dan Pemukiman setelah digabungkan yang berimplikasi tidak maksimalnya setiap program yang dijalankan, maka pansus merekomendasikan perlu dipertimbangkan kembali untuk dimekarkan.		
6	Konsistensi Perencanaan Pelaksanaan dan Penganggaran Pansus merekomendasikan perlunya evaluasi kinerja terhadap konsistensi antara Perencanaan Pelaksanaan dan Penganggaran baik dalam rangka sinergitas pembangunan sektoral maupun pembangunan kewilayahan	Mengoptimalkan penggunaan SIPD utnuk perencanaan dan penanggaran	Untuk menjaga konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran dilakukan langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi antara berbagai pihak. Dengan uraian sebagai berikut : Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) berdasarkan visi dan misi yang jelas dan disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta. Rencana yang disusun harus selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, serta mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan pendekatan T-H-I-S (tematik, holistic, integrative, spasial).



		2. Penyusunan anggaran dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta prioritas program pembangunan yang telah disepakati dalam perencanaan. 3. Menjamin transparansi anggaran melalui mekanisme yang jelas. 4. Menggunakan sistem SIPD untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian perencanaan dan penganggaran. 5. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap program pembangunan guna mengukur pencapaian dan efektivitas pelaksanaan. 6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan tepat waktu. 7. Mengimplementasikan sistem pengawasan internal yang baik, dengan memperkuat fungsi Inspektorat dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mencegah penyimpangan. 8. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran. 9. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan penyesuaian perencanaan atau anggaran



			jika ditemukan ketidaksesuaian atau kendala di lapangan. 10. Koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan
7	Masalah Command Centre Berdasarkan rekomendasi pansus tahun lalu agar kehadiran command center dapat dimaksimalkan penggunaannya tapi kenyataannya sampai saat ini command centre tersebut belum ada upaya untuk memperbaiki bahkan menurut KPA belum dapat difungsikan. Oleh sebab itu Pansus merekomendasikan masalah ini segera diproses secara hukum guna memberikan punishment berupa efek jera terhadap penggunaan APBD.	Telah mengusulkan anggaran software namun belum terakomodir	- Command center belum bisa berfungsi secara optimal dikarenakan karena software belum tersedia. Dinas kominfo sudah mengusulkan anggaran software ditahun 2024 dan 2025 tetapi belum terakomodir. - Kedepan agar dinas kominfostatistik menyiapkan kajian teknis agar anggaran yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan sehingga command center bisa digunakan dan berfungsi optimal.
8	Proyek Jalan Iluta Pilolodaa Memperhatikan proyek jalan Iluta – Pilolodaa dengan total anggaran Rp. 35 Miliar dan saat ini telah putus kontrak, maka Pansus merekomendasikan agar tidak menggunakan dana DAK lagi untuk melanjutkan proyek jalan tersebut pada tahun 2024, karena tidak akan menyelesaikan pekerjaan jalan tersebut.	Bahwa untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Tenilo-Pilolodaa-Iluta pada TA.2024 ini telah dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebelumnya dari Bidang terkait telah menyampaikan telaahan ke DPRD terkait rekomendasi dimaksud	Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tenilo-Pilolodaa-Iluta, telah dilaksanakan dengan nilai kontrak Rp.6.933.595.000,- Pelaksana PT.TRI SANDI YUDHA (10 Juli s/d 31 Des 2024) Realisasi keuangan 95% dan Realisasi Fisik 100%



9	Kanal Tanggidaa Terhadap proyek kanal tanggidaa yang belum selesai, pansus merekomendasikan agar proyek ini segera diselesaikan dengan menggunakan dana Rp. 4,9 Miliar sisa pinjaman dari PEN.	Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa, benar telah menggunakan kembali sisa anggaran PEN sebesar Rp.4.953.775.093.-	Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa, telah dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.946.672.287; pelaksana CV.Bone Tirta (1 Okt s/d 29 Des 2024). Realisasi Keuangan 100%, Realisasi Fisik 100%
10	Pendidikan Mengingat pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mempersiapkan masa depan peserta didik, maka terkait hal tersebut dalam rangka menuntaskan problematika pendidikan baik perbaikan infrastruktur, layanan dan mutu pendidikan, penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan secara merata dan profesional termasuk memastikan hak-hak sertifikasi guru yang belm terbayarkan sesuai ketentuan, maka pansus merekomendasikan perlunya penyelesaian -Pberbagai permasalahan tersebut dengan pemenuhan berbagai syarat dan indeks pembelajaran yang harus dipenuhi.	- Penempatan guru PPPK di daerah – daerah yang kekurangan Guru - Sertifikasi Guru tahun 2023 telah disalurkan	Terkait Penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan secara merata dan profesional telah dilaksanakan melalui penempatan Guru PPPK yang dikukuhkan pada tahun 2023 sejumlah 880 orang. Sebagian guru PPPK dimaksud beroleh penempatan di daerah-daerah terpencil sehingga sebagian kebutuhan guru di daerah yang jauh dari perkotaan termasuk daerah khusus telah terpenuhi dan selanjutnya sertifikasi guru tahun 2023 telah disalurkan.
11	Sektor Lingkungan Hidup Pansus merekomendasikan pentingnya bagi setiap pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang terus menjaga alam dari berbagai potensi yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam yang mencakup	Tindak Lanjut : 1) Menjadikan lingkungan yang lestari sebagai Prioritas Utama Pembangunan di Provinsi Gorontalo; 2) Mensyaratkan semua Dokumen	Penyelesaian masalah: 1. Menjadikan lingkungan yang lestari sebagai Prioritas Utama Pembangunan di Provinsi Gorontalo yang akan dituangkan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo



pencemaran lingkungan kebakaran hutan dan pemanasan global, harus ada pemahaman bersama bahwa pencemaran udara, air dan tanah akan menyebabkan berkurangnya kualitas sumber daya alam dan berdampak pada kesehatan manusia secara permanen.	Perencanaan di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota wajib berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS), seperti dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD dan perencanaan yang sifatnya strategis lainnya); 3) Setiap rencana kegiatan yang akan dibangun di provinsi Gorontalo wajib memiliki dokumen kelayakan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL); 4) Membangun kesepakatan bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penetapan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5) Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib masuk dalam RPJPD maupun RPJMD; 6) Membangun dukungan dari Pemerintah Kab/Kota dalam peningkatan IKLH melalui Komunikasi dan	Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2025-2029 dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029; 2. Mensyaratkan semua Dokumen Perencanaan baik di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota wajib berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS), seperti dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD dan perencanaan yang sifatnya strategis lainnya); 3. Setiap rencana kegiatan yang akan dibangun di provinsi Gorontalo wajib memiliki dokumen kelayakan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL); 4. Memasukannya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib masuk dalam RPJPD maupun RPJMD; 5. Kedepan melalui program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup akan difasilitasi berupa kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Provinsi Gorontalo serta program pembinaan dan pengawasan terhadap ijin



		koordinasi secara rutin antara pemerintah Provinsi dan Kab/Kota; 7) Melakukan Pertemuan rutin dengan Instansi Lingkungan Hidup dan instansi terkait untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian IKLH serta respon terhadap peningkatan IKLH; 8) Penguatan Kelembagaan masyarakat dan Pengembangan Kearifan Lokal dalam pengelolaan lingkungan di Provinsi Gorontalo; 9) Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pelestarian Lingkungan; 10) Membangun keterpaduan dan kolaborasi antara seluruh stakeholders baik Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, dunia usaha dan masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan; 11) Melakukan pembinaan dan	lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) berupa fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha (Pemerintah dan swasta) dalam pelaksanaan persetujuan lingkungan di Provinsi Gorontalo; 6. Melalui program pengelolaan hutan kedepan akan difasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 7. Pada tahun depan telah diusulkan melalui program/kegiatan Hibah dari Kementerian LH dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) untuk Results-Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Result Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 dimana salah satu ruang lingkup kegiatan yang diusulkan adalah fasilitasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLAH).



		pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha (Pemerintah dan swasta) dalam pelaksanaan persetujuan lingkungan di Provinsi Gorontalo; 12) Penegakan hukum secara tegas dan terpadu 2. Tindak lanjut dalam Menurunkan jumlah titik api/hotspot yang berada diluar dan didalam kawasan hutan yaitu dengan : 1) Melibatkan unsur masyarakat peduli api terutama kejadian titik api didalam kawasan hutan dan lahan di Provinsi Gorontalo yang paling banyak menyumbang emisi karbon akibat pembukaan lahan dan hasil dari pemanenan limbah tanaman jagung; 2) Membuat peta kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai dasar dalam melakukan tindakan pencegahan dgn melakukan sosialisasi di lokasi yang rawan terjadinya karhutla;	



		3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian karhutla disetiap pemegang ijin pemanfaatan kawasan hutan; 4) Bekerjasama lintas sektor dalam penanganan bencana baik di provinsi ataupun daerah; 5) Pasca kejadian melakukan perhitungan luasan titik api sehingga dapat diketahui emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran atau gas karbondioksida yang dapat menaikkan emisi gas rumah kaca yg menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan udara.	
12	Potensi Pariwisata Pantai Minanga Pansus merekomendasikan perlunya stimulus dan keberpihakan kebijakan serta anggaran untuk sektor UMKM perlu diseriusi. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid bukan pada seminar, workshop dan agenda sejenis lainnya. tapi pada Political Will Daerah untuk memberdayakan sektor UMKM yang benar-benar kongkrit dan real untuk tumbuh kembangnya perekonomian daerah.	Adanya pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekraf (APBD) dan Pelatihan TOT Kepemanduan (TP) yang diikuti oleh perwakilan dari masing-masing Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Gorontalo Utara	Peningkatan kreativitas dan inovasi pelaku ekraf/UMKM di destinasi wisata sehingga dapat menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing



NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT OPD	MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Masalah SIPD RI Pansus mengkhawatirkan penggunaan tools keuangan berupa SIPD RI yang terpusat di Pusdatin Kemendagri akan mempengaruhi percepatan Realisasi penyerapan Anggaran yang muaranya akan menghambat capaian kinerja program kegiatan yang telah direncanakan. Dikhawatirkan akumulasi keterlambatan serapan anggaran akan membengkak dan diakhir tahun akan mepengaruhi capaian kinerja pemerintahan	Telah dilakukan koordinasi dengan Pusdatin Kemendagri untuk Optimalisasi Kinerja SIPD baik SIPD Perencanaan maupun Keuangan.	Implementasi SIPD secara tepat dan didukung oleh pelatihan bagi aparatur yang terlibat serta infrastruktur yang memadai akan mempermudah pemantauan dan administrasi yang lebih efisien, SIPD memungkinkan pemerintahan untuk lebih cepat dan akurat dalam mengelola anggaran serta melaksanakan program pembangunan yang sudah direncanakan.
2	Masalah Pendapatan Daerah Memperhatikan komposisi perbandingan dana Transfer dengan Pendapatan Asli Daerah 73 % : 27% menggambarkan ketergantungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap Dana Transfeer masih sangat dominan. Oleh sebab itu Pansus merekomendasikan perlu diupayakan kiat-kiat untuk menggali opsen pendapatan daerah dari sektor pajak mineral bukan logam dan bantuan atau dari sumber-sumber pendapatan lainnya. dan untuk memaksimalkan upaya pengelolaan pendapatan daerah tersebut, maka pansus merekomendasikan untuk segera dibentuk OPD baru yakni Dinas Pendapatan Daerah yang		• Komposisi PAD terhadap dana transfer sampai dengan tahun 20224 sebesar 27% : 73% terkait Rekomendasi Pansus LKPJ untuk menggali pendapatan daerah dari sector pajak mineral bukan logam akan diintensifkan. Hanya saja potensi pajak mineral bukan logam yang menjadi kewenangan kabupaten/kota masih sangat rendah. Sesuai pasal 83 UU HKPD tarif opsen pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan 25% dari besaran pajak MBLB terutang. • Terkait pembentukan perangkat daerah baru yang menangani pendapatan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada dasarnya mengikuti perundang-undangan yang mensyaratkan



	diharapkan OPD ini akan berkonsentrasi penuh terhadap pendapatan daerah		minimal skor yang harus dipenuhi untuk membentuk unit perangkat daerah baru. Pada 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk membentuk unit perangkat daerah baru.
3	Masalah Aset Memperhatikan kompleksitas permasalahan aset pemerintah Provinsi Gorontalo yang tidak selesai-selesai dari tahun ke tahu, maka pansus merekomendasikan perlunya Pemerintah Provinsi segera membentuk Pansus yang fokus menangani dan menyelesaikan permasalahan aset tersebut.		Telah dibentuk Pansus Khusus penanganan Aset tahun 2024 dengan menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh beberapa OPD terkait.
4	Stimulus dan Kebijakan Anggaran untuk Sektor UMKM Pansus merekomendasikan perlunya stimulus dan keberpihakan kebijakan serta anggaran untuk sektor UMKM perlu diseriusi. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid bukan pada seminar, workshop dan agenda sejenis lainnya. tapi pada Political Will Daerah untuk memberdayakan sektor UMKM yang benar-benar kongkrit dan real untuk tumbuh kembangnya perekonomian daerah.	Telah teranggarkan dalam DPA SKPD Program Pengembangan UMKM Dinas Koperasi UKM Industri dan Perdagangan	Ditahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo telah memprogramkan kegiatan Stimulan bantuan bagi UMKM berupa bahan produksi yang telah direalisasikan di tahun 2024 kepada 14.303 UMKM (@Rp.1.000.000,) dengan jumlah anggaran sebanyak RP.14.288.600,- melalui program pengembangan UKM.
5	Pemekaran OPD Dinas PUPR dan Penataan Ruang Pemukiman		



	Memperhatikan beban tubas dan beban organisasi yang diemban OPD Dinas PUPR, Penataan Ruang dan Pemukiman setelah digabungkan yang berimplikasi tidak maksimalnya setiap program yang dijalankan, maka pansus merekomendasikan perlu dipertimbangkan kembali untuk dimekarkan.		
6	Konsistensi Perencanaan Pelaksanaan dan Penganggaran Pansus merekomendasikan perlunya evaluasi kinerja terhadap konsistensi antara Perencanaan Pelaksanaan dan Penganggaran baik dalam rangka sinergitas pembangunan sektoral maupun pembangunan kewilayahan		Untuk menjaga konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran dilakukan langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi antara berbagai pihak. Dengan uraian sebagai berikut : 11. Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) berdasarkan visi dan misi yang jelas dan disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta. Rencana yang disusun harus selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, serta mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan pendekatan T-H-I-S (tematik, holistic, integrative, spasial). 12. Penyusunan anggaran dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta prioritas



		program pembangunan yang telah disepakati dalam perencanaan. 13. Menjamin transparansi anggaran melalui mekanisme yang jelas. 14. Menggunakan sistem SIPD untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian perencanaan dan penganggaran. 15. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap program pembangunan guna mengukur pencapaian dan efektivitas pelaksanaan. 16. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan, agar dapat menjalankan tugas secara profesional dan tepat waktu. 17. Mengimplementasikan sistem pengawasan internal yang baik, dengan memperkuat fungsi Inspektorat dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mencegah penyimpangan. 18. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran. 19. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan penyesuaian perencanaan atau anggaran jika ditemukan ketidaksesuaian atau kendala di lapangan.



			20. Koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan
7	Masalah Command Centre Berdasarkan rekomendasi pansus tahun lalu agar kehadiran command center dapat dimaksimalkan penggunaannya tapi kenyataannya sampai saat ini command centre tersebut belum ada upaya untuk memperbaiki bahkan menurut KPA belum dapat difungsikan. Oleh sebab itu Pansus merekomendasikan masalah ini segera diproses secara hukum guna memberikan punishment berupa efek jera terhadap penggunaan APBD.		- Command center belum bisa berfungsi secara optimal dikarenakan karena software belum tersedia. Dinas kominfo sudah mengusulkan anggaran software ditahun 2024 dan 2025 tetapi belum terakomodir. - Kedepan agar dinas kominfo statistik menyiapkan kajian teknis agar anggaran yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan sehingga command center bisa digunakan dan berfungsi optimal.
8	Proyek Jalan Iluta Pilolodaa Memperhatikan proyek jalan Iluta – Pilolodaa dengan total anggaran Rp. 35 Miliar dan saat ini telah putus kontrak, maka Pansus merekomendasikan agar tidak menggunakan dana DAK lagi untuk melanjutkan proyek jalan tersebut pada tahun 2024, karena tidak akan menyelesaikan pekerjaan jalan tersebut.	Bahwa untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Tenilo-Pilolodaa-Iluta pada TA.2024 ini telah dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sebelumnya dari Bidang terkait telah menyampaikan telaahan ke DPRD terkait rekomendasi dimaksud	Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Tenilo-Pilolodaa-Iluta, telah dilaksanakan dengan nilai kontrak Rp.6.933.595.000,- Pelaksana PT.TRI SANDI YUDHA (10 Juli s/d 31 Des 2024) Realisasi keuangan 95% dan Realisasi Fisik 100%
9	Kanal Tanggidaa Terhadap proyek kanal tanggidaa yang belum selesai, pansus merekomendasikan agar proyek ini segera diselesaikan dengan menggunakan dana Rp. 4,9 Miliar sisa pinjaman dari PEN.	Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa, benar telah menggunakan kembali sisa anggaran PEN sebesar Rp.4.953.775.093.-	Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa, telah dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp.4.946.672.287; pelaksana CV.Bone Tirta (1 Okt s/d 29 Des 2024). Realisasi Keuangan 100%, Realisasi Fisik 100%



10	Pendidikan Mengingat pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mempersiapkan masa depan peserta didik, maka terkait hal tersebut dalam rangka menuntaskan problematika pendidikan baik perbaikan infrastruktur, layanan dan mutu pendidikan, penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan secara merata dan profesional termasuk memastikan hak-hak sertifikasi guru yang belm terbayarkan sesuai ketentuan, maka pansus merekomendasikan perlunya penyelesaian berbagai permasalahan tersebut dengan pemenuhan berbagai syarat dan indeks pembelajaran yang harus dipenuhi.	Dikbud	Terkait Penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan secara merata dan profesional telah dilaksanakan melalui penempatan Guru PPPK yang dikukuhkan pada tahun 2023 sejumlah 880 orang. Sebagian guru PPPK dimaksud beroleh penempatan di daerah-daerah terpencil sehingga sebagian kebutuhan guru di daerah yang jauh dari perkotaan termasuk daerah khusus telah terpenuhi dan selanjutnya sertifikasi guru tahun 2023 telah disalurkan.
11	Sektor Lingkungan Hidup Pansus merekomendasikan pentingnya bagi setiap pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang terus menjaga alam dari berbagai potensi yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam yang mencakup pencemaran lingkungan kebakaran hutan dan pemanasan global, harus ada pemahaman bersama bahwa pencermaran udara, air dan tanah akan menyebabkan berkurangnya kualitas sumber daya alam dan berdampak pada	Tindak Lanjut : 6) Menjadikan lingkungan yang lestari sebagai Prioritas Utama Pembangunan di Provinsi Gorontalo; 7) Mensyaratkan semua Dokumen Perencanaan di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota wajib berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS), seperti dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD	Penyelesaian masalah: 8. Menjadikan lingkungan yang lestari sebagai Prioritas Utama Pembangunan di Provinsi Gorontalo yang akan dituangkan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo 2025-2029 dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan



kesehatan manusia secara permanen.	dan perencanaan yang sifatnya strategis lainnya); 8) Setiap rencana kegiatan yang akan dibangun di provinsi Gorontalo wajib memiliki dokumen kelayakan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL); 9) Membangun kesepakatan bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penetapan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10) Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib masuk dalam RPJPD maupun RPJMD; 11) Membangun dukungan dari Pemerintah Kab/Kota dalam peningkatan IKLH melalui Komunikasi dan koordinasi secara rutin antara pemerintah Provinsi dan Kab/Kota; 12) Melakukan Pertemuan rutin dengan Instansi	Kehutanan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029; 9. Mensyaratkan semua Dokumen Perencanaan baik di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota wajib berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS), seperti dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD dan perencanaan yang sifatnya strategis lainnya); 10. Setiap rencana kegiatan yang akan dibangun di provinsi Gorontalo wajib memiliki dokumen kelayakan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL); 11. Memasukannya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib masuk dalam RPJPD maupun RPJMD; 12. Kedepan melalui program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup akan difasilitasi berupa kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan di Provinsi Gorontalo serta program pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) berupa fasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha (Pemerintah dan



		Lingkungan Hidup dan instansi terkait untuk membahas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pencapaian IKLH serta respon terhadap peningkatan IKLH; 13) Penguatan Kelembagaan masyarakat dan Pengembangan Kearifan Lokal dalam pengelolaan lingkungan di Provinsi Gorontalo; 14) Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pelestarian Lingkungan; 15) Membangun keterpaduan dan kolaborasi antara seluruh stakeholders baik Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, dunia usaha dan masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan; 16) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha (Pemerintah dan swasta) dalam pelaksanaan persetujuan	swasta) dalam pelaksanaan persetujuan lingkungan di Provinsi Gorontalo; 13. Melalui program pengelolaan hutan kedepan akan difasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 14. Pada tahun depan telah diusulkan melalui program/kegiatan Hibah dari Kementerian LH dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) untuk Results-Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Result Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 dimana salah satu ruang lingkup kegiatan yang diusulkan adalah fasilitasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLAH).



		lingkungan di Provinsi Gorontalo; 17) Penegakan hukum secara tegas dan terpadu 3. Tindak lanjut dalam Menurunkan jumlah titik api/hotspot yang berada diluar dan didalam kawasan hutan yaitu dengan : 1) Melibatkan unsur masyarakat peduli api terutama kejadian titik api didalam kawasan hutan dan lahan di Provinsi Gorontalo yang paling banyak menyumbang emisi karbon akibat pembukaan lahan dan hasil dari pemanenan limbah tanaman jagung; 2) Membuat peta kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai dasar dalam melakukan tindakan pencegahan dgn melakukan sosialisasi di lokasi yang rawan terjadinya karhutla; 3) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian karhutla disetiap pemegang ijin pemanfaatan kawasan hutan;	



		4) Bekerjasama lintas sektor dalam penanganan bencana baik di provinsi ataupun daerah; 5) Pasca kejadian melakukan perhitungan luasan titik api sehingga dapat diketahui emisi yang dihasilkan dari proses pembakaran atau gas karbondioksida yang dapat menaikkan emisi gas rumah kaca yg menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan udara.	
12	Potensi Pariwisata Pantai Minanga Pansus merekomendasikan perlunya stimulus dan keberpihakan kebijakan serta anggaran untuk sektor UMKM perlu diseriusi. Pemulihan Ekonomi Pasca Covid bukan pada seminar, workshop dan agenda sejenis lainnya. tapi pada Political Will Daerah untuk memberdayakan sektor UMKM yang benar-benar kongkrit dan real untuk tumbuh kembangnya perekonomian daerah.	Adanya pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekraf (APBD) dan Pelatihan TOT Kepemanduan (TP) yang diikuti oleh perwakilan dari masing-masing Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Gorontalo Utara	Peningkatan kreativitas dan inovasi pelaku ekraf/UMKM di destinasi wisata sehingga dapat menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas dan berdaya saing



BAB IV

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Penugasan

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DI TUGAS PEMBANTUAN

4.1.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan dan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);



- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
- 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161);
- 13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024;
- 14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1238);

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Sebagaimana DIPA tahun anggaran 2023, terdapat 7 (Tujuh) Kementerian/Lembaga pemberi tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan total anggaran mencapai 57.556.288.000. Tahun 2024 beberapa K/L mengalami efisiensi yang berdampak pada pemotongan anggaran Tugas Pembantuan sebesar 2,61 % dari total Pagu Anggaran Tugas Pembantuan. Realisasi anggaran masing-masing satker dilaksanakan oleh instansi daerah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pagu dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

NO	NAMA BAGIAN ANGGARAN	KEWENANGAN	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU DIPA 2024	REALISASI (DES 2024)	%REALISASI	PENARIKAN
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	Tugas Pembantuan	319088	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	Rp 4.865.024.000	Rp 4.381.141.200	90,05%	Rp 308.378.000
2	KEMENTERIAN PERTANIAN	Tugas Pembantuan	319089	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	Rp 1.170.000.000	Rp 1.169.617.300	99,97%	Rp -
3	KEMENTERIAN PERTANIAN	Tugas Pembantuan	319090	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	Rp 4.744.646.000	Rp 4.380.802.036	92,33%	Rp 351.402.000
4	KEMENTERIAN PERTANIAN	Tugas Pembantuan	319091	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	Rp 2.323.552.000	Rp 2.089.507.638	89,93%	Rp 233.515.000
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	Tugas Pembantuan	319094	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	Rp 30.763.692.000	Rp 21.671.608.250	70,45%	Rp -
6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	Tugas Pembantuan	690772	DINAS KOPERASI , PERINDUSTRIAN	Rp 920.194.000	Rp 867.583.860	94,28%	Rp 25.718.000



NO	NAMA BAGIAN ANGGARAN	KEWENANGAN	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU DIPA 2024	REALISASI (DES 2024)	%REALISASI	PENARIKAN
				DAN PERDAGANGAN PROV. GORONTALO				
7	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tugas Pembantuan	319098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	Rp 525.749.000	Rp 354.627.800	67,45%	Rp 171.115.000
8	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tugas Pembantuan	319099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Rp 523.755.000	Rp 404.603.374	77,25%	Rp 117.625.000
9	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tugas Pembantuan	690954	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Rp 321.000.000	Rp 185.273.500	57,72%	Rp 135.707.000
10	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tugas Pembantuan	690999	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Rp 197.752.000	Rp 197.068.000	99,65%	Rp -
11	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tugas Pembantuan	691037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Rp 372.417.000	Rp 238.818.150	64,13%	Rp 133.425.000
12	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tugas Pembantuan	691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Rp 831.640.000	Rp 818.878.401	98,47%	Rp -
13	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Tugas Pembantuan	319150	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI GORONTALO	Rp 8.049.114.000	Rp 8.039.108.033	99,88%	Rp -
14	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Tugas Pembantuan	640023	DINAS PARIWISATA PROVINSI GORONTALO	Rp 1.330.000.000	Rp 1.326.943.606	99,77%	Rp -
15	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	Tugas Pembantuan	350413	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. GORONTALO	Rp 469.638.000	Rp 469.359.199	99,94%	Rp -
19	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	Tugas Pembantuan	319103	DINAS KOPERINDAG PROVINSI GORONTALO	Rp 148.115.000	Rp 122.313.700	82,58%	Rp 25.795.000
	TOTAL				57.556.288.000	46.717.254.047	86,49	1.502.680.000

Sumber ; Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah DJPB Provinsi Gorontalo

A. Urusan Pertanian (Dinas Pertanian)

1. Instansi/Lembaga Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Pertanian tahun 2024 mendapat anggaran dari Kementrian Pertanian untuk Tugas Pembantuan melalui Ditjen Tanaman Pangan (TP-03), Ditjen Hortikultura (TP-04), Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (TP-08), Ditjen Perkebunan (TP 05) dan Ditjen Peternakan (TP-06), yang ditetapkan dengan Surat Pengesahan DIPA sebagai berikut :

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2024 Nomor : SP DIPA -018.03.4.319088/2024
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2024 Nomor : SP DIPA -018.04.4.319089/2024



- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2024 Nomor : SP DIPA - 018.08.4.319094/2024
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2024 Nomor : SP DIPA -018.05.4.319090/2024
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA -018.06.4.319091/2024

2. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya

Tabel 4.2
 Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantuan (TP)
 Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
 Tahun 2024

NO	PROGRAM KEGIATAN	REALISASI TAHUN 2024		
		PAGU	KEGIATAN	PERSENTASE
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6.150.246.000	5.786.083.424	94,04
a.	Keg. Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	40.000.000	40.000.000	100
b.	Keg. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1.050.000.000	1.049.811.000	99,98
c.	Keg. Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma	890.280.000	882.030.000	99,07
d.	Keg. Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	1.745.000.000	1.592.500.000	91,26
e.	Keg. Pasca Panen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan	1.271.180.000	1.095.628.250	86,19
f.	Keg. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	778.786.000	751.243.786	96,46
g.	Keg. Pengembangan Pengolahan Pemasaran Hasil Ternak	375.000.000	374.870.388	99,97
2.	Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	36.161.722.000	26.894.081.370	74,37
a.	Keg. Pengolahan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	1.610.000.00	1.460.999.700	90,75
b.	Keg. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	2.648.000.000	2.621.495.500	99,00
c.	Keg. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	30.409.652.000	20.957.967.250	69,74
d.	Keg. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	245.000.000	244.940.000	99,98
e.	Keg. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	1.125.000.000	1.125.000.000	100,00
f.	Keg. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	484.070.000	483.678.920	99,92
3.	Program Dukungan Manajemen	1.321.431.000	1.012.511.630	76,62
a.	Keg. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	567.024.000	258.646.000	45,61
b.	Keg. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	120.000.000	119.806.300	99,84
c.	Keg. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Perkebunan	59.400.000	59.400.000	100,00
d.	Keg. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	469.040.000	468.701.000	99,93
e.	Keg. Dukungan dan Manajemen Teknis Lainnya pada Ditjen Peternakan	105.967.000	105.958.330	99,99
	Total	43.633.399.000	33.692.676.424	77,21

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2024

1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Output : Terlaksananya kegiatan pengawalan kegiatan PPHP 1 kegiatan dan monitoring evaluasi dan pelaporan
- Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Output : tersedianya 3 Unit Sarana Pengolahan dan Pascapanen + 3 Unit Bangsal Pascapanen, untuk 3 klpk pengolahan di Kab. Pohuwato (Pisang), Bone Bolango (Sirsak), dan Kab. Gorontalo (Pisang).
- Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma
Output : tersalurnya benih kelapa seluas 200 HA (Kawasan Kelapa)
- Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan
Output : tersalurnya bibit Kopi seluas 100 Ha (Kawasan Kopi)
- Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan
Output : Tersedianya Sarana Pengolahan Minyak Goreng Kelapa 1 Paket di Kab. Gorontalo, Unit Pengering (Solar Dryer) 1 Unit di Kab. Boalemo dan Prasarana bangunan UPH 1 Unit di Kab. Gtlo dan terlaksananya kegiatan Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan
- Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan
Output : Terlaksananya Fasilitas Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan 1 kegiatan , pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 44 ha (Upah pengelola Kebun benih Sumber, Pengadaan pupuk), Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul
- Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
Output : Terlaksananya penetapan muatan kapal ternak setiap voyage 1 kegiatan, Terbangunnya sarana houlding ground berupa instalasi air sebanyak 1 unit, Terbangunnya prasarana houlding ground berupa pagar 1 unit

2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

- Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tanaman Pangan
Output : tersalurnya benih Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) 1.000 Ha (Kawasan Padi)
- Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan
Output : Tersalurnya Bantuan Benih Padi Inbrida 2.000 Ha, Bantuan Kegiatan Mandiri Benih Padi Inbrida 40 Ha, Tersalurnya Bantuan Benih Jagung 2.000 Ha
- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Output : Terlaksananya vaksinasi PMK sebanyak 64.255 dosis dari target 45.000 dosis dengan persentase (142,79%)
- Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak
Output : Tersalurkannya Nitrogen Cair sebanyak 6.200 liter untuk kebutuhan Inseminasi Buatan kab/kota, Terlaksananya penandaan (pemasangan eartag) pada ternak sebanyak 5.861 ekor di kab/kota

- Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Pertanian
Output: Terlaksananya 4 Kegiatan Program UPLAND ke Petani penerima program, On Grating Officer, Fasdes dan Project Implementation Unit, Terpenuhinya Kebutuhan Air Sawah kekurangan Air melalui irigasi perpompaan sebanyak 124 unit dengan luas sasaran 1200 Ha - 2400 Ha, Terpenuhinya Kebutuhan Air Sawah kekurangan Air melalui irigasi perpipaan sebanyak 40 unit dengan luas sasaran 400 Ha - 800 Ha
- Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
Output: Terlaksananya Bimtek monitoring dan evaluasi lingkup alat dan mesin pertanian 1 keg, Keg. Fasilitas Pupuk dan Pestisida

3) Program Dukungan Manajemen

- Keg. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
Output: Terlaksananya 3 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
- Keg. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura
Output: Terlaksananya perencanaan dan penganggaran 12 layanan
- Keg. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
Output: Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebanyak 1 Dokumen.
 Keg. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Output: Layanan manajemen keuangan 1 dokumen
- Keg. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
Output: Terlaksananya Kegiatan layanan BMN sebanyak 4 layanan dan Layanan Perencanaan dan penganggaran sebanyak 6 dokumen

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Irigasi perpompaan di Prov sebanyak 10 unit dialokasi melalui Anggaran Biaya Tambah (ABT) pada Triwulan III 2024 untuk memenuhi kebutuhan irigasi perpompaan diseluruh Kab, jika alokasi yang diberikan sebelumnya tidak dapat memenuhi kebutuhan Kabupaten. Anggaran tersebut tidak terserap oleh Dinas Pertanian Kabupaten karena tidak tersedia cukup waktu untuk menentukan lokasi yang memenuhi syarat teknis, sebagaimana yang termuat dalam Juknis Kegiatan Irigasi Perpompaan dari Kementerian Pertanian.
- Irigasi perpipaan di Kab. Gorontalo sebanyak 92 unit dialokasi melalui Anggaran Biaya Tambah (ABT) pada Triwulan III 2024. Alokasi irigasi perpipaan tersebut tidak dapat diserap disebabkan waktu yang tersedia untuk menentukan lokasi yang memenuhi syarat teknis tidak cukup. Sehubungan dengan itu maka telah di sampaikan ke Pusat terkait anggaran yang dapat di serap. yaitu Irigasi perpompaan dari 134 Unit yang di laksanakan 124 Unit dan Irigasi Perpipaan dari 120 Unit yang di laksanakan 40 Unit.



Solusi :

Telah dikoordinasikan dan didiskusikan dengan Dinas Pertanian Kab. Gorontalo dan Distan Kab yang lainnya terkait irigasi perpipaan yang masih banyak yang belum terserap, untuk dicarikan lokasi yang memenuhi syarat teknis, namun sampai pada batas waktu yang telah disepakati, Distan Kabupaten belum memperoleh lokasi yang memenuhi syarat maka pada tanggal, 10 Oktober 2024 Distan Provinsi menyurat ke pusat dengan nomor surat: 500.6.5/Distan-PSP/X/2024, perihal Revisi POK terkait adanya kegiatan irigasi perpompaan dan perpipaan yang tidak dapat diserap

B. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

B.1 Urusan Perindustrian (Kementerian Perindustrian)

1. Instansi / Lembaga Pemberi Tugas

Tahun 2024 Provinsi Gorontalo memperoleh alokasi Tugas Pembantuan dari Kementerian Perindustrian yang ditetapkan melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 Nomor 019.05.3-690772/2023 tanggal 24 November 2023.

2. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya

Tabel 4.3
Program Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan
Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
(Urusan Perindustrian)

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Realisasi (%)
1.	PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI	835.316.000	823.273.860	12.042.140	98,56
	Keg. Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kecil, Menengah, Dan Aneka	835.316.000	823.273.860	12.042.140	98,56
	Fasilitasi Dan Pembinaan Industri				
a.	Wirausaha Industri yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Dan Teknis Produksi Melalui Dana	439.535.000	433.601.452	5.933.548	98,65
	Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Pendampingan Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	180.048.000	180.048.000	-	100
	- Pelatihan IKM Pakaian Jadi di Kota Gorontalo	49.030.000	49.030.000	-	100
	- Pelatihan Pembuatan Pupuk Cair dari Air Kelapa Di Kabupaten Pohuwato	63.620.000	63.620.000	-	100
	- Pelatihan Bagi Mekanik IKM Bengkel Motor di Kota Gorontalo	52.548.000	52.548.000	-	100
	- Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Bagi IKM di Kab/Kota	14.850.000	14.850.000	-	100
	Sinergitas Pembinaan Industri Melalui Tugas Pembantuan	259.487.000	253.553.452	5.933.548	97,71



No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Realisasi (%)
	- Administrasi Kegiatan	50.420.000	49.912.842	507.158	98,99
	- Rakornas Penyusunan Program PIKM Tahun 2025	16.926.000	16.926.000	-	100
	- Rakornas Pengelolaan DIPA Tahun 2024	20.438.000	20.437.120	880	100
	- Pemantapan Bagan Akun Standar dan Sistem Penganggaran pada Aplikasi SAKTI	7.659.000	7.658.680	320	100
	- Penyusunan Pagu Definitif	19.662.000	19.662.000	-	100
	- Laporan Keuangan I	5.910.000	5.908.980	1.020	99,98
	- Laporan Keuangan 2	7.186.000	5.689.380	1.496.620	79,17
	- Workshop Pembayaran Melalui Aplikasi Digipay	6.641.000	6.641.000	-	100
	- Bimbingan Teknis BMN di Bandung	6.797.000	6.796.280	720	99,99
	- Bimtek Administrasi Keuangan	7.184.000	7.183.500	500	99,99
	- Bimtek Kegiatan Laporan Akhir Tahun Jawa Timur	12.926.000	12.323.360	602.640	95,34
	- Sosialisasi Monev (Online)	6.521.000	6.521.000	-	100
	- Rekonsiliasi Data 1	24.192.000	21.470.430	2.721.570	88,75
	- Penyusunan Program Kegiatan Tugas Pembantuan 2025 Jawa Barat	12.840.000	12.807.360	32.640	99,75
	- Koordinasi Pusat	14.075.000	13.506.960	568.040	95,96
	- Partisipasi Promosi Unggulan IKM di Jakarta	40.110.000	40.108.560	1.440	100
b.	IKM yang Mendapatkan Pendampingan, Penerapan Sertifikasi Dan Pengembangan Produk Melalui Tugas Pembantuan	182.827.000	182.427.000	400.000	99,78
	Sub Keg. Pengembangan Produk Melalui Diversifikasi, Pendaftaran HKI/Merek, Desain Kemasan dan Fasilitasi dalam rangka Ovop	182.827.000	182.427.000	400.000	99,78
	- Diversifikasi Produk Pangan dari Pisang di Kab. Gorontalo	86.663.000	86.663.000	-	100
	- Dalam Rangka Pembinaan OVOP Di Kabupaten/Kota	26.998.000	26.998.000	-	100
	- Pelatihan Pengembangan IKM Furniture di Provinsi Gorontalo	47.406.000	47.406.000	-	100
	- Sosialisasi Penerapan TKDN di Provinsi Gorontalo	21.760.000	21.360.000	400.000	98,16
c.	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	212.954.000	207.245.408	5.708.592	97,32
	Layanan Pemberdayaan Penyuluh (Unit Pendampingan Langsung (UPL)) Melalui Tugas Pembantuan	212.954.000	207.245.408	5.708.592	97,32
	- Dalam Rangka Pembinaan IKM Oleh UPL	78.362.000	78.212.000	150.000	99,81



No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Realisasi (%)
	- FGD Pendataan IKM dan SIINAS di Kota Gorontalo	34.106.000	29.195.368	4.910.632	85,60
	- Sosialisasi dan Bimbingan Pendataan IKM Kepada Industri Kecil	34.356.000	33.859.280	496.720	98,55
	- Partisipasi dan Optimalisasi Pendataan Industri Kecil Melalui SIINAS	11.500.000	11.498.760	1.240	99,99
	- Pelatihan Desain Kemasan Produk IKM di Kota Gorontalo	42.780.000	42.780.000	-	100
	- Kunjungan Lapangan Untuk Sampling dan Verifikasi Pendataan Sentra DAK BPS	11.850.000	11.700.000	150.000	98,73
2.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90
	- <i>Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Industri Kecil Menengah dan Aneka</i>	<i>59.160.000</i>	<i>44.310.000</i>	<i>14.850.000</i>	<i>74,90</i>
	- <i>Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]</i>	<i>59.160.000</i>	<i>44.310.000</i>	<i>14.850.000</i>	<i>74,90</i>
a.	Layanan Perkantoran	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90
	- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90
	- Honorarium Pengelola DIPA	59.160.000	44.310.000	14.850.000	74,90
	TOTAL BELANJA	894.476.000	867.583.860	26.892.140	96,99

3. Permasalahan dan solusi

Untuk mengatasi kendala dalam pembinaan dan pendampingan terhadap industri kecil menengah (IKM) berikut beberapa saran dan tindak lanjut yang dapat dilakukan :

1. Meningkatkan Akses Terhadap Modal

- Saran : Pemerintah dan lembaga keuangan perlu menyediakan skema pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh IKM, dengan bunga yang terjangkau dan tanpa jaminan yang memberatkan. Selain itu, program bantuan modal usaha berbasis hibah atau pinjaman lunak untuk IKM perlu diperluas.
- Tindak Lanjut : Menyusun skema pembiayaan khusus untuk IKM, serta memberikan pelatihan kepada pelaku IKM mengenai cara mengakses pembiayaan, termasuk penggunaan sistem digital untuk memudahkan pengajuan kredit.

2. Pelatihan Keterampilan Manajerial dan Bisnis

- Saran : Program pelatihan manajerial yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dapat membantu pelaku IKM dalam meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan usaha, pemasaran dan pengelolaan keuangan.
- Tindak Lanjut : Menyelenggarakan pelatihan rutin yang berfokus pada peningkatan keterampilan bisnis dasar, seperti manajemen keuangan, pemasaran digital dan pengelolaan SDM. Pelatihan ini harus mudah di akses dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap jenis usaha.

3. Peningkatan Akses ke Pasar

- Saran : Menyediakan akses pasar yang lebih luas melalui pengembangan platform digital, serta mendorong kerjasama antara IKM dengan pelaku industri besar atau sektor swasta.
- Tindak lanjut : Membentuk jejaring pasar melalui pameran, bazar atau marketplace online yang memfasilitasi produk IKM. Selain itu, pemerintah dapat memberikan pelatihan tentang pemasaran digital dan e-commerce untuk membantu IKM memasarkan produk mereka secara efektif.

4. Penerapan Teknologi dan Inovasi

- Saran : Memberikan insentif bagi IKM yang berinvestasi dalam teknologi baru dan proses inovasi. Juga penting untuk menyediakan pelatihan tentang penerapan teknologi yang tepat guna di sektor IKM.
- Tindak lanjut : Melakukan penyuluhan dan pendampingan dalam penggunaan teknologi, seperti mesin produksi modern, perangkat lunak manajemen usaha dan teknologi digital untuk pemasaran. Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk subsidi teknologi bagi IKM.

5. Simplifikasi Regulasi dan Perizinan

- Saran : Pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan usaha dan memberikan panduan yang jelas tentang regulasi yang berlaku bagi IKM, serta membentuk sistem layanan terpadu untuk mempermudah akses informasi.
- Tindak lanjut : Membentuk pusat pelayanan satu atap untuk memfasilitasi IKM dalam memperoleh izin usaha dan memenuhi regulasi yang ada. Pemerintah juga perlu menyusun kebijakan yang lebih ramah bagi IKM, termasuk kemudahan dalam pengurusan izin dan pajak.

6. Meningkatkan Pendampingan dan Mentoring

- Saran : Program pendampingan yang lebih berfokus dan berkelanjutan dapat membantu IKM dalam menghadapi tantangan bisnis. Mentor yang memiliki pengalaman praktis sangat dibutuhkan.
- Tindak Lanjut : Meningkatkan jumlah pendamping atau mentor yang ahli dalam bidang IKM. Pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik IKM dan dilakukan secara berkala, serta memastikan mentor memberikan solusi praktis yang bisa langsung diterapkan oleh pelaku usaha.

7. Peningkatan Infrastruktur

- Saran : Pemerintah harus memperhatikan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan IKM, seperti jalan, listrik, air dan teknologi informasi.
- Tindak lanjut : Melakukan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor IKM, seperti akses transportasi yang lebih baik dan ketersediaan internet yang cepat dan murah. Pembangunan ini dapat dilakukan secara bertahap, dimulai dari daerah dengan konsentrasi IKM yang tinggi.



8. Kolaborasi Antar Pihak
- Saran : Kolaborasi antara pemerinath, sektor swasta, lembaga keuangan, dan komunitas IKM harus ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan IKM.
 - Tindak lanjut : Membentuk forum atau wadah kolaborasi yang melibatkan semua pihak terkait untuk saling berbagi informasi, pengalaman dan sumber daya dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh IKM.

B.2 Urusan Perdagangan (Kementerian Perdagangan)

4.2.1 Instansi/Lembaga Pemberi Tugas Pembantuan

Provinsi Gorontalo memperoleh alokasi anggaran Tugas Pembantuan oleh Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang ditetapkan melalui SK (DIPA) Satker Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Nomor:SP DIPA-090.02.3.319103/2024

4.2.2 Program Kegiatan

Tabel 4.4
Program Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pembantuan
Satker Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
(Urusan Perdagangan) Tahun 2024

KODE	URAIAN	BELANJA			KET
		ANGGARAN	REALISASI	%	
319059	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah				
	Tugas Pembantuan	148.115.000			Anggaran Awal
1	Fasilitasi Pasar Murah	25.795.000			
2	Pelatihan Pelaporan distribusi Barang Pokok dan Penting (Bapokting)	20.200.000	-	-	
3	Perlindungan Konsumen di Daerah	102.120.000	-	-	
	Tugas Pembantuan	122.320.000	122.313.700	99,99	Anggaran Perubahan
1	Pelatihan Pelaporan distribusi Barang Pokok dan Penting (Bapokting)	20.200.000	20.195.000	99.98	
2	Perlindungan Konsumen di Daerah	102.120.000	102.118.700	99.99	

1) Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah

Salah satu upaya untuk menjaga agar masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau, pada momen hari besar keagamaan adalah melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan pasar murah diharapkan dapat mendekatkan pelaku usaha kepada konsumen sehingga proses distribusi dapat dipersingkat dan lebih efisien.

Pada kegiatan ini pagu anggaran kegiatan fasilitasi pasar murah yaitu Rp. 25.795.000,- tidak dapat direalisasikan karna mendapatkan blokir Automatic Adjustment (AA) oleh Kementerian Keuangan hingga akhir tahun.

2) Pelatihan Pelaporan Distribusi Barang Pokok dan Penting (Bapokting)

Kegiatan Pelatihan yang akan dilaksanakan saat ini merupakan amanat Pasal 25 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengatur bahwa pendistribusian barang kebutuhan pokok dan barang penting, hanya dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha yang terdaftar.

Melalui kegiatan ini, pelaku usaha yang terdaftar diberikan pemahaman tentang cara pelaporan kegiatan distribusi Bapokting, dan harapannya kedepan kewajiban pelaporan ini akan rutin dilaksanakan oleh pelaku usaha setiap bulannya. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 20.200.000,- dengan realisasi senilai Rp. 20.195.000,- atau 99.98%.

3) Perlindungan Konsumen di Daerah

Kegiatan Perlindungan Konsumen bertujuan agar konsumen sadar dan paham akan perlindungan konsumen sehingga konsumen dapat melindungi diri, keluarga dan masyarakat sekitarnya agar terhindar dari akses-akses negatif terhadap penggunaan/pemanfaatan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo selang tahun 2024 antara lain adalah Edukasi terkait Perlindungan Konsumen (Hari Konsumen Nasional), Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Tertib Niaga), dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, yang dimaksudkan dalam rangka melindungi industri dan pasar dalam negeri khususnya di provinsi Gorontalo, serta melindungi konsumen dan kegiatan perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk diantaranya memberikan kepastian hukum atas kegiatan perdagangan dalam meningkatkan kepatuhan hukum terkait tertib niaga bidang perdagangan, dan yang terakhir mewujudkan iklim usaha yang sehat.

Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 102.120.000,- dengan realisasi Rp. 102.118.700,- atau 99.99 %.

4.2.3 Permasalahan dan Solusi

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan baik bersumber dari Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan, memiliki beberapa permasalahan antara lain :

- a. Waktu pelaksanaan kegiatan yang sudah memasuki semester 2(dua) tahun anggaran berjalan, bahkan ada yang baru bisa direalisasikan pada triwulan 4(empat), yang disebabkan regulasi terkait Petunjuk Teknis (Juknis) yang baru diterbitkan pada bulan Juli Tahun 2024, ditambah dengan waktu pemrosesan kelengkapan administrasi keuangan yang berlarut-larut, sehingga berakibat pada molornya jadwal pelaksanaan kegiatan;
- b. Adanya regulasi yang mengatur pembayaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, hanya dapat diberikan/dibayarkan sebesar 60%(enam puluh persen) dari besaran Honorarium yang tersedia/tercantum dalam RKA-KL, sehingga untuk sisa 40% (empat puluh

persen) harus dikembalikan ke negara, dan hal itu yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak dapat terealisasi seutuhnya.

- c. Keterbatasan anggaran APBN yang dialokasikan pada tahun 2024 yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan kegiatan, termasuk pada monitoring dan evaluasinya.

Tindak Lanjut, yaitu Mengoptimalkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun dan tentunya tetap berpatokan pada petunjuk teknis (JUKNIS) yang berlaku.

C. Urusan Perikanan dan Kelautan (Dinas Perikanan dan Kelautan)

4.2.1 Instansi / Lembaga Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi / Lembaga Pemberi Tugas Pembantuan meliputi :

- a) Sekretariat Jenderal (310046)
- b) Ditjen Perikanan Tangkap (319031)
- c) Ditjen Perikanan Budidaya (319032)
- d) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (319033)
- e) Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (319034)
- f) Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (319035)

4.2.2 Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya

Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya antara lain :

- a) Program Dukungan Manajemen
 - Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN
 - Pengelolaan Data dan Informasi
- b) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawasan Kapal Perikanan
 - Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan
 - Pengelolaan Sumber Daya Ikan
 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap
- c) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
 - Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan
- d) Program Dukungan Manajemen
 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya
- e) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan

Program Dukungan Manajemen

 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- f) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
- g) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan



- Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan
- Perencanaan Ruang Laut

h) Program Dukungan Manajemen

- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan alokasi dana APBN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.5

Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantuan
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

NO.	KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			FISI K (%)	KEUANGAN (Rp)	KEUANG AN (%)
1	Program Dukungan Manajemen	185.293.000	100	185.273.500	99,99
	- Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN	185.293.000	100	185.273.500	99,99
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	354.634.000	100	54.627.800	100
	- Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	26.825.000			
	- Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	53.340.000			
	- Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	95.951.000			
	- Pengelolaan Sumber Daya Ikan	33.318.000			
	- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	145.200.000			
3	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	406.130.000	100	404.603.374	99,62
	- Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	259.353.000			
	- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	146.777.000			
4	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	197.752.000	100	197.068.000	99,65
	- Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	86.600.000			
	- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	111.152.000			
5	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	238.992.000	100	238.818.150	99,93
	- Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	48.399.000			
	- Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	30.000.000			
	- Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	160.593.000			
6	Program Kualitas Lingkungan Hidup	831.640.000		820.416.921	98,65
	- Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	330.000.000			
	- Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	300.000.000			
	- Perencanaan Ruang Laut	100.000.000			



NO.	KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
				FISI K (%)	KEUANGAN (Rp)	KEUANG AN (%)
	-	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	101.640.000			
J U M L A H			2.214.441.000	100	2.200.807.745	99,38

➤ **Permasalahan dan Solusi**

Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a) Adanya perubahan tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan sehingga satker daerah mengalami perubahan dari satker dekonsentrasi menjadi satker tugas pembantuan akibatnya satker daerah harus melakukan proses pembukaan satker baru dan penutupan satker lama yang prosesnya memerlukan waktu sampai bulan mei 2024 sehingga efektifnya pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Mei 2024.
- b) Terdapatnya *automatic adjustment* (AA) atau pemblokiran anggaran pada DIPA seluruh satker lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo tahun 2024 sehingga menyebabkan penyerapan anggaran tidak maksimal.
- c) Banyaknya perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi pada aplikasi tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu.

D. Urusan Pekerjaan Umum (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)

4.2.1 Program dan Kegiatan

Program Kegiatan SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo sesuai DIPA TA. 2024 Nomor DIPA-033.04.4.319150/2024 adalah sebagai berikut:

Program	Program Peyelenggaraan Jalan	
Sasaran Program	1.	Program Infrastruktur Konektivitas
	2.	Program Dukungan Manajemen
Kegiatan	1.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
	2.	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
Sasaran Kegiatan	1.	Dukungan Teknis
	2.	Prasarana Bidang Konektifitas Darat (Jalan)
	3.	Prasarana Bidang Konektifitas Darat (Jembatan)
		Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
Output Kegiatan	1.	Dukungan Teknis 1 Dokumen
	2.	Prasarana Bidang Konektifitas Darat (Jalan) 87,4 KM
		Prasarana Bidang Konektifitas Darat (Jembatan) 374,2 M
	3.	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga 1Layanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo melaksanakan pekerjaan dari Kementerian Pekerjaan Umum, melalui dana Tugas Pembantuan tahun 2024 sebagai berikut :



Tabel 4.6
Realisasi Fisik dan Keuangan Tugas Pembantuan (TP) Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Urusan
Pekerjaan Umum)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	
			(%)	(Rp.)	%
1	Program Infrastruktur Konektivitas	7.514.606.000	100,00	7.512.710.000	99,97
2	Program Dukungan Manajemen (Urusan Pekerjaan Umum) Bina Marga	534.508.000	100,00	526.398.000	98,48
TOTAL		8.049.114.000	100,00	8.039.108.000	99,88

Tabel 4.7
Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Dana Tugas Pembantuan (TP)
Di SKPD – TP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1.	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	7.514.606.000	7.512.710.000	100,00
	- Dukungan Teknis	120.000.000	120.000.000	100,00
	- Preservasi Jalan Ruas Randangan - Desa Talu Diti	5.012.195.000	5.010.535.000	99,97
	- Preservasi Jalan Ruas Lemito - Molosipat (Bts. Prov. Sulteng)	2.382.411.000	2.382.175.000	99,99
2.	Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	534.508.000	526.398.000	98,48
	- Layanan Umum	416.508.000	416.508.000	100,00
	- Layanan Perkantoran	118.000.000	109.890.000	93,13

Program penyelenggaraan Jalan

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

- 1. Terlaksananya Panjang Jalan yang mendapatkan Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan.
- 2. Terlaksananya Jalan Nasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin Jalan
- 3. Terlaksananya Panjang Jembatan yang mendapatkan Pemeliharaan Rutin Jembatan
- 4. Terlaksananya Jumlah Bulan Layanan Dukungan Manajemen Satker.

4.2.2 Permasalahan Dan Solusi

Adapun permasalahan yang sering ditemui dalam pelaksanaan tugas pembantuan, antara lain :

1. Kondisi cuaca yang susah diprediksi dan curah hujan sangat tinggi, mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan konstruksi aspal maupun pekerjaan beton terhambat sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan.
2. Adanya penyesuaian volume pekerjaan terhadap kondisi di lapangan.
3. Jaringan telekomunikasi berupa sinyal yang masih belum memadai terutama di lokasi pekerjaan di lapangan sehingga menghambat komunikasi saat bekerja.
4. Kurang adanya kesadaran dari penyedia jasa dalam menjaga produktifitas alat, Apabila ada alat yang mengalami kerusakan, tidak ada alat cadangan untuk meng- back-up alat yang rusak tersebut.

Adapun Solusi yang dilakukan oleh SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo dalam upaya menangani masalah yang timbul selama pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Memacu, mengawal, dan monitoring pengendalian setiap proses tahapan -tahapan pelaksanaan kegiatan antara lain dengan membuat rencana jadwal percepatan.
2. Mendorong Penyedia jasa untuk meningkatkan stock persediaan sesuai dengan kebutuhan proyek.
3. Menambah Jumlah Peralatan dan Tenaga Kerja (pemberlakuan 2 shif waktu kerja).
4. Mempertimbangkan kondisi cuaca terhadap trend musim yang sering terjadi dan memaksimalkan Pekerjaan disaat cuaca sedang dalam kondisi baik.
5. Selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan pemerintah desa setempat untuk pelaksanaan pekerjaan malam mengingat arus lalu lintas di lokasi ini cukup padat.

E. Urusan Pariwisata (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

1. Instansi/Lembaga Pemberi TP

Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerima pelimpahan wewenang pengelolaan Tugas Pembantuan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

2. Program dan Kegiatan yang diterima serta Pelaksanaannya

Sasaran dari Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif yang diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo meliputi :

a. Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :

1. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
2. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;
3. Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata;
4. Kegiatan Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events);



- b. Program Dukungan Manajemen yang merupakan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan.

Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.8
Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantuan
Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

No	Program Kegiatan		Realisasi Tahun 2024		
			Pagu (Rp)	Keuangan (Rp)	Persentase (%)
1	Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	1	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	200,000,000	197,195,906	98.60%
	2	Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	200,000,000	196,812,410	98.41%
	3	Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	300,000,000	298,319,980	99.44%
	4	Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)	500,000,000	499,707,100	99.94%
2	Dukungan Manajemen				
	1	Pengembangan Perencanaan dan Keuangan	130,000,000	124,965,610	96.13%
Total Pagu Program			1,330,000,000	1,317,001,006	99.02%

1) Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

a) *Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata*

Output : Pelatihan bagi pelatih kependuan wisata berbasis kompetensi Tahun 2024

Tujuan dari pelaksanaan Pelatihan adalah untuk :

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peserta dalam bidang kependuan wisata, khususnya mengenai standar kompetensi pemandu wisata.
- Membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merancang dan melaksanakan pelatihan kependuan wisata yang efektif dan efisien
- Membentuk para peserta menjadi trainer yang kompeten dan mampu mentransfer ilmu dan keterampilan kependuan wisata kepada calon pemandu wisata.
- Meningkatkan kualitas pemandu wisata di provinsi gorontalo, sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas kepada wisatawan.

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah berasal dari pemandu wisata berjumlah 25 orang yang terdiri dari himpunan/organisasi kependuan dari HPI, PGWI dan IPMI

b) *Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*

Output : Pelaksanaan kegiatannya adalah Bimbingan Teknis Penyusunan Proposal dan Presentasi Bisnis Ekonomi Kreatif (PASTI EKRAF).

Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penyusunan proposal bisnis serta mengembangkan kemampuan presentasi yang efektif untuk menarik minat investor atau pemberi dana

yang sasaran kegiatan ini berasal dari pelaku ekonomi kreatif berjumlah 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari sub sektor fesyen, kuliner dan kriya.

Adapun Materi pelatihannya meliputi tentang bagaimana cara pembuatan konten untuk branding yang akan di pasarkan lewat storytelling untuk menarik investor serta materi manajemen produk dan bisnis usaha ekonomi kreatif.

c) Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

Output :

a. Bimbingan Teknis Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata Berbasis Data

Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku wisata di daerah dalam peningkatan pelayanan wisata dan manajemen Pariwisata guna memperluas skala industri pariwisata dengan platform informasi real time, mengintegrasikan penyedia jasa pariwisata dan peran masyarakat local, Adapun Sasaran kegiatan ini adalah unsur pelaku industri pariwisata dan pengelola sektor pariwisata berjumlah 40 (empat puluh) orang peserta yang terdiri dari : Pengelola daya tarik wisata, Pengelola Desa Wisata (ADWI); dan Unsur Pelaku ekonomi Kreatif

b. Workshop Pemahaman dan Pengisian Data Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Gorontalo

Workshop ini bertujuan meningkatnya pemahaman tentang indikator dan tata cara pengisian data pariwisata dan ekonomi kreatif dalam sistem informasi kepariwisataan nasional, adapun sasaran dari kegiatan ini adalah berasal dari unsur tim surveyor, penanggung jawab pengelola website dan instansi terkait di tingkat Provinsi dan administrator data dari Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota yang secara keseluruhan berjumlah 40 (empat puluh) orang

d) Kegiatan Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)

Output : Pendukung Event Daerah antara lain :

- Whale Shark Gorontalo Festival 2024
- Dukungan Festival Green Tumbilotohe
- Hulonthalo Art and Creative Festival 2024
- Gorontalo Maleos Festival 2024

F. Urusan Transmigrasi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)

1. Instansi/Lembaga Pemberi Tugas Pembantuan

Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi RI



2. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya

Tabel 4.9
Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Tugas Pembantuan
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2024		
		Pagu (Rp)	Keuangan (Rp)	Persentase (%)
1.	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	469.638.000	469.359.199	99,94
	- Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	419.942.000	419.773.599	99,96
	- Kegiatan Dukungan Manajemen Ess I Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	49.696.000	49.585.600	99,78

Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 469.638.000, telah terealisasi sebesar Rp. 469.359.199 atau 99,94%, dengan rincian kegiatan sebagaimana berikut :

- a) Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 419.942.000, telah terealisasi sebesar Rp. 419.773.599 atau 99,96%.
Output kegiatan meliputi :
 - 1. Rapat Pengembangan Usaha SP Bina Tahun 2024
 - 2. Pemberian Bantuan Obat-obatan di 2 (dua) Lokasi yaitu Kimtrans Sandalan Kec. Taluditi Kab. Pohuwato dan Kimtrans Pangea SP 3 Kec. Wonosari Kab. Boalemo
 - 3. Rehab/Peningkatan Jembatan di Kimtrans Sandalan Kec. Taluditi Kab. Pohuwato sepanjang 4 meter
 - 4. Rapat koordinasi dan konsultasi percepatan penyelesaian SHM Transmigrasi
- b) Kegiatan Dukungan Manajemen Ess I Dirjen PPKTrans
Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.696.000, telah terealisasi sebesar Rp. 49.585.600 atau 99,78%.
Output kegiatan ini adalah :
 - Kebutuhan operasional untuk penunjang kegiatan PPKTrans dapat terpenuhi semua.
 - Terlaksananya kegiatan monitoring, pengendalian dan pelaporan kegiatan pendistribusian terhadap pengadaan barang dan jasa untuk warga transmigrasi.

3. Permasalahan dan Tindaklanjut

- **Permasalahan**
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dikarenakan kondisi medan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat sehingga banyak pihak ketiga yang mengundurkan diri dengan alasan tingginya biaya mobilisasi

- **Tindaklanjut**

Mengajukan usulan rehab/peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan menuju Lokasi transmigrasi

4.1.3 Identifikasi Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada Tingkatan pemerintahan di bawahnya.

Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memberikan Tugas Pembantuan kepada Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Gorontalo

4.2 DEKONSENTRASI

4.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan dekonsentrasi

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
- f) Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- g) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
- h) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024.
- i) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161);
- j) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2024;
- k) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.4.3-526 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 tanggal 27 November 2023.

l)



Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh alokasi Dekonsentrasi sebesar Rp. 23.494.035.000, dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 22.241.271.142 atau mencapai 96,18 %, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.10
Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Kementerian/Lembaga
Di Provinsi Gorontalo Tahun 2024

NO	NAMA BAGIAN ANGGARAN	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU DIPA 2024	REALISASI (DES 2024)	%REALISASI	BLOKIR
1.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	319061	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI GORONTALO	Rp 977.252.000	Rp 976.490.000	99,92%	Rp -
2.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	433349	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo	Rp 82.427.000	Rp 82.078.980	99,58%	Rp -
3.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	484187	BAPPEDA PROVINSI GORONTALO	Rp 135.697.000	Rp 135.670.109	99,98%	Rp -
4.	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	484188	INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO	Rp 56.211.000	Rp 56.155.000	99,90%	Rp -
5.	KEMENTERIAN PERTANIAN	319002	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	Rp 384.125.000	Rp 383.792.900	99,91%	Rp -
6.	KEMENTERIAN PERTANIAN	319004	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	100,00%	Rp -
7.	KEMENTERIAN PERTANIAN	319055	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	Rp 1.695.320.000	Rp 1.680.540.000	99,13%	Rp 11.500.000
8.	KEMENTERIAN PERTANIAN	319057	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	Rp 706.100.000	Rp 706.010.000	99,99%	Rp -
9.	KEMENTERIAN PERTANIAN	403455	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	Rp 2.804.354.000	Rp 2.776.123.134	98,99%	Rp 9.030.000
10.	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	319144	DINAS KOPERASI , PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. GORONTALO	Rp -	Rp -	-	Rp -
11.	KEMENTERIAN KESEHATAN	310013	DINAS KESEHATAN PROVINSI GORONTALO	Rp 6.430.822.000	Rp 5.807.402.897	90,31%	Rp 262.910.000
12.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	319014	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	Rp 309.460.000	Rp 235.642.000	76,15%	Rp 73.810.000
13.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	319017	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	Rp 308.608.000	Rp 308.547.100	99,98%	Rp -
14.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	319018	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO	Rp 2.157.690.000	Rp 2.157.682.620	100,00%	Rp -
15.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	319056	DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN	Rp 318.021.000	Rp 317.627.112	99,88%	Rp -



NO	NAMA BAGIAN ANGGARAN	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU DIPA 2024	REALISASI (DES 2024)	%REALISASI	BLOKIR
			TRANSMIGRASI PROVINSI GORONTALO				
16.	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	310055	DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO	Rp 1.422.206.000	Rp 952.469.760	66,97%	Rp 465.447.000
17.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS	310060	Bappeda Provinsi Gorontalo	Rp 982.511.000	Rp 966.535.447	98,37%	Rp -
18.	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	310067	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI GORONTALO	Rp 262.643.000	Rp 261.822.251	99,69%	Rp -
19.	KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	310090	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI GORONTALO	Rp 230.369.000	Rp 229.121.879	99,46%	Rp -
20.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	319024	DINAS KOPERINDAG PROVINSI GORONTALO	Rp 84.950.000	Rp 79.252.327	93,29%	Rp -
21.	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	319059	DINAS KOPERINDAG PROVINSI GORONTALO	Rp 110.870.000	Rp 105.313.352	94,99%	Rp -
22.	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	310052	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI GORONTALO	Rp 1.312.200.000	Rp 1.312.069.730	99,99%	Rp -
23.	BADAN PANGAN NASIONAL	690728	DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO	Rp 2.647.199.000	Rp 2.635.924.544	99,57%	Rp -
	TOTAL			Rp23.494.035.000	Rp22.241.271.142	96,18%	Rp822.697.000

A. Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo

4.2.2 Instansi/Lembaga Pemberi Dekonsentrasi

Instansi/Lembaga pemberi Dana Dekonsentrasi adalah Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yang ditetapkan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA 010.04.3.319061/2024 Tahun 2023 Tanggal 24 November 2023.

4.2.3 Program Kegiatan

Satuan Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo pada awal tahun menerima angagran sebesar Rp. 1.051.906.000.- kemudian pada tanggal 01 februari 2024 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengirim surat penyampaian penyesuaian Cut Off Tahap pada Satker Setda untuk optimalisasi kegiatan dengan melakukan penyesuaian realokasi anggaran sebesar Rp. 74.654.000 yang akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan strategis lingkup Ditejn Bina Administrasi Kewilayahan. Jadi anggaran setelah penyesuaian menjadi sebesar Rp. 977.252.000.- seperti terlihat pada tabel 4 dibawah ini.



Tabel 4.11

Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi
 Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Gorontalo
 Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Tahun 2024	
			Keuangan (%)	Persentase (%)
1	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	977.252.000	976.490.000	99,92
	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah	977.252.000	976.490.000	99,92
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	977.252.000	976.490.000	99,92
	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah	977.252.000	976.490.000	99,92
	Penyelenggaraan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi	977.252.000	976.490.000	99,92
	- Susunan Pengelola Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada Satker Setda	149.618.000	149.606.837	99,99
	- Sekretariat Perangkat Daerah sebagai Wakil Pemerintah Pusat	290.890.000	290.516.323	99,87
	- Monitoring dan Evaluasi Kerjasama yang dilakukan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi	87.005.000	86.996.500	99,99
	- Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota	112.406.000	112.399.620	99,99
	- Koordinasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antar Daerah Kabupaten/Kota diwilayahnya (melalui Peningkatan Daya Saing Wilayah Berbasis Kawasan dan Strategis Nasional)	91.205.000	91.191.415	99,99
	- Menerima Pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Umum untuk diteruskan kepada Menteri	62.532.000	62.325.250	99,67
	- Pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota	32.400.000	32.300.000	99,69
	- Evaluasi Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	86.772.000	86.757.675	99,98
	- Evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	64.424.000	64.396.380	99,96

B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo
(Kementerian Investasi dan Kementerian Dalam Negeri RI)

1. Instansi / Lembaga Pemberi Dekonsentrasi

- Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
- Dirjen Bina ADWIL Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

2. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya

Tabel 4.12

Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi
 Satker Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo
 (Kementerian Investasi Hilirisasi/BKPM RI)
 Tahun Anggaran 2024

No.	Program / Kegiatan	Realisasi Tahun 2024		
		Pagu (Rp)	Keuangan (Rp)	Persen %
1.	Program Penanaman Modal	230.369.000	229.121.879	99,46
	- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	230.369.000	229.121.879	99,46



Program Penanaman modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.230.369.000,- telah terealisasi sebesar Rp.229.121.879,- atau 99,46% dengan outcome program meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi dengan jumlah realisasi invetasi tahun 2024 sebesar Rp.3.563 T dan jumlah perusahaan yang dipantau/diawasi adalah sejumlah 26 perusahaan.-

Tabel 4.13
Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi
Satker Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo
(Kementerian Dalam Negeri RI)
Tahun Anggaran 2024

No.	Program / Kegiatan	Realisasi Tahun 2024		
		Pagu (Rp)	Keuangan (Rp)	Persentase %
1.	Program Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	82.427.000	82.412.080	99,98
	- Kegiatan Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	82.427.000	82.412.080	99,98

Program Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.82.427.000,- telah terealisasi sebesar Rp.82.412.080,- atau 99,98% dengan outcome program meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.

3. Permasalahan dan Solusi

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan realisasi investasi:
 - Masih banyak pelaku usaha yang terlambat dan tidak menyampaikan LKPMnya dan sebagian pula yang menyampaikan tapi nilai realisasi investasinya NIHIL;
 - Contact Person sebagian pelaku usaha yang terdaftar dalam Sistem OSS RBA tidak dapat dihubungi;
 - Masih ada pelaku usaha yang ditemui memiliki banyak KBLI namun tidak melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan KBLI yang dimilikinya, sehingga mempengaruhi terhadap capaian realisasi investasi;
 - Terdapat ketakutan di kalangan pelaku usaha terkait hubungan antara pajak dan laporan nilai investasi yang telah direalisasikan;
- b. Solusi yang diharapkan:
 - Sosialisasi/Workshop/Bimbingan Teknis Tata Cara Penyampaian LKPM Online bagi investor baru;
 - Bimibingan Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Bimbingan Teknis Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



C. Bappeda (Kementerian Dalam Negeri RI dan Bappenas)

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Sasaran/fokus dekonsentrasi penguatan sinergi pusat dan daerah oleh Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut :

a. Fasilitasi Penguatan Perencanaan Daerah dalam Koridor Prioritas Nasional

Dalam rangka Penguatan Perencanaan Daerah dalam Koridor Prioritas Nasional, kegiatan yang akan dilaksanakan di Provinsi Gorontalo untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Penyelarasan indikator makro dan program (indikator dan target) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 serta RKP dengan RKPD;
- Sinkronisasi daftar data dan/atau Rencana Aksi Satu Data Indonesia
- Pengisian Aplikasi KRISNA – SELARAS, Aplikasi KRISNA DAK, pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional, dan strategi pengembangan wilayah dalam rangka mendukung penyiapan bahan Rakorgub, Rakortek, dan Musrenbang
- Penyusunan/Evaluasi RKPD dalam rangka mendukung keselarasan dengan prioritas nasional
- Penyusunan/Evaluasi RPJMD, Renstra dan Renja OPD Propinsi/Kabupaten/ Kota dalam rangka mendukung keselarasan dan pencapaian prioritas nasional

b. Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi

- Keikutsertaan dalam Rakor Perencanaan dan Evaluasi Dekonsentrasi.
- Penyusunan Laporan
- Administrasi

2. Kementerian Dalam Negeri

a. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya

- Program : Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa
- Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah.

Klasifikasi rincian output : Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Rincian output : Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik.



Tabel 4.14
Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi
BAPPPEDA Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2024

No	Program / Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi Tahun 2024		Keterangan
			Keuangan (Rp.)	(%)	
1.	Program: Perencanaan Pembangunan Nasional	982.511.000	966.535.447	98,37%	Kementerian PPN/Bappenas
	Kegiatan : Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	982.511.000	966.535.447	98,37%	
2.	Program: Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	135.697.000	135.670.109	99,98%	Kementerian Dalam Negeri RI
	Kegiatan : Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	135.697.000	135.670.109	99,98%	
Jumlah		1.118.208.000	1.102.205.556	98,57%	

D. Inspektorat Provinsi (Kementerian Dalam Negeri RI)

1. Instansi/Lembaga Pemberi Tugas Pembantuan
- a. SP DIPA-010.04.3.484188/2024 Tanggal 30 November 2022
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemenetrian Dalam Negeri
2. Program Kegiatan
- Program : Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa
- Kegiatan : Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah

Tabel 4.15
Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	Realisasi Tahun 2024		
		Pagu (Rp)	Keuangan (%)	Persentase (%)
1.	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	56.211.000	56.155.000	99.90
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah	56.211.000	56.155.000	99.90
Total Pagu Program		56.211.000	56.155.000	99.90

E. Dinas Pertanian (Kementerian Pertanian)

1. Instansi / LembagaPemberiDekonsentrasi (Diuraikan)
- Dinas Pertanian tahun 2024 mendapat anggaran dari Kementrian Pertanian melalui Dekosentrasi melalui Ditjen Tanaman Pangan (DK-03), Ditjen Hortikultura (DK-04), Ditjen Prasarana dan Sarana Pdertanian (DK-08), Ditjen Perkebunan (DK 05) dan BPPSDM (TP-06) yang ditetapkan melalui :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA 018.03.3.319055/2024
- Surat Pengesahan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA 018.04.3.319002/2024



- Surat Pengesahan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA 018.08.3.319004/2024
- Surat Pengesahan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA 018.05.3.319057/2024
- Surat Pengesahan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA 018.10.3.403455/2024

2. Program Kegiatan

Tabel 4.16
 Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekosentrasi (DK)
 Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo
 Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Realisasi Tahun 2024		
		Pagu (Rp)	Keuangan (Rp.)	Persentase (%)
1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.636.420.000	1.633.140.000	99,80
	- Keg. Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	387.940.000	387.570.000	99,90
	- Keg. Pengelolaan Perlindungan Tanaman Pangan	1.248.480.000	1.245.570.000	99,77
2.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	310.230.000	310.230.000	100,00
	- Keg. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	194.730.000	194.730.000	100,00
	- Keg. Penguatan Perlindungan Perkebunan	115.500.000	115.500.000	100,00
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.795.324.000	2.776.123.880	99,31
	- Keg. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian	2.795.324.000	2.776.123.880	99,31
4.	Program Dukungan Manajemen	902.695.000	902.272.900	99,95
	- Keg. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	47.700.000	47.700.000	100,00
	- Keg. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	189.395.000	189.062.900	99,82
	- Keg. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Perkebunan	590.600.000	590.510.000	99,98
	- Keg. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	75.000.000	75.000.000	100,00

1) **Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**

- **Kegiatan Pengelolaan Sistem perbenihan Tanaman Pangan**
Output : Terlaksananya 1 kegiatan sertifikasi benih
- **Kegiatan Pengelelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian**
Output : bimtek monitoring dan evaluasi lingkup irigasim pertanian 1 kegiatan

2) **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri**

- Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
Output : 5 Layanan Data dan Informasi Publik (PIP) dan Pelatihan SL GAP untuk 4 poktan
- Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan
Output : Terlaksanax kegiatan perbanyakkan dan penyebaran APh bagi petani 1 lokasi



3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian
Output : Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah daerah berupa dukungan manajemen Penyelenggaraan Penyuluhan Provinsi; Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat berupa Fasilitasi Biaya Operasional PNS, PPPK dan Honorarium THLTB-PP; Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat berupa Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian melalui Sekolah Lapang (SL)

4) Program Dukungan Manajemen

- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
Output
- Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura
Output
- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
Output : Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebanyak 1 Dokumen yang terdiri dari Perencanaan Pembangunan Perkebunan, Pengelolaan Data dan Informasi Statistik Pembangunan Perkebunan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Administrasi Kegiatan, Pemantapan Sistem Akuntansi dan Verifikasi, Pengendalian Percepatan Pengembalian Pinjaman Petani Eks. Proyek UPP.
- Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Output : layananan manajemen keuangan 1 dokumen

F. Dinas Kesehatan (Kementerian Kesehatan)

1. Instansi / Lembaga Pemberi Dekonsentrasi.
 Provinsi Gorontalo memperoleh Dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2 Tahun 2024. Permenkes ini ditetapkan pada 24 Januari 2024 dan berlaku pada 29 Januari 2024.
2. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya.
 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Melaksanakan Sebagian Tugas Kementerian Kesehatan Berkontribusi terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional, kegiatan Bersumber Dana Dekonsentrasi atau sumber lain yang ditetapkan.
 Untuk mendukung kebijakan Kementerian Kesehatan dan dekonsentrasi digunakan untuk mendukung transformasi layanan kesehatan.



Tabel 4.17
Rincian Pagu Dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2024		
		Pagu	Realisasi	%
		(Rp)	(Rp)	
1	Program Kesehatan Masyarakat	1,722,481,000	1,598,964,351	92.83
1.1	Kegiatan Penguatan Kesehatan Masyarakat di Provinsi	1,722,481,000	1,598,964,351	92.83
2	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	1,009,540,000	942,329,621	93.34
2.1	Kegiatan Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provinsi	1,009,540,000	942,329,621	93.34
3	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	867,993,000	774,392,040	89.22
3.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan di Provinsi	867,993,000	774,392,040	89.22
4	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1,560,467,000	1,545,790,020	99.06
4.1	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Provinsi	1,413,376,000	1,402,230,020	99.21
4.2	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji	22,825,000	19,820,000	86.83
4.3	Pengelolaan krisis Kesehatan	124,266,000	123,740,000	99.58
5	Program Dukungan Manajemen	1,007,431,000	946,837,865	93.99
5.1	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN	273,785,000	242,866,220	88.71
5.2	Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan	224,000,000	218,451,960	97.52
5.3	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	509,646,000	485,519,685	95.27
	Total Pagu	6,167,912,000	5,808,313,897	94.17

3. Permasalahan dan Solusi.

Secara garis besar Kegiatan APBN tidak ada masalah yang berarti karena untuk kegiatnnya menyesuaikan Juknis dari Kementerian Kesehatan

G. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kementerian Ketenagakerjaan)

1. Instansi/Lembaga Pemberi Dekonsentrasi

1. Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI
2. Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI
3. Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI
4. Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI



2. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya.

Tabel 4.18
Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi
Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

No.	Program / Kegiatan	Realisasi Tahun 2024		
		Pagu (Rp.)	Keuangan (Rp.)	Persentase %
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2.157.690.000	2.157.682.620	100%
	- Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	154.570.000	154.570.000	100%
	- Kegiatan Pengembangan dan peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas	440.670.000	440.669.000	100%
	- Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	1.562.450.000	1.562.443.620	100%
2.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Penempatan Tenaga Kerja)	318.021.000	317.627.112	99,88%
	- Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	88.434.000	88.133.632	99,66%
	- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja	141.989.000	141.922.000	99,95%
	- Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	87.598.000	87.571.480	99,97%
3.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Pengawasan Ketenagakerjaan)	308.608.000	308.547.100	99,98%
	- Kegiatan Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan	143.738.000	143.692.000	99,97%
	- Kegiatan Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	83.270.000	83.255.100	99,98%
	- Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	81.600.000	81.600.000	100%
4.	Program Pembinaan Ketenagakerjaan (Hubungan Industrial)	235.650.000	235.642.000	100%
	- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial	82.000.000	81.992.000	99,99%
	- Kegiatan Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan	11.650.000	11.650.000	100%
	- Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	142.000.000	142.000.000	100%
JUMLAH		3.019.969.000	3.019.498.832	99,98%

1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Mendapatkan alokasi Anggaran sebesar Rp 2.157.690.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.157.682.620,- atau 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
- Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.570.000,- telah terealisasi Rp 154.570.000,- atau 100%

Output untuk kegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi sebanyak 5 Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas

- b. Kegiatan Pengembangan dan peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Binalavotas
Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 440.670.000,- telah terealisasi Rp 440.669.000,- atau 100%

Output untuk kegiatan ini adalah

- Bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas sebanyak 10 UMKM
- Penghargaan Sidakarya kepada 6 Perusahaan yang unggul dan 3 perusahaan yang berkembang
- 2 (dua) paket Pelatihan peningkatan produktivitas dengan total peserta sebanyak 50 Orang dari 10 UMKM

- c. Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas
Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.562.450.000,- telah terealisasi Rp 1.562.443.620,- atau 100%

Output untuk kegiatan ini adalah 173 Peserta yang Mengikuti Pemagangan Dalam Negeri pada 21 Perusahaan.

2) Program Pembinaan Ketenagakerjaan

Program Pembinaan Ketenagakerjaan (*Penempatan Tenaga Kerja*) mendapatkan alokasi Anggaran sebesar Rp. 318.021.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 317.627.112,- atau 99,88% dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.434.000,- telah terealisasi Rp. 88.133.632,- atau 99,66%

Output untuk kegiatan ini adalah Tenaga Kerja yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan penempatan tenaga kerja melalui Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri yang diikuti 75 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 75 orang.

- b. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja
Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 141.989.000,- telah terealisasi Rp. 141.922.000,- atau 99,95%

Output untuk kegiatan ini adalah :

- Bimtek Petugas Antar Kerja yang diikuti 30 orang.
- 1 (satu) Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi hasil Bimtek.

3) Program Pembinaan Ketenagakerjaan

Program Pembinaan Ketenagakerjaan (*Pengawasan Ketenagakerjaan*) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 308.608.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 308.547.100,- atau 99,98% dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran Rp. 143.738.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 143.692.000,- atau 99,97%

output kegiatan :

- Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan
- Pemeriksaan dan Penanganan Kasus Norma Ketenagakerjaan dan K3
- FGD Penerapan Norma 100 di Perusahaan

b. Kegiatan Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran Rp. 83.270.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 83.255.100,- atau 99,98%

output kegiatan :

- Penyusunan Rencana Kerja unit Pengawasan
- Penilaian Indeks kinerja Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3

4) Program Pembinaan Ketenagakerjaan

Program Pembinaan Ketenagakerjaan (*Hubungan Industrial*) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 235.650.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 235.642.000,- atau 100% dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial

Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran Rp. 82.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 81.992.000,- atau 99,99%

output kegiatan :

- Tersedianya data HI dan Jamsos

b. Kegiatan Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan

Kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran Rp.11.650.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 11.650.000,- atau 100%

output kegiatan :

- Laporan Data Pengaduan dan Konsultasi terkait Pembayaran THR Keagamaan di Perusahaan

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Keterlambatan juknis dari Kementerian Ketenagakerjaan RI dan proses penerbitan SK KPA oleh Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan
- Adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan pemagangan karena adanya peraturan baru terkait Perusahaan yang menjadi Lokasi pemagangan harus terdaftar dalam aplikasi Siap Kerja (Ayo Magang Vokasi) dan WLKP Online
- Terbatasnya perusahaan yang memiliki Lembaga Pelatihan sendiri

Solusi

- Lebih intens berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo
- Sosialisasi ke Perusahaan terkait pembentukan Lembaga Pelatihan dan peraturan baru tersebut serta dibantu dalam pembuatan akun dan pendaftaran di aplikasi Siap Kerja (Ayo Magang Vokasi) dan WLKP Online.



H. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)

1. Instansi/Lembaga Pemberi Tugas
- Alokasi anggaran Dekonsentrasi dari Kementerian Perdagangan, terdiri atas :
- a. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-090.03.3.319024/2024 tanggal 24 November 2024.

b. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Negeri, melalui SK DIPA :
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Nomor:SP DIPA-090.02.3.319059/2024.
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Nomor:SP DIPA-090.02.3.319103/2024
2. Program dan Kegiatan
- Dalam Pelaksanaan dekonsentrasi Tahun 2024 program peningkatan perdagangan luar negeri Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mendapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp. 84.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 79.252.327,- atau 93,29%. Dan silva sebesar Rp. 5.697.673,-.

Tabel 4.19

Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi
Di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Capaian Tahun 2024				Keterangan
		Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir 2024	Realisasi Keuangan	%	
I	Program Perdagangan Luar Negeri	84.950.000	84.950.000	79.252.327	93.29	Dirjen Perdagangan Luar Negeri
	- Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri	26.870.000	26.870.000	26.868.000	99,99	
	- Dukungan Manajemen & dukungan teknis lainnya Ditjen Perdagangan Luar Negeri	58.080.000	58.080.000	52.384.327	90.19	
2	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	110.870.000	110.870.000	105.313.352	94,99	Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
	- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Harga Komoditi di Pasar Rakyat	44.765.000	44.765.000	44.765.000	100	
	- Dukungan Layanan Administrasi Satker	66.105.000	66.105.000	60.548.352	91,59	

- 1) Program peningkatan perdagangan luar negeri ini didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Partisipasi pada rapat peningkatan ekspor dan koordinasi bidang perdagangan luar negeri di Kementrian Perdagangan RI

Tujuan :

- Menyelaraskan program/kegiatan perdagangan luar negeri, Pengembangan ekspor dan hasil perundingan perdagangan internasional antara pusat dan daerah
- Menyusun program dan kegiatan di bidang perdagangan luar negeri ke dalam alokasi anggaran dan dekonsentrasi

output:

- Laporan dari hasil rapat kerja kementerian perdagangan
- Laporan hasil dari penyusunan RKA-K/L Dekonsentrasi bidang perdagangan luar negeri adalah draf kertas kerja RKA-K/L dana dekonsentrasi bidang perdagangan luar negeri.

- b) Dukungan Manajemen (ATK dan honor pengelola keuangan, perjalanan dinas koordinasi ke Kementrian Perdagangan RI)

Tujuan :

Memberikan dukungan operasional satuan kerja dekonsentrasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pelimpahan urusan di bidang perdagangan luar negeri kepada dinas provinsi yang membidangi perdagangan.

Output :

Terlaksananya layanan operasional perkantoran Dana Dekonsentrasi selama 1 (satu) tahun untuk mendukung kinerja satuan kinerja.

2) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

- a) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Harga Komoditi di Pasar Rakyat
Pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Harga Komoditi di Pasar Rakyat bertujuan untuk :

- memastikan kepatuhan dinas yang membidangi perdagangan kabupaten/kota dalam memantau dan melaporkan perkembangan harga Komoditi di Pasar Rakyat pada sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok (SP2KP) secara harian sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pemantauan
- memberikan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas pemantau harga di kabupaten/kota agar dapat melaksanakan pemantauan dan pelaporan sesuai petunjuk pelaksanaan dalam rangka meningkatkan kualitas data harga Komoditi di Pasar Rakyat pada sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok (SP2KP).

Adapun sasaran dari kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Harga Komoditi di Pasar Rakyat tersebut yaitu tersedianya data harga harian barang kebutuhan pokok yang terkini, akurat dan berkelanjutan dari seluruh kabupaten/kota di tingkat Provinsi.

Lingkup kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Komoditi di Pasar Rakyat meliputi:

- Monitoring pelaksanaan pemantauan dan pelaporan harga oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan;
- Supervisi langsung di pasar pantauan kabupaten/kota guna memastikan pemantauan telah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan; dan

- Pelatihan dan pendampingan petugas pemantau harga Komoditi di Pasar Rakyat dari dinas kabupaten/kota.

Pada kegiatan ini pagu anggaran kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemantauan Harga Komoditi di Pasar Rakyat yaitu Rp. 44.765.000,- , dengan pencapaian realisasi sebesar Rp. 44.765.000,- atau 100%

b) Dukungan Layanan Administrasi Satker

Layanan dukungan Satker dimaksudkan agar terlaksananya layanan berupa kebutuhan perkantoran sehari-hari selama 1 (satu) tahun, seperti pengadaan ATK dan Komputer Suplies, Penggandaan Surat dan Dokumen, honorarium serta perjalanan dinas koordinasi/konsultasi.

Pada kegiatan ini terdapat ketentuan dalam regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024, dimana untuk besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, hanya dapat diberikan/dibayarkan sebesar 60%(enam puluh persen) dari besaran Honorarium yang tersedia/tercantum dalam RKA-KL, sehingga untuk sisa 40% (empat puluh persen) harus dikembalikan ke negara, dan hal itu yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak dapat terealisasi seutuhnya.

Pada kegiatan ini pagu anggaran sebesar Rp. 66.105.000,- dengan realisasi senilai Rp. 60.548.352,- atau 91.59%.

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Dekonsentrasi Program Perdagangan Luar Negeri Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

- a. Tidak adanya dukungan anggaran promosi pada kegiatan Promosi dan pengembangan Produk ekspor daerah yang merupakan target dalam renstra
- b. Kurangnya fasilitas ekspedisi/container sehingga cost yang dikeluarkan dalam melakukan pengiriman barang sangat tinggi.
- c. Tidak adanya dukungan anggaran pada kegiatan pembinaan UKM/IKM/Pelaku Usaha yang Memahami Prosedur Ekspor yang merupakan target dalam renstra.

Solusi

Solusi/tindak lanjut yang perlu dilakukan :

- a. mengupayakan kerjasama baik dengan direktorat perdagangan luar negeri untuk bisa mempertemukan eksportir walau hanya dalam virtual dalam hal membuka peluang ekspor. Harapan kedepan adalah dukungan anggaran pada kegiatan promosi dan Pengembangan Produk ekspor daerah yang berdasarkan kebutuhan belanja untuk pencapaian target promosi komoditi unggulan Provinsi Gorontalo
- b. Adanya koordinasi dengan instansi terkait serta pengusaha dibidang ekspedisi untuk mendapatkan kesepakatan bersama sehingga masalah ini bisa teratasi.

- c. Kegiatan pembinaan UKM/IKM/Pelaku usaha perlu anggaran yang bisa membuka peluang pada UKM sebagai calon eksportir di Provinsi Gorontalo tapi kondisi ini disiasati dengan menghubungi para calon eksportir dan bersedia melaksanakan ekspor. Harapan kedepan adalah dukungan anggaran pada kegiatan promosi dan Pengembangan Produk ekspor daerah yang berdasarkan kebutuhan belanja untuk pencapaian target jumlah UKM yang memahami Prosedur ekspor.

I. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

1. Instansi / Lembaga Pemberi Tugas

Instansi / Lembaga Pemberi Tugas adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ditetapkan melalui SK DIPA sebagai berikut :

- Dipa Petikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Nomor : SP Dipa-057.01.3.310067/2024 tanggal 24 November 2023
- SK Gubernur Gorontalo Nomor 6/25/I/2024 tanggal 03 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024

2. Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya

Program Perpustakaan dan Literasi

Kegiatan :

- Pembinaan Administrasi Keuangan
Kegiatan ini berupa pemberian honor kepada penanggung jawab dan pengelola keuangan, Administrasi, Pengiriman, Pelaporan dan surat menyurat
- Pendataan Bidang Perpustakaan
Melakukan pendataan perpustakaan, tenga perpustakaan, jumlah pemustaka, dll data perpustakaan lainnya.
- Workshop Akreditasi Perpustakaan
Workshop Akreditasi Perpustakaan dengan menghadirkan perpustakaan-perpustakaan yang akan dilakukan akreditasi, sehingga siap dan layak untuk dilakukan akreditasi
- Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA dan Lomba Bertutur Tingkat SD
Lomba Perpustakaan SMA/SMK/MA dengan hasil sebagai berikut :
 1. Juara I Perpustakaan Ibnu Rusyd MAN 1 Kabupaten Gorontalo
 2. Juara II Perpustakaan SMKN Pulubala SMK Negeri 1 Pulubala
 3. Juara III Perpustakaan Pustaka Jaya Inspiratif SMA Negeri 1 Telaga

Lomba Bertutur bagi Siswa Siswi SD/MI Tingkat Provinsi Gorontalo Tahun 2024

 1. Juara I Nanyara A.C.M Nuna SDIT Lukmanul Hakim Kabupaten Gorontalo
 2. Juara II Aisyah Lathifah Danial SDIT Az-Zahra Kota Gorontalo
 3. Juara III Aprilia KH. Harun SDN No.13 Kabila Kabupaten Bone Bolango



Tabel 4.20
Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Dana Dekonsentrasi
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo
Tahun 2024

No	Program / Kegiatan	Realisasi Tahun 2024		
		Pagu	Keuangan	Persentase
1.	Program Perpustakaan dan Literasi			
	Keg. Pembinaan Administrasi Keuangan	58.084.000	57.431.969	98,88
	Keg. Pendataan Bidang Perpustakaan	47.631.000	47.625.184	99,98
	Keg. Workshop Akreditasi Perpustakaan	47.975.000	47.95.000	100
	Keg. Lomba Perpustakaan SMA/MA/ dan Lomba Bertutur Tingkat SD	108.953.000	108.948.098	99,99
Total Pagu Program		262.643.000	261.980.251	99,75

4. Permasalahan dan Solusi
- Kurangya perhatian Kab/Kota dalam hal pendataan perpustakaan di daerahnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan melalui dana dekonsentrasi akan melakukan kerjasama dengan Kab/Kota dalam hal pendataan perpustakaan dengan menunjuk satu orang penanggung jawab data yang akan melaporkan secara berkala ke Provinsi dan diberikan honorarium.
 - Kurangnya jumlah peserta lomba perpustakaan, disebabkan prasyarat perpustakaan yang dapat mengikuti lomba tersebut merupakan perpustakaan yang ber SNP (Standar Nasional Perpustakaan) ataupun telah dilakukan akreditasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan pembinaan dan pendampingan secara intens kepada perpustakaan yang belum terakreditasi.

J. Dinas Pemuda dan Olahraga (Kementerian Pemuda dan Olahraga)

1. Instansi Pemberi Dekonsentrasi

Provinsi Gorontalo memperoleh alokasi Dekonsentrasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang disahkan melalui DIPA Petikan Satker Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo (310052) NOMOR : SP DIPA- 092.01.3.310052/2024, Tanggal 21 Maret 2024 Kode Digital Stamp : 6433-5782-3008-1195.

2. Program dan Kegiatan

Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2024 mendapat anggaran dari Kementrian Pemuda dan Olahraga (DK-01)



Tabel 4.21
Perangkat Daerah yang melaksanakan dana
Dekonsentrasi di Provinsi Gorontalo Tahun 2024

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU (Rp)	REALISASI	
			Rp.	%
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	1,312,200,000	1,311,958,650	99,98

Tabel 4.22
Tabel Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan pendanaan Dekonsentrasi
Di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	
			Rp.	%
1	Program Keolahragaan	1.312.200.000	1.311.958.650	99,98
	- Pengelolaan Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi	1.312.200.000	1.311.958.650	99,97
	- Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1.312.200.000	1.311.958.650	99,97
	- Pengelolaan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di daerah	1.117.790.000	1.117.710.000	99,99
	A Pembinaan SKO	1.006.850.000	1.006.850.000	100,00
	Belanja Barang Operasional Lainnya	55.800.000	55.800.000	100,00
	- Belanja Bahan	536.846.000	536.846.000	100,00
	- Belanja Jasa Profesi	370.000.000	370.000.000	100,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.204.000	44.204.000	100,00
	B Tes Pengukuran Fisik PPLP	11.100.000	11.100.000	100,00
	- Belanja Bahan	3.900.000	3.900.000	100,00
	- Belanja Jasa Profesi	4.800.000	4.800.000	100,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.400.000	2.400.000	100,00
	C Operasional Satker	99.840.000	99.760.000	99,92
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	87.840.000	87.840.000	100,00
	Belanja Bahan	11.920.000	11.920.000	99,33
	D Pengiriman Atlet pada Kejuaraan Nasional antar Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi	194.410.000	194.248.650	99,92
	- Kejurnas	82.500.000	82.445.800	99,93
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.500.000	82.445.800	99,93
	- Kejurnas	41.250.000	41.160.800	99,78
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.250.000	41.160.800	99,78
	- Kejurnas	19.910.000	19.892.050	99,91
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.910.000	19.892.050	99,91
	- Kejurnas	50.750.000	50.750.000	100,00
	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.750.000	50.750.000	100,00

1. Program Keolahragaan

Program Keolahragaan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **1,312,200,000,-** dan telah terealisasi sebesar Rp. **1,311,958,650** atau **99.98%**. Adapun Outcome Program Keolahragaan adalah Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga, Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Peserta PPLP yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan, Pemberian Dana Dekonsentrasi PPLP.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

a. Seleksi, Pembinaan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Sentra Keolahragaan Daerah (Dekonsentrasi).

- Pembinaan SKO mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,006,850,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1,006,850,000 atau 99.98%.
- Tes Pengukuran Fisik PPLP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.100.000 atau 100.00%.
- Operasional Satker mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.840.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.760.000 atau 99,92%.
- Pengiriman Atlet pada Kejuaraan Nasional antar Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 194.410.000,- dengan realisasi sebesar Rp.194.248.650 atau 99,92%.

3. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Dengan adanya Pergatian Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo yang terjadi diakhir Tahun (Bulan Desember) 2024, sehingga agak berpengaruh pada Pengelolaan Administrasi, namun dalam pelaksanaan seluruh kegiatan telah terlaksana dengan baik, dan bahkan anggaran dapat terealisasi sampai 99,98%.

2. Solusi melakukan Koordinasi dan Konsultasi lebih intensif dengan DJPB Gorontalo.

K. Dinas Ketahanan Pangan (Badan Pangan Nasional)

1. Instansi/Lembaga Pemberi Dekonsentrasi

Tahun 2024 alokasi Dekonsentrasi Dinas Ketahanan Pangan bersumber dari Badan Ketahanan Pangan Nasional, yang ditetapkan melalui :

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-125.01.3.690728/2023 Tanggal 30 Desember 2023;

2. Program dan Kegiatan yang diterima

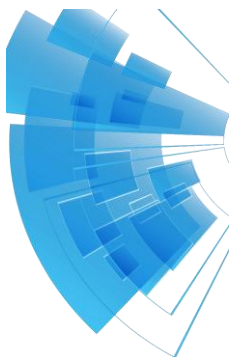
- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dengan kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan output Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan sebanyak 6 rekomendasi.



- Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan output Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan sebanyak 6 rekomendasi
 - Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan sebanyak 70 produk
- b. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan yaitu :
- Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya dengan outputnya adalah Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen

Tabel 4.23
Rincian Pagu dan Realisasi Keuangan Pendanaan Dekonsentrasi
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

No.	Uraian	REALISASI		KET.
		FISIK	KEUANGAN	
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				
1.	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100	2.449.008.244	
2	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100	1.098.433.320	
3	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	100	359.208.099	
4	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	100	991.366.825	
Program Dukungan Manajemen				
5	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	100	186.916.300	
	TOTAL	100	2.635.924.544	



Bab V

Penutup

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang disusun sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi : (a) hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, dan (b) hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

LKPJ Gubernur Gorontalo Tahun 2024 menjabarkan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam RKPD Provinsi Gorontalo maupun APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2024. Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 dengan Tema "Peningkatan Produktivitas Ekonomi yang berwawasan lingkungan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Infrastruktur Dasar dan Strategis, serta Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Daerah" merupakan bagian dari implementasi dan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 yang merupakan periodisasi transisi kepala daerah.

Tahun 2024, kinerja pembangunan Provinsi Gorontalo cukup baik yang ditandai dengan capaian beberapa indikator yang meningkat positif dibanding tahun sebelumnya, diantaranya :

1. Penurunan tingkat kemiskinan hingga mencapai 13,87 % atau turun 0,7% poin dibanding tahun 2023 sebesar 14,57%.
2. Indeks gini yang menggambarkan kesenjangan atau ketimpangan pendapatan masyarakat turun dari 0,417 tahun 2023 menjadi 0,413 tahun 2024.
3. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo tahun 2024 mencapai 72,01 atau meningkat sebesar 1,07 persen dibandingkan tahun 2023, yang didukung oleh perbaikan diseluruh indikator pembentuknya yaitu Umur Harapan Hidup meningkat 0,23% menjadi 70,73 tahun 2024, Harapan Lama Sekolah meningkat 0,01 tahun (0,08%) menjadi 13,17 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,19 tahun menjadi 8,29 tahun pada tahun 2024, serta indikator ekonomi yaitu pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan mencapai 11.539 Ribu Rupiah pada tahun 2024 atau mengalami peningkatan 470 Ribu Rupiah.

4. Inflasi cukup stabil berada pada range target 2-3%, yaitu dengan capaian rata-rata inflasi bulanan sebesar 2,87.
5. Indikator kinerja lainnya ditunjukkan dengan pertumbuhan ekspor sebesar 31,95% dengan total ekspor mencapai 52.967.332,45 US\$ tahun 2024, nilai investasi tahun 2024 meningkat mencapai 5,383 Triliun Rupiah.

Berbanding terbalik dengan kemiskinan dan IPM, Capaian yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu :

6. Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami kenaikan menjadi 3,13 % tahun 2024, sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 sebesar 3,06%.
7. Ekonomi tumbuh 4,13 %, mengalami sedikit pelambatan dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 sebesar 4,50%.

Selain itu kinerja pembangunan tidak lepas dari penyelenggaraan pemerintahan, perbaikan kinerja pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang adaptif, akuntabel dan responsif. Beberapa hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan juga menunjukkan kinerja yang cukup baik dan progresif, diantaranya capaian Reformasi Birokrasi dengan Kategori BB, SAKIP naik sebesar 68,88 (B), Nilai MCP KPK mencapai 81.7, Indeks Kualitas Perencanaan sebesar 84,36 dengan kategori Baik, Indeks Sistem Merit sebesar 327 atau Sangat Baik, Nilai Maturitas SPBE mencapai 4,13 dengan kategori Sangat Baik. Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo juga mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih kategori A sebagai Zona Hijau kualitas tertinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan tahun 2024 yang dilakukan oleh Ombudsman Gorontalo, Provinsi Gorontalo memperoleh nilai 90,41. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik yang prima.

Tahun 2024 realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun 2024 mencapai 1,93 Triliun Rupiah. meningkat 3,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 1,86 Trilyun Rupiah. dengan Silpa sebesar 135.909.425.415,94 atau 6,54 % dari Total APBD. Meskipun demikian tahun 2024, Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi Gorontalo masih dalam kategori Rendah atau sebesar 1,421 indeks.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh pihak maupun masyarakat yang telah bersama-sama dalam mengawal penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, dan terutama saat penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk menjaga situasi dan kondusifitas sehingga penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan damai.

Selain itu tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Gorontalo di Tahun 2024 cukup berat, kejadian bencana banjir, tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo memberikan dampak yang sangat besar bagi kondisi ekonomi, sosial maupun lingkungan di wilayah Provinsi Gorontalo. berkat dukungan dan upaya dari semua pihak, dapat kembali stabil.

Disamping keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Olehnya melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk dapat memberikan saran, kritik, dan masukan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimasa yang akan datang.

Demikian LKPJ Provinsi Gorontalo ini disampaikan, diiringi harapan semoga di periode mendatang keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo dalam menjadikan Gorontalo sebagai Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan sebagai bagian dari Perwujudan Indonesia Emas 2045. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua.